



RPD

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
TAHUN 2023 - 2026

KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT

**KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
TAHUN 2023 - 2026**

RPD

SAKA MERE MURA



SALINAN

BUPATI SERAM BAGIAN BARAT

PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN BARAT

NOMOR 3.a TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT TAHUN 2023-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERAM BAGIAN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Tahun 2022, Bupati/Walikota yang masa jabatannya berakhir Tahun 2022 menyusun Dokumen Perencanaan Daerah 2023-2026;
- b. bahwa Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, akan digunakan oleh Penjabat Kepala Daerah sebagai pedoman untuk Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2023-2026.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2003, tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4350);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 03 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2014 Nomor 132, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 0134).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT TAHUN 2023-2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Seram Bagian Barat.
2. Kepala Daerah adalah Bupati Seram Bagian Barat.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
8. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
9. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
10. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
11. Kecamatan adalah bagian dari wilayah Daerah Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh camat.
12. Badan Perencanaan adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.
13. Pemangku Kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Daerah antara lain unsur DPRD provinsi dan kabupaten/kota, TNI, POLRI, Kejaksaan, akademisi, LSM/Ormas, tokoh masyarakat provinsi dan kabupaten/kota/desa, dunia usaha/investor, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten/kota, pemerintahan desa, dan keterwakilan perempuan (seperti PKK, Organisasi Kewanitaan) dan kelompok masyarakat rentan termarginalkan.
14. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan

dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

15. Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
16. Pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif.
17. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
18. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 4 (empat) tahun terhitung sejak Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2026.
19. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 4 (empat) tahun.
20. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
21. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
23. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

24. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
25. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
26. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
27. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
28. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
29. Rencana Kerja adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan.
30. Kerangka Pendanaan adalah analisis pengelolaan keuangan Daerah untuk menentukan sumber-sumber dana yang digunakan dalam pembangunan, optimalisasi penggunaan sumber dana dan peningkatan kualitas belanja dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dalam upaya mencapai visi dan misi Kepala Daerah serta target pembangunan nasional.
31. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.
32. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan.

33. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.
34. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
35. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
36. Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPD.
37. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
38. Program pembangunan Daerah adalah program strategis Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPD.
39. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
40. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
41. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).
42. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud.
43. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.

44. Dampak (*impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program.
45. Sistem Informasi Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SIPD adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pembangunan Daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 2

Maksud rencana pembangunan daerah adalah merupakan penjabaran tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, prioritas pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program pembangunan daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 4 (empat) tahun.

Pasal 3

Tujuan rencana pembangunan daerah menjadi pedoman untuk:

- a. Penyusunan RKPD, Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah, dan dokumen perencanaan pembangunan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Instrument pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
- c. Bagi pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

Pasal 4

- (1) RPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN;

BAB II GAMBARAN UMUM;

BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH;

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS;

BAB V TUJUAN DAN SASARAN;

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS;

BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH;

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH;

BAB IX PENUTUP.

- (2) Isi beserta uraian RPD Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI RPD

Pasal 5

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap RPD;
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengendalian terhadap:
 - a. kebijakan perencanaan pembangunan daerah; dan
 - b. pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi evaluasi terhadap:
 - a. kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
 - b. pelaksanaan rencana pembangunan daerah; dan
 - c. hasil rencana pembangunan daerah.
- (4) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) secara teknis dilakukan oleh Kepala Bappeda.

Pasal 6

Tata cara pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV

PERUBAHAN RPD

Pasal 7

- (1) Perubahan RPD Tahun 2023-2026 dapat dilakukan apabila:
 - a. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara asumsi perencanaan dengan kondisi eksisting;
 - b. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara target dan pencapaian kinerja sampai dengan tahun berjalan;
 - c. terjadi perubahan yang mendasar.

- (2) Perubahan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 dapat dilakukan tanpa melalui tahapan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan, dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat.

Ditetapkan di Piru

pada tanggal 7 Maret 2022

BUPATI SERAM BAGIAN BARAT,

ttd

TIMOTIUS AKERINA

Diundangkan di Piru

pada tanggal 8 Maret 2022

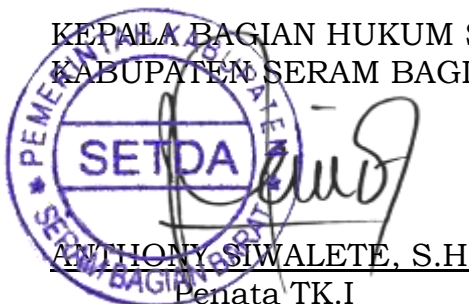
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT,

ttd

LEVERNE ALVIN TUASUUN

Salinan Sesuai Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT



ANTHONY SIWALETE, S.H
Penata TK.I

NIP.19800324 200801 1 015

BERITA DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT TAHUN 2022
NOMOR 0263.a

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI SERAM SERAM BAGIAN BARAT
NOMOR 3.a TAHUN 2022

TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN
TAHUN 2023-2026

I. UMUM

Pembangunan merupakan proses dinamis dan progresif untuk mencapai tujuan berupa peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing. Dalam rangka menjalankan pembangunan yang efektif dan mencapai tujuan pembangunan, maka diperlukan perencanaan yang sistematis. Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana didefinisikan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.

Menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang salah satu amanatnya adalah dilaksanakan pemilu kepada daerah serentak secara nasional pada Tahun 2024. Selanjutnya dijelaskan bahwa bagi daerah yang tidak memiliki kepala daerah dikarenakan masa jabatan berakhir pada Tahun 2022 atau Tahun 2023 dalam hal penyusunan dokumen perencanaan

pembangunan daerah tahunan, yang lebih lanjut akan menjadi pedoman penyusunan KUA-PPAS sebagai rangkaian penyusunan APBD, maka melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022, diinstruksikan untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah tahun 2023-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026.

RPD merupakan penjabaran tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 4 (empat) tahun yang disusun dengan berpedoman pada visi misi RPJPD Provinsi Maluku, analisis sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Provinsi Maluku Tahap Keempat dan isu strategis aktual, dengan memperhatikan penyelarasan target indikator makro dan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024, hasil evaluasi capaian indikator kinerja daerah RPJMD Kabupaten Seram Bagian Barat tahun 2017-2022, RPJMD Provinsi Maluku dan kebijakan nasional. RPD kemudian digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan perencanaan tahunan, perencanaan menengah Perangkat Daerah, serta instrumen pengendalian dan evaluasi pembangunan agar sesuai dengan target kinerja yang telah direncanakan.

RPD disusun dengan menggunakan pendekatan perencanaan berorientasi proses dan substansi. Pendekatan berorientasi proses berupa pendekatan teknokratik dan partisipatif. Sedangkan pendekatan berorientasi substansi yaitu tematik-holistik, integratif, dan spasial. Penggunaan seluruh pendekatan tersebut dalam rangka menghasilkan perencanaan yang komprehensif, sesuai kebutuhan daerah, sinergis dengan perencanaan Pusat dan Provinsi, serta memiliki legitimasi yang kuat sebagai pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

DAFTAR ISI

Daftar Isii

Daftar Tabel.....vi

Daftar Gambarxii

BAB I PENDAHULUAN1

1.1. Latar Belakang.....1

1.2. Dasar Hukum Penyusunan4

1.3. Maksud dan Tujuan8

1.3.1. Maksud8

1.3.2. Tujuan.....8

1.4. Hubungan Antar Dokumen.....8

1.4.1. Amanat RPJMN Tahun 2020-2024.....9

1.4.2. Amanat Perubahan RPJMD Provinsi Maluku
Tahun 2019-2024.....12

1.4.3. Amanat RPJMD Kabupaten Seram Bagian Barat
Tahun 2005-2025.....14

1.4.4. Rencana Tata Ruang (RTRW) Kabupaten.....19

1.5. Sistematika Penyusunan31

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH33

2.1. Aspek Geografi dan Demografi33

2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah33

2.1.1.1. Luas dan Batas Wilayah Administratif33

2.1.1.2. Letak Kondisi Geografis.....34

2.1.1.3. Topografi34

2.1.1.4. Kemiringan Lahan40

2.1.1.5. Hidrologi41

2.1.1.6. Batimetri46

2.1.1.7. Klimatologi.....47

2.1.1.8. Penggunaan Lahan.....49

2.1.1.9. Potensi Sumber Daya Alam.....51

2.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah54

2.1.3. Wilayah Rawan Bencana57

2.1.4. Demografi59

2.1.4.1. Penduduk Menurut Tenaga Kerja.....60

2.1.4.2. Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan.....62

2.1.4.3. Penduduk Menurut Tingkat Kesehatan62

2.1.4.4. Penduduk Menurut Tingkat Kesejahteraan63

2.1.4.5. Kepadatan Penduduk64

2.1.4.6. Pertumbuhan Penduduk	65
2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat	66
2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi	67
2.2.1.1. Pertumbuhan PDRB.....	67
2.2.1.2. PDRB Perkapita	70
2.2.1.3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	71
2.2.1.4. Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	72
2.2.1.5. Harapan Lama Sekolah (HLS).....	73
2.2.1.6. Usia Harapan Hidup (UHH)	74
2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial.....	75
2.2.2.1. Angka Kemiskinan	75
2.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga	79
2.2.3.1. Budaya	79
2.2.3.2. Olahraga.....	80
2.3. Aspek Pelayanan Umum	81
2.3.1. Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Wajib	82
2.3.1.1. Layanan Urusan Pemerintahan Wajib yang Terkait Pelayanan Dasar.....	82
2.3.1.2. Layanan Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Terkait Pelayanan Dasar	131
2.3.1.3. Urusan Pilihan	159
2.3.1.4. Unsur Penunjang, Pendukung, Pengawasan Urusan Pemerintahan, serta Unsur Kewilayahan	164
2.4. Aspek Daya Saing Daerah	175
2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah	175
2.4.1.1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga.....	175
2.4.1.2. Nilai Tukar Petani.....	177
2.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur	177
2.4.2.1. Perhubungan.....	177
2.4.2.2. Sarana Perekonomian	177
2.4.2.3. Jaringan Listrik	178
BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH	179
3.1. Kondisi Perekonomian Nasional	179
3.2. Kondisi Perekonomian Daerah.....	180
3.3. Kinerja Keuangan Masa Lalu	180
3.3.1 Kinerja Pelaksanaan APBD.....	181
3.3.1.1. Pendapatan	181
3.3.1.1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)	190
3.3.1.1.2. Pendapatan Transfer	191

3.3.1.1.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	192
3.3.1.2. Belanja Daerah	193
3.3.1.3. Pembiayaan Daerah	199
3.3.1.4. Kerangka Pendanaan	202
3.3.1.4.1. Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Seram Bagian Barat	202
BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS	207
4.1. Permasalahan Pembangunan Daerah.....	208
4.1.1. Layanan Urusan Pemerintahan Wajib Yang Terkait Pelayanan Dasar	208
4.1.1.1. Urusan Pendidikan.....	208
4.1.1.2. Urusan Kesehatan	210
4.1.1.3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.....	212
4.1.1.4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.....	213
4.1.1.5. Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.....	213
4.1.1.6. Sosial.....	215
4.1.2. Layanan Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Terkait Pelayanan Dasar	216
4.1.2.1. Tenaga Kerja.....	216
4.1.2.2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	216
4.1.2.3. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	218
4.1.2.4. Pangan	218
4.1.2.5. Lingkungan Hidup	219
4.1.2.6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	220
4.1.2.7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	221
4.1.2.8. Perhubungan.....	222
4.1.2.9. Komunikasi dan Informatika	222
4.1.2.10. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	223
4.1.2.11. Penanaman Modal.....	224
4.1.2.12. Kepemudaan dan Olahraga.....	225
4.1.2.13. Statistik.....	226
4.1.2.14. Persandian	226
4.1.2.15. Kebudayaan	227
4.1.2.16. Kearsipan	227
4.1.3. Urusan Pilihan	228
4.1.3.1. Pertanian	228

4.1.3.2.	Kelautan dan Perikanan.....	229
4.1.3.3.	Perindustrian	230
4.1.3.4.	Perdagangan.....	231
4.1.3.5.	Pariwisata.....	231
4.1.4.	Unsur Penunjan, Urusan Pemerintahan	232
4.1.4.1.	Perencanaan	232
4.1.4.2.	Keuangan	233
4.1.4.3.	Kepegawaian.....	234
4.1.4.4.	Penelitian dan Pengembangan.....	235
4.1.5.	Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan Pengawasan	235
4.1.5.1.	Inspektorat Daerah.....	235
4.1.6.	Urusan Pendukung Urusan Pemerintahan	236
4.1.6.1.	Sekretariat Daerah	236
4.1.6.2.	Sekretariat DPRD.....	237
4.1.7.	Urusan Kewilayahaan	238
4.1.7.1.	Kecamatan	238
4.1.8.	Urusan Pemerintahan Umum	239
4.1.8.1.	Kesatuan Bangsa dan Politik.....	239
4.2.	Isu Strategis.....	239
4.2.1.	Isu Internasional	240
4.2.1.1.	<i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs)	240
4.2.1.2.	Revolusi Industri 4.0.....	241
4.2.1.3.	Pandemi COVID-19	243
4.2.1.4.	Isu Nasional didalam RPJMN 2020-2024	244
4.2.1.5.	Isu Strategis Provinsi Maluku didalam RPJMD 2019-2024	254
4.2.2.	Telaah RTRW Kabupaten Seram Bagian Barat	260
4.2.3.	Penetapan Isu Strategis Kabupaten Seram Bagian Barat	270
BAB V TUJUAN DAN SASARAN		282
5.1.	Tujuan	283
5.2.	Sasaran.....	284
BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS.....		296
6.1.	Strategi dan Arah Kebijakan.....	296
6.2.	Arah Kebijakan Tahunan dan Prioritas Pembangunan	317
6.3.	Program Pembangunan Daerah	323
6.3.1.	Prioritas Pembangunan Daerah	323
6.3.2.	Program Pengentasan Kemiskinan Lintas Sektor Kabupaten Seram Bagian Barat	327
6.3.3.	Program Prioritas.....	331

BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM	
PERANGKAT DAERAH.....	405
7.1. Kerangka Pendanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah	405
7.2. Program Pembangunan	407
7.2.1. Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan	
Dasar	407
7.2.2. Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan	
Pelayanan Dasar	413
7.2.3. Urusan Pemerintahan Pilihan.....	423
7.2.4. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	427
7.2.5. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	428
7.2.6. Unsur Pengawas Urusan Pemerintahan.....	430
7.2.7. Unsur Kewilayahan.....	431
7.2.8. Unsur Pemerintahan Umum.....	432
 BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	498
8.1. Indikator Kinerja Utama Daerah	498
8.2. Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah.....	500
8.3. Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (IKK)	508
 BAB IX PENUTUP	523

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Matriks Hubungan Antar Dokumen Perencanaan.....	21
Tabel 2.1.	Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Seram Bagian Barat.....	33
Tabel 2.2.	Topografi Menurut Selang Ketinggian Dalam Wilayah Kecamatan di Kabupaten Seram Bagian Barat.....	37
Tabel 2.3.	Kemiringan Lahan dan Karakteristik Morfologi Dalam Wilayah Kecamatan di Kabupaten Seram Bagian Barat.....	40
Tabel 2.4.	Sebaran Karakter Geohidrologi Menurut Kecamatan di Kabupaten Seram Bagian Barat.....	44
Tabel 2.5.	Cekungan Air Tanah di Kabupaten Seram Bagian Barat	46
Tabel 2.6.	Kondisi Klimatologi Rata-Rata Tahun 2020 Kabupaten Seram Bagian Barat.....	48
Tabel 2.7.	Sebaran Curah Hujan Kabupaten Seram Bagian Barat	48
Tabel 2.8.	Sebaran Tutupan Lahan/Penggunaan Lahan Menurut Kecamatan di Kabupaten Seram Bagian Barat.....	50
Tabel 2.9.	Potensi Air Baku yang Direncanakan untuk SPAM Kota Piru.....	53
Tabel 2.10.	Sejarah Kejadian Bencana di Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2016-2019	58
Tabel 2.11.	Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Seram Bagian Barat SP10, 2010-2020	59
Tabel 2.12.	Jumlah Penduduk Menurut Ketenagakerjaan di Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2015-2020.....	61
Tabel 2.13.	Jumlah Penduduk 15 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi dan Jenis Kegiatan di Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2020.....	62
Tabel 2.14.	Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2013-2020.....	63
Tabel 2.15.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2016-2020	64
Tabel 2.16.	Kepadatan Penduduk Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2020	64
Tabel 2.17.	Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Seram Bagian Barat, SP2010 dan 2020	65
Tabel 2.18.	Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Seram Bagian Barat Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha 2018-2021 (Persen).....	68

Tabel 2.19.	Laju Pertumbuhan Riil PDRB Kabupaten Seram Bagian Barat Menurut Lapangan Usaha (Persen) Tahun 2018-2021	69
Tabel 2.20.	Produk Domestik Regional Bruti dan PDRB Perkapita Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2018-2020	70
Tabel 2.21.	Garis Kemiskinan (GK), Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2018-2021	78
Tabel 2.22.	Perkembangan Capaian Bidang Olahraga di Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2018-2021	80
Tabel 2.23.	Cakupan Pelayanan Rumah Sakit di Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2018-2021	113
Tabel 2.24.	Rasio Tenaga Kesehatan di Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2021	115
Tabel 2.25.	Panjang Jalan Berdasarkan Kewenangan	119
Tabel 2.26.	Panjang Jalan Dalam Kondisi Mantap.....	119
Tabel 2.27.	Panjang Jembatan Kewenangan Kabupaten	120
Tabel 2.28.	Cakupan Akses Air Minum Aman dan Berkelanjutan	120
Tabel 2.29.	Cakupan Layanan Sanitasi yang Layak	121
Tabel 2.30.	Capaian Indikator Tata Ruang.....	122
Tabel 2.31.	Luas Kawasan Kumuh di Kabuapaten Seram Bagian Barat	122
Tabel 2.32.	Presentase Rumah Layak Huni dan Data Backlog Rumah di Kabupaten Seram Bagian Barat.....	123
Tabel 2.33.	Jumlah PMKS di Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2018-2021	126
Tabel 2.34.	Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Seram Bagian Barat, 2014–2021	130
Tabel 2.35.	Target dan Capaian Indikator Kinerja Urusan Ketenagakerjaan	132
Tabel 2.36.	Target dan Capaian Indikator Kinerja Urusan Pangan	138
Tabel 2.37.	Target dan Capaian Indikator Kinerja Urusan Pertanahan	139
Tabel 2.38.	Rasio Kepemilikan Dokumen Kependuduka Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2018-2021	141
Tabel 2.39.	Capaian Indikator Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	143
Tabel 2.40.	Target dan Capaian Indikator Kinerja Urusan Perhubungan	146
Tabel 2.41.	Target dan Capaian Indikator Kinerja Urusan Komunikasi dan Informasi.....	148
Tabel 2.42.	Target dan Capaian Indikator Kinerja Urusan Koperasi dan UKM	149
Tabel 2.43.	Target dan Capaian Indikator Kinerja Urusan Penanaman	

	Modal.....	150
Tabel 2.44.	Perkembangan Capaian Bidang Olahraga di Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2018-2021	152
Tabel 2.45.	Jumlah Dokumen Statistik Daerah Yang Dipublikasikan	157
Tabel 2.46.	Capaian Pengelolaan Arsip di Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2018 – 2021	157
Tabel 2.47.	Capaian Indikator Sektor Kelautan dan Perikanan	159
Tabel 2.48.	Capaian Indikator Sektor Pariwisata	160
Tabel 2.49.	Capaian Indikator Urusan Pertanian	161
Tabel 2.50.	Capaian Kinerja Urusan Perdagangan.....	162
Tabel 2.51.	Capaian Kinerja Urusan Perindustrian	163
Tabel 2.52.	Capaian Kelitbangan Kab. Seram Bagian Barat Tahun 2018-2021	164
Tabel 2.53.	Capaian Indikator Urusan Keuangan	166
Tabel 2.54.	Jumlah Pegawai di Kabupaten Seram Bagian Barat Berdasarkan Golongan	167
Tabel 2.55.	Capaian ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal di Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2018-2021	167
Tabel 2.56.	Capaian Nilai LPPD, Kinerja Pemerintah Daerah, Nilai E Sakip dan IKM	169
Tabel 2.57.	Jumlah Anggota DPRD Menurut Partai Politik dan Jenis Kelamin di Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2021	171
Tabel 2.58.	Rata-rata Pengeluaran Per Kapita Sebulan menurut Kelompok Komoditas dan Kelompok Pengeluaran (Rupiah) Tahun 2021	176
Tabel 3.1.	Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2017-2021	183
Tabel 3.2.	Proporsi Pendapatan Daerah di Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2017-2021	188
Tabel 3.3.	Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2017-2021.....	194
Tabel 3.4.	Proporsi Belanja Daerah di Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2017-2021	197
Tabel 3.5.	Rata-Rata Pertumbuhan Pembiayaan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2017-2021	200
Tabel 3.6.	Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2023-2026.....	204
Tabel 4.1.	Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Pendidikan	209
Tabel 4.2.	Permasalahan Pembangunan Daerah urusan Kesehatan	210

Tabel 4.3.	Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	212
Tabel 4.4.	Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	213
Tabel 4.5.	Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	214
Tabel 4.6.	Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Sosial	215
Tabel 4.7.	Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Tenaga Kerja	216
Tabel 4.8.	Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.....	217
Tabel 4.9.	Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	218
Tabel 4.10.	Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Pangan.....	219
Tabel 4.11.	Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Lingkungan Hidup	220
Tabel 4.12.	Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	221
Tabel 4.13.	Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	221
Tabel 4.14.	Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Perhubungan	222
Tabel 4.15.	Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Komunikasi dan Informatika.....	223
Tabel 4.16.	Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	223
Tabel 4.17.	Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Penanaman Modal.....	224
Tabel 4.18.	Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Kepemudaan dan Olahraga.....	225
Tabel 4.19.	Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Statistik	226
Tabel 4.20.	Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Persandian.....	227
Tabel 4.21.	Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Kebudayaan.....	227
Tabel 4.22.	Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Kearsipan	228
Tabel 4.23.	Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Pertanian	229
Tabel 4.24.	Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Kelautan dan Perikanan	229
Tabel 4.25.	Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Perindustrian.....	230
Tabel 4.26.	Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Perdagangan	231
Tabel 4.27.	Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Pariwisata	232
Tabel 4.28.	Permasalahan Pembangunan Daerah Unsur Penunjang Perencanaan	232

Tabel 4.29.	Permasalahan Pembangunan Daerah Unsur Penunjang Keuangan	233
Tabel 4.30.	Permasalahan Pembangunan Daerah Unsur Penunjang Kepegawaian	234
Tabel 4.31.	Permasalahan Pembangunan Daerah Unsur Penunjang Penelitian dan Pengembangan	235
Tabel 4.32.	Permasalahan Pembangunan Daerah Unsur Penunjang Pemerintahan	236
Tabel 4.33.	Permasalahan Pembangunan Daerah Unsur Pendukung Pemerintahan Sekretariat Daerah	236
Tabel 4.34.	Permasalahan Pembangunan Daerah Unsur Pendukung Sekretariat DPRD	238
Tabel 4.35.	Permasalahan Pembangunan Daerah Unsur Kewilayahan/Kecamatan	238
Tabel 4.36.	Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Pemerintahan Umum	239
Tabel 5.1.	Penjelasan Tujuan yang Menjawab Isu Strategis	283
Tabel 5.2.	Rumusan Tujuan dan Sasaran serta Indikator Capaian RPD Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2023-2026.....	2
Tabel 6.1.	Perumusan Strategi RPD Berbasis Pemetaan Masalah Pembangunan	296
Tabel 6.2.	Strategi dan Arah Kebijakan	302
Tabel 6.3.	Arah Kebijakan Tahunan dan Prioritas Pembangunan	318
Tabel 6.4.	Dukungan Arah Kebijakan RPD Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2023-2026 Terhadap RPJMN 2020-2024	322
Tabel 6.5.	Prioritas Pembangunan Daerah	323
Tabel 6.6.	Identifikasi Program yang Mewakili Kriteria Kemiskinan.....	328
Tabel 6.7.	Program Prioritas	333
Tabel 7.1.	Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026	406
Tabel 7.2.	Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2023-2026	434
Tabel 8.1.	Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2023-2026	499
Tabel 8.2.	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2023-2026.....	500
Tabel 8.3.	Penetapan Indikator Kinerja Menurut Bidang Urusan Penyelenggaraan Tingkat Sasaran (Dampak / Impact) Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2023-2026.....	509

Tabel 8.4. Penetapan Indikator Kinerja Menurut Bidang Urusan Penyelenggaraan
Tingkat Outcome Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun
2023-2026511

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Hubungan Antar Dokumen Perencanaan30

Gambar 2.1. Peta Administrasi Kabupaten Seram Bagian Barat36

Gambar 2.2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Pengangguran
di Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2015-202061

Gambar 2.3. Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Seram Bagian
Barat Tahun 2010-202066

Gambar 2.4. Grafik Perbandingan IPM Kabupaten Seram Bagian Barat
dengan Kabupaten/Kota Lain di Wilayah Provinsi Maluku
Tahun 2018-202171

Gambar 2.5. Grafik Capaian Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten
Seram Bagian Barat dengan Kabupaten/Kota Lain di
Wilayah Provinsi Maluku Tahun 2018-202173

Gambar 2.6. Grafik Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Seram
Bagian Barat dengan Kabupaten/Kota Lain di Wilayah
Provinsi Maluku 2018-202174

Gambar 2.7. Grafik Usia Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Seram Bagian
Barat dengan Kabupaten/Kota Lain di Wilayah Provinsi
Maluku Tahun 2018-202175

Gambar 2.8. Grafik Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Seram
Bagian Barat Provinsi Maluku dan Nasional
Tahun 2018-202176

Gambar 2.9. Grafik Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Seram
Bagian Barat dengan Kabupaten/Kota Lain di Wilayah
Provinsi Maluku Tahun 2018-202177

Gambar 2.10. Grafik Perkembangan Capaian Bidang Olahraga di
Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2018-202181

Gambar 2.11. Grafik Angka Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
di Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2018-202183

Gambar 2.12. Grafik Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK)
di Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2018-202184

Gambar 2.13. Grafik Persentase Angka Partisipasi Murni (APM)
di Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2018-202185

Gambar 2.14. Grafik Angka Pendidikan yang Ditamatkan di Kabupaten
Seram Bagian Barat Grafik Angka Pendidikan Yang
Ditamatkan di Kabupaten Seram Bagian Barat
Tahun 2018-202187

Gambar 2.15. Grafik Angka Putus Sekolah SD dan SMP di Kabupaten
Seram Bagian Barat Tahun 2018-202188

Gambar 2.16.	Grafik Angka Partisipasi Sekolah SD/MI/ Paket A dan SMP/MTs/Paket B di Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2018-2021	89
Gambar 2.17.	Grafik Persentase Angka Kelulusan (AL) SD/MI dan SMP/MTs di Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2018-2021	90
Gambar 2.18.	Grafik Persentase Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP dan SMP/MTs ke SMA/MA di Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2018-2021	91
Gambar 2.19.	Grafik Persentase Sekolah pendidikan SD/MI dan SMP/MTs Kondisi Bangunan Baik di Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2018-2021	92
Gambar 2.20.	Grafik Rasio Ketersediaan Sekolah/penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar di Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2018-2021	94
Gambar 2.21.	Grafik Rasio Guru/murid Sekolah Pendidikan Dasar di Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2018-2021	95
Gambar 2.22.	Grafik Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV di Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2018-2021	96
Gambar 2.23.	Grafik Cakupan Komplikasi Kebidanan Yang Tertangani di Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2018-2021	97
Gambar 2.24.	Grafik Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan Tahun 2018-2021	98
Gambar 2.25.	Grafik Cakupan Desa/ Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan Tahun 2018-2021	99
Gambar 2.26.	Grafik Cakupan Balita Gizi Buruk Yang Mendapat Perawatan Tahun 2018-2021	100
Gambar 2.27.	Grafik Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD Tahun 2018-2021	101
Gambar 2.28.	Grafik Penderita Diare yang ditangani Tahun 2018-2021	102
Gambar 2.29.	Grafik Cakupan Kunjungan Bayi Tahun 2018-2021	103
Gambar 2.30.	Grafik Cakupan Puskesmas Tahun 2018-2021	104
Gambar 2.31.	Grafik Cakupan Pembantu Puskesmas Tahun 2018-2021	105
Gambar 2.32.	Grafik Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA	106
Gambar 2.33.	Grafik Case Notification Rate (CNR) Seluruh Kasus TB Per Puskesmas di Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2021	107

Gambar 2.34.	Grafik Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran Hidup Tahun 2018-2021	108
Gambar 2.35.	Grafik Angka Kematian Ibu (AKI) Per 100.000 Kelahiran Hidup di Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2018-2021	109
Gambar 2.36.	Grafik Angka Usia Harapan Hidup Tahun 2018-2021.....	110
Gambar 2.37.	Grafik Jumlah Jiwa Balita Gizi Kurang Per Puskesmas di Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2021	111
Gambar 2.38.	Grafik Persentase Balita Gizi Buruk mendapat Perawatan di Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2018-2021	112
Gambar 2.39.	Grafik Rasio Rumah sakit per Satuan Penduduk Tahun 2018-2022	112
Gambar 2.40.	Grafik Rasio Dokter Per Satuan Penduduk.....	114
Gambar 2.41.	Grafik Rasio Tenaga Medis Tahun 2018-2022	116
Gambar 2.42.	Grafik Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin	117
Gambar 2.43.	Grafik Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level 1 Yang Harus Diberikan Sarana Kesehatan (RS) Tahun 2018-2022.	118
Gambar 2.44.	Grafik Menurunkan Pelanggaran Ketertiban Masyarakat Tahun 2018-2022.....	124
Gambar 2.45.	Grafik Kegiatan Pembinaan Politik Daerah Tahun 2018-2021	125
Gambar 2.46.	Grafik Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan Tahun 2018-2021.....	125
Gambar 2.47.	Grafik Persentase PMKS Yang Memperoleh Bantuan Sosial Tahun 2018-2021	127
Gambar 2.48.	Grafik Persentase PMKS Yang Tertangani Tahun 2018-2021	127
Gambar 2.49.	Grafik Persentase Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKBSM) Yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesejahteraan Sosial Tahun 2018-2021	128
Gambar 2.50.	Grafik Persentase Penyandang Cacat Fisik dan Mental Serta Lanjut Usia Tidak Potensial Yang Telah Menerima Jaminan Sosial Tahun 2018-2021	129
Gambar 2.51.	Grafik Kemiskinan dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Seram Bagian Barat, 2014–2021.....	130
Gambar 2.52.	Grafik Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan Tahun 2018-2021.....	133
Gambar 2.53.	Grafik Proporsi Kursi yang Diduduki Perempuan di DPRD Tahun 2018-2021	134

Gambar 2.54.	Grafik Pasangan usia subur (PUS) yang ingin ber KB tidak terpenuhi & Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontraseps Tahun 2018-2021	135
Gambar 2.55.	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber KB, Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber KB dan Tahun 2018-2021	136
Gambar 2.56.	Grafik Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) Tahun 2018-2021	137
Gambar 2.57.	Grafik Cakupan Remaja Dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja/mahasiswa Tahun 2018-2021	137
Gambar 2.58.	Grafik Rasio Kepemilikan Dokumen Kependudukan di Kabupaten Seram Bagian BaratTahun 2018-2021	142
Gambar 2.59.	Grafik Jumlah Atlet Berprestas di Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2018-2021	152
Gambar 2.60.	Grafik Cakupan Pembinaan Atlet Muda di Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2018-2021	153
Gambar 2.61.	Grafik Cakupan Pelatih Berprestasi di Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2018-2021	154
Gambar 2.62.	Grafik Jumlah Prestasi Olahraga di Kabupaten Seram Bagian Barat 2018-2021	155
Gambar 2.63.	Grafik Persentase Organisasi Pemuda Aktif & Cakupan Pembinaan Olahraga di Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2018-2021 ...	156
Gambar 2.64.	Grafik Koleksi Buku Yang Tersedia di Perpustakaan Daerah Tahun 2018 – 2021.....	158
Gambar 2.65.	Grafik Persentase OPD Yang Telah Mengelola Arsip Secara Baku Tahun 2018 – 2021	158
Gambar 2.66.	Grafik Capaian Kelitbangan Kab. Seram Bagian Barat Tahun 2018-2021	165
Gambar 2.67.	Grafik Persentase ASN Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal Tahun 2018-2021	168
Gambar 2.68.	Grafik Jumlah Kursi DPRD Kab. SBB Berdasarkan Partai Politik Tahun 2019-2024	172
Gambar 2.69.	Grafik Capaian Persentase Pelanggaran Pegawai dan Temuan BPK Tahun 2018-2021	173
Gambar 3.1.	Persentase Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2018-2021.....	181
Gambar 3.2.	Persentase Kontribusi Komponen Pendapatan Asli Daerah terhadap Total Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2017-2021	190

Gambar 3.3. Persentase Kontribusi Pendapatan Transfer Terhadap Total
Pendapatan Transfer Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2017-2021
.....191

Gambar 3.4. Persentase Kontribusi Komponen Lain-Lain Pendapatan Daerah yang
Sah Terhadap Total Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Kabupaten
Seram Bagian Barat Tahun 2017-2021192

Gambar 3.5. Persentase Pertumbuhan Belanja Daerah Kabupaten Seram Bagian
Barat Tahun 2018-2021196

Gambar 3.6. Persentase Pertumbuhan Pembiayaan Daerah Kabupaten Seram
Bagian Barat Tahun 2017-2021.....201

Gambar 6.1. Arah Kebijakan Tahunan RPD Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun
2023-2026318

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan merupakan suatu proses yang berkesinambungan untuk menetapkan tujuan pembangunan yang ingin dicapai menuju arah yang lebih baik. Perencanaan pembangunan sangat penting dan signifikan dalam menentukan arah perkembangan daerah yang bersangkutan. Selain untuk menjadikan pembangunan lebih terarah, perencanaan pembangunan juga dapat berfungsi sebagai standar atau alat ukur untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan pembangunan yang telah dilaksanakan. Pentingnya perencanaan dalam pembangunan sebagai sarana untuk mencapai tujuan pembangunan melalui pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan, sehingga tanpa perencanaan tujuan pembangunan yang dicitacitakan mustahil dapat tercapai. Perencanaan yang baik dilakukan berdasarkan pada data, fakta, dan informasi yang valid, akurat, dan akuntabel dengan tetap memperhatikan potensi dan sumber daya yang dimiliki. Oleh karena itu, penyusunan perencanaan pembangunan daerah harus dilakukan dengan mempertimbangkan pada kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah untuk mengatasi permasalahan dan isu-isu strategis di daerah, provinsi, maupun nasional.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah wajib menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional. Dokumen perencanaan pembangunan harus disusun secara sistematis, terarah, terpadu, dan berkelanjutan. Seiring dengan terjadinya perubahan kebijakan nasional tentang pelaksanaan pemilihan umum serentak yaitu Pemilihan Umum Presiden, Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Umum Kepala Daerah, berdasarkan amanat Undang-Undang nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang. Dengan demikian untuk

Kepala Daerah yang masa Jabatannya berakhir di tahun 2022, akan diangkat dan ditetapkan seorang Penjabat Kepala Daerah atau Penjabat Bupati sampai dengan terlaksananya pemilihan umum Kepala daerah pada Pemilu serentak tahun 2024 mendatang.

Berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah, maka berakhir pula dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD), dan akan dilakukan evaluasi pencapaian target implementasi dokumen RPJMD lima tahun masa kepemimpinan Kepala Daerah tersebut, karena dalam dokumen RPJMD dimaksud memuat Visi dan Misi Kepala Daerah yang menjadi tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan selama lima tahun atau satu periode Kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Pemerintah Pusat, melalui Menteri Dalam Negeri telah mengambil langkah strategi dengan dikeluarkannya Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022. Instruksi tersebut mengamanatkan kepada Kepala Daerah yang akan mengakhiri masa jabatannya harus menyiapkan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPD) sebagai dokumen pengganti RPJMD, yang akan memberi arah atau haluan pembangunan masa transisi, sampai dengan terpilihnya Kepala Daerah yang baru, pada Pemilu serentak Tahun 2024. Selanjutnya, dokumen RPD dijabarkan melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai dokumen perencanaan tahunan, yang kemudian menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD), landasan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), yang selanjutnya menjadi Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Dengan demikian, RPD Tahun 2023-2026 merupakan pedoman bagi seluruh alur pembangunan di Kabupaten Seram Bagian Barat.

Demikian halnya Kabupaten Seram Bagian Barat, juga merupakan salah satu daerah di Indonesia, yang masa kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berakhir pada tanggal 22 Mei 2022, sehingga masa kepemimpinan Kepala Daerah akan di lanjutkan oleh seorang Penjabat Kepala Daerah atau Penjabat Bupati. Dalam menyikapi permasalahan tersebut di atas, maka Perangkat Daerah, melalui Badan Perencanaan kabupaten Seram Bagian Barat bersama organisasi perangkat daerah lainnya,

telah membentuk tim dalam menyiapkan dan menyusun dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2023 -2026, yang akan digunakan oleh Penjabat Kepala Daerah dalam menjalankan roda penyelenggaraan pemerintahan, perencanaan pembangunan serta pembinaan kemasyarakatan selama (4) empat tahun kedepan.

Dokumen RPD juga merupakan dokumen perencanaan yang sama muatannya dengan RPJMD, yang membedakan dalam dokumen ini adalah muatan Visa dan Misi Kepala Daerah. Namun kedua-duanya terlahir dari berbagai permasalahan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di daerah, yang dapat diidentifikasi dan dirumuskan menjadi isu permasalahan atau masalah pokok, yang akan berkembang menjadi isu startegi. Selain itu pula RPD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah, beda halnya dengan RPJMD yang harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Berdasarkan Inmendagri 70 tahun 2021, dalam penyusunan RPD sinergitas perencanaan Pusat dan Daerah memperhatikan pendekatan penyelarasan target indikator makro dan program prioritas Nasional dalam RPJMN 2020-2024, kesesuaian sasaran pokok dan arah kebijakan RPJMD Provinsi, Hasil Evaluasi capaian Indikator Kinerja daerah dalam RPJMD tahun 2018-2022. serta penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam RPD harus memperhatikan beberapa hal antara lain :

- a) Penyelarasan program prioritas nasional dalam RPJMN tahun 2020-2024 dan RPJMD Provinsi yang meliputi Evaluasi hasil capaian kinerja tujuan, sasaran, dan hasil (*outcome*), Renstra Pemerintah Daerah, Evaluasi kontribusi keluaran (*output*) dari kegiatan dan sub kegiatan sampai dengan tahun 2021 dalam pencapaian hasil (*out come*), Isu-isu strategis terkait bidang urusan dan tupoksi perangkat daerah.
- b) Kebijakan Nasional terkait dengan regulasi yang masih berlaku serta saran dan atau masukan dari pemangku kepentingan (*stakeholder*) pembangunan daerah.
- c) Penyelarasan dengan program prioritas nasional RPJPN dan RPJPD Provinsi maupun Kabupaten serta Daerah yang bersebelahan.

Penyusunan RPD Kabupaten Seram Bagian Barat juga tidak terlepas dari telaahan dokumen tata ruang wilayah (RTRW) baik Kabupaten maupun provinsi dan nasional, sehingga dokumen disusun dalam menjawab permasalahan perencanaan pembangunan

empat (4) tahun ke depan sampai dengan tahun 2026 benar-benar komperhensif terukur dan terarah.

Dokumen Rancangan Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 Kabupaten Seram Bagian Barat ditetapkan oleh Bupati Seram Bagian Barat, TIMOTIUS AKERINA, SE, MSi sisa masa jabatan 2021-2022, dari masa jabatan Bupati Sebelumnya Bupati Drs. MOHAMMAD YASIN PAYAPO, M.Pd (Alm) dan Wakil Bupati TIMOTIUS AKERINA, SE, MSi periode 2017-2022, dengan Visi “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Seram Bagian Barat Yang Sejahtera, Berbudi Pekerti luhur dan Berbudaya Berbasis potensi Ekonomi Lokal.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan RPD Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2023-2026 berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2022 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2003 Tentang Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;

8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang;
10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
11. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
13. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 Tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

20. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
22. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
23. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

30. Intruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022.
31. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
32. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 02 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Maluku Tahun 2005-2025;
33. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Rencana tata Ruang Wilayah Provinsi Maluku Tahun 2013-2033
34. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 01 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Maluku Tahun 2019-2024;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 09 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2017-2022;
36. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 03 Tahun 2014 Tentang Rencana tata Ruang Wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2010-2030;
37. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 4 Tahun 2016 Tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
38. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 04 Tahun 2020 Tentang Perubahan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2017-2022.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud;

Adapun maksud dari penyediaan dokumen rencana pembangunan daerah (RPD) adalah Sebagai dokumen pengganti RPJMD, sebagaimana amanat Intruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Nomor 70 Tahun 2021, serta merupakan dokumen penjabaran tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, prioritas pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program pembangunan daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 4 (empat) tahun

1.3.2 Tujuan

- a) Sebagai pedoman dan dasar untuk penyusunan RKPD, Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah, dan Dokumen Perencanaan Pembangunan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b) Instrument pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
- c) Bagi pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

1.4. Hubungan Antar Dokumen

Sinkronisasi antar dokumen perencanaan menentukan efektivitas Pembangunan Daerah, Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022, telah mengamanatkan kepada Kepala Daerah yang akan mengakhiri masa jabatannya harus menyiapkan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPD) sebagai dokumen pengganti RPMJD, yang akan memberi arah atau haluan pembangunan masa transisi, sampai dengan terpilihnya Kepala Daerah yang baru, pada Pemilu serentak Tahun 2024.

Penyusunan dokumen RPD tahun 2023-2026, tidak terlepas dari pendekatan kajian telaahan dokumen-dokumen perencanaan nasional dan daerah, baik dalam penyelarasan indikator makro, program prioritas nasional yang termuat dalam RPJMN dan RPJMD serta kesesuaian sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Provinsi sampai dengan tahun 2025, juga termasuk hasil evaluasi capaian indikator kinerja daerah RPJMD Provinsi Maluku Tahun 2019-2024

dan Hasil evaluasi capaian indikator kinerja daerah dalam PRJMD Kabupaten Seram Bagian Barat tahun 2017-2022

Penyusana dokumen RPD Kabupaten Seram Bagian Barat tahun 2023-2026 juga dilakukan dengan melihat isu-isu strategis yang berkembang, serta kebijakan nasional maupun regulasi yang berlaku juga RPD kabupaten daerah sekitarnya antara lain Kabupaten Induk Maluku Tengah, Kota Ambon, mapun Kabupaten Seram Bagian Timur.

Demikian halnya dengan Intruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022 sebagai bahan penyusunan dan penyesuaian RPD, sekaligus sebagai instrumen penyelarasan tujuan, sasaran, isu strategis, arah kebijakan dan Program yang termuat dalam dokumen RPJMN Tahun 2020-2024, Dokumen Perubahan RPJMD Provinsi Maluku Tahun 2019-2025, maupun RPJMD Provinsi Maluku Tahun 2005-2025 sehingga dapat menggambarkan penyelarasan yang menjadi tujuan Pembangunan dari pusat sampai ke daerah memiliki hubungan yang sinergitas, yang dapat di jabarkan sebagai berikut;

1.4.1. Amanat RPJMN Tahun 2020-2024

Amanat rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2020-2024, tidak terlepas dari Visi, Misi RPJMN dan agenda pembangunan nasional yang dapat diuraikan sebagai berikut;

a) Visi

“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

b) Misi (Nawacita kedua)

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya

7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan

c) Arahan Presiden dan Strateginya

Presiden menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita, diantaranya sebagai berikut :

1. Pembangunan SDM
 - Layanan Dasar dan Perlindungan Sosial;
 - Produktivitas;
 - Pembangunan Karakter
2. Pembangunan Infrastruktur
 - Infrastruktur Pelayanan Dasar
 - Infrastruktur Ekonomi
 - Infrastruktur Perkotaan
 - Energi dan Ketenagalistrikan
 - Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Transformasi Digital
3. Penyederhanaan Regulasi
 - Pendekatan OMNIBUS LAW
 - Pendekatan Terhadap Regulasi yang akan disusun
4. Penyederhanaan Birokrasi
 - Penyederhanaan Prosedur
 - Penyelenggaran E-Government
 - Reformasi Birokrasi Pelayanan Publik untuk Kegiatan Ekspor/Impor, Kepabeanaan dan Kepelabuhanan
5. Transformasi Ekonomi
 - Industrialisasi
 - Pengembangan Destinasi Unggulan
 - Penguatan ekonomi kreatif dan ekonomi digital

d) Agenda Pembangunan dan Sasaran.

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;
 - Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan; dan

- Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor dan daya saing perekonomian.
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
 - Menurunnya kesenjangan antar wilayah dengan mendorong transformasi dan akselerasi pembangunan wilayah KTI yaitu Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua dan tetap menjaga momentum pertumbuhan di wilayah Jawa, Bali dan Sumatera.
 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
 - Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan menguatnya tata Kelola kependudukan;
 - Meningkatnya perlindungan sosial bagi seluruh penduduk;
 - Terpenuhinya layanan dasar;
 - Meningkatnya kualitas anak, perempuan dan pemuda;
 - Terwujudnya pengentasan kemiskinan;
 - Meningkatnya produktivitas dan daya saing.
 4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
 - Menguatnya revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memantapkan ketahanan budaya;
 - Meningkatnya pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan;
 - Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan daya rekat sosial;
 - Menguatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat dan membangun harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat;
 - Meningkatnya ketahanan keluarga untuk memperkuat karakter bangsa;
 - Meningkatnya budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, inovatif dan kreatif.
 5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
 - Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar;
 - Meningkatnya Konektivitas wilayah;

- Meningkatnya layanan angkutan umum massal di 6 (enam) kota metropolitan;
 - Meningkatnya akses dan pasokan energi dan tenaga listrik yang merata, andal, dan efisien;
 - Meningkatnya pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK, serta kontribusi sector informasi dan komunikasi dalam pertumbuhan ekonomi.
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim;
- Peningkatan kualitas lingkungan hidup;
 - Peningkatan ketahanan bencana dan iklim;
 - Pembangunan rendah karbon.
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
- Menguatnya stabilitas polhukhankam dan terlaksananya transformasi pelayanan public.

1.4.2. Amanat Perubahan RPJMD Provinsi Maluku Tahun 2019-2024

Amanat rencana pembangunan jangka menengah Provinsi Maluku Tahun 2019-2024, tidak terlepas dari Visi, Misi Perubahan RPJMD Provinsi Maluku dan program prioritas pembangunan daerah yang dapat diuraikan sebagai berikut;

a) Visi

“Maluku yang Terkelola Secara Jujur, Bersih dan Melayani, Terjamin dalam Kesejahteraan dan Berdaulat atas Gugusan Kepulauan”

b) Misi

- 1) Mewujudkan birokrasi yang dinamis, jujur, bersih dan melayani;

Tujuan ;

- Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik dan bersih

- 2) Meningkatkan kualitas Pendidikan dan Kesehatan, murah dan terjangkau;

Tujuan;

- Meningkatkan kualitas SDM yang sehat, unggul dan berdaya saing

- 3) Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan;
Tujuan;
 - Meningkatkan kualitas dan daya saing pembangunan ekonomi berkelanjutan;
 - Meningkatkan kesejahteraan social masyarakat;
 - Meningkatkan ketahanan lingkungan yang berkelanjutan;
- 4) Peningkatan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau;
Tujuan;
 - Meningkatkan pemerataan infrastruktur dan konektivitas wilayah kepulauan.
- 5) Meningkatkan suasana kondusif untuk investasi, budaya dan pariwisata;
Tujuan;
 - Meningkatkan pembangunan daerah berbasis kebudayaan dan pariwisata.
- 6) Mewujudkan sumber daya manusia yang professional, kreatif, mandiri dan berprestasi.
Tujuan
 - Meningkatkan masyarakat yang terampil, kreatif dan kompetitif.

c) Program Unggulan

- 1) Rapat koordinasi bulanan Gubernur dan Wakil Gubernur dengan para Bupati/ Walikota;
- 2) Koordinasi provinsi dan kabupaten/kota berbasis e-government;
- 3) Integrasi e-planning dan e-budgeting;
- 4) Pertemuan rutin bulanan dengan para pemangku kepentingan (coffee morning).
- 5) Penyelenggaraan pendidikan berbasis teknologi informasi
- 6) Program sarjana mengajar di daerah tertinggal, terdepan dan terluar
- 7) Pemberdayaan agen perdamaian berbasis agama dan budaya lokal
- 8) Beasiswa bagi mahasiswa kurang mampu dan berprestasi serta dosen
- 9) Revitalisasi BUMD;
- 10) Satu produk satu desa;

- 11) Gerakan ekonomi kreatif berbasis potensi lokal wilayah;
- 12) Revitalisasi tanaman rempah (pala dan cengkih);
- 13) Peningkatan daya saing produk olahan perikanan; dan
- 14) Tata niaga produk pertanian dan perikanan (sistem resi gudang).
- 15) Banda sebagai kawasan ekonomi khusus pariwisata; dan
- 16) Festival budaya tahunan;
- 17) Pekan pemuda kreatif
- 18) Pekan olah raga unggulan pemuda

1.4.3. Amanat RPJPD Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2005-2025

Amanat rencana pembangunan jangka Panjang daerah Kabupaten Seram Bagian Barat tahun 2020-2024, dalam menyajikan dokumen rencana pembangunan daerah (RPD) tahun 2023-2026, mengacu pada tujuan pembangunan daerah Provinsi Maluku tahun 2005-2025, karena terkendala dengan ketersediaan dokumen RPJPD Kabupaten Seram Bagian Barat dan hasil konsultasi Pemerintah Daerah melalui Badan Perencanaan Kabupaten Seram Bagian Barat ke Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Maluku. Dengan demikian amanat rencana pembangunan terlepas dari Visi, Misi Perubahan RPJPD Provinsi Maluku yang dapat diuraikan sebagai berikut;

a) Visi

Visi Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Maluku Tahun 2005 - 2025 adalah : *“Maluku Yang Rukun Dan Damai, Adil Dan Demokratis, Serta Maju Dan Sejahtera”*.

Visi pembangunan daerah tahun 2005 - 2025 harus dapat diukur untuk dapat mengetahui tingkat ketaqwaan, kerukunan, keamanan, kedamaian, kemajuan, kemandirian, keadilan, dan demokrasi yang ingin dicapai. Masyarakat yang taqwa adalah masyarakat yang beranggotakan individu-individu yang menjalani kehidupannya dengan mematuhi segala hukum agama dan negaranya. Ketaqwaan masyarakat yang demikian akan mampu membangkitkan suasana kehidupan yang rukun aman dan damai dengan menjunjung tinggi semangat siwalima. Kerukunan akan menciptakan kebutuhan bersama (pembangunan)

sementara suasana yang aman dan damai menjadi syarat tercapainya kebutuhan bersama yang harus dijaga.

Masyarakat yang adil adalah masyarakat yang memiliki kesempatan dan pelayanan yang sama dalam segala bidang pembangunan dan kehidupan dan memberikan partisipatif rakyat dalam merencanakan, melaksanakan, dan menikmati hasil pembangunan sehingga tidak ada diskriminasi dalam bentuk apapun baik antarindividu, gender, maupun wilayah. Masyarakat Maluku yang demokratis adalah masyarakat yang telah meningkat pendidikan politiknya; masyarakat yang hak-hak dan partisipasi politiknya terjamin; serta masyarakat yang hak-hak warga, keamanan, dan ketentramannya terjamin yang tercermin dengan meningkatnya peran masyarakat dalam rangka meningkatnya kesejahteraan masyarakat, sistem, dan kelembagaan politik di daerah yang baik termasuk hukum yang mantap serta dilandasi oleh nilai-nilai budaya lokal.

Masyarakat yang maju dan sejahtera adalah masyarakat yang memiliki berbagai keunggulan yang ditunjukkan dalam segala aspek kehidupan. Dalam aspek sumber daya manusia ditunjukkan dengan individu-individu yang sehat, cerdas, produktif, berakhlak mulia, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta mampu berperan dan berfungsi dalam pembangunan yang berkelanjutan. Masyarakat maju dan mandiri juga dicirikan dengan individu-individu yang memiliki jati diri yang kuat dan tidak tergantung pada pihak lain serta mampu bersaing dalam kehidupan sehingga menjadi potensi yang memiliki kapabilitas untuk memenuhi pasar kerja lokal, nasional, dan internasional.

Dalam aspek ekonomi masyarakat maju ditunjukkan dengan penciptaan struktur ekonomi yang tangguh, pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pemerataan hasil-hasil pembangunan ekonomi di seluruh wilayah Provinsi Maluku yang bertumpu pada potensi sumberdaya kepulauan, serta mampu bersaing dalam percaturan global. Dalam aspek pemerintahan ditunjukkan dengan profesionalisme aparatur pemerintah, pelayanan publik yang prima, penegakan hukum

secara konsekuen dan peningkatan akuntabilitas serta transparansi dalam pemerintahan.

b) Misi

Dalam mewujudkan visi pembangunan Provinsi Maluku tersebut ditempuh melalui 3 (tiga) misi pembangunan daerah, sebagai berikut;

1. Mewujudkan masyarakat Kepulauan Provinsi Maluku yang bertaqwa, rukun, aman, dan damai adalah mendorong pembangunan yang dapat meningkatkan tata kehidupan masyarakat Kepulauan Maluku yang religius dalam menghayati nilai-nilai luhur ajaran agama sehingga tercipta semangat persaudaraan, persatuan, dan perdamaian.
2. Mewujudkan masyarakat Kepulauan Maluku yang Maju, Mandiri, dan Sejahtera adalah mendorong pembangunan daerah dengan mengelola sumber daya alam kepulauan unggulan Maluku secara berkelanjutan dengan mempertimbangkan geoposisi yang strategis dalam skala nasional dan internasional (perkembangan ekonomi di *Pasifik Rim* dan *Arafura Rim*) yang didukung oleh sumber daya manusia dan kelembagaan yang berkualitas, infrastruktur yang maju dan merata, serta teknologi yang adaptif dan fungsional terhadap kebutuhan daerah.
3. Mewujudkan masyarakat Kepulauan Maluku yang adil dan demokratis adalah menciptakan pembangunan yang merata di seluruh wilayah Kepulauan Maluku dan meningkatkan budaya politik masyarakat yang demokratis dengan menjunjung tinggi rasa keadilan demi terwujudnya stabilitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam realitas kehidupan masyarakat yang majemuk serta terjaminnya penegakan hukum dan hak asasi manusia berbasis keadilan dan kepastian hukum melalui pembentukan tata hukum daerah kepulauan dengan mewujudkan tata pemerintahan yang bersih, jujur, berwibawa, transparan, akuntabel, dan responsif terhadap dinamika masyarakat.

c) Tujuan

Tujuan pembangunan jangka panjang Provinsi Maluku tahun 2005 - 2025 adalah mewujudkan tata kehidupan masyarakat Maluku yang bertaqwa, rukun, aman dan damai, maju, mandiri, dan sejahtera, adil dan demokratis melalui pembangunan berbasis pengelolaan sumber daya alam kepulauan secara berkelanjutan. Sebagai ukuran tercapainya Provinsi Maluku yang bertaqwa, rukun, aman dan damai, maju dan mandiri, adil dan demokratis dalam 20 tahun mendatang diarahkan pada pencapaian sasaran-sasaran pokok sebagai berikut:

- 1) Terwujudnya masyarakat Provinsi Maluku yang bertaqwa, rukun, aman, dan damai ditandai oleh hal-hal berikut:
 - Terwujudnya manusia Maluku dengan tata kehidupan masyarakat yang religius dan bertaqwa.
 - Terwujudnya karakter masyarakat yang berakhlak mulia dan bermoral yang dicirikan beriman, dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, bertoleran, dan berkembang dinamis.
 - Terciptanya suatu tatanan kehidupan masyarakat yang memiliki kemampuan beradaptasi dengan perubahan lingkungan sosial budaya pada tingkat lokal, nasional, dan global,
 - Terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Maluku melalui kerjasama lintas institusional dan adanya dukungan partisipasi aktif seluruh lapisan masyarakat.
 - Terwujudnya stabilitas keamanan yang mampu mendukung perkembangan kegiatan ekonomi di semua sektor dan menarik minat investor.
 - Terwujudnya lingkungan permukiman yang harmonis dengan menjamin kepastian hukum pertanahan dan tata ruang serta keberlangsungan aktivitas produktif masyarakat secara berkelanjutan.
- 2) Terwujudnya masyarakat Provinsi Maluku yang maju, mandiri, dan sejahtera ditandai oleh hal-hal berikut:

- Terwujudnya sumber daya manusia Maluku yang sehat, sejahtera, cerdas, kreatif, produktif, berbudaya, berakhlak mulia, dan percaya diri serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Terwujudnya perekonomian Provinsi Maluku yang tangguh dan mandiri dengan mendorong pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata nasional dan pemerataan ekonomi yang berkelanjutan dan berdaya saing tinggi.
- Meningkatnya kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh yang ditandai oleh pendapatan per kapita pada tahun 2025 di atas pendapatan per kapita nasional.
- Meningkatnya hubungan ekonomi antardaerah, nasional, dan internasional yang didukung oleh potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang berkualitas untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.
- Berkurangnya proporsi penduduk miskin tidak lebih dari 8 persen pada tahun 2025 dan pengangguran tidak lebih dari 5 persen demi stabilitas ekonomi yang berkelanjutan.
- Tersedianya infrastruktur sosial dan infrastruktur ekonomi yang memadai dan merata untuk mendukung pembangunan Maluku berbasis Kepulauan bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.
- Terwujudnya infrastruktur pemerintahan dan penunjang pembangunan lainnya dengan tingkat pelayanan yang menyeluruh dan merata untuk mengurangi disparitas antarwilayah dan meningkatkan kapasitas masyarakat Maluku berbasis Kepulauan.
- Terwujudnya pengembangan gugus pulau secara nyata dan terlaksananya penataan pulau-pulau yang relatif terisolir, tertinggal, dan perbatasan antarnegara dalam rangka mengurangi tingkat ketidakseimbangan kualitas hidup masyarakat.

- Terwujudnya tata ruang yang produktif, aman, nyaman, dan berkelanjutan serta struktur ruang yang kompak dan mandiri berbasis keunggulan karakter lokal berdasarkan pendekatan gugus pulau dan kawasan laut pulau dalam tata ruang nasional yang didukung oleh sistem kelembagaan dan regulasi di tingkat daerah dan partisipasi aktif masyarakat.
- Diterapkannya RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang secara konsisten sehingga tercipta tata ruang yang produktif, aman, nyaman, dan berkelanjutan.

3) Terwujudnya masyarakat Kepulauan Maluku yang adil dan demokratis ditandai oleh hal-hal berikut:

- Berkurangnya kesenjangan pembangunan sarana dan prasarana antarwilayah di Provinsi Maluku.
- Terwujudnya tata kelola pelayanan publik yang berkualitas sesuai Standar Pelayanan Minimum.
- Terwujudnya supremasi hukum dan hak asasi manusia yang didukung tata hukum daerah kepulauan yang mengakomodasikan nilai-nilai hukum adat
- Terwujudnya nilai-nilai demokrasi yang menitikberatkan pada prinsip-prinsip toleransi, non-diskriminasi, dan kemitraan
- Terwujudnya stabilitas kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan nilai-nilai demokrasi,

1.4.4. Rencana Tata Ruang (RTRW) Kabupaten Seram Bagian Barat
 Tujuan RTRW Kabupaten Seram Bagian Barat yaitu “Penataan ruang wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan, sebagai bagian dari gugusan kepulauan, dengan pembangunan berbagai sektor dalam masyarakat berbudaya Maluku yang luhur.” Pengaturan tata ruang sesuai peruntukan menjadi tantangan yang harus dihadapi untuk meminimalisir

terjadinya krisis tata ruang. Penataan ruang yang baik perlu memperhatikan keterhubungan antara perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang. Tujuan tersebut diwujudkan melalui berbagai kebijakan perencanaan ruang wilayah, yaitu:

- a) Strategi Penataan Ruang Wilayah dalam rangka peningkatan aksesibilitas di dalam dan antarwilayah kabupaten, peningkatan fungsi-fungsi pelayanan sosial, ekonomi, dan budaya, peningkatan produktivitas kegiatan pertanian, perikanan, dan kehutanan, pengembangan kegiatan pariwisata dan ekonomi kreatif, pemanfaatan sumber daya alam lainnya dengan berwawasan lingkungan, pemantapan dan peningkatan fungsi kawasan lindung, pengembangan khusus pada bagian wilayah yang relatif jauh di Kepulauan Pisang dan Kepulauan Lucipara.
- b) Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat melalui rencana pengembangan sistem perkotaan.
- c) Rencana sistem jaringan prasarana yang terdiri dari sistem jaringan jalan, pelabuhan penyeberangan, pembangunan bandar udara.
- d) Rencana pola ruang di Kabupaten Seram Bagian Barat terdiri dari rencana kawasan lindung, yang meliputi Kawasan yang memberi perlindungan terhadap badan air, kawasan yang memberi perlindungan terhadap kawasan bawahannya hutan lindung, Kawasan yang memberi perlindungan terhadap Kawasan sempadan pantai, kawasan yang memberi perlindungan terhadap Kawasan sempadan Sungai, kawasan yang memberi perlindungan terhadap Kawasan Konservasi kawasan yang memberi perlindungan terhadap Kawasan Budidaya, Kawasan Pariwisata, kawasan perkotaan, kawasan perdesaan
- e) Kawasan strategis di Kabupaten Seram Bagian Barat yang terdiri dari kawasan Strategis Nasional, kawasan Strategis Provinsi Maluku di Wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat, kawasan Strategis Kabupaten Seram Bagian Barat (Dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi) dan kawasan strategis kabupaten (KSK) dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi.

Tabel 1. 1. Matriks Hubungan Antar Dokumen Perencanaan

No	RPD 2023-2026 (Tujuan dan Sasaran)	RPJMD Provinsi Tahun 2019-2024		RPJMN Tahun 2020-2024	
		Visi Misi RPJMD Provinsi	Program Unggulan	Visi Misi RPJMN	Agenda Pembangunan
		Visi : Maluku yang Terkelola Secara Jujur, Bersih dan Melayani, Terjamin dalam Kesejahteraan dan Berdaulat atas Gugusan Kepulauan		Visi : Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong	
1.	Tujuan ke-1; Terwujudnya kualitas sumberdaya manusia yang berdaya saing Sasaran: a) Meningkatnya pelestarian budaya local b) Meningkatnya pengendalian penduduk c) Meningkatnya	Misi ke-2; Meningkatkan kualitas Pendidikan dan Kesehatan, murah dan terjangkau; Tujuan; Meningkatkan kualitas SDM yang sehat, unggul dan berdaya saing	1) Penyelenggaraan pendidikan berbasis teknologi informasi 2) Program sarjana mengajar di daerah tertinggal, terdepan dan terluar 3) Pemberdayaan agen perdamaian berbasis agama dan budaya lokal 4) Beasiswa bagi mahasiswa kurang mampu/ berprestasi	Misi ke-1; Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia Arahan ke-1: Pembangunan SDM Starteginya; 1) Lanan dasar dan perlindungan social 2) Produktivitas 3) Pembangunan karakter	Agenda ke-3; Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing; Sasaran; 1) Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan menguatnya tata Kelola kependudukan; 2) Meningkatnya perlindungan sosial

No	RPD 2023-2026 (Tujuan dan Sasaran)	RPJMD Provinsi Tahun 2019-2024		RPJMN Tahun 2020-2024	
		Visi Misi RPJMD Provinsi	Program Unggulan	Visi Misi RPJMN	Agenda Pembangunan
	<p>pertumbuhan sektor Pertanian dan perikanan terhadap perekonomian</p> <p>d) Meningkatnya ketahanan pangan</p> <p>e) Meningkatnya pertumbuhan sektor Perindustrian dan perdagangan terhadap perekonomian</p>		serta dosen		<p>bagi seluruh penduduk;</p> <p>3) Terpenuhinya layanan dasar;</p> <p>4) Meningkatnya kualitas anak, perempuan dan pemuda;</p> <p>5) Terwujudnya pengentasan kemiskinan;</p> <p>6) Meningkatnya produktivitas dan daya saing.</p>
2.	<p>Tujuan ke-2; Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi</p> <p>Sasaran;</p> <p>1) Meningkatnya pertumbuhan sektor pertanian dan perikanan</p> <p>2) Meningkatnya ketahanan pangan</p> <p>3) Meningkatnya sektor perindustrian dan</p>	<p>Misi ke-3; Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan;</p> <p>Tujuan :</p> <p>1) Meningkatkan kualitas dan daya saing pembangunan ekonomi berkelanjutan;</p> <p>2) Meningkatkan</p>	<p>1) Revitalisasi BUMD;</p> <p>2) Satu produk satu desa;</p> <p>3) Gerakan ekonomi kreatif berbasis potensi lokal wilayah;</p> <p>4) Revitalisasi tanaman rempah (pala dan cengkih);</p> <p>5) Peningkatan daya saing produk olahan perikanan; dan</p>	<p>Misi ke- 2 Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing</p> <p>Arahan ke-5 Transformasi Ekonomi</p> <p>1) Industrialisasi</p> <p>2) Pengembangan destinasi unggulan</p> <p>3) Penguatan ekonomi kreatif dan ekonomi</p>	<p>Agenda Pembangunan: Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;</p> <p>Sasaran;</p> <p>1) Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi</p>

No	RPD 2023-2026 (Tujuan dan Sasaran)	RPJMD Provinsi Tahun 2019-2024		RPJMN Tahun 2020-2024	
		Visi Misi RPJMD Provinsi	Program Unggulan	Visi Misi RPJMN	Agenda Pembangunan
	perdagangan 4) Meningkatnya pertumbuhan sektor pariwisata 5) Meningkatnya realisasi investasi	kesejahteraan social masyarakat; 3) Meningkatkan ketahanan lingkungan yang berkelanjutan.	6) Tata niaga produk pertanian dan perikanan (sistem resi gudang).	digital	pembangunan ekonomi yang berkelanjutan; dan 2) Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor dan daya saing perekonomian. 3) Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan; dan 4) Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor dan daya saing perekonomian.
3.	Tujuan ke-3; Menurunnya Kemiskinan 1) Menurunnya angka pengangguran 2) Meningkatnya kontribusi sektor koperasi dan UKM terhadap perekonomian	Misi ke-3; Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan; Tujuan : 1) Meningkatkan kualitas dan daya saing	1) Revitalisasi BUMD; 2) Satu produk satu desa; 3) Gerakan ekonomi kreatif berbasis potensi lokal wilayah; 4) Revitalisasi tanaman rempah (pala dan	Misi ke-3 Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan Arahan ke-1 Pembangunan SDM Strateginya; 1) Layanan dasar dan	Agenda Pembangunan: Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;

No	RPD 2023-2026 (Tujuan dan Sasaran)	RPJMD Provinsi Tahun 2019-2024		RPJMN Tahun 2020-2024	
		Visi Misi RPJMD Provinsi	Program Unggulan	Visi Misi RPJMN	Agenda Pembangunan
		pembangunan ekonomi berkelanjutan; 2) Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat; 3) Meningkatkan ketahanan lingkungan yang berkelanjutan.	cengkih); 5) Peningkatan daya saing produk olahan perikanan; dan 6) Tata niaga produk pertanian dan perikanan (sistem resi gudang).	perlindungan sosial 2) Produktivitas 3) Pembangunan Karakter Arahan ke-3 Pembangunan Infrastruktur Strateginya; 1) Infrastruktur pelayanan dasar 2) Infrastruktur Ekonomi 3) Infrastruktur perkotaan 4) Energi dan ketenagalistrikan 5) Teknologi informasi dan komunikasi untuk transformasi digital	Sasaran; 1) Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan; dan 2) Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor dan daya saing perekonomian. 3) Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan; dan 4) Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor dan daya saing perekonomian.

No	RPD 2023-2026 (Tujuan dan Sasaran)	RPJMD Provinsi Tahun 2019-2024		RPJMN Tahun 2020-2024	
		Visi Misi RPJMD Provinsi	Program Unggulan	Visi Misi RPJMN	Agenda Pembangunan
4.	<p>Tujuan ke-4; Meningkatnya Infrastruktur Dasar dan Pengembangan wilayah yang berkelanjutan Sasaran</p> <p>1) Meningkatnya infrastruktur pelayanan dasar yang memadai</p> <p>2) Meningkatnya infrastruktur pendukung pengembangan ekonomi yang memadai</p> <p>3) Meningkatnya kualitas kinerja lalu lintas dan angkutan jalan</p> <p>4) Meningkatnya keserasian pembangunan antar sektor</p> <p>5) Meningkatnya kualitas air, udara dan lahan</p>	<p>Misi ke-4; Peningkatan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau;</p> <p>Tujuan; Meningkatkan pemerataan infrastruktur dan konektivitas wilayah kepulauan. Meningkatkan pemerataan infrastruktur dan konektivitas wilayah kepulauan.</p>		<p>Misi ke-3; Pembangunan yang merata dan berkeadilan</p> <p>Misi ke-9 Sinergi Pemerintahan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan</p> <p>Arahan ke-2 Pembangunan Infrastruktur</p> <p>Strateginya;</p> <p>1) Infrastruktur pelayanan dasar</p> <p>2) Infrastruktur Ekonomi</p> <p>3) Infrastruktur perkotaan</p> <p>4) Energi dan ketenagalistrikan</p> <p>5) Teknologi informasi dan komunikasi untuk transformasi digital</p>	<p>Agenda Pembangunan ke-2: Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan</p> <p>Menurunnya kesenjangan antar wilayah dengan mendorong transformasi dan akselerasi pembangunan wilayah KTI yaitu Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua dan tetap menjaga momentum pertumbuhan di wilayah jawa, bali dan sumatera.</p>

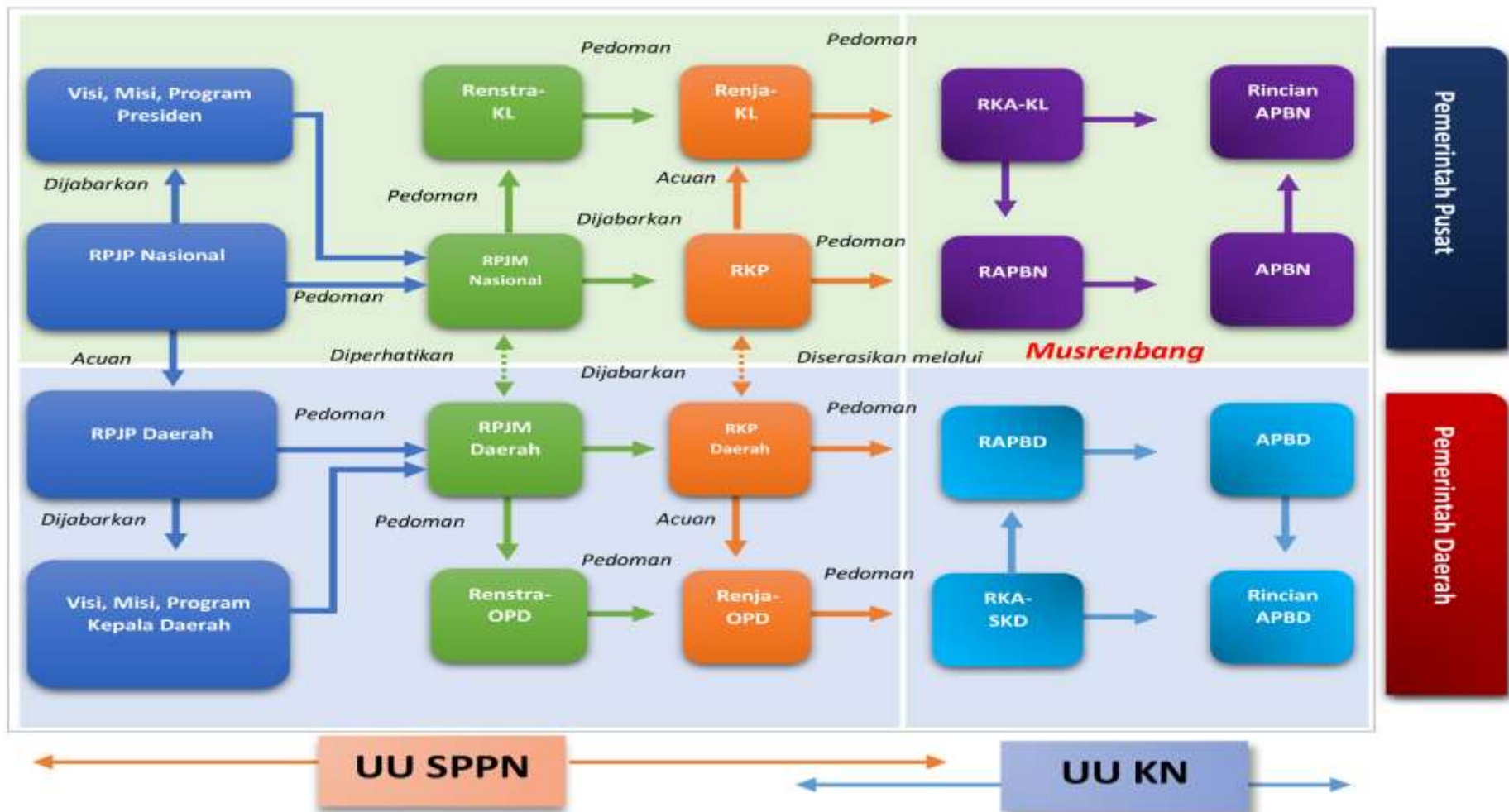
No	RPD 2023-2026 (Tujuan dan Sasaran)	RPJMD Provinsi Tahun 2019-2024		RPJMN Tahun 2020-2024	
		Visi Misi RPJMD Provinsi	Program Unggulan	Visi Misi RPJMN	Agenda Pembangunan
5.	<p>Tujuan: ke-5 Meningkatnya keberdayaan sosial masyarakat</p> <p>Sasaran: Meningkatnya kesejahteraan PMKS</p>	<p>Misi ke-3 Pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan</p> <p>Tujuan : 1) Meningkatkan kualitas dan daya saing pembangunan ekonomi berkelanjutan; 2) Meningkatkan kesejahteraan social masyarakat;</p>	<p>Program Unggulan; 1) Gerakan ekonomi kreatif berbasis potensi local wilayah 2) Revitalisasi tanaman rempah (pala dan cengkih) 3) Penigkatan daya saing produk olahan perikanan 4) Tata niaga prodik pertanian dan perikanan</p>	<p>Misi ke-5 Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa</p> <p>Arahan ke-5 Transformasi ekonomi</p> <p>Strateginya; 1) Pengembangan detinasi unggulan 2) Penguatan ekonomi kreatif dan ekomi digital</p>	<p>Agenda ke-1 Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan</p> <p>Sasarannya; 1) Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumberdaya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. 2) Meningkatnya nilai tambah lapangan kerja, investasi, ekspor dan daya saing perekonomian</p>
6.	<p>Meningkatnya kualitas pencegahan dan penanganan bencana</p> <p>Sasaran; Menurunnya resiko bencana</p>	<p>Misi Ke-3 Pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan</p> <p>Tujuan ke-3 Meningkatkan ketahanan lingkungan yang</p>	-	<p>Misi ke-4 Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan</p>	<p>Agenda ke-6 Membangun lingkungan hidup, Meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim</p> <p>Sasarannya</p>

No	RPD 2023-2026 (Tujuan dan Sasaran)	RPJMD Provinsi Tahun 2019-2024		RPJMN Tahun 2020-2024	
		Visi Misi RPJMD Provinsi	Program Unggulan	Visi Misi RPJMN	Agenda Pembangunan
		berkelanjutan.			1) Peningkatan kualitas lingkungan 2) Peningkatan ketahanan bencana dan iklim 3) Pembangunan rendah karbon
7.	Menurunnya kesenjangan gender Sasaran; Meningkatnya keberdayaan perempuan dan anak	Misi ke-6 Mewujudkan SDM yang professional, kreatif, mandiri dan berprestasi Tujuan : Meningkatkan masyarakat yang trampil, kreatif dan kompetitif	-	Misi ke-7 Perlindungan segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga Arahkan ke-1 Pembangunan SMD Strategi ke-3 Pembangunan karakter	Agenda ke-4 Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan Sasarannya 1) Menguatnya revolusi mental dan pembinaan Ideologi Pancasila untuk memantapkan ketahanan budaya 2) Meningkatkan pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan
8.	Meningkatkan kualitas tatakelola pemerintahan Sasaran;	Misi ke-1 Mewujudkan birokrasi tata Kelola pemerintahan yang baik dan bersih	1) Rapat koordinasi bulanan Gubernur dan wakil Gubernur dengan para Bupati/	Misi ke-6 Penegakan system hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan	Agenda ke-7 Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan

No	RPD 2023-2026 (Tujuan dan Sasaran)	RPJMD Provinsi Tahun 2019-2024		RPJMN Tahun 2020-2024	
		Visi Misi RPJMD Provinsi	Program Unggulan	Visi Misi RPJMN	Agenda Pembangunan
	1) Terwujudnya pengelolaan keuangan yang akuntabel 2) Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah 3) Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan public 4) Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik	Tujuan; Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Walikota 2) Koordinasi Provinsi dan Kabupaten/ kota berbasis e government 3) Integrasi e-planning e-budgeting 4) Pertemuan rutin dan bulanan dengan para pemangku kepentingan (coffee morning)	terpercaya Misi ke-8 Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya Arahannya ke-3 Pederhanaan regulasi Arahannya ke-4 Reformasi birokrasi	public Sasarannya; Menguatnya penguatan dan terlaksananya transformasi pelayanan publik
9.	Optimalisasi kemandirian desa Sasaran; Meningkatnya keberdayaan Desa	Misi ke-3 Pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan; Tujuan Meningkatnya kualitas dan daya saing pembangunan ekonomi berkelanjutan	-	Misi ke-2 Struktur Ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing Arahannya ke-1 Pembangunan SDM - Produktivitas	Agenda ke-1 Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan Sasarannya; 1) Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumberdaya ekonomi

No	RPD 2023-2026 (Tujuan dan Sasaran)	RPJMD Provinsi Tahun 2019-2024		RPJMN Tahun 2020-2024	
		Visi Misi RPJMD Provinsi	Program Unggulan	Visi Misi RPJMN	Agenda Pembangunan
					sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan 2) Meningkatnya nilai tambah lapangan kerja, investasi, ekspor dan daya saing perekonomian
10.	Meningkatnya kehidupan masyarakat yang harmonis Sasaran; 1) Meningkatnya suasana konsif 2) Meningkatnya ketertiban dan ketentraman	Misi ke-5 Meningkatnya suasana kondusif Tujuan; Meningkatnya pembangunan daerah berbasis kebudayaan dan pariwisata	Festival budaya tahunan	Misi ke-7 Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga	Agenda ke-4 Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan Sasarannya Menguatnya revolusi mental dan pembinaan idiologi Pancasila utk memantapkan ketahanan budaya

Gambar 1. 1. Hubungan Antar Dokumen Perencanaan



1.5. Sistematika Penyusunan

Sebagaimana diatur di dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022, sistematika Dokumen RPD Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2023- 2026 terdiri dari sembilan bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Secara garis besar memuat gambaran umum kondisi daerah, terutama capaian kinerja pembangunan periode 2018-2022 beserta analisisnya. Bab ini disajikan berdasarkan aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, serta aspek daya saing daerah.

BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Gambaran keuangan daerah yang disajikan di dalam Bab III terdiri dari kinerja keuangan masa lalu, kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu, dan kerangka pendanaan periode 2017-2022.

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

Bab ini memuat identifikasi permasalahan Pembangunan Daerah yang berbasis analisis capaian kinerja di Bab II. Permasalahan Pembangunan Daerah kemudian menjadi dasar perumusan isu strategis daerah, yang memperhatikan pula isu strategis Internasional, Nasional, Provinsi Maluku.

BAB V TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini memuat narasi tujuan dan sasaran pembangunan yang disertai dengan indikator tujuan dan sasaran yang jelas, ringkas, mudah dipahami dan terukur.

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS

Menjelaskan strategi yang dipilih untuk mencapai sasaran, dan arah kebijakan dari masing-masing strategi, dan program prioritas dirumuskan dari masing-masing strategi sebagai upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran.

BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Bab ini menjelaskan kerangka pendanaan pembangunan daerah dan program perangkat daerah yang memuat indikasi program serta pagu indikatif program dan sebagai acuan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah.

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Bab ini berisi Tentang uraian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang dirumuskan ke dalam Indikator Kinerja Utama Daerah, Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah, dan Indikator Kinerja Kunci.

BAB IX PENUTUP

Memuat pedoman transisi yang diperlukan dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan serta kaidah pelaksanaan RPD Tahun 2023-2026.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

Sub bab ini akan mendeskripsikan kondisi Daerah baik dari aspek geografi maupun demografi. Penjelasan pada aspek geografi meliputi karakteristik lokasi dan wilayah, potensi pengembangan wilayah, dan wilayah rawan bencana. Sedangkan aspek demografi akan mendeskripsikan struktur dan jumlah penduduk di Daerah.

2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

Karakteristik lokasi dan wilayah akan memberikan gambaran mengenai kondisi geografis Daerah. Sub bab ini akan menjelaskan berbagai hal terkait luas dan batas wilayah administratif, letak kondisi geografis, topografi, hidrologi, klimatologi, dan penggunaan lahan.

2.1.1.1. Luas dan Batas Wilayah Administratif

Kabupaten Seram Bagian Barat merupakan salah satu kabupaten di Maluku yang memiliki luas wilayah 6,948,40 Km2. Wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat terbagi ke dalam 11 wilayah administrasi kecamatan yang terdiri dari 92 desa, 11 desa persiapan dan 116 Dusun. Berikut merupakan batas-batas wilayah administratif Kabupaten Seram Bagian Barat.

- Sebelah Utara : Laut Seram
- Sebelah Selatan : Laut Banda
- Sebelah Barat : Laut Buru
- Sebelah Timur : Kabupaten Maluku Tengah

Adapun pembagian administrasi, luas wilayah kecamatan dan jarak antar Ibu Kota secara detail di Kabupaten Seram Bagian Barat adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1. Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Seram Bagian Barat

No	Kecamatan	Ibu Kota Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Jarak (Km)
1.	Seram Barat	Piru	503,33	3
2.	Huamual	Luhu	1.162,99	53

No	Kecamatan	Ibu Kota Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Jarak (Km)
3.	Kairatu	Kairatu	329,65	52
4.	Kairatu Barat	Kamal	132,25	30,6
5.	Inamosol	Honitetu	504,61	76
6.	Amalatu	Latu	665,35	100
7.	Elpaputih	Elpaputih	1.165,74	135
8.	Taniwel	Taniwel	1.181,32	76
9.	Taniwel Timur	Uwen Pante	733,80	105,2
10.	Huamual Belakang	Waesala	409,65	41
11.	Kepulauan Manipa	Masawoy	159,71	111

Sumber : BPS, Kabupaten Seram Bagian Barat Dalam Angka, Tahun 2020

2.1.1.2. Letak Kondisi Geografis

Kabupaten Kabupaten Seram Bagian Barat sebagian besar berada pada wilayah pulau Seram, secara geografis terletak diantara 109°-7016’ lintang selatan dan 127022’-1290 1’ Bujur Timur. Kabupaten Seram Bagian Barat juga dikenal sebagai daerah kepulauan karena terdiri dari 58 buah pulau. Karena terdiri dari pulau besar dan pulau-pulau kecil maka, Kabupaten Seram Bagian Barat lebih dikenal dengan kabupaten bahari, dengan potensi unggulan bidang Pariwisata, karena letaknya strategis karena berada pada jalur lntas kabupaten Maluku tengah, Seram Bagian Timur dan Kota Ambon, sehingga kedepan akan memberi dampak bagi pertumbuhan ekonomi dan pergerakan arus barang dan jasa.

2.1.1.3. Topografi

Secara umum wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat didominasi oleh bentang lahan berketinggian 0 – 1.000 mdpl, sedangkan ketinggian tempat di atas 1000 mdpl tidak terlalu banyak ditemui di wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat. Secara topografi wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat memiliki 67,58% dari luas wilayah berada pada ketinggian 0 – 1.000 mdpl dan 32,42% berada di atas 1.000 mdpl.

Dari semua klasifikasi ketinggian diperoleh proporsi lahan

Kabupaten Seram Bagian Barat berada pada wilayah dataran rendah dengan selang topografi 0 -250 mdpl sebesar 24,26% atau seluas 120.519,20 Ha dengan sebaran di Kecamatan Seram Bagian Barat, Huamual Belakang dan Taniwel. Sedangkan daerah dengan dataran tinggi > 1000 mdpl dominasi berada di Kecamatan Elaputih, Taniwel, Inamosol dan Taniwel Timur. Adapun topografi menurut selang ketinggian dalam wilayah kecamatan di Kabupaten Seram Bagian Barat dapat dilihat pada **Tabel 2.2.** :

RPD Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2023-2026

Tabel 2.2. Topografi Menurut Selang Ketinggian Dalam Wilayah Kecamatan di Kabupaten Seram Bagian Barat

No	Kecam- atan	Luas Berdasarkan Peta (dalam Ha)												Total
		Topografi Dengan Selang Ketinggian m.d.p.l												
		0-250	250-500	500-750	750-1000	1000-1250	1250-1500	1500-1750	1750-2000	2000-2250	2250-2500	2500-2750	2750-3000	
1.	Kairatu	8.522,21	2.294,50	1.870,05	1.386,08	1.182,50	931,09	734,01	274,19	81,20	-	-	-	17.275,84
2.	Kairatu Barat	4.913,05	4.840,25	3.733,99	1.967,63	1.383,18	694,39	67,81	-	-	-	-	-	17.600,31
3.	Amalatu	8.919,71	5.917,02	5.299,72	3.828,04	2.332,92	1.808,55	1.699,92	1.225,12	483,80	242,71	12,94	-	31.770,47
4.	Inamosol	3.921,07	8.291,35	9.491,91	9.014,06	10.350,09	7.698,92	5.394,89	2.355,25	503,42	108,35			57.129,31
5.	Elpaputih	8.740,07	9.768,44	9.809,32	12.356,24	12.650,68	8.880,59	6.732,52	4.065,59	2.422,53	1.236,93	387,49	42,98	77.093,38

No	Kecamatan	Luas Berdasarkan Peta (dalam Ha)												Total
		Topografi Dengan Selang Ketinggian m.d.p.l												
		0-250	250-500	500-750	750-1000	1000-1250	1250-1500	1500-1750	1750-2000	2000-2250	2250-2500	2500-2750	2750-3000	
6.	Seram Barat	30.347,70	16.192,58	8.223,27	5.654,18	5.233,96	4.244,31	3.398,16	901,04	15,11	-	-	-	74.210,31
7	Huamual	8.196,55	8.001,55	7.706,52	5.979,98	4.616,86	3.543,21	1.821,77	495,67	20,43	-	-	-	40.382,54
8.	Huamual Belangan	25.116,81	9.539,45	6.384,76	4.186,65	2.506,94	1.111,98	235,58	69,63	-	-	-	-	49.151,80
9.	Kepulauan Manipa	6.179,23	3.264,56	1.682,81	625,40	43,41	-	-	-	-	-	-	-	11.795,40
10.	Taniwel	10.190,85	9.665,46	13.676,29	11.849,92	9.043,14	8.350,90	7.580,16	5.703,59	2.203,38	253,03	0,49	-	78.517,20

No	Kecam- atan	Luas Berdasarkan Peta (dalam Ha)												Total
		Topografi Dengan Selang Ketinggian m.d.p.l												
		0-250	250-500	500-750	750-1000	1000-1250	1250-1500	1500-1750	1750-2000	2000-2250	2250-2500	2500-2750	2750-3000	
11.	Taniwel Timur	5.471,95	3.973,72	4.317,55	4.407,22	3.692,56	4.230,83	3.921,87	4.460,92	4.540,45	2.582,69	246,87	-	41.846,62
Kab. Seram Bagian Barat		120.519,20	81.748,89	72.196,16	61.255,41	53.036,23	41.494,78	31.586,70	19.551,01	10.270,32	4.423,70	647,79	42,98	496.773,18

Sumber : Peta Topografi Wilayah Kab. Seram Bagian Barat

2.1.1.4. Kemiringan Lahan

Wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat didominasi oleh kelas kemiringan lahan 25 - 40 %), yakni seluas 168.410,97 Ha atau 33,90% tersebar di Kecamatan Elpaputih, Taniwel, Inamosol, Huamual dan Seram Barat. Sedangkan kelas kemiringan lahan dominasi berikutnya pada kemiringan lereng 15-25% seluas 125.872,58 Ha atau 25,24% yang tersebar di Kecamatan Taniwel, Seram Barat, Inamosol dan Elpaputih.

Berdasarkan kelas klasifikasi lahan tersebut maka Kabupaten Seram Bagian Barat berada pada wilayah dengan morfologi berombak hingga berbukit pada bagian timur, barat dan selatan wilayah.

Tabel 2.3. Kemiringan Lahan dan Karakteristik Morfologi Dalam Wilayah Kecamatan di Kabupaten Seram Bagian Barat

No	Kecamatan	Luas Berdasarkan Peta (dalam Ha)					Total
		Kemiringan Lahan dengan Selang Persentase Kemiringan					
		0,2%	2-15%	15-25%	25-40%	>40%	
1.	Kairatu	2.987,48	5.058,86	2.824,98	4.016,64	2.387,90	17.275,84
2.	Kairatu Barat	1.018,62	6.366,27	5.002,94	4.557,53	654,94	17.600,30
3.	Amalatu	928,50	7.316,22	7.548,18	10.000,62	5.976,95	31.770,47
4.	Inamosol	245,71	14.326,24	18.056,03	20.230,21	4.271,13	57.129,31
5.	Elpaputih	1.232,33	12.916,04	18.019,12	35.178,04	9.747,86	77.093,38
6.	Seram Barat	6.185,74	28.801,22	19.854,74	16.834,93	2.533,68	74.210,31
7	Huamual	844,77	6.060,96	9.519,97	18.137,90	5.818,95	40.382,54
8.	Huamual Belakang	4.151,80	16.631,00	12.230,87	12.194,31	3.943,82	49.151,80
9.	Kepulauan	775,9	3.789,	4.050,2	2.950,	229,3	11.795

No	Kecamatan	Luas Berdasarkan Peta (dalam Ha)					Total
		Kemiringan Lahan dengan Selang Persentase Kemiringan					
		0,2%	2-15%	15-25%	25-40%	>40%	
	Manipa	4	44	6	43	3	,40
10	Taniwel	2.198,21	18.178,18	21.090,51	27.155,05	9.895,25	78.517,19
11	Taniwel Timur	1.271,12	5.779,98	7.675,00	17.155,32	9.965,21	41.846,62
Kab. Seram Bagian Barat		21.840,20	125.224,42	125.872,58	168.410,97	55.425,01	496.773,18
Persentase (%)		4,40	25,21	25,34	33,90	11,16	100,00
Morfologi		Datar	Berombak	Bergelombang	Berbukit	Bergunung	Datar

Sumber : Peta Topografi Wilayah Kab. Seram Bagian Barat

2.1.1.5. Hidrologi

Kabupaten Seram Bagian Barat memiliki sumberdaya air yang cukup melimpah, baik sumberdaya air permukaan maupun sumberdaya air bawah tanah. Dengan adanya curah hujan yang lebih besar 2000 mm/tahun dapat dipastikan bahwa semua sungai-sungai yang mengalir di daerah ini adalah bersifat permanenatau selalu berair sepanjang tahunnya.

a. Pola Air Sungai

Sungai-sungai sebagai salah satu unsur geografi seperti telah dijelaskan sebelumnya, pada umumnya membentuk pola aliran dendritik (mendaun) yang mengalir ke arah utara dan selatan, serta ke barat, sedangkan sungai-sungai yang mengalir di pulau Buano, Pulau Kelang dan Pulau Manipa cenderung radier (melingkar)keseluruh arah wilayah pulau-pulau tersebut. Adapun sungai-sungai yang mengalir di semenanjung Huamual adalah mengalir timur – barat, mengingat wilayah ini menjorok, melintang utara - selatan.

Wilayah tangkapan hujan dari pola aliran tersebut dapat dibagi menjadi:

- Pada daerah Kabupaten Seram Bagian Barat, batas pemisah air morfologi ("morphological water devided")

adalah berarah relatif Timur – Barat,

- Pola Semenanjung Huamual batas air pemisah morphologinya berarah Utara – Selatan.
- Ketika pulau lainnya seperti Pulau Buano, Pulau Kelang, dan Pulau Manipa puncak air cenderung mengerut di bagian tengah pulau-pulau tersebut.

b. Genetika Aliran Sungai

Sistem Genetika aliran air dikaitkan dengan pola struktur pelapisan batuan sedimen yang tedapat diwilayah ini. Secara umum sunga-sungai di Kabupaten Seram Bagian Barat mempunyai genetika aliran seperti berikut:

- Pada daratan Pulau Seram Bagian Barat adalah aliran sungai mengikuti lereng kemiringan ("dipsloipe") dari batuan sedimen, sehingga genetika aliran sungainya disebut juga sebagai sungai konsekuen, baik yang mengalir di sebelah Utara maupun sebelah selatannya.
- Pada daratan semenanjung Huamual, aliran sungai cenderung mengikuti jurus (strike") pelapisan batuan sedimen, sehingga genetika alirannya disebut juga sebagai sungai resekuen.
- Pada ketiga Pulau (Pulau Buano, Pulau Kelang, dan Pulau Manipa) adalah kombinasi genetika aliran sungai konsekuen dan resekuen seperti tersebut diatas.

Pola aliran dan genetika aliran sungai tersebut diatas dapat mempengaruhi pola erosi sungai didaerah ini, dimana keduanya mempunyai tingkat erosi yang sangat tinggi bila curah hujan jatuh dan mengalir pada kawasan permukaan yang tidak ada tutupan vegetasinya.

c. Daerah Aliran Sungai

Sumberdaya air disamping berfungsi untuk kehidupan sehari-hari juga berfungsi untuk berusaha dalam rangka meningkatkan kesejahteraan manusia seperti pertanian, perikanan, perindustrian, pembangkit tenaga listrik dan sebagainya. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kedaan hidrologi yaitu curah hujan, tipe iklim dan sungai.

Kondisi hidrologi di Kabupaten Seram Bagian Barat, meliputi potensi air tanah dan potensi air sungai, dimana potensi air tanah di Kabupaten Seram Bagian Barat cukup baik. Terdapat 46 (empat puluh enam) Daerah Aliran Sungai (DAS) di Kabupaten

Seram Bagian Barat dengan DAS terluas DAS Tala seluas 77.296,69 Ha atau 15,56% dari luas wilayah mencakup wilayah Kecamatan Elpaputih, Inamosol, Seram Barat, Taniwel dan Taniwel dengan total luas Daerah Aliran Sungai (DAS) yaitu 496.774,24 Ha.

dari jumlah sungai dan persebarannya yang mencakup keseluruhan wilayah maka Kabupaten Seram Bagian Barat memiliki potensi air permukaan yang sangat besar, dan dapat dimanfaatkan untuk keperluan domestik (air bersih dan air baku), serta untuk kegiatan pertanian (irigasi) untuk tanaman pangan lahan basah.

d. Geohidrologi

Air tanah merupakan sumber air yang berbentuk mata air atau sumur. Sumur dapat berupa sumur dangkal (kedalaman 5-20 meter) atau sumur dalam (deep well) dengan kedalaman rata-rata 250 meter. Keterdapatan air tanah di Kabupaten Seram Bagian Barat terdiri dari mata air (air tanah tertekan) dan air tanah bebas. Air tanah tersebut terdapat dalam berbagai sistem akuifer pada litologi yang berbeda-beda, dan akan muncul di permukaan tanah berupa mata air atau dengan menyadap akuifer melalui pembuatan sumur. Adapun persebaran akuiter air tanah dibagi menjadi 6 (enam) karakter dengan air langka dan akuifer produktivitas kecil setempat berarti tersebar dominan di Kabupaten Seram Bagian Barat.

Untuk Air Langka terdapat di bagian tengah sampai selatan wilayah yang berbatasan dengan Kabupaten Maluku Tengah, Semenanjung Huamual Bagian Tengah, hampir seluruh Pulau Manipa dan Pulau Kelang Bagian Timur dan Barat, Kairatu, Kairatu Barat, Amalatu, Inamosol, Elpaputih, Huamual dan Taniwel Timur dan produktif kecil setempat berarti tersebar di Seram Barat, Huamual Belakang, Huamual, Taniwel, Kepulauan Manipa, Kairatu Barat, Inamosol, Elpaputih. Sedangkan keterdapata air dengan produktifitas sedang hingga tinggi tersebar dari Piru ke arah Timur dari bagian tengah Kabupaten Seram Bagian Barat sampai ke perbatasan Kabupaten Maluku Tengah, bagian utara semenanjung Huamual dan pulau Manipa serta Pulau Kelang

Tabel 2.4. Sebaran Karakter Geohidrologi Menurut Kecamatan di Kabupaten Seram Bagian Barat

No	Kecamatan	Luas Berdasarkan Peta (dalam Ha)						Total
		Langka	Prod. Kecil Set. Berarti	Produktif Sedang	Prod. Sedang/ Sdg sp Tinggi	Prod. Sedang dg Peny. Luas	Setempat Produktif	
1.	Kairatu	7.887,72	2.238,59	2.651,34	952,99	2.561,20	984,00	17.275,84
2.	Kairatu Barat	9.001,98	4.045,41	25,63	1.359,17	2.890,52	277,60	17.600,30
3.	Amalatu	23.530,43	2.839,59	5.180,41	-	220,03	-	31.770,47
4.	Inamosol	48.039,24	8.595,75	-	44,40	287,61	162,33	57.129,32
5.	Elpaputih	62.841,87	9.024,04	4.051,91	1.100,49	74,92	-	77.093,23
6.	Seram Barat	21.689,71	33.765,81	9.500,48	94,66	2.421,09	6.738,56	74.210,31
7	Huamual	26.302,79	7.076,04	4.797,72	1.757,04	-	448,94	40.382,53
8.	Huamual Belakang	14.082,32	19.420,64	2.123,24	6.248,54	-	7.277,07	49.151,81

No	Kecamatan	Luas Berdasarkan Peta (dalam Ha)						Total
		Langka	Prod. Kecil Set. Berarti	Produktif Sedang	Prod. Sedang/ Sdg sp Tinggi	Prod. Sedang dg Peny. Luas	Setempat Produktif	
9.	Kepulauan Manipa	3.496,43	6.823,41	1.168,62	-	-	306,95	11.795,40
10	Taniwel	27.579,29	30.145,30	3.450,74	776,31	1.779,57	14.785,99	78.517,20
11	Taniwel Timur	37.444,55	1.428,22	1.762,85	-	951,41	259,66	41.846,68
Kab. Seram Bagian Barat		21.840,20	125.224,42	125.872,58	168.410,97	55.425,01		496.773,18
Persentase (%)		4,40	25,21	25,34	33,90	11,16		100,00
Morfologi		Datar	Berombak	Bergelombang	Berbukit	Bergunung		Datar

Sumber : Peta Topografi Wilayah Kab. Seram Bagian Barat

a. **Cekungan Air Tanah (CAT)**

Berdasarkan peta Cekungan Airtanah yang dikeluarkan oleh Direktorat Tata Lingkungan Geologi dan Kawasan Pertambangan (DTLGKP) di Wilayah Kabupaten Seram Barat, terdapat 4 (empat) cekungan air tanah, sebaran dan potensi ketersediaan air tanah di Kabupaten Seram Barat dapat dilihat pada berikut :

Tabel 2.5. Cekungan Air Tanah di Kabupaten Seram Bagian Barat

Nama CAT	Kecamatan	Litologi Akuifer	Peringkat Penyelidikan	Jumlah Air Tanah (juta m3/thn)	
				Bebas (Q1)	Tertekan (Q2)
Buano	Huamual Belakang	- Batugamping koral dan batu-gamping kalsilutit	Diketahui	68	-
Kawa	Seram Barat dan Taniwel	- Batugamping koral dan batu-gamping kalsilutit, - Batupasir dan konglomerat	Diketahui	151	-
Liaela	Huamual	- Batugamping koral	Diketahui	34	-
Waesamu	Kairatu dan Kairatu Barat	- Endapan aluvium : kerakal, kerikil, lanau dan pasir - Batupasir dan konglomerat	Diketahui	48	-

Sumber : RISPAM Kab. Seram Bagian Barat.

2.1.1.6. **Batimetri**

Kondisi Batimetri kelautan (Laut lepas, Selat dan Teluk) yang mengitari Kabupaten Seram Bagian Barat termasuk ketiga pulau-pulau terbesarnya dapat diuraikan seperti berikut :

- a. Berdasarkan kontur dapat diuraikan bahwa kondisi pantai Kabupaten Seram Bagian Barat bertipe pantai yang curam, karenakedalaman laut yang terdekat dengan pantai adalah 50 – 100 m, hal ini ditunjukkanoleh warna laut biru tua.
- b. Demikian pula dengan Teluk Piru, Teluk Latira, Teluk Elputih

(batas dengan Kabupaten Maluku Tengah), TelukHatuputih, Selat Buano, Selat Seram, dan Selat Kelang, serta Selat Manipa (batas dengan Kabupaten Buru) memiliki kedalaman diatas 100 m.

Demikian kondisi tersebut, maka desa-desa maupun dusun yang ada pada pesisir pantai dengan daya dukung sumberdaya alam potensial sebagai komoditas unggulan untuk di ekspor keluar daerah, maka sangat memungkinkan dapat dibangun pelabuhan-pelabuhan alam yang tidak terganggu oleh kedangkalan pantai. Disisi lain bahwa lipatan laut yang sangat luas yang mengelilingi Kabupaten Seram Bagian Barat dari utara – barat – selatan sampai ke timur adalah memendam sumberdaya hayati kelautan yang sangat besar untuk di olah sebagai alat untuk mensejahterakan masyarakat daerah ini.

2.1.1.7. Klimatologi

Parameter klimatologi Kabupaten Seram Bagian Barat adalah tipe iklim, curah hujan dan suhu udara. Kondisi iklim wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat dan sekitarnya secara umum ditandai dengan hari hujan dan curah hujan yang relatif tinggi dan sangat dipengaruhi oleh angin musim, dimana kondisi iklim Musim barat umumnya berlangsung pada bulan Desember sampai dengan bulan Maret, sedangkan pada bulan April merupakan masa transisi ke musim Timur. Musim Timur berlangsung pada bulan Mei sampai dengan bulan Oktober disusul oleh masa pancaroba pada bulan November yang merupakan transisi ke musim Barat.

Suhu tertinggi di kabupaten Seram Bagian Barat tercatat sebesar 35^o C di bulan Februari dan April, untuk suhu terendah tercatat sebesar 20^o C di bulan September dan Desember 2020. Di tahun 2020, curah hujan tertinggi ada di bulan Juni yaitu sebesar 621 mm dan curah hujan terendah ada di bulan Januari sebesar 52 mm. Curah hujan Kabupaten Seram Bagian Barat dengan curah hujan 2000 – 3000 mm/tahun. Penyinaran Matahari rata-rata 60 % dengan tekanan udara pertahun di bawah rata-rata dan kelembaban nisbi rata-rata 85 %. Kecepatan angin rata-rata 2 knot dengan arah angin terbanyak dari arah Tenggara, sedangkan kecepatan angin terbesar terjadi pada Bulan Agustus sebesar 8 knot. Arah angin terbanyak pada saat kecepatan angin terbesar adalah dari arah Barat.

**Tabel 2.6. Kondisi Klimatologi Rata – Rata Tahun 2020
Kabupaten Seram Bagian Barat**

Bulan	Suhu Udara (OC)	Kelembaban Udara (%)	Tekanan Udara (mb)	Kecepatan Angin (Knot)	Penyinaran Matahari (%)	Curah Hujan (mm)	Hari Hujan
Januari	28	79	1009,9	2	76	52	7
Februari	28	79	1010,8	2	70	57	8
Maret	27	85	1010,7	1	60	200	18
April	27	86	1010,8	2	69	67	19
Mai	27	88	1010,4	2	53	184	21
Juni	26	91	1010,8	2	19	621	29
Juli	25	91	1010,3	2	13	505	30
Agustus	25	90	1011,4	3	34	497	24
Septem ber	26	93	1010,7	3	34	451	27
Oktober	27	88	1010,0	3	59	251	19
Novemb er	28	86	1009,9	2	62	74	18
Desemb er	28	84	1008,6	2	60	188	20

Sumber : BPS Kabupaten Seram Bagian Barat Dalam Angka, Tahun 2021

Tabel 2.7. Sebaran Curah Hujan Kabupaten Seram Bagian Barat

No	Kecamatan	Curah Hujan (mm/tahun)		Luas (Ha)
		2000 - 2500 mm	2500 - 3000 mm	
1.	Elpaputih	24.746,39	52.346,86	77.093,25
2.	Huamual	-	44.301,80	44.301,80
3.	Huamual Belakang	13.142,13	36.009,68	49.151,81
4.	Inamosol	36.578,25	20.551,07	57.129,32
5.	Kairatu		17.275,84	17.275,84
6.	Kairatu Barat	14.802,91	2.797,39	17.600,31
7.	Kairatu Timur		31.770,46	31.770,46
8.	Pulau Manipa	8.894,45	2.900,95	11.795,40
9.	Seram Barat	73.455,62	754,67	74.210,30
10.	Taniwel	78.517,21		78.517,21
11.	Taniwel Timur	38.239,34	3.607,32	41.846,65
	Luas (Ha)	288.376,30	212.316,05	212.316,05

No	Kecamatan	Curah Hujan (mm/tahun)		Luas (Ha)
		2000 - 2500 mm	2500 - 3000 mm	
	Proporsi (%)	57,60	42,40	100,00s

Sumber : Interpretasi Peta Curah Hujan Kab. Seram Bagian Barat, RTRWKabupaten Seram Bagian Barat 2010-2030.

2.1.1.8. Penggunaan Lahan

Pola penggunaan lahan di Kabupaten Seram Bagian Barat yang termuat dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Seram Bagian Barat dikelompokkan menjadi 5 (lima) kawasan yaitu :

1. Kawasan pertanian lahan basah meliputi kecamatan Kairatu (Desa Waimital dan Waihatu) dan Kecamatan Seram Barat (Desa Kawa). Kawasan Lahan kering meliputi hampir seluruh wilayah Kecamatan Seram Barat, Taniwel dan Kecamatan Kairatu.
2. Kawasan Perikanan yaitu seluruh Kecamatan Waesala, Kecamatan Seram Barat (Eti, Kaibobo, Ariate) dan Kecamatan Huamual.
3. Kawasan Pemukiman meliputi hamparan dari Piru-Eti dataran Huamual di Kecamatan Seram Barat dan Dataran Waeruapa di Kecamatan Kairatu yang menghubungkan Pulau Seram dan Kota Provinsi serta Pulau-pulau sekitarnya.
4. Kawasan Pegunungan meliputi Kecamatan Kairatu dan Hunitetu (Desa Hunitetu, Rambatu, Rumberu, Manusa, Hukuanakota, Huku kecil, Watui, Abio, Buria, Riring dan Ahiolo, ohiasapalewa, Neniari, Rumahsoal, Laturake) yang merupakan potensi pengembangan komoditi dataran tinggi (Sayuran, buah-buahan).
5. Kawasan Pantai yaitu meliputi hampir seluruh kecamatan dengan potensi budidaya Perikanan dan Pariwisata.

Penggunaan lahan/penutup lahan yang paling dominan di Kabupaten Seram Bagian Barat adalah Hutan Lahan Kering Sekunder, yaitu seluas lebih dari 50% dari luas Kabupaten Seram Bagian Barat, urutan luas berikutnya diikuti oleh Pertanian Lahan Kering Bercampur Semak yakni seluas 23,87 % dari luas Kabupaten Seram Bagian Barat, sedangkan kawasan pemukiman mencakup 0,63 % dari luas Kabupaten Seram Bagian Barat. Kawasan pemukiman tercakup di dalamnya pemukiman pedesaan, pemukiman transmigrasi dan pemukiman perkotaan.

Tabel 2.8. Sebaran Tutupan Lahan/Penggunaan Lahan Menurut Kecamatan di Kabupaten Seram Bagian Barat

Kecamatan		Jenis Penutupan Lahan (dalam Ha)					
		Hutan Rimba	Hutan Bakau	Semak Belukar	Padang Rumput	Tanah Kosong	Perkeb/ Kebun
1.	Kairatu	8.586,21	13,69	3.138,10	84,05	-	1.471,76
2.	Kairatu Barat	8.721,91	-	5.865,42	701,19	-	-
3.	Amalatu	30.225,76	-	308,12	-	-	670,54
4.	Inamosol	47.112,78	-	8.764,41	367,58	14,62	-
5.	Elpaputih	72.206,73	-	1.372,42	-	23,44	2.767,58
6.	Seram Barat	45.747,14	-	17.530,04	5.821,04	-	-
7.	Huamual	27.902,07	-	10.221,02	1.504,74	-	-
8.	Huamual Belakang	21.643,11	358,28	17.310,05	8.396,17	-	-
9.	Kepulauan Manipa	8.988,07	-	2.006,04	733,76	-	-
10.	Taniwel	61.512,94	-	14.961,09	370,30	1.053,72	-
11.	Taniwel Timur	34.995,05	-	5.777,18	-	720,22	-
Kab. Seram Bagian Barat		367.641,77	371,97	87.253,88	17.978,83	1.812,01	4.909,88
Persentase (%)		74,01	0,07	17,56	3,62	0,36	0,99

Lanjutan

Kecamatan		Jenis Penutupan Lahan (dalam Ha)					
		Tegalan/ Ladang	Sawah	Permukiman/Kegiatan	Sungai/ Perairan	Empang	Total
1.	Kairatu	1.908,70	1.024,48	1.017,91	47,93	-	17.292,82
2.	Kairatu Barat	1.468,84	152,48	700,24	8,15	4,46	17.622,70
3.	Amalatu	-	-	350,79	215,25	-	31.770,46
4.	Inamosol	604,64	-	114,52	110,79	-	57.089,34
5.	Elpaputih	-	-	207,50	515,65	-	77.093,33
6.	Seram Barat	3.749,00	75,94	1.083,24	201,37	-	74.207,76
7.	Huamual	-	-	757,08	0,16	-	40.385,07
8.	Huamual Belakang	879,21	-	450,51	114,47	-	49.151,80

Kecamatan		Jenis Penutupan Lahan (dalam Ha)					
		Tegalan/ Ladang	Sawah	Permukiman/Kegiatan	Sungai/ Perairan	Empang	Total
9.	Kepulauan Manipa	-	-	67,52	-	-	11.795,40
10.	Taniwel	-	-	335,13	284,04	-	78.517,21
11.	Taniwel Timur	-	-	172,05	182,18	-	41.846,67
Kab. Seram Bagian Barat		8.610,39	1.252,91	5.256,49	1.679,99	4,46	496.772,57
Persentase (%)		1,73	0,25	1,06	0,34	0,00	100,00

Sumber : Peta Penutup Lahan Wilayah Kab. Seram Bagian Barat.

2.1.1.9. Potensi Sumber Daya Alam

Potensi sumber daya alam Kabupaten Seram Bagian Barat meliputi mineral logam, non logam dan batuan, panas bumi, air permukaan, dan air tanah. Berdasarkan dari berbagai sumber penelitian, maka gambaran umum terhadap potensi sumber daya alam di Kabupaten Seram Bagian Barat adalah sebagai berikut:

a. Mineral Logam

- Potensi Nikel pada zona anomali untuk nikel baik itu yang berasal dari pelapukan (lateritik) ataupun yang bersifat sulfida terletak di daeah Piru dan umumnya di zona tektonit dengan kandungan nikelnya Ni: 1,68%. Kandungan nikel sulfida yang dianalisis menunjukan kadar yang cukup signifikan Ni(S) : 3.02, dengan demikian nikel sulfida ini menjadi alternatif untuk menggantikan nikel laterit (sumber : Laporan Inventarisasi Mineral Logam Di Kabupaten Seram Bagian Barat Provinsi Maluku, 2013);
- Potensi Nikel di Desa Hualoy dan Seriholo (Kecamatan Kairatu) dengan kualitas Ni 0,21% - 0,94% (sumber : Profil Pertambangan DPMPTSP, Prov. Maluku, 2012);
- Potensi pasir besi berlokasi di Pantai Hunipopu, Desa Ariate Kecamatan Huamuaal dengan luas sebaran ± 1.401 Ha. (sumber : Pemetaan Daerah Potensi Sumber Daya Mineral Berbasis SIG, Dinas ESDM Prov. Maluku, 2019);
- Potensi Nikel di Kaibobu dan Supe dengan luas areal 40.000 Ha (sumber : Selayang Pandang Kabupaten Seram

Bagian Barat, 2009);

- Emas dan tembaga di Desa Neniari, Hukuanakota dengan luas areal 50.000 Ha (sumber : Selayang Pandang Kabupaten Seram Bagian Barat, 2009).

b. Mineral Non Logam dan Batuan

- Berdasarkan Hasil Inventarisasi Dan Evaluasi Mineral Non Logam di daerah Kabupaten Buru dan Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku Utara, Desember 2006 yang dilaksanakan oleh Pusat Sumber Daya Geologi diperoleh potensi bahan galian batuan ultrabasa, serpentinit, batugamping, lempung dan sirtu sungai;
- Berdasarkan Profil Pertambangan DPMPTSP, Prov. Maluku, 2012 terdapat potensi Marmer yang berlokasi di Gunung Nakele dan Gunung Kasieh, Kec. Taniwel; Gunung Anuena dan Gunung Keki, Pulau Buano. Memiliki cadangan masing-masing sebesar 3.733.000.000 ton, 1.047.600.000 ton, 412.799.999 ton, dan 11.200.000 ton;
- Potensi Marmer di W. Sapalewa dengan luas 25.000 Ha (sumber Selayang Pandang Kabupaten Seram Bagian Barat, 2009);
- Potensi Garnet di Pulau Kelang dengan luas 7.000 Ha (sumber : Selayang Pandang Kabupaten Seram Bagian Barat, 2009).

c. Panas Bumi

- Desa Elpaputih, P. Seram dengan potensi 25 Mwe (sumber : Profil Pertambangan;
- Panas Bumi Pohon Batu Desa Kawa Kecamatan Seram Barat dengan potensi panas bumi 15 Mwe. (sumber: Survei Terpadu Gaya Berat Dan Audio Magnetotelluric (AMT) Daerah Panas Bumi Pohon Batu, Kabupaten Seram Bagian Barat Dan Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, Kelompok Penyelidikan Panas Bumi, Pusat Sumber Daya Geologi, 2015).

d. Air Tanah

Berdasarkan peta Cekungan Airtanah yang dikeluarkan oleh Direktorat Tata Lingkungan Geologi dan Kawasan Pertambangan (DTLGKP) di Wilayah Kabupaten Seram Barat terdapat 4 (empat) cekungan airtanah yaitu Boano, Kawa,

Laela dan Waesamu dengan jumlah air tanah 301 juta m3/tahun.

e. Air Permukaan

Terdapat 29 sungai yang terindikasi berair sepanjang tahun di Kabupaten Seram Bagian Barat. Dilihat dari jumlah sungai dan persebarannya yang mencakup keseluruhan wilayah maka Kabupaten Seram Bagian Barat memiliki potensi air permukaan yang sangat besar, dan dapat dimanfaatkan untuk keperluan domestik (air bersih dan air baku), serta untuk kegiatan pertanian (irigasi) untuk tanaman. Pemenuhan kebutuhan keperluan air bersih dan air baku teridentifikasi di Kecamatan Seram Bagian Barat (RISPAM Kab. Seram Bagian Barat 2014) untuk alternatif pengembangan SPAM Kota Piru, yaitu S. Amarale, S. Cabang Tiga, S. Waemeteng, S. Batuluhi dan S. Laiuen. Selain potensi yang sudah teridentifikasi potensi air bersih dan air baku pada wilayah yang lain akan menjadi prioritas pembangunan bagi masyarakat di Kabupaten Seram Bagian Barat.

Tabel 2.9. Potensi Air Baku Yang Direncanakan Untuk SPAM Kota Piru

Sumber Air Baku		Lokasi	Luas DAS (Km²)	Koordinat
1.	Sungai Laiuen	Dusun Laiuen, Desa Lumoli, Kec. Seram Barat	46,8	3° 04.892' LS 128° 14.181' BT
2.	Sungai Amarale	Desa Piru Kec. Seram Barat	1,74	3° 02.993' LS 128° 10.990' BT
3.	Sungai Cabang Tiga Hulu	Dusun Belakang Tangsi, Desa Piru Kec. Seram Barat	1,2	3° 02.840' LS 128' 12.347 BT
	Sungai Cabang Tiga Hilir		1,35	3° 02.838' LS 128° 12.290' BT
4.	Sungai Batu Luhu	Dusun Belakang Tangsi, Desa Piru Kec. Seram Barat	3,13	3° 02.945' LS 128° 13.325' BT
5.	Sungai Waemeteng (Cabang 1)	Dusun Belakang Tangsi, Desa Piru Kec. Seram Barat	1,17	3° 03.362' LS 128° 12.670' BT
	Sungai Waemeteng (Cabang 2)			3° 03.362' LS 128° 12.670' BT

Lanjutan Tabel 2.9

Sumber Air Baku		Debit Sesaat (L/Det)		Keterangan
		Sesaat (L/det)	Q95 (L/Det)	
1.	Sungai Laiuen	78	298,48	Alternatif sumber air baku untuk pengembangan SPAM Kota Piru jangka panjang
2.	Sungai Amarale	54,554	49,79	Alternatif sumber air baku untuk pengembangan SPAM Kota Piru
3.	Sungai Cabang Tiga Hulu	40	34,45	Alternatif sumber air baku untuk pengembangan SPAM Kota Piru
	Sungai Cabang Tiga Hilir	120,17	38,75	
4.	Sungai Batu Luhu	99,6	92,72	Alternatif sumber air baku untuk pengembangan SPAM Kota Piru
5.	Sungai Waemeteng (Cabang 1)	20,651	33,59	Alternatif sumber air baku untuk pengembangan SPAM Kota Piru jangka panjang
	Sungai Waemeteng (Cabang 2)	29,237		

Sumber : RISPAM Kab. Seram Bagian Barat Tahun 2014.

2.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah

Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Seram Bagian Barat konsep membangun daerah dalam meningkatkan potensi wilayah dilakukan dengan menggunakan pendekatan :

1. Pengembangan Gugus Pulau

Potensi pengembangan wilayah dengan pendekatan gugus pulau.Gugus pulau adalah kumpulan pulau yang secara geografis saling berdekatan dan berkaitan erat. Kumpulan pulau tersebut saling tergantung dan berinteraksi satu sama lain dalam berbagai aspek. Sehingga dapat dikatakan jika pulau dalam gugusan pulau memiliki beberapa

kesaamaan.. Pada intinya, ciri utama dari gugus pulau ialah adanya keterikatan dalam berbagai aspek, seperti sosial dan budaya, ekonomi, serta ekosistemnya.

Untuk mendukung interaksi antar pusat pelayanan dan gugus-gugus pulau di wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat serta interaksinya secara eksternal dengan wilayah sekitarnya tentunya harus didukung dengan keterkaitan atau konektivitas (connectivity) antar wilayah pulau yang efisien dalam satu kesatuan tata ruang pulau dan laut sehingga membentuk sinergi antar pemanfaatan ruang darat dan ruang laut.

2. Pengembangan Interaksi Keseluruhan Bagian Wilayah

Konsep pengembangan kawasan ini dapat disebut mirip dengan perputaran baling-baling, dimana kestabilan terjadi apabila dari setiap simpul dapat mengeluarkan potensi pertumbuhannya, yang kemudian baling-baling bergerak berputar seimbang dengan kekuatan simpul utama. Simpul utama adalah Kota Piru dan Kota Kairatu yang akan menyebarkan konektivitas terhadap sub-sub pusat pertumbuhan pada bagian Utara, Timur dan Barat. Simpul Piru akan menyebarkan konektivitas pada Kairatu, Pelita Jaya, Waesala, Luhu, Morekau dan Taniwel. Sedangkan Kota Kairatu akan menyebarkan konektivitas menuju Piru, Taniwel, Tomalehu sampai dengan Honitetu.

Berdasarkan analisis orde yang setingkat maka terdapat 3 (tiga) Simpul utama yaitu Piru, Kairatu dan Luhu. Selain itu untuk menyeimbangkan perkembangan ke wilayah hinterland terdapat 3 (tiga) potensi sub simpul pengembangan yaitu Waesala, Taniwel dan Amalatu-Tomalehu.

3. Pengembangan Wilayah Pesisir

Secara alamiah kawasan pesisir pada dasarnya bukan semata-mata merupakan kawasan peralihan ekosistem daratan dan laut, namun sekaligus titik temu antara aktifitas ekonomi masyarakat berbasis daratan dan laut. Kawasan pesisir merupakan tempat pendaratan ikan serta berbagai sumberdaya laut maupun aliran sumberdaya lainnya untuk kemudian dialirkan ke daratan. Dari arah daratan mengalir sumberdaya untuk disalurkan via lautan (dan juga udara) melalui kawasan-kawasan pesisir. Akibatnya, kawasan pesisir secara global telah cenderung menjadi konsentrasi aktifitas perekonomian dan peradaban manusia. Kawasan pesisir dalam kenyataannya menampung sekitar 60% populasi dunia. Secara historis, kawasan pesisir telah menjadi hamparan konsentrasi berbagai kota-kota pelabuhan dan pusat-pusat pertumbuhan global.

Di dalam struktur pembangunan daerah, suatu kawasan pesisir dinilai strategis secara ekonomi jika memiliki potensi sentrifugal di dalam menggerakkan perekonomian suatu daerah. Dalam pengertian, dinamika perkembangannya sangat menentukan pertumbuhan sektor-sektor pembangunan lainnya, menentukan pertumbuhan wilayah-wilayah di sekelilingnya secara lintas pelaku (tidak sebatas kehidupan ekonomi kelompok masyarakat tertentu).

4. Pengembangan Berbasis Mitigasi

Kabupaten Seram Bagian Barat memiliki kawasan – kawasan rawan bencana yang menunjukkan adanya potensi bencana yang perlu ditangani secara serius. Lokasi yang telah teridentifikasi tersebut memerlukan perhatian dan penanganan dalam memperbaiki dan mengantisipasi kemungkinan bencana yang akan ditimbulkan. Mitigasi bencana yaitu serangkaian upaya untuk mengurangi bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana (PP 21 Tahun 2008). Pendekatan mitigasi terbagi menjadi :

- ✓ Mitigasi Non Struktural;
- ✓ Mitigasi Struktural;
- ✓ Mitigasi Kultural.

5. Pengembangan Berbasis Pertanian

Merujuk pada sistem pengembangan wilayah pertanian dapat dibedakan antara kawasan on-farm dan kawasan off-farm. Kawasan on-farm adalah kegiatan pertanian pada rantai awal dan merupakan kegiatan yang belum merubah bentuk dan memberikan nilai tambah pada komoditas pertanian. Kawasan off-farm adalah kawasan yang dialokasikan untuk kegiatan pengelolaan hasil pertanian, dalam hal ini mata rantai sudah pada tingkat yang lebih jauh, karena sudah merubah bentuk komoditas asal menjadi komoditas turunan. Selanjutnya adalah kawasan pemasaran yang merupakan simpul perdagangan dan jasa.

Mengingat potensi sumberdaya unggulan adalah pertanian tanaman pangan (padi sawa), hortikultura, perkebunan dan perikanan yang menjadi basis, maka pendekatan pengembangan wilayah adalah sistem Pertanian Terpadu yang bertujuan untuk menerapkan sistem pertanian yang berkelanjutan karena berbasis organik dan dikembangkan serta diarahkan dengan memaksimalkan potensi sumber daya lokal. Dalam sistem pertanian terpadu, paling sedikit memiliki lima komponen penting, diantaranya adalah :

- Agro-ekosistem yang berkeanekaragaman tinggi;

- Keanekaragaman fungsional;
- Dukungan sumberdaya manusia, pengetahuan dan teknologi, permodalan, hubungan produk dan konsumen, serta masalah keseimbangan misi pertanian dalam pembangunan;
- Sistem pertanian yang kompleks dan terpadu yang menggunakan sumberdaya dan input yang ada secara optimal, dan
- Menentukan kombinasi tanaman, hewan dan input yang mengarah pada produktivitas yang tinggi, keamanan produksi serta konservasi sumberdaya yang relatif sesuai dengan keterbatasan lahan, tenaga kerja dan modal.

2.1.3. Wilayah Rawan Bencana

Undang Undang No. 24 tahun 2007 mendefinisikan bencana sebagai “peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis”. Morfologi wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat.

Secara geografis, bentuk relief Kabupaten Seram yang terdiri dari pesisir dan perbukitan dengan jarak yang pendek antara keduanya, sehingga tingkat kelandaian lerengnya menjadi relative curam dan pendek. Hal ini berakibat pada derasnya arus aliran sungai pada saat musim hujan, sehingga mengakibatkan banjir dan banjir bandang, terutama pada daerah aliran sungai yang berada di lahan gundul dan kritis.

Berdasarkan Data sejarah kejadian bencana di Kabupaten Seram Bagian Barat sejak 2016-2019, tampak bahwa Kabupaten Seram Bagian Barat memang sangat rentan terhadap bencana hidrometeorologi, khususnya banjir dan banjir bandang. Bencana-bencana tersebut terjadi setiap tahun dan berdampak kepada masyarakat karena kerusakan infrastruktur, seperti jalan, jembatan, fasilitas umum maupun permukiman masyarakat. Sedangkan pada Tahun 2020-2021 Kabupaten Serm Bagian Barat memiliki kejadian bencana geologi gempa bumi dan kebakaran yang rutin terjadi.

Data mengenai bencana alam merupakan bahan informasi yang sangat penting dalam merumuskan Rencana Tata Ruang Kabupaten Seram Bagian Barat, dimana bencana alam yang terjadi, seperti; bencana banjir, gempa bumi, tanah longsor serta tsunami dan abrasi pantai; untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada penjabaran berikut :

Tabel 2.10. Sejarah Kejadian Bencana di Kabupaten Seram Bagian Barat, Tahun 2016-2019.

Jenis Bencana		Kejadian (tgl/bln/thn)	Korban				
			Mening gal	Hilang	Terluka	Mengun gsi	Mening gal
1.	Gempa bumi	26 Sept 2019	39	-	1.578	170.900	1
2 .	Banjir	8 Jan 2018	-	-	-	500	2
3 .	Cuaca ekstrim	11 & 134 Ja2018	-	-	-	30	3
4 .	Banjir	5 Juli 2017	-	-	-	10	4
5 .	Banjir	17 Juni 2017	-	-	-	150	5
6 .	Tanah longsor	14 Juni 2017	-	-	-	5	6
7 .	Banjir bandang	3 Juni 2017	-	-	-	10	7
8 .	Tanah longsor	28 Mei 2017	-	-	-	5	8
9 .	Banjir bandang	18-25 Mei 2017	-	-	-	50	9
10	Tanah longsor	5 Mei 2017	-	-	-	-	10
11	Gempa bumi	26 April 2017	-	-	10	-	11
12	Banjir	7 April 2017	-	-	-	10	12
13	Glombang ekstrim dan abrasi	3 April 2017	-	-	-	35	13
14	Cuaca ekstrim	2 April 2017	-	-	10	-	14
15	Tanah longsor	28 Maret 2017	-	-	-	-	15
16	Banjir	3 Februari 2017	-	-	38	-	16
17	Cuaca ekstrim	3 Februari 2017	-	-	50	-	17
18	Tanah longsor	1 Januari 2017	-	-	-	-	18
19	Banjir	25 Maret 2016	-	-	-	1.000	19
20	Banjir	17 April 2016	-	-	-	800	20

Sumber : RPB Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2018.

Perubahan dan perkembangan kejadian bencana tiap tahunnya dapat menjadi dasar dalam melakukan analisis kecenderungan kejadian. Untuk kejadian bencana yang tercatat pernah terjadi maupun yang berpotensi terjadi perlu dilakukan analisa ulang terkait dengan kecenderungan untuk setiap jenis bahaya tersebut. Berdasarkan data sejarah kejadian

kebencanaan daerah, penetapan kecenderungan dilakukan dengan kesepakatan bersama dari seluruh unsur stakeholders terkait penanggulangan bencana di Kabupaten Seram Bagian Barat. Dari 9 (sembilan) jenis bencana yang terjadi di Kabupaten Seram Bagian Barat, terdapat 7 (tujuh) jenis bencana yang ditetapkan memiliki kecenderungan meningkat yaitu banjir, banjir bandang, cuaca ekstrim, gelombang ekstrim dan abrasi, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan dan longsor, sedangkan 2 (dua) jenis bencana yang ditetapkan memiliki kecenderungan tetap yaitu gempa bumi dan tsunami.

2.1.4. Demografi

Jumlah penduduk senantiasa berubah dari waktu ke waktu. Terdapat beragam faktor yang menyebabkan perubahan jumlah penduduk. Misalnya, wabah penyakit atau epidemi, kelaparan, dan bencana alam. Di lain pihak, kestabilan wilayah, peningkatan gizi, dan kesehatan dapat mengakibatkan jumlah penduduk cenderung naik. Fenomena bertambah atau berkurangnya jumlah penduduk dari waktu ke waktu dalam suatu wilayah tertentu sehingga gejala dinamika penduduk dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu kelahiran (fertilitas atau natalitas), kematian (mortalitas), dan perpindahan penduduk (migrasi).

Penduduk Kabupaten Seram Bagian Barat merupakan penduduk dengan proporsiterbanyak di Provinsi Maluku dengan mata pencaharian dominan pada petani, pekebun, nelayan. Status pekerjaan utama di Kabupaten Seram Bagian Barat pada tahun 2018 lebih banyak bekerja di bidang Pertanian, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan dengan Jumlah 36.005 jiwa. Hal ini sangat berkaitan erat dengan potensi sumberdaya dan alam di Kabupaten Seram Bagian Barat.

Tabel 2.11. Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Seram Bagian Barat SP10, 2010-2020

Kabupaten		Jumlah Penduduk (Jiwa)							
Kecamatan		SP2010	2010	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Kab. Seram Bagian Barat		168.012	165.372	169.481	170.023	210.009	210.167	210.607	212.393
1	Kairatu	23.146	23.246	23.823	23.900	24.853	26.694	26.640	27.040
2	Kairatu Barat	13.146	13.146	13.472	13.515	16.062	14.433	14.500	14.478
3	Amalatu	10.979	10.979	11.252	11.288	12.037	13.27	13.18	12.537

Kabupaten		Jumlah Penduduk (Jiwa)							
Kecamatan		SP2010	2010	2015	2016	2017	2018	2019	2020
							2	1	
4	Inamosol	5.311	5.311	5.443	5.461	6.023	6.581	6.556	6.422
5	Elpaputih*)	4.909	1.453	1.489	1.494	5.152	5.299	5.157	5.233
6	Seram Barat	27.311	27.311	27.990	28.078	35.240	34.946	34.869	35.045
7	Huamual	34.203	34.919	35.787	35.902	47.396	46.235	46.583	49.097
8	Huamual Belakang	25.689	25.689	26.328	26.411	33.222	32.761	32.891	33.132
9	Kepulauan Manipa	5.810	5.810	5.954	5.974	7.536	7.399	7.570	7.165
10	Taniwel	12.133	12.133	12.435	12.474	15.326	15.487	15.608	15.448
11	Taniwel Timur	5.375	5.375	5.508	5.526	7.162	7.060	7.052	6.796

Sumber : BPS, Kabupaten Seram Bagian Barat Dalam Angka, Tahun 2016-2021.

Saat ini Kabupaten Seram Bagian Barat menjadi kabupaten ketiga di Maluku dengan penduduk terbanyak. Menurut hasil proyeksi yang telah diperbaiki dengan memperhitungkan faktor demografi dan migrasi, Jumlah penduduk yang meningkat terus menjadi perhatian pemerintah dalam upaya mengendalikan laju pertumbuhan penduduk. Selain itu, kualitas sumber daya manusia juga perlu diperhatikan mengingat dengan besarnya jumlah penduduk tapi tidak diimbangi dengan kualitas sumber daya manusia yang baik, maka akan menimbulkan masalah ditengah-tengah kehidupan bermasyarakat.

2.1.4.1. Penduduk Menurut Tenaga Kerja

Adapun Jumlah penduduk Kabupaten Seram Bagian Barat pada tahun 2020 yang berusia 15 tahun ke atas yang masuk dalam kategori usia kerja berdasarkan survei angkatan kerja nasional adalah sebanyak 84.595 jiwa dengan jumlah angkatan kerja laki laki 49.882 jiwa dan angkatan kerja perempuan 34.713 jiwa dengan tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) penduduk Kabupaten Seram Bagian Barat sebesar 71,86%. Artinya setiap 100 penduduk Usia Kerja terdapat 71,86 penduduk yang berpartisipasi dalam Angkatan Kerja. Sedangkan tingkat pengangguran sebesar 5,47%.

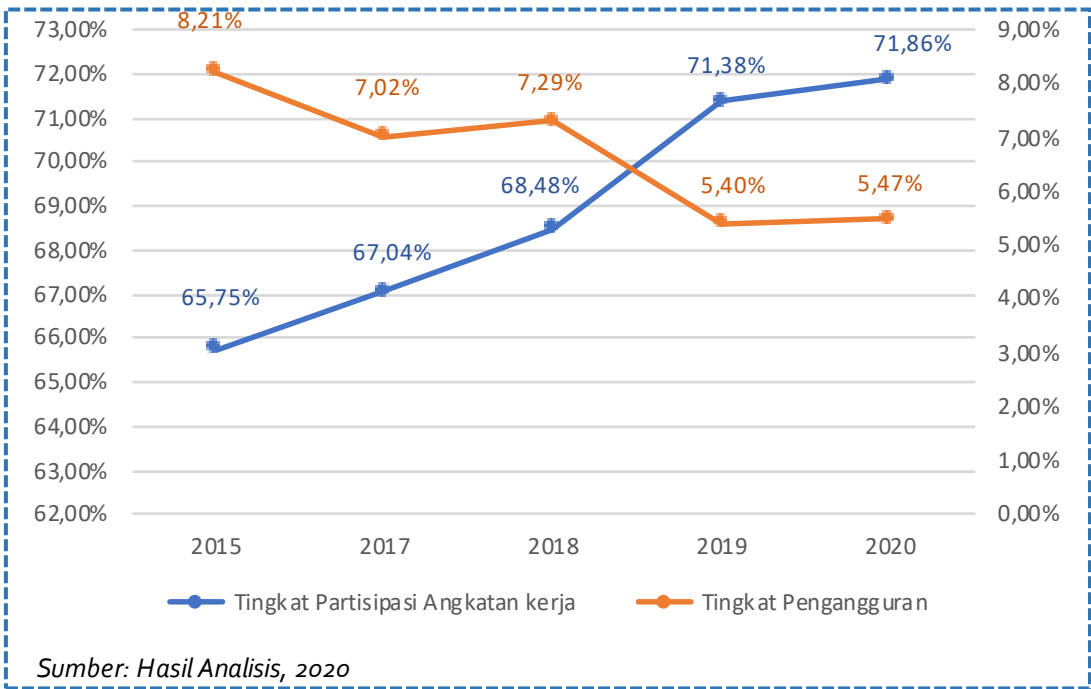
Nilai TPAK mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.meskipun tingkat pengangguran meningkat pada Tahun 2020 sebesar 0,07% dari tahun sebelumnya.

Tabel 2.12. Jumlah Penduduk Menurut Ketenagakerjaan di Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2015-2020.

Kegiatan Utama		Jumlah Penduduk				
		2015	2017	2018	2019	2020
Angkatan Kerja		69.687	72.004	74.104	77.648	84.595
	Bekerja	63.966	66.949	68.701	73.454	79.969
	PengangguranTerbuka	5.721	5.055	5.403	4.194	4.626
Bukan Angkatan Kerja		36.298	35.397	34.101	31.133	33.120
	Sekolah	8.948	12.004	11.584	9.048	9.655
	MengurusRumahTangga	21.696	19.575	19.600	17.777	19.268
	Lainnya	5.654	3.818	2.917	4.308	4.197
Total		105.985	107.401	108.205	108.781	117.715
Tingkat Partisipasi Angkatan kerja		65,75%	67,04%	68,48%	71,38%	71,86%
Tingkat Pengangguran		8,21%	7,02%	7,29%	5,40%	5,47%

Sumber: BPS, Kabupaten Seram Bagian Barat Dalam Angka 2016-2021.

Gambar 2.2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Pengangguran di Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2015-2020.



2.1.4.2. Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

Penduduk Kabupaten Seram Bagian Barat memiliki penduduk dengan tingkat pendidikan tingkat menengah atas sejumlah 30.635 jiwa, dimana diantaranya terdapat 92.05% yang bekerja dan 7,95% dalam status pengangguran. Sedangkan proporsi penduduk terhadap angkatan kerja diperoleh penduduk dengan tingkat pendidikan dasar mendominasi penyerapan tenaga kerja.

Tabel 2.13. Jumlah Penduduk 15 Tahun Ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi dan Jenis Kegiatan di Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2020.

Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan	Angkatan Kerja			% Berkerja terhadap Angkatan Kerja
	Bekerja	Pengangguran	Total	
0	27.343	914	28.257	96,77%
1	13.488	689	14.177	95,14%
2	28.198	2.437	30.635	92,05%
3	10.940	586	11.526	94,92%
Total	79.969	4.626	84.595	94,53%

Sumber : BPS, Kabupaten Seram Bagian Barat Dalam Angka, Tahun 2021.

2.1.4.3. Penduduk Menurut Tingkat Kesehatan

Secara umum, kondisi kesehatan di Kabupaten Seram Bagian Barat masih dihadapkan pada beberapa permasalahan pokok yaitu disparitas status kesehatan, beban ganda penyakit, kinerja pelayanan kesehatan yang masih rendah, perilaku masyarakat yang kurang mendukung pola hidup bersih dan sehat, rendahnya kondisi kesehatan lingkungan, rendahnya kualitas pemerataan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan, serta terbatasnya tenaga kesehatan dan distribusinya tidak merata.

Angka Kesakitan atau persentase penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan di Kabupaten Seram Bagian Barat berdasarkan BPS Statistik Kesejahteraan Rakyat pada tahun 2020 sebesar 14,59 %. Dibandingkan dengan Tahun 2015-2019, angka kesakitan mengalami penurunan setiap tahunnya. Hal ini merupakan suatu perhatian pemerintah untuk terus menggalakan program peningkatan kesehatan, khususnya berfokus pada daerah-daerah terpencil yang akses ke fasilitas kesehatannya jauh. Pemerintah

perlu memonitoring program Jamkesmas/Jamkesda atau program jaminan kesehatan lainnya khususnya bagi masyarakat miskin sehingga penyaluran dan pemanfaatannya dapat dirasakan secara penuh oleh masyarakat.

2.1.4.4. Penduduk Menurut Tingkat Kesejahteraan

Data BPS Kabupaten Seram Bagian Barat menunjukkan bahwa jumlah penduduk Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2020 sebanyak 212.393 jiwa dengan penduduk miskin sebanyak 43.150 jiwa atau 25,11 % dari total jumlah penduduk. Angka penduduk miskin tahun 2020 tersebut menunjukkan penurunan bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya meskipun laju penurunan yang lambat. Jika dibandingkan dengan 11 Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku, Kabupaten Seram Bagian Barat menempati urutan kedua untuk jumlah penduduk miskin terbanyak.

Tabel 2.14. Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2013-2020.

Tahun	Garis Kemiskinan (Rupiah/Kapita/Bulan)	Jumlah Penduduk Miskin (ribu)	Persentase Penduduk Miskin
2013	295.465	41,40	24,63
2014	301.802	40,21	23,79
2015	320.963	44,64	26,35
2016	334.729	45,03	26,50
2017	350.853	43,44	25,49
2018	359.085	43,77	25,62
2019	394.628	43,14	25,16
2020	419.793	43,15	25,11

Sumber : BPS, Kabupaten Seram Bagian Barat Dalam Angka, Tahun 2021.

Tabel 2.15. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2013-2020.

Tahun	Kabupaten Seram Bagian Barat	Provinsi Maluku	Peringkat
2016	63,76	67,60	6
2017	64,34	68,19	6
2018	65,14	68,87	6
2019	65,49	69,45	6
2020	65,62	69,49	6

Sumber : BPS, Kabupaten Seram Bagian Barat Dalam Angka, Tahun 2021.

2.1.4.5. Kepadatan Penduduk

Dilihat dari kepadatan penduduk di Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2020 mencapai 43 Jiwa/Km2. Kepadatan penduduk di 11 kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kecamatan Kairatu Barat dengan kepadatan sebesar 110 Jiwa/Km2 dan terendah di Kecamatan Elpaputih sebesar 5 Jiwa/Km2.

Tabel 2.16. Kepadatan Penduduk Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2020

Kabupaten		Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km ²)					
Kecamatan		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Kairatu	138	138	144	155	154	157
2	Kairatu Barat	77	77	91	82	82	82
3	Amalatu	35	36	38	42	41	39
4	Inamosol	10	10	11	12	11	11
5	Elpaputih*)	2	2	7	7	7	7
6	Seram Barat	38	38	47	47	47	47
7	Huamual	89	89	117	114	115	122
8	Huamual Belakang	54	54	68	67	67	67
9	Kepulauan Manipa	50	51	64	63	64	61
10	Taniwel	16	16	20	20	20	20
11	Taniwel Timur	13	13	17	17	17	16
Kab. Seram Bagian Barat		34	34	42	42	42	43

Sumber : BPS, Kabupaten Seram Bagian Barat Dalam Angka, Tahun 2021.

2.1.4.6. **Pertumbuhan Penduduk**

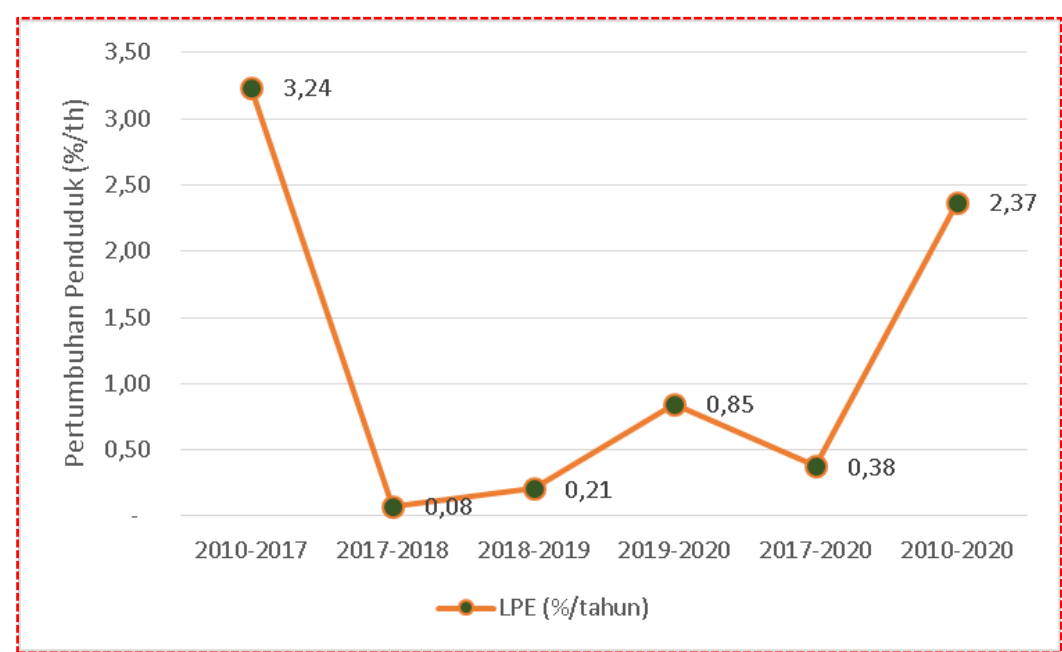
Perkembangan penduduk di Kabupaten Seram Bagian Barat selama periode 10 (sepuluh) tahun yaitu Tahun 2010 yang diwakilkan oleh SP2010 sampai dengan tahun 2020 mengalami peningkatan. Laju pertumbuhan penduduk tiap tahunnya meningkat dengan rata-rata pertumbuhan 2,37% per tahunnya. Dilihat pertumbuhan penduduk menurut Kecamatan diperoleh perkembangan penduduk tinggi dan berada di atas rata-rata Kabupaten adalah Kecamatan Huamual dengan rata-rata pertumbuhan penduduk 3,68% per tahun, Kecamatan Huamual Belakang dengan pertumbuhan penduduk 2,58% per tahun dan Kecamatan Seram Barat dengan pertumbuhan penduduk sebesar 2,52% per tahun.

Tabel 2.17. Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Seram Bagian Barat, SP2010 dan 2020.

Kabupaten		Jumlah Penduduk (Jiwa)		Laju Pertumbuhan Penduduk
Kecamatan		SP2010	2010	(%/tahun)
Kab. Seram Bagian Barat		168.012	212.393	2,37
1	Kairatu	23.146	27.040	1,57
2	Kairatu Barat	13.146	14.478	0,97
3	Amalatu	10.979	12.537	1,34
4	Inamosol	5.311	6.422	1,92
5	Elpaputih*)	4.909	5.233	0,64
6	Seram Barat	27.311	35.045	2,52
7	Huamual	34.203	49.097	3,68
8	Huamual Belakang	25.689	33.132	2,58
9	Kepulauan Manipa	5.810	7.165	2,12
10	Taniwel	12.133	15.448	2,44
11	Taniwel Timur	5.375	6.796	2,37

Sumber : Hasil Analisis, Tahun 2021

Gambar 2.3. Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2010-2020.



Sumber : BPS, Kabupaten Seram Bagian Barat Dalam Angka, Diolah Tahun 2021

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Dalam rangka mewujudkan masyarakat sejahtera, ada beberapa aspek pembangunan yang harus diperhatikan, yaitu aspek ekonomi dan sosial budaya. Pada aspek ekonomi, beberapa indikator yang umum digunakan untuk menganalisis keberhasilan pembangunan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat adalah pertumbuhan ekonomi, inflasi, serta ketimpangan pendapatan. spek sosial dan seni budaya terlihat dalam indikator bidang pendidikan dan kesehatan, antara lain angka partisipasi kasar (APK), angka partisipasi murni (APM), angka harapan hidup (AHH), angka kematian ibu melahirkan (AKI), balita gizi buruk, tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK), angka kemiskinan, selain itu Aspek kesejahteraan masyarakat berisi tentang capaian-capaian makro pembangunan yang mengindikasikan tentang kondisi tingkat kesejahteraan masyarakat. Aspek ini terdiri atas fokus pemerataan ekonomi, kesejahteraan social serta seni budaya dan olah raga dan sebagainya. Penjelasan terinci aspek kesejahteraan masyarakat akan diuraikan sebagai berikut :

2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Indikator yang dipakai dalam mengukur kesejahteraan masyarakat dan pemerataan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi dan laju inflasi. Indikator-indikator tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

2.2.1.1. Pertumbuhan PDRB

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah dalam suatu periode tertentu. Penghitungan PDRB dilakukan atas harga berlaku (harga-harga pada tahun penghitungan) dan harga konstan (hargaharga pada tahun yang dijadikan tahun dasar penghitungan). Perkembangan PDRB Kabupaten Seram Bagian Barat Atas Harga Berlaku pada tahun 2018 hingga 2021 dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Sedangkan tahun 2020 mengalami penurunan, tercatat besarnya peranan berbagai lapangan usaha ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa sangat menentukan struktur ekonomi di Kabupaten Seram Bagian Barat. Struktur perekonomian Kabupaten Seram Bagian Barat didominasi oleh 5 (lima) kategori lapangan usaha yaitu; pertanian, kehutanan dan perikanan; administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib; konstruksi; perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil, dan sepeda motor; dan industri pengolahan.

Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Seram Bagian Barat pada tahun 2021 dihasilkan oleh lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan yaitu mencapai 33,60 persen, selanjutnya lapangan usaha administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib sebesar 21,66 persen, disusul oleh lapangan usaha konstruksi sebesar 11,79 persen, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 8,77 persen, berikutnya lapangan usaha industri pengolahan sebesar 5,47 persen. secara rinci distribusi persentase PDRB Kabupaten Seram Bagian Barat dapat dilihat pada Tabel berikut dibawah ini :

Tabel 2.18. Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Seram Bagian Barat Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha 2018 – 2021 (persen).

LAPANGAN USAHA		Tahun			
		2018	2019	2020	2021
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	34,71	34,19	35,08	33,60
B	Pertambangan dan Penggalian	1,41	1,41	1,41	1,47
C	Industri Pengolahan	5,85	5,81	5,62	5,47
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,06	0,06	0,06	0,07
E	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,08	0,08	0,08	0,08
F	Konstruksi	10,87	11,11	11,09	11,79
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8,78	8,87	8,49	8,77
H	Transportasi dan Pergudangan	3,97	3,95	3,41	3,50
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,78	0,77	0,73	0,74
J	Informasi dan Komunikasi	1,29	1,27	1,29	1,32
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,72	2,69	2,85	2,97
L	Real Estate	0,42	0,39	0,39	0,39
M,N	Jasa Perusahaan	0,27	0,27	0,27	0,27
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	21,15	21,37	21,37	21,66
P	Jasa Pendidikan	2,73	2,74	2,75	2,76
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,91	2,95	3,07	3,16
RSTU	Jasa Lainnya	2,02	2,07	2,03	2,00
PDRB		100	100	100	100

Sumber : BPS Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2022

**Tabel 2.19. Laju Pertumbuhan Riil PDRB Kabupaten Seram
Bagian Barat Menurut Lapangan Usaha (Persen)
Tahun 2018 - 2021 .**

LAPANGAN USAHA		Tahun			
		2018	2019	2020	2021
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	4,60	3,97	2,75	0,19
B	Pertambangan dan Penggalian	5,22	5,69	-0,08	8,43
C	Industri Pengolahan	5,99	3,94	-4,20	0,99
D	Pengadaan Listrik dan Gas	6,82	3,66	4,13	9,87
E	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,80	3,64	1,40	1,06
F	Konstruksi	5,68	8,10	-0,82	7,69
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,47	6,12	-4,63	6,13
H	Transportasi dan Pergudangan	6,19	4,80	-13,39	5,51
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,44	3,26	-4,20	4,88
J	Informasi dan Komunikasi	5,64	3,73	1,13	5,00
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	8,00	4,06	7,43	3,84
L	Real Estate	0,96	1,32	-0,35	3,19
M,N	Jasa Perusahaan	3,74	3,81	-1,27	4,44
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7,98	7,41	-0,54	5,18
P	Jasa Pendidikan	6,20	7,04	-0,36	3,93
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,29	7,41	4,38	5,98
RSTU	Jasa Lainnya	5,89	7,84	-2,25	1,98
PDRB		5,95	5,56	-0,17	3,40

Sumber : BPS Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2021

Pertumbuhan PDRB Kabupaten Seram Bagian Barat baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan tahun 2010 selama kurun waktu tahun 2018 - 2021 kondisinya fluktuatif tetapi masih menunjukkan tren yang positif. Pada tahun 2020 mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan yang ditunjukkan dengan pertumbuhan minus 0,17 dikarenakan terjadinya pandemi Covid-9 yang terjadi mulai awal tahun 2020. Hal ini tidak hanya terjadi di Kabupaten Seram Bagian Barat saja, tetapi juga dialami oleh seluruh Kabupaten di Maluku bahkan Nasional.

2.2.1.2. PDRB Perkapita

Bila PDRB suatu daerah dibagi dengan jumlah penduduk yang tinggal di daerah itu, maka akan dihasilkan suatu PDRB Per Kapita. PDRB Per Kapita atas dasar harga berlaku menunjukan nilai PDRB Per kepala atau per satu orang penduduk. Pada tahun 2020 PDRB per kapita Kabupaten Seram Bagian Barat mencapai 17,62 juta Rupiah. Dan pertumbuhan PDRB per kapita pada tahun 2018 – 2020 berturut-turut sebesar 6,97 persen (2018), 6,42 persen (2019) dan 0,74 persen (2020).

Tabel 2.20. Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2018 – 2020.

Nilai PDRB (Milliar Rupiah)			
	2018	2019	2020
➤ ADBH	2.810,46	3.002,17	3.029,73
➤ ADHK	1.863,09	1.966,73	1.963,37
PDRB per Kapita (Ribu Rupiah)			
➤ ADBH	16.438,42	17.496,60	17.622,08
➤ ADHK	10.897,24	11.462,08	11.420,19
➤ Pertumbuhan PDRB per kapita ADHK 2010	5,66	5,18	-0,37

Sumber : BPS Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2021

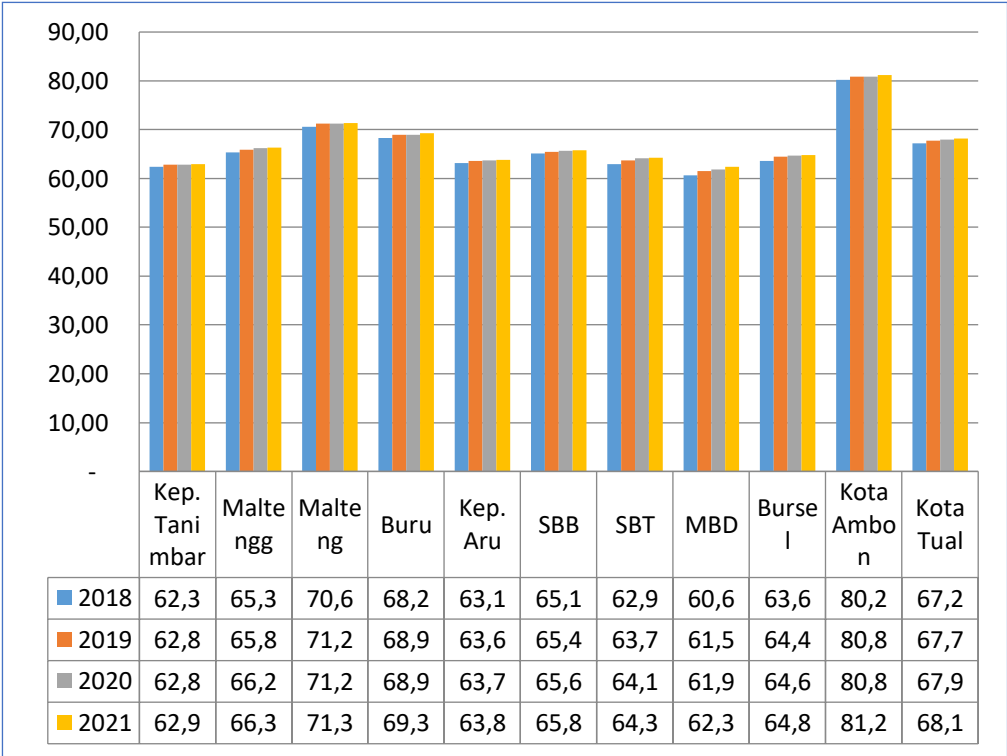
Lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan merupakan kategori dengan PDRB per kapita tertinggi di tahun 2020 dari 17 kategori yang lainnya yaitu sebesar 6,18 juta Rupiah.

2.2.1.3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pembangunan manusia merupakan paradigma pembangunan yang menempatkan manusia sebagai fokus dan sasaran akhir dari seluruh kegiatan pembangunan. Sasaran pembangunan manusia adalah tercapainya penguasaan atas sumber daya guna memperoleh peningkatan akses pendidikan, peningkatan derajat kesehatan serta pendapatan untuk mencapai kehidupan yang layak. Namun kondisi ideal dalam pembangunan manusia bukan hanya sampai pada pencapaian target tersebut, tetapi sampai pada pemanfaatan dari capaian target telah dicapai.

Aspek kesejahteraan penduduk juga dapat dilihat dari capaian kualitas pembangunan manusia yaitu melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Nilai IPM menunjukkan capaian pembangunan manusia pada tiga aspek utama yaitu pendidikan, kesehatan, dan pendapatan. Secara keseluruhan, capaian IPM Kabupaten Seram Bagian Barat terus mengalami peningkatan selama tiga tahun terakhir meskipun masih dibawah capaian IPM beberapa kabupaten sekitar seperti ditampilkan pada grafik di bawah ini.

Gambar 2.4. Grafik Perbandingan IPM Kabupaten Seram Bagian Barat dengan Kabupaten/Kota lain di wilayah Provinsi Maluku Tahun 2018 2021



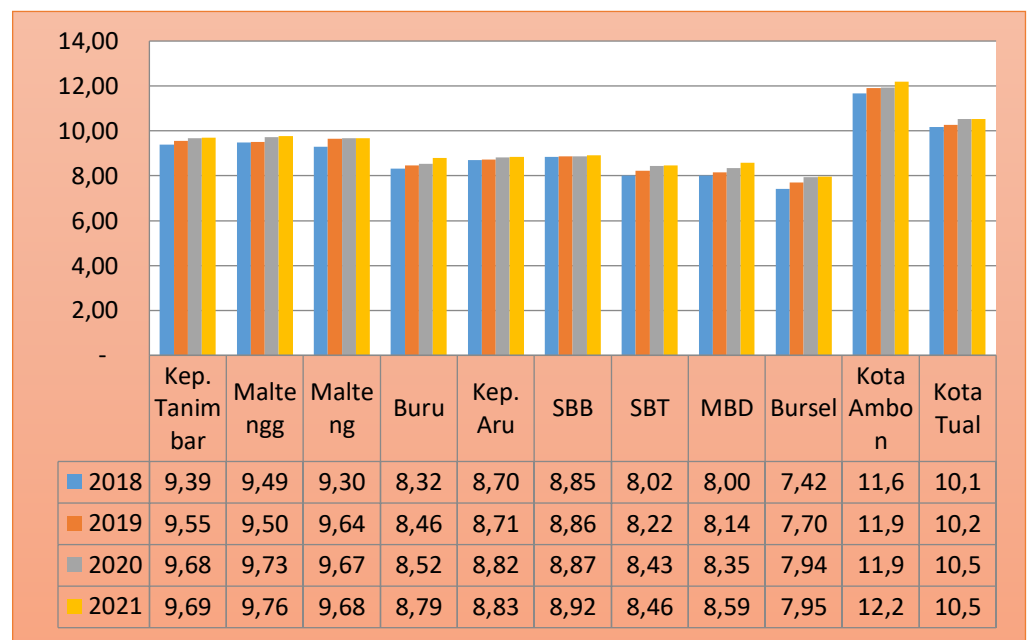
Sumber: BPS Kabupaten Seram Bagian Barat, 2021

Grafik di atas menunjukkan bahwa IPM Kabupaten Seram Bagian Barat mengalami kenaikan yang cukup signifikan 0,58 poin dari 65,14 pada tahun 2018 menjadi 65,83 pada tahun 2021. Jika dibandingkan dengan daerah lain di wilayah Provinsi Maluku, IPM Kabupaten Seram Bagian Barat masih berada di bawah IPM Kabupaten Maluku Tenggara, Kota Tual, dan Kabupaten Maluku Tengah, serta Kota Ambon yang sudah mencapai angka 81 ke atas. Artinya, kualitas pembangunan manusia pada aspek pendidikan, kesehatan dan pendapatan keluarga Kabupaten Seram Bagian Barat masih tertinggal jika dibandingkan dengan 4 kabupaten tersebut. Sebaliknya, IPM Kabupaten Seram Bagian Barat masih sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan IPM Kabupaten Buru Selatan dan Kabupaten Maluku Barat Daya yang masih berada di angka 62. Dengan kondisi geografis yang lebih baik dan kawasan yang sangat strategis tentunya IPM Kabupaten Seram Bagian Barat memiliki peluang untuk bisa setara atau lebih tinggi dibandingkan dengan kabupaten lain.

2.2.1.4. Rata-rata Lama Sekolah (RLS)

Capaian rata-rata lama sekolah menunjukan jumlah tahun efektif yang dicapai penduduk untuk menamatkan suatu jenjang pendidikan, mulai jenjang SD hingga SMA (12 Tahun). Semakin tinggi, capaian RLS, maka kualitas SDM masyarakat semakin tinggi. Penghitungan tersebut tanpa memperhatikan aspek pernah tinggal kelas atau tidak. Selama periode 3 tahun (2018-2020), capaian RLS Kabupaten Seram bagian Barat mengalami peningkatan dari 8,85 ke 8,87. Capaian tersebut sudah tergolong kurang karena masih berada pada angka 8. Artinya rata-rata penduduk dapat lulus sekolah selama 8 tahun atau setara dengan kelas 1 SMP.

Gambar 2.5. Grafik Capaian Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Seram Bagian Barat dengan Kabupaten/Kota Lain di Wilayah Provinsi Maluku Tahun 2018-2021.



Sumber: BPS Provinsi Maluku, 2021

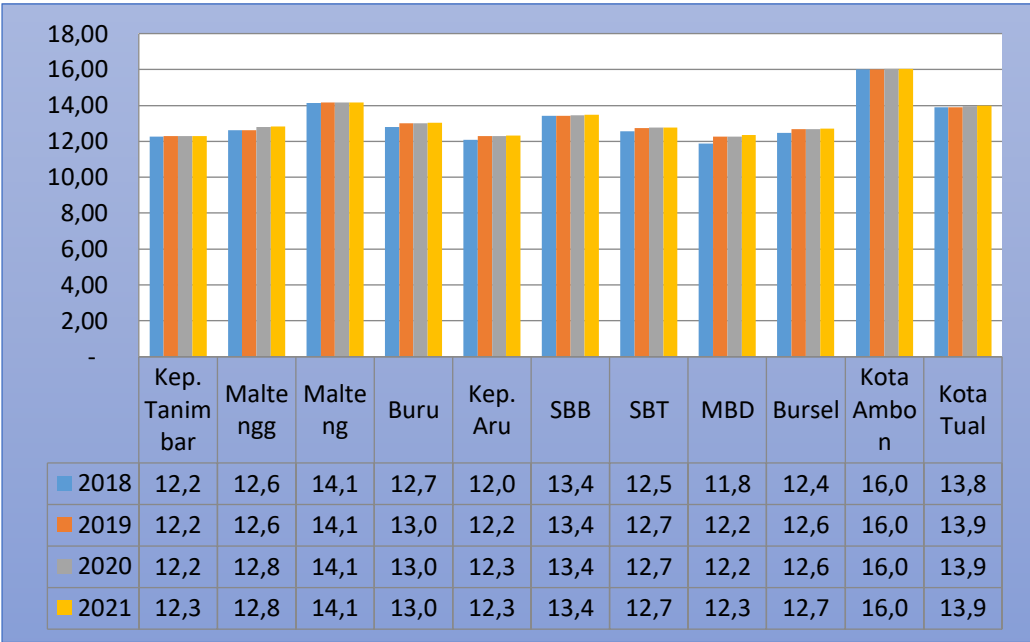
Jika dibandingkan dengan capaian RLS dengan daerah lain di Provinsi Maluku, maka capaian RLS Kabupaten Seram Bagian Barat terendah keenam setelah Kabupaten Maluku Tenggara dan Kabupaten Maluku Tengah. Capaian tertinggi yaitu Kota Ambon sebesar 12,20. Tingginya capaian RLS Kota Ambon dikarenakan fasilitas publik sebagai daerah kota lebih memadai dibanding dengan daerah kabupaten lain.

Capaian tertinggi kedua yaitu Kota Tual sebesar 10,53. Pada tahun 2020, capaian RLS Kota Tual dengan Kabupaten Seram Bagian Barat selisih sekitar 2 tahun dengan nilai masing- masing 10,53 dan 8,92. Selisih tersebut dapat dikejar dengan intervensi kebijakan pendidikan selama periode pembangunan 4 tahun kedepan. Selain itu, mempertimbangkan program wajib belajar 9 tahun, maka capaian RLS Kabupaten Seram Bagian Barat minimal harus bisa memenuhi standar minimal tersebut.

2.2.1.5. Harapan Lama Sekolah (HLS)

Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah yang diharapkan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan diberbagai jenjang. Selama periode 3 tahun (2018-2020), capaian HLS Kabupaten Seram Bagian Barat mengalami peningkatan dari 13,42 menjadi 13,44. Capaian tersebut tergolong kurang tinggi karena masih berada pada angka 13.

Gambar 2.6. Grafik Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Seram Bagian Barat dengan Kabupaten/Kota Lain di Wilayah Provinsi Maluku Tahun 2018-2021



Sumber: BPS Provinsi Maluku, 2021

Grafik diatas menunjukan bahwa capaian HLS Kabupaten Seram Bagian Barat berada pada posisi terendah ketujuh setelah Kabupaten Buru. Capaian HLS tertinggi diperoleh oleh Kota Ambon, kemudian disusul Kabupaten Maluku Tengah dan Kota Tual. Pada tahun 2020, rata-rata capaian HLS pada sebelas wilayah tersebut pada angka 12-16 tahun, hanya ada enam daerah yang berada pada angka 12 tahun yaitu Kabupaten Kepulauan Tanimbar sebesar 12,30, Kabupaten Maluku Tenggara sebesar 12,82, Kabupaten Kepulauan Aru sebesar 12,31, Kabupaten Seram Bagian Timur sebesar 12,77 dan Kabupaten Maluku Barat Daya 12,35 dan Kabupaten Buru sebesar 13,04. Artinya, capaian HLS Kabupaten Seram Bagian Barat hampir sama dengan Kota Tual. Untuk mencapai daya saing SDM yang berkualitas maka angka HLS haru terus di tingkatkan.

2.2.1.6. Usia Harapan Hidup (UHH)

Usia Harapan Hidup (UHH) merupakan indikator untuk mengevaluasi kinerja pelayanan kesehatan dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Semakin tinggi UHH, maka semakin tinggi kualitas kesehatan masyarakat. UHH Kabupaten Seram Bagian Barat selama periode 3 tahun (2018-2020) mengalami peningkatan dari 61,20 menjadi 61,69. Meskipun peningkatannya kurang terlalu signifikan, capaian tersebut menunjukan adanya perbaikan pada aspek kesehatan seperti pelayanan kesehatan, kondisi ekonomi, budaya dan pendidikan masyarakat

Gambar 2.7. Grafik Usia Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Seram Bagian Barat dengan Kabupaten/Kota Lain di Wilayah Provinsi Maluku Tahun 2018-2021



Sumber : BPS Provinsi Maluku, 2021

Dari 11 wilayah Provinsi Maluku, daerah yang memiliki UHH terendah yaitu Kabupaten Seram Bagian Timur sebesar 59,62 kemudian disusul Kabupaten Seram Bagian Barat sebesar 61,85. Keduanya memiliki selisih yang tidak terpaut jauh, untuk itu selama periode pembangunan kedepan maka UHH Kabupaten Seram Bagian Barat bisa untuk lebih ditingkatkan. Sedangkan UHH tertinggi berada di Kota Ambon dengan nilai sebesar 70,63, kemudian disusul Kabupaten Maluku Tengah sebesar 66,45 dan Kabupaten Buru sebesar 66,44. Jika dibanding dengan Kabupaten Seram Bagian Barat, maka UHH Kabupaten Seram Bagian Barat memiliki selisih 2 tahun dengan UHH Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

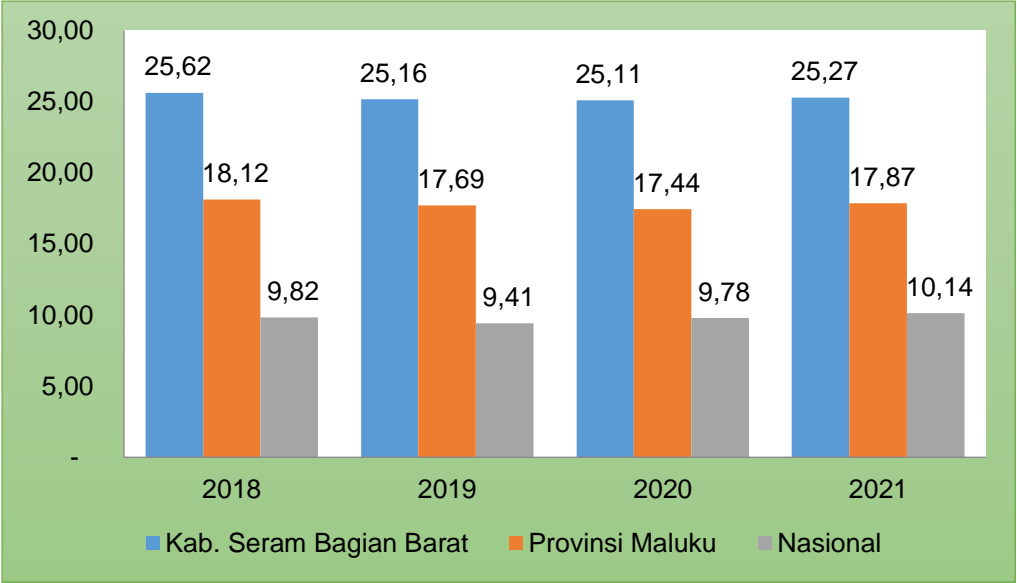
Fokus kesejahteraan sosial berisi tentang analisis terhadap indikator-indikator makro pembangunan seperti Angka Kemiskinan, Rata-rata Lama Sekolah, Angka Harapan Lama Sekolah, Usia Harapan Hidup, Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi, Persentase Balita Gizi Kurang, dan Persentase Balita Pendek (stunting).

2.2.2.1. Angka Kemiskinan

Angka kemiskinan merupakan indikator makro untuk melihat sejauh mana tingkat kesejahteraan masyarakat dalam suatu daerah. Kemiskinan merupakan kondisi dimana terjadi ketidakmampuan

dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan dan kesehatan. Selama periode 3 tahun (2018-2020), persentase kemiskinan di Kabupaten Seram Bagian Barat mengalami penurunan sekitar 0,48 %.

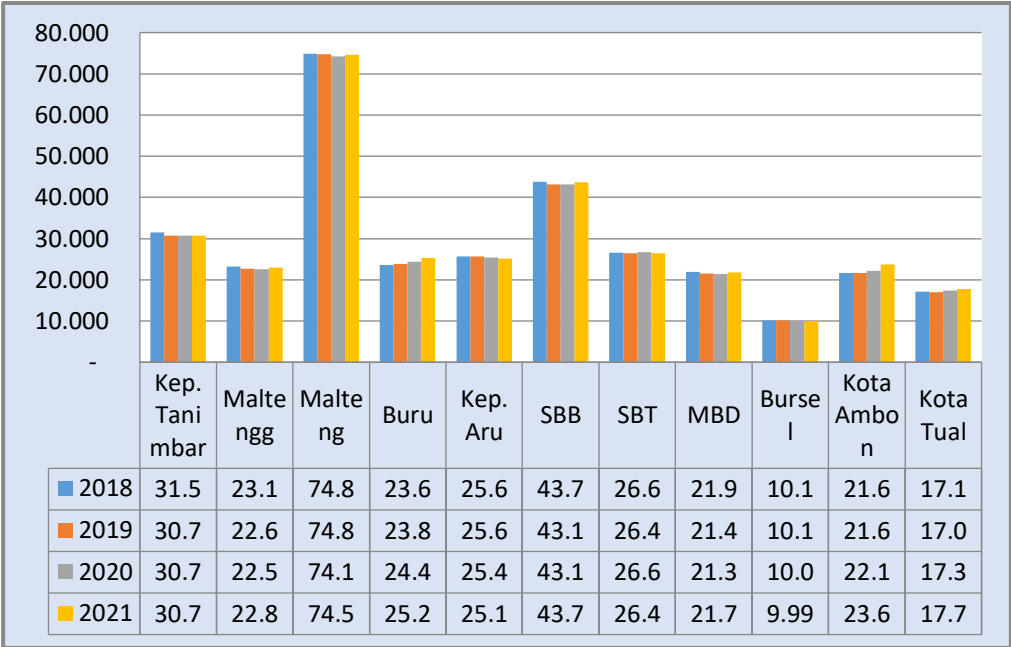
Gambar 2.8. Grafik Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku dan Nasional Tahun 2018-2021



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2021

Tingkat kemiskinan Kabupaten Seram Bagian Barat selama tahun 2018-2021 menunjukkan trend penurunan yang fluktuatif dari 25,62% pada tahun 2018 turun menjadi 25,16% pada tahun 2019. Angka tersebut kemudian turun 0,05% atau menjadi sebesar 26,11% pada tahun 2020 kemudian naik menjadi 25,27% di tahun 2021. Kenaikan angka kemiskinan disebabkan karena pandemi Covid-19 yang menyebabkan penurunan pada hampir semua sektor perekonomian, sehingga berpengaruh terhadap persentase kenaikan angka kemiskinan. Namun, jika dibandingkan dengan angka kemiskinan Provinsi Maluku, angka kemiskinan di Kabupaten Seram Bagian Barat masih tinggi sekitar 8% selama periode 2018-2021. Kondisi tersebut berbalik apabila dibandingkan dengan persentase kemiskinan secara nasional, persentase kemiskinan Kabupaten Seram Bagian Barat selalu lebih tinggi sekitar 16% dibanding rata-rata nasional. Hal tersebut mengindikasikan bahwa capaian persentase kemiskinan Kabupaten Seram Bagian Barat masih perlu untuk terus ditingkatkan.

Gambar 2.9. Grafik Presentase Penduduk Miskin Kabupaten Seram Bagian Barat dengan Kabupaten/Kota Lain di Wilayah Provinsi Maluku Tahun 2018-2021



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2021

Meskipun persentase kemiskinan Kabupaten Seram Bagian Barat mengalami penurunan yang fluktuatif selama periode 2018-2021, namun jika dibandingkan dengan daerah lain di wilayah Provinsi Maluku, maka tingkat kemiskinan Kabupaten Seram Bagian Barat masih berada dibawah Kabupaten Seram Bagian Timur dan Kota Tual. Artinya, dari 11 wilayah Provinsi Maluku, Kabupaten Seram Bagian Barat menempati posisi terendah kedelapan, kemudian disusul Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Kabupaten Maluku Barat Daya. Pada tahun 2021, persentase kemiskinan di seluruh wilayah Provinsi Maluku mengalami peningkatan akibat pandemi Covid-19. Persentase kenaikan kemiskinan terbesar pada Kota Tual sebesar 0,75%, kemudian disusul Kabupaten Buru sebesar 0,64%. Sedangkan Kabupaten Maluku Tengah mengalami peningkatan kemiskinan relatif rendah yakni sebesar 0,01%. Tingginya penambahan angka kemiskinan di Kabupaten Seram bagian Barat mengindikasikan perlu adanya upaya lebih untuk menekan angka tersebut. Diperlukan kerjasama dari berbagai stakeholder untuk mengintervensi angka kemiskinan di berbagai sektor. Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan yaitu Garis Kemiskinan (GK, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks

Keparahan Kemiskinan (P2). Garis Kemiskinan (GK) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kalori per kapita per hari. Seseorang dinyatakan miskin apabila memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan. GK diukur dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM). GK selalu naik setiap tahunnya mengikuti kenaikan harga kebutuhan makanan dan bukan makanan. GK Kabupaten Seram Bagian Barat tahun 2021 sebesar Rp 427.355 per kapita per bulan.

Tabel 2.21. Garis Kemiskinan (GK), Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2018-2021

Tahun	2018	2019	2020	2021
Garis Kemiskinan (GK)	359.085	394.628	419.793	427.355
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	4,15	4,86	4,46	4,34
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	0,99	1,30	1,23	1,26

Sumber: BPS Pusat Statistik, 2021

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Sedangkan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) merupakan gambaran penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi indeks semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Seram Bagian Barat selama periode tahun 2018-2021 menunjukkan tren penurunan yang fluktuatif. Hal tersebut mengindikasikan bahwa rata- rata kesenjangan pengeluaran antara penduduk miskin terhadap garis kemiskinan semakin kecil dan semakin besar. Namun, kondisi tersebut mengalami peningkatan saat terjadi pandemi Covid-19 tahun 2020, sehingga mengalami penurunan untuk P1 sebesar 0,12 untuk P1 mengalami kenaikan sebesar 0,03 untuk P2.

2.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Fokus seni budaya dan olahraga menjabarkan tentang indikator-indikator yang berkaitan dengan kondisi seni budaya dan olahraga di Kabupaten Seram Bagian Barat. Beberapa data menjadi target pada RPJMD Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2018-2022 yang di analisis meliputi Benda, situs dan kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan, Jumlah Cagar Budaya yang dikelola secara terpadu, Jumlah Atlet berprestasi, Cakupan Pembinaan atlet muda, Cakupan Pelatih Berprestasi dan Jumlah Prestasi Olahraga di Kabupaten Seram Bagian Barat, namun capaian pada bidang seni dan budaya tidak mencapai target sesuai dengan yang direncanakan.

2.2.3.1. Budaya

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) budaya adalah sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan dan sukar diubah. Dengan demikian, budaya adalah suatu kebiasaan, adat istiadat dan suatu kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus sampai kapanpun (jangka panjang). Budaya diciptakan sekelompok yang mendiami wilayah tertentu dengan tujuan untuk membuat kehidupan yang lebih baik dan menjadi ciri khas dari kelompok yang bersangkutan. Kabupaten Seram Bagian Barat tidak memiliki cagar budaya yang terdaftar dan ditetapkan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010, Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya dan kawasan cagar budaya di darat dan/atau air yang perlu dilestarikan karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama dan kebudayaan melalui proses penetapan.

Kabupaten Seram Bagian Barat mempunyai potensi yang cukup besar di bidang kebudayaan. Hal ini ditunjukkan dengan beragamnya seni dan budaya yang berkembang di Kabupaten Seram Bagian Barat seperti pagelaran tari cakalele yang biasanya dipentaskan pada saat kunjungan tamu dari dalam dan luar negeri serta pada acara atau kegiatan resmi lainnya disamping tarian musik sawat yang menjadi ciri khas masyarakat Kabupaten Seram Bagian Barat.

2.2.3.2. Olahraga

Olahraga merupakan aspek pembangunan sumber daya manusia sekaligus sebagai sarana untuk menguatkan karakter dan kepemimpinan pemuda dalam meningkatkan prestasi olahraga. Pembinaan dibidang olahraga dilakukan dengan mengidentifikasi potensi dan bakat diberbagai cabang olahraga serta menyediakan fasilitas pendukung seperti tenaga pelatih, sarana prasarana dan teknologi. Berikut perkembangan bidang olahraga di Seram Bagian Barat tahun 2018-2021.

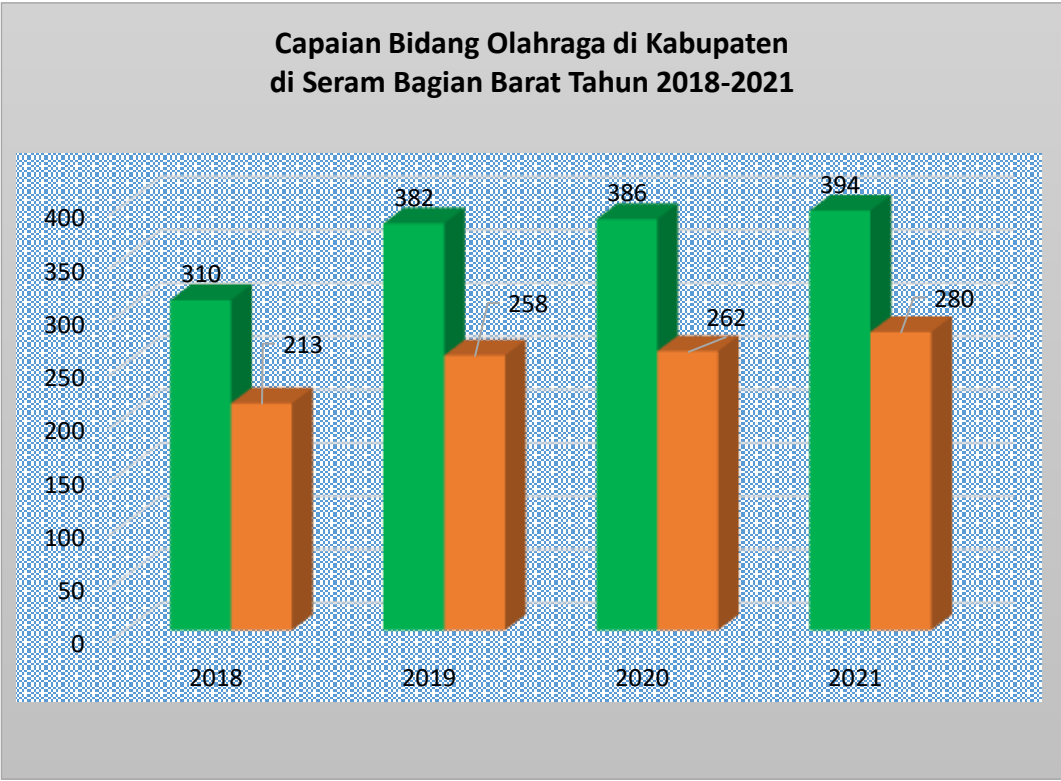
Tabel 2.22. Perkembangan Capaian Bidang Olahraga di Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2018-2021

Capaian Pembangunan	Tahun			
	2018	2019	2020	2021
1. Peringkat PORDA	-	-	-	-
2. Jumlah Klub Olahraga	310	382	386	394
3. Jumlah Lapangan Olahraga	213	258	262	280

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. SBB, 2022

Pekan Olahraga Daerah (PORDA) merupakan penyelenggaraan turnamen olahraga pada level provinsi, namun pada kurun waktu 2018-2021 Kabupaten Seram Bagan Barat tidak diikutsertakan dalam ajang perhelatan olahraga tingkat provinsi Maluku tersebut. Diupayakan ada perwakilan atlet Seram Bagian Barat yang diikuti dalam kegiatan tersebut ke depan.

Gambar 2.10. Grafik Perkembangan Capaian Bidang Olahraga di Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2018-2021



Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. SBB, 2022

Jumlah klub olahraga di Kabupaten Seram Bagian Barat mengalami peningkatan dari 310 klub (2018) menjadi 394 klub (2021). Peningkatan tersebut tergolong cukup tinggi karena sebanding dengan banyaknya variasi cabang olahraga yang ada. Rendahnya jumlah klub olahraga dikarenakan masih banyaknya klub olahraga yang belum terdaftar ke pengurus cabang dan masih banyak klub olahraga yang pasif dalam berbagai turnamen. Kedepan, pemerintah dapat meningkatkan jumlah serta keikutsertaan turnamen olahraga pada masing-masing cabang olahraga.

2.3. Aspek Pelayanan Umum

Aspek pelayanan umum berisi tentang analisis capaian kinerja pada layanan urusan pemerintahan wajib, urusan pemerintahan pilihan, dan penunjang urusan. Aspek ini berhubungan erat dengan capaian penyelenggaraan pemerintah daerah pada periode sebelumnya dan menjadi basis bagi perencanaan pembangunan untuk periode lima tahun mendatang.

2.3.1. Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Wajib

Analisis pada fokus layanan urusan pemerintahan wajib terdiri atas capaian-capaian pada layanan urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar dan layanan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar. Layanan urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar terdiri atas enam urusan, sedangkan layanan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar terdiri atas 18 urusan.

2.3.1.1. Layanan Urusan Pemerintahan Wajib yang Terkait Pelayanan Dasar

Layanan urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar meliputi analisis pada capaian urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta sosial.

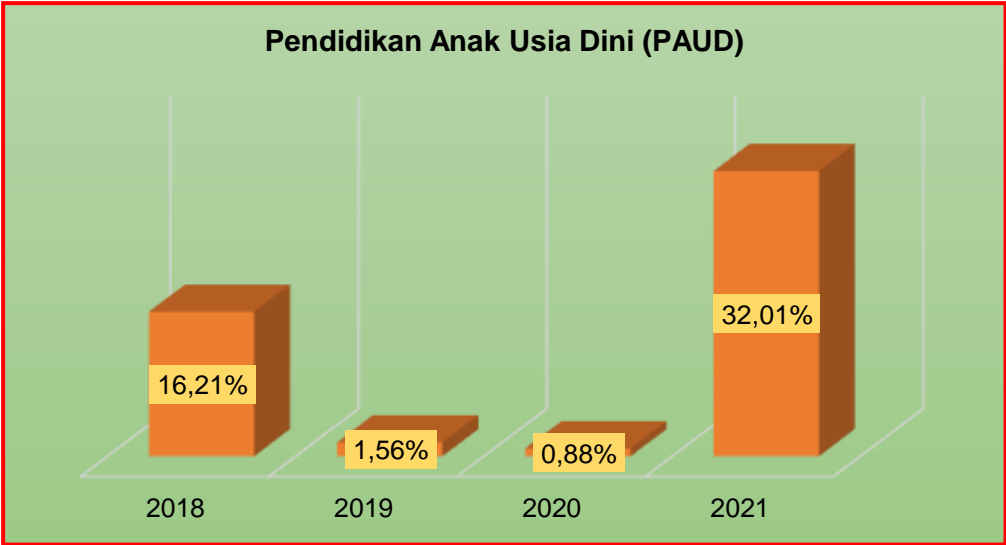
a. Pendidikan

Pendidikan merupakan faktor penting dalam meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia sesuai nilai-nilai yang berkembang di masyarakat. Capaian pembangunan pendidikan dapat dilihat dari beberapa indikator berikut.

1. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Berdasarkan evaluasi indikator kinerja utama (IKU) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada aspek pelayanan umum (output)/program) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2018-2022, maka terlihat bahwa persentase Pendidikan Usia Anak Dini (PAUD) tertinggi pada tahun 2021 yaitu sebesar 32,01%

Gambar 2.11. Grafik Angka Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2018-2021



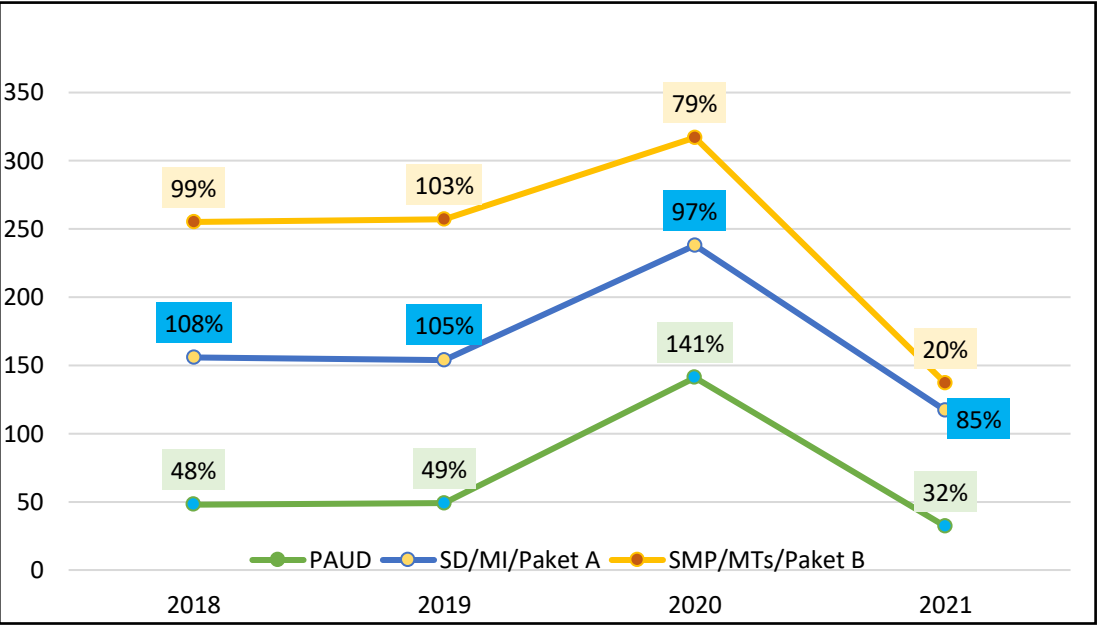
Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. SBB 2022

Persentase Pendidikan Usia Anak Dini (PAUD) tinggi pada tahun 2021 diakibatkan pemerintah menyediakan fasilitas pengasuhan dan pendidikan anak usia dini yang mudah diakses, terjangkau, dan berkualitas. Secara ideal, rentang usianya dimulai dari lahir hingga usia masuk ke sekolah dasar. Selain itu pendidikan anak usia dini merupakan fondasi penting untuk aspek perkembangan anak. Akibat pandemi, orang tua juga berjuang menyeimbangkan antara bekerja dan mengasuh anak.

2. Angka Partisipasi Kasar (APK)

APK adalah rasio jumlah siswa (berapapun usianya) pada tingkat pendidikan SD/SMP/SMA sederajat dibagi jumlah penduduk berusia 3-18 tahun. APK merupakan indikator sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah dimasing-masing jenjang pendidikan. Berikut capaian APK Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2018-2021.

Gambar 2.12. Grafik Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) di Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2018-2021



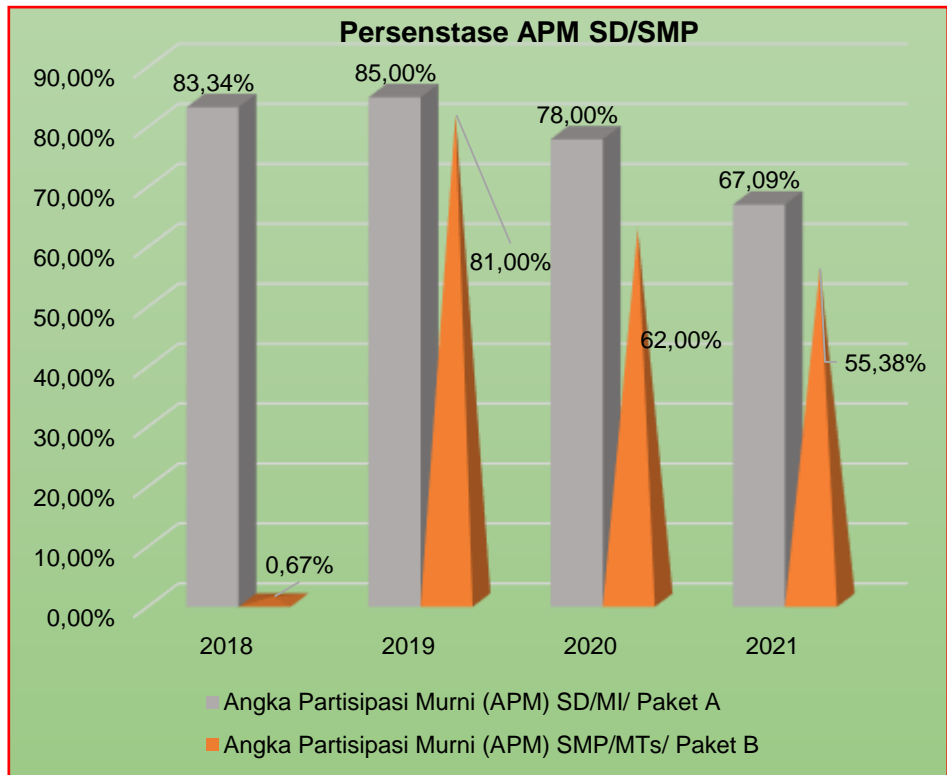
Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. SBB, 2022

Selama periode 4 tahun (2018-2021), kondisi APK PAUD hingga SMP mengalami trend kenaikan yang fluktuatif. Peningkatan APK SD dan SMP relatif tidak terlalu besar, namun dari segi angka capaiannya relatif cukup bagus yaitu diatas 100%. Disisi lain capaian APK PAUD dan SMP lebih rendah dibanding SD yakni PAUD 32% dan SMP 20 % pada tahun 2021, persentasinya lebih rendah bila dibandingkan dengan SD pada tahun 2021 yaitu 85%, dengan demikian diperlukan intervensi khusus untuk mengembangkan jenjang pendidikan PAUD dan SMP di Kabupaten Seram Bagian Barat.

3. Angka Partisipasi Murni (APM)

APM adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama. Jika dibandingkan dengan APK, APM lebih baik karena melihat partisipasi penduduk kelompok usia sesuai standar umur pada masing-masing jenjang pendidikan. Berikut perkembangan APM Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2018-2021.

Gambar 2.13. Grafik Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) di Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2018-2021



Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. SBB, 2022

Secara umum, capaian APM SD dan SMP Kabupaten Seram Bagian Barat selama periode 2018-2021 mengalami tren yang menurun. Namun, mengalami kenaikan pada tahun 2019. Jika dibandingkan dengan APK yang sudah mencapai 100%, capaian APM Kabupaten Seram Bagian Barat pada tahun 2021 masih dibawah 100% yaitu 67 untuk APM SD dan 55 untuk APM SMP. Untuk itu, selama periode pembangunan kedepan perlu adanya peningkatan APM pada masing-masing jenjang.

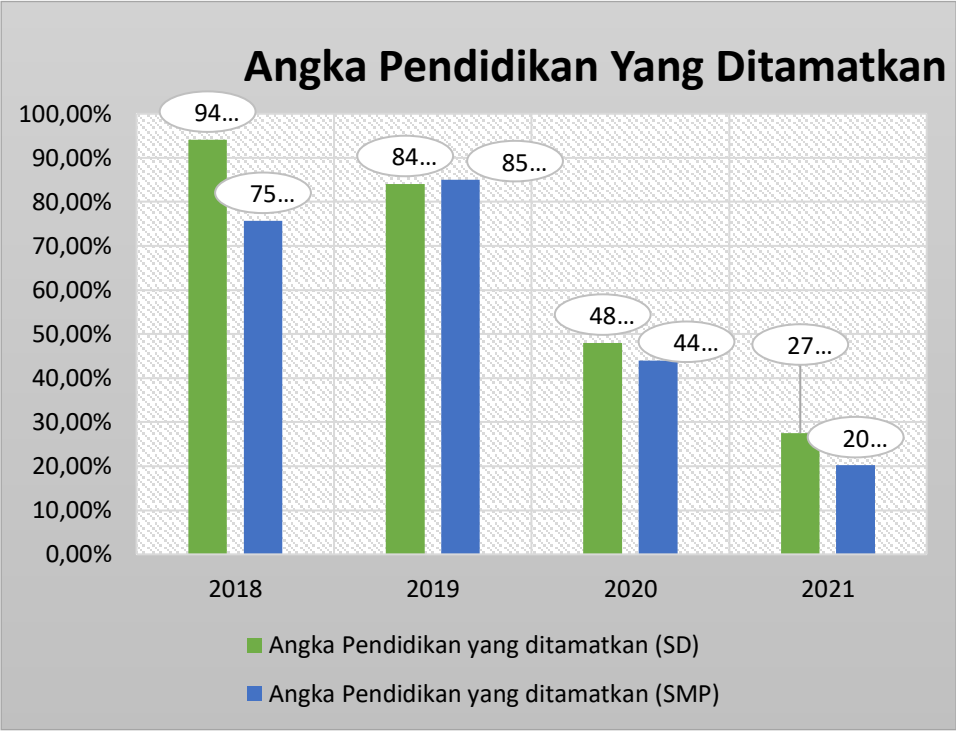
Angka Partisipasi Murni (APM) adalah Proporsi dari penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah tepat di jenjang pendidikan yang seharusnya (sesuai antara umur penduduk dengan ketentuan usia bersekolah di jenjang tersebut) terhadap penduduk kelompok usia sekolah yang bersesuaian. Kegunaan dari APM adalah Untuk menunjukkan seberapa besar penduduk yang bersekolah tepat waktu, atau menunjukkan seberapa besar penduduk yang bersekolah dengan umur yang sesuai dengan ketentuan kelompok usia sekolah di jenjang pendidikan yang sedang ditempuh.

Berdasarkan hasil capaian indikator kinerja utama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2018-2022, APM SD/MI/Paket A terbesar pada tahun 2019 yakni sebesar 85,00% dan terendah pada tahun 2021 yakni sebesar 67,09%. Pada jenjang pendidikan SMP/MTs/Paket B terbesar pada tahun 2019 dengan persentase 81,00% dan terendah pada tahun 2018 yakni 0,67%. Nilai APM berkisar antara 0-100. APM menunjukkan seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai pada jenjang pendidikannya. Bila seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu, maka APM akan mencapai 100 persen. Secara umum, APM akan selalu lebih rendah dari APK karena APK memperhitungkan jumlah penduduk di luar usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan.

4. Angka Pendidikan Yang Ditamatkan (SD/SMP)

APT adalah menyelesaikan pelajaran pada kelas atau tingkat terakhir suatu jenjang sekolah di sekolah negeri maupun swasta dengan mendapatkan surat tanda tamat belajar ijazah. APT bermanfaat untuk menunjukkan pencapaian pembangunan pendidikan di suatu daerah, juga berguna untuk melakukan perencanaan penawaran tenaga kerja, terutama untuk melihat kualifikasi pendidikan angkatan kerja di suatu wilayah. APT merupakan persentase jumlah penduduk, baik yang masih sekolah ataupun tidak sekolah lagi, menurut pendidikan tertinggi yang telah ditamatkan.

Gambar 2.14. Grafik Angka Pendidikan Yang Ditamatkan di Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2018-2021



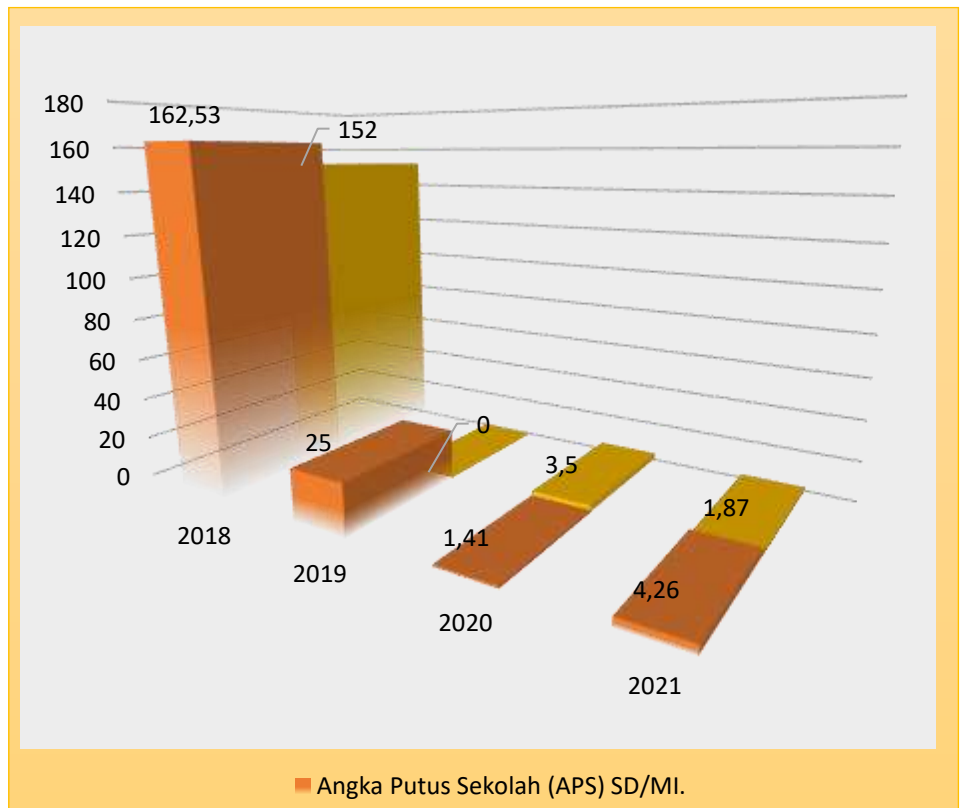
Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. SBB, 2022

Angka pendidikan yang ditamatkan pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar sesuai dengan hasil capaian indikator kinerja utama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada RPJMD Kabupaten Seram Bagian Barat tertinggi pada tahun 2018 yaitu sebesar 94,06% dan terendah pada tahun 2021 yakni sebesar 27,49%. Sedangkan pada jenjang pendidikan SMP tertinggi pada tahun 2018 yaitu 85,00% dan terendah pada tahun 2021 yaitu sebesar 20,19%. Tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk akan sangat berpengaruh terhadap angka IPM, karena akan mempengaruhi rata-rata lama sekolah yang merupakan unsur pembentuk IPM.

5. Angka Putus Sekolah

Angka putus sekolah menunjukkan tingkat putus sekolah di suatu jenjang pendidikan. Semakin tinggi angka putus sekolah menggambarkan kondisi pendidikan yang kurang baik dan sebaliknya. Berikut angka putus sekolah Kabupaten Seram Bagian Barat tahun 2018-2022.

Gambar 2.15. Grafik Angka Putus Sekolah SD dan SMP di Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2018-2021



Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. SBB, 2022

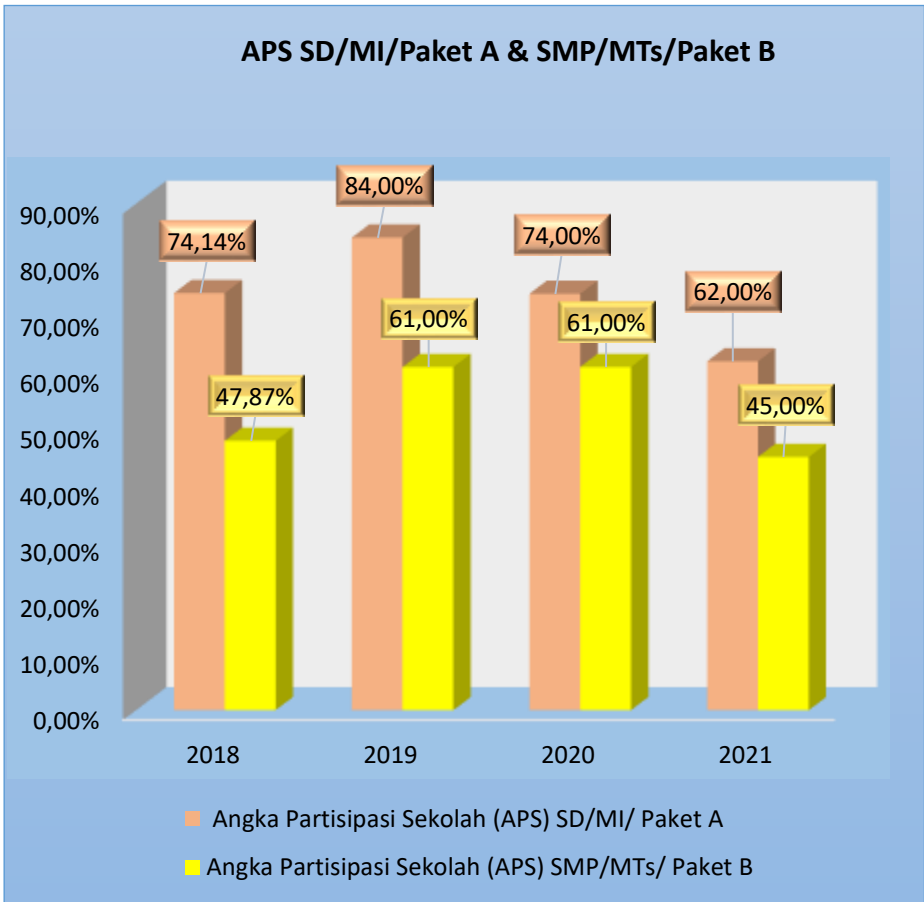
Secara umum capaian angka putus sekolah SD dan SMP di Kabupaten Seram Bagian Barat selama periode tahun 2018-2021 tergolong kurang baik karena masih di atas kisaran angka 1%. Banyaknya penyebab angka putus sekolah karena faktor ekonomi seperti persentase penduduk miskin, jumlah pengangguran, pendapatan/PDRB perkapita, indeks pembangunan manusia serta faktor lain penyebab putus sekolah seperti rasio sekolah, rasio siswa, angka melek huruf. Angka Putus Sekolah (APS) SMP.MTs/Paket B pada tahun 2021 adalah 1,87%, nilainya lebih rendah bila di dibandingkan dengan Angka Putus Sekolah (APS) pada SD yaitu 4.26% Keberhasilan tersebut karena adanya intervensi pemberian beasiswa untuk siswa miskin dan pendidikan gratis.

6. Angka Partisipasi Sekolah SD/MI/ Paket A dan SMP/MTs/ Paket B

Angka parsipasi sekolah adalah Proporsi dari penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah (tanpa memandang jenjang pendidikan yang ditempuhi)

terhadap penduduk kelompok usia sekolah yang bersesuaian. Nilai APS berkisar antara 0-100. Makin tinggi APS berarti makin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu daerah. APS yang tinggi menunjukkan terbukanya peluang yang lebih besar dalam mengakses pendidikan secara umum. Pada kelompok kelompok umur mana peluang tersebut terjadi dapat dilihat dari besarnya APS pada setiap kelompok umur. Angka partisipasi sekolah pada Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2018-2021 terlihat pada grafik di bawah ini

Gambar 2.16. Grafik Angka Partisipasi Sekolah SD/MI/ Paket A dan SMP/MTs/Paket B di Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2018-2021



Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. SBB, 2022

Berdasarkan hasil capaian indikator kinerja utama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2018-2021 menunjukan bahwa Angka Partisipasi Sekolah pada jenjang pendidikan SD/MI/ Paket A dinilai cukup baik karena berada pada kisaran lebih atau diatas 50%, hal ini menunjukan bahwa usia sekolah pada tingkat SD cukup baik dalam mengakses sekolah. Berbeda dengan APS pada

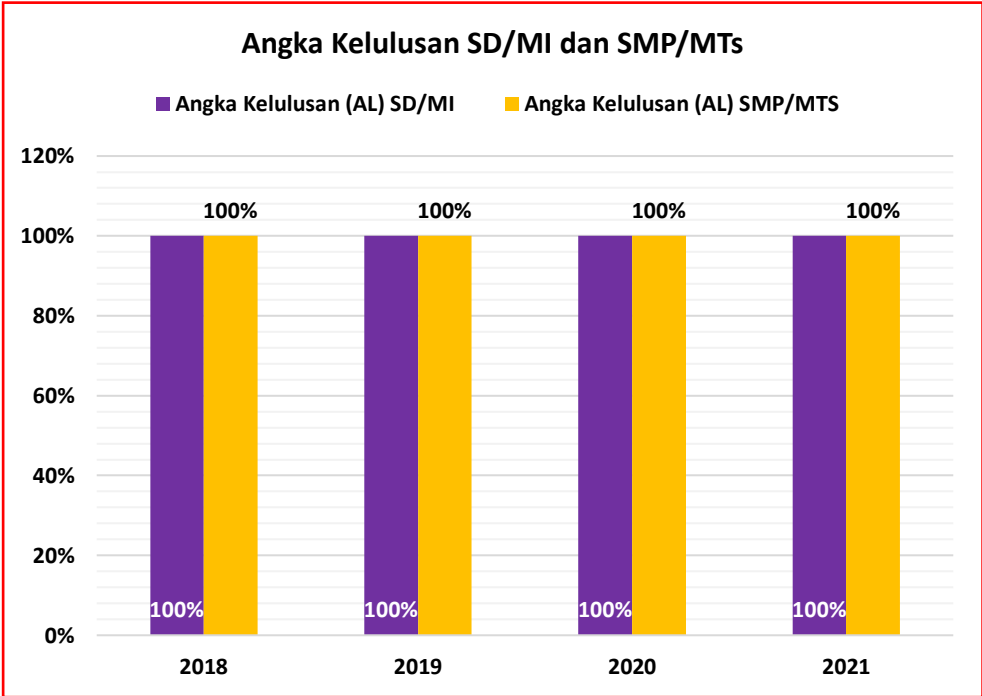
jenjang pendidikan SMP/MTs/Paket B, dimana pada tahun 2021 masih di bawah 50 %. Untuk itu perlu adanya dukungan terutama dari orang tua dalam memberikan akses untuk sekolah kepada anak disamping kontribusi pemerintah daerah melalui dukungan program dan kegiatan pada jenjang pendidikan dasar.

7. Angka Kelulusan (AL) SD/MI dan SMP/MTs

Angka kelulusan sekolah adalah menyelesaikan pelajaran pada kelas/tingkat terakhir suatu jenjang pendidikan di sekolah negeri maupun swasta dengan mendapatkan tanda tamat/ijazah. Seorang yang belum mengikuti pelajaran pada kelas tertinggi tetapi jika ia mengikuti ujian dan lulus maka dianggap tamat.

Berdasarkan hasil capaian indikator kinerja utama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2018-2021, menunjukan bahwa angka kelulusan pada jenjang pendidikan dasar SD dan SMP adalah 100% tiap tahun. Angka kelulusan di Kabupaten Seram Bagian Barat dapat di lihat pada grafik berikut ini.

Gambar 2.17. Grafik Persentase Angka Kelulusan (AL) SD/MI dan SMP/MTs di Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2018-2021



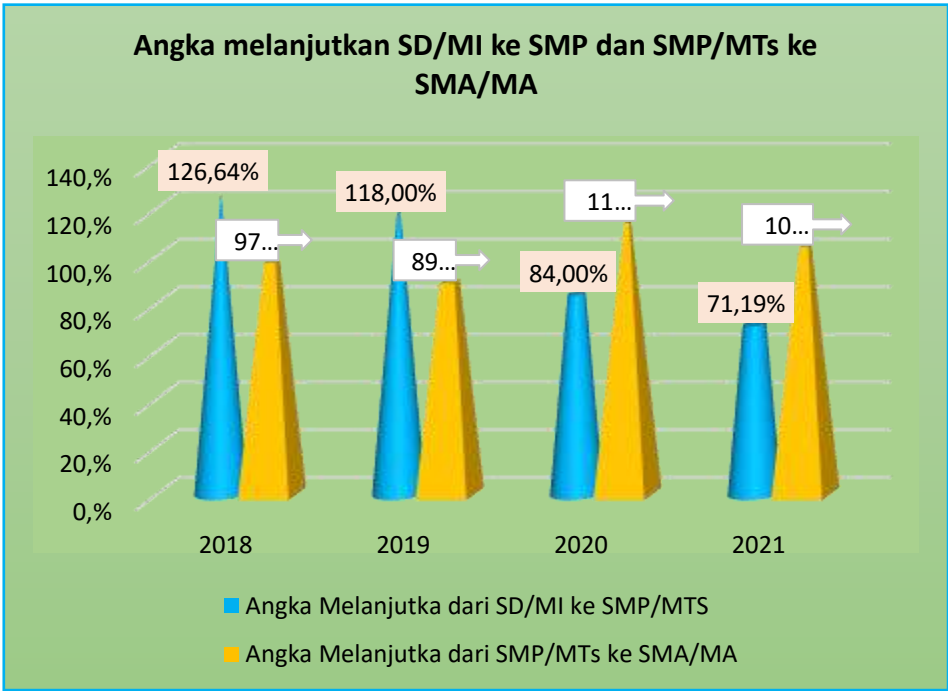
Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. SBB, 2022

Pada Kabupaten Seram Bagian Barat Standar Kompetensi Lulusan menjadi instrumen penting dan menjadi dasar kompetensi lulusan yang dikompilasi dengan hasil belajar peserta didik. Standar ini harus dapat diukur dan diamati untuk memudahkan pengambilan keputusan bagi guru, tenaga kependidikan yang lain, peserta didik, orang tua dan penentu kebijaksanaan.

8. **Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTS dan SMP/MTs ke SMA/MA**

Angka melanjutkan sekolah dapat didefenisikan sebagai Persentase siswa yang duduk di kelas terakhir suatu jenjang pendidikan x pada tahun ajaran lalu dan duduk di kelas 1 jenjang pendidikan yang lebih tinggi pada tahun ajaran sekarang, terhadap siswa yang duduk di kelas terakhir jenjang pendidikan x pada tahun ajaran lalu. Angka Melanjutka dari SD/MI ke SMP/MTS dan SMP/MTs ke SMA/MA pada Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2018-2022 dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

Gambar 2.18. Grafik Persentase Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP dan SMP/MTs ke SMA/MA di Kabupaten Seram Bagian Barat Tahu 2018-2021.



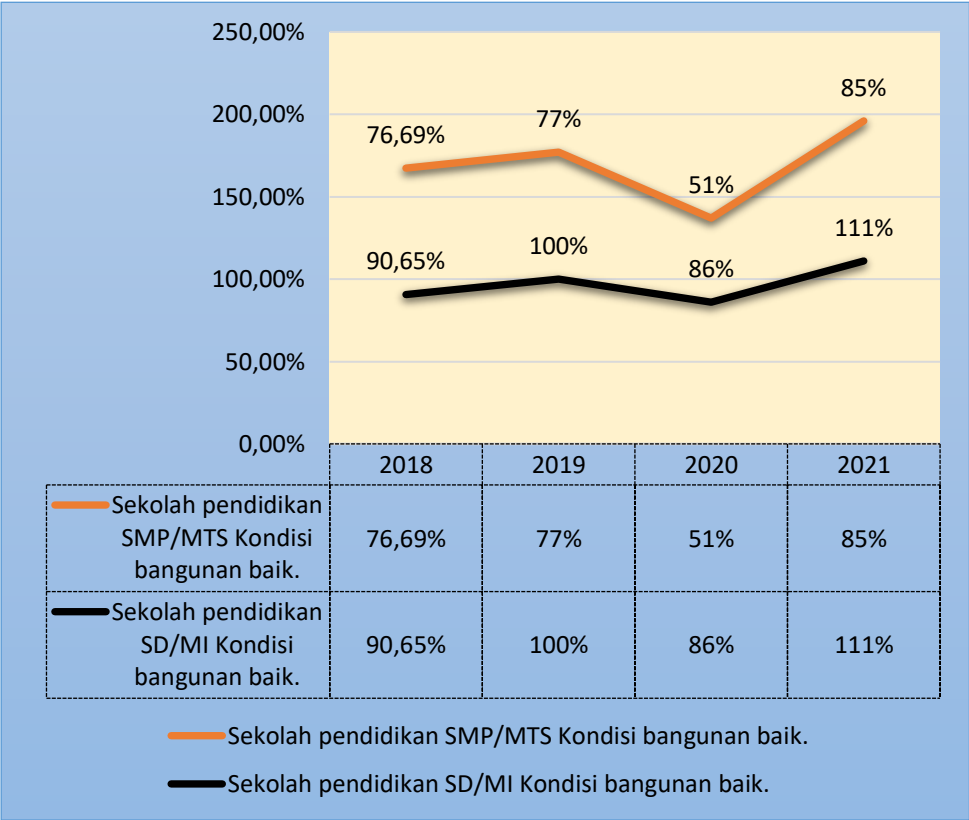
Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. SBB, 2022

Berdasarkan hasil capaian indikator kinerja utama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2018-2021, Angka Melanjutkan sekolah dari SD/MI ke SMP sangat baik dengan persentase rata-rata di atas 100%, hal ini menunjukkan bahwa keinginan peserta didik pada jenjang pendidikan SD untuk melanjutkan sekolah pada jenjang pendidikan SMP sangat baik. Kemudian untuk jenjang pendidikan SMP/MTs setiap tahun mengalami tren penurunan namun tidak signifikan.

9. Sekolah pendidikan SD/MI dan SMP/MTs Kondisi Bangunan Baik

Bangunan gedung sebagai tempat manusia melakukan kegiatan, mempunyai peranan yang sangat strategis dalam pembentukan watak, perwujudan kreativitas, dan jati diri manusia, khususnya bagi peserta didik. Persentase sekolah pendidikan SD/MI dan SMP/MTs dengan kondisi baik dapat dilihat pada grafik dibawah ini.

Gambar 2.19. Grafik Persentase Sekolah pendidikan SD/MI dan SMP/MTs Kondisi Bangunan Baik di Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2018-2021



Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. SBB, 2022

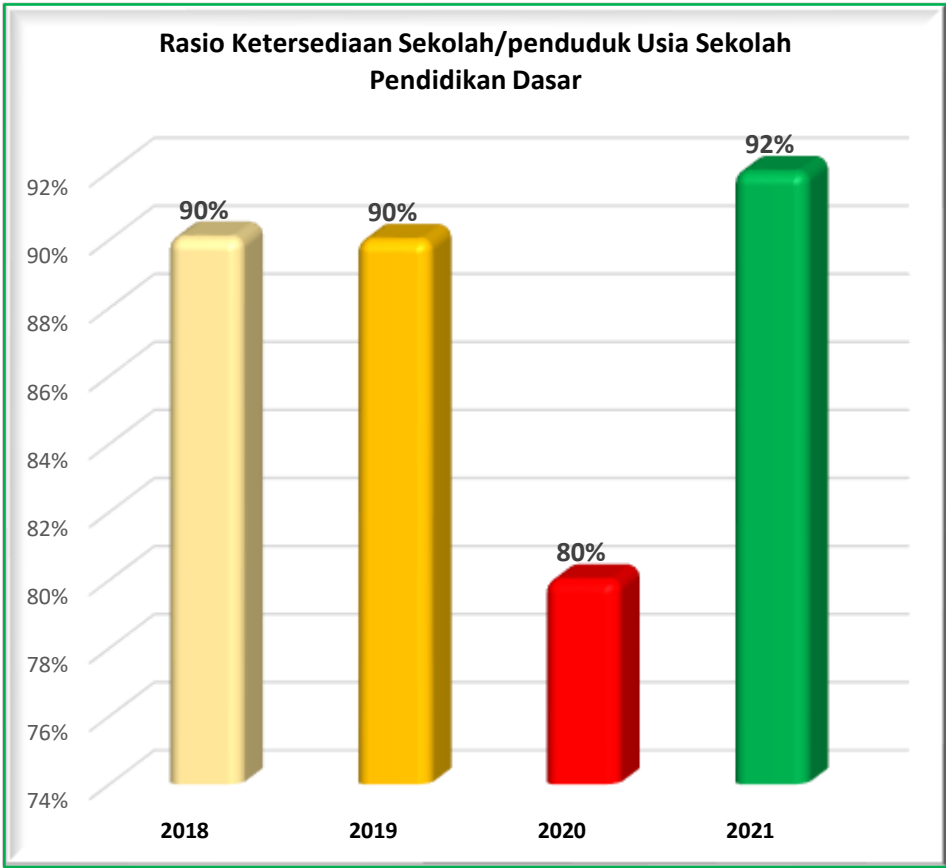
Sesuai dengan capaian indikator utama pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada RPJMD Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2018-2022, terlihat bahwa kondisi bangunan dengan kondisi baik pada Sekolah Dasar (SD) yang mengalami kenaikan di atas 100%, namun belum sepenuhnya menjawab permasalahan yang ada pada Kabupaten Seram Bagian Barat karena masih ada sekolah yang harus intervensi oleh pemerintah baik yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) maupun Dana Alokasi Khusus (DAK). Selanjutnya untuk bangunan SMP dengan kondisi baik rata-rata berada pada 51%-85%, artinya bahwa dukungan perbaikan sarana dan prasarana perlu direncanakan sejak dini untuk menjawab kondisi bangunan pada jenjang pendidikan SMP lebih baik.

Seiring dengan berjalannya waktu, terjadi banyak perubahan, baik secara fisik maupun finansial pada bangunan gedung yang sudah jadi. Oleh karena itu, perlu adanya perhatian yang lebih terhadap bangunan tersebut. Hal ini dapat diwujudkan dengan dilakukannya kegiatan pemeliharaan bangunan gedung. Namun seringkali kegiatan pemeliharaan ini hanya dilakukan bila terdapat masalah pada bangunan tersebut. Terbatasnya dana merupakan salah satu penyebab dimana kegiatan pemeliharaan ini seringkali dilupakan.

10. Rasio Ketersediaan Sekolah/penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar

Rasio Ketersediaan Sekolah/penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar adalah Perbandingan Jumlah sekolah dasar per 10.000 jumlah penduduk usia dasar. Formulasnya adalah Jumlah sekolah (SD/MI) dibagi Jumlah penduduk usia (7 s.d 12) thn dikali 10.000. Rasio Ketersediaan Sekolah/penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Gambar 2.20. Grafik Rasio Ketersediaan Sekolah/penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar di Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2018-2021



Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. SBB, 2022

Capaian rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar sesuai dengan realisasi indikator utama perangkat daerah pada pendidikan dasar terbesar pada tahun 2021 yaitu sebesar 92% dan terendah pada tahun 2018 yakni 80%, namun secara keseluruhan rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar sangat baik. Ketersediaan sekolah SD/MI hampir menyeluruh ada di semua desa di Kabupaten Seram Bagian Barat, namun dari segi akses dan transportasi tidak semua penduduk usia 7-12 tahun merasakan aksesibilitas yang baik dalam menempuh pendidikan di SD/MI. Ke depan persoalan aksesibilitas harus menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

11. Rasio Guru/murid Sekolah Pendidikan Dasar

Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru tingkat pendidikan dasar per 10.000 jumlah murid pendidikan dasar

(Jumlah Guru (SD/MI) dibagi Jumlah Murid (SD/MI) dikali 10.000).

Gambar 2.21. Grafik Rasio Guru/murid Sekolah Pendidikan Dasar di Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2018-2021



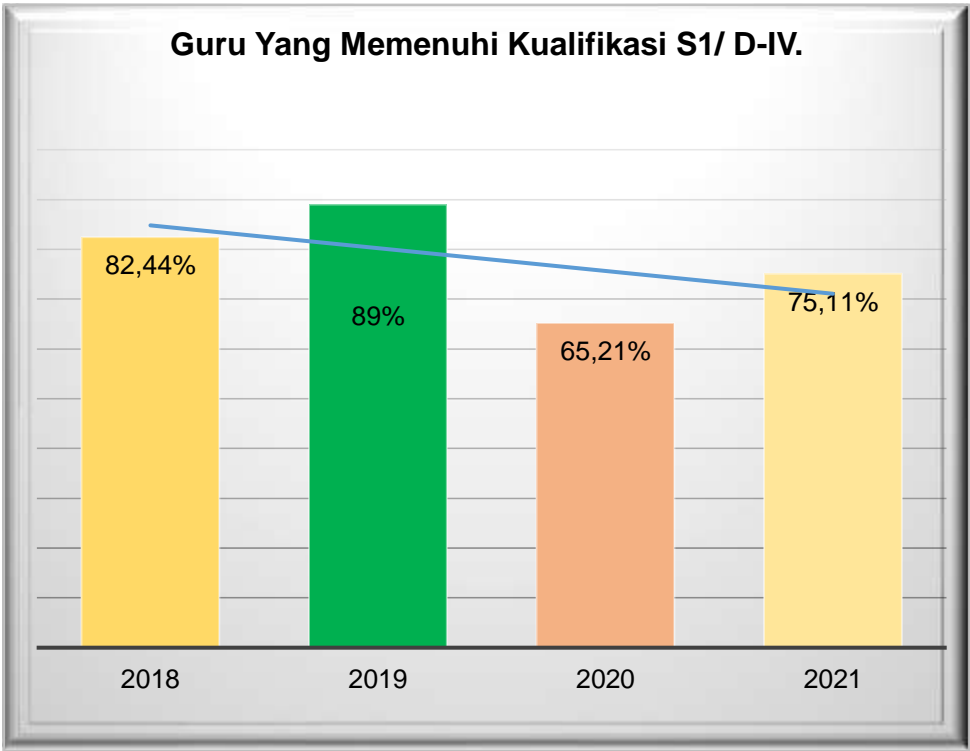
Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. SBB, 2022

Hasil capaian indikator utama pada rasio guru/sekolah pendidikan dasar di Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2018-2022 di Kabupaten Seram Bagian Barat tertinggi pada tahun 2020 dan 2021 yaitu 858%. Dan terendah pada tahun 2019 yaitu 103,49%.

12. Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S1/ D-IV

Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV adalah Persentase Pendidik Pada Jenjang Sekolah Dasar yang Memiliki Ijazah S1/D-IV dan Sertifikat Pendidik di Kabupaten Seram Bagian Barat pada periode waktu tertentu.

Gambar 2.22. Grafik Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV di Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2018-2021



Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. SBB, 2022

Hasil capaian indikator utama pada guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV di Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2018-2022 mengalami tren kenaikan dan penurunan yang fluktuatif setiap tahunnya, pada tahun 2019 angka guru yang memenuhi S1/D-IV merupakan persentase tertinggi yakni sebesar 89% dan terendah pada tahun 2020 yaitu sebesar 65,21%.

b. Kesehatan

Urusan bidang kesehatan merupakan prasyarat bagi peningkatan produktivitas masyarakat. Kondisi masyarakat yang sehat dapat mendukung proses dan dinamika pembangunan suatu daerah.

Tanggungjawab Pemerintah Daerah dalam urusan kesehatan mencakup 5 (lima) aspek diantaranya sebagai berikut:

- 1. Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat melalui sistem jaminan sosial nasional bagi Upaya Kesehatan Perorangan.
- 2. Ketersediaan segala bentuk Upaya Kesehatan yang bermutu, efisien, dan terjangkau.
- 3. Ketersediaan lingkungan tatanan, fasilitas kesehatan baik fisik maupun sosial bagi masyarakat untuk mencapai derajat

kesehatan yang setinggi-tingginya.

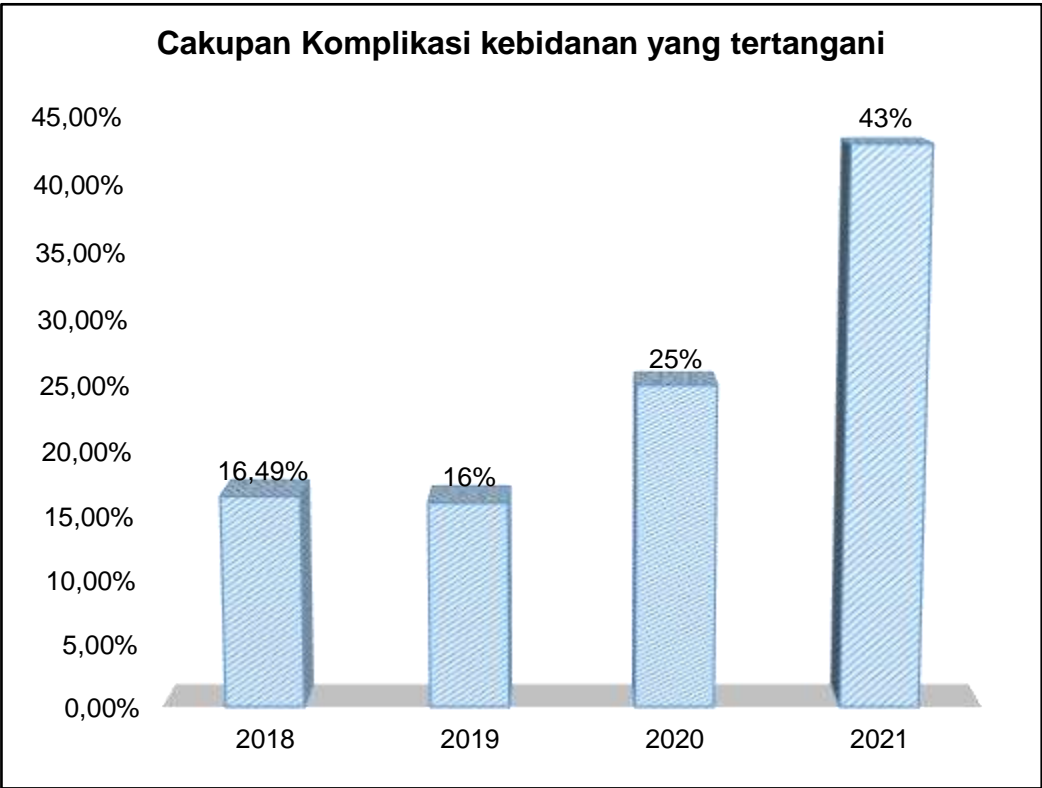
- 4. Ketersediaan akses informasi edukasi dan fasilitas pelayanan kesehatan untuk meningkatkan dan memelihara derajat kesehatan setinggi-tingginya.
- 5. Pemberdayaan dan mendorong peran aktif masyarakat dalam segala bentuk upaya kesehatan

1. **Cakupan Komplikasi Kebidanan Yang Tertangani**

Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani adalah ibu dengan komplikasi kebidanan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu yang mendapat penanganan definitif sesuai dengan standar oleh tenaga kesehatan terlatih pada tingkat pelayanan dasar dan rujukan (Polindes, Puskesmas, Puskesmas pembantu, Rumah Bersalin, RSIA/RSB, dan RSU).

Sesuai dengan data capaian indikator kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2018-2021, cakupan komplikasi kebidanan yang tertangani terlihat seperti grafik di bawah ini.

Gambar 2.23. Grafik Cakupan Komplikasi Kebidanan Yang Tertangani di Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2018-2021



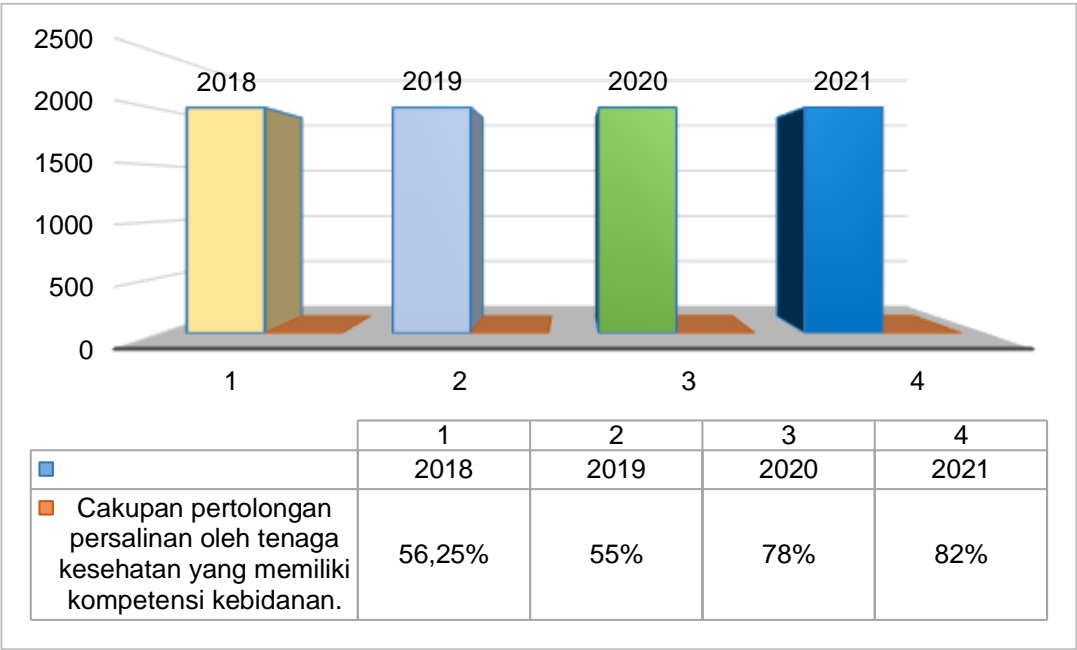
Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Seram Bagian Barat, 2022

Data menunjukkan bahwa cakupan komplikasi kebidanan yang tertangani di Kabupaten Seram Bagian Barat setiap tahun mengalami peningkatan, yakni pada tahun 2019 16%, 2020 25 % dan ertinggi pada tahun 2021 yaitu 43%. Hal ini menunjukkan bahwa semua ibu hamil yang datang ke sarana kesehatan atau ditemukan oleh tenaga kesehatan yang belum tertanganai kurang lebih 57%. Komplikasi yang dimaksud adalah kesakitan pada ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas yang dapat mengancam jiwa ibu dan atau bayi.

2. Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan adalah jumlah ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.

Gambar 2.24. Grafik Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan Tahun 2018-2021



Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Seram Bagian Barat, 2022

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan sejak 2018 sampai dengan 2021 cenderung meningkat namun pada posisi 2018 ke 2019 mengalami penurunan. Penurunan ini bukan karena kurangnya penanganan namun karena sebagian dari jumlah ibu sasaran bersalin belum proses melahirkan sampai dengan akhir tahun 2019, Hal ini menunjukkan meningkatnya kemampuan

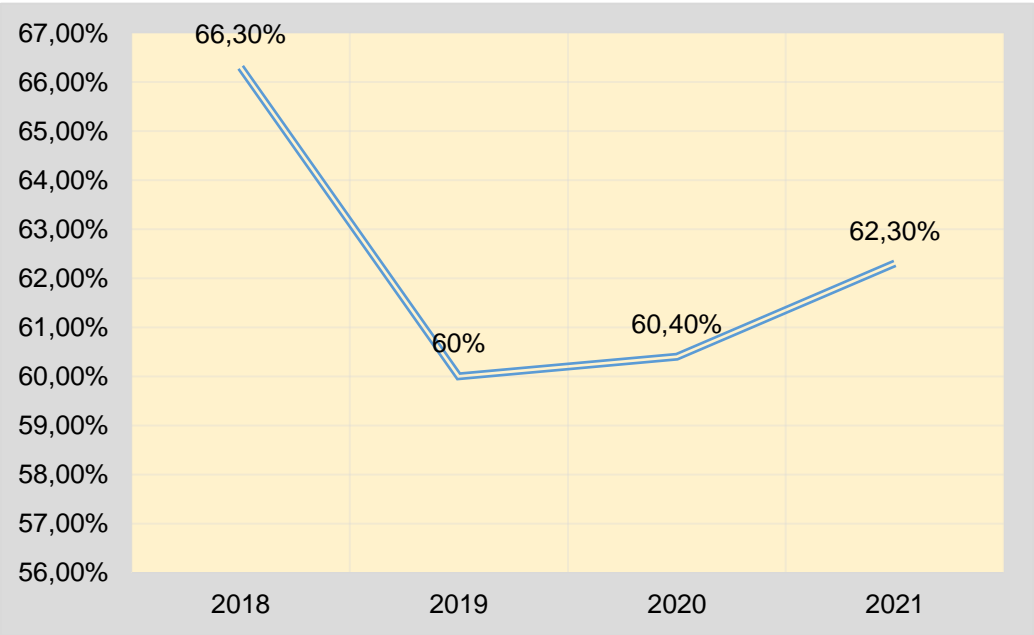
manajemen program Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) dalam pertolongan persalinan sesuai standar.

3. **Cakupan Desa/ Kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI)**

UCI (*Universal Child Immunization*) ialah tercapainya imunisasi dasar secara lengkap pada bayi (0- 11 bulan), ibu hamil, WUS dan anak sekolah tingkat dasar. Imunisasi dasar lengkap pada bayi meliputi: 1(satu) dosis BCG, 3 (tiga) dosis DPT, 4 (empat) dosis Polio, 4 (empat) dosis Hepatitis B,1 (satu) dosis Campak.

Capaian indikator utama Cakupan Desa/ Kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI) Dinas Kesehatan Kabupaten Seram Bagian Barat tahun 2018-2021 seperti terlihat pada grafik di bawah ini.

Gambar 2.25. Grafik Cakupan Desa/ Kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI) Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan Tahun 2018-2021



Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Seram Bagian Barat, 2022

Pada tahun 2018 cakupan desa kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI) adalah 66,30% dan merupakan persentase tertinggi dan yang terendah pada tahun 2019 yaitu 60%. Penyebab data *Universal Child Immunization* (UCI) menurun diakibatkan oleh kurangnya antusias masyarakat dalam pelaksanaan imunisasi dilihat dari masyarakat yang selalu melewati imunisasi, Pelaksanaan sudah sesuai dengan tugas peran masing-masing orang yang terlibat, namun pelaksanaan sering terkendala karena kurang matangnya perencanaan yang berdampak pada pelaksanaan pemberian

imunisasi pada bayi. Diharapkan kepada petugas kesehatan melakukan sosialisasi pentingnya Universal Child Immunization (UCI) bagi Ibu dan bayi serta kesadaran masyarakat dalam mendukung kegiatan tersebut.

4. Cakupan Balita Gizi Buruk Yang Mendapat Perawatan

Balita gizi buruk mendapat perawatan adalah Balita gizi buruk (sangat kurus) yang dirawat inap maupun rawat jalan (sesuai tata laksana gizi buruk) di fasilitas pelayanan kesehatan dan masyarakat.

Gambar 2.26. Grafik Cakupan Balita Gizi Buruk Yang Mendapat Perawatan Tahun 2018-2021



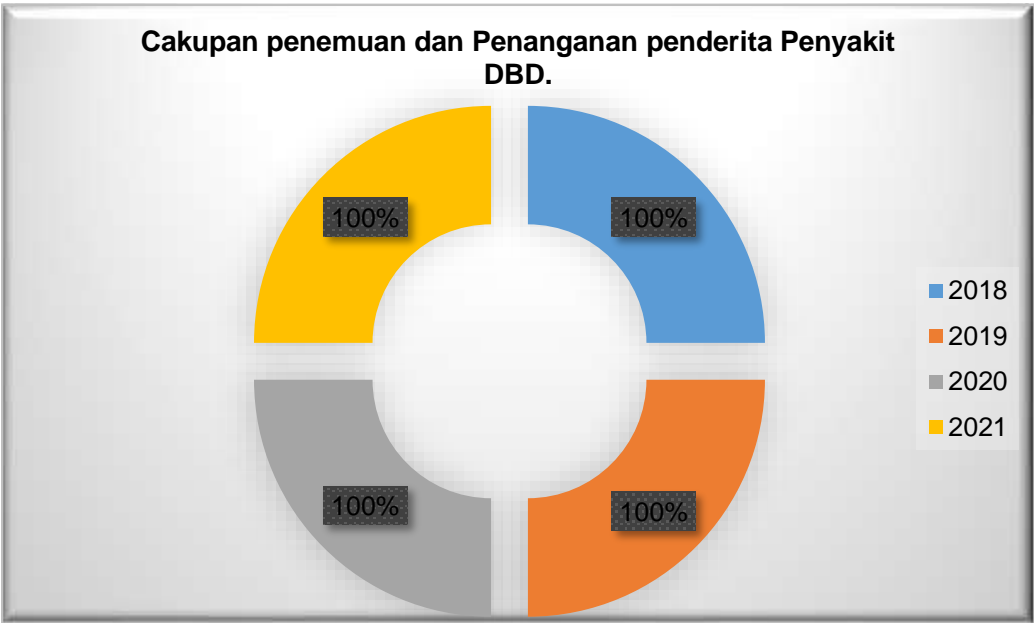
Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Seram Bagian Barat, 2022

Capaian indikator cakupan balita gizi buruk yang mendapat perawatan sesuai realisasi RPJMD Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2018-2021 adalah 100%, hal ini menunjukkan bahwa balita gizi buruk semuanya mendapat pelayanan kesehatan yang memadai pada Kabupaten Seram Bagian Barat.

5. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD

Penyakit-penyakit yang ditularkan vektor dan menjadi masalah kesehatan di Indonesia adalah malaria, filariasis dan demam berdarah. Penularannya dari orang ke orang dengan perantara nyamuk, demam berdarah sendiri ditularkan oleh nyamuk *Aedes aegypti* dan *Aedes albopictus*. Penyakit DBD dapat dijumpai di daerah sub tropik dan tropik dan mengenai sekitar 500 – 100 juta jiwa per tahun. dengan demikian sekitar dua per lima penduduk dunia bertempat tinggal di daerah berisiko tinggi termasuk Indonesia.

Gambar 2.27. Grafik Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD Tahun 2018-2021



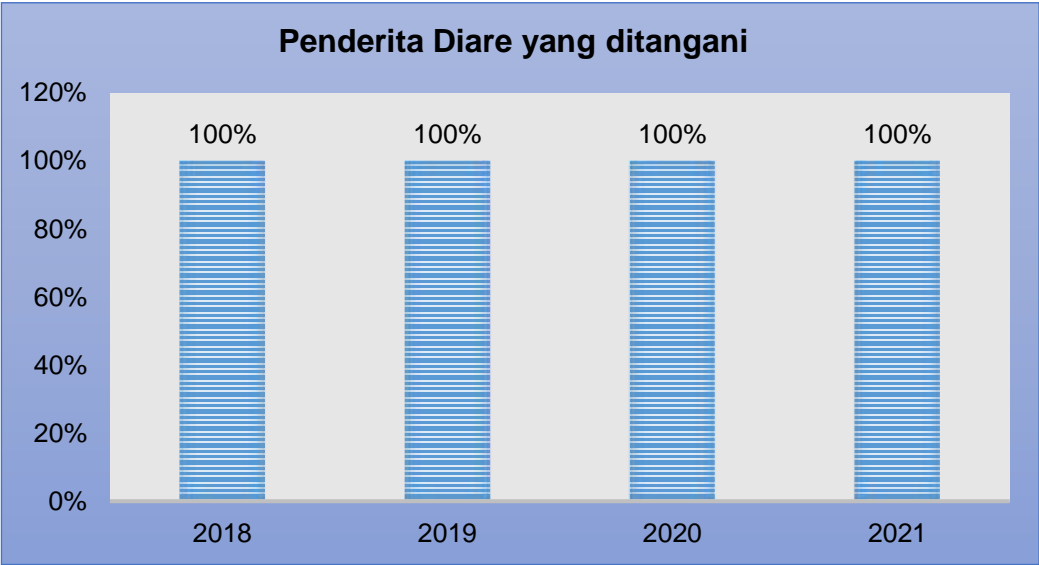
Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Seram Bagian Barat, 2022

Pada grafik diatas menunjukan bahwa cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD di Kabupaten Seram Bagian Barat sejak tahun 2018-2021 adalah 100 %. Dengan demikian penemuan dan penanganan penderita DBD di 11 Kecamatan di Kabupaten Seram Bagian Barat berjalan dengan baik. DBD terutama diderita penduduk <15 tahun, mereka yang berpendidikan rendah dan mereka yang hidup di perkotaan juga lebih rawan terkena DBD. Penderita demam berdarah dengue (DBD) yang ditangani adalah penderita DBD yang ditangani sesuai standar satu wilayah dalam waktu satu tahun dibandingkan dengan jumlah penderita DBD yang ditemukan/ dilaporkan dalam kurun waktu satu tahun yang sama.

6. Penderita Diare Yang Ditangani

Menurut World Helath Organization (WHO) diare adalah kejadian buang air besar dengan konsistensi lebih cair dari biasanya, dengan frekuensi tiga kali atau lebih dalam periode 24 jam. Diare merupakan penyakit berbasis lingkungan yang disebabkan oleh infeksi mikroorganisme meliputi bakteri, virus, parasit, protozoa, dan penularannya secara fekal-oral.

Gambar 2.28. Grafik Penderita Diare yang ditangani Tahun 2018-2021



Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Seram Bagian Barat, 2022

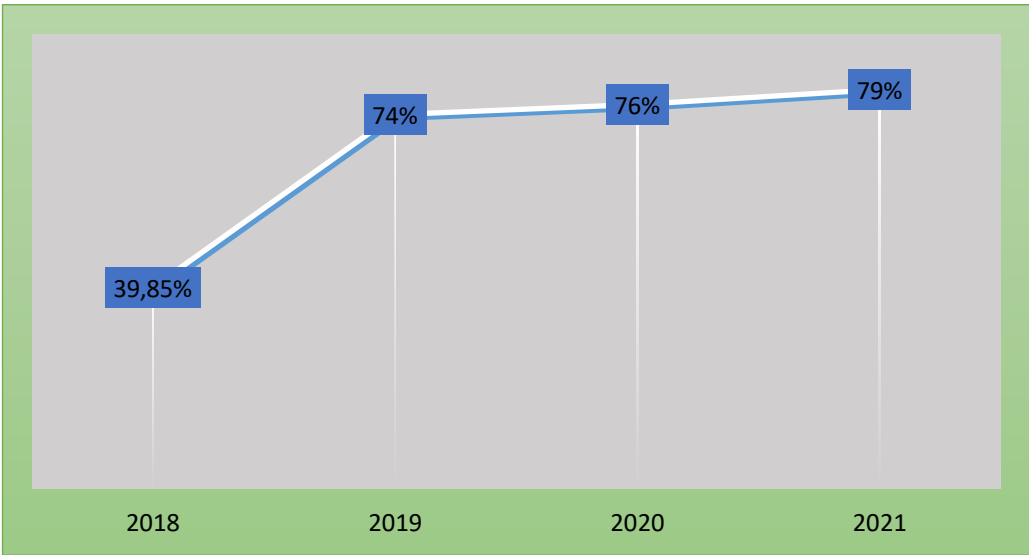
Sesuai dengan capaian indikator kinerja utama pada Dinas Kesehatan Kabupaten Seram Bagian Barat pada tahun 2018-2021 pada penderita diare yang ditangani, terlihat bahwa pada periodisasi waktu tersebut mencapai angka 100%. Dapat disimpulkan bahwa masalah diare pada Kabupaten Seram Bagian Barat dapat ditangani dengan baik.

Kejadian diare sering dikaitkan dengan sumber air yang tercemar, sanitasi yang tidak memadai, praktik kebersihan yang buruk, makanan yang terkontaminasi dan malnutrisi.⁽¹³⁾ Kejadian diare dapat disebabkan beberapa faktor antara lain : faktor pendidikan, pekerjaan, sosial ekonomi dan faktor makanan dan minuman yang dikonsumsi, faktor balita seperti umur balita, gizi balita, serta faktor lingkungan.

7. Cakupan Kunjungan Bayi

Cakupan kunjungan bayi adalah Cakupan kunjungan bayi umur 29 hari – 11 bulan di sarana pelayanan kesehatan polindes, pustu, puskesmas, rumah bersalin dan rumah sakit maupun di rumah, posyandu, tempat penitipan anak, panti asuhan dan sebagainya melalui kunjungan petugas.

Gambar 2.29. Grafik Cakupan Kunjungan Bayi Tahun 2018-2021



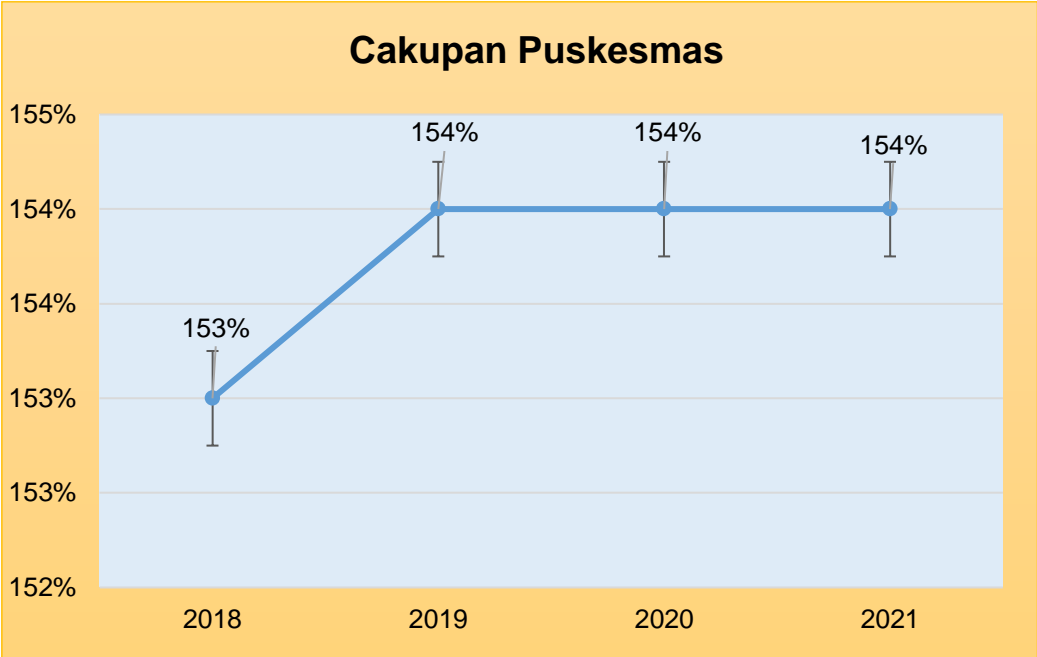
Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Seram Bagian Barat, 2022

Berdasarkan capaian indikator kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Seram Bagian Barat pada cakupan kunjungan bayi pada tahun 2018-2021 menunjukkan kenaikan eksponensial dari tahun ke tahun. Cakupan kunjungan bayi terendah pada tahun 2018 dan tertinggi pada tahun 2021. Pada Kabupaten Seram Bagian Barat Setiap bayi memperoleh pelayanan kesehatan minimal 4 kali yaitu satu kali pada umur 29 hari-3 bulan, 1 kali pada umur 3-6 bulan, 1 kali pada umur 6-9 bulan, dan 1 kali pada umur 9-11 bulan. Pelayanan Kesehatan tersebut meliputi pemberian imunisasi dasar BCG, DPT HB1-3, Polio 1-4, Campak, stimulasi deteksi intervensi dini tumbuh kembang SDIDTK bayi dan penyuluhan perawatan kesehatan bayi. Indikator ini mengukur kemampuan manajemen program KIA dalam melindungi bayi sehingga kesehatannya terjamin melalui penyediaan pelayanan kesehatan.

8. Cakupan Puskesmas

Puskesmas yaitu suatu unit penyelenggara fungsional yang bermanfaat sebagai pusat pembangunan kesehatan, pusat pembinaan peran serta masyarakat dalam bidang kesehatan serta pusat pelayanan kesehatan tingkat kesatu yang mengadakan kegiatannya secara menyeluruh, terpadu yang berkesinambungan pada sebuah masyarakat yang berlokasi tinggal dalam sebuah wilayah tertentu. Cakupan puskesmas pada Kabupaten Seram Bagian Barat tahun 2018-2021 seperti terlihat pada grafik di bawah ini.

Gambar 2.30. Grafik Cakupan Puskesmas Tahun 2018-2021



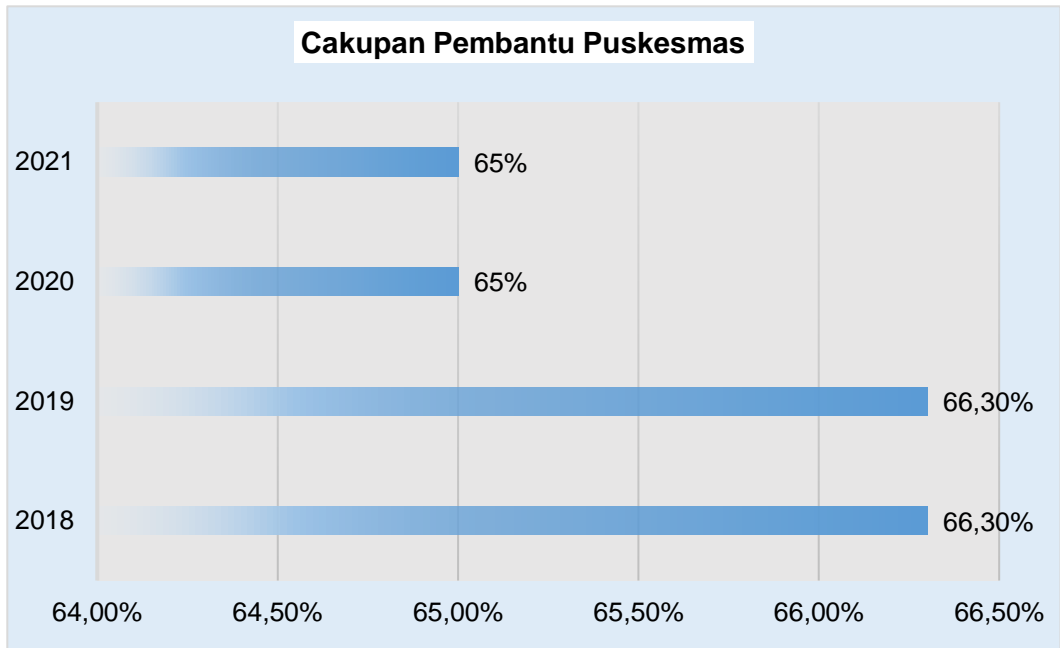
Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Seram Bagian Barat, 2022

Capaian indikator Cakupan puskesmas Dinas Kesehatan pada tahun 2018-2021 berada pada kisaran 153-154%, angka tentu sama dengan target persentase yang di rencanakan olah Dinas kesehatan, dengan demikian cakupan puskesmas pada Kabupaten Seram Bagian Barat tercapai.

9. Cakupan Pembantu Puskesmas

Puskesmas merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kesehatan yang memiliki fungsi untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan tingkat pertama. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat, Puskesmas harus didirikan pada setiap kecamatan, sehingga wilayah kerja puskesmas maksimal satu kecamatan. Sedangkan, dalam kondisi tertentu dalam satu kecamatan dapat didirikan lebih dari satu puskesmas untuk meningkatkan jangkauan pelayanan puskesmas terhadap wilayah kerjanya. Pada tahun 2021, Kabupaten Seram Bagian Barat memiliki 17 unit puskesmas, 53 puskesmas pembantu, 17 puskesmas keliling dan 9 poskesdes.

Gambar 2.31. Grafik Cakupan Pembantu Puskesmas Tahun 2018-2021



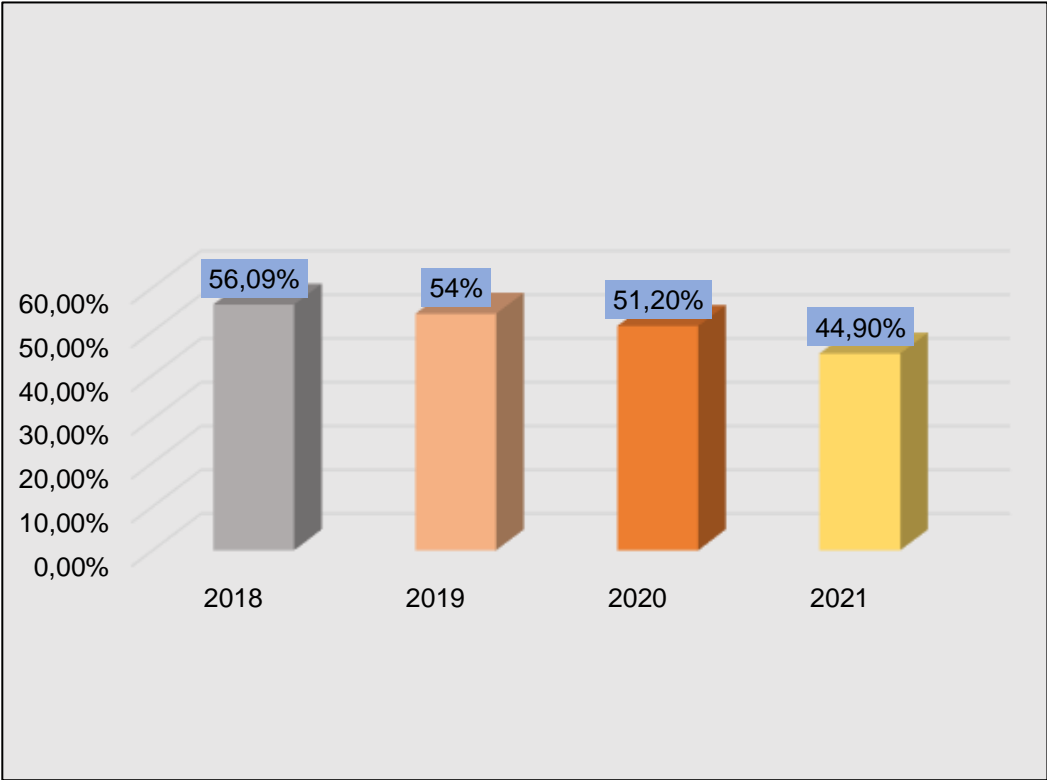
Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Seram Bagian Barat, 2022

Pada tahun 2018-2019 cakupan pembantu puskesmas pada Kabupaten Seram Bagian Barat adalah 66,30% dan menurun pada tahun 2020-2021 yaitu 65%. Jumlah penduduk Seram Bagian tahun 2021 sebanyak 212.494 jiwa. Jumlah puskesmas yang tersedia sudah cukup ideal. Namun demikian, pelayanan di puskesmas masih perlu ditingkatkan terutama dalam pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan.

10. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA selama kurun waktu tahun 2018 - 2021 masih fluktuatif. Masih rendahnya cakupan karena masih adanya sebagian masyarakat yang dropout dalam berobat.

Gambar 2.32. Grafik Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA

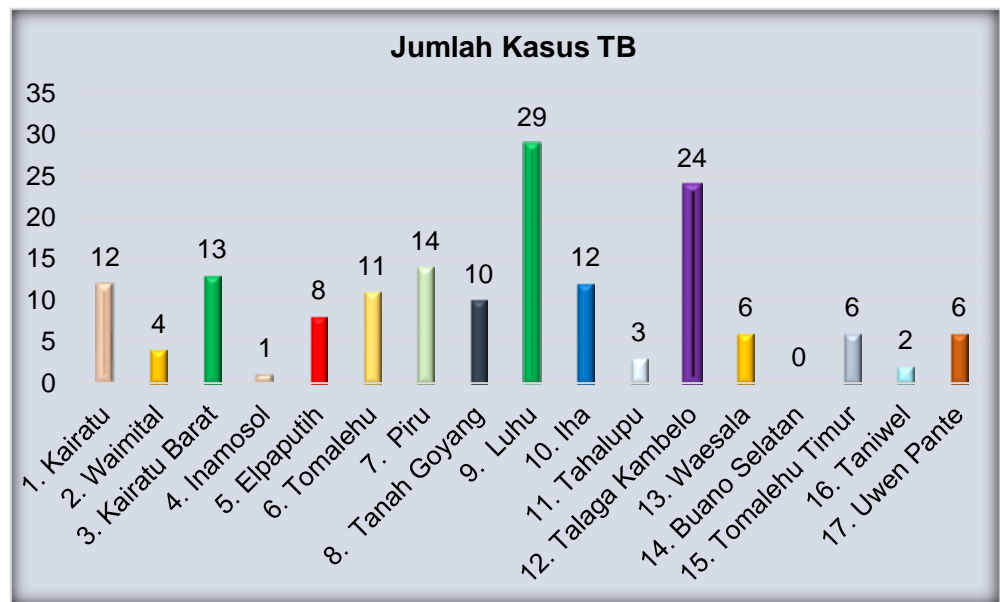


Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Seram Bagian Barat, 2022

Cakupan Penemuan dan penanganan penderita Penyakit TBC BTA adalah jumlah penderita baru TBC BTA yang ditemukan dan diobati dibagi dengan jumlah perkiraan penderita baru TBC BTA dikalikan 100. Capaian cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA menurun setiap tahunnya. Terbesar pada tahun 2018 dan terendah pada tahun 2021 yaitu 44,90%.

Jumlah semua kasus Tuberkulosis (CNR) pada tahun 2021 tercatat sebanyak 161 kasus. Kasus paling banyak terdapat di Puskesmas Luhu Kecamatan Huamual sebanyak 29 penderita di ikuti dengan puskesmas talaga kambelo sebanyak 24 kasus. Pada tahun 2021, kasus TB dengan angka 0 (tidak ada penderita) terdapat pada puskesmas Buano Selatan. Jumlah kasus TBC dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

Gambar 2.33. Grafik Case Notification Rate (CNR) Seluruh Kasus TB Per Puskesmas di Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2021



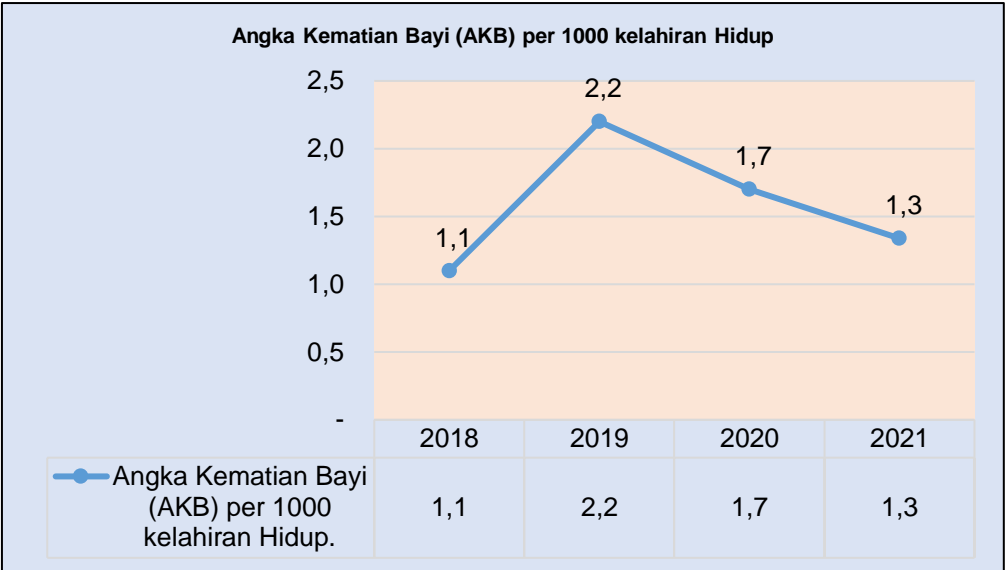
Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Seram Bagian Barat, 2022

Seseorang yang menunjukkan gejala batuk > 2 minggu disertai dengan panas badan merupakan terduga kasus tuberkolosis, sementara Terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan sesuai standar adalah terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dengan penegakan diagnosis tuberkulosis melalui pemeriksaan bakteriologis dan klinis, dilakukan pemeriksaan penunjang lainnya atau di rujuk ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjut serta dilakukan pengobatan sesuai standar jika dinyatakan tuberkulosis (register TBC 06). Kasus tertinggi pada Puskesmas luhu yakni sebanyak 29 kasus, Dengan jumlah kasus tuberkulosis yang tinggi akan meningkatkan penularan penyakit, diperlukan langkah pengendalian yang tepat. Salah satu strategi utama dalam penanggulangan tuberkulosis adalah penemuan kasus dan pengobatan tuberkulosis.

11. Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran Hidup

Angka Kematian Bayi (AKB) merupakan kematian saat setelah bayi lahir sampai bayi belum berusia satu tahun. AKB adalah banyaknya kematian bayi berusia dibawah satu tahun per 1.000 kelahiran hidup. Kematian bayi menjadi salah satu indikator SDGs atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yaitu mengurangi angka kematian bayi hingga 12 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2030.

Gambar. 2.34. Grafik Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran Hidup Tahun 2018-2021



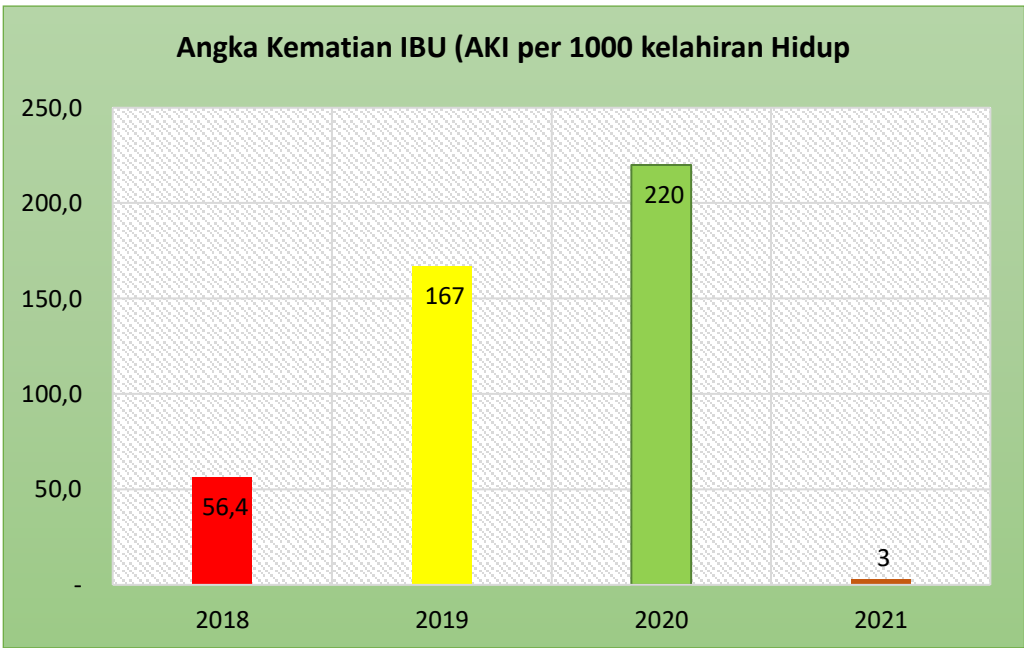
Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Seram Bagian Barat, 2022

Selama periode 4 tahun (2018-2021), AKB di Kabupaten Seram Bagian Barat dibawah target TPB 12/1.000 kelahiran hidup. Pada tahun 2021, AKB di Kabupaten Seram Bagian Barat berada pada angka 1,3 per 1.000 kelahiran hidup. Namun demikian, upaya penurunan angka kematian bayi perlu untuk terus ditingkatkan hingga mencapai 0 kematian.

12. Angka Kematian IBU (AKI) per 1000 Kelahiran Hidup

Angka Kematian Ibu (AKI) adalah kematian perempuan yang terjadi saat kehamilan atau dalam 42 hari pasca melahirkan. Kematian ibu menjadi salah satu indikator SDGs atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yaitu mengurangi angka kematian ibu hingga 70 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2030.

Gambar 2.35. Grafik Angka Kematian Ibu (AKI) Per 100.000 Kelahiran Hidup Di Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2018-2021.



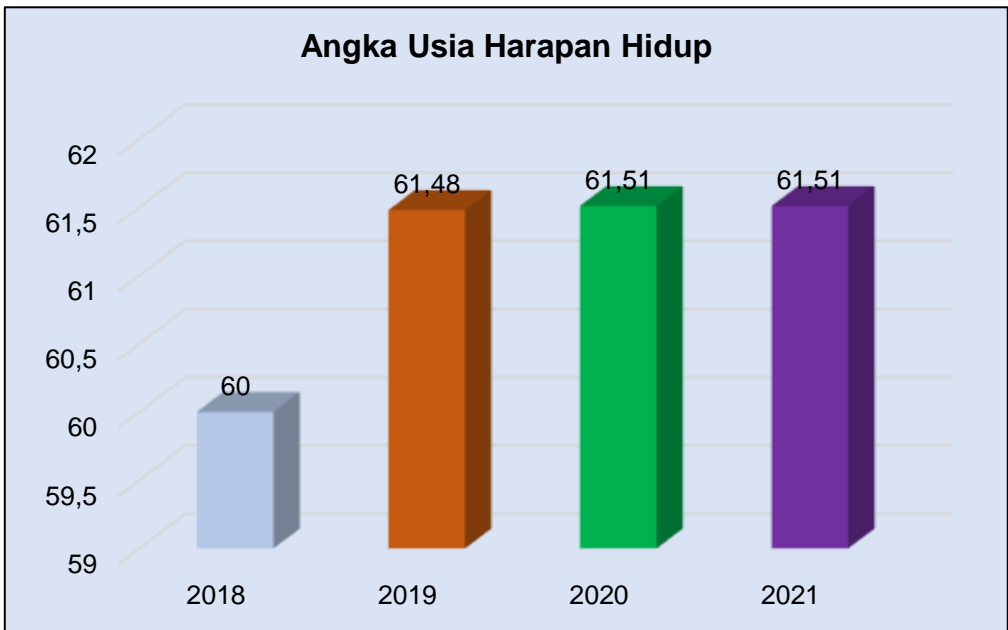
Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Seram Bagian Barat, 2022

Angka Kematian Ibu (AKI) di Kabupaten Seram Bagian Barat mengalami tren kenaikan pada interval tahun 2018 hingga 2020. Namun, mengalami penurunan kembali pada tahun 2020. Angka Kematian Ibu (AKI) pada tahun 2020 mencapai angka 220 orang. Berdasarkan profil kesehatan Kabupaten Seram Bnagian Barat tahun 2021, penyebab utama kematian ibu didominasi oleh pendarahan saat melahirkan dan hipertensi dalam kehamilan. Selain itu, ada beberapa hambatan yang menyebabkan AKI tinggi. Pertama, deteksi dini terhadap kasus yang belum maksimal, sehingga mengakibatkan keterlambatan penanganan. Kedua, keterbatasan puskesmas yang bisa melakukan PONED (pelayanan kasus kegawatdaruratan obsetetric neonatal), sedangkan rujukan ke RS yang mampu PONEK jarak tempuhnya cukup jauh.

13. Angka Usia Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan indikator penyusun Indeks Pembangunan Manusia dalam bidang kesehatan dimana angka tersebut mengindikasikan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. AHH mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat sehingga capaian positifnya sangat mengindikasikan perkembangan fasilitas pelayanan kesehatan di suatu wilayah.

Gambar 2.36. Grafik Angka Usia Harapan Hidup Tahun 2018-2021



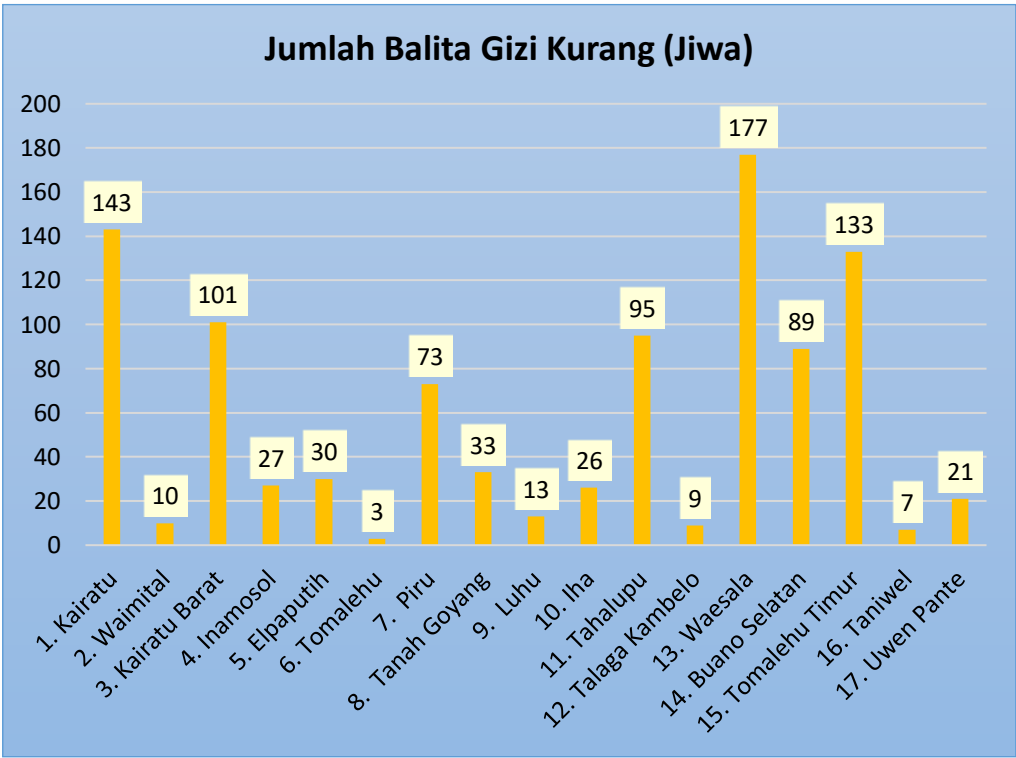
Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Seram Bagian Barat, 2022

Dari capaian angka harapan hidup Kabupaten Seram Bagian Barat terlihat bahwa derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Seram Bagian Barat mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini harus terus diupayakan program strategis pelayanan kesehatan. khususnya dalam hal cakupan dan pemerataan layanan kesehatan. Angka harapan hidup Seram Bagian Barat meningkat hingga mencapai 61,51 tahun pada tahun 2021. Angka ini mengindikasikan bahwa bayi yang baru lahir pada tahun 2021, akan memiliki kesempatan hidup hingga berumur 65-66 tahun.

14. Persentase Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan

Balita Gizi Kurang adalah status gizi yang didasarkan pada indeks berat badan menurut umur yang merupakan gabungan dari istilah gizi buruk dan gizi kurang dengan Z score 2 standar deviasi. Berikut persentase balita kurang gizi per kecamatan di Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2021.

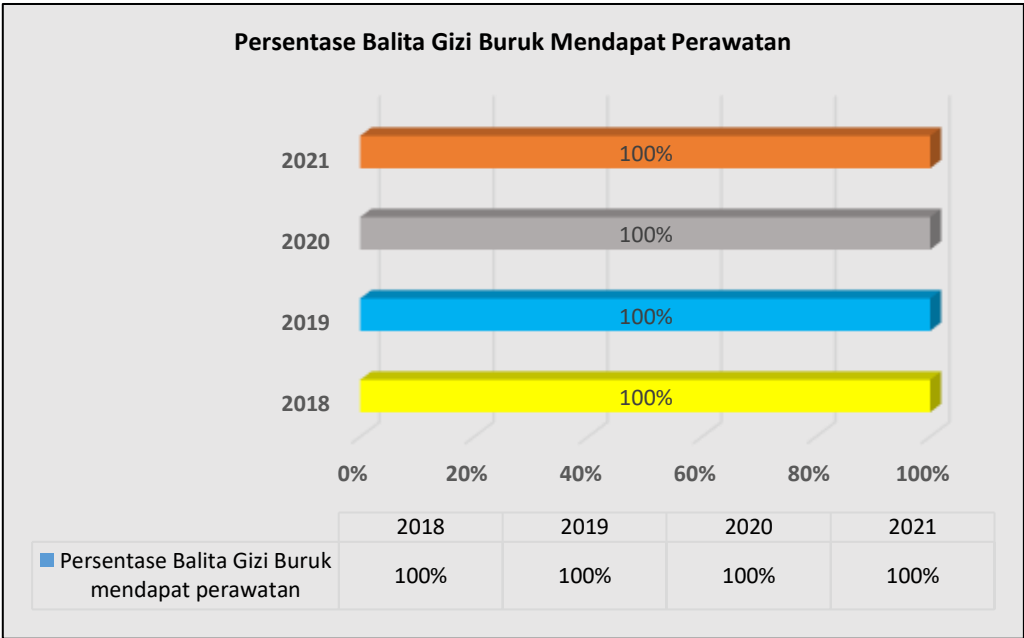
Gambar 2.37. Grafik Jumlah Jiwa Balita Gizi Kurang Per Puskesmas di Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2021



Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Seram Bagian Barat, 2022

Berdasarkan data Dinas kesehatan Kabupaten Seram Bagian Barat jumlah balita gizi kurang paling banyak terdapat pada puskesmas Waesala Kecamatan Huamual Belakang, kemudian disusul Kecamatan Kairatu dan Tomalehu Timur. Dari segi lokasi, dua kecamatan letaknya cukup jauh yaitu puskesmas Waesala (Kecamatan Huamual Belakang) dan Puskesmas Tomalehu Timur (Kecamatan Kepulauan Manipa). Dari segi fasilitas kesehatan dan kondisi daerah secara umum masih perlu perbaikan pada semua bidang.

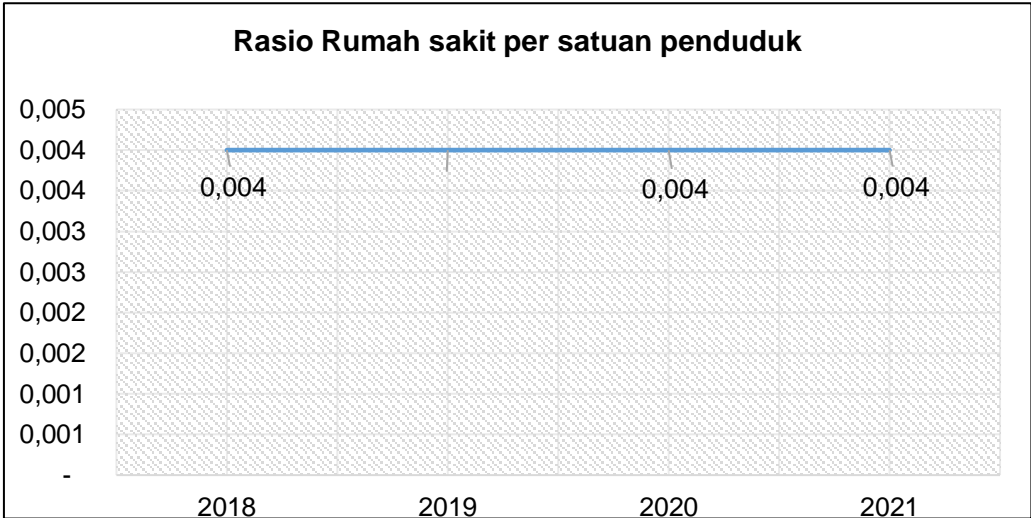
Gambar 2.38. Grafik Persentase Balita Gizi Buruk mendapat Perawatan di Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2018-2021



Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Seram Bagian Barat, 2022

Berdasarkan data capaian indikator kinerja pada balita gizi buruk mendapat perawatan di Seram Bagian Barat pada kurun waktu 2018-2021 adalah 100%, dengan demikian jumlah balita gizi buruk yang mendapat pelayanan sangat baik, namun perlu adanya perhatian dari Pemerintah Daerah dan Pusat dalam upaya pemberian layanan kesehatan yang maksimal bagi masyarakat khususnya pada balita yang mengalami gizi buruk melalui intervensi program dan kegiatan.

Gambar 2.39. Grafik Rasio Rumah sakit per Satuan Penduduk Tahun 2018-2022



Sumber : Rumah Sakit Umum Daerah Piru, 2022

Berdasarkan capaian indikator utama Rumah Sakit Umum Daerah Piru bahwa rasio rumah sakit persatuan penduduk rata-rata 0,004 pada tahun 2018-2021.

Tabel 2.23. Cakupan Pelayanan Rumah Sakit di Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2018-2021

No	Nama Rumah Sakit	Bed Occupancy Rate (BOR) (%)	Bed Turn Over (BTO) (Kali)	Turn of Interval (TOI) (Hari)	Length of Stay (LOS) (Hari)
1.	RSUD Piru	25,75%	17,35%	15,61%	5,4%

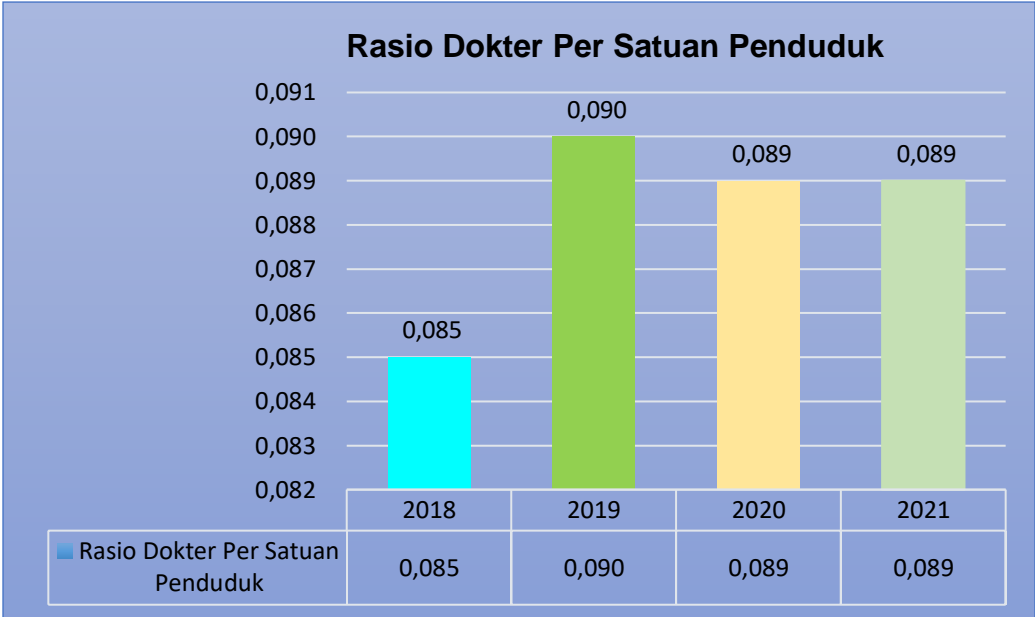
Sumber : Rumah Sakit Umum Daerah Piru, 2022

Berdasarkan tabel diatas, Bed Occupancy Rate (BOR) sebesar 25,75%. Pelayanan rumah sakit dikatakan efisien apabila angka BOR sebesar 75%-85%, sehingga capaian BOR Kabupaten Seram Bagian Barat tergolong kurang. Selain itu, jika dilihat dari Kepmen Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 534/KPTS/M/2001, bahwa setiap 240.000 penduduk harus tersedia satu unit Rumah Sakit. Jika melihat jumlah penduduk Kabupaten Seram Bagian Barat 212.494 jiwa (2021), jumlah yang tersedia sudah memenuhi standar minimal, namun tetap ditingkatkan dalam penyediaan sarana dan prasaran kesehatan.

15. Rasio Dokter Per Satuan Penduduk

Rasio tenaga kesehatan per 100.000 penduduk diatur dalam Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 54 Tahun 2013 tentang Rencana Pengembangan Tenaga Kesehatan Tahun 2011-2025.

Gambar 2.40. Grafik Rasio Dokter Per Satuan Penduduk



Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Seram Bagian Barat, 2022

Capaian indikator rasio dokter per satuan penduduk di Seram Bagian Barat pada tahun 2018-2021 yaitu pada tahun 2018-2019 mengalami tren kenaikan (dari 0,085 ke 0,090), namun tidak signifikan, pada tahun 2020-2021 mengalami penurunan yakni 0,089.

16. Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk

Menurut Permenkes No.262/1979 yang dimaksud dengan tenaga medis adalah lulusan Fakultas Kedokteran atau Kedokteran Gigi dan "Pascasarajna" yang memberikan pelayanan medik dan penunjang medik. Sedangkan menurut PP No.32 Tahun 1996 Tenaga Medik termasuk tenaga kesehatan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan tersebut, yang dimaksud dengan tenaga medis meliputi dokter dan dokter gigi. Tenaga medis adalah mereka yang profesinya dalam bidang medis yaitu dokter, physician (dokter fisit) maupun dentist (dokter gigi).

Setiap tenaga medis harus memenuhi kewajiban sebagai tenaga medis yang diturunkan dari syarat legal yang tidak melawan hukum, yaitu kewajiban yang timbul dari sifat perawatan medis. Setiap tenaga medis, harus berpraktik sesuai dengan standar profesi medis, yaitu bertindak secara teliti dan hati hati sesuai dengan standar medis/ketentuan yang baku menurut ilmu kedokteran.

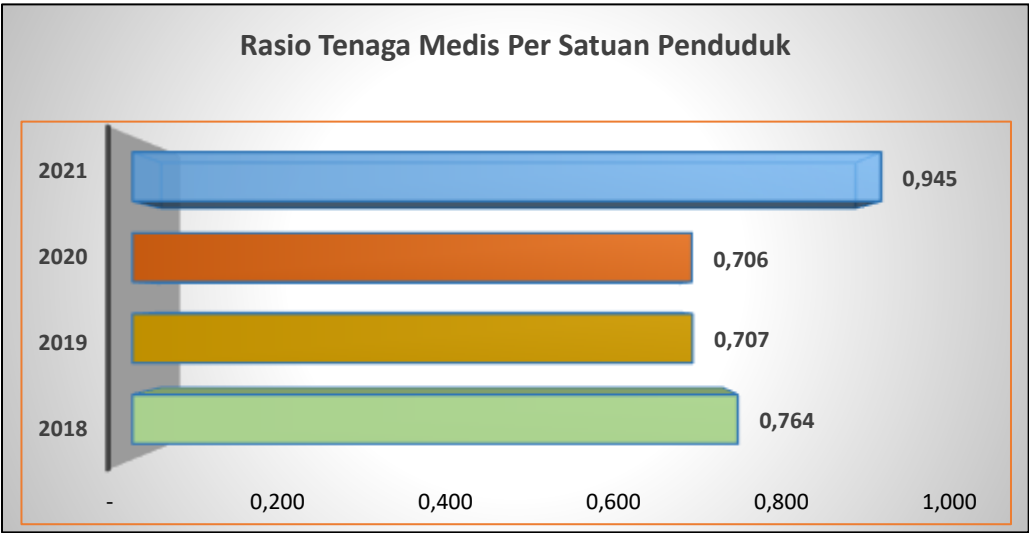
Tabel 2.24. Rasio Tenaga Kesehatan di Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2021

No	Jenis Tenaga	Jumlah			Penduduk	Rasio	
		L	P	Total		/100.000 penduduk	Ideal
1.	Dokter Spesialis	4	2	6	212.495	1 : 35.416	
2.	Dokter Umum	1	10	11		1 : 19.318	
3.	Dokter Gigi	1	1	2		1 : 106.248	
4.	Perawat	60	242	302		1 : 704	
5.	Bidan	0	182	182		1 : 1.168	
6.	Apoteker	1	13	14		1 : 15.179	
7.	Tenaga Teknis Kefarmasian	0	3	3		1 : 70.832	
8.	Kesehatan Masyarakat	2	33	35		1 : 6.073	
9.	Kesehatan Lingkungan	6	29	35		1 : 6.250	
10.	Gizi	5	29	34		-	
11.	Keteknisan Medis	0	0	0		-	
12.	Keterapian Fisik	0	0	0		-	
13.	Ahlo Laboratorium Medik	0	0	0		-	
14.	Teknik Biometrik	0	0	0		-	

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Seram Bagian Barat, 2022

Berdasarkan tabel diatas menunjukan bahwa untuk tenaga kesehatan lain seperti dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi, perawat, bidan, apoteker, tenaga kefarmasian, kesehatan masyarakat, kesehatan lingkungan dan nutrisisionis masi belum memenuhi target rasio ideal. Untuk itu, kedepan perlu adanya penambahan tenaga kesehatan yang jumlahnya belum memenuhi target rasio per 100.000 penduduk. Capaian rasio tenaga medis tahun 2018-2021 berdasarkan RPJMD Kabupaten Seram Bagian Barat tahun 2018-2021 bahwa pada tahun 2021 mengalami peningkatan 0.945 dari tahun 2020 yaitu 0,706

Gambar 2.41. Grafik Rasio Tenaga Medis Tahun 2018-2022



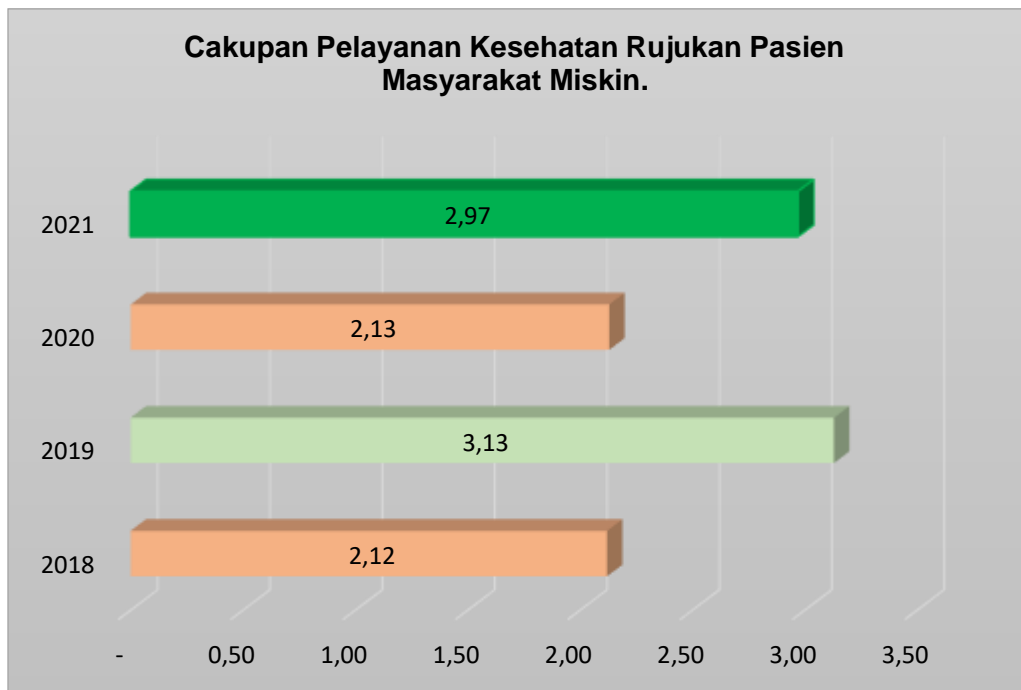
Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Seram Bagian Barat, 2022

Rasio tenaga medis pada Kabupaten Seram Bagian Barat sejak tahun 2018 hingga 2021 rata-rata mengalami kenaikan kurang lebih 0.80% artinya bahwa Secara umum jumlah tenaga kesehatan di Kabupaten Seram Bagian Barat masih belum tercukupi sesuai dengan indikator Indonesia Sehat maupun Indikator dari WHO. Namun Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat telah berusaha mencukupi kebutuhan tenaganya. Usaha yang dilakukan berupa pengangkatan tenaga baru seperti CPNS maupun PTT secara berkala. Pemerataan tenaga kesehatan yang tersebar di wilayah pelayanan kesehatan diupayakan dengan peningkatan sarana-sarana kesehatan yang ada seperti peningkatan akreditasi Puskesmas menjadi Puskesmas Rawat Inap pada beberapa puskesmas yang ada di Kabupaten Seram Bagian Barat.

17. Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin

Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin adalah jumlah rujukan pasien masyarakat miskin dibagi dengan jumlah pasien masyarakat miskin kali 100 di wilayah dalam kurun waktu yang sama. Cakupan ini tergantung pada kondisi kesehatan masyarakat miskin sehingga cakupannya tidak 100%. Namun pasien masyarakat miskin yang datang ke sarana kesehatan 100% semuanya tertangani.

Gambar 2.42. Grafik Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin



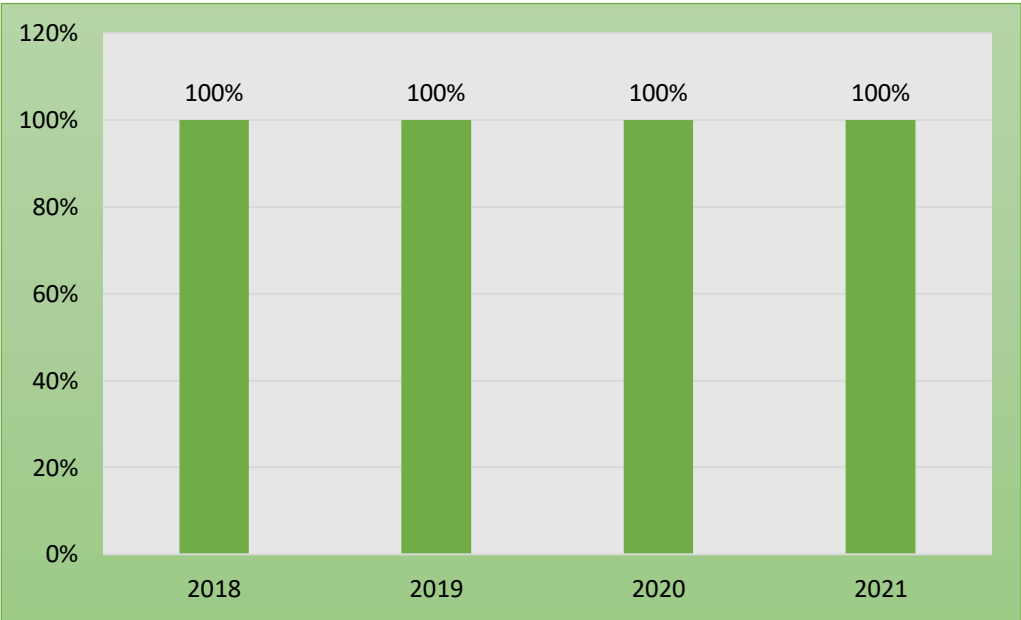
Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Seram Bagian Barat, 2022

Berdasarkan capaian indikator utama RSUD Piru pada Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin, sesuai data menunjukkan bahwa pada tahun 2018-2021 mengalami kenaikan setiap tahunnya dan tertinggi pada tahun 2021 yaitu sebesar 2,97.

18. Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)

Gawat darurat level 1 adalah tempat pelayanan gawat darurat yang memiliki Dokter Umum on site 24 jam dengan kualifikasi GELS dan atau ATLS + ACLS, serta memiliki alat transportasi dan komunikasi. Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) terlihat seperti grafik dibawah ini :

Gambar 2. 43. Grafik Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level 1 Yang Harus Diberikan Sarana Kesehatan (RS) Tahun 2018-2022.



Sumber : Rumah Sakit Umum Daerah Piru, 2022

Rata-rata cakupan pelayanan kesehatan darurat level 1 yang diberikan sarana kesehatan di Kabupaten Seram Bagian Barat pada tahun 2018-2021 adalah 100%. Hal ini menunjukkan bahwa komponen pelayanan gawat darurat sangat baik. Menjadi perhatian Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat bahwa bagi daerah yang aksesibilitasnya sulit ditempuh dalam aspek evakuasi dan pelayanan pasien, di sarankan agar lokus daerah tersebut diberikan fasilitas sarana dan prasarana yang memadai dalam upaya menjawab kesenjangan pelayanan kesehatan.

c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kinerja urusan pekerjaan umum dan penataan ruang dapat dilihat melalui beberapa indikator utama. Uraian mengenai kinerja urusan pekerjaan umum dan penataan ruang difokuskan pada aspek ketersediaan dan kualitas. Beberapa indikator penting yang perlu menjadi perhatian meliputi infrastruktur jalan dan jembatan, sumber daya air, bangunan dan penataan ruang.

Jalan di kabupaten Seram Bagian Barat dilihat dari kewenangan pengelolaan, pada tahun 2021 dari total panjang jalan yakni 936.838 Km, yang menjadi kewenangan kabupaten adalah sepanjang 481.398

Km, kewenangan provinsi sepanjang 64.490 Km dan jalan yang merupakan kewenangan pusat adalah sepanjang 390.950 Km.

Tabel 2.25. Panjang Jalan Berdasarkan Kewenangan

Kewenangan Pengelolaan	Tahun (Km)			
	2018	2019	2020	2021
Nasional	390,950	390,950	390,950	390,950
Provinsi	64,90	64,90	64,90	64,90
Kabupaten	481,398	481,398	481,398	481,398
Jumlah Total	936,838	936,838	936,838	936,838

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2022

Disamping ketersediaan jalan, kualitas jalan juga perlu menjadi perhatian. Jika dilihat berdasarkan kondisi kemantapan jalan, maka kondisi kemantapan jalan di Kabupaten Seram Bagian Barat, seperti digambarkan pada table berikut.

Tabel 2.26. Panjang Jalan Dalam Kondisi Mantap

Kewenangan Pengelolaan	Tahun (Km)			
	2018	2019	2020	2021
Nasional	390,950	390,950	390,950	390,950
Provinsi	42,49	42,49	42,49	42,49
Kabupaten	79,39	109,44	246,17	285,454
Jumlah Total	473,24	542,88	679,61	718,894

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2022

Bila dibandingkan antara data panjang jalan (Tabel 2.25) dan jalan dalam kondisi mantap (Tabel 2.26), maka dapat disimpulkan bahwa untuk jalan nasional persentase jalan mantap sudah mencapai 100 persen, untuk jalan provinsi kondisi jalan mantap baru mencapai 65,47 persen, sedangkan jalan kabupaten kondisi mantap baru mencapai 59,30 persen. Sedangkan Kemantapan jalan di Kabupaten Seram Bagian Barat terutama jalan provinsi dan jalan kabupaten perlu ditingkatkan, sehingga aksesibilitas barang dan jasa dapat lebih lancar.

Bentang alam di Kabupaten Seram Bagian Barat yang merupakan pegunungan dan dataran rendah, mengakibatkan banyak terbentuk sungai. Potensi hidrologi yang dimiliki Kabupaten Seram Bagian Barat dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan rumah tangga, irigasi maupun kepentingan lainnya, baik alami maupun buatan. Sungai-

sungai yang memotong jalan membutuhkan jembatan untuk dapat dilalui masyarakat dalam rangka melakukan berbagai aktivitas. Mengingat peran strategis jembatan dalam berbagai aktifitas masyarakat, perlu direncanakan pembangunan, pemeliharaan dan perawatan jembatan. Beberapa factor yang mempengaruhi kondisi jembatan antara lain; muatan kendaraan yang melebihi batas ketentuan, pengambilan materian disekitar badan jembatan, usia jembatan, banjir dan lain-lain. Kondisi kemantapan jembatan di Kabupaten Seram Bagian Barat, dapat dilihat pada table berikut.

Tabel 2.27. Panjang Jembatan Kewenangan Kabupaten

Kondisi Jembatan	Tahun (Km)			
	2018	2019	2020	2021
Baik	22	22	22	22
Rusak Ringan	-	-	-	-
Rusak Sedang	-	-	-	-
Rusak Berat	-	-	-	-
Jumlah	22	22	22	22

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2022

Capaian kinerja di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang juga diukur dari jumlah masyarakat yang dapat mengakses air minum layak dan berkelanjutan. Cakupan penduduk Kabupaten Seram Bagian Barat yang dapat mengakses air minum layak menunjukan tren kenaikan dari tahun ke tahun, sebagaimana tergambar pada table berikut.

Tabel 2.28. Cakupan Akses Air Minum Aman dan Berkelanjutan

Tahun	Jiwa	Persen
2018	124.250	55,47
2019	135.460	60,47
2020	137.530	61,31
2021	139.410	62,15

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2022

Tren kenaikan cakupan akses air minum aman dan berkelanjutan baru mencapai 0,84 persen, tren kenaikan ini masih terbilang kecil, hal ini disebabkan karena alokasi anggaran untuk bidang air minum masih terlalu kecil.

Capaian kinerja pada Urusan Pekerjaan Umum yang juga perlu untuk diperhatikan adalah akses terhadap sanitasi layak dan berkelanjutan. Indicator ini merupakan salah satu amanat SDGs yang perlu untuk terus untuk ditingkatkan. Pada tahun 2018 – 2021, persentase rumah tangga memiliki akses terhadap sanitasi yang layak mengalami peningkatan.

Jenis pelayanan dasar urusan Pekerjaan Umum yang dilaksanakan di Kabupaten Seram Bagian Barat berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimum Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Jenis pelayanan tersebut meliputi:

- a. Pelayanan Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari dengan indikatornya adalah Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari.
- b. Pelayanan Pengolahan air limbah Domestik dengan indikatornya adalah Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik.

Tabel 2.29. Cakupan Layanan Sanitasi yang Layak

Tahun	Akses (%)
2018	61,36
2019	73,96
2020	76,12
2021	77,18

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2022

Tren kenaikan cakupan layanan sanitasi yang layak rata-rata baru mencapai 6,84 persen, tren kenaikan ini masih terbilang kecil, hal ini disebabkan karena alokasi anggaran untuk bidang sanitasi masih terlalu kecil.

Pada bidang Tata Ruang, indikator persentase pemanfaatan ruang sesuai Rencana Tata Ruang hasilnya cukup maksimal yakni 99 persen. Hal ini karena gencarnya sosialisasi-sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, sehingga hasil kesesuaian pemanfaatan ruang di Kabupaten Seram Bagian Barat cukup tinggi.

Tabel 2.30. Capaian Indikator Tata Ruang

Uraian	Tahun			
	2018	2019	2020	2021
Persentase Pemanfaatan Ruang Sesuai RTRW	99	99	99	99
Persentase Cakupan Kawasan Yang Telah Memiliki RDTR	0	0	0	0

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2022

Cakupan kawasan yang telah memiliki Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) masih kosong hal ini disebabkan karena masih menunggu selesai dilakukannya revisi terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Seram Bagian Barat.

d. Perumahan dan Kawasan Permukiman

Berdasarkan Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terdapat 5 sub urusan yang menjadi kewenangan urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Pemerintah Kabupaten/ Kota. Kelima sub urusan tersebut adalah: 1) Perumahan; 2) Kawasan Permukiman; 3) Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh; 4) Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU); dan 5) Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Dalam RPJMD Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2018-2022 capaian kinerja urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman diukur berdasarkan 3 (tiga) indikator yang telah ditetapkan, yaitu: 1) Persentase penataan kawasan permukiman; 2) Rasio rumah layak huni; dan 3) Persentase lingkungan permukiman kumuh.

Tabel 2.31. Luas Kawasan Kumuh di Kabupaten Seram Bagian Barat

Uraian	Tahun			
	2018	2019	2020	2021
Luas Kawasan Kumuh Yang Tertangani (Ha)	NA	NA	148,01	NA
Luas Kawasan Kumuh yang Belum Tertangani (Ha)	NA	NA	53,05	NA
Jumlah (Ha)			201.06	

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, 2022

Tabel 2.32. Presentase Rumah Layak Huni di Kabupaten Seram Bagian Barat

Tahun	Jumlah Rumah Layak Huni	Persen
2018	19.220	61,0
2019	19.693	62,5
2020	20.071	63,7
2021	20.449	64,9

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, 2022

Data Backlog Rumah di Kabupaten Seram Bagian Barat

Tahun	Jumlah Rumah Tangga (Unit)	Jumlah KK	Backlog
2018	802	1.895	1.093
2019	892	2.108	1.216
2020	1.004	2.372	1.368
2021	1.096	2.589	1.493

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, 2022

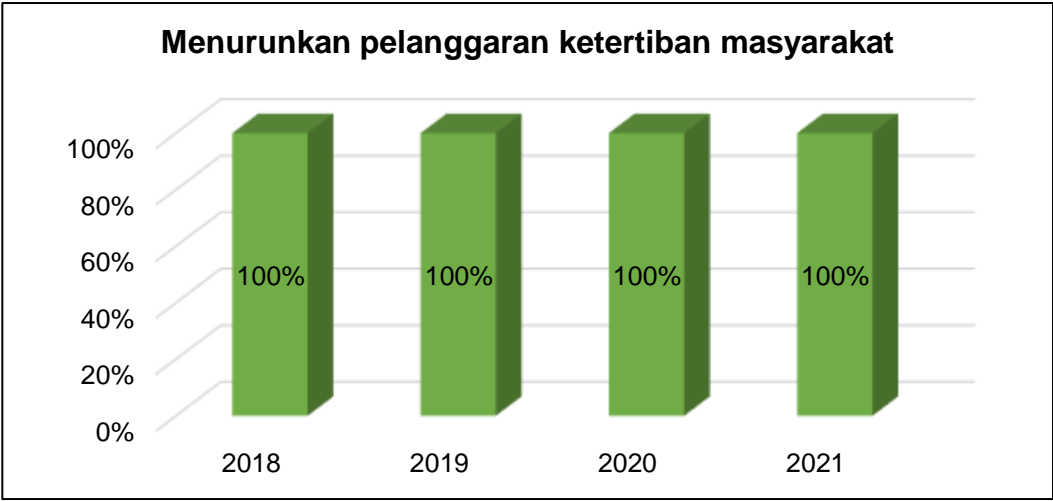
Sampai dengan tahun 2021, capaian indikator pada bidang urusan perumahan dan kawasan permukiman dapat diuraikan sebagai berikut. Indikator persentase penataan kawasan permukiman, capaian sampai dengan tahun 2021 adalah 96 persen dari target yang ditetapkan yaitu 62,40 persen. Sedangkan untuk indikator rasio rumah layak huni, capaiannya masih jauh dari yang ditargetkan yakni 14 persen dari yang ditargetkan sebesar 74,37 persen. Dan untuk indikator persentase lingkungan permukiman kumuh terjadi penurunan dan malampaui dari target sekitar 7,81 persen dengan capaian sebesar 4 persen.

e. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Secara umum capaian pelayanan guna mewujudkan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di Kabupaten Seram Bagian Barat sudah cukup baik. Beberapa indikator yang menggambarkan Kabupaten Seram Bagian Barat cukup kondusif antara lain penurunan jumlah pelanggaran perda, penurunan jumlah kejadian kriminalitas, penyelesaian pelanggaran ketertiban, ketenteraman dan keindahan (K3) serta beberapa indikator lainnya. Selain itu, pada aspek kebencanaan terdapat beberapa hal yang masih perlu ditingkatkan seperti partisipasi masyarakat dalam pembentukan desa tangguh bencana,

pemahaman masyarakat akan pentingnya penanggulangan bencana, pemahaman masyarakat tentang mitigasi bencana dan hal lain yang mendukung kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana.

Gambar 2.44. Grafik Menurunkan Pelanggaran Ketertiban Masyarakat Tahun 2018-2022

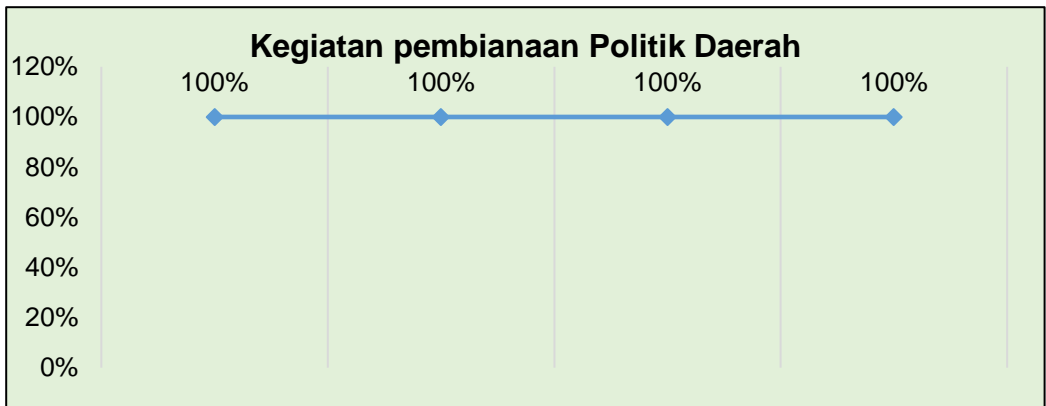


Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, 2022

Selama periode upaya Menurunkan Pelanggaran Ketertiban Masyarakat 2018-2021 mengalami stagnasi sebesar 100%. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya penyelesaian K3 di Kabupaten Seram Bagian Barat sangat baik namun masih perlu ditingkatkan. Diperlukan kerjasama dan koordinasi intensif mulai dari pemerintahan di level desa, kecamatan hingga instansi di level daerah untuk menjaga kondusivitas wilayah. Beberapa upaya yang telah dilakukan guna menurunkan angka gangguan ketenteraman dan ketertiban umum di Kabupaten Seram Bagian Barat diantaranya kegiatan patroli wilayah, PAM Terpadu yang dilaksanakan pada saat hari raya dan tahun baru, dan kegiatan terpadu antar instansi lainnya

Kegiatan pembinaan politik di daerah, capaian indikator kinerja pada Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seram Bagian Barat menunjukan bahwa selama periodisasi 2018-2021 berjalan dengan baik yaitu 100%, artinya bahwa kegiatan pembinaan politik baik kepada masyarakat yang diikuti dalam perhelatan pilkada maupun perhelatan politik lain memiliki integritas yang tinggi.

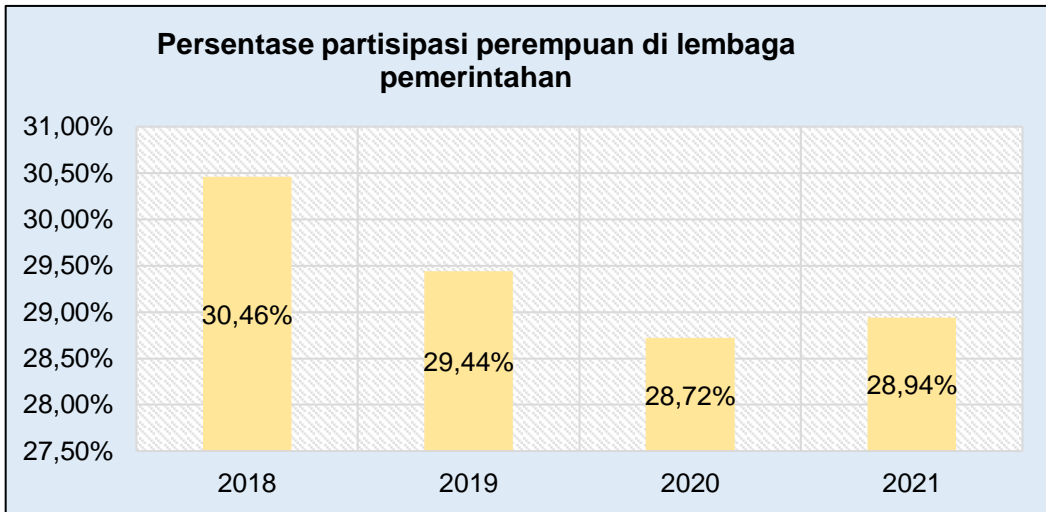
Gambar 2.45. Grafik Kegiatan Pembinaan Politik Daerah Tahun 2018-2021



Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, 2022

Capaian target kinerja sasaran pembangunan daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2018-2021 pada indikator sasaran Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan menunjukan bahwa partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan tertinggi pada tahun 2018 yaitu 30,46% dan terendah pada tahun 2020 yaitu 28,72%.

Gambar 2.46. Grafik Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan Tahun 2018-2021



Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, 2022

Undang-undang Dasar Republik Indonesia tidak memberikan batasan akan partisipasi dan keterwakilan perempuan dalam kegiatan pemerintahan. Keterlibatan perempuan dalam kehidupan publik telah meningkat namun partisipasi dan keterwakilan mereka di lembaga legislatif tingkat nasional maupun provinsi, dan di seluruh lembaga pemerintahan masih rendah. Gerakan perempuan di Indonesia memiliki keterlibatan aktif di bidang politik namun masih

ada kesenjangan dalam hal partisipasi dan keterwakilan perempuan di struktur politik formal. Partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan di Kabupaten Seram Bagian Barat harus terus ditingkatkan.

f. Sosial

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial mengamanatkan pelayanan sosial guna untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warganya. Pelayanan sosial tersebut terdiri dari 4 pilar yaitu perlindungan sosial, jaminan sosial, rehabilitasi sosial dan pemberdayaan masyarakat. Pelayanan sosial dilakukan bersama antara pemerintah, masyarakat dan swasta. Pemerintah melalui Dinas Sosial melakukan pelayanan sosial terutama kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Berikut data jumlah PMKS di Kabupaten Seram Bagian Barat tahun 2018-2021.

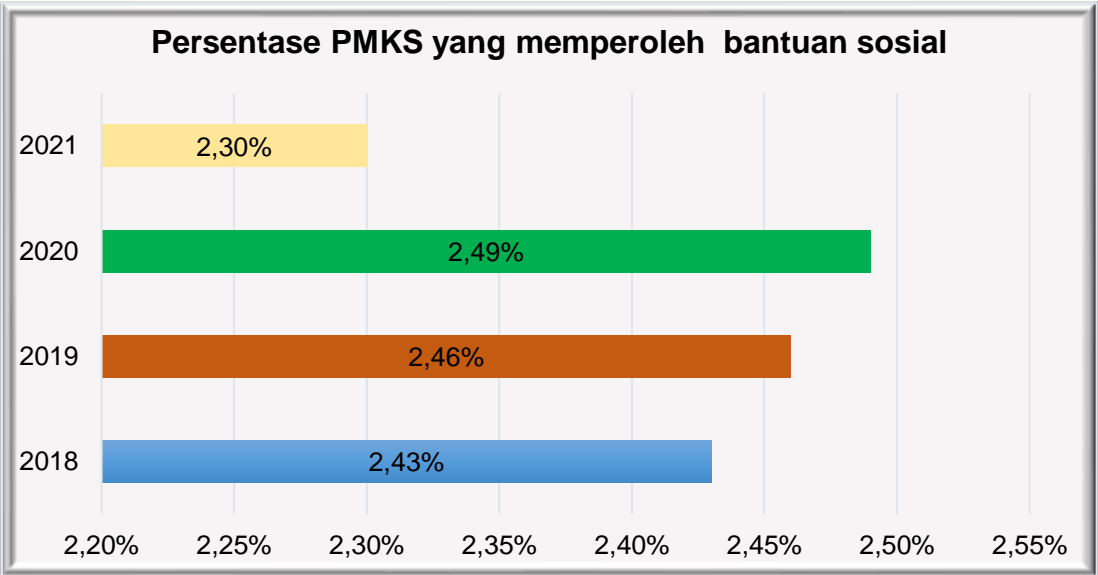
Tabel 2.33. Jumlah PMKS di Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2018-2021.

No	Jenis PMKS	Tahun			
		2018	2019	2020	2021
1.	Tunba Mental	85	85	85	85
2.	Anak Terlantar			367	367
3.	Anak Korban Kekerasan		14	35	53
4.	Wanita Rawan Ekonomi	150	150	150	150
5.	Lanjut Usia Terlantar				8102
6.	Penyandang Cacat	421	421	421	441
7.	Tuna Susila	42	42	42	42
8.	Korban Bencana Alam		1500	3	446
9.	Korban Bencana Sosial	17		71	42
Total		715	2.212	1.174	9.728

Sumber : Dinas Sosial Kab. SBB, 2022

Berdasarkan tabel di atas, jumlah PMKS di Kabupaten Seram Bagian Barat selama periode 2018-2021 menunjukan trend fluktuatif. Jumlah PMKS terendah pada tahun 2018 sebanyak 715 jiwa dan terendah pada tahun, namun meningkat menjadi 9.728 jiwa pada tahun 2021 akibat pandemi Covid19 yang menyebabkan penurunan kesejahteraan masyarakat. Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial terlihat seperti tabel di bawah ini:

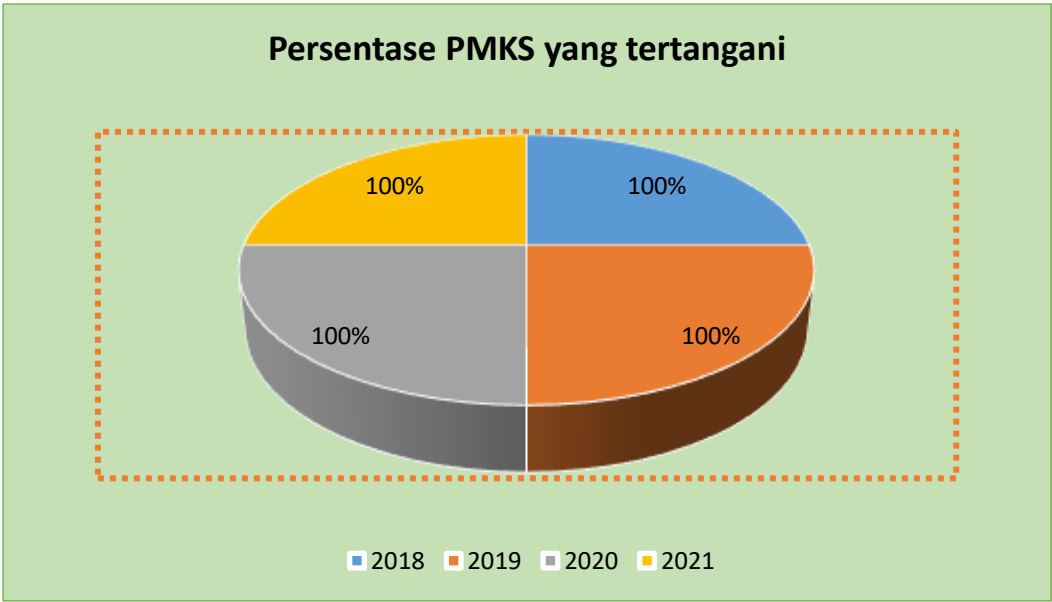
Gambar. 2.47. Grafik Persentase PMKS Yang Memperole Bantuan Sosial Tahun 2018-2021



Sumber : Dinas Sosial Kab. SBB, 2022

Capaian persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial di Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2018-2021 tertinggi pada tahun 2020 yaitu 2,49% dan terendah pada tahun 2021 yaitu 2,30%. PMKS yang ditangani adalah masyarakat PMKS yang diberikan pelatihan, pendampingan, rekomendasi dan pelayanan jenis apapun oleh Dinas Sosial dengan formula Jumlah PMKS yang tertangani pada tahun (n) di bagi dengan Jumlah PMKS yang ada pada tahun (n) dikalikan 100%. Sesuai capaian indikator tersebut pada tahun 2018-2021 terlihat dalam grafik di bawah ini.

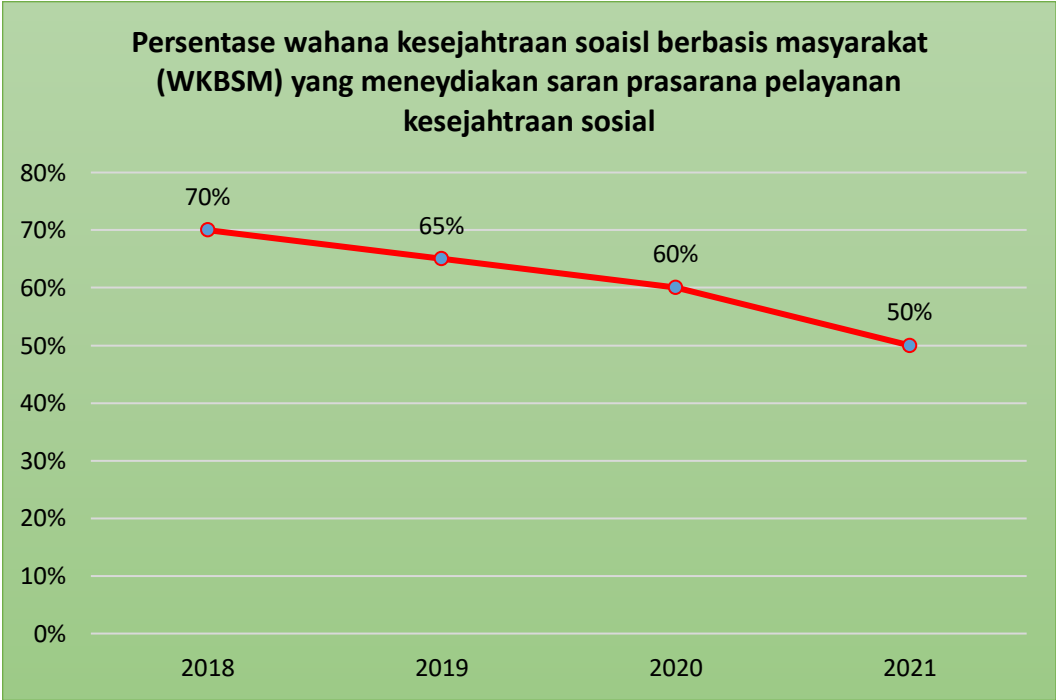
Gambar 2.48. Grafik Persentase PMKS Yang Tertangani Tahun 2018-2021



Sumber : Dinas Sosial Kab. SBB, 2022

Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) /kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya pada Kabupaten Seram Bagian Barat yaitu pada tahun 2018-2020 100% dan pada tahun 2021 turun menjadi 75%. Persentase Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial pada Kabupaten Seram Bagan Barat terlihat pada grafik di bawah ini.

Gambar 2.49. Grafik Persentase Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKBSM) Yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesejahteraan Sosial Tahun 2018-2021



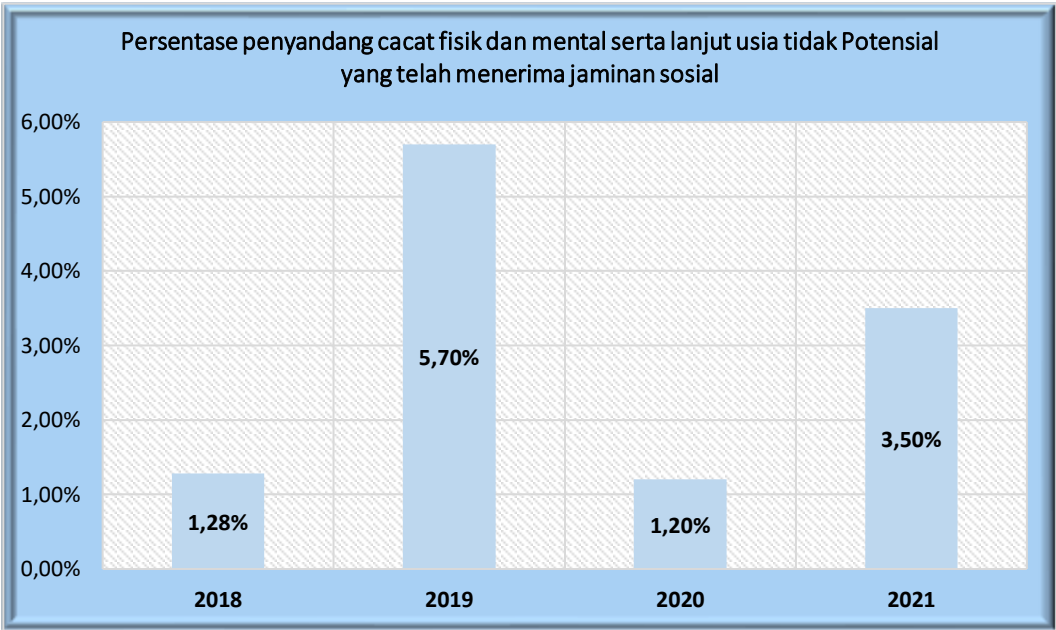
Sumber : Dinas Sosial Kab. SBB, 2022

Sesuai dengan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) aspek pelayanan umum pada Dinas Sosial Kabupaten Seram Bagian Barat dengan indikator Persentase Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKBSM) Yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesejahteraan Sosial terlihat bahwa pada tahun 2018 merupakan angka yang tertinggi yaitu 70% dan terendah pada tahun 2021 yaitu 50%. Pada periodisasi 2018-2021 indikator ini semakin menurun setiap tahunnya artinya bahwa sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial yang dibutuhkan semakin berkurang.

Penyandang cacat fisik adalah seseorang yang menderita kelainan pada tulang dan/atau sendi anggota gerak dan tubuh, kelumpuhan pada anggota gerak tulang, tidak lengkapnya anggota gerak atas dan bawah, sehingga menimbulkan gangguan atau menjadi lambat untuk melakukan kegiatan sehari-hari secara

layak/wajar. (UU No. 4 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat). Persentase penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak Potensial yang telah menerima jaminan sosial dapat dilihat pada grafik

Gambar 2.50. Grafik Persentase Penyandang Cacat Fisik dan Mental Serta Lanjut Usia Tidak Potensial Yang Telah Menerima Jaminan Sosial Tahun 2018-2021

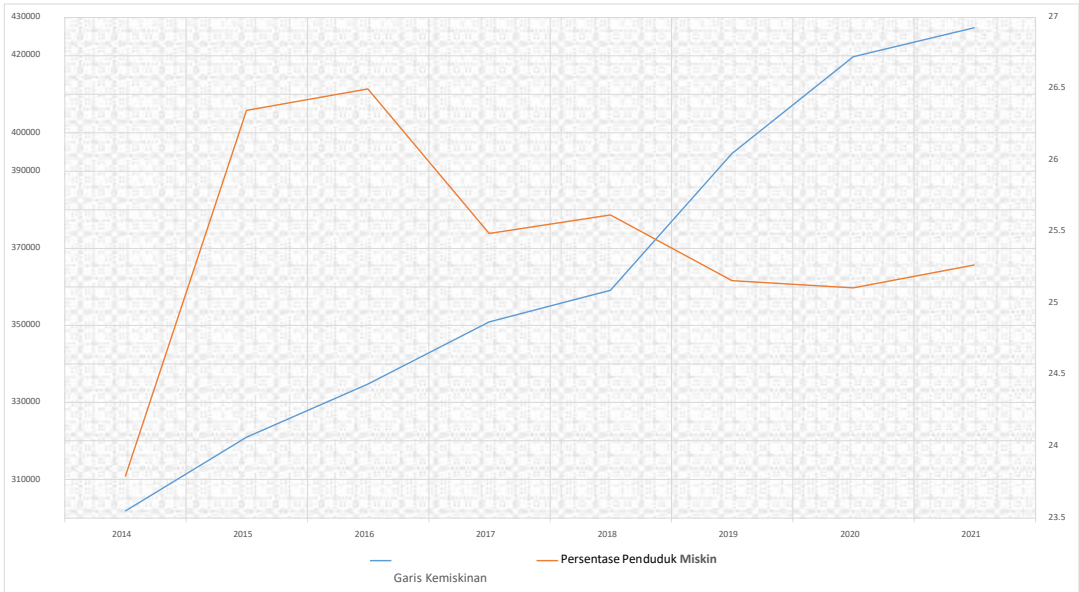


Sumber : Dinas Sosial Kab. SBB, 2022

Pada grafik menunjukan bahwa Persentase penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak Potensial yang telah menerima jaminan sosial pada Kabupaten Seram Bagian Barat mengalami tren kenaikan yang fluktuatif yakni pada tahun 2018 1,28% dan kemudian naik pada tahun 2019 dengan persentase 5,70%, kemudian turun pada tahun 2020 dan naik kembali pada tahun 2021 dengan angka 3,50%. Penyandang disabilitas pada umumnya merupakan warga negara yang layak diberikan hak sesuai dengan kebutuhannya sebagai warga negara, akan tetapi terkadang penyandang disabilitas dipandang sebelah mata karena keterbatasan fisik sehingga kebutuhannya sulit terpenuhi. Indikator ini harus menjadi perhatian pemerintah pada periodisasi selanjutnya.

Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kkalori per kapita per hari. Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya. Kemiskinan dann garis kemiskinan.

Gambar 2.51. Grafik Kemiskinan dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Seram Bagian Barat, 2014–2021



Sumber : BPS Kab. Seram Bagian Barat Tahun 2022

Tabel 2.34. Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Seram Bagian Barat, 2014–2021

Tahun Year	Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan) Poverty Line (rupiah/capita/month)	Jumlah Penduduk Miskin (ribu) Number of Poor People(thousand)	Persentase Penduduk Miskin Percentage of Poor People
(1)	(2)	(3)	(4)
2014	301 802	40,20	23,79
2015	320 963	44,61	26,35
2016	334 729	45,03	26,50
2017	350 853	43,44	25,49
2018	359 085	43,77	25,62
2019	394 628	43,14	25,16
2020	419 793	43,15	25,11
2021	427 355	43,72	25,27

Sumber : BPS Kab. Seram Bagian Barat Tahun 2022

Pada periodisasi 2018-2021, persentase angka kemiskinan terendah pada tahun 2020 yaitu 25,11% dan kemudian naik pada tahun 2021 yaitu dengan persentase 25,27. Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Jumlah penduduk miskin di Kabupatenn Seram Bagian Barat berjumlah 43,72 ribu orang pada tahun 2021. Jika dibandingkan dengan 11 Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku, Kabupaten Seram Bagian Barat menempati urutan kedua untuk jumlah penduduk miskin terbanyak

2.3.1.2. Layanan Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Terkait Pelayanan Dasar

Layanan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar meliputi analisis capaian kinerja pada urusan tenaga kerja; pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; pangan; pertanahan; lingkungan hidup; administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; pemberdayaan masyarakat dan desa; pengendalian penduduk dan keluarga berencana; perhubungan; komunikasi dan informatika; koperasi, usaha kecil, dan menengah; penanaman modal; kepemudaan dan olahraga; statistik; persandian; kebudayaan; perpustakaan; dan kearsipan.

1. Ketenaga Kerjaan

Kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam bidang ketenagakerjaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mencakup pelatihan tenaga kerja, produktivitas tenaga kerja, penempatan tenaga kerja, hubungan tenaga kerja dan pengawasan industrial. Ketenagakerjaan termasuk salah satu Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ SDGs, yaitu. Target dunia yang ingin dicapai yaitu Pada tahun 2030, memberikan pekerjaan penuh dan produktif yang layak bagi semua wanita dan pria, termasuk bagi orang-orang muda dan penyandang disabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.

Sesuai RPJMD Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2018-2022 telah ditetapkan indicator pada urusan ketenaga kerjaan yakni; 1) Rasio daya serap tenaga kerja; 2) Besaran tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi; 3) Besaran tenaga kerja

yang mendapat pelatihan berbasis kewirausahaan; 4) Angka partisipasi angkatan kerja; 5) Tingkat pengangguran terbuka.

Tabel 2.35. Target dan Capaian Indikator Kinerja Urusan Ketenaga Kerjaan

Indikator	Target (Persen)			Capaian (Persen)		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Rasio daya serap tenaga kerja	1.00	1.00	1.00	1.10	1.50	1.00
Persentase besaran tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi	10.50	10.75	11.00	10.00	10.00	10.00
Persentase besaran tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi	0.30	0.40	0.50	0.20	0.20	0.20
Tingkat Pengangguran Terbuka	5.50	4.50	3.50	5.40	5.46	5.46
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	82.54	72.54	67.50	71.38	71.86	71.86

Sumber : Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja, 2022

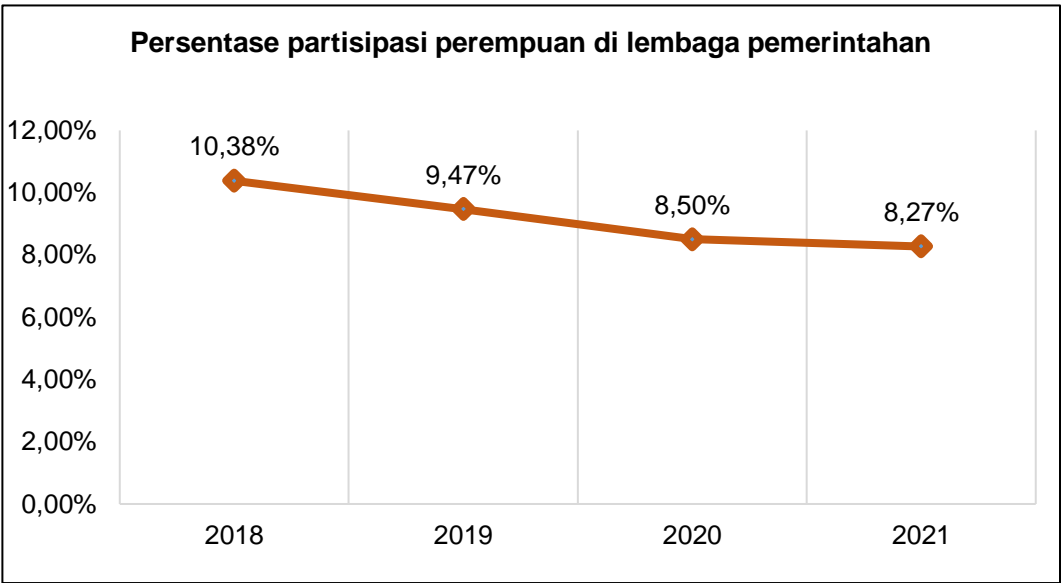
Permasalahan ketenagakerjaan adalah tingginya angka tingkat pengangguran terbuka (TPT). Hal ini berarti terdapat kesenjangan antara supply tenaga kerja dengan permintaan tenaga kerja. Pertumbuhan angkatan kerja tidak sebanding dengan pertumbuhan kesempatan kerja. Pada masa Pandemi Covid 19 saat ini diperkirakan pada tahun 2020 angka TPT akan bertambah, banyak usaha dan perusahaan pada masa Pandemi mengalami goncangan sehingga terpaksa melakukan pemutusan hubungan kerja. Selain itu kesempatan kerja di masa Pandemi saat ini juga berkurang karena banyak perusahaan dan masyarakat yang tidak dapat melakukan pengembangan usaha.

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pelaksanaan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan aspek serius dalam pembangunan manusia. Capaian pemberdayaan perempuan biasanya diukur dengan indikator Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks

Pemberdayaan Gender (IDG). Indikator IDG menunjukkan seberapa jauh perempuan mampu memainkan peranan aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik.

Gambar 2.52. Grafik Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan Tahun 2018-2021

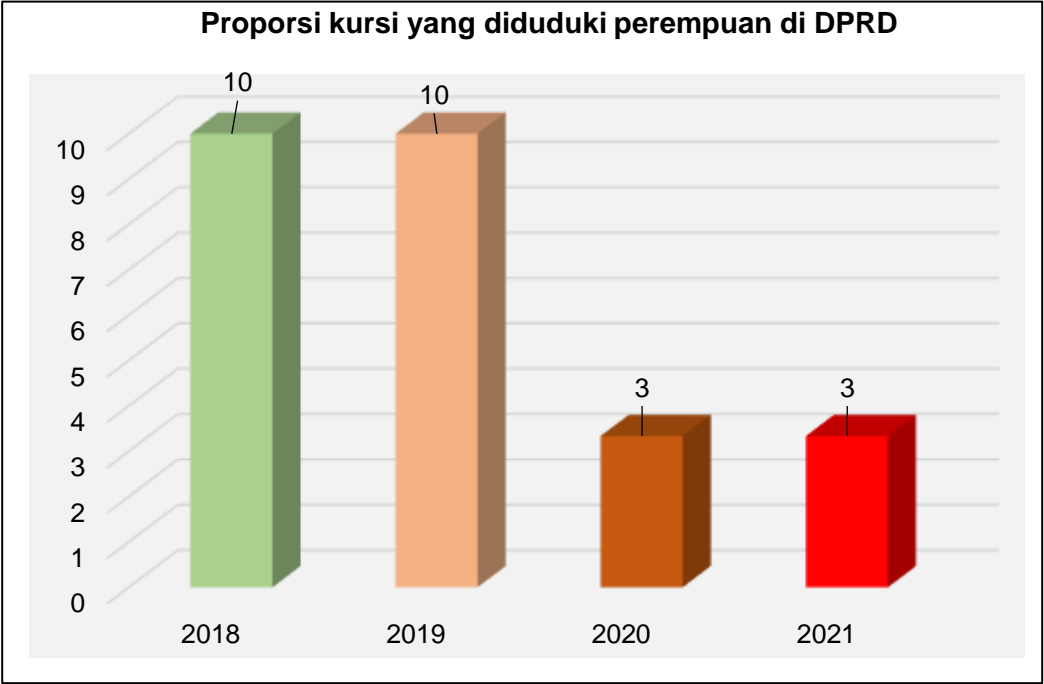


Sumber : DP3AP2&KB Kab. SBB, 2022

Sesuai dengan capaian indikator Utama (IKU) aspek pelayanan umum pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Seram Bagian Barat dengan indikator persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan menunjukkan bahwa pada tahun 2018-2021 mengalami penurunan setiap tahunnya yakni tertinggi pada tahun 2018 dan terendah pada tahun 2021. Hal ini menunjukkan bahwa peran perempuan di lembaga pemerintahan semakin menurun, oleh karena itu perempuan harus diberikan akses aktif dalam kegiatan pemerintahan maupun non pemerintahan.

Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD adalah jumlah perempuan yang menjadi perwakilan daerah dan terpilih pada saat pemilihan legislatif. Selama periodisasi 2018-2021 proporsi perempuan yang mendapat suara terbanyak dan menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Seram Bagian Barat terlihat pada grafik di bawah ini.

Gambar 2.53. Grafik Proporsi Kursi yang Diduduki Perempuan di DPRD Tahun 2018-2021



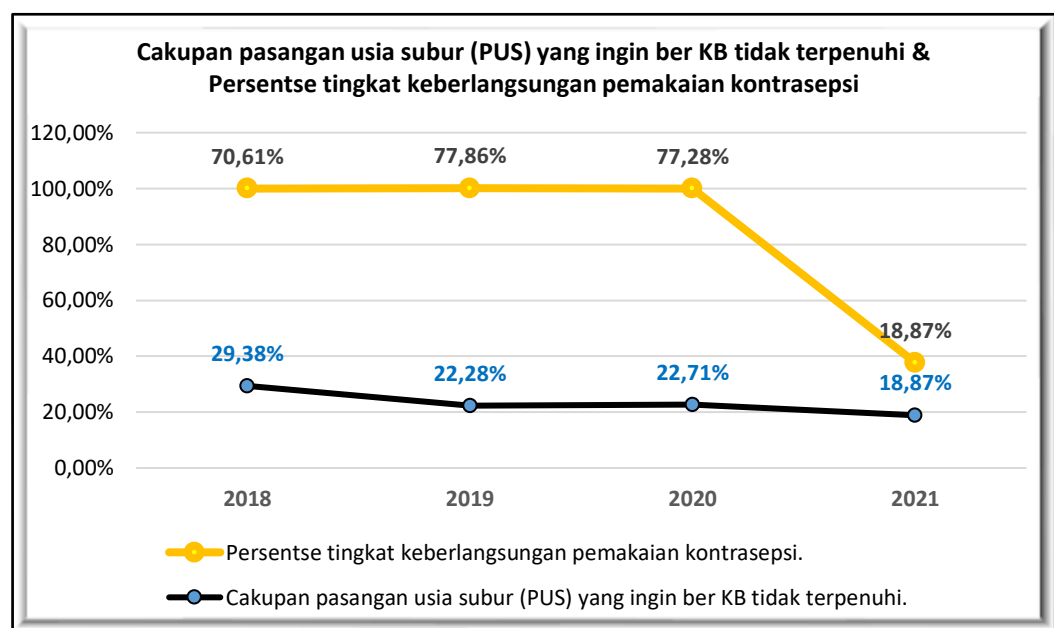
Sumber : DP3AP2&KB Kab. SBB, 2022

Penyebab indikatif mengapa persentase perempuan dalam pemerintahan dan DPRD sebagai aspek dalam pembangunan manusia, bahwa Dikeluarkannya Instruksi Presiden nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender merupakan indikator bahwa isu gender yang terus bergulir belum mendapatkan perhatian khusus dalam berbagai bidang pembangunan, sehingga Pemerintah menetapkan pijakan politis yang membuka peluang bagi perempuan Indonesia untuk berpartisipasi aktif di dalam pembangunan termasuk pembangunan politik yang berwawasan gender. Sementara fakta menunjukan bahwa peran perempuan Indonesia secara progresif banyak menduduki posisi-posisi penting, walaupun persentasenya lebih kecil jika dibandingkan dengan laki-laki.

3. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Sesuai dengan capaian indikator Utama (IKU) aspek pelayanan umum pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Seram Bagian Barat dengan indikator Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang ingin ber KB tidak terpenuhi & Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi pada Kabupaten Seram Bagian dapat di lihat pada grafik di bawah ini.

Gambar 2.54. Grafik Pasangan usia subur (PUS) yang ingin ber KB tidak terpenuhi & Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi Tahun 2018-2021

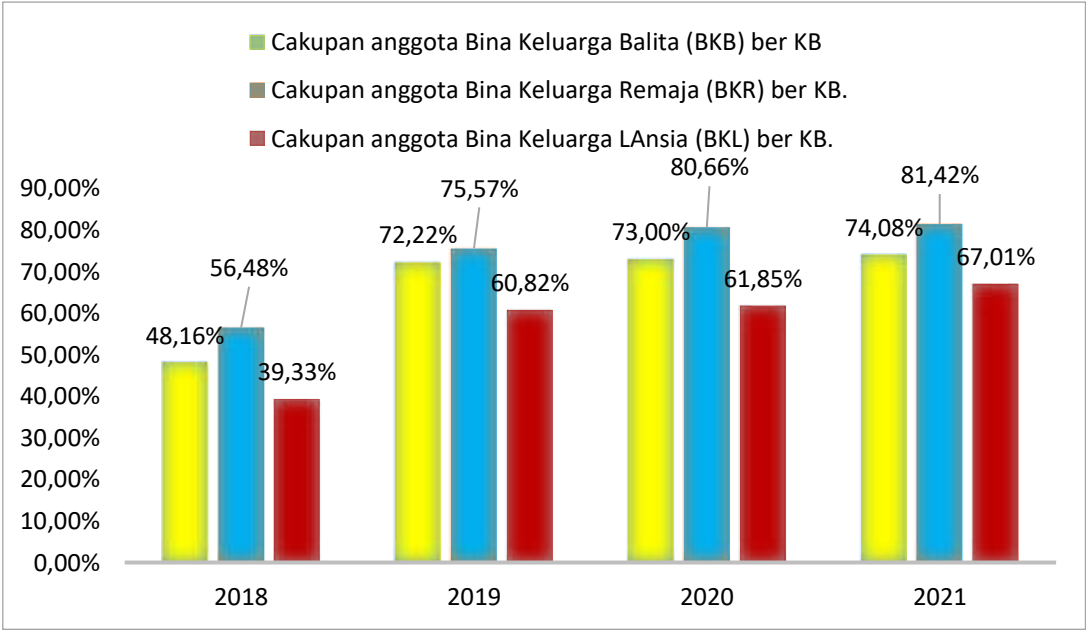


Sumber : DP3AP2&KB Kab. SBB, 2022

Pasangan Usia Subur (PUS) yang ingin ber KB tidak terpenuhi pada tahun 2018-2021 fluktuatif, tertinggi pada tahun 2020 yaitu 77,28% dan terendah pada tahun 2021 yaitu 18,87%. Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi pada interval waktu 2018-2021 sesuai grafik diatas menurun setiap tahunnya, pada tahun 2021 persentase pemakaian kontrasepsi turun menjadi 18,87% setelah pada tahun sebelumnya (2020) 22,71%. Hal ini disebabkan karena di Kabupaten Seram Bagian Barat sebahagian besar ibu-ibu pada usia produktif belum mengetahui manfaat pemakaian alat kontrasepsi. Intervensi program/kegiatan terhadap indikator tersebut perlu di canangkan oleh Pemerintah.

Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber KB, Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber KB dan Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber KB merupakan program yang dibuat oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan orang tua dalam mendidik anak usia balita.

Gambar 2.55. Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber KB, Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber KB dan Tahun 2018-2021

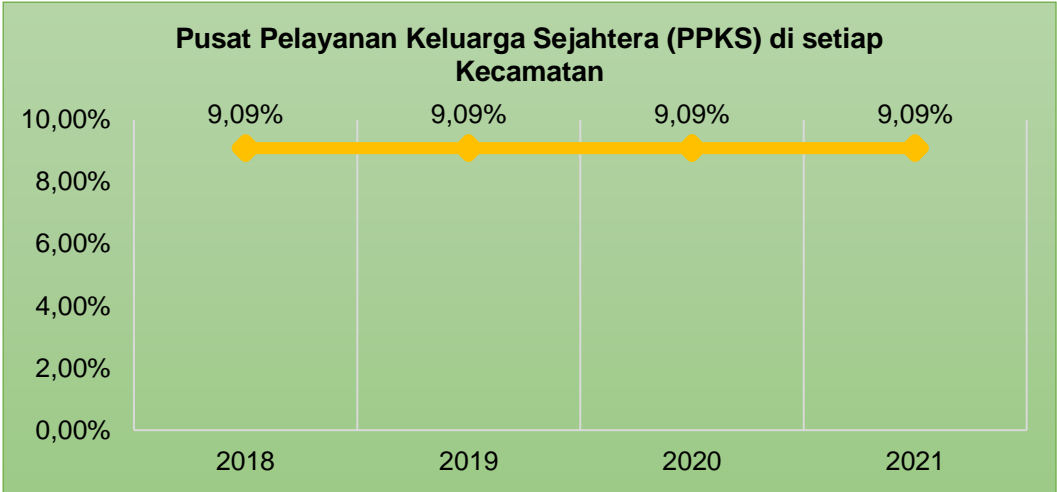


Sumber : DP3AP2&KB Kab. SBB, 2022

Berdasarkan capaian indikator utama Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Seram Bagian Barat pada anggota Bina Keluarga Balita setiap tahun mengalami kenaikan dan pada tahun 2021 merupakan yang tertinggi yaitu 74,08%, hal ini disebabkan karena layanan penyuluhan bagi orang tua dan anggota keluarga lainnya dalam mengasuh dan membina tumbuh kembang anak melalui kegiatan stimulasi fisik, mental, intelektual, emosional, spiritual, sosial, dan moral di Seram Bagian Barat berjalan dengan baik. Begitu pula dengan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber KB setiap tahunnya mengalami kenaikan. Pada anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber KB tren persentasenya menurun bila dibandingkan dengan BKB balita dan BKB remaja, namun pada periodisasi 2018-2021 setiap tahunnya meningkat. Perlu dukungan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat dalam hal penyuluhan sebagai bekal orang tua dalam mendidik anaknya.

Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan merupakan salah satu upaya mewujudkan penduduk yang berkualitas. Untuk mendukung upaya mewujudkan ketahanan keluarga , telah dikembangkan berbagai prograam aksi , diantaranya adalah Pengelolaan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di Kabupatem Seram Bagian Barat.

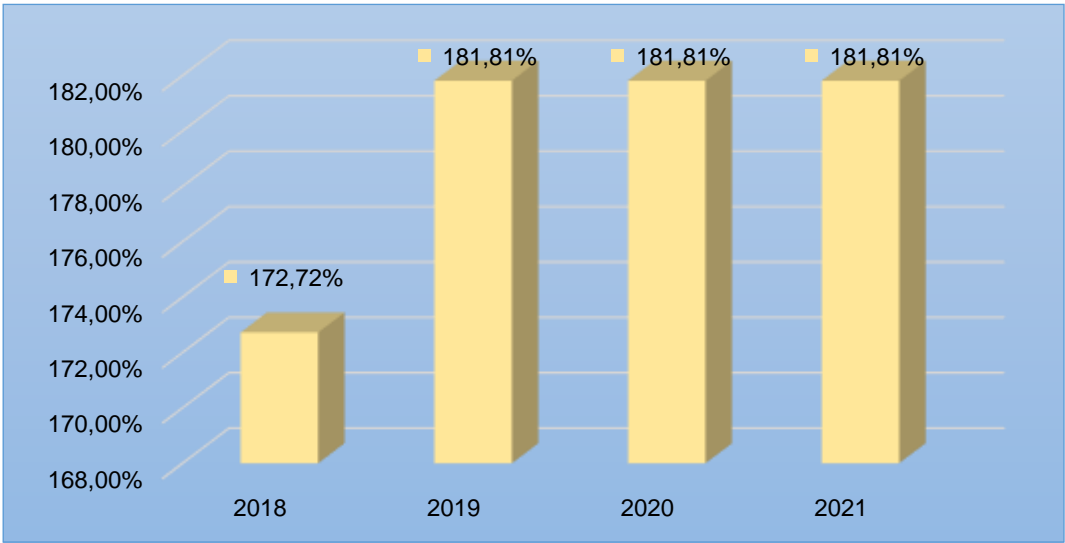
Gambar 2.56. Grafik Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) Tahun 2018-2021



Sumber : DP3AP2&KB Kab. SBB, 2022

Total akumulasi Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) pada 11 Kecamatan adalah 9,09% dari tahun 2018-2021. terlihat stagnan diakibatkan oleh belum maksimalnya fungsi Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS). Pusat Pelayanan Informasi dan rujukan program dalam rangka penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja , jaminan pelayanan KB, dan Kesehatan Reproduksi, Tumbuh Kembang Anak, Ketahanan Ekonomi dan Kesejahteraan Keluarga Serta Pelayanan data Informasi Kependudukan dan KB perlu dilakukan secara kontinu oleh dinas teknis dalam rangka mempercepat terwujudnya keluarga kecil bahagia dan sejahtera. Cakupan Remaja dalam pusat Informasi dan konseling remaja/mahasiswa dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

Gambar 2.57. Grafik Cakupan Remaja Dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja/mahasiswa Tahun 2018-2021



Sumber : DP3AP2&KB Kab. SBB, 2022

Capaian indikator remaja pada pusat informasi dan konseling remaja/mahasiswa terendah pada tahun 2018 dan pada tahun 2019-2021 nilainya sama yaitu 181,81%. Secara tidak langsung dapat disimpulkan bahwa pengelolaan remaja dan pusat informasi di Kabupaten Seram Bagian Barat cenderung baik dalam aspek penanganan masalah yang menonjol pada remaja seperti masalah dampak seks dini, penyakit menular seksual (PMS), kehamilan tidak diinginkan (KTD), aborsi, HIV dan AIDS serta penyalahgunaan Napza (Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya) Selain itu masalah lain yang marak terjadi di Indonesia adalah menonton video porno, tawuran, membolos, geng motor dan merokok.

4. Pangan

Pelaksanaan pembangunan bidang pangan di lingkup kabupaten berdasarkan UU 23/2014 meliputi 4 sub urusan. 4 sub urusan tersebut adalah Penyelenggaraan Pangan Berdasarkan Kedaulatan dan Kemandirian, Penyelenggaraan Ketahanan Pangan, Penanganan Kerawanan Pangan, dan Keamanan Pangan. Capaian kinerja urusan pemerintahan bidang pangan di Kabupaten Seram Bagian Barat secara detail tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 2.36. Target dan Capaian Indikator Kinerja Urusan Pangan

Indikator	Target (Persen)			Capaian (Persen)		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Persentase Penguatan cadangan pangan	30	35	40	30	30	47
Persentase Penanganan Daerah Rawan Pangan	37,17	37,51	37,86	37,17	78,80	73
Persentase ketersediaan pangan utama	0,18	0,18	0,18	0,18	4,02	0,14
Persentase ketersediaan energy dan protein per kapita	100	100	100	50,31	68	89,25
Persentase pencapaian skor pola pangan harapan (PPH)	72	75	78	62	65,6	71,2
Persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	70	75	80	99,97	57,2	71

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, 2022

Untuk penanganan daerah rawan pangan, hal yang telah dilakukan adalah penyediaan peta kerentanan dan ketahanan pangan atau

yang biasa disebut peta FSVA (Food Security And Vulnerability Atlas) di tingkat kabupaten. Selain itu juga Pemerintah kabupaten harus menyediakan serta mengelola cadangan pangan untuk mengantisipasi kondisi rawan pangan di daerah. Selain menjaga ketersediaan dan pengelolaan cadangan pangan, kewenangan lain untuk pemerintah kabupaten adalah pelaksanaan keamanan pangan. Keamanan pangan disini berarti adalah adanya pengawasan terhadap bahan pangan segar yang beredar di masyarakat. Dari tahun 2018 sampai tahun 2021 pemerintah selalu melaksanakan pengawasan peredaran bahan pangan segar di masyarakat.

5. **Pertanahan**

Urusan pertanahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah terbagi atas 3 sub urusan yaitu 1) izin lokasi; 2) sengketa tanah garapan; 3) ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan, 4) Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah, serta 5) Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absente.

Target dan capaian indicator kinerja bidang urusan pertanahan sebagaimana tersaji dalam table berikut.

Tabel 2.37. Target dan Capaian Indikator Kinerja Urusan Pertanahan

Indikator	Target (Persen)			Capaian (Persen)		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Persentase Penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan yang selesai tepat waktu	20	20	30	20	20	30

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, 2022

Bidang urusan Pertanahan dalam RPJMD Kabupaten Seram Bagian Barat, ditetapkan 1 (satu) indikator yang harus diselesaikan yakni persentase penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan yang selesai tepat waktu.

6. **Lingkungan Hidup**

Berdasarkan Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terdapat 11 sub urusan yang menjadi kewenangan urusan Lingkungan Hidup di Pemerintah Kabupaten/ Kota. Kesebelas sub urusan tersebut adalah: 1) Perencanaan Lingkungan Hidup; 2) Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS); 3) Pengendalian Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup;

4) Keanekaragaman Hayati (Kehati); 5) Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3); 6) Pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH); 7) Pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan local dan hak MHA yang terkait dengan PPLH; 8) Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat; 9) Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat; 10) Pengaduan Lingkungan Hidup dan 11) Persampahan.

Dalam RPJMD Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2018-2022, capaian kinerja Urusan Lingkungan Hidup diukur berdasarkan 6 (enam) indikator yang telah ditetapkan, yaitu: 1) Indeks Lingkungan Hidup; 2) Terintegrasinya RPPLH dalam Dokumen Perencanaan Kabupaten; 3) Timbulan Sampah Yang Tertangani; 4) Persentase jumlah sampah yang tertangani; 5) Tersusunnya RPPLH; 6) Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PPU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah, lokasi usaha dan dampaknya bagi Pemerintah Daerah.

Indek Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu. Dalam IKLH terdapat 3 komponen atau indikator pembentuk yaitu: 1) Indeks kualitas air; 2) indeks kualitas udara dan 3) Indeks tutupan hutan/ lahan. IKLH Kabupaten Seram Bagian Barat selama kurun waktu 4 tahun (2018-2021) mengalami trend fluktuatif yang cenderung meningkat. Pada tahun 2018 dan 2019 IKLH Kabupaten seram Bagian Barat tidak ada data. Sampai dengan tahun 2020 capaian IKLH Kabupaten Seram Bagian Barat sebesar 78,5 nilai tersebut masuk pada kategori baik. Untuk tahun 2021, capaian IKLH Kabupaten Seram Bagian Barat sebesar 79,8 dan masuk dalam kategori baik.

Indikator terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kabupaten belum tercapai karena dokumen RPPLH Kabupaten Seram Bagian Barat sampai dengan tahun 2021 belum tersusun. Capaian Indikator Timbulan Sampah yang Tertangani dapat dijelaskan sebagai berikut; untuk tahun 2018 volume timbulan sampah sebesar 30.684 ton dan yang baru dapat tertangani adalah sebesar 2.150 ton (7,00 persen); tahun 2019 jumlah volume timbulan sampah sebanyak 30.749 ton dan yang dapat dikelola/ditangani

adalah sebanyak 2.245 ton (7,29 persen); tahun 2020 jumlah volume timbulan sampah sebanyak 31.064 ton dan yang dapat dikelola/tertangani adalah sebanyak 2.810 ton (7,92 persen); dan pada tahun 2021 jumlah volume timbulan sampah sebanyak 31.109 ton dan yang dapat dikelola/tertangani adalah sebanyak 2.452 ton (7,89 persen). Kecilnya persentase timbulan sampah yang tertangani disebabkan karena kurangnya fasilitas sarana dan prasarana penanganan dan pengelolaan sampah serta terbatasnya tenaga pengelolaan sampah.

Indicator RPPLH Kabupaten Seram Bagian Barat belum tercapai, karena sampai dengan tahun 2021, dokumen RPPLH Kabupaten Seram Bagian Barat belum tersusun. Cakupan indicator pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah, lokasi usaha dan dampaknya bagi Pemerintah Daerah, pencapaiannya melampaui target yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2018-2022 yakni 100 persen dari yang ditargetkan sebesar 50 persen.

7. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelaksanaan urusan wajib non pelayanan dasar bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil mencakup tertib administrasi. Indikator paling penting untuk mengukur kinerja pelaksanaan urusan ini berkaitan dengan kepemilikan dokumen kependudukan seperti e-KTP, akta kelahiran, dan juga kartu keluarga. Berdasarkan data pada tabel di bawah, rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk adalah 0.86 atau 86 %, rasio bayi berakte kelahiran ada lah 0.78 atau 78%, jumlah bayi berakte kelahiran adalah 2.924 dari total jumlah bayi 3.733 yang berumur 0-1 tahun. Sementara untuk rasio pasangan berakte nikah ada lah sebesar 0,11 atau 11,64 % yaitu dari jumlah bersatus kawin sebesar 89.647 pasangan dan yang memiliki akte perkawinan berjumlah 10.434 pasangan artinya, cakupan pelayanan administrasi kependudukan sudah cukup maksimal.

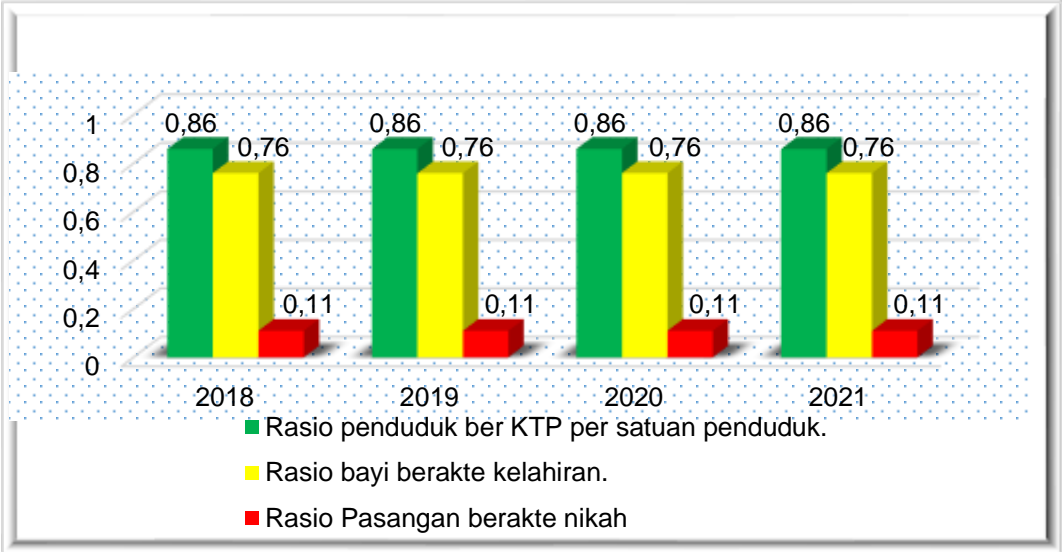
Tabel 2.38. Rasio Kepemilikan Dokumen Kependuduka Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2018-2021

No.	Jenis Data	2016	2017	2018	2019
1.	Rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk.	0.86	0.86	0.86	0.86

No.	Jenis Data	2016	2017	2018	2019
2.	Rasio bayi berakte kelahiran.	0.78	0.78	0.78	0.78
3.	Rasio Pasangan berakte nikah	0.11	0.11	0.11	0.11

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. SBB, 2022

Gambar 2.58. Grafik Rasio Kepemilikan Dokumen Kependudukan di Kabupaten Seram Bagian BaratTahun 2018-2021



Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. SBB, 2022

Rata-rata presentase kepemilikan E-KTP yaitu 86% hal ini disebabkan oleh penambahan kependudukan pindah datang sehingga penduduk yang wajib E-KTP dengan penduduk yang telah memiliki E-KTP memiliki perbedaan yang signifikan. Indikator lain yang perlu mendapatkan perhatian adalah persentase penduduk yang memiliki akta kelahiran. Dalam kurun waktu empat tahun terakhir, indikator ini mengalami kenaikan yaitu menjadi 76%. Data tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat 24 % penduduk Seram Bagian Barat yang belum memiliki akta kelahiran. Oleh karena itu, hal ini menjadi poin penting dalam rangka memperbaiki cakupan layanan administrasi kependudukan bagi masyarakat Kabupaten Seram Bagian Barat.

Sedangkan pasangan yang memiliki akta nikah masih padakisaran 0,11 atau 11 %. Hal ini harus menjadi perhatian baik masyarakat maupun Pemerintah Daerah dalam melakukan pendataan dan melaporkan perkawinan pada OPD teknis.

Sesuai dengan data indikator kinerja perangkat daerah pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Barat

bahwa Kabupaten Seram Bagian Barat telah sudah melaksanakan KTP berbasis NIK baik pada Ibukota Kabupaten maupun pada 11 Kecamatan.

8. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pembangunan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, kewenangan Pemerintah Kabupaten terbagi menjadi 4 sub urusan, yaitu:

- 1. Penataan desa, dengan kewenangan penyelenggaraan penataan desa;
- 2. Kerja sama desa, dengan kewenangan fasilitasi kerja sama antar desa dalam satu daerah kabupaten/kota;
- 3. Administrasi pemerintahan desa, dengan kewenangan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa;
- 4. Lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat

Tabel 2.39. Capaian Indikator Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021
Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa	Persen	14,13	17,39	21,74	30,43
Persentase pembentukan BUMDes	Persen	96	96,67	96,77	97,56
Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	Persen	84	87	89	90
Rata-rata jumlah kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat	Persen	83	85	89	91
Persentase PKK aktif	Persen	87	93	93	94
Jumlah desa berstatus mandiri	Desa	0	1	2	6
Jumlah desa berstatus maju	Desa	15	14	14	21

Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021
Jumlah desa berstatus berkembang	Desa	42	42	43	47
Jumlah desa berstatus tertinggal	Desa	28	29	30	16
Jumlah desa berstatus sangat tertinggal	Desa	7	6	3	2

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 2022

Masyarakat desa pada umumnya termasuk dalam kategori ekonomi lemah. Usaha yang dijalankan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari pun tergolong usaha kecil. Masalah yang sering mereka hadapi persoalan terbatasnya modal. Kehadiran Badan Usaha Milik Desa-Lembaga Keuangan Mikro (BUMDes-LKM) dibentuk dengan harapan dapat membantu warga dalam aksesibilitas permodalan dalam rangka meningkatkan derajat kehidupan masyarakat. Persentase pembentukan BUMDes di Kabupaten Seram Bagian Barat selama empat tahun terakhir meningkat sangat signifikan, yaitu dari 96 persen tahun 2018 menjadi 97,56 pada tahun 2021.

Selain Badan Usaha Milik Desa, PKK menjadi wadah potensial motor penggerak pembangunan dalam peningkatan kesejahteraan rumah tangga, khususnya dalam hal pemberdayaan keluarga sebagai ujung tombak keberhasilan pembangunan. PKK aktif di Kabupaten Seram Bagian Barat berkembang cukup pesat, pada Tahun 2018 sebanyak 87 persen dan meningkat menjadi 94 persen pada Tahun 2021. Perihal kesehatan masyarakat, PKK juga memberikan kontribusi penting dalam kesehatan masyarakat melalui Posyandu.

Program pemberdayaan masyarakat memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mendapatkan akses terhadap kesempatan kerja maupun kesempatan berusaha, serta diharapkan masyarakat bisa berpartisipasi melalui swadaya di desanya masing-masing. Program pemberdayaan masyarakat merupakan stimulan atau perangsang saja untuk menumbuhkan swadaya masyarakat. Kunci keberhasilan program pemberdayaan masyarakat ada di tangan masyarakat itu sendiri, masyarakat-lah yang merencanakan, melaksanakan, mengawasi dan memanfaatkan serta memelihara hasil kegiatan dari program pemberdayaan masyarakat. Dalam tahap perencanaan, swadaya masyarakat dapat berupa tenaga, alat-alat dan uang. Dalam

tahap pelaksanaan swadaya masyarakat berupa bahan/material, tenaga dan alat-alat. Sedangkan swadaya uang tidak ada. Dalam tahap pelestarian partisipasi masyarakat diwujudkan dengan kesanggupan masyarakat untuk memelihara hasil pembangunan dengan swadaya tenaga. Ketersediaan sarana dan prasarana sebagai faktor penunjang kemajuan sebuah desa, sarana dan prasarana juga menjadi salah satu faktor yang dapat membantu keberlangsungan kehidupan masyarakat dan menentukan status kemandirian sebuah desa.

Di Kabupaten Seram Bagian Barat, status kemandirian desa dalam indeks desa membangun (IDM) terus mengalami peningkatan. Pada Tahun 2018, desa mandiri masih belum ada, namun sampai dengan Tahun 2021, ada 6 desa yang berstatus desa mandiri.

9. Perhubungan

Urusan perhubungan Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah terbagi atas 1 sub urusan yaitu Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dengan kewenangan sebagai berikut:

- a. Penetapan rencana induk jaringan LLAJ Kabupaten/Kota.
- b. Penyediaan perlengkapan jalan di jalan Kabupaten/Kota.
- c. Pengelolaan terminal penumpang tipe C.
- d. Penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir.
- e. Pengujian berkala kendaraan bermotor.
- f. Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/kota.
- g. Persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan kabupaten/kota.
- h. Audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan kabupaten/kota.
- i. Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dalam Daerah kabupaten/kota.
- j. Penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota.
- k. Penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota.
- l. Penetapan rencana umum jaringan trayek pedesaan yang menghubungkan 1 (satu) Daerah kabupaten.
- m. Penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya berada dalam Daerah kabupaten/kota.

- n. Penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek perdesaan dan perkotaan dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota
- o. Penerbitan izin penyelenggaraan taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam Daerah kabupaten/kota.
- p. Penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antar kota dalam Daerah kabupaten serta angkutan perkotaan dan perdesaan yang wilayah pelayanannya dalam Daerah kabupaten/kota.

Dalam RPJMD Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2018-2022 telah ditetapkan 10 (sepuluh) indikator yang harus dicapai pada bidang urusan perhubungan yakni :

- a. Persentase layanan angkutan darat;
- b. Jumlah arus penumpang angkutan umum;
- c. Rasio ijin trayek;
- d. Jumlah uji KIR angkutan umum;
- e. Jumlah pelabuhan laut;
- f. Jumlah terminal;
- g. Persentase jumlah kepemilikan uji KIR angkutan umum;
- h. Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan;
- i. Jumlah barang yang terangkut angkutan umum
- j. Jumlah barang melalui dermaga/terminal

Capaian dari indikator bidang urusan perhubungan dapat diuraikan sebagaimana table berikut.

Tabel 2.40. Target dan Capaian Indikator Kinerja Urusan Perhubungan

Indikator	Satuan	Target (Persen)			Capaian (Persen)		
		2019	2020	2021	2019	2020	2021
Persentase layanan angkutan darat	Persen	17.58	21.68	17.31	15.6	17.7	17.0
Jumlah arus penumpang angkutan umum	orang	9.728.506	10.895.926	12.530.314	1.021.410	809.280	907.680
Rasio ijin trayek	Rasio	0.00076	0.00067	0.00068	0.00067	0.00067	0.00068
Jumlah uji KIR	Buah	177	177	177	65	45	47

Indikator	Satuan	Target (Persen)			Capaian (Persen)		
		2019	2020	2021	2019	2020	2021
angkutan umum							
Jumlah pelabuhan laut	Buah	9	9	9	9	9	9
Jumlah terminal	Unit	5	5	5	5	5	5
Persentase jumlah kepemilikan uji KIR angkutan umum	Persen	100	100	100	75	50	74
Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	Rasio	58202.95	58202.95	58202.95	5741.51	6383.92	6295.86
Jumlah barang yang terangkut angkutan umum	Ton	151	152	153	125	135	135.8
Jumlah barang yang melalui dermaga/terminal	Ton	800	400	400	763.7	412.9	419.7

Sumber : Dinas Perhubungan, 2022

10. Komunikasi dan Informatika

Sarana/prasarana komunikasi dan informatika yang berkembang dengan pesat telah merevolusi cara hidup manusia, baik cara berkomunikasi, cara belajar, cara bekerja, cara berbisnis dan lain sebagainya. Melalui teknologi komunikasi dan informasi, segala aktivitas manusia dapat dilakukan melalui cara baru, inovatif, instan, transparan, akurat, tepat waktu dan efektif. Selain itu, semua proses pelaksanaan kegiatan serta konten dapat ditransformasikan dari fisik dan status menjadi digital, mobile, virtual, serta personal dengan demikian kecepatan kinerja akan meningkat. Keberadaan sarana/prasarana teknologi komunikasi dan informasi dapat digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu, yang dapat

digunakan untuk berbagai kepentingan dan merupakan informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan. Pemanfaatan TIK dalam proses penyelenggaraan pemerintah (e-Government) sangat penting dalam peningkatan kualitas pelayanan publik yang efisiensi, efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas. Pemanfaatan Tik tersebut salah satunya dilakukan melalui penyediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagikan serta dikelola secara seksama, terintegrasi dan berkelanjutan sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2018-2022, telah ditetapkan 6 (enam) indicator kinerja untuk bidang Urusan Komunikasi dan Informasi yakni; 1) Persentase layanan informasi teknologi; 2) Cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di tingkat kecamatan; 3) Cakupan layanan telekomunikasi; 4) Persentase penduduk yang menggunakan Hp/telepon; 5) Proporsi rumah tangga dengan akses internet; dan 6) Proporsi rumah tangga yang memiliki computer pribadi. Selanjutnya target dan capaian urusan komunikasi dan informasi dapat dilihat pada table berikut.

Tabel 2.41. Target dan Capaian Indikator Kinerja Urusan Komunikasi dan Informasi

Indikator	Target (Persen)			Capaian (Persen)		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Persentase Layanan Informasi Teknologi (IT)	25	45	75	70	75	80
Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di tingkat kecamatan	50	70	80	5	5	5
Cakupan Layanan Telekomunikasi	55	75	85	80	85	90
Persentase penduduk yang menggunakan Hp/telepon	55	70	85	80	85	90
Proporsi rumah tangga dengan akses internet	35	40	50	70	75	80
Proporsi rumah tangga yang memiliki computer pribadi	55	70	85	50	55	60

Sumber : Dinas Informasi dan Komunikasi, 2022

Target indicator persentase layanan informasi teknologi sampai dengan tahun 2021 adalah 75 persen, dan yang dapat dicapai pada tahun 2021 adalah sebesar 80 persen. Untuk indicator Cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di tingkat kecamatan ditargetkan sebesar 80 persen, sampai dengan tahun 2021 capaiannya sebesar 5 persen.

11. Koperasi dan UKM

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Pelaksanaan urusan koperasi usaha kecil dan menengah di tingkat Kabupaten berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memiliki kewenangan terkait bidang: (1) Izin Usaha Simpan Pinjam; (2) Pengawasan dan Pemeriksaan; (3) Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi; (4) Pendidikan dan Latihan Perkoperasian; (5) Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi; (6) Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM); dan (7) Pengembangan UMKM.

Secara rinci capaian indicator bidang urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dari Tahun 2019 – 2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.42. Target dan Capaian Indikator Kinerja Urusan Koperasi dan UKM

Indikator	Capaian (Persen)		
	2019	2020	2021
Persentase Koperasi aktif	75.16	79.74	80.39
Jumlah Koperasi yang dibina dan meningkat nilai kesehatannya	NA	NA	6
Jumlah UMKM yang dibina dan meningkat nilai usahanya	3.353	1.599	5.734
Cakupan penyaluran permodalan kepada koperasi dan UMKIM	200	1.744	5.742

Sumber : Dinas Koperasi UKM dan Transmigrasi, 2022

Permasalahan yang dialami oleh UMKM di Kabupaten Seram Bagian Barat selain permodalan adalah produksi dan pemasaran. Untuk produksi, produk dari pelaku UMKM belum mampu bersaing dengan produk pabrikan, baik dari rasa, bentuk, varian, maupun packagingnya.

Oleh karena itu dibutuhkan pendampingan baik dari Pemerintah maupun swasta untuk menaikkan nilai produk UMKM tersebut. Saat ini digitalisasi produk dan pemasaran sudah menjadi hal yang biasa. Tetapi banyak pelaku UMKM yang belum memanfaatkan digitalisasi ini. Pelaku UMKM masih melakukan produksi secara manual. Pemasaran secara online merupakan solusi saat ini untuk meningkatkan penjualan di era pandemi COVID-19. Pelaku UMKM yang memanfaatkan *ecommers* masih sedikit karena pengetahuan mereka tentang *ecommers* masih kurang. Disamping itu, pelaku UMKM juga masih kesulitan dalam mendisplaykan produk mereka.

12. Penanaman Modal

Penanaman modal atau investasi menjadi salah satu variabel pendukung yang sangat penting dalam menghitung pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Munculnya investor baik tingkat internasional maupun domestik sangat penting dalam pembentukan modal daerah. Rasionalnya semakin banyak nilai realisasi investasi PMDN dan PMA maka semakin menggambarkan ketersediaan pelayanan penunjang yang dimiliki daerah berupa ketertarikan investor untuk meningkatkan investasinya di daerah. Multiplier Effect dari kegiatan investasi di suatu daerah adalah penyerapan tenaga kerja, peningkatan output, penghematan devisa atau bahkan penambahan devisa.

Berdasarkan Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Penyelenggaraan Urusan Penanaman Modal memiliki 6 sub urusan yakni 1) Pengembangan Iklim Penanaman Modal; 2) Kerja Sama Penanaman Modal; 3) Promosi Penanaman Modal; 4) Pelayanan Penanaman Modal; 5) Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal; dan 6) Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal. Capaian dari masing-masing indikator sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.43. Target dan Capaian Indikator Kinerja Urusan Penanaman Modal

Indikator	Satuan	Target (Persen)			Capaian (Persen)		
		2019	2020	2021	2019	2020	2021
Persentase pertumbuhan investasi	Persen	20	20	20	20	20	20
Waktu penyelesaian perijinan	Hari	5	5	5	3	3	3

Indikator	Satuan	Target (Persen)			Capaian (Persen)		
		2019	2020	2021	2019	2020	2021
Persentase investor berskala nasional dan internasional (PMDN/PMA)	Persen	50	50	50	50	50	50

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP, 2022

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2018-2022, indicator kinerja Urusan Penanaman Modal yang ditetapkan adalah 3 (tiga) indicator yakni 1) Persentase pertumbuhan investasi; 2) Waktu penyelesaian perijinan; 3) Jumlah investor berskala nasional dan internasional (PMDN dan PMA).

13. Kepemudanaan dan Olahraga

Pembangunan urusan kepemudaan dan olahraga bertujuan untuk mewujudkan kondisi yang ideal bagi pemuda dalam mengembangkan dan mengaktualisasikan potensi, bakat dan minatnya melalui berbagai kegiatan. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009, perencanaan pembangunan kepemudaan dimaknai sebagai rencana pelayanan kepemudaan yang berfungsi untuk melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi kepemimpinan, kewirausahaan, serta pelaporan pemuda dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Berikut peran kepemudaan di Kabupaten Seram Bagian Barat.

Olahraga merupakan aspek pembangunan sumber daya manusia sekaligus sebagai sarana untuk menguatkan karakter dan kepemimpinan pemuda dalam meningkatkan prestasi olahraga. Pembinaan dibidang olahraga dilakukan dengan mengidentifikasi potensi dan bakat atlit muda diberbagai cabang olahraga serta menyediakan fasilitas pendukung seperti tenaga pelatih, sarana prasarana olahraga, Cakupan Pelatih Berprestasi, Jumlah Prestasi Olahraga. Evaluasi capaian target kinerja sasaran pembangunan daerah pada bidang olahraga meliputi Persentase Organisasi Pemuda Aktif dan Cakupan Pembinaan Olahraga. Berikut perkembangan bidang olahraga di Seram Bagian Barat tahun 2018-2021.

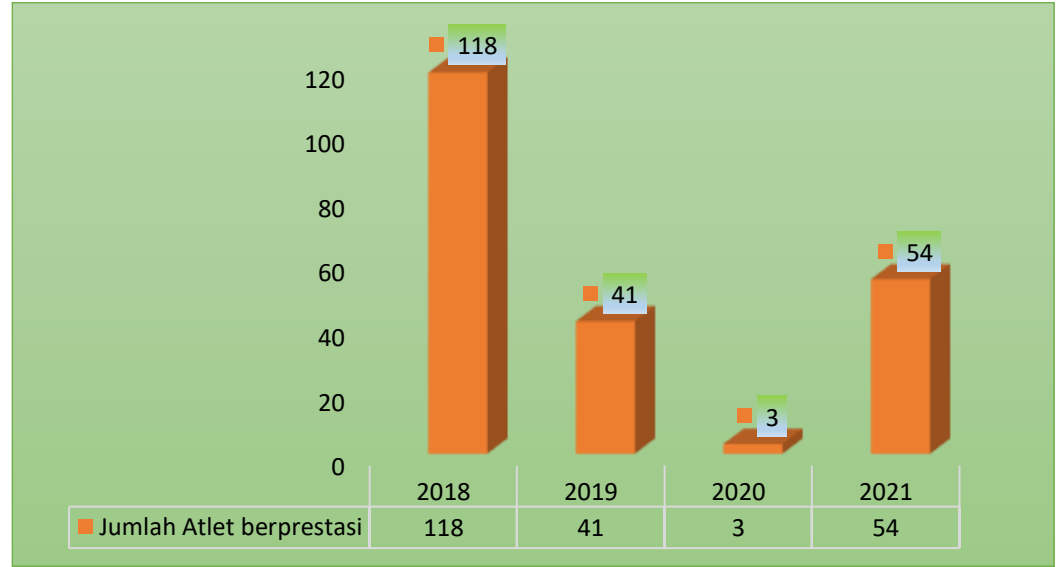
Tabel 2.44. Perkembangan Capaian Bidang Olahraga di Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2018-2021

No.	Capaian Pembangunan	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah Atlet berprestasi	118	41	3	54
2.	Cakupan Pembinaan atlet muda	58.82%	60.77%	38.10%	69.45%
3.	Cakupan Pelatih Berprestasi	25.86%	31.75%	34.85%	50.00%
4.	Jumlah Prestasi Olahraga	20	9	0	36

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga Kab.SBB Tahun 2021

Jumlah atlet beprestasi pada Kabupaten Seram Bagian Barat berdasarkan RPMJD Kabupaten Seram Bagian Barat, pada tahun 2018 capaiannya meningkat dari yang ditargetkan yakni 15 atlet yang ditargetkan dan capaiannya adalah 118 atlet, namun pada tahun 2019 menurun menjadi 41 dan kemudian meningkat pada tahun 2021. Berikut jumlah atlet berprestasi Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2018-2021.

Gambar 2.59. Grafik Jumlah Atlet Berprestas di Kabupaten Seram Bagian Barat 2018-2021

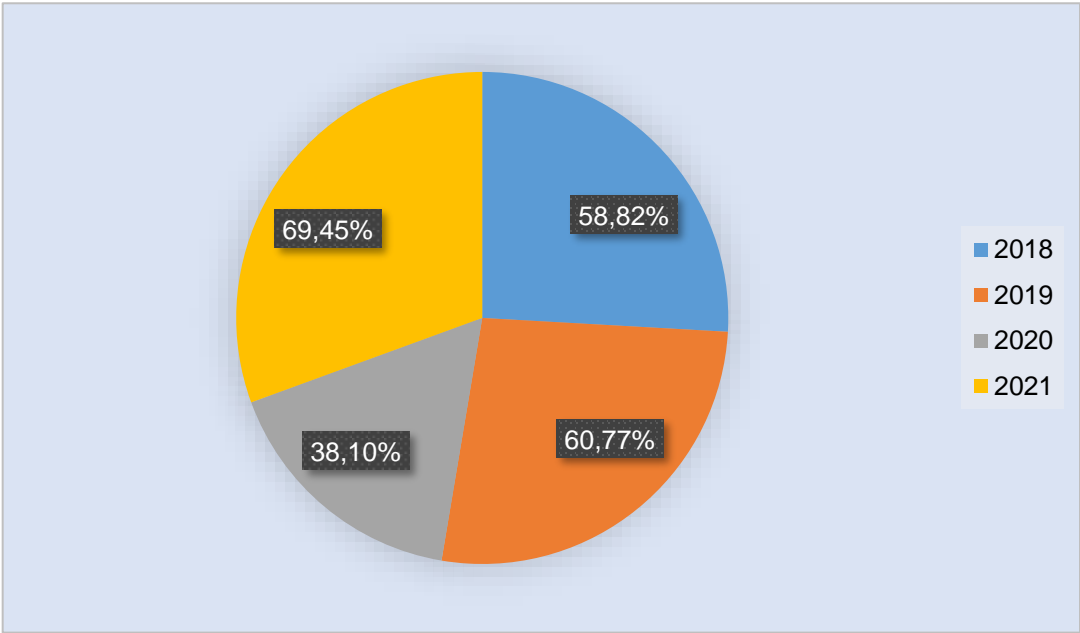


Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. SBB, 2022

Melahirkan sebuah prestasi tidak merupakan suatu proses instan, yang hasilnya bisa dilihat, dirasakan, namun merupakan suatu proses panjang melibatkan berbagai komponen baik internal maupun

eksternal. Melahirkan juara merupakan suatu proses panjang mulai dari bagaimana menemukan atlet melalui talensscouting yang tepat dalam mendapatkan bibit atlet yang berkualitas, perkembangan multilateral, tahap spesialisasi sampai nantinya memasuki prestasi puncak (*Golden Age*). Dibutuhkan pemahaman, pengetahuan dan kesabaran dari pelatih dalam pembinaan atlet muda potensial, agar prestasi yang diinginkan bisa terwujud.

Gambar 2.60 Grafik Cakupan Pembinaan Atlet Muda di Kabupaten Seram Bagian Barat 2018-2021

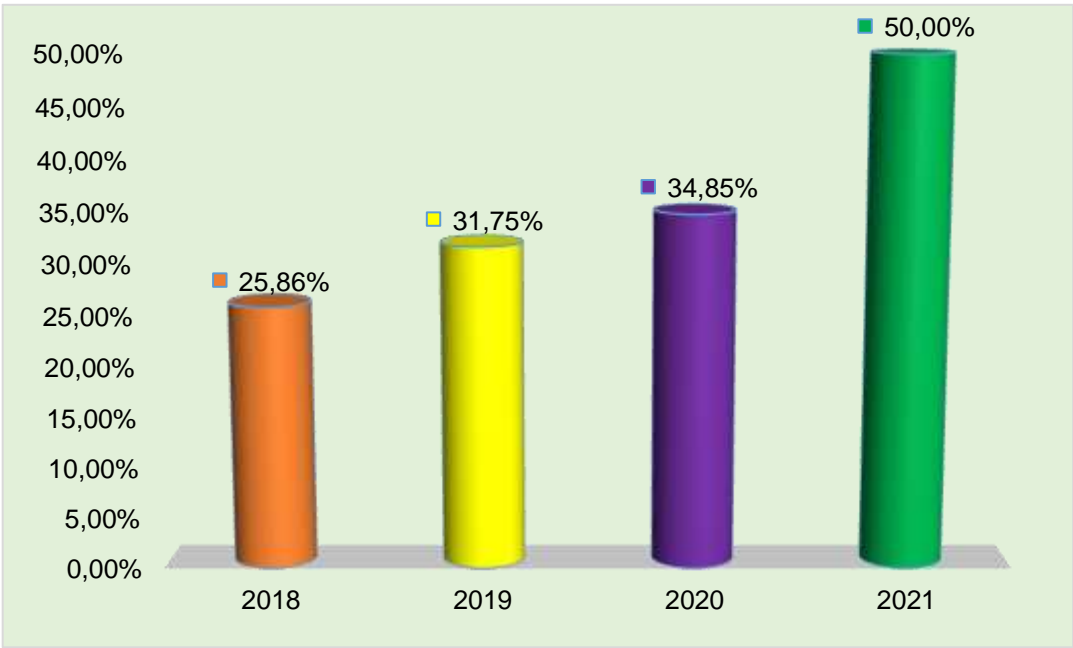


Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. SBB, 2022

Capaian pembinaan atlet muda tertinggi pada tahun 2021 dengan total persentase 69,45% dan terendah pada tahun 2020 yakni 38,10%. Talenta atlit muda dan berbakat pada Kabupaten Seram Bagian Barat cukup mumpuni jika di kembangkan, tentu manajemen pengelolaan atlit serta menambah keikutsertaan berbagai turnamen untuk meningkatkan bakat saat bertanding sangat diperlukan. Selama periode pembangunan mendatang, keterwakilan atlit Kab. Seram Bagian Barat dalam ajang Pekan Olahraga Daerah (PORDA) lebih diperhatikan.

Berdasarkan capaian RPJMD Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2018-2022, cakupan pelatih berprestasi sesuai dengan data yang diperoleh dari Dinas Pemuda dan Olahraga setiap tahun meningkat. Cakupan pelatih berprestasi sebagaimana terlihat pada grafik

Gambar 2.61. Grafik Cakupan Pelatih Berprestasi di Kabupaten Seram Bagian Barat 2018-2021

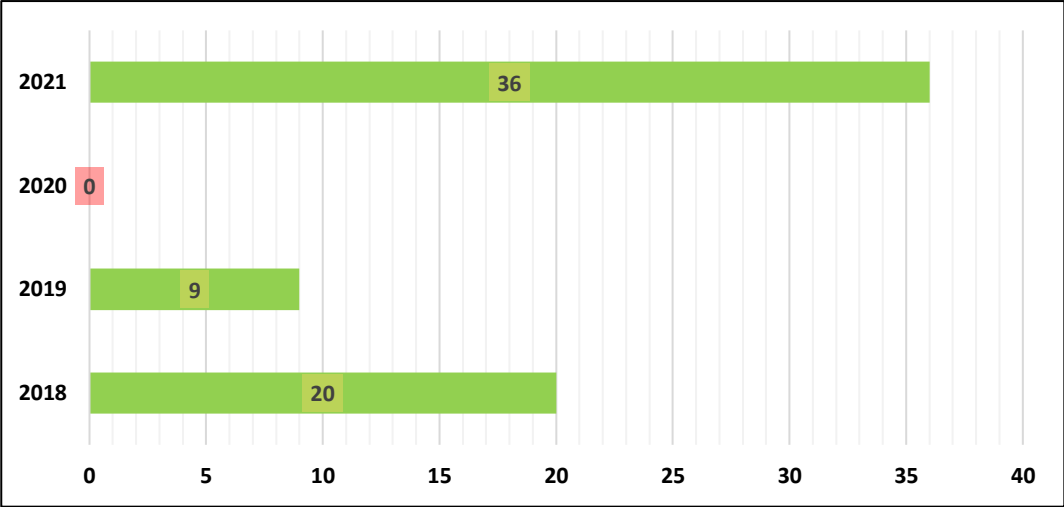


Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. SBB, 2022

Pada tahun 2021, cakupan pelatih berprestasi mencapai 50%, hal ini menunjukkan bahwa perhatian pada sektor olahraga cukup baik. Pelatih hebat bukanlah satu-satunya faktor atau faktor tunggal prestasi dan kesuksesan sebuah tim. Selain itu harus pula ditunjang oleh atlet hebat, sejalan dengan hal tersebut Pemerintah Daerah melalui dinas Pemuda dan olahraga harus disupport dalam upaya peningkatan kualitas pelatih dan atlit muda yang berbakat.

Olahraga Prestasi adalah olahraga yang membina dan mengembangkan olahragawan secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan. Untuk mencapai prestasi yang setinggi-tingginya, maka usaha pembinaan harus dilakukan dengan menyusun strategi dan perencanaan yang rasional sebagai usaha untuk meningkatkan kualitas serta mempunyai program yang jelas. Hai ini penting agar program pembinaan dapat mencapai sasaran yang tepat yaitu prestasi yang tinggi, seperti apa yang diinginkan.

Gambar 2.62. Grafik Jumlah Prestasi Olahraga di Kabupaten Seram Bagian Barat 2018-2021.

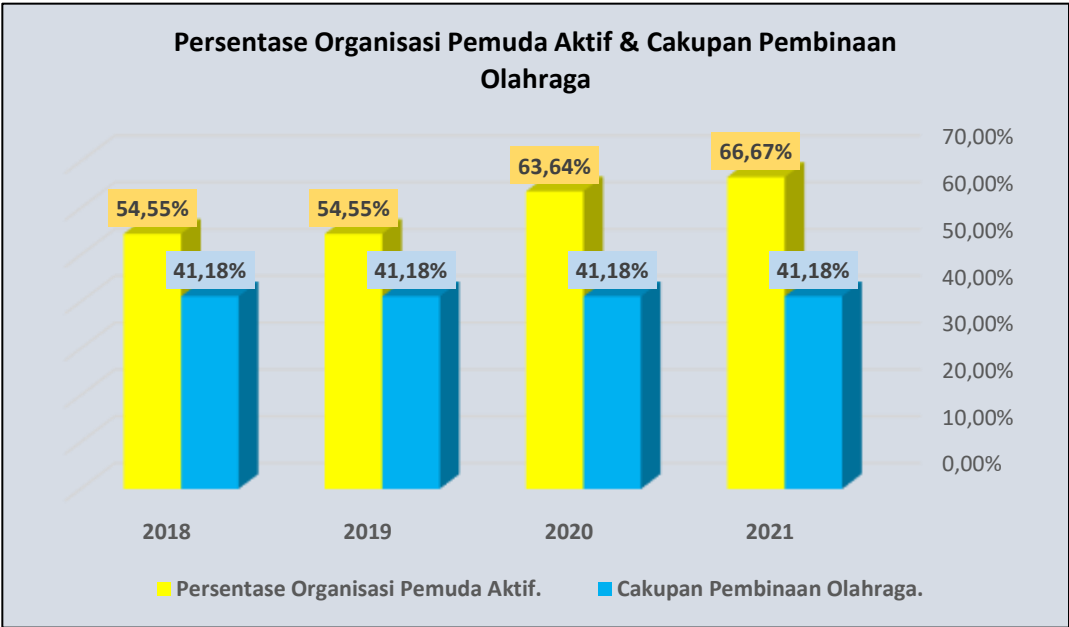


Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. SBB, 2022

Berdasarkan capaian jumlah prestasi olahraga pada RPJMD kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2018-2022, nampak bahwa jumlah prestasi olahraga tertinggi pada tahun 2021 dan terendah atau tidak ada prestasi olahraga pada tahun 2020. Hal ini disebabkan karena atlit tidakikutsertakan dalam lomba. Kedepan perhatian Pemerintah Daerah terhadap atlit harus tetap diprioritaskan demi menciptakan prestasi olahraga yang mumpuni bagi Kabupaten Seram Bagian Barat. Pada sisi lain, Jumlah klub olahraga di Kabupaten Seram Bagian Barat mengalami peningkatan dari 310 klub (2018) menjadi 394 klub (2021). Peningkatan tersebut tergolong cukup tinggi jika disebabkan banyaknya variasi cabang olahraga yang ada. Rendahnya jumlah klub olahraga dikarenakan masih banyaknya klub olahraga yang belum terdaftar ke pengurus cabang dan masih banyak klub olahraga yang pasif dalam berbagai turnamen. Ke depan, pemerintah dapat meningkatkan jumlah serta keikutsertaan turnamen olahraga pada masing-masing cabang olahraga.

Jumlah lapangan olahraga pada tahun (2018) adalah 213 dan pada tahun 2021 meningkat menjadi 280. Peningkatan jumlah lapangan olahraga menunjukkan bahwa antusias masyarakat yang berpartisipasi dalam cabang olahraga sangat tinggi dan potensi untuk menghasilkan atlit yang berbakat sangat terbuka lebar karena dari sisi kuantitas dukungan fasilitas lapangan olahraga yang memadai. Capaian target kinerja sasaran pembangunan daerah urusan pemuda dan olahraga sesuai RPJMD Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2018-2022 terdiri dari 2 indikator yaitu Persentase Organisasi Pemuda Aktif dan Cakupan Pembinaan Olahraga.

Gambar 2.63. Grafik Persentase Organisasi Pemuda Aktif & Cakupan Pembinaan Olahraga di Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2018-2021



Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. SBB, 2022

Cakupan pembinaan olahraga pada Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2018-2022 rata-rata 41,18%, sementara persentase organisasi pemuda aktif pada kurun waktu RPJMD tersebut semakin meningkat setiap tahunnya, hal ini disebabkan oleh organisasi pemuda dinilai cukup baik dalam memainkan perannya serta aktif dalam membina pemuda dalam rangka menciptakan pemuda yang handal serta dapat berkontribusi bagi pembangunan di Kabupaten Seram Bagian Barat.

14. Statistik

Ketersediaan data dan informasi yang terpercaya adalah kunci keberhasilan sebuah perencanaan pembangunan. Data dan informasi yang berkualitas menjadi sumber informasi tentang kondisi berbagai hal yang dapat diketahui oleh pihak-pihak terkait dalam memahami permasalahan dan tantangan. Pengumpulan, pengelolaan dan penyediaan data merupakan aspek penting dalam pembangunan pada urusan statistic. Jenis data statistic terdiri dari statistic dasar, statistic sektoral dan statistic khusus.

Tabel 2.45. Jumlah Dokumen Statistik Daerah Yang Dipublikasikan

Dokumen	2018	2019	2020	2021
Jumlah Dokumen Statistik Daerah Yang Dipublikasikan	15 Dokumen	15 Dokumen	15 Dokumen	15 Dokumen

Sumber : BPS Kabupaten Seram Bagian Barat, 2022

Statistik dasar dilakukan oleh Badan Pusat Statistik sesuai amanat Undang-undang nomor 16 tahun 1997 tentang Statistik. Sedangkan statistic sektoral diselenggarakan oleh instansi pemerintah sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya baik secara mandiri maupun bersama dengan BPS.

15. Kearsipan

Urusan kearsipan di Kabupaten Seram Bagian Barat diselenggarakan oleh Dinas Kearsipan. Pengelolaan arsip di daerah Kabupaten meliputi arsip statis dan arsip dinamis yang diciptakan dalam lingkup kabupaten. Kondisi pengelolaan arsip di Kabupaten Seram Bagian Barat adalah sebagai berikut.

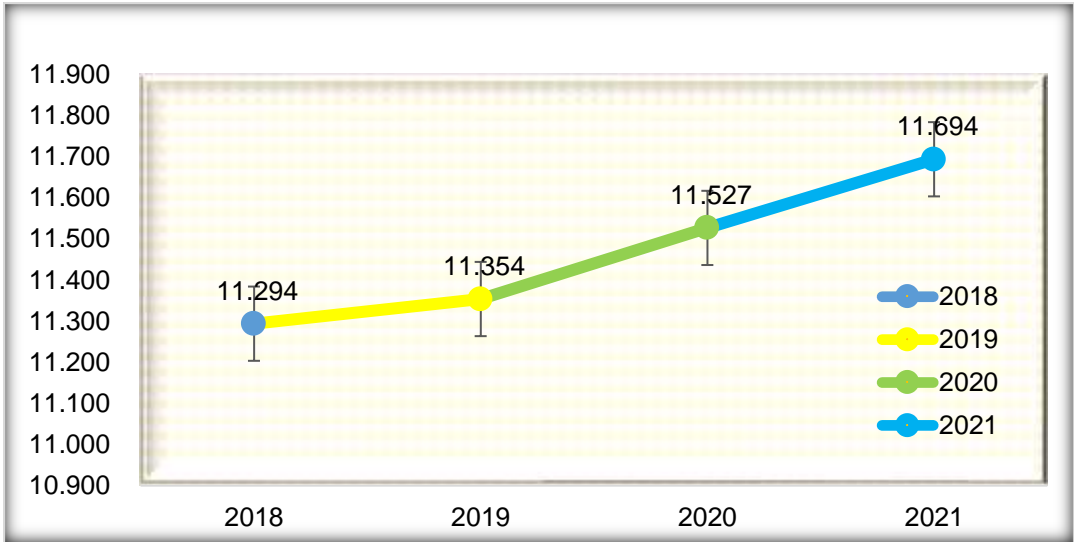
Tabel 2.46. Capaian Pengelolaan Arsip di Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2018 – 2021

No.	Uraian	2018	2019	2020	2021
1.	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	11,294	11,354	11,527	11,694
2.	Persentase OPD yang telah mengelolah arsip secara baku	77,11%	77,16%	83,69%	84,32%

Sumber : Dinas Kearsipan Kab. Seram Bagian Barat, 2022

Pada tahun 2021, Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan berjumlah 11,694, sementara itu persentase perangkat daerah yang menerapkan pengelolaan arsip secara baku sebesar 84,32%.

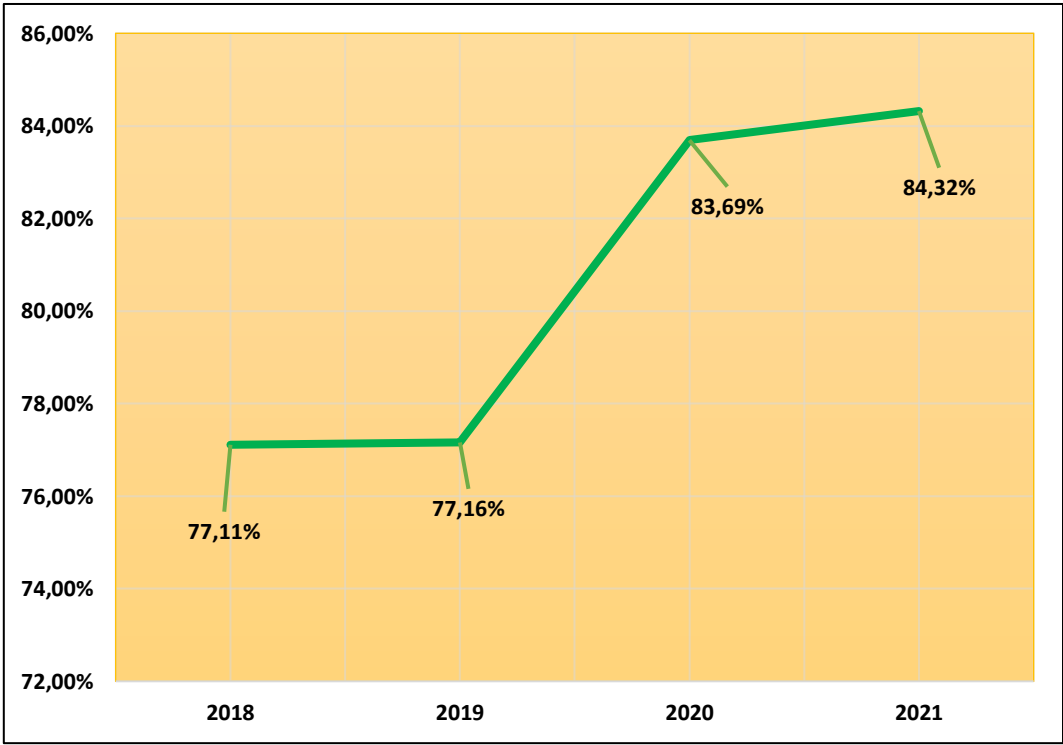
Gambar 2.64. Grafik Koleksi Buku Yang Tersedia di Perpustakaan Daerah Tahun 2018 – 2021.



Sumber : Dinas Kearsipan Kab. Seram Bagian Barat, 2022

Beberapa hambatan yang dihadapi dalam pengelolaan arsip adalah belum semua Perangkat Daerah mengirimkan arsipnya untuk diolah Dinas Kearsipan, petugas pengelola kearsipan di Satuan Kerja masih sering dibebani tugas- tugas lain dan sering terjadi pergantian petugas, serta kurangnya sarana tata kearsipan di Satuan Kerja sehingga arsip belum seluruhnya dapat tertata secara baik dan benar.

Gambar 2.65. Grafik Persentase OPD Yang Telah Mengelola Arsip Secara Baku Tahun 2018 – 2021



Sumber : Dinas Kearsipan Kab. Seram Bagian Barat, 2022

Berdasarkan capaian indikator Utama Perangkat Daerah pada Dinas Kerasipan dengan variabel presentase OPD yang telah mengelola arsip secara baku yaitu pada tahun 2021 sebesar 84,32 persen dari total 52 OPD yang ada pada Kabupaten Seram Bagian Barat sudah termasuk 11 Kecamatan.

2.3.1.3. Urusan Pilihan

Fokus layanan urusan pemerintahan pilihan meliputi analisis capaian kinerja pada urusana kelautan dan perikanan, perindustrian, pariwisata dan berbagai sektor potensial lainnya yang berpengaruh terhadap berbagai indicator makro daerah. Berikut ini merupakan capaian beberapa sektor yang termasuk dalam urusan pilihan di Kabupaten Seram Bagian Barat.

1. Kelautan dan Perikanan

Kewenangan kabupaten/kota sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pada urusan kelautan dan perikanan mencakup sub urusan perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Indikator pada urusan kelautan perikanan meliputi: 1) Jumlah Konsumsi Ikan; 2) Nilai Tukar Nelayan (NTN); 3) Produksi Hasil Perikanan Tangkap; 4) Produksi Hasil Perikanan Budidaya; 5) Kontribusi Sektor Perikanan dan Kelautan Terhadap PDRB. Perkembangan pencapaian indikator kinerja urusan kelautan perikanan sebagaimana tergambar pada table berikut.

Tabel 2.47. Capaian Indikator Sektor Kelautan dan Perikanan

Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021
Kontribusi Sektor Kelautan Perikanan Terhadap PDRB	Persen	8,50	8,43	8,57	8,66
Nilai Tukar Nelayan	Persen	101	101	101	101
Produksi Hasil Perikanan Tangkap	Ton	25.845	25.637	32.164	31.903
Produksi Hasil Perikanan Budidaya	Ton	330,37	436,21	350,98	355,05
Jumlah Konsumsi Ikan	Kg/Kapita	60,52	61,76	62,03	64,96

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan, 2022

Capaian indikator untuk urusan kelautan dan perikanan ini tidak terlepas dari peran Dinas Kelautan dan Perikanan yang gencar melakukan pembinaan dan

penyuluhan serta fasilitasi bantuan kepada kelompok nelayan tangkap maupun kepada kelompok nelayanan pembudidaya ikan.

Hal yang tidak kalah penting adalah upaya yang dilakukan untuk senantiasa meningkatkan jumlah konsumsi ikan, melalui sosialisasi dan kampanye-kampanye yang dilakukan kepada masyarakat dan terbukti bahwa jumlah konsumsi ikan di Kabupaten Seram Bagian Barat dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan.

2. **Pariwisata**

Pembangunan pariwisata memiliki posisi strategis karena pariwisata memiliki daya ungkit terhadap perekonomian perekonomian local dan provinsi. Pelaksanaan urusan pariwisata di tingkat kabupaten berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memiliki kewenangan yaitu mencakup; pengelolaan daya tarik wisata kabupaten/kota; pengelolaan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota; pengelolaan destinasi wisata kabupaten/kota; penetapan tanda daftar usaha pariwisata kabupaten/kota; pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri; destinasi dan kawasan strategis kabupaten/kota; penyediaan prasarana sebagai ruang berekspresi, promosi dan berinteraksi bagi insan kreatif kabupaten/kota; pelaksanaan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar.

Gambaran perkembangan pencapaian indicator kinerja urusan pariwisata di Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2018-2021 sebagaimana tergambar pada table berikut.

Tabel 2.48. Capaian Indikator Sektor Pariwisata

Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021
Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	Persen	4,12	12,76	3,6	2,41
Persentase kenaikan jumlah kunjungan wisata	Persen	93,76	42,21	22,58	40,52
Jumlah objek wisata yang dikembangkan	Lokasi	3	3	2	1
Peningkatan penyelenggaraan promosi dan pameran pariwisata	Kegiatan	2	3	1	1
Jumlah even wisata daerah	Kegiatan	2	2	0	1

Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021
Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang dibina	Kelompok	40	80	60	50

Sumber : Dinas Pariwisata, 2022

Indikator kinerja urusan pariwisata di Kabupaten Seram Bagian Barat tahun 2018-2021 adalah 1) kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB; 2) jumlah kunjungan wisata; 3) jumlah objek pariwisata yang dikembangkan; 4) peningkatan penyelenggaraan promosi dan pameran pariwisata; 5) jumlah even wisata daerah; 6) jumlah pelaku ekonomi kreatif yang dibina.

3. Pertanian

Kewenangan urusan pertanian Kabupaten/kota sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 mencakup sub urusan: sarana pertanian, prasarana pertanian, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian, dan perizinan usaha pertanian. Secara keseluruhan kinerja pertanian dapat dilihat dari kontribusi sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terhadap PDRBB. Dalam kurun waktu 2018-2021 kontribusi PDRB sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terhadap PDRB 33,60 persen pada tahun 2021. Sektor pertanian mulai dikejar oleh sektor administrasi pemerintahan; dan konstruksi. Penurunan kontribusi sektor pertanian dipengaruhi oleh kepemilikan lahan pertanian yang semakin menyempit, sumber air irigasi menyusut, cuaca dan iklim tidak menentu, akses terhadap sumber permodalan terbatas, labilitas harga jual hasil pertanian, dan belum berkembangnya industri pengolahan hasil pertanian.

Capaian kinerja urusan pertanian Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2018-2021, dapat digambarkan sebagaimana table berikut.

Tabel 2.49. Capaian Indikator Urusan Pertanian

Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021
Kontribusi sektor pertanian perkebunan terhdap PDRB	Persen	25,74	25,74	24,02	24,02
Kontribusi sektor pertanian palawija terhadap PDRB	Persen	53,86	53,86	4,80	4,80
Produksi sektor pertanian	Ton	14.462	14,462	34.169	34.169
Kontribusi sektor perkebunan tanaman keras terhadap PDRB	Persen	24,30	24,30	9,61	9,61
Produksi sektor perkebunan	Ton	25.247	25.789	12.611	12.611

Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021
Kontribusi produksi kelompok petani terhadap PDRB	Persen	13	13	15,85	15,85
Produksi hasil perkebunan	Ton	25.662	26.176	12.611	12.611
Produksi padi atau bahan pangan local lainnya per hektare	Ton	4,4	4,5	3,7	3,7
Cakupan bina kelompok petani	Persen	75	80	85	90

Sumber : Dinas Pertanian, 2022

Indikator kinerja urusan pertanian di kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2018-2021 mencakup: 1) Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB; 2) Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB; 3) Produksi sektor pertanian; 4) Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB; 5) Produksi sektor perkebunan; 6) Kontribusi produksi kelompok petani terhadap PDRB; 7) Produksi hasil perkebunan; 8) Produksi padi atau bahan pangan local lainnya per hektar; 9) cakupan bina kelompok petani.

4. Perdagangan

Pelaksanaan urusan perdagangan di tingkat Kabupaten berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memiliki kewenangan kabupaten/kota :

1. Perijinan dan pendaftaran perusahaan;
2. Sarana distribusi perdagangan
3. Stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting;
4. Pengembangan ekspor;
5. Standarisasi dan perlindungan konsumen.

Tabel 2.50. Capaian Kinerja Urusan Perdagangan

Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021
Persentase pasar yang diawasi	Persen	65	70	75	80
Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	Persen	5.85	5.81	5.75	6.0
Cakupan bina kelompok pedagang	Persen	60	70	80	90

Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021
Persentase lokasi PKL yang tertata	Persen	45	50	55	60
Persentase pasar yang memenuhi persyaratan	Persen	45	60	65	70

Sumber : Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Naker, 2022

Dilihat dari indikator persentase pasar yang diawasi dalam kurun waktu 3 tahun terus mengalami peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2019 sebesar 70 persen meningkat menjadi 75 persen pada tahun 2020 dan meningkat lagi pada Tahun 2021 menjadi 80 persen. Namun demikian sampai dengan tahun 2021 masih ada pasar yang belum memenuhi persyaratan, terlihat dari indikator persentase pasar yang memenuhi persyaratan baru mencapai 75 persen pada tahun 2021.

5. Perindustrian

Urusan perindustrian sesuai Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dengan 3 sub urusan, yaitu Perencanaan Pembangunan Industri, Perizinan, dan Sistem Informasi Industri Nasional. Kewenangan Kabupaten dari 3 sub urusan tersebut sebagai berikut: 1) sub urusan perencanaan industry; 2) sub urusan perizinan; 3) sub urusan system informasi industry nasional. Secara rinci capaian indicator kinerja urusan perindustrian dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 2.51. Capaian Kinerja Urusan Perindustrian

Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021
Kontribusi sektor industry terhadap PDRB	Persen	4,2	4,3	4,6	6,1
Pertumbuhan industri	Persen	15	20	25	30
Cakupan pembinaan unit usaha IKM	Persen	40	45	50	55
Persentase industry yang berkembang	Persen	15	20	25	30
Persentase peningkatan omzet unit usaha IKM	Persen	10	15	15	20

Sumber : Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Naker, 2022ss

6. Transmigrasi

Sektor transmigrasi menjadi penting dalam pelaksanaan reforma agraria. Transmigrasi memiliki nilai strategis dalam konteks ketersediaan tenaga kerja manusia yang produktif, dan tanah atau lahan untuk dikembangkan oleh

transmigran. Transformasi paradigma dan strategi transmigrasi harus mampu menggeser makna memindahkan kemiskinan atau mengasingkan rakyat miskin dari pembangunan menjadi cara baru membangun produktivitas bersama rakyat dan pemerataan kesempatan berkembangnya ekonomi. Dengan begitu, transmigrasi menjadi kegiatan penting bagi pembangunan manusia Indonesia secara keseluruhan. Transmigrasi juga punya peran yang sangat besar untuk mengurangi kesenjangan. Secara teknis, kawasan transmigrasi baiknya dijadikan kawasan produktif dengan komoditas tanaman pangan unggulan. Berdasarkan Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terdapat 3 sub urusan yang menjadi kewenangan urusan Transmigrasi di Pemerintah Kabupaten/ Kota. Ketiga sub urusan tersebut adalah: 1) Perencanaan Kawasan Transmigrasi; 2) Pembangunan Kawasan Transmigrasi dan 3) Pengembangan Kawasan Transmigrasi.

2.3.1.4. Unsur Penunjang, Pendukung, Pengawasan Urusan Pemerintahan, serta Unsur Kewilayahan.

1. Penelitian dan Pengembangan

Peningkatan daya saing antar daerah merupakan agenda penting dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Kolaborasi antara stakeholders menjadi faktor kunci dalam meningkatkan daya saing. Instansi yang terkait memiliki tugas untuk melaksanakan penelitian dan pengembangan dalam bidang pemerintahan dalam negeri. Tugas tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas regulasi dan kebijakan pemerintah serta daya saing daerah melalui penelitian dan pengembangan.

Penelitian dan pengembangan merupakan pendukung perencanaan dalam memberikan rekomendasi bagi pengambil kebijakan. Beberapa fungsi kelitbangan antara lain adalah menyusun kebijakan teknis, program, anggaran penelitian, melaksanakan kelitbangan, memberikan rekomendasi kebijakan dan regulasi serta melaksanakan administrasi kelitbangan. Berikut adalah gambaran hasil penelitian dan pengembangan yang diimplementasikan.

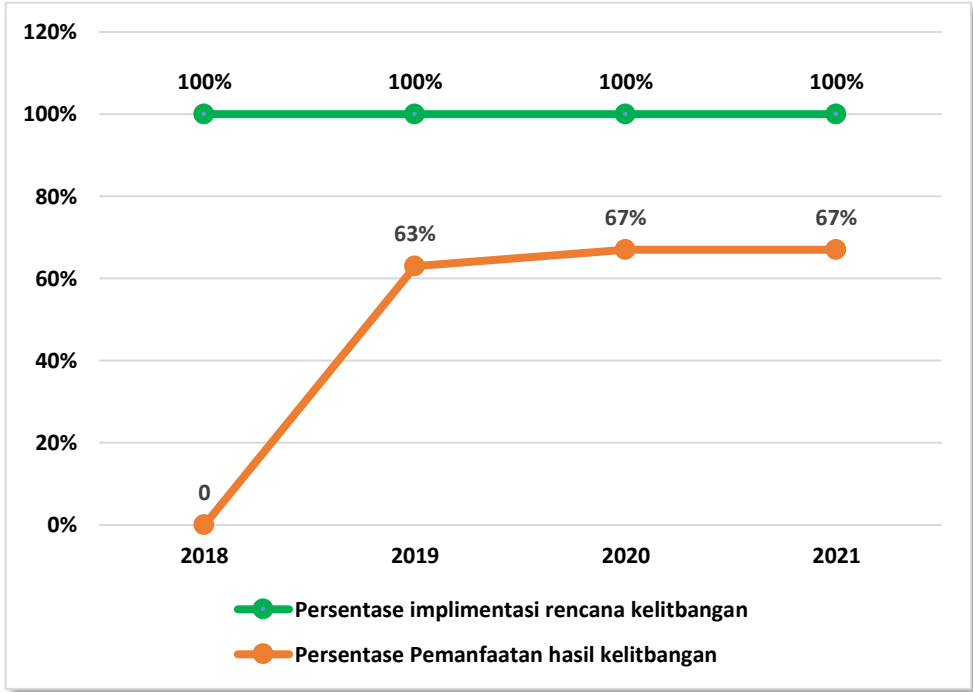
Tabel 2.52. Capaian Kelitbangan Kab. Seram Bagian Barat Tahun 2018-2021

No.	Uraian	2018	2019	2020	2021
1.	Persentase implimentasi rencana kelitbangan	100%	100%	100%	100%
2.	Persentase Pemanfaatan hasil kelitbangan	-	63%	67%	67%

No.	Uraian	2018	2019	2020	2021
3.	Persentase kebijakan Inovasi yang diterapkan di Daerah	-	19 %	-	48 %
4.	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	-	-	19 %	96 %

Sumber : Balitbangda Kab. SBB, 2022

Gambar 2.66. Grafik Capaian Kelitbangan Kab. Seram Bagian Barat Tahun 2018-2021



Sumber : Balitbangda Kab. SBB, 2022

Hasil penelitian dan inovasi daerah yang diimplementasikan mengalami tren yang meningkat yang sangat baik pada tahun 2018 hingga 2021. Namun pada pemanfaatan hasil kelitbangan belum sepenuhnya di implementasikan. Kondisi ini menunjukkan masih belum optimalnya peran lembaga kelitbangan dalam melakukan penelitian dan pengembangan serta inovasi daerah di Kabupaten Seram Bagian Barat.

2. Keuangan

Sesuai dengan PP 12 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, lingkup pengelolaan keuangan mencakup perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, efisien, transparan dan bertanggung jawab dengan

memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan perundangundangan.

Kinerja pengelolaan keuangan daerah secara keseluruhan diukur dengan Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), dengan realisasi pada tahun 2018 – 2020 adalah WDP, sementara untuk 2021 sementara dalam proses audit.

Terkait pendapatan daerah, persentase PAD terhadap seluruh pendapatan daerah dalam APBD mengalami peningkatan dari tahun ke tahun pada kisaran antara 0,1 sampai dengan 0,5 persen per tahun. Peningkatan pendapatan belum maksimal terkait dengan data potensi pajak dan retribusi yang perlu dilakukan pemutakhiran, dan pemanfaatan teknologi yang masih kurang dalam peningkatan akurasi data dan pelayanan pajak dan retribusi. Pencapaian indikator kinerja pada urusan keuangan, dapat digambarkan sebagaimana pada table berikut.

Tabel 2.53. Capaian Indikator Urusan Keuangan

Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021
Opini BPK terhadap laporan keuangan Pemda	Opini	WDP	WDP	WDP	WDP
Penetapan APBD	Waktu	Belum tepat waktu	Belum tepat waktu	Belum tepat waktu	Belum tepat waktu
Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Persen	2,09	2,59	2,96	3,68
Tingkat Pengelolaan Aset Daerah	Persen	75	80	85	90

Sumber : BPKAD dan Bapenda, 2022

Pengelolaan aset daerah yang meliputi perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, pendistribusian (termasuk penyimpanan), penggunaan, pemeliharaan dan penghapusan masih perlu perbaikan kinerja, terutama dalam hal registrasi aset. pengamanan aset baik dari sisi administrasi maupun fisik, serta terkait penghapusan aset.

3. Kepegawaian

Urusan kepegawaian merupakan unsur penunjang yang memiliki fungsi mengelola ASN. Urusan kepegawaian erat kaitannya dengan beberapa aspek seperti manajemen kepegawaian, pengadaan calon ASN, mutasi, promosi, dan pemberhentian ASN, serta pengembangan kompetensi dan kapasitas ASN. Salah satu kinerja urusan kepegawaian dapat dilihat dari

persentase jabatan yang diisi sesuai dengan kompetensi pegawai.

Jumlah ASN di Kabupaten Seram Bagian Barat pada tahun 2021 sebanyak 1.509 orang dengan komposisi 919 orang laki-laki dan 590 orang perempuan. Berikut adalah rekapitulasi jumlah ASN menurut golongan di Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2021.

Tabel 2.54. Jumlah Pegawai di Kabupaten Seram Bagian Barat Berdasarkan Golongan

No.	Golongan	2021
1.	Golongan I	15
2.	Golongan II	508
3.	Golongan III	843
4.	Golongan IV	143

Sumber : BKPSDM Kab. Seram Bagian Barat, 2022

ASN di wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat merupakan pegawai Otonomi daerah. Pegawai otonomi daerah Kabupaten Seram sejak tahun 2018-2019 mengalami penurunan. Rata-rata penurunan jumlah ASN per tahun sejak tahun 2018 disebabkan oleh beberapa faktor seperti banyak pegawai pensiun dan mutasi serta moratorium penerimaan ASN.

4. Pendidikan dan Pelatihan

Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas mengumpul, mengolah dan merumuskan bahan kebijakan teknis di bidang pendidikan dan pelatihan serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsinya. Dalam rangka meningkatkan kualitas aparatur pemerintah di lingkungan pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat yang profesional, bersih, berwibawa, dan bersikap netral dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, maka Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Seram Bagian Barat melaksanakan kegiatan pengembangan kompetensi aparatur sipil negara yang sesuai dengan kebutuhan

Tabel 2.55. Capaian ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal di Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2018-2021

No	Uraian	2018	2019	2020	2021
1.	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan	0,01%	0,02%	0,08%	0,07%

No	Uraian	2018	2019	2020	2021
	pelatihan formal				
2.	Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	0%	0,01%	0%	0,05%

Sumber : BKPSDM Kab. Seram Bagian Barat, 2022

Berdasarkan data capaian indikator kinerja pada Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal yang tertinggi pada tahun 2020 yaitu sebesar 0.08% dan terendah pada tahun 2019 yaitu 0,02%. Hal ini menunjukan bahwa kurang lebih 93 % ASN yang ada di Kabupaten Seram Bagian Barat belum mengikuti pendidikan formal. Begitu pula dengan Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural tertinggi pada tahun 2021 yaitu 0,05%.

Gambar 2.67. Grafik Persentase ASN Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal Tahun 2018-2021



Sumber : BKPSDM Kab. Seram Bagian Barat, 2022

Upaya peningkatan pelayanan publik dilakukan dengan meningkatkan kualitas pemberi layanan. Beberapa hal yang menjadi fokus pengembangan adalah efektifitas dan produktivitas kinerja aparatur, peningkatan kapasitas tersebut dilakukan melalui pendidikan maupun pelatihan serta pembinaan pegawai. Upaya peningkatan kapasitas aparatur dilakukan guna mewujudkan penempatan jabatan sesuai kompetensi yang dimiliki pegawai

Terdapat jabatan yang diisi oleh ASN dengan latar belakang pendidikan yang berbeda dengan jabatan yang diisi. Perbedaan latar belakang pendidikan dengan jabatan yang diisi semata-mata terjadi karena

kebutuhan organisasi dan masih kurangnya pegawai yang memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai dengan jabatan yang tersedia.

Dengan berlakunya PermenPAN RB Nomor 17 Tahun 2021 tentang penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional, diharapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat mengimplementasikannya sesuai dengan ketentuan dan kaidah yang berlaku, sehingga kebutuhan organisasi dan jabatan dapat terpenuhi.

5. **Sekretariat Daerah**

Sekretariat Daerah bagian dari urusan penunjang pemerintahan yang mendukung efektivitas tata kelola pemerintahan di Kabupaten Seram Bagian Barat. Sekretariat Daerah tidak lepas dari tugas dan fungsi koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi berbagai kebijakan Bupati dan Wakil Bupati. Perangkat daerah tersebut menjadi koordinator pencapaian beberapa indikator kinerja makro (outcome), salah satunya adalah capaian nilai Reformasi Birokrasi. Reformasi birokrasi berupaya mencapai sasaran terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas birokrasi, serta terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik. Nilai Reformasi Birokrasi Kabupaten Seram Bagian Barat 2018-2021. Pada capaian sasaran indikator kinerja utama yaitu Meningkatnya Kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi dengan indikator sasaran Nilai LPPD, Kinerja Pemerintah Daerah dan nilai E Sakip, Indeks Survey Kepuasan Masyarakat (IKM) pada tahun 2018-2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.56. Capaian Nilai LPPD, Kinerja Pemerintah Daerah, Nilai E Sakip dan IKM

Uraian	2018	2019	2020	2021
Nilai LPPD Kinerja Pemerintah Daerah	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Tinggi
Nilai E Sakip	C	C	CC	CC
Indeks Survey Kepuasan Masyarakat (IKM)	B	B	B	C

Sumber : Setda Kab.SBB, 2022

Hasil Evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) juga menjadi representasi capaian manajemen kinerja yang dikoordinasi oleh Sekretariat Daerah. LPPD merupakan penilaian atas indikator kinerja kunci Pemerintah Daerah yang terdiri dari komponen tataran pengambilan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan. Capaian LPPD Kabupaten Seram Bagian Barat mulai dari 2018 hingga 2020 sangat baik yakni sangat tinggi, namun pada tahun 2021 dengan penilaian tinggi.

Capaian nilai SAKIP dibentuk oleh beberapa komponen, yaitu perencanaan, pengukuran, pelaporan, capaian dan evaluasi kinerja. Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat berupaya memperbaiki perencanaan kinerja dengan memastikan adanya bagan alir yang jelas antara indikator

kinerja Bupati dan Wakil Bupati dengan masing-masing kepala Perangkat Daerah. Tantangan lain terkait penerapan SAKIP adalah pelembagaan perencanaan kinerja yang masih bergantung pada sumber daya manusia perencana. Adapun sumber daya perencana tersebut kadang mengalami mutasi. Tindak lanjut penerapan SAKIP antara lain penggunaan komponen kinerja dalam menentukan TPP, serta penerapan e-SAKIP yang terus diperbaiki.

Capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah didukung oleh capaian indikator di seluruh aspek pelayanan wajib dasar, non-dasar, pilihan dan unsur penunjang. Capaian dalam seluruh aspek pelayanan tersebut ditunjang oleh penerapan survei kepuasan masyarakat sebagai instrumen pengendalian atas kualitas pelayanan publik sekaligus membuka akses partisipasi masyarakat. Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat dalam kurun waktu 2018 hingga 2020 dalam kategori cukup baik yakni pada rentang 75-80, Namun turun pada tahun 2021. Capaian ini dibangun dari pendampingan intensif kepada masing-masing unit pelayanan/perangkat daerah dalam rangka pembinaan pelayanan dan penyusunan instrumen Survey Kepuasan masyarakat Kabupaten Seram Bagian Barat.

6. Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD memiliki fungsi untuk memfasilitasi anggota DPRD dalam membuat kebijakan daerah dan penyusunan produk hukum daerah. Dalam menjalankan fungsinya, Sekretariat Dewan memiliki tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan DPRD.

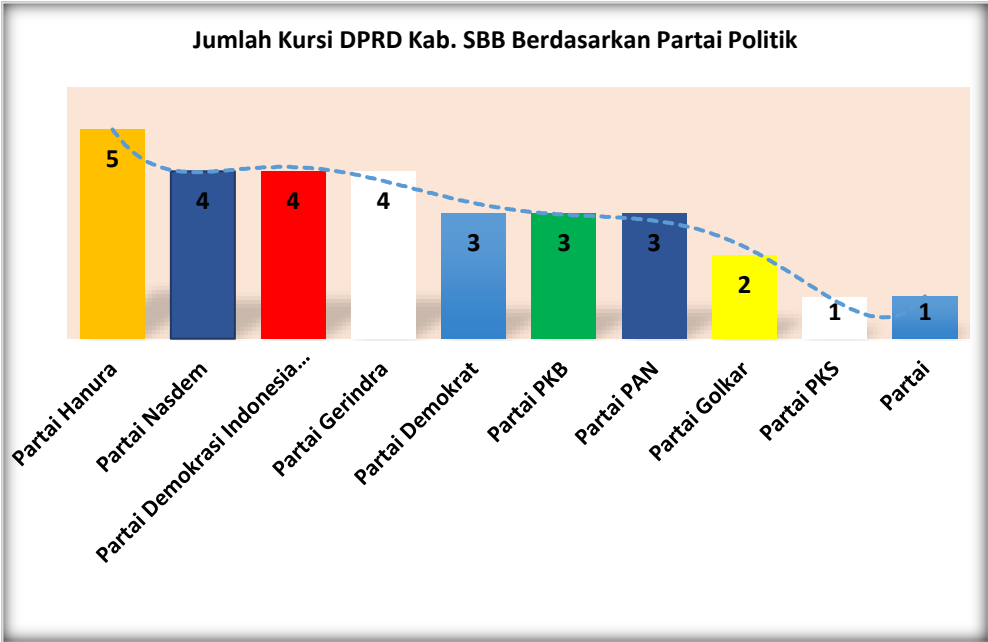
Tabel 2.57. Jumlah Anggota DPRD Menurut Partai Politik dan Jenis Kelamin di Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2021

Partai Politik	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Partai Hanura	4	1	5
Partai Nasdem	4	0	4
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	4	0	4
Partai Gerindra	4	0	4
Partai Demokrat	3	0	3
Partai PKB	3	0	3
Partai PAN	3	0	3
Partai Golkar	2	0	2
Partai PKS	1	0	1
Partai	1	0	1
Jumlah	29	1	30

Sumber : Sekretariat DPRD Kab. SBB, 2022

Berdasarkan tabel diatas, anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat didominasi oleh jenis kelamin laki-laki. Persentase anggota DPRD berjenis kelamin laki-laki 29 orang atau sebesar 96,67% dan perempuan sebesar 3,33% atau hanya terdiri dari 1 orang. Persentase tersebut belum memenuhi standar minimal keterwakilan perempuan pada anggota dewan sebesar 30%. Namun demikian, angka tersebut selisih sangat sedikit dengan angka minimal. Untuk itu, pada periode selanjutnya diharapkan persentase keterwakilan perempuan pada anggota dewan semakin meningkat dan isu kesetaraan gender bisa dikawal dengan lebih baik. Jumlah kursi DPRD berdasarkan partai politik periode 2019-2021 paling tinggi di raih oleh Partai Hati Nurai Rakyat (Hanura) dengan total 5 kursi, disusul oleh Partai Nasdem, PDI Perjuangan dan Gerindra dengan masing-masing 4 kursi dan 3 kursi oleh Partai Demokrat, PKB dan PAN. Perolehan kursi DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat 2019-2024 dapat di lihat pada grafik di bawah ini:

Gambar 2.68. Grafik Jumlah Kursi DPRD Kab. SBB Berdasarkan Partai Politik Tahun 2019-2024



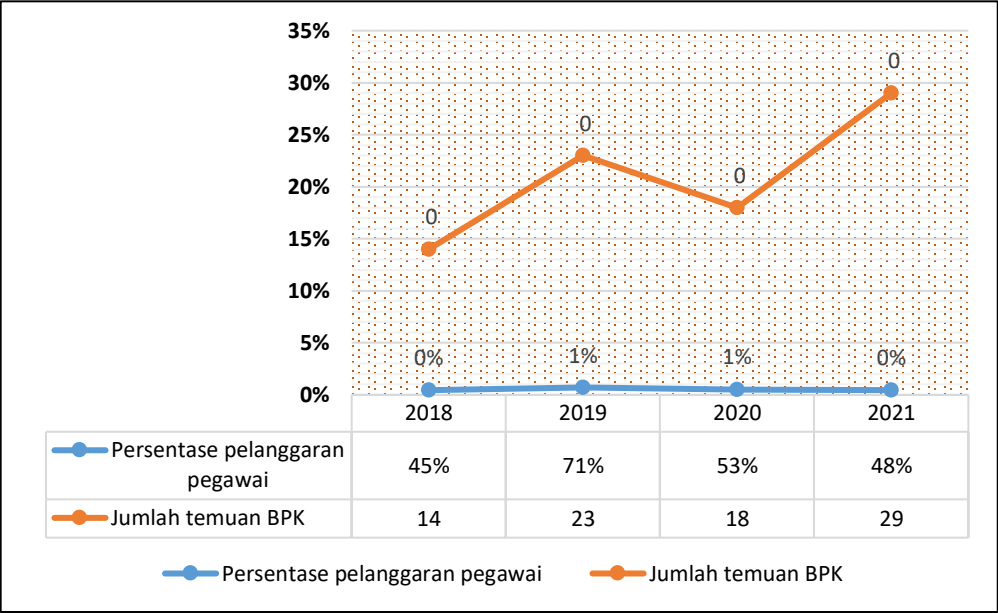
Sumber : Sekretariat DPRD Kab. SBB, 2022

Berdasarkan capaian evaluasi indikator kinerja utama pada Sekretariat DPRD yaitu Rencana Kerja Tahunan pada setiap alat-alat kelengkapan DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat pada tahun 2018-2021 telah ada atau tersedia. Alat kelengkapan DPRD terdiri dari pimpinan, komisi, badan musyawarah, badan anggaran, badan kehormatan dan alat kelengkapan lain yang diperlukan.

7. Pengawasan

Salah satu fungsi penunjang pemerintahan adalah pengawasan. Fungsi pengawasan terkait pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang bertujuan memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Capaian indikator utama perangkat daerah sesuai dengan dokumen RPJMD Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2018-2021 adalah sebagai berikut:

Gambar 2.69. Grafik Capaian Persentase Pelanggaran Pegawai dan Temuan BPK Tahun 2018-2021



Sumber : Inspektorat Daerah Kab. SBB, 2022

Berdasarkan data tersebut di atas, menunjukkan bahwa jumlah pelanggaran pegawai dan temuan BPK pada Kabupaten Seram Bagian Barat terus meningkat setiap tahun. Hal ini perlu menjadi perhatian serius bagi ASN maupun OPD untuk dapat mengeliminir kasus-kasus tersebut serta peningkatan disiplin, pengelolaan serta pertanggungjawaban keuangan yang handal dan akurat.

Secara kelembagaan capaian maturitas SPIP antara lain didukung oleh penerapan kebijakan operasional dari Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan di level kabupaten, satgas SPIP di tingkat kabupaten dan Perangkat Daerah, komitmen pimpinan daerah beserta struktur di bawahnya, adanya pentahapan penerapan SPIP yang jelas, pemantauan berkelanjutan, serta pelaporan. Sedangkan capaian Kapabilitas APIP ditopang oleh koordinasi dan pendampingan intensif dari BPKP Provinsi Maluku, pelaksanaan pengawasan yang mengacu Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, serta adanya rencana aksis dan tindak lanjut rencana aksi.

Tugas pengendalian terkait laporan keuangan Pemerintah Daerah dijalankan dengan aktivitas pendampingan dan koordinasi intensif dengan perangkat daerah dalam penyusunan laporan keuangan dan penataan aset. Pelaksanaan audit keuangan juga telah menyasar pemerintah desa. Auditor melakukan pendampingan penyusunan neraca desa. Implementasi

sistem tersebut kemudian menopang pencapaian kinerja tindak lanjut hasil pemeriksaan. Kabupaten Seram Bagian Barat juga telah memperkuat upaya penerapan integritas bagi aparatur pemerintah, terutama dalam pelaporan harta kekayaan.

Upaya memperkuat integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan ditopang dengan pencegahan gratifikasi dengan menjalankan Unit Pengendali Gratifikasi (UPG). Tim saber pungli juga telah berjalan dengan koordinasi dan dukungan berbagai pemangku kepentingan terkait

Disamping itu Monitoring Centre for Prevention (MCP) merupakan aplikasi atau dashboard yang dikembangkan oleh KPK untuk melakukan monitoring capaian kinerja program pencegahan korupsi melalui perbaikan tata kelola pemerintahan yang dilaksanakan pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Meliputi delapan area intervensi yakni pengelolaan APBD, pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), manajemen ASN, optimalisasi pajak daerah, pengelolaan aset, serta dana desa.

Survey Penilaian Integritas (SPI) adalah survei untuk mengukur tingkat atau risiko korupsi di suatu K/L/PD. SPI digunakan sebagai indikator pencegahan korupsi oleh Bappenas dalam RPJMN 2020 – 2024, dengan target tahun 2021 sebesar 70. SPI juga menjadi Indikator KemenPANRB untuk menilai dalam PMPRB pada suatu institusi dengan bobot 16%. Diharapkan baik MCP maupun SPI, dapat digunakan sebagai basis perbaikan titik-titik rawan korupsi pada pelaksanaan tata kelola pemerintahan di kementerian, lembaga, maupun pada pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat.

7. Kewilayahan

Unsur kewilayahan dijalankan oleh kecamatan yang memiliki tugas berupa koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan. Salah satu kinerja outcome kecamatan direpresentasikan oleh capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). IKM mengukur kualitas pelayanan publik atau penerapan standar pelayanan publik. IKM sekaligus representasi akuntabilitas sosial instansi pemerintah kepada masyarakat. Sebelas kecamatan di Seram Bagian Barat telah mengukur IKM namun belum mengalami peningkatan yang signifikan, adapun yang masih menjadi kendala terkait implementasi fungsi kecamatan, yakni dalam asistensi pembangunan desa, terutama permasalahan terkait fungsi kecamatan yang perlu menjadi perhatian. ini diharapkan menjadi representasi nyata dari perbaikan kualitas pelayanan publik yang dijalankan oleh kecamatan. Hal lain yang masih menjadi kendala adalah belum optimalnya kualitas

pelayanan publik kecamatan, belum optimalnya kapasitas ASN tingkat Kecamatan dan Desa, serta masih perlunya fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa.

Adanya pelimpahan kewenangan tetap disertai evaluasi pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dari Sekretariat Daerah. Fungsi lain yang dijalankan oleh kecamatan adalah pemberdayaan masyarakat dan pendampingan pembangunan desa. Fungsi pemberdayaan dijalankan melalui penyelenggaraan pelatihan kepada lembaga desa, misalnya PKK, Linmas, dan Karang Taruna. Sedangkan dalam rangka mendorong pembangunan desa, Kecamatan menjalankan fungsi asistensi ke desa dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran desa, sekaligus melaksanakan evaluasi atas RPJMDesa, RKPDesa dan APBDesa. Kendala yang masih dihadapi dalam proses pembangunan desa adalah belum optimalnya ketersediaan database desa di kecamatan yang mutakhir.

2.4. Aspek Daya Saing Daerah

Aspek daya saing merupakan aspek penting untuk mengukur kemampuan daerah dalam menghasilkan pendapatan dan kesempatan kerja yang tinggi dengan tetap terbuka terhadap persaingan domestic maupun internasional. Aspek daya saing dapat dilihat dari fokus kemampuan ekonomi daerah dan fokus fasilitas wilayah/infrastruktur.

2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Analisis terkait fokus kemampuan ekonomi daerah dilakukan dengan melihat beberapa indikator yaitu Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga dan Nilai Tukar Petani (NTP). Berikut ini merupakan deskripsi singkat mengenai indikator-indikator tersebut

2.4.1.1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga

Rumah tangga merupakan konsumen atau pemakai barang dan jasa sekaligus juga pemilik faktor-faktor produksi tenaga kerja, lahan, modal dan kewirausahaan. Rumah tangga menjual atau mengelola faktor-faktor produksi tersebut untuk memperoleh balas jasa. Balas jasa atau imbalan tersebut adalah upah, sewa, bunga dividen, dan laba yang merupakan komponen penerimaan atau pendapatan rumah tangga.

Penerimaan lain yang mungkin diperoleh rumah tangga adalah transfer (pemberian cuma-cuma), perkiraan pendapatan (imputasi) dari rumah milik rumah tangga tersebut yang ditempati sendiri atau ditempati pihak lain dengan bebas sewa, dan hasil produksi barang/jasa dari kegiatan yang tidak digolongkan sebagai kegiatan usaha rumah tangga. Transfer yang

diterima berasal dari pemerintah, badan usaha, lembaga nirlaba, rumah tangga lain, maupun dari luar negeri.

Tabel 2.58. Rata-rata Pengeluaran Per Kapita Sebulan menurut Kelompok Komoditas dan Kelompok Pengeluaran (Rupiah) Tahun 2021

No	Kelompok Komoditas	Rata-Rata Pengeluaran
1	Padi-padian	72.212
2	Umbi-umbian	27.518
3	Ikan/udang/cumi/kerang	62.079
4.	Daging	9.745
5.	Telur dan susu	19.912
6.	Sayur-sayuran	47.854
7.	Kacang-kacangan	3.729
8.	Buah-buahan	14.523
9.	Minyak dan kelapa	17.062
10.	Bahan minuman	20.683
11.	Bumbu-bumbuan	12.774
12.	Konsumsi lainnya	6.435
13.	Makanan dan minuman jadi	83.195
14.	Rokok dan tembakau	47.795
Jumlah Makanan		445.513
15.	Perumahan dan fasilitas rumah tangga	255.135
16.	Aneka barang dan jasa	83.988
17.	Pakaian, alas kaki, dan tutup kepala	23.709
18.	Barang tahan lama	19.909
19.	Pajak, pungutan dan asuransi	28.609
20.	Keperluan pesta dan upacara/kenduri	4.754
Jumlah Bukan makanan		416.103
Rata – rata Pengeluaran		861.616

Sumber : BPS Kabupaten Seram Bagian Barat, 2022

Pengeluaran rata-rata per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama seminggu/sebulan/setahun baik yang berasal dari pembelian, pemberian maupun produksi sendiri dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga dalam rumah tangga tersebut. Konsumsi rumah tangga dibedakan atas konsumsi makanan maupun bukan makanan tanpa memperhatikan asal barang dan terbatas

pada pengeluaran untuk kebutuhan rumah tangga saja, tidak termasuk konsumsi/pengeluaran untuk keperluan usaha atau yang diberikan kepada pihak lain.

2.4.1.2. Nilai Tukar Petani

Penghitungan NTP ini diperoleh dari perbandingan antara Indeks Harga yang Diterima Petani (It) dengan Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib) yang dinyatakan dalam persentase. NTP juga menunjukkan daya tukar (term of trade) antara produk pertanian yang dijual petani dengan produk yang dibutuhkan petani dalam memproduksi dan konsumsi rumah tangga. Dengan membandingkan kedua perkembangan angka tersebut, maka dapat diketahui apakah peningkatan pengeluaran untuk kebutuhan petani dapat dikompensasi dengan penambahan pendapatan petani dari hasil pertaniannya. Atau sebaliknya, apakah kenaikan harga jual produksi pertanian dapat menambah pendapatan petani yang pada gilirannya meningkatkan kesejahteraan para petani. Semakin tinggi nilai NTP, relatif semakin sejahtera tingkat kehidupan petani.

Nilai Tukar Petani di Kabupaten Seram Bagian Barat pada tahun 2021 sebesar 101,53, dan perkembangan dari tahun ke tahun cenderung mengalami peningkatan. Pada Tahun 2018 sebesar 101,23, meningkat pada Tahun 2019 sebesar 101,34 dan pada Tahun 2020 menjadi 101,44. Hal ini berarti bahwa usaha pertanian di Kabupaten Seram Bagian Barat dapat memberikan tambahan pendapatan bagi petani.

2.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Aspek daya saing daerah pada fokus fasilitas wilayah/infrastruktur diarahkan untuk meninjau indikator-indikator yang menunjukkan kondisi fasilitas maupun infrastruktur yang tersedia di suatu daerah. Ketersediaan fasilitas dan infrastruktur daerah sangat diperlukan untuk mendukung kelancaran mobilitas orang serta barang dan jasa guna mendorong kegiatan perekonomian.

2.4.2.1. Perhubungan

Keberhasilan pembangunan pada urusan perhubungan salah satunya dapat dilihat dari sejauh mana pemerintah dapat menekan angka kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas dapat disebabkan oleh banyak factor seperti kurangnya perlengkapan dan keamanan jalan, kepatuhan pengemudi, dan kondisi kendaraan yang digunakan. Kejadian kecelakaan yang fatal bahkan dapat mengakibatkan kematian.

2.4.2.2. Sarana Perekonomian

Infrastruktur kewilayahan lain yang menjadi fokus pembangunan adalah terkait sarana perekonomian. Infrastruktur penunjang perekonomian perlu menjadi perhatian guna dapat mendukung pariwisata di Kabupaten Seram Bagian Barat. Beberapa sarana perekonomian yang dapat mendukung pariwisata di Kabupaten Seram Bagian Barat adalah hotel dan restoran. Berikut adalah jumlah hotel dan restoran yang ada di Kabupaten Seram Bagian Barat. Jumlah hotel yang ada di Kabupaten Seram Bagian Barat ada berjumlah 2 (dua) buah pada tahun 2021, serta jumlah restoran atau rumah makan sebanyak 159 buah.

Seiring dengan bertumbuhnya jumlah restoran di Kabupaten Seram Bagian Barat, fasilitas penginapan di Kabupaten Seram Bagian Barat juga turut meningkat. Peningkatan jumlah sarana perekonomian tersebut sangat berdampak positif terhadap upaya peningkatan pariwisata di Kabupaten Seram Bagian Barat.

Mengikuti perkembangan zaman, jumlah sarana perdagangan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Pada tahun 2021 tercatat jumlah sarana perdagangan di Kabupaten Seram Bagian Barat sebanyak 1.496 sarana, yang terdiri dari : pasar 25 unit, took sebanyak 233 unit dan kios sebanyak 1.238 unit. Sarana – sarana perdagangan ini sangat mendukung peningkatan perekonomian di Kabupaten Seram Bagian Barat.

2.4.2.3. Jaringan Listrik

Fokus pengembangan infrastruktur kewilayahan yang lain adalah terkait jaringan kelistrikan. Kebijakan tersebut diupayakan agar setiap desa memiliki sumber kelistrikan yang dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan yang lainnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa desa yang masih belum teraliri listrik seperti desa yang berada di pegunungan. Beberapa kendala yang dihadapi dalam pemenuhan kebutuhan listrik di desa-desa adalah terkait lokasi geografis beberapa desa yang sulit dijangkau atau terhalang kawasan hutan lindung. Upaya lain yang dapat dilakukan guna memenuhi kebutuhan listrik di desa-desa adalah dengan membangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS).

BAB III

GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Bab ini menganalisis kondisi keuangan Pemerintah Daerah. Analisis ini bertujuan memberikan gambaran pengelolaan keuangan daerah periode sebelumnya dan menyusun kerangka pendanaan untuk satu periode ke depan. Hasil analisis tersebut digunakan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah dalam rangka mendanai pembangunan Daerah. Data dan informasi yang digunakan dalam bab ini, yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan neraca daerah dengan durasi waktu minimal 5 tahun sebelumnya. Sebelum menganalisis APBD periode sebelumnya, terlebih dahulu akan dilakukan analisis terhadap kondisi perekonomian nasional dan daerah sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan proyeksi APBD ke depan.

3.1. Kondisi Perekonomian Nasional

Pertumbuhan ekonomi nasional sepanjang tahun 2020 mengalami kontraksi minus 2,07 persen. Kondisi ini disebabkan oleh Pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia bahkan hampir seluruh negara di dunia. Berbagai kebijakan untuk menangani Pandemi Covid-19 telah dikeluarkan oleh pemerintah pusat melalui stimulus fiskal sebagai instrument untuk mengendalikan dan menangani permasalahan tersebut maupun kebijakan penanganan Covid-19, seperti Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di wilayah Jawa dan Bali.

Kebijakan atau program yang telah dikeluarkan tersebut diharapkan dapat membantu memulihkan kondisi nasional sehingga kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat dapat berjalan normal kembali. Kebijakan berupa insentif pajak maupun kebijakan belanja negara dan pembiayaan untuk pemulihan kondisi perekonomian diharapkan mampu mendorong berbagai kegiatan sektoral sehingga dapat berjalan seperti sediakala. Selain itu, program untuk menjamin daya beli masyarakat perlu diteruskan, begitu juga dengan dukungan terhadap sector swasta.

Dengan demikian, kerjasama dan dukungan dari berbagai pihak, baik pemerintah, swasta dan masyarakat merupakan solusi yang terbaik bagi pemulihan kondisi negara dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3.2. Kondisi Perekonomian Daerah

Secara nasional kondisi pandemik Covid-19 menjadi faktor utama memburuknya kondisi perekonomian negara. Hal yang sama juga terjadi di tingkat daerah. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Maluku juga mengalami kontraksi minus 3,42 persen sepanjang tahun 2020. Kondisi ini selain disebabkan oleh Pandemi Covid-19 juga kebijakan-kebijakan pemerintah pusat terkait pembatasan aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat.

Kabupaten Seram Bagian Barat yang notabene merupakan salah satu kabupaten di Maluku juga tidak terlepas dari permasalahan Covid-19. Meskipun kondisi perekonomian daerah mengalami kontraksi, namun masih lebih baik dibandingkan dengan kondisi perekonomian nasional maupun provinsi, yaitu hanya terkontraksi minus 0,17 persen. Dilihat menurut lapangan usaha, PDRB Kabupaten Seram Bagian Barat tahun 2020 masih didominasi oleh kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, yaitu sebesar 35,68 persen, kemudian diikuti oleh kategori Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib, yaitu sebesar 21,37 persen. Hal tersebut mengartikan bahwa Kabupaten Seram Bagian Barat masih sangat bergantung pada kegiatan usaha yang sangat mengandalkan alam dan program pemerintah.

Kondisi tersebut kemudian menimbulkan berbagai permasalahan sosial, seperti kemiskinan dan pengangguran. Pada tahun 2020, persentase penduduk miskin mengalami peningkatan menjadi sebesar 43,15 persen dari tahun sebelumnya hanya 43,14 persen. Sementara tingkat pengangguran pada tahun 2020 mengalami kenaikan 5,47 persen dibandingkan tahun 2019 sebesar 5,40 persen. Hal inilah yang kemudian berpengaruh terhadap kondisi perekonomian daerah di Kabupaten Seram Bagian Barat.

3.3. Kinerja Keuangan Masa Lalu

Analisis terhadap kinerja keuangan masa lalu Kabupaten Seram Bagian Barat penting untuk dilakukan karena bertujuan untuk melihat capaian-capaian yang telah dilakukan oleh Kabupaten Seram Bagian Barat. Capaian tersebut dapat membantu dalam menentukan kebijakan pengelolaan keuangan daerah untuk satu periode ke depan. Berikut ini adalah hasil analisis kinerja keuangan masa lalu Kabupaten Seram Bagian Barat.

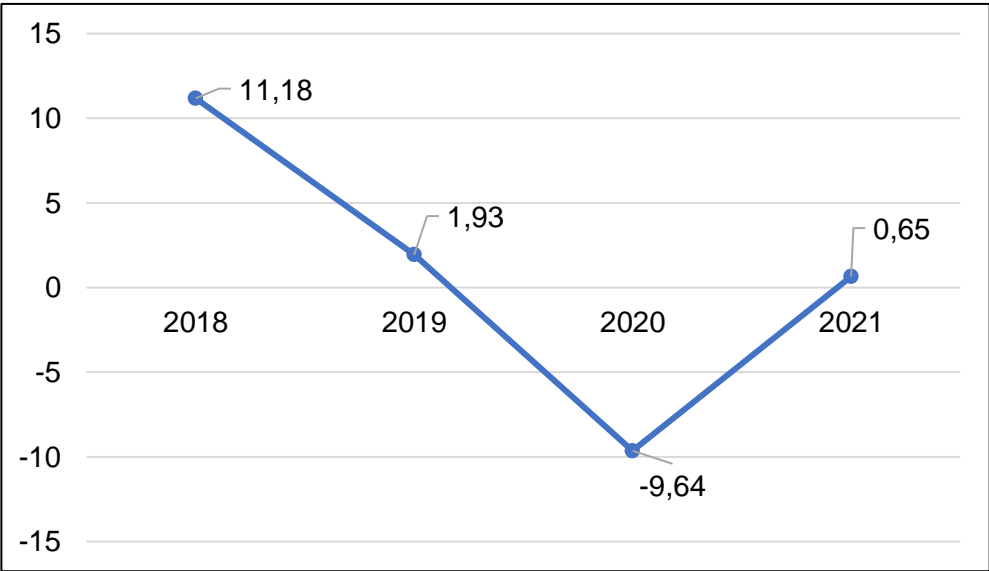
3.3.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

Sub bab ini menganalisis kinerja pelaksanaan APBD periode sebelumnya berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat tahun 2017-2021. Analisis dilakukan sesuai struktur APBD yang meliputi pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Hasil analisis ini kemudian digunakan untuk memproyeksi pertumbuhan APBD periode yang akan datang. Berikut ini adalah uraian analisis kinerja pelaksanaan APBD Kabupaten Seram Bagian Barat.

3.3.1.1. Pendapatan Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Komponen pendapatan daerah meliputi PAD, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Berikut ini adalah persentase pertumbuhan pendapatan daerah Kabupaten Kabupaten Seram Bagian Barat tahun 2018-2021.

Gambar 3.1. Persentase Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2018-2021



Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2017-2021

Dari tahun 2017 hingga 2021, pertumbuhan pendapatan daerah Kabupaten Seram Bagian Barat mengalami perkembangan fluktuatif. Pada tahun 2018, pendapatan daerah mengalami pertumbuhan sebesar 11,18 persen dari tahun sebelumnya. Namun, pada tahun 2020 pendapatan daerah mengalami penurunan yang sangat signifikan, yaitu sebesar -9,64 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan pendapatan daerah belum berjalan optimal. Persoalan ini terjadi disebabkan oleh adanya penurunan kontribusi komponen pendapatan daerah, yaitu pendapatan transfer pemerintah pusat, retribusi daerah dan pajak daerah.

Analisis kinerja pendapatan daerah juga dapat dilihat dari kontribusi masing-masing komponen pendapatan daerah terhadap pendapatan daerah. Kontribusi masing-masing komponen pendapatan daerah ini menunjukkan seberapa besar pengaruh masing-masing komponen pendapatan daerah terhadap total pendapatan daerah. Berikut ini adalah uraian kontribusi masing-masing komponen pendapatan daerah terhadap pendapatan daerah di Kabupaten Seram Bagian Barat.

Tabel 3. 1. Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2017-2021

NO	URAIAN	REALISASI PENDAPATAN					RATA-RATA PERTUMBUHAN
		2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	PENDAPATAN	941.306.675.349,02	1.046.586.713.375,18	1.066.745.880.649,36	963.960.442.197,30	970.195.216.207,80	1,03
1 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	18.864.607.656,54	23.246.718.525,24	28.635.819.084,80	29.295.721.702,30	38.075.664.325,80	19,67
1 . 1 . 1	Pendapatan Pajak Daerah	3.034.040.605,00	6.409.438.637,37	7.817.833.381,00	5.667.069.464,31	7.651.525.338,30	35,18
1 . 1 . 2	Pendapatan Retribusi Daerah	508.316.475,00	1.103.076.369,00	2.108.589.800,00	1.416.674.430,00	2.011.372.731,00	54,33
1 . 1 . 3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	2.935.198.155,00	3.107.298.510,47	1,47
1 . 1 . 4	Lain-lain Pendapatan Asli	15.322.250.576,54	15.734.203.518,87	18.709.395.903,80	19.276.779.652,99	25.305.467.746,03	13,98

NO	URAIAN	REALISASI PENDAPATAN					RATA-RATA PERTUMBUHAN
		2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Daerah yang Sah						
1 . 2	PENDAPATAN TRANSFER	922.437.749.220,48	1.023.331.388.849,94	909.934.318.761,00	799.963.722.950,00	932.029.551.882,00	1,07
1 . 2 . 1	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	831.199.000.997,00	889.664.845.728,00	892.581.464.014,00	782.259.015.096,00	806.597.399.833,00	(0,47)
1 . 2 . 1 . 1	Dana Bagi Hasil Pajak	6.803.406.788,00	8.195.252.573,00	6.107.697.000,00	6.656.402.228,00	12.766.085.865,00	23,94
1 . 2 . 1 . 2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	3.046.299.794,00	2.901.981.445,00	4.072.905.200,00	3.435.883.173,00	0,00	(20,01)
1 . 2 . 1 . 3	Dana Alokasi Umum	589.772.789.000,00	597.525.057.000,00	622.135.262.000,00	593.026.095.000,00	560.441.696.000,00	(1,19)

NO	URAIAN	REALISASI PENDAPATAN					RATA-RATA PERTUM- BUHAN
		2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8
1 . 2 . 1 . 4	Dana Alokasi Khusus	231.576.505.415,00	281.042.554.710,00	260.265.599.814,00	179.140.634.695,00	233.389.617.968,00	3,27
1 . 2 . 2	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	76.287.947.000,00	119.058.683.000,00	0,00	0,00	106.741.352.742,00	(10,98)
1 . 2 . 2 . 1	Dana Otonomi Khusus	76.287.947.000,00	86.318.043.000,00	0,00	0,00	0,00	(21,71)
2 . 2 . 2 . 2	Dana Penyesuaian	0,00	32.740.640.000,00	0,00	0,00	106.741.352.742,00	(25,00)
1 . 2 . 3	Transfer Pemerintah Provinsi	14.950.801.223,48	14.607.860.121,94	17.352.854.747,00	17.704.707.854,00	18.690.799.307,00	6,02

NO	URAIAN	REALISASI PENDAPATAN					RATA-RATA PERTUMBUHAN
		2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8
1 . 2 . 3 . 1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	14.950.801.223,48	14.607.860.121,94	17.352.854.747,00	17.704.707.854,00	18.690.799.307,00	6,02
1 . 3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	4.318.472,00	8.606.000,00	128.175.742.803,56	134.700.997.545,00	90.000.000,00	372.320,24
1 . 3 . 1	Pendapatan Hibah	0,00	0,00	24.000.040.000,00	26.482.600.000,00	90.000.000,00	(22,33)
1 . 3 . 3	Pendapatan Lainnya	4.318.472,00	8.606.000,00	104.175.702.803,56	108.218.397.545,00	0,00	302.601,00

Secara umum, rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah Kabupaten Seram Bagian Barat sebesar 1,03 persen. Komponen pendapatan daerah yang pertumbuhannya paling tinggi, yaitu berasal dari lain-lain pendapatan daerah yang sah, diikuti PAD dan pendapatan transfer. Meskipun rata-rata pertumbuhan pendapatan transfer sangat rendah, namun memiliki kontribusi terhadap pendapatan daerah paling besar, yaitu dengan besaran proporsi rata-rata selama 5 tahun terakhir sebesar 92,03 persen, diikuti oleh PAD sebesar 2,77 persen, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 5,20 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pendapatan transfer terutama transfer dari pusat masih menjadi komponen utama dalam penyusunan pendapatan daerah Kabupaten Seram Bagian Barat. Ketergantungan terhadap pendapatan transfer tersebut berasal dari dana perimbangan. Proporsi masing-masing komponen pendapatan daerah dapat digambarkan melalui tabel 3.2.

Tabel 3.2 Proporsi Pendapatan Daerah Di Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2017 – 2021 (Dalam persen)

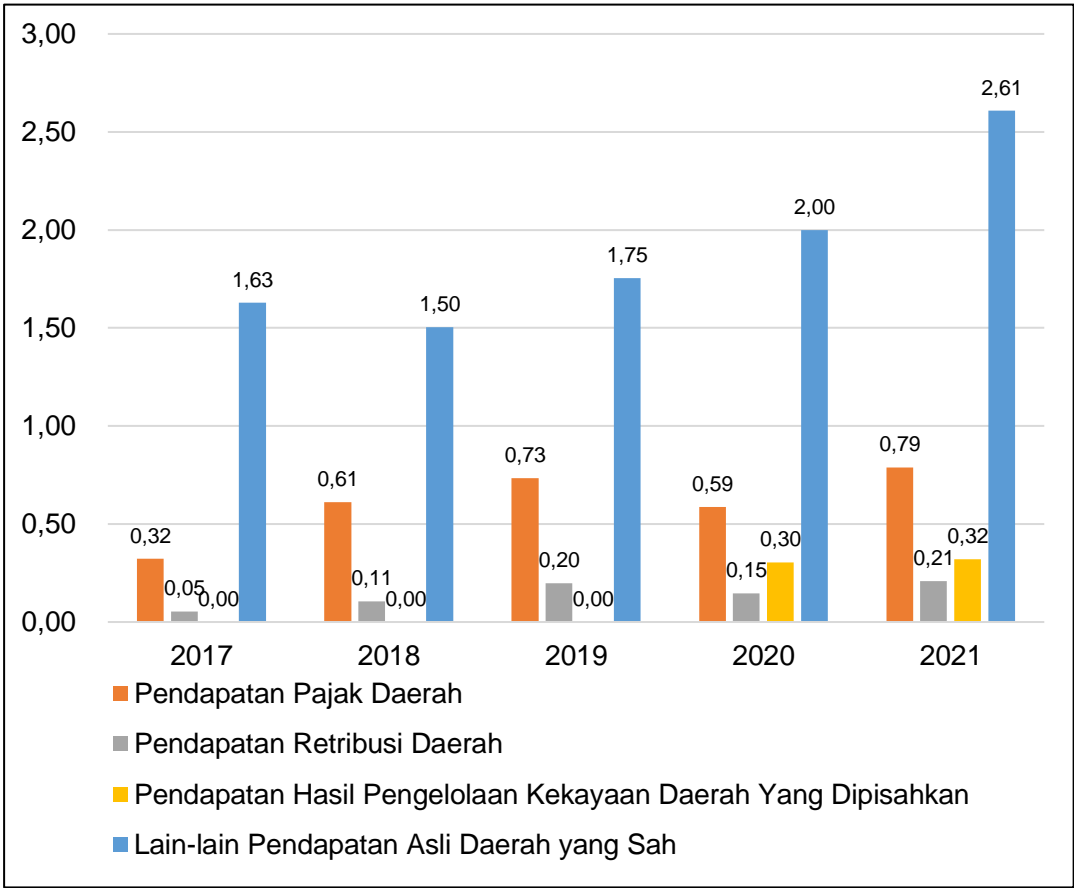
NO	URAIAN	2017	2018	2019	2020	2021	RATA - RATA KONTRIBUSI
1	2	3	4	5	6	7	8
1	PENDAPATAN	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	2,00	2,22	2,68	3,04	3,92	2,77
1 . 1 . 1	Pendapatan Pajak Daerah	0,32	0,61	0,73	0,59	0,79	0,61
1 . 1 . 2	Pendapatan Retribusi Daerah	0,05	0,11	0,20	0,15	0,21	0,14
1 . 1 . 3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,30	0,32	0,12
1 . 1 . 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	1,63	1,50	1,75	2,00	2,61	1,90
1 . 2	PENDAPATAN TRANSFER	98,00	97,78	85,30	82,99	96,07	92,03
1 . 2 . 1	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	88,30	85,01	83,67	81,15	83,14	84,25
1 . 2 . 1 . 1	Dana Bagi Hasil Pajak	0,72	0,78	0,57	0,69	1,32	0,82
1 . 2 . 1 . 2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	0,32	0,28	0,38	0,36	0,00	0,27

NO	URAIAN	2017	2018	2019	2020	2021	RATA - RATA KONTRIBUSI
1	2	3	4	5	6	7	8
1 . 2 . 1 . 3	Dana Alokasi Umum	62,65	57,09	58,32	61,52	57,77	59,47
1 . 2 . 1 . 4	Dana Alokasi Khusus	24,60	26,85	24,40	18,58	24,06	23,70
1 . 2 . 2	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	8,10	11,38	0,00	0,00	11,00	6,10
1 . 2 . 2 . 1	Dana Otonomi Khusus	8,10	8,25	0,00	0,00	0,00	3,27
2 . 2 . 2 . 2	Dana Penyesuaian	0	3,13	0,00	0,00	11,00	2,83
1 . 2 . 3	Transfer Pemerintah Provinsi	1,59	1,40	1,63	1,84	1,93	1,67
1 . 2 . 3 . 1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	1,59	1,40	1,63	1,84	1,93	1,67
1 . 3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	0,00	0,00	12,02	13,97	0,01	5,20
1 . 3 . 1	Pendapatan Hibah	0,00	0,00	2,25	2,75	0,01	1,00
1 . 3 . 3	Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	9,77	11,23	0,00	4,20

3.3.1.1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Dari ketiga komponen pembentuk pendapatan daerah, PAD memiliki rata- rata pertumbuhan sudah baik. Pertumbuhan PAD ini tentu saja didukung oleh kontribusi dari masing-masing komponen dalam PAD itu sendiri. Berikut ini adalah tabel persentase kontribusi komponen PAD terhadap total PAD Kabupaten Seram Bagian Barat.

Gambar 3. 2. Persentase Kontribusi Komponen Pendapatan Asli Daerah Terhadap Total Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2017-2021



Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2017-2021

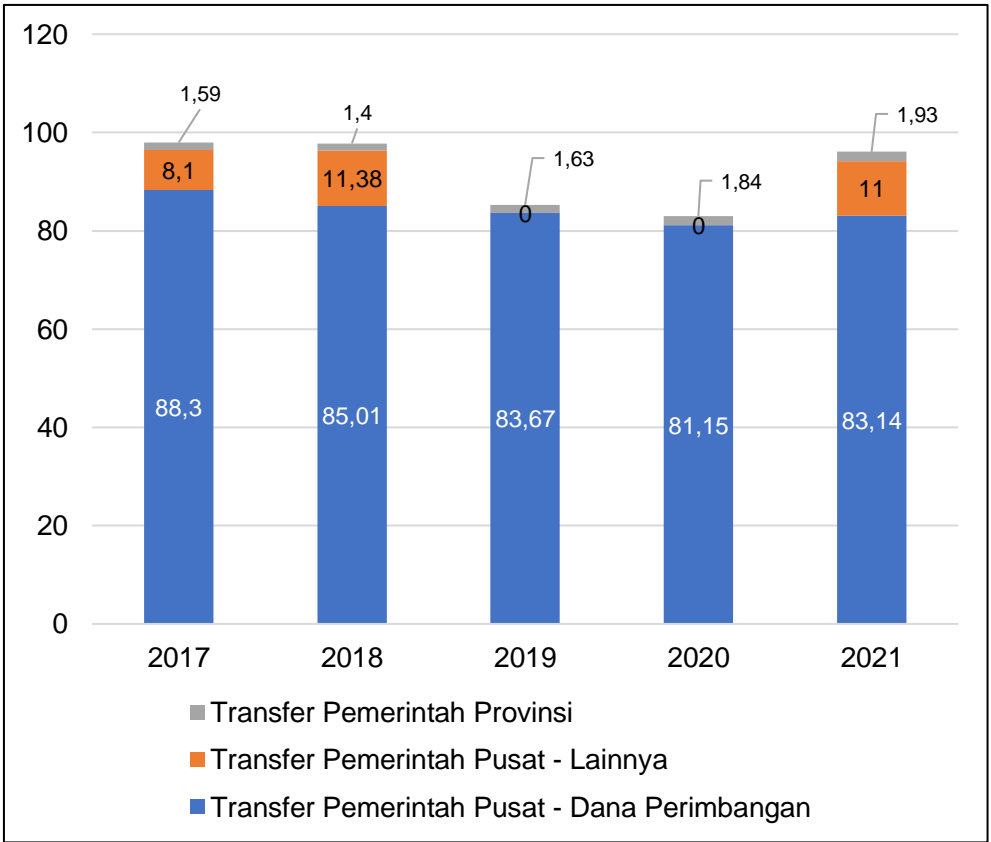
Rata-rata kontribusi komponen PAD terhadap total PAD paling tinggi berasal dari lain-lain PAD yang sah, diikuti oleh pajak daerah, retribusi daerah, dan kemudian pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Hal lain yang penting untuk diperhatikan dari kontribusi masing-masing komponen PAD

adalah tingkat pertumbuhan seluruh komponen tersebut masih berjalan fluktuatif. Kondisi ini terjadi karena masih belum optimalnya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber PAD dan masih lemahnya data terkait sumber-sumber PAD, seperti pajak dan retribusi. Hal ini perlu diantisipasi karena bisa berdampak pada penurunan PAD yang selanjutnya berpengaruh pada pendapatan daerah itu sendiri.

3.3.1.1.2. Pendapatan Transfer

Kontribusi pendapatan transfer masih menjadi komponen utama dalam pendapatan daerah Kabupaten Seram Bagian Barat. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh pendapatan transfer terhadap kapasitas keuangan daerah masih signifikan. Berikut ini adalah gambaran kontribusi masing-masing komponen pendapatan transfer Kabupaten Seram Bagian Barat.

Gambar 3. 3. Persentase Kontribusi Pendapatan Transfer Terhadap Total Pendapatan Transfer Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2017-2020



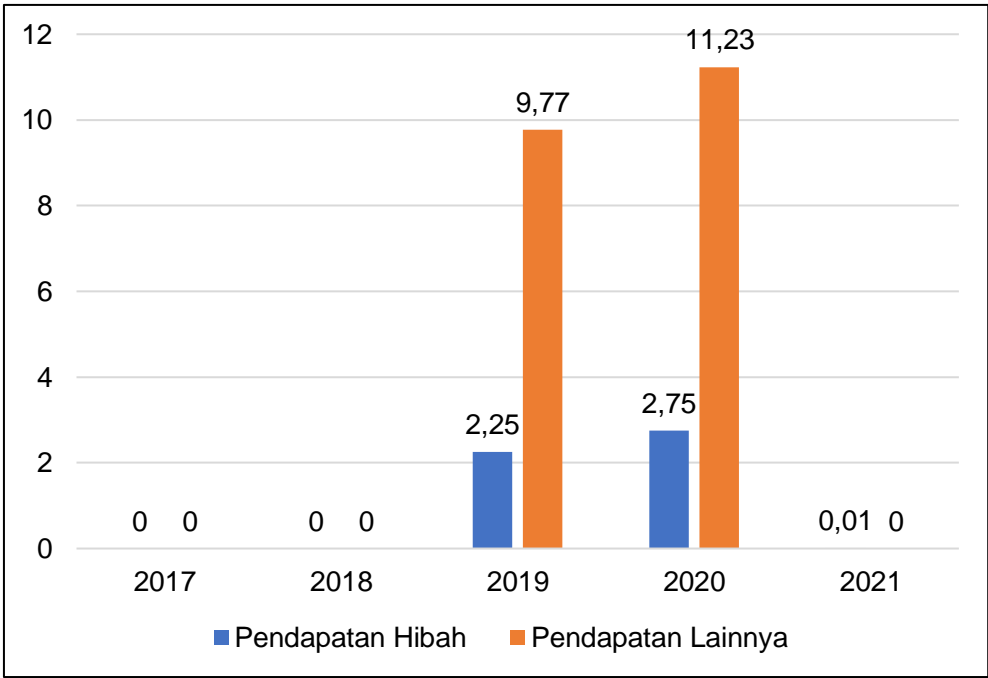
Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2017-2021

Persentase kontribusi komponen pendapatan transfer masih didominasi oleh ransfer pemerintah pusat yang berasal dari dana perimbangan, seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan sebagainya. Rata-rata pertumbuhan seluruh komponen pendapatan transfer mengalami *trend* fluktuatif dan cenderung menurun pada tahun 2019 dan 2020, seperti dana perimbangan, bagi hasil, dan lain-lain.

3.3.1.1.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Rata-rata pertumbuhan lain-lain pendapatan daerah yang sah sudah baik di Kabupaten Seram Bagian Barat. Pertumbuhan ini terjadi karena adanya kontribusi dari masing-masing komponen dalam lain-lain pendapatan daerah yang sah. Berikut ini adalah tabel persentase kontribusi komponen lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Gambar 3.4. Persentase Kontribusi Komponen Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Terhadap Total Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2017-2021



Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2017-2021

Persentase kontribusi lain – lain pendapatan daerah yang

sah terjadi fluktuatif. Kontribusi lain – lain pendapatan daerah yang sah terwujud signifikan pada tahun 2019 – 2020. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi komponen lain-lain pendapatan daerah yang sah belum optimal karena belum seluruh komponen memiliki kontribusi terhadap lain-lain pendapatan daerah yang sah.

3.3.1.2. Belanja Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah merupakan semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Berikut ini adalah tabel gambaran pertumbuhan belanja daerah Kabupaten Seram Bagian Barat tahun 2017-2021.

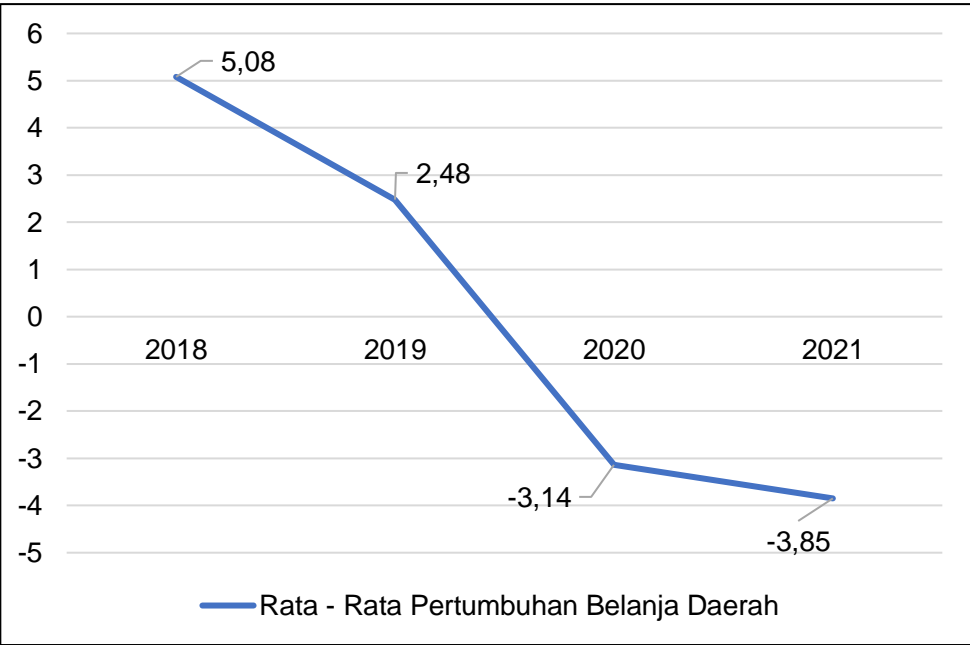
Tabel 3. 3. Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2017-2021

No	Uraian	Realisasi Belanja					Rata-Rata Pertumbuhan
		2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8
2	BELANJA	956.959.343.085,29	1.005.582.921.299,00	1.030.558.109.143,31	998.232.897.313,40	959.824.657.576,97	0,15
2 . 1	BELANJA OPERASI	724.522.012.255,29	724.977.144.797,00	801.592.371.374,57	796.921.770.561,00	780.013.761.024,97	1,98
2 . 1 . 1	Belanja Pegawai	346.015.405.236,00	361.990.611.116,00	386.360.301.044,00	363.918.390.185,00	370.870.153.377,00	1,86
2 . 1 . 2	Belanja Barang	206.653.596.046,00	204.683.138.014,00	233.872.787.867,57	253.074.145.397,00	234.919.537.174,97	3,59
2 . 1 . 5	Belanja Hibah	34.612.793.031,29	7.984.494.050,00	11.090.499.850,00	8.516.382.800,00	8.104.744.506,00	(16,52)
2 . 1 . 6	Belanja Bantuan Sosial	740.000.000,00	2.723.441.128,00	4.892.500.000,00	3.645.000.000,00	2.940.413.750,00	75,71
2 . 1 . 7	Belanja Bantuan Keuangan	136.500.217.942,00	147.595.460.489,00	165.376.282.613,00	167.767.852.179,00	163.178.912.217,00	4,72
2 . 2	BELANJA MODAL	230.412.989.830,00	277.981.699.502,00	222.457.749.468,74	156.851.926.563,40	178.948.308.552,00	(3,68)

No	Uraian	Realisasi Belanja					Rata-Rata Pertumbuhan
		2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8
2 . 2 . 1	Belanja Tanah	467.960.000,00	43.700.000,00	1.425.900.000,00	1.112.255.852,00	1.190.000.000,00	764,32
2 . 2 . 2	Belanja Peralatan dan Mesin	44.986.962.988,00	22.386.957.539,00	37.689.594.226,74	40.328.868.813,40	22.846.815.747,00	(4,56)
2 . 2 . 3	Belanja Bangunan dan Gedung	77.381.904.670,00	98.259.493.484,00	93.241.719.928,00	68.526.153.896,00	62.752.619.287,00	(3,26)
2 . 2 . 4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	102.400.784.422,00	151.580.714.650,00	84.441.210.190,00	44.570.424.939,00	91.828.873.518,00	15,64
2 . 2 . 5	Belanja Aset Tetap Lainnya	5.175.377.750,00	5.710.833.829,00	5.659.325.124,00	2.314.223.063,00	0,00	(37,42)
3 . 2 . 6	Belanja Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000.000,00	0,00
2 . 3	BELANJA TAK TERDUGA	2.024.341.000,00	2.624.077.000,00	6.507.988.300,00	44.459.200.189,00	862.588.000,00	165,68
2 . 3 . 1	Belanja Tak Terduga	2.024.341.000,00	2.624.077.000,00	6.507.988.300,00	44.459.200.189,00	862.588.000,00	165,68

Dari tahun 2017 hingga 2027, rata-rata pertumbuhan belanja daerah Kabupaten Seram Bagian Barat sebesar 0,15 persen. Hal ini terjadi disebabkan oleh penurunan belanja daerah pada tahun 2020-2021. Penurunan belanja ini terjadi akibat dampak pandemic Covid-19 yang mengharuskan pemerintah daerah untuk melakukan *refocusing* dan realokasi belanja daerah, yaitu yang berasal dari belanja Barang dan Jasa dan belanja modal. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Gambar 3. 5. Persentase Pertumbuhan Belanja Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2018-2021



Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2017-2021

Dari tahun 2017 hingga 2021, persentase pertumbuhan belanja di Kabupaten Seram Bagian Barat cenderung menurun. Pertumbuhan belanja daerah paling rendah berada pada tahun 2021, yaitu sebesar -3,85 persen atau dengan kata lain terjadi penurunan sebesar 8,93 persen. Proporsi masing – masing komponen Belanja daerah dapat digambarkan mel lui tabel 3.4.

Tabel 3.4 Proporsi Belanja Daerah Di Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2017 – 2021 (Dalam persen)

NO	URAIAN	2017	2018	2019	2020	2021	RATA - RATA KONTRIBUSI
1	2	3	4	5	6	7	8
2	BELANJA	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2 . 1	BELANJA OPERASI	75,71	72,10	77,78	79,83	81,27	77,34
2 . 1 . 1	Belanja Pegawai	36,16	36,00	37,49	36,46	38,64	36,95
2 . 1 . 2	Belanja Barang	21,59	20,35	22,69	25,35	24,48	22,89
2 . 1 . 5	Belanja Hibah	3,62	0,79	1,08	0,85	0,84	1,44
2 . 1 . 6	Belanja Bantuan Sosial	0,08	0,27	0,47	0,37	0,31	0,30
2 . 1 . 7	Belanja Bantuan Keuangan	14,26	14,68	16,05	16,81	17,00	15,76
2 . 2	BELANJA MODAL	24,08	27,64	21,59	15,71	18,64	21,53

NO	URAIAN	2017	2018	2019	2020	2021	RATA - RATA KONTRIBUSI
1	2	3	4	5	6	7	8
2 . 2 . 1	Belanja Tanah	0,05	0,00	0,14	0,11	0,12	0,09
2 . 2 . 2	Belanja Peralatan dan Mesin	4,70	2,23	3,66	4,04	2,38	3,40
2 . 2 . 3	Belanja Bangunan dan Gedung	8,09	9,77	9,05	6,86	6,54	8,06
2 . 2 . 4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	10,70	15,07	8,19	4,46	9,57	9,60
2 . 2 . 5	Belanja Aset Tetap Lainnya	0,54	0,57	0,55	0,23	0,00	0,38
3 . 2 . 6	Belanja Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,01
2 . 3	BELANJA TAK TERDUGA	0,21	0,26	0,63	4,45	0,09	1,13
2 . 3 . 1	Belanja Tak Terduga	0,21	0,26	0,63	4,45	0,09	1,13

3.3.1.3. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Komponen pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Analisis terhadap pembiayaan daerah digunakan untuk mendapatkan gambaran pengaruh kebijakan pembiayaan daerah Kabupaten Seram Bagian Barat pada tahun-tahun sebelumnya terhadap surplus maupun defisit belanja daerah sebagai dasar untuk menentukan kebijakan pembiayaan di masa depan. Adapun hasil analisis pembiayaan daerah Kabupaten Seram Bagian Barat dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

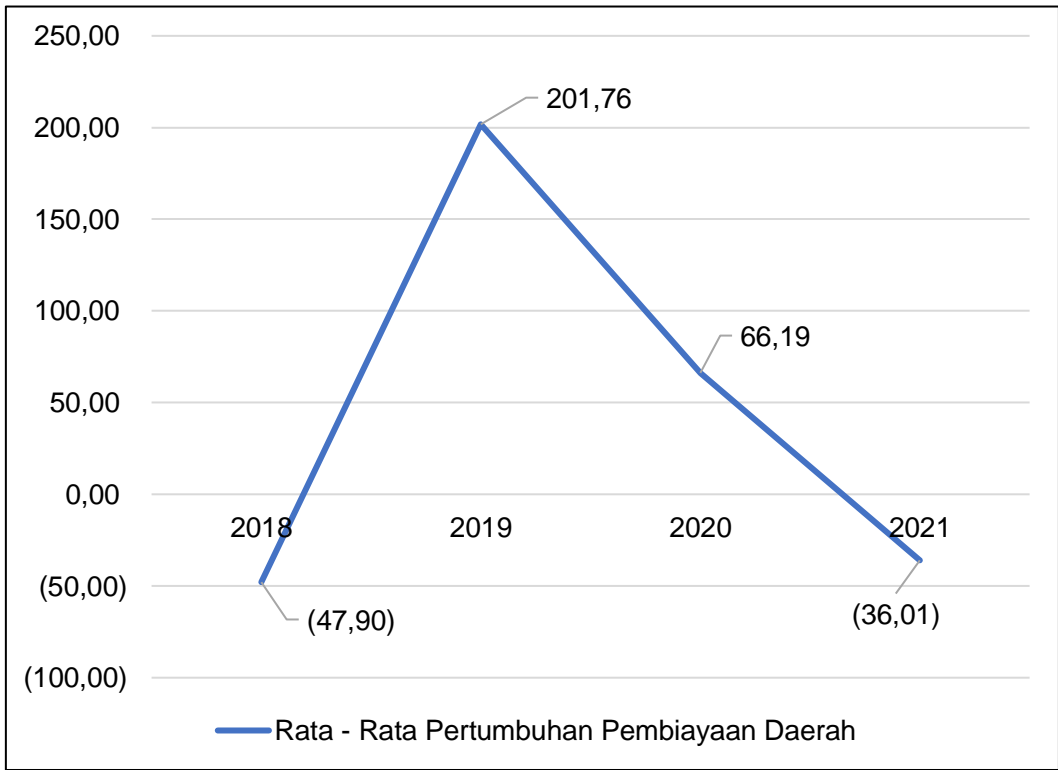
Tabel 3. 5. Rata-Rata Pertumbuhan Pembiayaan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021	Rata-Rata Pertumbuhan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	PENDAPATAN	941.306.675.349,02	1.046.586.713.375,18	1.066.745.880.649,36	963.960.442.197,30	970.195.216.207,80	1,03
2	BELANJA	956.959.343.085,29	1.005.582.921.299,00	1.030.558.109.143,31	998.232.897.313,40	959.824.657.576,97	0,15
	SURPLUS / (DEFISIT)	(15.652.667.736,27)	41.003.792.076,18	36.187.771.506,05	(34.272.455.116,10)	10.370.558.630,83	-174,67
3	PEMBIAYAAN	36.849.411.148,81	19.196.743.412,54	57.927.846.622,92	96.272.572.742,37	61.606.117.326,27	46,01
3 . 1	PENERIMAAN DAERAH	40.849.411.148,81	21.196.743.412,54	59.927.846.622,92	96.272.572.742,37	62.000.117.626,27	39,91
3 . 1 . 1	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	40.849.411.148,81	21.196.743.412,54	59.927.846.622,92	96.272.572.742,37	62.000.117.626,27	39,91
3 . 2	PENGELUARAN DAERAH	4.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	394.000.300,00	-37,5
3 . 2 . 2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	4.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	394.000.300,00	(37,50)

Dari tahun 2017 hingga 2021, rata-rata pertumbuhan pembiayaan daerah mengalami *trend* fluktuatif dan cenderung naik. Pada tahun 2018, rata- rata pertumbuhan pembiayaan daerah mengalami penurunan. Kondisi ini terjadi disebabkan oleh adanya penurunan SiLPA pada tahun 2018.

Trend pertumbuhan penerimaan pembiayaan daerah mengalami kondisi yang sama dengan realisasi pembiayaan daerah, yaitu mengalami tren fluktuatif dan cenderung naik. Kondisi ini dipengaruhi oleh kecenderungan SiLPA yang mengalami peningkatan. Hal sebaliknya terjadi pada pengeluaran pembiayaan, yaitu rata-rata pertumbuhan pengeluaran pembiayaan mengalami penurunan. Penurunan tersebut disebabkan oleh adanya pengeluaran pembiayaan di komponen penyertaan modal (investasi daerah) mengalami penurunan juga. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada grafik berikut ini.

**Gambar 3.6. Persentase Pertumbuhan Pembiayaan Daerah
Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2017-2021**



Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2017-2021

3.3.1.4. Kerangka Pendanaan

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan selama 4 tahun ke depan. Kerangka pendanaan ini dirancang secara efisien untuk mencapai tujuan pembangunan yang efektif, baik dalam konteks kinerja maupun efisiensi anggaran. Struktur APBD yang digunakan dalam sub bab ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sementara itu, teknik yang digunakan dalam memproyeksi APBD Kabupaten Seram Bagian Barat adalah teknik peramalan (*Forecasting*). Teknis peramalan adalah suatu proses memperkirakan secara sistematis tentang apa yang akan terjadi pada masa mendatang berdasarkan informasi pada masa lalu dan sekarang yang dimiliki agar kesalahan dapat diminimalisir. Teknik ini tidak memberikan informasi secara pasti, namun berusaha mencari pendekatan tentang apa yang akan terjadi sehingga dapat menentukan kebijakan yang terbaik.

3.3.1.4.1 Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Seram Bagian Barat

Proyeksi APBD Kabupaten Seram Bagian Barat selama 4 (empat) tahun ke depan mempertimbangkan beberapa kondisi, sebagai berikut; *pertama*, *trend* rata-rata pertumbuhan, proporsi, dan tingkat realisasi masing-masing komponen APBD pada periode sebelumnya dan APBD tahun 2022; *kedua*, Persoalan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) yang kemudian membuat pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan

Dalam rangka menghadapi pemulihan perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan; dan *ketiga*, melihat potensi perkembangan perekonomian mikro dan makro (tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi) dan adanya perubahan kebijakan pemerintah, khususnya yang berimplikasi pada APBD.

Proyeksi APBD Kabupaten Seram Bagian Barat menggunakan *baseline* APBD murnitahun 2022. Berikut ini adalah proyeksi APBD Kabupaten Seram Bagian Barat tahun 2023-2026.

Tabel 3. 6. Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2023-2026

NO	URAIAN	APBD 2022	PROYEKSI APBD				RATA-RATA PERTUMBUHAN
			2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	PENDAPATAN	1.022.312.654.349,84	1.024.311.626.726,94	1.026.410.547.722,90	1.028.614.414.768,66	1.030.928.475.166,71	5%
1 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	39.979.447.542,09	41.978.419.919,19	44.077.340.915,15	46.281.207.960,91	48.595.268.358,96	5%
1 . 1 . 1	Pendapatan Pajak Daerah	8.034.101.605,22	8.435.806.685,48	8.857.597.019,75	9.300.476.870,74	9.765.500.714,27	
1 . 1 . 2	Pendapatan Retribusi Daerah	2.111.941.367,55	2.217.538.435,93	2.328.415.357,72	2.444.836.125,61	2.567.077.931,89	
1 . 1 . 3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	3.262.663.435,99	3.425.796.607,79	3.597.086.438,18	3.776.940.760,09	3.965.787.798,10	
1 . 1 . 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	26.570.741.133,33	27.899.278.190,00	29.294.242.099,50	30.758.954.204,47	32.296.901.914,70	
1 . 2	PENDAPATAN TRANSFER	982.238.706.807,75	982.238.706.807,75	982.238.706.807,75	982.238.706.807,75	982.238.706.807,75	0%
1 . 2 . 1	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	850.534.947.156,30	850.534.947.156,30	850.534.947.156,30	850.534.947.156,30	850.534.947.156,30	
1 . 2 . 1 . 1	Dana Bagi Hasil Pajak	13.404.390.158,25	13.404.390.158,25	13.404.390.158,25	13.404.390.158,25	13.404.390.158,25	
1 . 2 . 1 . 2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	3.607.677.331,65	3.607.677.331,65	3.607.677.331,65	3.607.677.331,65	3.607.677.331,65	

NO	URAIAN	APBD 2022	PROYEKSI APBD				RATA-RATA PERTUMBUHAN
			2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8
1 . 2 . 1 . 3	Dana Alokasi Umum	588.463.780.800,00	588.463.780.800,00	588.463.780.800,00	588.463.780.800,00	588.463.780.800,00	
1 . 2 . 1 . 4	Dana Alokasi Khusus	245.059.098.866,40	245.059.098.866,40	245.059.098.866,40	245.059.098.866,40	245.059.098.866,40	
1 . 2 . 2	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	112.078.420.379,10	112.078.420.379,10	112.078.420.379,10	112.078.420.379,10	112.078.420.379,10	
1 . 2 . 2 . 1	Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 . 2 . 2 . 2	Dana Penyesuaian	112.078.420.379,10	112.078.420.379,10	112.078.420.379,10	112.078.420.379,10	112.078.420.379,10	
1 . 2 . 3	Transfer Pemerintah Provinsi	19.625.339.272,35	19.625.339.272,35	19.625.339.272,35	19.625.339.272,35	19.625.339.272,35	
1 . 2 . 3 . 1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	19.625.339.272,35	19.625.339.272,35	19.625.339.272,35	19.625.339.272,35	19.625.339.272,35	
1 . 3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	94.500.000,00	94.500.000,00	94.500.000,00	94.500.000,00	94.500.000,00	0%
1 . 3 . 1	Pendapatan Hibah	94.500.000,00	94.500.000,00	94.500.000,00	94.500.000,00	94.500.000,00	
1 . 3 . 3	Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Proyeksi pendapatan daerah Kabupaten Seram Bagian Barat mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 5 persen dari tahun 2022 hingga 2026. Komponen PAD yang memiliki kontribusi yang paling tinggi adalah Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah diikuti oleh pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sementara paling kecil kontribusinya bagi PAD adalah retribusi daerah. Sementara untuk pendapatan transfer diproyeksikan sama dengan APBD tahun 2022. Untuk mencapai target-target pendapatan daerah tahun 2023-2026, terutama PAD yang notabene kewenangan daerah, maka upaya atau kebijakan yang dilakukan adalah peningkatan kapasitas pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber PAD. Upaya intensifikasi melalui strategi sebagai berikut:

1. Peningkatan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak;
2. Penguatan data objek pajak;
3. Peningkatan *punishment* dan *reward* terhadap subjek pajak;
4. Optimalisasi objek retribusi daerah;
5. Peningkatan koordinasi dengan PD penghasil;
6. Peningkatan pelayanan pajak berbasis digital.

Sedangkan upaya ekstensifikasi dilakukan melalui strategi:

1. Peningkatan kontribusi BUMD terhadap PAD;
2. Optimalisasi aset-aset daerah yang potensial dalam mendukung investasi daerah.

BAB IV

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Permasalahan dan isu strategi daerah dalam dokumen Rancangan Pembangunan Daerah (RPD) adalah merupakan hasil dari telaahan dokumen-dokumen perencanaan meliputi, hasil evaluasi dokumen RPJMD Kabupaten tahun 2018-2022, RPJMD dan RPJPD Provinsi, RPJPN dan RPJMN yang meliputi permasalahan-permasalahan yang menjadi isu nasional maupun isu permasalahan yang ada di tingkat daerah. Selain dari telaahan dokumen perencanaan juga mencakup kebijakan-kebijakan nasional, maupun isu global yang juga turut mempengaruhi isu permasalahan nasional dan daerah serta, RPJMD daerah sekitar.

Telaahan masalah-masalah penyelenggaraan pemerintahan, perencanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan sebagaimana diuraikan tersebut, diidentifikasi menjadi masalah pokok dan akan di jadikan isu strategis daerah, dalam kondisi yang ada sekarang dan selanjutnya akan dirumuskan menjadi suatu tujuan, sasaran, strategis, dan arah kebijakan yang akan digambarkan dalam dokumen RPD Kabupaten Seram Bagian Barat tahun 2023-2026. Penyusunan Bab IV juga dilakukan melalui analisis atas gambaran umum kondisi daerah yang berisi tentang capaian kinerja pembangunan dalam RPJMD 2018-2022 yang diuraikan pada Bab II. Dengan demikian dapat terlihat permasalahan pembangunan yang menjadi kesenjangan antara target dan harapan dalam dokumen perencanaan dengan realitas di lapangan. Permasalahan yang akan muncul kemudian dielaborasi dengan berbagai lingkungan strategis bersifat yang membawa potensi sekaligus tantangan bagi pembangunan daerah. Lingkungan strategis yang menjadi bahan pertimbangan antara lain isu internasional, nasional, provinsi maupun daerah sekitar Kabupaten Seram Bagian Barat.

Elaborasi antara permasalahan pembangunan di setiap kategori antara lain Sumberdaya Manusia (SDM), Ekonomi, Infrastruktur, Tata Kelola Pemerintahan dan Sosial yang akan di *mapping* dalam urusan penyelenggaraan Pemerintahan baik yang merupakan urusan wajib pelayanan dasar, dan wajib yang bukan pelayanan dasar, serta urusan pilihan yang menjadi sektor unggulan serta potensi daya saing daerah, yang menjadi isu strategis yang harus diintervensi dan akan terus didorong menjadi rumusan tujuan serta sasaran strategis dalam dokumen RPD.

4.1. Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan merupakan kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara yang akan dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Sebagaimana uraian pada Bab II, kinerja pembangunan Daerah di satu sisi telah memunculkan *outcome* yang bermanfaat kepada masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan, serta memenuhi target kinerja, namun di sisi lain masih terdapat beberapa capaian pembangunan yang belum memenuhi target dan belum tercipta *outcome* yang optimal bagi pemangku kepentingan.

Kesenjangan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, sehingga penyusunan permasalahan pembangunan daerah disusun menggunakan metode analisis pohon masalah. Dalam metode ini permasalahan diklasifikasikan ke dalam tiga level yang memiliki hubungan kausalitas atau sebab-akibat, yaitu masalah pokok, masalah dan akar masalah. Klasifikasi ini pada tahap selanjutnya akan membantu dalam perumusan intervensi pembangunan mulai dari tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan atau disebut metode *fold grand cascading*.

4.1.1. Layanan Urusan Pemerintahan Wajib yang Terkait Pelayanan Dasar

4.1.1.1. Urusan Pendidikan

Pelaksanaan urusan pendidikan masih berhadapan dengan dengan masalah pokok yaitu belum optimalnya akses dan kualitas pendidikan terutama pada tingkat dasar dan menengah. Penyebab utamanya adalah berkaitan dengan belum maksimalnya partisipasi pendidikan pada tingkat PAUD dan juga belum memadainya sarana dan prasarana pendidikan pada tingkat SD dan SMP. Pada tingkat PAUD, akar masalah yang paling menonjol adalah standarisasi pelaksanaan sekolah PAUD yang belum maksimal. Selama ini, pelaksanaan pendidikan tingkat PAUD sebagian besar dilaksanakan oleh pihak non pemerintah. Pada saat yang sama, proses penyediaan sarana dan prasarana serta standarisasi pendidikan oleh dinas belum maksimal. Pada tingkat SD dan SMP, akar masalah utamanya berkaitan dengan kurangnya tenaga pengajar berstatus PNS karena proses sertifikasi yang seringkali terlambat sehingga mendekati usia pensiun. Selain itu, ketersediaan sarana dan

sarana sekolah juga memerlukan rehabilitasi karena kualitas yang ada belum setara.

Tabel 4.1. Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Pendidikan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya Akses dan Kualitas Pendidikan	Belum optimalnya Fasilitas pendidikan	Belum optimalnya pembaharuan sarana dan prasarana Pendidikan SD dan SMP
		Belum optimalnya pelayanan ketersediaan pendidikan kesetaraan
		Belum optimalnya Pendidikan inklusif
		Rendahnya fasilitasi beasiswa Pendidikan tinggi
		Standarisasi penyelenggaraan PAUD belum optimal
		Belum optimalnya koordinasi dengan sekolah-sekolah PAUD non pemerintah
		Belum optimalnya peningkatan sarana dan prasarana PAUD
	Belum optimalnya kualitasnya penyelenggaraan pendidikan	Rendahnya kompetensi guru
		Belum optimalnya akreditasi SD dan SMP
		Belum optimalnya pembelajaran berbasis digital
		Belum optimalnya partisipasi Pendidikan tingkat PAUD
	Belum optimalnya manajemen atau tata Kelola Pendidikan dan tenaga kependidikan	Rendahnya manajemen atau tata kelola pendidikan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		Belum terdistribusinya tenaga kependidikan secara merata

4.1.1.2. Urusan Kesehatan

Urusan kesehatan merupakan salah satu urusan wajib pelayanan dasar yang harus dipenuhi oleh Pemerintah. Kondisi kesehatan masyarakat menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan pembangunan di suatu daerah, mengingat urusan kesehatan menjadi salah satu komponen yang menunjang ketercapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) baik di level daerah maupun nasional. Upaya pembangunan dalam bidang kesehatan di Kabupaten Seram Bagian Barat, lebih mengarah pada pokok permasalahan yaitu belum optimalnya peningkatan derajat kesehatan beberapa permasalahan seperti kualitas pelayanan Kesehatan, gizi buruk dan stunting, kualitas kesehatan ibu, kualitas kesehatan anak, penanganan penyakit menular (TBC dan HIV) dan tidak menular (Hipertensi dan demam berdarah), Penanganan dan pemulihan pandemi covid-19, kesehatan berbasis masyarakat di Kabupaten Seram Bagian Barat. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh akar permasalahan sebagai berikut:

Tabel 4.2. Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Kesehatan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya derajat kesehatan masyarakat	Masih rendahnya kualitas pelayanan kesehatan	Belum optimalnya peningkatan sarana dan prasarana kesehatan
		Masih rendahnya akreditasi puskesmas dan rumah sakit
		Masih rendahnya kapasitas SDM tenaga kesehatan
		Belum optimal kualitas pengawasan obat dan makanan
	Masih tingginya gizi buruk dan stunting	Masih rendahnya pemenuhan kebutuhan gizi ibu hamil
		Belum optimalnya peningkatan gizi bayi dan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		balita
		Belum optimalnya penerapan PHBS (perilaku hidup bersih dan sehat)
	Masih rendahnya kualitas kesehatan ibu	Belum optimalnya penanganan komplikasi saat kehamilan
		Belum optimalnya penanganan komplikasi saat persalinan
		Belum optimalnya penanganan komplikasi pasca persalinan/nifas
		Masih rendahnya kunjungan K1 dan K4
		Masih rendahnya ibu melahirkan di fasilitas kesehatan
	Masih rendahnya kualitas kesehatan anak	Masih rendahnya imunisasi dasar lengkap
		Masih rendahnya gizi bayi
		Masih tingginya bayi lahir dengan berat badan bawah garis merah (BBBGM)
		Masih tingginya bayi lahir dengan Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR)
	Belum optimalnya penanganan penyakit menular (TBC dan HIV) dan tidak menular (Hipertensi dan demam berdarah)	Masih rendahnya pengetahuan tentang gizi seimbang
		Belum optimal edukasi masyarakat tentang penyakit menular dan tidak menular
		Masih rendahnya cakupan pelayanan kesehatan jiwa (ODGJ)
	Belum optimalnya penanganan dan pemulihan pandemi covid-19	Belum optimalnya disiplin protokol kesehatan
		Belum optimalnya fasilitasi percepatan vaksinasi COVID-19
		Belum optimalnya testing dan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		perawatan pasien COVID-19
	Masih rendahnya upaya kesehatan berbasis masyarakat	Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam bidang kesehatan
		Belum Optimalnya peran kader kesehatan

4.1.1.3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pelaksanaan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang di Kabupaten Seram Bagian Barat masih dihadapkan pada dua permasalahan pokok yaitu Infrastruktur pelayanan dasar yang meliputi pembangunan dan pengembangan jalan, jembatan, irigasi/ saluran air serta permasalahan pokok tentang keserasian pembangunan antar sektor dalam rangka pembangunan berkelanjutan, yang disebabkan oleh masalah penyediaan infrastruktur pelayanan dasar yang memadai dan penyelenggaraan perencanaan pemanfaatan dan pengendalian tata ruang. Kedua masalah ini disebabkan beberapa akar permasalahan antara lain:

Tabel 4.3. Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya Infrastruktur pelayanan dasar yang memadai	Rendahnya ketersediaan infrastruktur pelayanan dasar secara merata.	Belum optimalnya ketersediaan sarana sanitasi, air bersih, listrik, jalan dan akses terhadap internet
Belum optimalnya infrastruktur pendukung pengembangan ekonomi	Terbatasnya ketersediaan infrastruktur pendukung pengembangan ekonomi	Belum optimalnya penyediaan aksesibilitas menuju pusat-pusat pertumbuhan ekonomi
Rendahnya keserasian	Rendahnya penyelenggaraan	Belum optimalnya penyelesaian sengketa

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
pembangunan antar sector dalam rangka pembangunan berkelanjutan	perencanaan	lahan pemerintah
	pemanfaatan dan pengendalian tata ruang	Belum optimalnya kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW
		Pemanfaatan tata ruang kota

4.1.1.4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman masih mengalami permasalahan dalam hal pemenuhan rumah yang layak huni yang masih perlu penanganan. Permasalahan pokok dalam menangani urusan perumahan dan Kawasan permukiman di Kabupaten Seram bagian Barat juga bagian masalah Infrastruktur pelayanan dasar, dengan fokus permasalahannya yaitu ketersediaan rumah layak huni, yang dibutuhkan oleh masyarakat yang kurang mampu. Tantangan dalam urusan perumahan rakyat dan kawasanpermukiman antara lain:

Tabel 4.4. Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya Infrastruktur dasar pelayanan dasar yang memadai	Belum optimalnya akses rumah layakhuni	Rendahnya fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah
		Rendahnya ketersediaan dan rehabilitasi rumah rusak atau tidak layak huni, dan korban bencana
		Rendahnya ketersediaan prasarana dan sarana utilitas umum (PSU) pada kawasan permukiman

4.1.1.5. Ketenteraman Dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Dalam rangka meningkatkan kondusifitas wilayah di Kabupaten Seram Bagian Barat, sebagai salah satu daerah miskin atau tertinggal di Indonesia, akan selalu mengalami gejolak

sosial, untuk itu beberapa upaya yang dilakukan antara lain peningkatan kualitas demokrasi, ketertiban umum, memelihara kerukunan antar umat beragama serta penanggulangan bencana. Pada aspek persentase penegakan produk hukum di Kabupaten Seram Bagian Barat serta penganan, terjadi peningkatan setiap tahunnya. Upaya peningkatan penegakan produk hukum selama ini terkendala pada belum optimalnya sinergi kewenangan tata Kelola pemerintahan dan koordinasi antar instansi terkait. Berikut adalah rumusan permasalahan terkait urusan Ketenteraman Ketertiban Umum di Kabupaten Seram Bagian Barat.

Tabel 4.5. Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Rendahnya penegakan kepastian hukum dan perlindungan masyarakat	Belum optimalnya ketentraman dan ketertiban masyarakat	Rendahnya kesadaran dan ketaatan terhadap Peraturan Daerah dan Kepala Daerah
		Belum optimalnya patroli ketentraman dan ketertiban
		Belum optimalnya kewaspadaan dini masyarakat
Tingginya resiko bencana	Belum optimalnya ketahanan dan perlindungan masyarakat terhadap bencana	Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana
		Belum optimalnya penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana
		Belum optimalnya kesiap siagaan dan penanggulangan bencana kebakaran dan non alam

4.1.1.6. Sosial

Urusan kesejahteraan sosial merupakan urusan wajib pelayanan dasar yang harus dilaksanakan oleh masing-masing Pemerintah Daerah. Masalah kesejahteraan sosial meliputi urusan anak terlantar, anak yang berhadapan dengan masalah hukum, anak jalanan, disabilitas, perlindungan dan perlakuan khusus dan lansia. Permasalahan Sosial di Kabupaten Seram Bagian Barat meliputi dua permasalahan pokok yaitu Kesejahteraan PMKS dan tingginya angka pengangguran. Dua masalah pokok tersebut di sebabkan oleh masalah kemiskinan dan masalah pelayanan kesejahteraan sosial bagi PMKS. Berikut adalah rumusan permasalahan terkait urusan Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Seram Bagian Barat antara lain:

Tabel 4.6. Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Sosial

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya kesejahteraan PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial)	Belum optimalnya pelayanan sosial bagi PMKS	Belum optimalnya upaya rehabilitas social diluar panti
		Rendahnya pemberdayaan penyandang disabilitas
		Rendahnya kapasitas tenaga penyelenggara kesejahteraan sosial
		Belum optimalnya system keamanan makam pahlawan
		Belum optimalnya penanganan fakir miskin
	Pengembangan Kawasan transmigrasi berkelanjutan	Rendahnya kawasan transmigrasi
Tingginya resiko bencana	Peningkatan ketahanan dan perlindungan masyarakat terhadap bencana	Fasilitasi pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana alam dan non alam saat terjadi bencana

4.1.2. Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Terkait Pelayanan Dasar

Urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar adalah urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia.

4.1.2.1. Tenaga Kerja

Kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten Seram Bagian Barat masih belum optimal khususnya dalam serapan tenaga kerja. Data pada tahun 2020, berdasarkan data Seram Bagian Barat Dalam Angka 2022 (bersumber dari Survei Angkatan Kerja Nasional BPS) menunjukkan Tingkat Kesempatan Kerja di Kabupaten Seram Bagian Barat sebesar 94,35%, nilai ini diperoleh dari data penduduk yang bekerja yang berusia 15 tahun keatas yaitu sebanyak 80.801 orang, dibagi jumlah Angkatan kerja yaitu sebanyak 85.640 orang. Selain itu, kualifikasi tenaga kerja yang sedang bekerja pada tahun 2022 didominasi oleh lulusan setara SD sebesar 31,36%, SMP 17,24%, SMK/SMA 36,93%, dan perguruan tinggi sebanyak 14,47%. Hal tersebut menunjukan masih adanya tantangan untuk menyerap penduduk usia kerja agar mampu bekerja serta meningkatkan kualifikasi tenaga kerja. Selanjutnya angka partisipasi angkatan kerja pada tahun 2021 sebesar 71,86 persen dan tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,46 persen tahun 2021. Maka dari itu, ada beberapa tantangan urusanketenagakerjaan yang perlu diperhatikan yaitu:

Tabel 4.7. Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Tenaga Kerja

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Masih tingginya pengangguran	Masih rendahnya kesempatan kerja	Rendahnya kesesuaian keterampilan pencari kerja dengan permintaan pasar kerja
		Belum optimalnya jaringan pemasaran tenaga kerja

4.1.2.2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan urusan yang erat kaitannya dengan isu kesetaraan gender dalam program pembangunan nasional. Isu tersebut

bertujuan untuk meningkatkan peran dan kualitas hidup perempuan dalam pembangunan. Selain itu, urusan ini memiliki fokus untuk menghapuskan diskriminasi gender serta meningkatkan upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak. Di Kabupaten Seram Bagian Barat urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak tidak terlepas dari urusan keluarga berencana, selain fokus pemberdayaan perempuan, upaya penanganan kekerasan terhadap anak juga masih perlu ditingkatkan berikut ini adalah masalah pokok serta masalah dan akar masalah dari permasalahan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta masalah keluarga berencana.

Tabel 4.8. Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya kebedayaan perempuan dan anak	Rendahnya partisipasi perempuan aktif dalam kegiatan ekonomi dan politik	Masih rendahnya pengarusutamaan gender di lingkungan pemerintah dan masyarakat
		Belum optimalnya Kerjasama antar Lembaga perlindungan perempuan
		Belum optimalnya peran serta masyarakat, dunia usaha dan media dalam mencegah kekerasan terhadap perempuan
		Rendahnya kapasitas kader dalam memberikan pendampingan
		Rendahnya fasilitas pengaduan
	Belum optimalnya perlindungan terhadap perempuan	Belum optimalnya perlindungan anak terpadu

4.1.2.3. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan urusan nasional yang erat kaitannya dengan isu pengendalian penduduk dan keluarga berencana dalam program pembangunan nasional. Isu tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga dalam pembangunan. Selain itu, urusan ini memiliki fokus pada laju pertumbuhan penduduk, dan pengendalian penduduk di Kabupaten Seram Bagian Barat, sehingga perlu diperhatikan.

Tabel 4.9. Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Rendahnya kualitas pelayanan pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Belum optimalnya pengendalian penduduk	Belum optimalnya pembinaan keluarga berencana
		Belum optimalnya komunikasi informasi dan edukasi tentang pengendalian penduduk
		Belum optimalnya partisipasi Pasangan Usia Subur (PUS) dalam ber-KB

4.1.2.4. Pangan

Penyelenggaraan urusan pangan di Kabupaten Seram Bagian Barat masih perlu untuk dioptimalkan. Beberapa permasalahan yang dihadapi adalah masih adanya daerah rawan pangan meskipun dari sisi cadangan pangan tercukupi. Hal lain adalah keterjangkauan pangan masyarakat tidak merata, belum optimalnya penganeekaragaman pangan lokal yang disebabkan oleh beberapa masalah dan akar masalah. Rincian mengenai permasalahan pembangunan pada bidang urusan pangan adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.10. Permasalahan Pembangunan Daerah
Urusan Pangan**

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Masih belum optimalnya ketanahan pangan	Belum optimalnya ketersediaan pangan	Masih kurangnya stok cadangan pangan
		Rendah ketersediaan infrastruktur lumbung pangan
	Belum optimalnya keterjangkauan pangan	Peningkatan kualitas informasi dan distribusi pangan belum optimalnya
		Belum optimalnya penanganan kerawanan pangan
	Rendahnya pemanfaatan pangan	Rendahnya diversifikasi pangan non-beras dan non-terigu
	Belum optimalnya keamanan pangan	Belum optimalnya pengawasan dan pembinaan keamanan pangan

4.1.2.5. Lingkungan Hidup

Terciptanya kemajuan daerah dengan tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan merupakan salah satu tujuan pembangunan. Secara umum, kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Seram Bagian Barat masih cukup baik namun perlu didukung dengan pengawasan dan pendalian dampak lingkungan sehingga kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Seram Bagian Barat harus tetap terjaga, Beberapa permasalahan yang dihadapi pada bidang urusan lingkungan hidup adalah masih tingginya volume sampah yang belum terkelola dengan baik, masih perlunya peningkatan ketersediaan RTH, dan belum optimalnya pengelolaan limbah/ sampah rumah tangga. Adapun detail permasalahan pembangunan pada bidang urusan lingkungan hidup adalah sebagai berikut.

**Tabel 4.11. Permasalahan Pembangunan Daerah
Urusan Lingkungan Hidup**

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya kualitas lingkungan hidup	Beluam optimalnya pengawasan dan pengendalian lingkungan	Belum optimalnya pengendalian pencemaran air
		Belum optimalnya pengendalian pencemaran udara
		Belum optimalnya peran pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup
		Rendahnya ketersediaan lahan untuk ruang terbuka hijau
		Belum optimalnya pengolahan sampah terpadu
		Belum tersusunnya Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten

4.1.2.6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil sangat erat kaitannya dengan penyediaan layanan data kependudukan yang komprehensif sebagai salah satu basis yang digunakan dalam menentukan arah pembangunan daerah. Secara umum, kualitas layanan data kependudukan di Kabupaten Seram Bagian Barat masih belum optimal. Kondisi ini disebabkan oleh kurangnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kependudukan, disisi lain masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk memiliki dokumen kependudukan dan kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pencatatan pada peristiwa-peristiwa penting seperti kelahiran dan kematian juga menjadi tantangan tersendiri.

Tabel 4.12. Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya tingkat kepemilikan dokumen dukcapil	Belum optimalnya penguatan kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil	Belum optimalnya pengolahan data base kependudukan dan pencatatan sipil yang valid dan terupdate
		Kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan dan pencatatan sipil

4.1.2.7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pembangunan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Seram Bagian Barat masih memiliki tantangan berupa peningkatan status desa dari sebagian besar tertinggal dan berkembang menjadi desa maju serta desa maju menjadi desa mandiri. Optimalisasi potensi desa, penguatan tata kelola pemerintahan desa, dan status pemerintahan desa adat serta perluasan Pembangunan Kawasan Perdesaan menjadi agenda mendesak seiring dengan upaya mengurai peta permasalahan sebagai berikut:

Tabel 4.13. Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya Keberdayaan desa	Belum optimalnya Kapasitas tata Kelola pemerintahan desa	Rendahnya kapasitas aparatur pemerintah desa
		Rendahnya fasilitasi penataan desa
	Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat desa	Rendahnya kapasitas kelompok pemberdayaan masyarakat desa
		Belum optimalisasi pengelolaan potensi dan aset desa

4.1.2.8. Perhubungan

Penyelenggaraan urusan perhubungan sangat erat kaitannya dalam upaya menciptakan kenyamanan dan keselamatan transportasi. Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk melihat kondisi tersebut adalah angka kecelakaan. Untuk kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Seram Bagian Barat di Tahun 2020 sedikit mengalami penurunan yaitu terdapat 25 kasus kecelakaan lalulintas bila dibandingkan ditahun 2019 yaitu sebanyak 31 Kasus. Sedangkan untuk jumlah pelanggaran Lalu lintas ditahun 2020 sebanyak 975 pelanggaran, sedangkan pelanggaran ditahun 2019 sebanyak 2.495 pelanggaran. Itu artinya pelanggaran lalu lintas mengalami penurunan sebanyak 1.520 dikarenakan kita berada pada masa pandemi covid-19 sehingga penindakan menggunakan tilang dikurangi. Meskipun demikian kualitas kinerja lalulintas dan angkutan jalan perlu ditingkatkan. Adapun detail permasalahan pembangunan pada bidang urusan perhubungan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.15. Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Perhubungan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya Kualitas kinerja lalu lintas dan angkutan jalan	Belum optimalnya Kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan	Belum optimalnya standar keamanan dan keselamatan berlalulintas
		Belum optimalnya penyediaan prasarana dan sarana perhubungan berdasarkan rencana pengembangan wilayah.
Belum optimalnya infrastruktur pendukung pengembangan ekonomi yang memadai	Belum memadainya ketersediaan dan kualitas sarana prasarana perhubungan pendukung ekonomi	Belum optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana penunjang Pelabuhan pengumpan lokal

4.1.2.9. Komunikasi dan Informatika

Pelaksanaan urusan komunikasi dan informatika belum maksimal karena pemanfaatan teknologi informasi belum terintegrasi dengan baik. Selain karena sarana pengelolaan

jaringan yang belum memadai juga disebabkan oleh jaringan komunikasi dan pengelolaan data yang terintegrasi. Beberapa persoalan berkaitan dengan sarana dan prasarana jaringan komunikasi. Selain itu, jaringan fiber optik juga belum mencakup semua desa sehingga pengintegrasian data masih terfragmentasi.

Tabel 4.16. Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Komunikasi dan Informatika

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik	Belum optimalnya penguatan kelembagaan keterbukaan informasi pelayanan publik	Terbatasnya kapasitas infomasi masyarakat dalam penjabaran informasi pembangunan daerah
		Terbatasnya kapasitas pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID)

4.1.2.10. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah merupakan sektor yang dapat berperan dalam mengembangkan perekonomian masyarakat. Kondisi capaian kinerja dalam urusan koperasi dan UMKM belum menunjukkan kinerja yang optimal. Hal tersebut dapat terlihat dari kondisi kelembagaan koperasi yang masih memerlukan penataan serta pengembangan UMKM yang ada di Kabupaten Seram Bagian Barat yang masih terbatas dengan akses permodalan. Tantangan atau permasalahan kedepan yang dihadapi untuk memperbaiki sektor Koperasi dan UMKM di Kabupaten Seram Bagian Barat antara lain:

Tabel 4.17. Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Rendahnya	Belum	Rendanya kapasitas

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
kontribusi sektor koperasi dan UKM terhadap perekonomian	optimalnya	SDM pengurus koperasi
	kelembagaan dan kualitas SDM koperasi	Rendahnya kualitas metode pengelolaan koperasi
		Belum optimalnya kapasitas produksi UKM
	Belum optimalnya omzet usaha mikro	Masih rendahnya daya saing produk UKM

4.1.2.11. Penanaman Modal

Urusan penanaman modal pada Peraturan Bupati Seram Bagian Nomor Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Bahwa untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance) maka Penetapan Peraturan Bupati Tentang Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menjadi kebutuhan perangkat daerah sebagai acuan pelaksanaan Tugas pokok dan fungsi Aparatur Sipil Negara sesuai urusan pemerintahan yang menjadi beban tugas perangkat daerah, untuk memberikan pelayanan yang maksimal, menuju kesejahteraan bersama dikabupaten Seram Bagian Barat, sesuai besaran organisasi yang telah ditetapkan. Urusan penanaman modal menjadi prioritas pembangunan Kabupaten Seram Bagian Barat pada beberapa tahun ke depan, oleh karena itu masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diurai untuk melanjutkan arah pembangunan Seram Bagian Barat yang pro investasi, yaitu:

Tabel 4.18. Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Penanaman Modal

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Rendahnya realisasi investasi	Kurangnya daya tarik investasi	Belum optimalnya identifikasi potensi investasi
		Belum optimalnya promosi investasi

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		Belum optimalnya kualitas pelayanan perizinan

4.1.2.12. Kepemudaan dan Olahraga

Urusan kepemudaan dan olahraga memegang peranan penting dalam pengembangan sumber daya manusia di Seram Bagian Barat. Tantangan terbesar dalam pelaksanaan urusan kepemudaan adalah belum optimalnya kontribusi pemuda dalam pembangunan yang disebabkan oleh pengembangan organisasi kepemudaan yang belum optimal dan peningkatan prestasi olah raga. Hal itu disebabkan oleh pembinaan organisasi pemuda yang belum optimal karena belum mencakup ke seluruh desa. Selain itu, pengembangan pemuda belum diarahkan pada tema-tema yang sesuai dengan kebutuhan pengembangan masyarakat lokal secara real. Dari sisi keolahragaan, prestasi olahraga Kabupaten Seram Bagian Barat samapai pada tingkat Nasional/ PON dan Asean Game, secara keseluruhan juga perlu mendapatkan perhatian khusus. Hal itu disebabkan oleh belum optimalnya sarana dan prasarana keolahragaan karena persebarannya yang kurang merata dan masih terbatas pada jenis olahraga tertentu. Di samping itu, pengembangan SDM belum optimal karena pembibitan atlet belum terstruktur dengan baik serta belum adanya *event-event* olahraga reguler sebagai sarana pembibitan.

Tabel 4.19. Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya kontribusi pemuda dalam pembangunan	Belum optimalnya prestasi raga	Rendahnya fasilitas olah raga
		Belum optimalnya perbaikan manajemen pembibitan atlit
	Belum optimalnya Pengembangan organisasi kepemudaan	Belum optimalnya pembinaan oragnisasi kepemudaan
		Rendahnya kapasitas pemuda dalam berorganisasi
		Belum optimalnya tatakelola

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		oraginasi kepemudaan
	Belum optimalnya pembinaan organisasi kepramukaan	Belum optimalnya tatakelola oraginasi kepramukaan
Rendahnya kepelatihan terhadap atlet	Pengembangan SDM keolahragaan belum optimal	Pembibitan atlet masih belum terstruktur

4.1.2.13. Statistik

Pelaksanaan urusan statistik di Kabupaten Seram Baguian Barat masih belum optimal. Hingga saat ini, fungsi statistik melekat di Dinas Komunikasi dan Informatika. Seperti tercantum pada tabel di bawah ini, masalah terbesar pelaksanaan urusan Statistik adalah belum optimalnya ketersediaan data statistik yang terintegrasi. Penyebab utama dari masalah pokok tersebut yaitu belum optimalnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.

Tabel 4.20. Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Statistik

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Belum optimalnya Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Belum optimalnya system pengeloan data kinerja

4.1.2.14. Persandian

Di Kabupaten Seram Bagian Barat, pelaksanaan urusan persandian juga belum menunjukkan progres yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Sama dengan Statistik, urusan Persandian juga masih melekat pada Dinas Komunikasi dan Informatika. Permasalahan pokok yang ada adalah belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik.

Tabel 4.21. Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Persandian

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik	Rendahnya penguatan inovasi dan adaptasi teknologi terpadu	Lemahnya kualitas keamanan informasi daerah

4.1.2.15. Kebudayaan

Pada urusan kebudayaan, minimnya upaya menjadikan budaya lokal sebagai katalisator pembangunan daerah menjadi masalah pokok. Hal ini berkaitan dengan bagaimana menjadikan kebudayaan sebagai bahan pengembangan sektor pariwisata. Upaya ini belum tercapai karena situs- situs kebudayaan belum dijadikan sebagai objek pembangunan pariwisata.

Tabel 4.22. Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Kebudayaan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Rendahnya pelestarian objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya	Belum optimalnya Dan fasilitasi obyek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya	Belom optimalnya peran serta masyarakat dalam pembangunan dan pelestarian objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya
		Pelestarian dan nilai warisan tradisi
		Lemahnya kreatifitas kesenian
		Belum optimalnya modernisasi nilai religus

4.1.2.16. Kearsipan

Urusan kearsipan diarahkan untuk penyelamatan dan pelestarian arsip daerah serta peningkatan kualitas pelayanan dalam bidang kearsipan. Arsip sebagai bukti terkait terjadinya peristiwa, kebijakan pemerintah dan sebagainya. Kinerja layanan kearsipan dapat dilihat dari indikator cakupan pengelolaan arsip daerah dan persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip

secara baku. Secara umum, kedua indikator tersebut masih belum menunjukkan kondisi yang baik. Hal tersebut dikarenakan belum semua Perangkat Daerah mengirimkan arsipnya untuk dikelola Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, sarana prasana kearsipan pada level daerah dan satuan kerja masih terbatas, serta SDM pengelola arsip masih kurang. Berikut adalah rumusan permasalahan terkait urusan Kearsipan di Kabupaten Seram Bagian Barat.

Tabel 4.24. Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Kearsipan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya Tata kelola kearsipan	Belum optimalnya Kualitas pelayanan kearsipan	Belum optimalnya peningkatan system pengelolaan kearsipan daerah
Belum optimalnya akses dan kualitas Pendidikan	Belum optimalnya budaya baca dan literasi	Terbatasnya koleksi buku perpustakaan
		Belum optimalnya fasilitas perpustakaan
		Rendahnya pengembangan taman baca masyarakat

4.1.3. Urusan Pilihan

4.1.3.1. Pertanian

Kabupaten Seram Bagian Barat merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi pada sektor pertanian dan peternakan. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa sektor tersebut dapat berkontribusi besar terhadap perekonomian daerah, karena sektor pertanian dan peternakan. akar masalah yang dihadapi dari bidang ini antara lain; Pertanian merupakan sektor unggulan sebab sebagian besar perekonomian masyarakat kabupaten seram bagian barat berasal dari sektor pertanian Berikut permasalahan pokok, masalah dan

Tabel 4.25. Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Pertanian

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya pertumbuhan sektor pertanian terhadap perekonomian	Belum optimalnya produksi pertanian dan perkebunan	Rendahnya kapasitas SDM sektor pertanian dan perkebunan
		belum optimalnya sarana dan prasarana pertanian, dan perkebunan
		Belum optimalnya perizinan pertanian
	Belum optimalnya produksi hasil peternakan	Kapasitas SDM Peternak belum memadai
		Belum optimalnya sarana dan prasarana peternakan
		Belum optimalnya penanganan Kesehatan ternak dan kesehatan masyarakat veteriner

4.1.3.2. Kelautan dan Perikanan

Dengan berlakunya Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan perikanan dan kelautan sudah menjadi kewenangan propinsi. Namun salah satu potensi unggulan perekonomian atau mata pencarian masyarakat Kabupaten Seram Bagian Barat yaitu bidang perikanan, dengan tujuan yaitu meningkatkan produksi perikanan, sebab kondisi wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat sebagian besar adalah adalah Laut, karena kabupaten dengan jumlah pulau yang dihuni dan tidak dihuni adalah 58 pulau. Dengan demikian potensi pencarian dan pendapat masyarakat lebih banyak pada nelayan tangkap dan budidaya keramba ikan.

Tabel 4.26. Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Kelautan dan Perikanan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya	Belum optimalnya	Rendahnya kapasitas SDM perikanan tangkap
		belum optimalnya

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
pertumbuhan sektor perikanan terhadap perekonomian	produksi perikanan	sarana dan prasarana perikanan tangkap
		Redahnya penerapan metode modern bidang perikanan tangkap
		Belum optimalnya Kapasitas SDM perikanan budidaya
		Belum optimalnya penyediaan sarana budidaya perikanan
		Belum optimalnya pengadopsian metode budidaya perikanan yang baik
		Belum optimalnya pengembangan promosi produk perikanan

4.1.3.3. Perindustrian

Sektor Perindustrian merupakan salah satu sektor unggulan yang menopang perekonomian Kabupaten Seram Bagian Barat. Pengembangan sektor industri di Kabupaten Seram Bagian Barat, lebih banyak pada industri rumah tangga berupa minyak asirin selain industri UKM Lainnya. Permasalahan pembangunan yang dihadapi pada sektor perindustrian adalah sebagai berikut:

Tabel 4.27. Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Perindustrian

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya pertumbuhan sektor perindustrian terhadap perekonomian	Belum optimalnya nilai produksi IKM	Belum optimalnya kapasitas SDM sektor industri
		Belum optimalnya sarana dan prasarana industri
		Rendahnya kreatifitas dan inovasi pelaku industri

4.1.3.4. **Perdagangan**

Sektor perdagangan juga merupakan salah satu sektor unggulan yang menopang perekonomian Kabupaten Seram Bagian Barat. Permasalahan utama sektor perdagangan sama halnya dengan sektor penindustrian yaitu belum optimalnya pertumbuhan sektor perindustrian terhadap perekonomian:

Tabel 4.28. Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Perdagangan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya laju pertumbuhan sektor perdagangan terhadap perekonomian	Belum optimalnya kelancaran distribusi barang perdagangan	Sarana dan prasarana distribusi barang perdagangan belum memadai
		Stabilitas harga barang pokok dan barang penting belum optimal
		Masih adanya kasus sengketa perdagangan
		Pembinaan dan fasilitasi promosi produk perdagangan belum optimal

4.1.3.5. **Pariwisata**

Pariwisata merupakan salah satu sektor potensial di Kabupaten Seram Bagian Barat yang merupakan Kawasan Strategis dalam Pengembangan Pariwisata pulau, pesisir daerah pegunungan semuanya lebih pada pengembangan potensi sumberdaya alam. Tingginya potensi tersebut belum diimbangi oleh dua penyebab yaitu minimnya sarana dan prasarana wilayah dan juga belum optimalnya dukungan SDM. Kedua aspek tersebut merupakan hal krusial dalam menopang peningkatan kegiatan wisata di Seram Bagian Barat. Selain itu, destinasi yang ada saat ini masih rendah dalam promosi atau pemasaran, serta pengembangan sarana dan prasarana. Dari sisi dukungan SDM, pengembangan pariwisata masih terkendala oleh masih lemahnya pola pikir pariwisata di kalangan masyarakat. Akibatnya, upaya-upaya menarik wisatawan berbasis desa secara maksimal.

Tabel 4.29. Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Pariwisata

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian	Belum optimalnya kunjungan wisatawan	Belum optimalnya daya Tarik destinasi wisata
		Belum optimalnya pemasaran destinasi wisata
		Belum optimalnya Kerjasama pengembangan pariwisata
	Belum optimalnya omzet pelaku ekonomi kreatif	Rendahnya kapasitas produksi ekraf
		Rendahnya kualitas produk ekraf

4.1.4. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

4.1.4.1. Perencanaan

Perencanaan pembangunan menentukan efektivitas proses pembangunan dan membawa dampak signifikan bagi penerapan akuntabilitas kinerja penyenggara pemerintahan di Kabupaten Seram Bagian Barat. Capaian fungsi perencanaan akan berdampak pada penilai SAKIP pemerintah daerah. Orientasi pembangunan berbasis kinerja *outcome/impact* perlu ditingkatkan, serta agar terbangun manajemen kinerja yang baik bagi Perangkat Daerah dan struktur organisasi di bawah kendali masing-masing perangkat daerah. Beberapa kinerja perencanaan masih berorientasi *output* berupa ketersediaan dokumen perencanaan. Pemetaan permasalahan dalam fungsi perencanaan sebagai berikut:

Tabel 4.30. Permasalahan Pembangunan Daerah Unsur Penunjang Perencanaan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya akuntabilitas kinerja	Belum optimalnya kualitas perencanaan daerah	Belum optimalnya sinergitas perencanaan di tingkat daerah dengan perangkat daerah

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
pemerintahan daerah	Belum optimalnya kualitas pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Belum optimalnya pengembangan instrument pengendalian dan evaluasi perencanaan
		Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan daerah

4.1.4.2. **Keuangan**

Urusan keuangan adalah satu kesatuan antara pendapatan daerah dan belanja daerah. Kinerja bidang pedapatan daerah dapat dilihat dari target capaian dan realisasi peningkatan Pendapatan Asli Daerah, diluar pendapatan lain-lain yang sah. Dan permasalahan utama dari pendapatan asli daerah adalah belum optimalnya PAD yang disebabkan oleh sumber-sumber pendapatan asli daerah. Demikian halnya dengan pengelolaan keuangan daerah. Meskipun demikian, terdapat tantangan untuk mempertahankan capaian akuntabilitas keuangan yang telah mendapatkan Opini BPK Wajar Dengan Pengecualian (WDP), variable utama yang menjadi permasalahan pokok yaitu belum optimalnya pengelolaan keuangan yang akuntabel, persoalan ini disebabkan oleh kapasitas keuangan daerah dan kinerja transparansi pengelolaan keuangan daerah.

Tabel 4.31. Permasalahan Pembangunan Daerah Unsur Penunjang Keuangan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya Pengeloalaan keuangan yang akuntabel	Belum optimalnya kinerja dan transparansi pengelolaan keuangan daerah	Lemahnya kinerja belanja daerah berbasis prioritas dan kebutuhan daerah
		Belum optimalnya akses public terhadap keuangan daerah
	Belum optimalnya kapasitas	Belum optimalnya pemanfaatan TIK dalam pengelolaan retribusi daerah
		Belum optimalnya identifikasi

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	keuangan daerah	dan pendataan sumber-sumber retribusi daerah
		Belum optimalnya system pajak daerah
		Belum optimalnya pengendalian dan pewasan Sumber PAD
	Belum optimalnya kualitas pelaporan dan system pengawasan daerah	Rendahnya efektifitas penatausahaan, pengamanan dan pemanfaatan asset daerah

4.1.4.3. Kepegawaian

Kepegawaian merupakan urusan krusial dalam upaya peningkatan tatakelola pemerintahan. Di Kabupaten Seram Bagian Barat, masalah dari urusan kepegawaian, yaitu kapasitas SDM kepegawaian dalam pengelolaan keuangan yang akuntabel. Beberapa persoalan mikro yang teridentifikasi antara lain tidak meratanya distribusi pegawai antara Perangkat Daerah, kurangnya SDM di beberapa posisi, serta proses mutasi yang seringkali tidak berjalan lancar.

Tabel 4.32. Permasalahan Pembangunan Daerah Unsur Penunjang Kepegawaian

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya manajemen dan tata kelola kepegawaian	Belum optimal tata kelola aparatur pemerintah dalam birokrasi	Belum optimalnya pemerataan distribusi pegawai
		Belum optimalnya pembinaan terhadap pegawai
		Belum optimalnya peningkatan kesejahteraan aparatur penyelenggaraan pemerintahan

4.1.4.4. Penelitian dan Pengembangan

Pelaksanaan urusan penelitian dan pengembangan merupakan aspek krusial yang menjadi basis pengambilan kebijakan. Namun demikian, tujuan tersebut belum bisa terwujud karena minimnya ketersediaan hasil penelitian yang bisa dijadikan basis perumusan kebijakan. Hal ini disebabkan oleh lemahnya kapasitas untuk melakukan riset oleh Perangkat Daerah yang mengampu urusan penelitian dan pengembangan. Pada saat yang sama penelitian juga dilaksanakan secara terbagi-bagi/terpecah-pecah di tingkat Perangkat Daerah dengan koordinasi yang lemah. Selanjutnya, rantai persoalan ini menyebabkan kegiatan riset belum sepenuhnya menjadi dasar perumusan kebijakan. Dalam perumusan kebijakan juga dibutuhkan kemampuan inovasi daerah. Hingga saat ini inovasi yang dihasilkan di Kabupaten Seram Bagian Barat masih perlu ditingkatkan. Adanya lomba kreasi dan invonasi belum sepenuhnya berhasil ditindaklanjuti ke tahapan yang lebih praktis. Inovasi oleh masyarakat juga belum sepenuhnya dapat difasilitasi oleh Perangkat Daerah karena lemahnya sumber daya manusia.

Tabel 4.33. Permasalahan Pembangunan Daerah Unsur Penunjang Penelitian dan Pengembangan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Rendahnya pengembangan penelitian dan inovasi	Belum optimalnya efektifitas kebijakan pemerintah daerah dalam aspek kelitbangan	Belum optimalnya peran penelitian sebagai dasar perumusan kebijakan
		Belum optimalnya koordinasi kelitbangan
	Belum optimalnya inovasi daerah	Belum optimalnya fasilitasi pengembangan inovasi

4.1.5 Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

4.1.5.1 Inspektorat Daerah

Capaian fungsi pengawasan di Kabupaten Seram Bagian Barat kedepan akan diupaya memenuhi target nasional dan kapabilitas

APIP dalam rangka mendorong berada di level pertama. Capaian tersebut diperkuat dengan peningkatan integritas aparatur yang ditandai dengan transparansi kegiatan dan kepatuhan pelaporan harta kekayaan. Namun, terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian untuk penguatan fungsi pengawasan di masa depan, yaitu:

Tabel 4.34. Permasalahan Pembangunan Daerah Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya penguatan sistem dan aparatur pengendalian intern pemerintah	Rendahnya kualitas pelaporan dan sistem pengawasan daerah	Kurangnya kelembagaan pengawasan daerah
		Belum optimalnya pengauatan system pengendalian intern pemerintah
		Belum optimalnya kualitas pelaporan keuangan daerah

4.1.6 Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

4.1.6.1 Sekretariat Daerah

Fungsi yang dijalankan oleh Sekretariat Daerah terkait dengan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi kebijakan Bupati dan Wakil Bupati. Fungsi tersebut menopang kualitas tata kelola pemerintahan yang berjalan di Daerah. Beberapa capaian kinerja yang menandai kualitas tata kelola pemerintahan belum optimal, antara lain terkait Nilai Reformasi Birokrasi dan penerapan SAKIP. Adapun koordinasi dalam peningkatan kualitas pelayanan publik telah menghasilkan nilai IKM yang meningkat setiap tahun. Tantangan yang masih dihadapi fungsi Sekretariat Daerah, yaitu:

Tabel 4.36. Permasalahan Pembangunan Daerah Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Sekretariat Daerah

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum	Belum optimalnya	Belum optimalnya penataan kelembagaan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
optimalnya Penerapan reformasi birokrasi	Pembangunan kelembagaan berbasis kinerja	Belum optimalnya ketatalaksanaan
		Belum optimalnya fasilitas perangkat daerah dalam reformasi birokrasi
	Kurangnya efektifitas kebijakan pemerintah daerah	Belum optimalnya sinkronisasi, pengendalian dan evaluasi kebijakan bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat
		Masih perlunya fasilitasi dan pembinaan penyusunan produk hukum daerah
		Perlunya sinkronisasi, pengendalian dan evaluasi kebijakan bidang perekonomian dan pembangunan
		Rendahnya kapasitas BUMD
		Belum optimalnya pengadaan barang dan jasa berbasis elektronik

4.1.6.2 Sekretariat DPRD

DPRD merupakan mitra Bupati dan Wakil Bupati yang berkedudukan sama tetapi memiliki fungsi yang berbeda. Dalam melaksanakan fungsinya, DPRD difasilitasi oleh Sekretariat DPRD. Adapun tugas Sekretariat DPRD diantaranya menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan DPRD. Secara umum, kinerja capaian Sekretariat DPRD Kabupaten Seram bagian Barat cukup baik yakni sudah mencapai target yang ditentukan. Namun, dalam pelaksanaan tugas fasilitasi masih mengalami beberapa kendala seperti manajemen internal di sekretariat DPRD, kinerja anggota Dewan

serta koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait. Berikut adalah rumusan permasalahan terkait urusan Sekretariat DPRD di Kabupaten Seram bagian Barat.

Tabel 4.35. Permasalahan Pembangunan Daerah Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Sekretariat DPRD

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya fasilitasi anggota dewan	Belum optimalnya koordinasi antar bagian dalam proses pelayanan anggota dewan	SDM aparatur dewan yang perlu ditingkatkan
		Belum optimalnya fasilitasi peningkatan kapasitas anggota dewan berbasis kebutuhan daerah

4.1.7 Unsur Kewilayahan

4.1.7.1 Kecamatan

Fungsi kewilayahan yang dijalankan oleh kecamatan, salah satunya dalam rangka menopang kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Seluruh kecamatan di Kabupaten Seram Bagian Barat telah menyelenggarakan survei kepuasan masyarakat sebagai instrumen pengendalian kualitas pelayanan dan bentuk akuntabilitas sosial. Capaian IKM di seluruh kecamatan belum mengalami peningkatan yang signifikan. Adapun yang masih menjadi kendala terkait implementasi fungsi kecamatan, yakni dalam rangka asistensi pembangunan desa, terutama dalam menyusun database pembangunan desa. Beberapa permasalahan terkait fungsi kecamatan yang perlu menjadi perhatian sebagai berikut:

Tabel 4.37. Permasalahan Pembangunan Daerah Unsur Kewilayahan/Kecamatan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Perlunya	Belum	Masih perlunya penerapan instrument

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
peningkatan kualitas pelayanan publik	optimalnya kualitas system pelayanan publik	pengendalian kualitas pelayanan publik
		Belum optimalnya kualitas pelayanan public kecamatan
	Belum optimally Dukungan terhadap fungsi kewilayahan	Belum optimalnya filitasi dan koordinasi pemberdayaan masyarakat kecamatan
		Belum optimalnya kapasitas ASN tingkat kecamatan dan desa
		Masih perlunya fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa

4.1.8 Urusan Pemerintahan Umum

4.1.8.1 Kesatuan Bangsa dan Politik

Urusan pemerintahan umum terkait pelaksanaan unsur kesatuan bangsa dan politik, sehingga terkait upaya membangun kohesivitas sosial dan peningkatan demokrasi dan kehidupan politik yang kondusif di daerah. Pelaksanaan urusan pemerintahan umum di Kabupaten Seram Bagian Barat memiliki beberapa tantangan sebagai berikut:

Tabel 4.38. Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Pemerintahan Umum

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Masih tingginya konflik sosial	Belum optimalnya kohesivitas sosial	Belum optimalnya pembinaan politik dan wawasan kebangsaan

4.2 Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka

menengah/panjang dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang. Isu strategis selain menggambarkan berbagai permasalahan dan peluang pembangunan yang berbasis kewenangan dan urusan daerah, juga menggambarkan lingkungan strategis supra daerah yang meliputi dinamika lingkungan skala regional, nasional, maupun internasional yang berpotensi memberi dampak terhadap daerah dalam kurun waktu jangka menengah maupun jangka panjang.

4.2.1 Isu Internasional

Kondisi global yang dinamis memunculkan berbagai isu internasional yang harus direspon pemerintah nasional maupun sub nasional di berbagai negara. Terdapat isu yang berangkat dari kesepakatan internasional berupa SDGs atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), yang secara nasional telah direspon dengan kebijakan berupa Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selain itu, kondisi global yang dinamis tercermin dari revolusi industri 4.0 yang membawa peluang sekaligus tantangan bagi komponen masyarakat maupun institusi pemerintah untuk meresponnya dengan mengedepankan digitalisasi yang menekankan efektivitas dan efisiensi. Kondisi global semakin dinamis bahkan terdampak besar dengan adanya Pandemi Covid-19. Seluruh level pemerintahan terdampak, dimana terdapat tuntutan penanganan pandemi agar tidak semakin berdampak kepada kesehatan masyarakat maupun tuntutan pemulihan perekonomian nasional dan daerah.

4.2.1.1 *Sustainable Development Goals (SDGs)*

Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan kesepakatan global sebagai tindak lanjut dari *Milennium Development Goals*. *Sustainable Development Goals (SDGs)* bertujuan untuk menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial, menjaga kualitas lingkungan hidup, pembangunan yang inklusif, dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya. *Sustainable Development Goals (SDGs)* memuat 17 tujuan pembangunan yang meliputi berbagai aspek pembangunan

berkelanjutan, yang terdiri dari empat pilar yaitu ; 1)Pembangunan Sosial; 2)Pembangunan Ekonomi; 3)Pembangunan Lingkungan; 4)Pembangunan Hukum dan Tata Kelola. Tujuh belas tujuan SDGs dilengkapi dengan target-target yang menggambarkan sasaran tertentu. Target-target SDGs tersebut menjadi mandat internasional yang bukan hanya harus dilaksanakan oleh pemerintah pusat, tetapi juga harus diakomodasi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan pada tingkat daerah baik provinsi maupun kabupaten.

4.2.1.2 Revolusi Industri 4.0

Perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi atau dikenal sebagai revolusi industri 4.0 yang semakin massif dewasa ini memberikan dampak signifikan bagi sektor publik. Banyak pihak memprediksi bahwa kekuatan revolusi industri 4.0 akan mampu meningkatkan otonomi warga negara dan juga mendisrupsi praktik-praktik tradisional dalam pemerintahan. Sebagai contoh, warganegara mempunyai akses yang lebih luas terhadap data-data publik dan mampu memproduksi serta menyebarkan isu-isu publik ke khalayak. Pada saat yang sama, ekspektasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan juga semakin meningkat akibat adanya tuntutan efisiensi dan kecepatan pelayanan, otomatisasi pelayanan publik, serta penggunaan teknologi digital dalam berbagai aspek pembangunan.

Pada akhirnya, hadirnya revolusi industri 4.0 menghadirkan tantangan yang lebih kuat bagi sektor-sektor publik terutama dalam pelaksanaan pelayanan publik dan pembangunan di Indonesia. Salah satu poin paling krusial dari revolusi industri 4.0 adalah proses digitalisasi. Proses digitalisasi termasuk penggunaan teknologi dalam berbagai sektor pembangunan dan pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, perdagangan, perindustrian, perizinan, pariwisata dan sektor lainnya. Berkaitan dengan itu, pemerintah pusat telah menjadikan digitalisasi sebagai suatu katalisator dalam upaya perbaikan pelayanan publik dan pembangunan daerah.

Pada akhir tahun 2020, *Asian Development Bank* (ADB) mencatat bahwa tingkat inovasi dan digitalisasi Indonesia hanya sebesar 0,08, jauh di bawah Thailand dan Vietnam yang masing-masingnya sebesar 0,62 dan 0,44. Lebih dari itu, peringkat

Indonesia juga masih berada di bawah negara ASEAN lainnya yaitu Filipina sebesar 0,14 dan Kamboja sebesar 0,12. Karena itu, proses digitalisasi di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan meskipun sudah menuju ke arah yang lebih baik. Data lain juga disebutkan berdasarkan *E-Government Survey 2020* yang dilakukan oleh *United Nations* mencatat bahwa tingkat implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Indonesia berada pada peringkat ke-88 dari 193 negara. Dengan demikian, dari sisi daya saing penyelenggaraan *e-government* di Indonesia masih berada di bawah negara-negara lain di ASEAN.

Kebijakan transformasi digital di Indonesia diarahkan pada dua sektor prioritas yaitu pelayanan publik dan pengembangan ekonomi lokal. Transformasi digital dalam pelayanan publik bersinggungan dengan kebijakan penyelenggaraan dan pelayanan publik berbasis elektronik atau yang dikenal sebagai *e-government*. Kebijakan pemerintah berbasis elektronik sudah digulirkan jauh sebelum isu digitalisasi di Indonesia muncul menjadi agenda publik. Pada tahun 2003, pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-Government*. Pengembangan *e-government* ini mencakup perbaikan penyelenggaraan perencanaan, penganggaran, dan pelayanan publik berbasis elektronik.

Transformasi digital pada bidang ekonomi juga telah digalakkan pemerintah pusat melalui berbagai instrument kebijakan. Potensi ekonomi digital di Indonesia sangat besar dengan pengguna internet yang terus mengalami kenaikan. Ada lima teknologi yang paling potensial memicu pertumbuhan ekonomi digital di kawasan Asia Tenggara, kelima hal tersebut yaitu *mobile internet*, *big data*, *internet of things*, *automation of knowledge*, dan *cloud technology*. Indonesia diprediksi akan menjadi negara dengan pertumbuhan ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara dan masuk ke dalam 5 besar ekonomi dunia pada tahun 2030. Selain itu, besarnya potensi ekonomi digital diprediksi akan berkontribusi terhadap 10% PDB pada tahun 2025.

Namun demikian, potensi tersebut belum bisa dimanfaatkan secara maksimal karena beberapa tantangan. Badan Koordinasi Penanaman Modal menyebut setidaknya terdapat 5 Tantangan Digital Ekonomi di Indonesia dari perspektif investasi yaitu: 1) *cyber*

security atau keamanan data digital; 2) persaingan yang semakin ketat dan terkonsentrasi di wilayah Jabodetabek; 3) kualitas sumber daya manusia; 4) ketersediaan jaringan internet; dan 5) regulasi yang belum *agile* dan mengikuti perkembangan jaman.

Pada level daerah, digitalisasi pelayanan publik dan digitalisasi ekonomi juga memberikan tantangan dan peluang. Di sektor pemerintahan dan pelayanan publik, pemerintah daerah memiliki peluang untuk memperbaiki kualitas layanan publik di berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, pelayanan sosial, dan perizinan yang lebih responsif. Namun demikian, tantangan pada sisi infrastruktur dan kesiapan SDM juga menjadi hal yang harus diintervensi. Demikian halnya dengan peluang ekonomi digital yang terus tumbuh di daerah. Problem terbesar yang dihadapi adalah kualitas SDM dan juga jaringan internet yang tidak memiliki kualitas setara di berbagai daerah. Dengan demikian, isu ini harus menjadi pedoman bagi daerah dalam perumusan isu dan kebijakan strategis di masa yang akan datang.

4.2.1.3 Pandemi COVID-19

Pada akhir tahun 2019, dunia dihadapkan pada permasalahan kesehatan yaitu Covid-19 yang dapat menyebabkan penurunan aktivitas (kontraksi) sosial dan juga perekonomian. Pada awal Maret tahun 2020, WHO menyatakan Covid-19 sebagai suatu pandemi yang harus direspon dan dicegah secara baik di seluruh dunia. Akibatnya pada semester I tahun 2020 Indonesia terimbas pandemi Covid-19 yang memerlukan pembatasan fisik (*physical distancing*) dan pembatasan sosial (*social distancing*) yang berpengaruh pada aktivitas sosial dan juga perekonomian secara nasional.

Positif perbaikan perekonomian setelah diterapkannya kebijakan *new normal*. Meskipun demikian, perlu adanya suatu kebijakan dan respon khusus daerah dalam menghadapi pandemi Covid-19 serta dampak terhadap sektor perekonomian daerah. Untuk Kabupaten Seram Bagian Barat pertumbuhan COVID tidak terlalu mencolok bahkan sampai dengan akhir tahun 2021 rata-rata, pertumbuhan COVID di Kabupaten Seram Bagian Barat adalah 0,001% atau 1/1000. Sedangkan jumlah kasus terkonfirmasi dari tahun 2020 sampai dengan akhir Februari 2022 adalah 348 orang yang (+)/ positif. Yang sembuh 321 orang, dan

meninggal dunia 22 orang, dan yang sedang berada dalam perawatan berjumlah 7 orang. Pada Tahun 2020, Kabupaten Seram Bagian Barat dikenal sebagai daerah tertinggal, yang mampu menciptakan inovasi dalam tata kehidupan baru *New Normal Live*, hidup aman Bersama Covid-19, oleh Kementerian Dalam Negeri Kabupaten Seram Bagian Barat, di anugrahi hadiah pemenang lomba inovasi daerah, dan penghargaan kinerja daerah sebesar Rp.27 miliar.

Pandemi Covid-19 yang menyebabkan kontraksi pertumbuhan ekonomi juga berpengaruh dari aspek distribusi dan pasaran sebab, pergeseran tatanan ekonomi suatu wilayah tentunya akan menyebabkan berbagai permasalahan lain yang saling berkaitan seperti peningkatan harga pasar, disisi lain dampak berdampak bagi para pekeja diluar yang karena pandemik Covid-19 harus Kembali ke daerah yang mengakibatkan, menambah angka pengangguran terbuka, dan juga mempengaruhi jumlah penduduk miskin di Kabupaten Seram bagian Barat, peningkatan tingkat inflasi, dan ketimpangan pendapatan. Hal tersebut tentunya perlu kebijakan khusus yang disiapkan oleh pemerintah daerah yang sifatnya preventif dan responsif sehingga berbagai dampak negatif dari pandemi Covid-19 bisa lebih diminimalisir.

4.2.1.4 Isu Nasional didalam RPJMN 2020-2024

Isu strategis nasional tidak lepas dari Arahan Presiden Republik Indonesia sebagai dasar penyusunan RPJMN Tahun 2020-2024, yaitu:

1. **Pembangunan SDM:** membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri.
2. **Pembangunan Infrastruktur:** melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat.

3. **Penyederhanaan Regulasi:** menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan *omnibus law* terutama menerbitkan 2 undang-undang, yaitu UU Cipta Kerja dan UU Pemberdayaan UMKM.
4. **Penyederhanaan Birokrasi:** memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi.
5. **Transformasi Ekonomi:** melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Lima Arah Presiden diinstrumentasikan ke dalam 7 Agenda Pembangunan dan masing-masing agenda pembangunan memiliki lingkungan dan isu strategis sebagai berikut:

Tabel 4.39. Agenda Pembangunan Nasional 2020-2024

No	Agenda Pembangunan	Uraian	Lingkungan dan Isu Strategis
1.	<p>Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan:</p> <p>Peningkatan inovasi dan kualitas investasi merupakan modal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata</p>	<ul style="list-style-type: none">• Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan, sumberdaya air, sumber daya energi, serta kehutanan• Akselerasi peningkatan nilai tambah pertaniandan perikanan, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital	<ul style="list-style-type: none">• Keberlanjutan dan ketersediaan SDA sebagai modal utama pembangunan makin berkurang.• Efektivitas tata kelola sumber daya ekonomi menghadapi tantangan terkait daya dukung lingkungan, ketersediaan lahan, keterbatasan infrastruktur, penataan ruang, serta kesejahteraan petani- nelayan dan masyarakat yang bergantung penghidupannya pada pemanfaatan SDA• Transformasi struktural berjalan lambat, yaitu Indonesia belum mampu melanjutkan transformasi sosial ekonomi yang terhenti akibat krisis moneter• Revolusi industri 4.0 dan ekonomi digital, yaitu Indonesia memiliki keunggulan dalam hal harga, namun tertinggal dalam

No	Agenda Pembangunan	Uraian	Lingkungan dan Isu Strategis
			infrastruktur serta kesiapan dan pemanfaatan oleh masyarakat dan institusi pemerintahan.
2.	Mengembang kan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan: Bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan harmonisasi rencana pembangunan dan pemanfaatan ruang.	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan sektor/komoditas/ kegiatan unggulandaerah • Penyebaran pusat-pusat pertumbuhan ke wilayah yang belum berkembang • Penguatan kemampuan SDM dan Iptek berbasiskeunggulan wilayah • Peningkatan infrastruktur danpelayanan dasar secara merata • Peningkatan dayadukung lingkungan serta ketahanan bencana dan perubahan iklim 	<ul style="list-style-type: none"> • Tingginya angka kemiskinan diwilayah timur Indonesia (18%) • Masih adanya ketimpangan pendapatan dengan rasio giniperdesaan 0,317 dan perkotaan 0,392 • Terjadinya konsentrasi kegiatan ekonomi di KawasanBarat Indonesia, terutama Pulau Jawa • Terbatasnya sarana prasarana, aksesibilitas, dan belum optimalnya pengembangan ekonomi lokal di daerah tertinggal, desa, kawasan pedesaan, kawasan transmigrasi, dan kawasan perbatasan
3.	Meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya	<ul style="list-style-type: none"> • Pengendalian penduduk dan penguatan tatakelola kependudukan 	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah penduduk usia produktif yang besar harus dimanfaatkan untuk memaksimalkan

No	Agenda Pembangunan	Uraian	Lingkungan dan Isu Strategis
	<p>saing:</p> <p>Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata diseluruh wilayah</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial • Peningkatan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta • Peningkatan pemerataan layanan pendidikan • Berkualitas • Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan Pemuda • Pengentasan kemiskinan • Peningkatan produktivitas dan daya saing 	<p>bonus demografi, jika tidak dikelola baik dapat menyebabkan tingginya tingkat pengangguran, konflik sosial, serta tekanan pada pangan dan lingkungan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kesejahteraan penduduk meningkat, namun jumlah penduduk yang rentan jatuh miskin saat terjadi guncangan masih cukup tinggi • Derajat kesehatan dan tingkat pendidikan membaik, namun belum menjangkau seluruh penduduk • Perlindungan dan pemenuhan hak anak belum optimal, kesenjangan gender masih relatif tinggi dan kelembagaan PUG belum efektif, serta peran dan partisipasi pemuda dalam pembangunan belum optimal, serta sebagian memiliki perilaku beresiko • Elastisitas terhadap tingkat kemiskinan menurun sehingga laju penurunan kemiskinan cenderung melambat

No	Agenda Pembangunan	Uraian	Lingkungan dan Isu Strategis
			<ul style="list-style-type: none"> • Produktivitas dan daya saing yang masih perlu ditingkatkan. Peringkat SDM Indonesia 65 dari 130 negara
4.	Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan: Revolusi mental sebagai gerakan kebudayaan memiliki kedudukan penting dan berperan sentral dalam pembangunan untuk mengubah cara pandang, sikap, perilaku yang berorientasi pada kemajuan dan kemodernan	<ul style="list-style-type: none"> • Revolusi mental dan pembinaan ideologi pancasila • Pemajuan dan pelestarian kebudayaan • Moderasi beragama • Penguatan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas 	<ul style="list-style-type: none"> • Melemahnya ideologi pancasila dan ketahanan budaya bangsa • Belum optimalnya pemajuan kebudayaan Indonesia • Belum mantapnya pendidikan karakter dan budi pekerti • Masih lemahnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai ajaran agama • Belum kukuhnya moderasi beragama untuk memperkuat toleransi dan kerukunan • Belum optimalnya peran keluarga • Rendahnya budaya literasi, inovasi, dan kreativitas
5.	Memperkuat infrastruktur untuk mendukung	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan infrastruktur pelayanan dasar 	<ul style="list-style-type: none"> • Keterbatasan akses perumahan dan permukiman yang layak, aman, dan

No	Agenda Pembangunan	Uraian	Lingkungan dan Isu Strategis
	<p>pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar:</p> <p>bertujuan mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan konektivitas multimoda untuk mendukung pertumbuhan ekonomi • Pembangunan infrastruktur perkotaan • Pembangunan energi dan ketenagalistrikan • Pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK untuk transformasi digital 	<p>terjangkau</p> <ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya peningkatan akses air minum layak dan aman • Belum optimalnya peningkatan akses layanan sanitasi layak dan aman • Pengelolaan air tanah dan air baku berkelanjutan yang masih menghadapi tantangan tingkat layanan penyediaan, kuantitas dan kualitas air, dan permasalahan pemanfaatan teknologi untuk menjamin air baku • Keselamatan dan keamanan transportasi yang masih menghadapi permasalahan tingginya angka kematian akibat kecelakaan • Ketahanan kebencanaan infrastruktur • Waduk multiguna dan modernisasi irigasi yang menghadapi tantangan kapasitas tampungan air masih rendah

No	Agenda Pembangunan	Uraian	Lingkungan dan Isu Strategis
			<p>karena terbatasnya jumlah bendungan, embung, dan penampung air lainnya</p> <ul style="list-style-type: none"> • Infrastruktur ekonomi yang menghadapi tantangan pada aspek konektivitas jalan, kereta api, laut, udara, dan darat • Infrastruktur perkotaan yang masih menghadapi tantangan: transportasi perkotaan; energi dan ketenagalistrikan perkotaan; infrastruktur dan ekosistem TIK perkotaan; penyediaan akses air minum dan sanitasi yang layak dan aman di perkotaan; serta penyediaan akses perumahan dan permukiman layak, aman, terjangkau di perkotaan. <p>Energi dan ketenagalistrikan yang menghadapi tantangan keberlanjutan penyediaan, akses dan keterjangkauan, serta kecukupan penyediaan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Transformasi digital memiliki tantangan

No	Agenda Pembangunan	Uraian	Lingkungan dan Isu Strategis
			penuntasan dan pemanfaatan infrastruktur TIK, serta fasilitas pendukung transformasi digital
6.	Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim: Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung SDA dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana dan perubahan iklim	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kualitas lingkungan hidup • Peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim • Pembangunan rendah karbon 	<ul style="list-style-type: none"> • Tren IKLH nasional menunjukkan kualitas air semakin memburuk, kualitas udara secara absolut menurun, dan tutupan lahan mengalami perbaikan • Indonesia memiliki riwayat kejadian bencana yang tinggi • Penurunan emisi gas rumah kaca yang mendekati target
7.	Memperkuat stabilitas politik, hukum dan transformasi pelayanan publik: Negara wajib hadir dalam melayani dan melindungi segenap bangsa, serta	<ul style="list-style-type: none"> • Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan berkualitas • Penataan kapasitas lembaga demokrasi, penguatan kesetaraan dan kebebasan • Perbaikan sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber • Peningkatan akses terhadap keadilan dan 	<ul style="list-style-type: none"> • Dinamika geopolitik global, antara lain depolarisasi pusat gravitasi politik internasional, instabilitas kawasan Timur Tengah, dinamika kebijakan luar negeri negara adidaya, melemahnya tata kelola global dan menguatnya unilateralisme • Tantangan nasional berupa demokrasi

No	Agenda Pembangunan	Uraian	Lingkungan dan Isu Strategis
	menegakkan kedaulatan negara	<p>sistem anti korupsi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri • Peningkatan rasa aman, penguatan kemampuan pertahanan dan industri pertahanan 	<p>prosedural, kompleksitas pelayanan birokrasi dan penegakan hukum, perilaku koruptif, potensi ancaman kedaulatan negara, dan kecenderungan meningkatnya kejahatan transnasional</p>

4.2.1.5 Isu Strategis Provinsi Maluku didalam RPJMD 2019-2014

Perumusan isu strategis Provinsi Maluku dalam perencanaan pembangunan daerah periode pembangunan 2019-2024, dapat diselaraskan dengan arah kebijakan tahap IV RPJPD Provinsi Maluku yang telah dikaji dan dianalisis permasalahan pembangunannya. Berkaitan dengan hal tersebut, berdasarkan hasil analisis terhadap permasalahan pembangunan dan tantangan pembangunan sebagaimana dijabarkan pada isu internasional, isu nasional, isu regional, maupun telaahan RTRW dan KLHS Perubahan RPJMD Maluku, maka dapat diindikasikan bahwa isu strategis pada perubahan rencana pembangunan jangka menengah Provinsi Maluku periode pembangunan 2019-2024 dijabarkan sebagai berikut:

a) Reformasi Birokrasi

Secara menyeluruh Manajemen birokrasi yang baik dan dinamis serta yang melayani, diantaranya sangat ditentukan oleh kompetensi birokratnya dan atmosfir budaya kerja yang baik. Sejalan dengan pengelolaan pemerintahan dalam semangat otonomi daerah, dimana kabupaten/kota memiliki kewenangannya sendiri yang secara garis besar terpisah dari kewenangan pemerintah provinsi, sehingga pada implementasinya tak jarang ditemukan adanya ketidakselarasan penyelenggaraan pemerintahan/pelaksanaan pembangunan antar level pemerintahan yang secara tidak langsung berdampak pada pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan.

Hal ini terlihat diantaranya tidak terintegrasinya konsep pengembangan wilayah provinsi dengan kabupaten/kota dan tidak selarasnya skenario/strategi penanggulangan kemiskinan provinsi dengan kabupaten/kota. Dalam hal pelayanan publik, masyarakat (publik) selalu menuntut kualitas pelayanan publik dari birokrat, meskipun tuntutan ini tidak sesuai dengan harapan karena pelayanan publik secara empiris masih ditandai dengan hal-hal antara lain adanya ketidakpastian, berbelit-belit, lambat dan berbiaya tinggi. Untuk itu diharapkan adanya perspektif baru untuk layanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance) ke depannya.

b) Sumber Daya Manusia Unggul dan Kompetitif

Derajat dan kualitas SDM menjadi penggerak utama dalam pembangunan. Hal tersebut penting menjadi perhatian mengingat tersedianya sumber daya manusia yang potensial, memiliki kompetensi atau latar belakang pendidikan serta keahlian yang diharapkan akan mampu memiliki daya saing dalam persaingan di pasar tenaga kerja. Oleh karena itu, optimalisasi capaian pendidikan dan kesehatan perlu diupayakan untuk memperbaiki derajat kehidupan masyarakat melalui peningkatan kapasitas individu sehingga akan

tercipta generasi yang berkualitas dan tangguh. Adanya pandemi Covid-19 sejak awal tahun 2020 mengancam upaya-upaya peningkatan sumber daya manusia yang telah dilakukan sebelumnya. Dalam jangka panjang, diperkirakan terjadi ancaman *lost generation* pada kelompok usia sekolah saat ini. Generasi yang hilang ditandai dengan kondisi kesehatan yang rentan, Selain itu, pembatasan kegiatan ekonomi menyebabkan turunnya kesejahteraan masyarakat dan berimbas pada turunnya asupan gizi. Pembatasan aktivitas di luar rumah mengakibatkan turunnya potensi kecerdasan sosio-emosional yang dialami anak-anak dan generasi muda. Nilai-nilai budaya masyarakat terancam luntur dan tergantikan dengan budaya dari luar yang tidak semuanya selaras dengan norma-norma yang telah berlaku. Bahkan sebelum terjadinya pandemi Covid-19, ancaman ini telah menjadi perhatian masyarakat.

c) Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan dan Berdaya Saing

Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam diharapkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidup. Pembangunan berkelanjutan adalah proses pembangunan yang berprinsip memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan.

Salah satu faktor yang harus dihadapi untuk mencapai pembangunan berkelanjutan adalah bagaimana menjamin keberlanjutan/kelestarian lingkungan tanpa mengorbankan kebutuhan pembangunan ekonomi dan keadilan sosial. Berbicara daya saing, banyak aspek yang seyogianya menjadi perhatian. Perlu penataan dalam peningkatan daya saing daerah, seperti produktivitas, nilai tambah dan logistik. Terkait produktivitas, hal utama yang perlu ditata adalah kualitas sumber daya manusia, peningkatan kapasitas dan ketrampilan masih sangat dibutuhkan. Nilai tambah produk pun masih rendah, demikian juga logistik dalam kabupaten/kota di Provinsi Maluku yang masih berbiaya tinggi/mahal harganya. Ketiga faktor ini (produktivitas, nilai tambah dan logistik) saling berkaitan satu dengan lainnya. Persoalan produktivitas erat kaitannya dengan masalah rendahnya nilai tambah. Rantai produk atau jalur distribusi yang terlalu panjang disertai dengan minimnya pemanfaatan teknologi dan inovasi dalam proses bisnis usaha juga menjadi salah satu penyebabnya

d) Kemiskinan Ekstrem dan Pengangguran

Kemiskinan merupakan sebab sekaligus akibat gagalnya sebuah pembangunan. Masyarakat miskin memiliki keterbatasan dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan sumber daya lainnya, padahal pendidikan dan kesehatan merupakan prasyarat peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Sumber daya manusia yang rendah akan menurunkan daya saing daerah, yang pada gilirannya akan berimbas pada penambahan angka kemiskinan itu sendiri. Salah satu fokus penanganan kemiskinan saat ini adalah kemiskinan ekstrim dimana pada tahun 2024 diharapkan kemiskinan ekstrim sudah berada pada angka 0 persen. Kemiskinan ekstrem sendiri didefinisikan sebagai kondisi dimana kesejahteraan masyarakat berada di bawah garis kemiskinan ekstrem - setara dengan USD 1.9 PPP (purchasing power parity). Menggunakan definisi tersebut, pada tahun 2021 tingkat kemiskinan ekstrem di Indonesia adalah 4 persen atau 10,86 juta jiwa. Kondisi Provinsi Maluku juga cukup tinggi kemiskinan ekstrim dimana total jumlah penduduk miskin ekstrem di Maluku mencapai 97.747 jiwa dengan total jumlah rumah tangga miskin ekstrem 22.110 rumah tangga. Oleh karena itu, penanganannya memerlukan upaya berbagai pihak agar meningkatkan kompetensi angkatan kerja sekaligus memperluas kesempatan kerja di Maluku. Masih rendahnya kapabilitas tenaga kerja yang terlihat dari jenjang pendidikannya, memaksa pemerintah daerah untuk meningkatkan keterampilan dan kompetensi tenaga kerja dalam mewujudkan kehidupan layak. Diharapkan nantinya, tenaga kerja yang unggul dan kompetitif akan terealisasi sehingga akan menjadi daya Tarik bagi penanam modal maupun meningkatkan penyerapan tenaga kerja daerah/lokal. Pada akhirnya, dengan daya saing yang tinggi akan meningkatkan pendapatan rumah tangganya sehingga terwujud kondisi rumah tangga yang lebih baik. Kondisi kemiskinan dan pengangguran di Provinsi Maluku diperparah dengan merebaknya pandemi Covid-19. Kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat mengakibatkan roda perekonomian melambat, mendorong naiknya angka pengangguran terbuka dan meningkatkan jumlah penduduk miskin.

e) Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang

Provinsi Maluku didominasi oleh pulau-pulau kecil yang memiliki pembangunan beragam dan sulit untuk dimonitoring dan diawasi, dimana sampai saat ini masih terdapat praktik-praktik pemanfaatan ruang yang belum sesuai dengan arahan tata ruang. Selain itu, pengendalian pemanfaatan ruangnya juga belum optimal disebabkan semua kabupaten/kota di Provinsi Maluku telah memiliki 1 (satu) Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) sebagai instrumen pengendali pemanfaatan ruang. Oleh karenanya, perlu adanya dukungan dari Provinsi Maluku dalam percepatan implementasi pengendalian dan pemanfaatan ruang sesuai dengan perencanaan tata ruang wilayah yang telah disusun. Salah satu fungsi dalam pengendalian dan pemanfaatan ruang adalah untuk mempertahankan pemanfaatan fungsi lahan irigasi teknis dan kawasan-kawasan lindung, termasuk didalamnya memperhatikan adanya alih fungsi lahan dan hutan. Sebagai wilayah yang didominasi oleh sektor

pertanian, maka Maluku memiliki potensi alih fungsi lahan dan hutan yang cukup tinggi. Hal ini tentu jika tidak dikontrol dan diawasi akan menyebabkan rusaknya ekosistem lahan dan hutan dengan beberapa dampak negatif sebagai konsekuensinya seperti terjadinya bencana alam.

f) Kerentanan Wilayah Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

Salah satu upaya dalam meningkatkan keamanan dan kenyamanan masyarakat dalam menjalankan aktivitas kesehariannya adalah dengan meningkatkan mitigasi bencana alam, khususnya pada beberapa periode terakhir dimana mitigasi bencana sudah menjadi isu dan perbincangan nasional maupun internasional. Mitigasi bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana (Pasal 1 ayat 6 PP No. 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana).

Beberapa potensi bencana yang dimiliki oleh Provinsi Maluku seperti Banjir, Tanah Longsor, Badai dan Angin Topan, Angin Puting Beliung, Gempa Bumi dan Tsunami, Letusan Gunung Berapi, Gelombang Pasang, Abrasi, Epidemi dan Wabah penyakit, Kemarau dan Kekeringan, Banjir Rob, Kebakaran Hutan, Banjir Bandang dan Kecelakaan Laut. Keseluruhan potensi bencana ini menjadikan pemerintah harus meningkatkan ketahanan bencana sekaligus meningkatkan kualitas penanggulangan dan pemulihan bencana. Isu strategi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim menjadi penting karena komitmen dari pemerintah pusat berdasarkan ratifikasi Paris Agreement pada tahun 2016 sesuai UU No. 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Persetujuan Paris, yang diimplementasikan melalui First Nationally Determined Contribution (NDC) yang merupakan komitmen Indonesia untuk mengurangi reduksi emisi 29% dengan kemampuan sendiri dan target 38% - 41% jika dengan kerjasama internasional. Oleh karena itu, isu penting untuk Maluku yakni Mitigasi Gas Rumah Kaca (GRK) pada sektor energi, limbah, industri, pertanian, kehutanan dan perikanan. Sedangkan adaptasi perubahan iklim meliputi sektor perikanan, pariwisata, air bersih, pertanian/perkebunan, kehutanan, perhubungan laut, serta adaptasi bencana banjir dan longsor.

g) Konektivitas Serta Sarana dan Prasarana

Provinsi Maluku secara fisik terdiri atas 1,340 pulau dan didominasi oleh pulau kecil serta tata letaknya yang tersebar dalam wilayahnya seluas 712.479,65 Km² dan mempunyai luas laut mencapai 658.294,69 Km² atau 92,4% dibandingkan dengan luas daratan (terrestrial) yang luasnya hanya 54.184,96 Km² atau sekitar 7,6%. Karakteristik geografis tersebut menunjukkan bahwa potensi Provinsi Maluku didominasi akan karakteristik wilayah yang bercirikan

kepulauan sebagai keunggulan komparatif terhadap wilayah provinsi lainya. Potensi wilayah yang bercirikan kepulauan tidak hanya mencakup daratan tetapi juga laut beserta ekosistemnya. Selain itu, terdapat 5 kabupaten/kota di Provinsi Maluku yang berada pada Kawasan perbatasan. Kabupaten Maluku Barat Daya, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual merupakan kabupaten/kota yang berbatasan laut dengan negara tetangga Australia dan Timor Leste. Pemerataan pembangunan yang lebih berorientasi pada pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan, menjadi isu strategis sebagai mainstream pembangunan ekonomi ke depan. Strategi kebijakan pembangunan yang berpihak kepada pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan akan terus dipacu, guna lebih meningkatkan daya saing menuju kemakmuran yang berkeadilan.

h) Minimnya Capaian Vaksinasi COVID-19

Maluku merupakan provinsi terendah dengan dampak kematian akibat Covid-19 di Indonesia. Namun, capaian vaksinasi Covid-19 di Maluku juga termasuk paling minim dengan dosis pertama baru belum mencapai 70 persen. Hal ini dikarenakan beberapa kendala di antaranya terkait minimnya ketersediaan jaringan internet di pulau terpencil, kurangnya ketersediaan lemari pendingin untuk penyimpanan vaksin, rendahnya konektivitas antar wilayah, serta cuaca ekstrem yang melanda pada waktu-waktu tertentu. Beberapa daerah yang masih minim vaksinasi dilakukan penggenjotan terhadap pemberian vaksin melalui berbagai upaya baik pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota maupun instansi vertikal bahkan kepolisian dan TNI.

i) Investasi, Pengembangan Pariwisata dan Budaya Daerah

Keragaman sumber daya alam terutama pariwisata, kekayaan budaya dan adat istiadat, agama maupun sumber daya sosial lainnya merupakan kekayaan dan keunggulan Provinsi Maluku. Namun keragaman ini belum dikelola dan dikembangkan secara baik. Pengelolaan keragaman multi dimensi ini sudah seharusnya mendapat perhatian serius dan porsi strategis dalam kebijakan pembangunan dan pengembangan wilayah Provinsi Maluku ke depannya, yang diarahkan pada pengembangan berbasis kearifal lokal dan konservasi kultural (yang tidak hanya bersifat seremonial). Investasi pun perlu terus ditingkat, karena suatu wilayah atau usaha bisa berdaya saing didukung juga oleh investasi. Tidak hanya investasi asing yang terus ditingkatkan, investasi dari dalam negeri juga perlu terus didorong. Karena dari investor dalam negeri pada akhirnya nilai tambah yang tercipta akan dinikmati oleh penduduk Indonesia sendiri.

j) Maluku Sebagai Lumbung Ikan Nasional

Pemerintah Provinsi Maluku telah mencanangkan program Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional/ LIN. Hal ini berarti menjadikan Maluku sebagai produsen perikanan terbesar di Indonesia, yang mampu mensuplai kebutuhan konsumsi masyarakat dan industri nasional dan menjadi eksportir utama komoditas perikanan Indonesia. Hal ini didasari dari potensi sumber daya ikan Provinsi Maluku yang diperkirakan mencapai kurang lebih satu juta ton dengan jumlah tangkapan sekitar 80 persen per tahun. Adapun daerah tangkapan dibagi dalam 3 Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) yaitu: (1) WPP Laut Banda, (2) WPP Laut Seram dan Teluk Tomini; dan (3) WPP Laut Arafura.

Pembangunan LIN ini merupakan salah satu bagian dari konsep ekonomi biru yang dijalankan pemerintah untuk mengoptimalkan pengelolaan potensi sektor ekonomi yang berbasis kemaritiman sehingga diharapkan mampu menjadi salah satu motor revitalisasi perekonomian pasca COVID-19 maupun menyeimbangkan perekonomian Indonesia bagian Timur.

k) Pengembangan Blok Migas

Provinsi Maluku dianugerahi Tuhan YME limpahan potensi sumber daya alam berupa minyak dan gas bumi yang cukup menjanjikan. Terdapat total 9 Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi (Selanjutnya disebut WK Migas) baik yang masih dalam tahap eksplorasi maupun yang sudah dalam tahap eksploitasi dan berproduksi. Dua buah lapangan migas yang terletak di Pulau Seram yaitu WK Bula dan WK Non Bula, pada tanggal 1 November 2019 (Migas, 2019) resmi diperpanjang selama 20 tahun. Semenetera itu WK Masela yang selama ini menjadi tumpuan harapan untuk masyarakat dan pemerintah provinsi maluku akhirnya pada bulan Oktober 2019 telah resmi disetujui usulan perubahan kontraknya (INPEX, 2019). Potensi Pendapatan Daerah yang berasal dari dividen dari skema PI 10% dari WK Masela diprediksi oleh banyak pengamat (Antara, 2019) akan menyentuh angka Rp. 30 Trilyun per tahun untuk porsi kepemilikan 5% atau setara Rp. 60 Trilyun per tahun untuk total porsi kepemilikan 10%.

l) Pembangunan Ambon New Port

Pemerintah memiliki rencana untuk membangun Pelabuhan Ambon Baru (New Ambon Port) yang akan disatukan dengan pelabuhan Perikanan Terintegrasi, guna mendukung penetapan Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional (LIN). Pembangunan infrastruktur Pelabuhan baru ini akan dibangun dengan menggunakan APBN. Diharapkan nantinya Pelabuhan Ambon Baru ini akan menjadi pusat pertumbuhan industri pengolahan ikan dan konsolidasi kargo dari wilayah Indonesia Timur. Selain itu, Pelabuhan ini akan mendorong konektivitas antara Indonesia dengan Australia maupun antar wilayah di NKRI.

Pada perencanaannya pula Pelabuhan Ambon Baru akan diwujudkan sejumlah fasilitas terminal petikemas internasional dan domestik, terminal ro-ro, pelabuhan perikanan, tempat pengolahan ikan, kawasan industri logistik, terminal LNG dan pembangkit listrik serta dermaga ultimate dengan panjang 1.000 meter.

4.2.2 Telaah RTRW Kabupaten Seram Bagian Barat

Penyusunan RPD Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2023-2026 berpedoman pada tujuan RTRW Kabupaten Seram Bagian Barat yaitu “Penataan ruang wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan, sebagai bagian dari gugusan kepulauan, dengan pembangunan berbagai sektor dalam masyarakat berbudaya Maluku yang luhur.” Pengaturan tata ruang sesuai peruntukan menjadi tantangan yang harus dihadapi untuk meminimalisir terjadinya krisis tata ruang. Penataan ruang yang baik perlu memperhatikan keterhubungan antara perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang. Tujuan tersebut diwujudkan melalui berbagai kebijakan perencanaan ruang wilayah, yaitu:

1. Strategi Penataan Ruang Wilayah :

- a) Strategi penataan ruang wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat dalam rangka “peningkatan aksesibilitas di dalam dan antarwilayah Kabupaten Seram Bagian Barat dengan wilayah lainnya, dalam konteks wilayah sebagai bagian gugusan kepulauan” meliputi:
 - meningkatkan dan mengembangkan jaringan jalan pada masing-masing pulau beserta komplementernya berupa pelabuhan laut, sebagai prasarana bagi angkutan jalan raya dan pelayaran pesisir pada pulau yang bersangkutan;
 - meningkatkan dan mengembangkan pelabuhan laut dan/atau pelabuhan penyeberangan, sebagai prasarana bagi angkutan laut dan angkutan penyeberangan antarpulau dalam wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat;
 - meningkatkan dan mengembangkan jaringan jalan raya, pelabuhan laut, pelabuhan penyeberangan, dan bandar udara, sebagai prasarana bagi angkutan jalan raya, angkutan laut, angkutan penyeberangan, dan angkutan udara, antarwilayah Kabupaten Seram Bagian Barat dengan wilayah lainnya.
- b) Strategi penataan ruang wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat

dalam rangka “peningkatan fungsi-fungsi pelayanan sosial, ekonomi, dan budaya pada pusat-pusat kegiatan dan pelayanan” meliputi:

- mengembangkan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), Pusat Kegiatan Lokal (PKL), Pusat Pelayanan Kawasan (PPK), dan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL), yang berjenjang atau berhirarki dalam memberikan pelayanan, baik di kawasan permukiman perkotaan maupun sampai ke permukiman perdesaan.
- mengembangkan dan meningkatkan pelayanan dalam pusat kegiatan dan pusat pelayanan tersebut dengan susunan fungsi sebagai tempat permukiman, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, pelayanan transportasi, pelayanan komunikasi/ telekomunikasi, dan kegiatan ekonomi

c) Strategi penataan ruang wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat dalam rangka “peningkatan produktivitas kegiatan pertanian, perikanan, dan kehutanan, yang didukung pengembangan industri pengolahan” meliputi:

- meningkatkan dan mengembangkan produktivitas kegiatan pertanian, yang meliputi: pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan, baik pada kawasan yang telah berkembang sebelumnya maupun pada kawasan pengembangan yang baru, yang didukung oleh industri pengolahan hasil pertanian;
- meningkatkan dan mengembangkan produktivitas kegiatan perikanan, yang meliputi perikanan tangkap dan perikanan budidaya, yang didukung oleh industri pengolahan hasil perikanan;
- meningkatkan dan mengembangkan produktivitas kegiatan kehutanan, yang didukung industri pengolahan hasil hutan.

d) Strategi penataan ruang wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat dalam rangka “pengembangan kegiatan pariwisata dan ekonomi kreatif” meliputi:

- mengembangkan dan meningkatkan kegiatan pariwisata, baik pada objek dan destinasi wisata yang ada maupun pengembangan objek dan destinasi wisata yang baru;
- mengembangkan ekonomi kreatif, yang selaras dengan potensi dan peluang pengembangan yang ada di dalam wilayah dan di kalangan masyarakat;

- memfasilitasi peran aktif masyarakat dalam peningkatan dan pengembangan dalam kegiatan pariwisata dan ekonomi kreatif.
- e) Strategi penataan ruang wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat dalam rangka “pemanfaatan sumber daya alam lainnya dengan berwawasan lingkungan” meliputi:
- mengembangkan kegiatan pemanfaatan sumber daya alam pada ruang di permukaan dan di bawah permukaan bumi (ruang dalam bumi) seperti kegiatan pertambangan dan lainnya, dengan menerapkan wawasan lingkungan, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - mengembangkan kegiatan pemanfaatan sumber daya alam pada ruang di perairan atau badan air, dan ruang udara, dengan menerapkan wawasan lingkungan, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f) Strategi penataan ruang wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat dalam rangka “pemantapan dan peningkatan fungsi kawasan lindung” meliputi:
- memantapkan tata batas kawasan lindung, yang meliputi: kawasan hutan lindung, kawasan hutan konservasi (suaka alam/pelestarian alam), perlindungan setempat, dan kawasan ekosistem mangrove;
 - merehabilitasi dan meningkatkan kualitas kawasan lindung; dan
 - mempertahankan luas kawasan lindung dan luas kawasan hutan yang telah ditetapkan dalam wilayah Kabupaten Seram bagian barat.
- g) Strategi penataan ruang wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat dalam rangka “pengembangan khusus pada bagian wilayah yang relatif jauh di Kepulauan Pisang dan Kepulauan Lucipara” meliputi:
- mengidentifikasi potensi dan peluang pengembangan di Kepulauan Pisang di Laut Seram, dengan memperhatikan kawasan di sekitarnya berupa gugusan pulau di Laut Seram, di wilayah Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara, dan wilayah Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat;
 - mengidentifikasi potensi dan peluang pengembangan di Kepulauan Lucipara di Laut Banda dengan memperhatikan kawasan di sekitarnya berupa gugusan pulau di perairan Laut Banda di wilayah Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku;
 - mengembangkan kegiatan produksi di wilayah Kepulauan Pisang dan Kepulauan Lucipara tersebut dengan pendekatan teknis pengembangan wilayah frontier yang tidak berhampiran

dengan wilayah lainnya yang telah berkembang atau dikenal dengan “*non-contiguous resource frontier regions*”.

- mengembangkan kegiatan pemanfaatan ruang wilayah Kepulauan Pisang dan Kepulauan Lucipara dengan memperhatikan karakternya sebagai pulau-pulau kecil serta berwawasan lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat melalui rencana pengembangan sistem perkotaan, yang dapat dilihat sebagai berikut :

- PKW (Pusat Kegiatan Wilayah).1 yang berada di Pusat Kawasan Kairatu Ibukota Kecamatan Kairatu, pelabuhan penyeberangan, perdagangan dan jasa, indikasi karakter permukiman perkotaan
- PKL (Pusat Kegiatan Wilayah) 2 yang berada di kawasan perkotaan Piru, Ibukota Kecamatan dan Kabupaten, Pelabuhan, Perdagangan dan Jasa Indikasi karakter permukiman perkotaan ;
- PKL (Pusat Kegiatan Wilayah)2 yang berada di kawasan perkotaan Waesala, Ibukota Kecamatan, Pelabuhan, Perdagangan dan Jasa Indikasi karakter permukiman perkotaan ;
- PKL (Pusat Kegiatan Wilayah)2 yang berada di kawasan perkotaan Taniwel, Ibukota Kecamatan, Pelabuhan, Perdagangan dan Jasa Indikasi karakter permukiman perkotaan ;
- PKL (Pusat Kegiatan Wilayah)2 yang berada di kawasan perkotaan Luhu, Ibukota Kecamatan, Pelabuhan, Perdagangan dan Jasa Indikasi karakter permukiman perkotaan ;
- PPK (Pusat Pelayanan Kawasan)3 yang berada di Kawasan ibu kota kecamatan antara lain; Kamal, Latu, Elpaputih, Hunitetu, Uwen Pantai, Masawoy indikasi karakter permukiman Transisi ke Perkotaan
- PPL (Pusat Pelayanan Lingkungan)4 yang berada di kawasan pedesaan terdiri dari; Kamarian, Kawa, Pelitajaya, Waehatu, Seriholo, Abio Ahiolo, Rambatu, Lisabata, Buria, Sohuwe, Buano, Tahalupu, Loki, Talaga Kambelo dan Pilar.

3. Rencana sistem jaringan prasarana yang terdiri dari

Sistem jaringan jalan dalam rencana struktur ruang dalam wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat

- a) Jalan Nasional (jalan kolektor primer 1) antara lain;
Ruas jalan Latu-Liang, Waeselan-Latu, Kairatu-Waiselan, Akses Pelabuhan ASPD Waipirit, Sp Eti- Kairatu, Piru-Simpang Eti, Sp. Pelitajaya-Piru, Taniwe-Saleman, Piru-Waesala
- b) Jalan Provinsi (jalan Kolektor)
 - Jalan kolektor primer. 2 ditetapkan oleh Provisi
 - Jalan kolektor primer. 3 (Piru-Loki, Loki-Iha) ditetapkan oleh Provinsi
- c) Jalan Kabupaten (jalan kolektor primer 4)
Jalan lingkar pulau Manipa, jalan lingkar Pulau Kelang, jalan lingkar Pulau Buano, Hunitetu-Taniwel, Loki-Luhu, Luhu-Kambelo, Waesala Talaga Kambelo
- d) Jalan Lokal Primer terdiri dari;
Jalan Mata Empat-Desa Eti, Sp Translog-Desa Lumoly, Desa lumoly-Air Terjun Desa Lumoly, Sp jalan Morekau Traslog- Dusun Layuwen. Sp Mata Empat-Tuguh Piru, Sp Mata Empat-Waemeteng Pantai, Tuguh Piru-Kantor Bupati, Sp jalan Trans Piru- Desa Neniari, Belakang Desa Piru Desa-Morekau, Desa Neniari-Desa Morekau, Desa Morekau-Sp Translog, Sp Pelita Jaya-Dusun Loun, Sp Pelita Jaya- TPA Piru, Sp Pelitajaya-Dusun Pulau Osi, Sp Kawa-dusun Pohon Batu, Dusun Pohon Batu-Dusun Patinia, Sp Kawa-Wayoho, Sp Kawa-Dusun waetoso, Sp Waesarisa-Desa kaibobu, Desa Waesarisa-Desa Lumoly, Desa waehatu-Desa lohia Tala, Desa Lohia tala-dusun Kawatu, Desa Waesamu-Desa Rumber, Dusun Kawatu-Desa Rumberu, Desa Hunitetu-Desa Hukuanakota, Desa Hunitetu-Dusun Imabatai, Desa Waemital-Dusun Kawatu, Kilo 9-Dusun Kawatu, Desa Waepirit-dusun Kawatu, Sp Rumah Kay-Air Terjun, Sp Tala-Desa Sumeit Pasinaro, Desa Sumeit Pasinaro-Sp.Watui (Huku Kecil), Desa Huku Kecil-Desa Abio, Dusun Samauru-Dusun Taman Jaya, dusun Melati-Dusun Tanah Merah, Desa Iha Kulur-Dusun Luhu Lama, Dusun Luhulama-Dusun Liaela, Dusun Liaela-Dusun Kasawari, Dusun Kasawari-Dusun Wayasel, Dusun Wayasel-Dusun Air Papaya, Dusun Aipapaya-Dusun Air Besar, Dusun Air Papaya-Dusun Eli Besar, Ruas jalan masuk Pelabuhan Hulung Taniwel, Sp Buria-Desa Latu Rake, Desa Buria-Desa Riring, Desa Riring Desa Rumasoal, Desa rumah Soal-Desa

Neniari Gunung, Desa Seakasale-Desa Makububui.

- e) Jalan Sekunder (potensi) jalan dalam Ibukota Kecamatan terdiri dari;
Kecamatan Seram Barat, Kairatu, kairatu Barat, Inamosol, Amalatu, Elpaputih, Huamual Belakang, Huamual, Taniwel, Taniwel Timur, Kepulauan Manipa.
- f) Jalan Strategis Kabupaten (jalan kolektor primer 4) terdiri dari;
Jalan lingkaran Pulau Manipa, Jalan lingkaran Pulau Kelang, Jalan Lingkaran Pulau Buano, Hunitetu Taniwel, Loki-Hulu, Luhu-Talaga Kambelo, Waisala Talaga kambelo.
- g) Jaringan jalur kereta api, yang terletak di wilayah Kabupaten Seram bagian Barat, secara indikatif dapat diusulkan:
Jaliran jalur utama lingkaran Pulau Seram, yang melalui pusat-pusat: dari Kabupaten Maluku Tengah - Elpaputih – Luhu - Kairatu – Kamal – Piru – Taniwel – Uwen Pantai – ke Kabupaten Maluku Tengah; dan Jaringan jalur cabang di Kabupaten Seram Bagian Barat, yaitu: Piru – Waisala.
- h) Pelabuhan Penyeberangan
- Pelabuhan penyeberangan **Waipirit**, dengan hierarki **Kelas I**, dan status Operasi, yang terletak di Kecamatan Kairatu;
 - Pelabuhan penyeberangan **Waisala**, dengan hierarki **Kelas II**, dan status Operasi, yang terletak di Kecamatan Huamual Belakang; (Catatan: Pelabuhan Penyeberangan Waisala atau Waisala ini terletak di Desa Alang Asaude)
 - Pelabuhan penyeberangan **Wailey**, dengan hierarki **Kelas II**, dan status Rencana, yang terletak di Kecamatan Amalatu; dan
 - Pelabuhan penyeberangan **Luhu**, dengan hierarki **Kelas III**, dan status Rencana, yang terletak di Kecamatan Huamual. (Rencana pelabuhan penyeberangan Luhu, adalah pada lokasi **Papora**, Desa Luhu).
- i) Selain pelabuhan penyeberangan yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 432 Tahun 2017 tersebut ditetapkan juga usulan rencana pelabuhan penyeberangan lainnya di Kabupaten Seram Bagian Barat untuk melayani **penyeberangan lokal antarpulau** dalam wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat, yang terletak di: Piru, di Kecamatan Seram Barat; Pelita Jaya, di Kecamatan Seram Barat; Hatu Piru, di Kecamatan Seram Barat; Pohon Batu, di Kecamatan Seram Barat; Taniwel, di Kecamatan Taniwel; Kelang, di Kecamatan Huamual Belakang; Buano, di Kecamatan Huamual Belakang; Masika Jaya, di Kecamatan

Huamual Belakang; Ketapang, di Kecamatan Huamual; Iha, di Kecamatan Huamual; Talaga Kambelo, di Kecamatan Huamual; Luhutuban, di Kecamatan Kepulauan Manipa; dan Pilar>Namae/Labuang Timur, di Kecamatan Kepulauan Manipa.

- j) Dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 432 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional, telah ditetapkan Sub Lampiran A1 – Penetapan Lokasi dan Hierarki Pelabuhan, dan Sub Lampiran A2 – Rencana Lokasi dan Hierarki Pelabuhan.

Pada Sub Lampiran A1 – Penetapan Lokasi dan Hierarki Pelabuhan, dapat diidentifikasi pelabuhan di Kabupaten Seram Bagian Barat, yaitu meliputi di: Hatu Piru, sebagai Pelabuhan Pengumpan Regional (PR); Waisarisa, sebagai Pelabuhan Pengumpan Lokal (PL); Kairatu, sebagai Pelabuhan Pengumpan Lokal (PL); Buano, sebagai Pelabuhan Pengumpan Lokal (PL); Manipa, sebagai Pelabuhan Pengumpan Lokal (PL); (dalam hal ini disepakati pelabuhan Luhutuban sebagai representasi Manipa yaitu Pulau Manipa di Kecamatan Kepulauan Manipa); Taniwel, sebagai Pelabuhan Pengumpan Lokal (PL).

- k) Selanjutnya pada Sub Lampiran A2 – Rencana Lokasi dan Hierarki Pelabuhan, dapat diidentifikasi yang terletak di wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat, yaitu:

- Ely Besar, sebagai Pelabuhan Pengumpan Lokal (PL), di Kecamatan Huamual;
- Hatunuru, sebagai Pelabuhan Pengumpan Lokal (PL), di Kecamatan Taniwel Timur;
- Kelang, sebagai Pelabuhan Pengumpan Lokal (PL), di Kecamatan Huamual Belakang; (dalam hal ini disepakati **pelabuhan Tahalupu** sebagai representasi Kelang yaitu Pulau Kelang di Kecamatan Huamual Belakang);
- Lokki, sebagai Pelabuhan Pengumpan Lokal (PL), di Kecamatan Huamual;
- Luhu, sebagai Pelabuhan Pengumpan Lokal (PL), di Kecamatan Huamual;
- Pelita Jaya, sebagai Pelabuhan Pengumpan Lokal (PL), di Kecamatan Seram Barat;
- Wailey, sebagai Pelabuhan Pengumpan Lokal (PL), di Kecamatan Amalatu;
- Waisala/Masika Jaya, sebagai Pelabuhan Pengumpan Lokal (PL), di Kecamatan Huamual Belakang.

- l) Selain yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri

Perhubungan Nomor KP 432 Tahun 2017 di atas, ada beberapa usulan rencana pelabuhan di Kabupaten Seram Bagian Barat, yang merupakan pelabuhan lokal, yaitu meliputi: Kamarian, di Kecamatan Kairatu; Tihulale, di Kecamatan Amalatu; Pohon Batu, di Kecamatan Seram Barat; Kaibobo, di Kecamatan Seram Barat; Waeyoho, di Kecamatan Seram Barat; Katapang, di Kecamatan Huamual; Iha, di Kecamatan Huamual; Sole, di Kecamatan Huamual Belakang; Dusun Haya (Desa Sole), di Kecamatan Huamual Belakang; Pulau Kasawari, di Kecamatan Huamual Belakang; Pasir Panjang (Desa Buano Selatan), di Kecamatan Huamual Belakang; Taman Sejarah/Alune (Desa Waesala), di Kecamatan Huamual Belakang; Pulau Luhu (Desa Kelang Asaude), di Kecamatan Kepulauan Manipa Pilar/Namae, di Kecamatan Kepulauan Manipa; Uwe (Desa Masawoy), di Kecamatan Kepulauan Manipa.

- m) Untuk mendukung kawasan perikanan tangkap tersebut, dikembangkan dan direncanakan dikembangkan pelabuhan perikanan, yang meliputi: Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Piru, terletak di Kecamatan Seram Barat, yang merupakan pelabuhan perikanan tertinggi hierarkinya dalam wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat; Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) Waeyoho, terletak di Dusun Waeyoho Desa Kawa, Kecamatan Seram Barat; Selain kedua pelabuhan perikanan tersebut, direncanakan juga pengembangan pelabuhan perikanan yang lebih berkarakter sebagai tempat tambat perahu atau pendaratan perahu (*beaching*), yang melayani atau berkaitan dengan kegiatan perikanan tangkap dan/atau perikanan budidaya. Berdasarkan Laporan Akhir Studi Kelayakan
- n) Pembangunan Bandar Udara Kabupaten Seram Bagian Barat tahun 2016, rencana lokasi bandar udara terpilih adalah di Desa Eti Kecamatan Seram Barat, dengan jarak kurang lebih 15 km dari Piru sebagai ibukota Kabupaten Seram Bagian Barat.
Petunjuk orientasi landas pacu (*runway*) rencana bandar udara tersebut dengan koordinat: 3° 0' 52,18" S, 128° 6' 18," T dan 3° 2' 25,76" S, 128° 6' 46,81" T, dengan arah relatif utara-selatan atau secara nominal orientasi azimuth 15-33.

4. Rencana Pola Ruang Kabupaten Seram Bagian Barat terdiri dari:

Rencana kawasan lindung, yang meliputi:

- a) Kawasan yang memberi perlindungan terhadap badan air

- seluas 625,67 Ha, meliputi 10 Kecamatan antara lain; Kecamatan Kairatu, Kecamatan Kairatu Barat, Kecamatan Amalatu, Kecamatan Inamosol, Kecamatan Elpaputih, Kecamatan Seram Barat, Kecamatan Huamual, Kecamatan Huamual Belakang, Kecamatan Taniwel, Kecamatan Taniwel Timur;
- b) Kawasan yang memberi perlindungan terhadap Kawasan bawahannya hutan lindung seluas 124.531,38 juga meliputi 9 Kecamatan antara lain; Kecamatan Kairatu, Kecamatan Amalatu, Kecamatan Inamosol, Kecamatan Elpaputih, Kecamatan Seram Barat, Kecamatan Huamual Belakang, Kecamatan Kepulauan Manipa, Kecamatan Taniwel, Kecamatan Taniwel Timur;
 - c) Kawasan yang memberi perlindungan terhadap Kawasan sempadan pantai seluas 1,110,50 Ha yang meliputi 9 Kecamatan antara lain Kecamatan Kairatu, Kecamatan Kairatu Barat, Kecamatan Amalatu, Kecamatan Elpaputih, Kecamatan Seram Barat, Kecamatan Huamual, Kecamatan Huamual Belakang, Kecamatan Taniwel, Kecamatan Taniwel Timur;
 - d) Kawasan yang memberi perlindungan terhadap Kawasan sempadan Sungai seluas 885,32 Ha yang meliputi 8 Kecamatan antara lain Kecamatan Kairatu, Kecamatan Kairatu Barat, Kecamatan Amalatu, Kecamatan Elpaputih, Kecamatan Seram Barat, Kecamatan Taniwel, Kecamatan Taniwel Timur;
 - e) Kawasan yang memberi perlindungan terhadap Kawasan Konservasi antara lain;
 - Cagar alam seluas 23.143,45 Ha. meliputi Kecamatan Seram Barat, Huamual dan Huamual Belakang,
 - Taman Wisata Alam seluas 63,15 Ha meliputi Kecamatan Seram Barat dan Huamual
 - Taman Wisata Alam Laut 1,20 Ha meliputi Kecamatan Seram Barat dan Huamual Belakang
 - f) Kawasan yang memberi perlindungan terhadap Kawasan Budidaya antara lain
 - Kawasan Hutan Produksi Tetap seluas 9.809,28 meliputi Kecamatan Kairatu Barat, Inamosol dan Seram Barat
 - Kawasan Hutan Produksi Terbatas seluas 156.209,99 Ha meliputi Kecamatan Kairatu Barat, Amalatu, Inamosol, Elpaputih, Seram Barat, Huamual, Huamual Belakang, Taniwel, Taniwel Timur;
 - Kawasan Hutan Produksi Konservasi seluas 91.895,79 Ha meliputi 11 Kecamatan; Kairatu, Kairatu Barat, Amalatu, Inamosol, Elpaputih, Seram Barat, Huamual, Huamual Belakang, Kepulauan Manipa, Taniwel,

Taniwel Timur;

- Kawasan Pertanian Tanaman Pangan seluas 1.118,73 Ha meliputi 4 Kecamatan; Kairatu, Kairatu Barat, Inamosol, Seram Barat;
 - Kawasan Pertanian Hortikultura seluas 21.180,61 Ha meliputi 11 Kecamatan; Kairatu, Kairatu Barat, Amalatu, Inamosol, Elpaputih, Seram Barat, Huamual, Huamual Belakang, Kepulauan Manipa, Taniwel, Taniwel Timur;
 - Kawasan Perkebunan seluas 60.829,76 Ha meliputi 11 Kecamatan; Kairatu, Kairatu Barat, Amalatu, Inamosol, Elpaputih, Seram Barat, Huamual, Huamual Belakang, Kepulauan Manipa, Taniwel, Taniwel Timur;
- g) Kawasan Pariwisata seluas 5,46 Ha meliputi 2 Kecamatan; Kairatu dan Seram Barat;
- h) Kawasan Perkotaan seluas 5,253,19 Ha meliputi 7 Kecamatan; Kairatu, Kairatu Barat, Inamosol, Seram Barat, Huamual Belakang, Taniwel, ;
- i) Kawasan Perdesaan seluas 3.979,16 Ha meliputi 11 Kecamatan; Kairatu, Kairatu Barat, Amalatu, Inamosol, Elpaputih, Seram Barat, Huamual, Huamual Belakang, Kepulauan Manipa, Taniwel, Taniwel Timur;

5. Kawasan strategis di Kabupaten Seram Bagian Barat

- a) Kawasan Strategis Nasional di Wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat KSN Kawasan Seram (Provinsi Maluku) tersebut merupakan kawasan strategis nasional dengan sudut kepentingan ekonomi., meliputi Pulau Seram yang terkena dengan 3 wilayah kabupaten, yaitu: Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Maluku Tengah, dan Kabupaten Seram Bagian Timur. (*Lampiran X PP Nomor 13/2017 tentang RTRWN*).
- b) Kawasan Strategis Provinsi Maluku di Wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat. Kawasan Strategis Provinsi (KSP) dari aspek kepentingan pertumbuhan ekonomi yang terkena dan/atau terletak di wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat, yaitu **Kawasan Seram Barat (GP 2)**, yang secara spasial dominan terletak dalam wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat. (*Perda Prov. Maluku Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Maluku 2013-2033, Pasal 55 ayat (4) huruf a*)
- c) Kawasan Strategis Kabupaten Seram Bagian Barat (Dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi)
- d) Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) Seram Bagian Barat

dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi meliputi:

- Pusat Pertumbuhan Piru dan sekitarnya; dan
- Pusat Pertumbuhan Kairatu dan sekitarnya.

4.2.3 Penetapan Isu Strategis Kabupaten Seram Bagian Barat

Penetapan isu strategis dilakukan dengan menggunakan prinsip menelaah isu-isu strategi, serta tujuan dan sasaran yang ada dokumen-dokumen perencanaan pembangunan baik jangka panjang maupun jangka menengah nasional dan daerah provinsi maupun kabupaten serta isu-isu global yang menjadi tantangan serta peluang bagi pembangunan di masa yang akan datang. Dengan melihat dan mempertimbangkan, isu strategis dengan memperhatikan berbagai tantangan di masa depan yang penuh dengan ketidakpastian, seperti revolusi industri 4.0. Proses ini juga meliputi penelaahan terkait amanat SDGs dan berbagai dokumen perencanaan yang bersifat jangka Panjang. Apakah akan terulang lagi dilakukan dengan mempertimbangkan hasil evaluasi pembangunan yang telah dilaksanakan. Dengan pengertian bahwa apakah proses ini, analisis terhadap data-data terkait capaian pembangunan yang dilakukan untuk melihat berbagai permasalahan yang dihadapi pada berbagai bidang urusan. Disisi lain juga perlu memperbandingkan kondisi kemampuan internal Kabupaten Seram Bagian Barat. Dengan demikian dalam Menyusun dokumen rencana pembangunan daerah Kabupaten Seram Bagian Barat untuk empat tahun kedepan pada masa transisi kepemimpinan Kelapa Daerah sampai dengan tahun 2026, maka diperoleh delapan isu strategis bagi rencana pembangunan daerah (RPD) Kabupaten seram Bagian Barat antara lain; selama empat tahun kedepan antara lain:

1. Belum optimalnya kualitas sumber daya manusia

Sumber Daya Manusia di Kabupaten Seram Bagian Barat merupakan isu strategis yang akan diproyeksikan menjadi tujuan pembangunan berjenjang dari level internasional, nasional, dan daerah. Pembangunan SDM merupakan bagian dari tujuan pembangunan berkelanjutan dalam pilar pembangunan manusia. Dalam konteks nasional, pembangunan SDM dituangkan dalam tujuh Agenda Pembangunan RPJMN 2020-2024 yaitu Meningkatkan SDM yang Berkualitas dan Berdaya Saing dan Revolusi Mental dan Pembangunan

Kebudayaan. Tujuan tersebut kemudian selaras dengan isu strategis RPJMD Provinsi Maluku tahun 2019–2023 yaitu Sumberdaya Manusia unggul dan kompetatif.

Secara umum pembangunan SDM harus bisa menjangkau lapisan masyarakat mampu maupun kurang mampu. Selain itu, pembangunan dalam berbagai aspek didorong untuk responsif gender, sehingga baik laki-laki maupun perempuan memiliki kesempatan yang sama dalam pembangunan. Kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Seram Bagian Barat, berdasarkan data BPS Tahun 2022, tenaga kerja dengan tingkat Pendidikan dibawah SMA/SMK adalah 84,6 %, sedangkan SMA/SMK adalah 36,93 % dan Sarjana adalah 14,36 %. Itu berarti tenaga kerja dengan tingkat pendidikan menengah kebawah masih berada pada angka 85,93 %. Sedangkan pembangunan Kualitas SDM dapat diukur melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dilihat dari aspek pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan. Nilai IPM Kabupaten Seram Bagian Barat tahun 2021 sebesar 65,83 dengan rata-rata pertumbuhan 0,58 per tahun. Jika dibanding dengan Kabupaten Seram Bagian Timur sebesar 63,83 dan Maluku Barat Daya 62,37. capaian IPM Kabupaten Seram Bagian Barat masih perlu ditingkatkan.

Dilihat dari aspek pendidikan, angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Seram Bagian Barat selama tiga tahun dari tahun 2018-2020 mengalami peningkatan dari 8,85 ke 8,87 capaian tersebut tergolong kurang karena masih berada pada angka 8, artinya rata-rata penduduk dapat lulus sekolah selama 8 tahun atau setara dengan kelas 1 SMP. Jika dibandingkan dengan kabupaten lain di Provinsi Maluku maka rata-rata lama sekolah (RLS) Kabupaten seram Bagian Barat berada pada urutan keenam setelah Kabupaten Maluku Tenggara dan Kabupaten Maluku Tengah. Merujuk pada program wajib belajar sembilan tahun, maka capaian tersebut perlu ditingkatkan. Angka partisipasi murni (APM) Kabupaten Seram Bagian Barat tahun 2018-2021 masih dibawah 100 % atau 67% untuk APM SD dan SMP 55%. Angka Pendidikan tidak tamat SD dan SMP atau Pendidikan dasar tahun 2021 berada pada angka 20,19%. Selain itu juga yang berpengaruh terhadap kualitas SMD yaitu guru yang memiliki kualifikasi sarjana samapai dengan Tahun 2021 adalah 75,11% artinya masih ada 24,89% guru atau tenaga pengajar pada Pendidikan dasar belum berijazah sarja.

Pada aspek kesehatan, Angka Harapan Hidup (AHH) cukup yaitu sebesar 61,69. Namun, dilihat dari Angka Kematian Ibu (AKI) di tahun 2020 sebesar 220 per 100.000 kelahiran hidup masih diatas rata-rata target capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang mengharuskan berada pada angka 70 per 100.000. dan tahun 2021 menurun menjadi 3 per 100.000, dan pada Tahun 2021 tidak dapat dijadikan tolak ukur, karena berada pada masa pandemic, sehingga anggu kunjungan dan persalinan di sarana Kesehatan pun menurun drastic. Selain itu, masih perlu ditingkatkanya sarana dan prasarana kesehatan, ketersediaan tenaga kesehatan dan peningkatan pada setia jenis pelayanan kesehatan.

Selain dimensi IPM, peningkatan kualitas SDM yang berdaya saing dan inklusif juga harus memperhatikan aspek kesetaraan gender dalam setiap proses pembangunan. Angka harapan hidup Kabupaten seram bagian Barat bila dilihat dari derajat Kesehatan tahun 2021 berada pada angka 61,51% ini berarti bayi yang baru lahir di tahun 2021 akan mempunyai kesempatan hidup sampai dengan usia 65-66 Tahun. Disisi lain jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan formal pada tahun 2021 yaitu 0,05%.

2. Rendahnya pertumbuhan ekonomi

Pembangunan secara luas baik pada level global, nasional, maupun daerah tidak lepas dari pembangunan bidang ekonomi. Dalam RPJMN 2020-2024, pertumbuhan ekonomi disinggung pada salah satu dari 7 Agenda Pembangunan nasional yaitu: Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, Pemerintah Pusat dengan gencar menarik investor dengan cara memperbaiki iklim investasi.

Terlepas dari polemik yang muncul, hadirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang baru disahkan menggambarkan komitmen pemerintah dalam memotong mata rantai birokrasi yang rumit, meningkatkan ketersediaan infrastruktur penunjang, meningkatkan kualitas dan ketersediaan tenaga kerja, serta menyediakan dukungan stabilitas sosial politik untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi. RPJMD Provinsi Maluku tahun 2019-2024 juga secara implisit menjadikan pertumbuhan ekonomi sebagai salah satu agenda utama, yaitu pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan dan

berdaya saing yang dapat mendukung masalah produktivitas, nilai tambah dan logistik, nilai tambah produk pun masih rendah, berbiaya tinggi/mahal, rantai produk atau jalur distribusi terlalu panjang, minimnya pemanfaatan teknologi dan inovasi dalam proses bisnis usaha, maupun investasi dan pengembangan pariwisata dan budaya daerah sebab keragaman sumber daya alam terutama pariwisata, kekayaan budaya dan adat istiadat, agama maupun sumber daya sosial lainnya merupakan kekayaan dan keunggulan yang belum dikelola dan dikembangkan secara baik, yang dapat berpeluang investasi dalam memperkuat perekonomian daerah.

Dalam rangka memperkuat perekonomian daerah dan peningkatan kesempatan berusaha adalah strategi daerah guna target peningkatan daya saing ekonomi melalui peningkatan usaha dengan cara memperbaiki kesempatan berinvestasi. Adanya upaya mendorong investasi di level provinsi ini merupakan peluang besar bagi Kabupaten Seram bagian Barat sehingga kesiapan investasi di level kabupaten menjadi pointer dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Sejalan dengan itu RPJMD Provinsi Maluku telah berupaya mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui pengolahan sumberdaya alam berkelanjutan dan berdaya saing serta pengembangan investasi dan pariwisata di Provinsi Maluku termasuk Kabupaten Seram Bagian Barat.

Dalam dokumen rencana pembangunan daerah (RPD) Kabupaten Seram Bagian Barat tahun 2023-2026, memotret ini sebagai peluang dan tantangan dalam meningkatkan pertumbuhan dan pengembangan sektor perekonomian masih di daerah. Berdasarkan data BPS, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Seram Bagian Barat di tahun 2019 berada pada angka 5,56 % dan tahun di tahun 2020 merosot keangka - 0,17% sebagai dampak pandemik COVID-19 dan Kembali meningkat di tahun 2021 yaitu pada angka 3,40% dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. Namun demikian, angka tersebut masih bisa digenjot ke angka yang lebih tinggi dengan membuka peluang investasi yang lebih tinggi lagi. Kabupaten Seram Bagian Barat merupakan daerah dengan potensi investasi sangat terbuka bagi lintasan jalur transportasi dua daerah otonom, yaitu Kabupaten Maluku Tengah dan Kabupaten Seram Bagian Timur serta disisi lain dengan dengan

Kota Ambon. mengingat dari sisi akses cukup mudah karena dilalui oleh dan dekat dengan salah satu pusat perekonomian di wilayah Maluku yaitu Kota Ambon. Potensi investasi ada di berbagai sektor terutama pertanian, peternakan, perikanan, dan pariwisata.

Namun demikian, adanya kebutuhan untuk menggenjot perekonomian melalui peningkatan peluang investasi di Kabupaten Seram Bagian Barat juga harus memperhatikan kondisi lingkungan. Oleh karena itu, upaya menggenjot pertumbuhan ekonomi melalui investasi merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan dengan kondisi lingkungan yang berkaitan dengan daya tampung dan daya dukung kewilayahan. Dengan demikian isu strategis yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, selain itu pula Kabupaten Seram Bagian Barat termasuk dalam wilayah jalur tol laut, sebagaimana kebijakan nasional. Pada tahun 2021 tercatat jumlah sarana perdagangan di Kabupaten Seram Bagian Barat sebanyak 1.496 sarana, yang terdiri dari : pasar 25 unit, toko sebanyak 233 unit dan kios sebanyak 1.238 unit. Sarana – sarana perdagangan ini sangat mendukung peningkatan perekonomian di Kabupaten Seram Bagian Barat.

3. Rendahnya kesejahteraan masyarakat

Aspek kesejahteraan masyarakat berisi tentang capaian-capaian makro pembangunan yang mengindikasikan tentang kondisi tingkat kesejahteraan masyarakat. Aspek ini terdiri atas fokus pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, serta seni budaya dan olahraga. Kesejahteraan masyarakat adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya, dengan demikian tujuan utama dari kesejahteraan yaitu menurunkan tingkat kemiskinan. Indikatornya adalah tingkat kemiskinan. Kemiskinan merupakan isu umum baik secara global, nasional maupun daerah yang urgen untuk diselesaikan. Kemiskinan juga merupakan kondisi dimana terjadi ketidakmampuan dalam memenuhi kesejahteraan hidup atau kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan dan kesehatan.

Peran dalam pengentaskan kemiskinan di suatu daerah dapat dilihat dari menurunnya persentase penduduk miskin dalam kurun waktu tertentu. Kabupaten Seram Bagian Barat termasuk

daerah tertinggal di Indonesia dengan indikator kemiskinan di tahun 2018 adalah, 25,62% dan terus menurun 0,05% sampai dengan tahun 2020 berada pada angka 25,11%, dan Kembali naik pada angka 25,27% sebagai dampak dari pandemik Covid-19. Sedangkan tingkat kemiskinan nasional di tahun 2021 berada pada angka 9,71%. RPJMD Provinsi Maluku menggambarkan tingkat kemiskinan kabupaten/ kota di Provinsi Maluku, Kabupaten Seram Bagian Barat berada pada urutan keenam setelah Kabupaten Kepulauan Aru dan Kabupaten Buru, dengan presentase penduduk miskin di tahun 2018 sebanyak 25,62 %. Tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Seram Bagian Barat pada Tahun 2021 berada pada angka 5,65%. bila dibandingkan dengan tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Maluku yaitu berada pada angka 6,93%.

Seseorang dinyatakan miskin apabila memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dibawah garis kemiskinan (GK). GK selalu naik setiap tahunnya mengikuti kenaikan harga kebutuhan makanan dan bukan makanan. GK Kabupaten Seram Bagian Barat tahun 2021 sebesar Rp 427.355 per kapita per bulan. Upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Seram Bagian Barat masih perlu ditingkatkan, mengingat jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Kabupaten Seram Bagian Barat yang memperoleh bantuan sosial Tahun 2021 yaitu 2,30% atau 9.728 jiwa, dan salah satu penyebab meningkat di tahun 2021 yaitu Covid-19, sebelumnya di tahun 2018 berada pada angka 715 jiwa. Kondisi ini menyebabkan terjadinya pemberian bantuan sosial yang tidak tepat sasaran. Pemutakhiran dan verifikasi data penduduk miskin menjadi penting untuk dilakukan dalam periode pembangunan yang akan datang, guna meningkatkan akurasi pemberian bantuan agar lebih tepat sasaran. Selain itu, intervensi yang lebih menyeluruh perlu dilakukan, tidak hanya pada pemberian bantuan sosial tetapi penanganan lintas sektor melalui pengembangan ekonomi dan peningkatan fasilitas pelayanan dasar.

4. Belum optimalnya infrastruktur dasar dan pengembangan wilayah yang berkelanjutan

Sebagai Kabupaten dengan status daerah tertinggal di Indonesia Kabupaten Seram Bagian Barat akan terus

membenahi pembangunan infrastruktur dasar yang perlu ditingkatkan, sebab Kabupaten Seram bagian Barat dengan kondisi geografis adalah wilayah kepulauan karena terdiri dari 58 buah pulau, dengan sebaran penduduknya berada pada pesisir dan pegunungan serta pulau-pulau terpencil yang sulit dijangkau pada musim tertentu atau iklim yang ekstrim. Terdiri dari 11 kecamatan dengan kondisi ekstrim berada pada 7 kecamatan, yaitu Kecamatan Kepulauan Manipa karena terletak pada pulau yang sulit dijangkau saat musim iklim yang ekstrim karena harus melalui laut, sedangkan yang berada pada sebagian wilayah pegunungan yaitu Kecamatan Elpaputih dan Kecamatan Taniwel, dan yang berada pada seantero wilayah pegunungan yaitu Kecamatan Inamosol. Yang berada pada wilayah pesisir yang terpencil dan pulau-pulau terisolir yang sulit dijangkau melalui darat yaitu Kecamatan Huamual dan Huamual Belakang, karena akses jalan belum memadai bahkan sebagian belum dibangun atau gusur/ pembukaan jalan baru. Di samping ketersediaan jalan, peningkatan konektivitas wilayah juga perlu didukung dengan transportasi umum yang memadai. Kondisi transportasi umum darat di Kabupaten Seram Bagian Barat sampai dengan tahun 2021 belum optimal. Hal ini sedang menghadapi tantangan yang cukup serius. Kondisi ini ditandai dengan semakin menurunnya armada yang melayani trayek angkutan umum. Selain itu pula, kenyamanan dan keselamatan transportasi juga perlu untuk ditingkatkan. Peningkatan ketersediaan perlengkapan jalan dan edukasi kepada masyarakat tentang tertib berlalu lintas masih perlu untuk dilakukan. Jalan di kabupaten Seram Bagian Barat dilihat dari kewenangan pengelolaan, pada tahun 2021 dari total panjang jalan yakni 936.838 Km, yang menjadi kewenangan kabupaten adalah sepanjang 481.398 Km, kewenangan provinsi sepanjang 64.490 Km dan jalan yang merupakan kewenangan pusat adalah sepanjang 390.950 Km. dari Panjang tersebut di atas yang berada pada kondisi baik yaitu 718.894 Km atau 76,73%. Selain fasilitas jalan juga jembatan, karena banyaknya jalan yang harus melewati sungai sehingga dibutuhkan fasilitas jembatan. Selain akses jalan juga menyentuh dengan kebutuhan pelayanan dasar yaitu akses terhadap air minum, persentase penduduk yang terlayani penggunaan air baku sampai dengan tahun 2021 di Kabupaten Seram Bagian Barat yaitu, 62,15%. Kondisi ini mengindikasikan bahwa masih ada 37,85% penduduk

Kabupaten Seram Bagian Barat yang belum terlayani air bersih. Selain kondisi air sehat bersih, presentase cakupan Kawasan yang telah memiliki RDTR dari tahun 2018 sampai dengan Tahun 2021 masih 0%, itu berarti cakupan Kawasan yang telah memiliki RDTR belum ada. Indikator rasio rumah layak huni Kabupaten Seram Bagian Barat tahun 2021 yaitu 14 % dari yang ditargetkan sebesar 74,37%. Data Backlog rumah di Kabupaten Seram Bagian Barat di tahun 2021 masih terdapat 1,493 unit. Pembangunan infrastruktur dasar juga bertujuan untuk meningkatkan kelayakhunian. Upaya ini meliputi pengembangan kawasan permukiman yang memenuhi standar teknis kelayakan dan penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat.

5. Belum optimalnya ketahanan sosial masyarakat

Ketahanan sosial masyarakat merupakan kemampuan dan peran pemerintah dalam menjalankan fungsinya untuk memberikan perlindungan secara efektif bagi warga masyarakat, Pelayanan sosial tersebut terdiri dari 4 pilar yaitu perlindungan sosial, jaminan sosial, rehabilitasi sosial dan pemberdayaan masyarakat. Pelayanan sosial dilakukan bersama antara pemerintah, masyarakat dan swasta. Pemerintah melalui Dinas Sosial melakukan pelayanan sosial terutama kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Capaian persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial di Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2018-2021 teritinggi pada tahun 2019 yaitu 2,49% dan terendah pada tahun 2021 yaitu 2,30%.

Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) /kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya pada Kabupaten Seram Bagian Barat yaitu pada tahun 2018-2020 100% dan pada tahun 2021 turun menjadi 75%. Persentase Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial pada Kabupaten Seram Bagian Barat.

Sesuai dengan capaian indikator Utama (IKU) aspek pelayanan umum pada Dinas Sosial Kabupaten Seram Bagian Barat dengan indikator Persentase Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKBSM) Yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesejahteraan Sosial terlihat bahwa pada tahun 2018 merupakan angka yang tertinggi yaitu 70% dan terendah pada tahun 2021 yaitu 50%. Persentase penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak

Potensial yang telah menerima jaminan sosial pada Kabupaten Seram Bagian Barat mengalami tren kenaikan yang fluktuatif yakni pada tahun 2018 1,28% dan kemudian naik pada tahun 2019 dengan persentase 5,70%, kemudian turun pada tahun 2020 dan naik kembali pada tahun 2021 dengan angka 3,50%. Penyandang disabilitas pada umumnya merupakan warga negara yang layak diberikan hak sesuai dengan kebutuhannya sebagai warga negara, akan tetapi terkadang penyandang disabilitas dipandang sebelah mata karena keterbatasan fisik sehingga kebutuhannya sulit terpenuhi. Indikator ini harus menjadi perhatian pemerintah pada periodisasi selanjutnya.

6. Belum optimalnya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik

Tata kelola pemerintahan di Kabupaten Kabupaten Seram Bagian Barat sejak tahun 2018 sampai dengan 2021 sudah mulai tertata dan berjalan dengan baik, hal ini di tandai dengan capaian kinerja dan kepatuhan aparatur penyelenggara pemerintahan yang diharapkan dapat memenuhi target nasional. Aspek akuntabilitas keuangan telah berubah dari status *disclamer* atau tidak berpendapat ke status wajar dengan pengecualian atau (WDP) ditopang oleh tindak lanjut hasil pemeriksaan yang berjalan sistematis dengan sinergi antar perangkat daerah maupun dengan pemerintah desa. Tata kelola yang efektif dan efisien juga dibangun melalui penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik, baik dalam pelayanan publik maupun integrasi dan koordinasi antar perangkat daerah. Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat berharap dan bekerja keras semoga di Tahun 2022 dan seterusnya dapat meyandang penilain kinerja perangkat daerah oleh Badan Pemeriksa Keuangan beropni wajar tanpa pengecualian. Selain itu Kabupaten Seram Bagian Barat di tahun 2021, kepuasan Pelayanan Publik masih berada pada zona kuning kategori tingkat kepatuhan sedang dengan skor penilaian 62,73. Nilai kualitas pelayanan dari hasil laporan akuntabilitas kinerja atau SAKIP masih berpredikat “CC”. Dan persoalan untuk memperbaiki akuntabilitas kinerja kedepan perlu dimulai dari peningkatan kualitas perencanaan pembangunan, pengawasan dan pengendalian serta pelaporan sehingga terciptanya manajemen kinerja berupa pembagian kinerja yang sinergis, terarah dan terukur. Pada era perkembangan industri 4.0, Tahun 2003, pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan

e-Government. Pengembangan *e-government* ini mencakup perbaikan penyelenggaraan perencanaan, penganggaran, dan pelayanan publik berbasis elektronik.

Dalam RPMJD Provinsi Maluku, isu manajemen birokrasi yang baik dan dinamis serta yang melayani, diantaranya sangat ditentukan oleh kompetensi birokratnya dan atmosfir budaya kerja yang baik. Sejalan dengan pengelolaan pemerintahan dalam semangat otonomi daerah, dimana kabupaten/kota memiliki kewenangannya sendiri yang secara garis besar terpisah dari kewenangan pemerintah provinsi, sehingga pada implementasinya tak jarang ditemukan adanya ketidakselarasan penyelenggaraan pemerintahan/pelaksanaan pembangunan antar level pemerintahan yang secara tidak langsung berdampak pada pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan.

Hal ini terlihat diantaranya tidak terintegrasinya konsep pengembangan wilayah provinsi dengan kabupaten/kota dan tidak selarasnya skenario/strategi penanggulangan kemiskinan provinsi dengan kabupaten/kota. Dalam hal pelayanan publik, masyarakat (publik) selalu menuntut kualitas pelayanan publik dari birokrat, meskipun tuntutan ini tidak sesuai dengan harapan karena pelayanan publik secara empiris masih ditandai dengan hal-hal antara lain adanya ketidakpastian, berbelit-belit, lambat dan berbiaya tinggi. Untuk itu diharapkan adanya perspektif baru untuk layanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance) ke depannya.

7. Belum optimalnya kemandirian desa

Kemandirian desa selalu mencerminkan kemauan masyarakat desa yang kuat untuk maju, kaya akan inovasi yang dihasilkannya dalam berbagai bentuk produk atau karya desa yang membanggakan dan kemampuan desa untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Sebab Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Atas dasar tersebut desa diberikan kewenangan untuk mengatur wilayahnya sendiri. Di Kabupaten Seram bagian Barat terdapat 92 desa dengan berbagai karekteristik dan kompleksitas, masalah serta kendala yang ada di dalamnya.

Kondisi ini semakin menambah beban desa yang sudah demikian berat sehingga cenderung semakin sulit untuk mandiri. Kemandirian desa dapat diwujudkan dengan strategi pemberdayaan masyarakat desa, dengan outputnya yaitu ekspansi asset dan kapabilitas warga masyarakat (terutama kelompok miskin) agar mampu meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik bagi seluruh warga masyarakat melalui kegiatan-kegiatan

swadaya dengan tujuan agar dengan kekuatan atau keberdayaan atau kemampuannya itu desa dapat meningkatkan kesejahteraan atau kemandiriannya. Dengan indikator keberhasilan yaitu Indeks Desa Membangun. Indeks Desa Membangun Kabupaten Seram Bagian Barat, Tahun 2021 jumlah desa Mandiri berjumlah 6 desa, desa tertinggal 16 desa dan sangat tertinggal 2 desa dengan demikian kemandirian desa di kabupaten seram bagian barat adalah 6,52 %, sedangkan desa yang masih tertinggal 17,39% dan sangat tertinggal adalah 2,17%. Disisi lain Tahun 2021 jumlah Kepala Desa Defenitif ada 66 Desa atau 71,73%, sedangkan jumlah desa yang status Kepala Desa masih Penjabat Kepala Desa berjumlah 26 Desa atau 28,26 %. Itu berarti masih ada 28,26 % desa yang secara kemandirian masih terbatas kewenangannya dalam pengambilan keputusan, seperti mengatur penataan untuk berkembangannya dusun menjadi desa persiapan/ desa, pengaturan batas wilayah desa, dan lainnya. Sehingga kedepan permasalahan pemberdayaan dan tata Kelola pemerintahan agar menjadi perhatian.

8. Masih adanya potensi konflik sosial

Sasaran pokok pembangunan dalam RPJPD Provinsi Maluku tahun 2005-2025 yaitu terwujudnya masyarakat Provinsi Maluku yang bertaqwa, rukun, aman. Dan damai. Dengan tata kehidupan yang religious, berakhlak mulia, menjunjung tinggi nilai-nilai perdamaian, aman dan tertib lintas institusional, yang menarik investasi, lingkungan yang harmonis yang menjamin kepastian hukum, dari target tujuan sasaran pembangunan tersebut dapat mengeluarkan Provinsi Maluku dari konflik kemanusiaan di tahun 1999, yang merengut jiwa dan martabat anak bangsa. Berawal dari permasalahan tersebut, Kabupaten Seram Bagian dengan kondisi geografis sebagai daerah kepulauan dan demografis dengan kondisi masyarakat pluralisme yang cukup tinggi. Disi lain tingkat kemajemukan yang ada menyebabkan tingginya kesenjangan sosial dalam struktur masyarakat adat di daerah. Dari kemajemukan yang ada muda sekali terjadi gesekan horsonal di masyarakat yang mudah menyebabkan konflik di masyarakat. Isu penyebab konflik tersebut tidak jauh berbeda dengan konflik kemanusiaan tahun 1999. Antara lain; Perkalian antara pemuda antara desa/ kampung seperti Desa Libata dan Desa Mornaten, Desa mornaten dengan desa Kawa, Desa Iha dan Desa Luhu, Desa Kamarian dan Desa Tihulale, Desa latu dan Hualoy, Selain itu konflik batas desa antara desa Lisabata dengan desa Wakolo, Desa Kaibobu dan Desa Waesamu, Desa Eti dan Desa Lumoly, Desa Eti dan desa Piru, Desa Ariate dan Loki/ dusun Laala, Desa Buano Utara dan Buano Selatan. Selain itu juga lagi berkembang di tahun 2022, yaitu

Konflik kepentingan penataan desa yaitu peningkatan status dusun menjadi Desa. Contohnya Dusun Ketapang dengan desa Induk Desa Loki, Desa Tahalupu dengan dusun Tihu, Tiang Bendera dan dusun Tomi-Tomi di Kecamatan Huamual Belakang. Sehingga kedepan diharapkan isu strategi ini menjadi perhatian.

BAB V

TUJUAN DAN SASARAN

Bedasarkan Intruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Nomor 70 Tahun 2021 menjadi panduan bagi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPD), yang mana dalam Bab 5 dokumen RPD tidak memuat Visi dan Misi Daerah yang akan memberikan arah bagi perencanaan pembangunan daerah masa transisi layaknya dokumen RPJMD. Namun uraian dari Bab 5 akan memuat tentang rumusan tujuan, dan sasaran pembangunan daerah pada periode tahun 2023-2026 atau selama empat tahun kedepan.

Tujuan dan Sasaran akan menjadi visi dan misi pembangunan selama empat tahun atau masa transisi keberadaan Kepala Daerah defenitif. rumusan tujuan dan sasaran tersebut akan menjadi cita-cita atau impian dalam prioritas pembangunan yang diformulasikan dari berbagai amanat atau telaahan dokumen perencanaan pembangunan antara lain RPJPN dan RPJMN, serta RPJPD dan RPMJD Provinsi maupun Kabupaten/ Kota, termasuk telaahan kajian atas dokumen-dokumen kebijakan nasional lainnya, RTRW, arahan Presiden Republik Indonesia serta isu global maupun nasional.

Tujuan dan sasaran pembanungan selama empat tahun ke depan dalam dokumen RPD Kabupaten Seram Bagian Barat tahun 2023-2026 yang dirumuskan dan disinergikan dari lima sektor lingkungan strategis dalam dokumen perencanaan yaitu, sumberdaya manusia (SDM), ekonomi, infratraktur, sosial dan tata kelola pemerintahan, maka diperoleh delapan isu trategis dalam perencanaan pembangunan selama empat tahun kedepan antara lain:

1. Belum optimalnya kualitas sumberdaya manusia (SDM)
2. Rendahnya pertumbuhan ekonomi (ekonomi)
3. Rendahnya kesejahteraan masyarakat (ekonomi)
4. Belum optimalnya infrastruktur dasar dan pengembangan wilayah yang berkelanjutan (Infrastruktur)
5. Belum Optimalnya ketahanan sosial masyarakat (sosial)
6. Belum optimalnya tata Kelola pemerintahan dan pelayanan public (tata kelola pemerintahan)
7. Belum optimalnya kemadirian desa (Tata Kelola pemerintahan)
8. Masih adanya potensi konflik sosial (Tata Kelola pemerintahan)

Delapan isu strategis tersebut yang akan dikembangkan menjadi tujuan dan sasaran untuk perbaikan terhadap perencanaan pembangunan selama empat tahun kedepan, mulai dari tahun 2023 yang akan dikerjakan oleh Penjabat Bupati sampai dengan tahun 2026 di Kabupaten Seram Bagian Barat.

5.1. Tujuan

Tujuan merupakan sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam masa transisi. Rumusan tujuan dalam setiap misi menggambarkan pula kondisi yang akan dicapai dalam merespon isu strategis perencanaan, berpijak dari amanat dan upaya membangun sinkronisasi dengan visi pembangunan jangka panjang, serta dalam rangka menjawab isu strategis aktual yang keberlanjutan dalam pembangunan, maka dirumuskan Tujuan Perencanaan Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026, dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 5. 1. Penjelasan Tujuan yang Menjawab Isu Strategis

Sektor	Tujuan	Indikator Tujuan	Respons Terhadap Isu Strategi
Sumber daya Manusia	Terwujudnya kualitas sumberdaya manusia yang berdaya saing	1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	1. Belum optimalnya kualitas sumberdaya manusia
Ekonomi	1. Meningkatnya Pertumbuhan ekonomi 2. Menurunnya kemiskinan	1. Laju Pertumbuhan Ekonomi 2. Tingkat Kemiskinan	1. Rendahnya pertumbuhan ekonomi 2. Rendahnya kesejahteraan masyarakat
Infrastruktur dan pengembangan wilayah	Meningkatnya Infrastruktur dasar dan pengembangan wilayah yang berkelanjutan	1. Indeks Infrastruktur 2. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	1. Belum optimalnya infrastruktur dasar dan pengembangan wilayah yang berkelanjutan

Sektor	Tujuan	Indikator Tujuan	Respons Terhadap Isu Strategi
Sosial	1. Meningkatnya keberdayaan sosial masyarakat 2. Meningkatnya kualitas pencegahan dan penanganan bencana 3. Menurunnya kesenjangan gender	1. Angka Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 2. Indeks Resiko bencana 3. Indeks Pembangunan Gender	1. Belum Optimalnya ketahanan sosial masyarakat
Tata kelola pemerintahan	1. Meningkatnya kualitas tatakelola pemerintahan 2. Optimalisasi kemandirian desa 3. Meningkatnya kehidupan masyarakat yang harmonis	1. Indeks Reformasi Birokrasi 2. Indeks Desa Membangun 3. Angka Konflik Sosial	1. Belum optimalnya tata Kelola pemerintahan dan pelayanan publik 2. Belum optimalnya kemandirian desa 3. Masih adanya potensi konflik sosial

5.2. Sasaran

Berdasar tabel 5.1, maka RPD Kabupaten Seram Bagian Barat tahun 2023-2026, dari tujuan yang telah dirumuskan dan ditetapkan, maka perlu dijabarkan dalam target sasaran yang akan dicapai selama empat tahun masa transisi kepemimpinan penyelenggraan pemerintahan dibawah kendali seorang Penjabat Bupati. Sasaran juga merupakan rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan. Tujuan maupun sasaran perencanaan pembangunan daerah, adalah rumusan kondisi yang memiliki indikator sebagai alat ukur yang akan dicapai keberhasilannya yang berorentasi pada hasil (*outcome-impact*). Rumusan Tujuan dan Sasaran serta indikator sasaran dapat dijabarkan dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 5. 2. Rumusan Tujuan dan Sasaran serta Indikator Capaian RPD
Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2023-2026**

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Satuan	Kondisi Awal Program (2021)	Capaian Kinerja Program				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD
					2023	2024	2025	2026	
Terwujudnya kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing		Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	65,83	66,32	66,67	67,01	67,36	67,36
	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	Tahun	61,85	62,34	62,57	62,8	63,03	63,03
	Meningkatnya Akses dan Kualitas Pendidikan	Rata - Rata Lama Sekolah	Tahun	8,92	8,95	8,97	9,00	9,02	9,02
		Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,48	13,52	13,54	13,56	13,59	13,59
		Nilai Rata-Rata Ujian Sekolah	Angka	65,20	66,50	67,00	68,00	68,50	68,50

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Satuan	Kondisi Awal Program (2021)	Capaian Kinerja Program				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD
					2023	2024	2025	2026	
	Meningkatnya kontribusi pemuda dalam pembangunan	Persentase Cabang Olahraga yang dibina	Persen	3,87	6,38	8,51	8,51	12,77	12,77
		Tingkat Partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan	Persen	1,87	2,75	3,10	3,40	3,85	3,85
	Meningkatnya pelestarian budaya lokal	Persentase budaya lokal yang dilestarikan	Persen	2	3	4	4	5	5
	Meningkatnya Pengendalian penduduk	Angka Kelahiran Total (TFR)	Angka	0	2,09	2,08	2,07	2,06	2,06
Meningkatnya pertumbuhan Ekonomi		Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	3,40	5,44	5,79	6,15	6,50	6,50

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Satuan	Kondisi Awal Program (2021)	Capaian Kinerja Program				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD
					2023	2024	2025	2026	
	Meningkatnya pertumbuhan sektor Pertanian dan perikanan terhadap perekonomian	Persentase Pertumbuhan PDRB sektor Pertanian, dan perikanan	Persen	1,12	1,56	1,86	2,05	2,33	2,33
	Meningkatnya ketahanan pangan	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	43	55	60	68	72	72
	Meningkatnya pertumbuhan sektor Perindustrian dan perdagangan terhadap perekonomian	Persentase Pertumbuhan PDRB sektor perindustrian	Persen	1,98	2,34	2,66	3,03	3,47	3,47
		Persentase Pertumbuhan PDRB sektor Perdagangan	Persen	2,21	3,26	3,91	4,56	5,20	5,20

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Satuan	Kondisi Awal Program (2021)	Capaian Kinerja Program				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD
					2023	2024	2025	2026	
	Meningkatnya pertumbuhan sektor pariwisata terhadap perekonomian	Persentase Pertumbuhan PDRB sektor Pariwisata	Persen	1,97	2,52	2,87	3,27	3,74	3,74
	Meningkatnya realisasi investasi	Pertumbuhan Realisasi penanaman modal dalam negeri (PMDN)	Persen	0,92	1,5	2,3	3	3,5	3,5
Menurunnya kemiskinan		Tingkat Kemiskinan	Persen	25,27	24,95	24,86	24,76	24,67	24,67
	Menurunnya Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	5,65	4,34	3,88	3,43	2,97	2,97
	Meningkatnya kontribusi sektor koperasi dan UKM terhadap perekonomian	Persentase koperasi yang meningkat SHU-nya	Persen	4,37	5,47	5,95	6,42	6,90	6,90

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Satuan	Kondisi Awal Program (2021)	Capaian Kinerja Program				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD
					2023	2024	2025	2026	
		Persentase Pertumbuhan UMKM	Persen	0,7	1	1,2	1,6	2	2
Meningkatnya infrastruktur dasar dan pengembangan wilayah yang berkelanjutan		Indeks Infrastruktur	Indeks	64,64	75,03	80,23	85,42	90,62	90,62
	Meningkatnya infrastruktur pelayanan dasar yang memadai	Persentase cakupan infrastruktur pelayanan dasar	Persen	64,37	78,12	79,26	80,39	81,53	81,53
	Meningkatnya infrastruktur pendukung pengembangan ekonomi yang	Cakupan infrastruktur yang mendukung pengembangan ekonomi dalam kondisi mantap/dalam kondisi	Persen	49,73	60,89	64,69	68,50	72,31	72,31

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Satuan	Kondisi Awal Program (2021)	Capaian Kinerja Program				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD
					2023	2024	2025	2026	
	memadai	baik							
	Meningkatnya kualitas kinerja lalu lintas dan angkutan jalan	indeks kinerja lalu lintas dan angkutan jalan	Indeks	48,33	62,83	66,96	71,08	75,21	75,21
	Meningkatnya keserasian pembangunan antar sektor	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	Persen	61	65	69	72,5	75	75
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	79,80	82,40	83,70	85,00	86,30	86,30
	Meningkatnya kualitas air, udara	Indeks Kualitas Air (IKA)	Indeks	55,56	56,09	56,17	56,25	56,33	56,33

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Satuan	Kondisi Awal Program (2021)	Capaian Kinerja Program				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD
					2023	2024	2025	2026	
	dan lahan								
		Indeks Kualitas Udara (IKU)	Indeks	93,33	93,73	93,93	94,13	94,33	94,33
		Indeks Kualitas Lahan (IKL)	Indeks	87,85	87,85	87,85	87,85	87,85	87,85
Meningkatnya keberdayaan sosial masyarakat		Angka Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Angka	12,71	16,39	15,74	15,31	15,21	15,21
	Meningkatnya kesejahteraan PMKS	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	Persen	0,91	1,44	1,58	1,71	1,83	1,83
Meningkatnya kualitas pencegahan dan penanganan bencana		Indeks Resiko bencana	Indeks	170,18	172,81	173,68	174,56	175,44	175,44

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Satuan	Kondisi Awal Program (2021)	Capaian Kinerja Program				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD
					2023	2024	2025	2026	
	Menurunnya resiko bencana	Indeks Kapasitas (Komponen IRBI)	Indeks	79	83	85	86	87	87
Menurunnya kesenjangan gender		Indeks Pembangunan Gender	Indeks	96,21	98,62	98,65	98,67	98,69	98,69
	Meningkatnya keberdayaan perempuan dan anak	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	Persen	59,47	64,77	66,78	68,78	70,79	70,79
		Persentase kekerasan terhadap perempuan	Persen	0,0207	0,0195	0,0188	0,0182	0,0143	0,0143
		Persentase Kekerasan terhadap Anak	Persen	0,0043	0,0038	0,0031	0,0023	0,0016	0,0016
Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan		Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	58,12	76,67	76,92	77,08	77,16	77,16
	Terwujudnya pengelolaan	Opini BPK	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Satuan	Kondisi Awal Program (2021)	Capaian Kinerja Program				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD
					2023	2024	2025	2026	
	keuangan yang akuntabel								
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah	Nilai SAKIP	Nilai	CC	B	B	A	A	A
		Status kinerja Penyelenggaraan pemerintahan daerah	Predikat	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	0	77,5	80,5	85,75	87	87
	Meningkatnya Penyelenggaraan pemerintahan	Predikat SPBE	Predikat	Kurang	Cukup	Baik	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Satuan	Kondisi Awal Program (2021)	Capaian Kinerja Program				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD
					2023	2024	2025	2026	
	berbasis Elektronik								
Optimalisasi Kemandirian Desa		Indeks Desa Membangun	Angka	6	10	12	14	16	16
	Meningkatnya keberdayaan desa	Persentase Penurunan Status Desa dari Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal	Persen	19,57	3,26	0,00	0,00	0,00	0,00
Meningkatnya kehidupan masyarakat yang harmonis		Angka Konflik Sosial	Angka	3,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Menurunnya potensi konflik sosial	Persentase konflik sosial yang ditangani	Persen	100	100	100	100	100	100
	Meningkatnya ketertiban dan	Persentase Penanganan Kasus K3	Persen	100	100	100	100	100	100

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Satuan	Kondisi Awal Program (2021)	Capaian Kinerja Program				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD
					2023	2024	2025	2026	
	ketenteraman								

BAB VI
STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN,
DAN PROGRAM PRIORITAS

Bab ini berisi tentang penjelasan terkait upaya-upaya yang akan dilakukan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah seperti yang telah dipaparkan dalam bab sebelumnya. Upaya yang dilakukan untuk mencapai kondisi dalam jangka waktu 4 (empat) tahun yang akan datang dirumuskan melalui strategi dan arah kebijakan pembangunan Daerah. Secara umum bab ini mencakup 4 (empat) poin besar, yaitu: strategi dan arah kebijakan, arah kebijakan tahunan, dan program pembangunan Daerah.

6.1. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan dirumuskan dalam bentuk upaya-upaya yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu 4 (empat) tahun kedepan yang dirumuskan dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Rumusan strategi dan arah kebijakan juga memperhatikan pemetaan permasalahan pembangunan dijabarkan pada Bab IV. Strategi dan arah kebijakan ditata dengan memperhatikan kondisi eksisting, melakukan komunikasi dan kolaborasi dalam menentukan arah kebijakan, serta fleksibel dalam mempertimbangkan ide-ide dalam pencapaian tujuan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam menghadapi situasi yang tidak pasti dan kompleks. Sehingga dibutuhkan Strategi dan arah kebijakan yang mampu menjawab permasalahan yang terjadi dan selanjutnya akan dikonversi menjadi rumusan program pembangunan/perangkat daerah. Oleh karena itu, pilihan program dan indikator didalam RPD dipandu oleh rumusan strategi dan arah kebijakan

Tabel 6.1. Perumusan Strategi RPD Berbasis Pemetaan Masalah Pembangunan

Pemetaan Masalah	Strategi
Bidang Urusan Pendidikan	
Belum optimalnya Fasilitas pendidikan	Peningkatan Fasilitas Pendidikan
Belum optimalnya kualitas penyelenggaraan pendidikan	Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan

Pemetaan Masalah	Strategi
Bidang Urusan Kesehatan	
Masih Rendahnya Kualitas Pelayanan Kesehatan	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan
Masih Tingginya Gizi Buruk dan Stunting	Peningkatan Penanganan Gizi Buruk Dan Stunting
Masih Rendahnya Kualitas Kesehatan Ibu	Peningkatan Kualitas Kesehatan Ibu
Masih Rendahnya Kualitas Kesehatan Anak	Peningkatan Kualitas Kesehatan Anak
Belum Optimalnya Penanganan Penyakit Menular (TNC dan HIV) dan Tidak Menular (Hipertensi dan Demam Berdarah)	Peningkatan Penanganan Penyakit Menular (TBC Dan HIV) Dan Tidak Menular (Hipertensi Dan Demam Berdarah)
Belum Optimalnya Penanganan dan Pemulihan Pandemi Covid-19	Penanganan Dan Pemulihan Pandemi Covid-19,
Masih Rendahnya Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat	Peningkatan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat
Bidang Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	
Belum optimalnya penyediaan infrastruktur pelayanan dasar yang memadai	Mengoptimalkan Penyediaan Infrastruktur Pelayanan Dasar Yang Memadai
	Mengoptimalkan Penyediaan Sistem Jaringan Infrastruktur Pengembangan Ekonomi
Rendahnya penyelenggaraan perencanaan pemanfaatan dan pengendalian tata ruang	Optimalisasi Penyelenggaraan Perencanaan Pemanfaatan Dan Pengendalian Tata Ruang
	Peningkatan Pengawasan Dan Pengendalian Kualitas Lingkungan
Bidang Urusan Perumahan Dan Kawasan Permukiman	
Belum optimalnya penyediaan infrastruktur pelayanan dasar yang memadai	Mengoptimalkan Penyediaan Infrastruktur Pelayanan Dasar Yang Memadai
Bidang Urusan Perumahan Dan Kawasan Permukiman	
Belum optimalnya ketentraman dan ketertiban masyarakat	Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban
Belum optimalnya ketahanan dan perlindungan masyarakat terhadap	Peningkatan Ketahanan Dan Perlindungan Masyarakat Terhadap

Pemetaan Masalah	Strategi
bencana	Bencana
Bidang Urusan Sosial	
Belum optimalnya pelayanan sosial bagi PMKS	Peningkatan pelayanan kesejahteraan sosial bagi PMKS
Pengembangan Kawasan transmigrasi berkelanjutan	Peningkatan Ketahanan dan perlindungan Masyarakat terhadap Bencana
Peningkatan pengelolaan dan pemeliharaan makam pahlawan	Peningkatan Pengelolaan dan Pemeliharaan Makam Pahlawan
Bidang Urusan Tenaga Kerja	
Masih rendahnya kesempatan kerja	Peningkatan kesempatan kerja
Bidang Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
Rendahnya partisipasi perempuan aktif dalam kegiatan ekonomi dan politik	Peningkatan partisipasi perempuan aktif dalam kegiatan ekonomi dan politik
Belum optimalnya perlindungan terhadap perempuan	Peningkatan Perlindungan terhadap perempuan
Belum optimalnya perlindungan terhadap anak dan pemenuhan hak anak	Peningkatan perlindungan terhadap anak dan pemenuhan hak anak
Bidang Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
Belum optimalnya pengendalian penduduk	Peningkatan pengendalian pertumbuhan penduduk
Bidang Urusan Pangan	
Belum optimalnya ketersediaan pangan	Peningkatan ketersediaan pangan
Belum optimalnya keterjangkauan pangan	Peningkatan keterjangkauan pangan
Rendahnya pemanfaatan pangan	Peningkatan pemanfaatan pangan
Belum optimalnya keamanan pangan	Peningkatan keamanan pangan
Bidang Urusan Lingkungan Hidup	
Belum optimalnya pengawasan dan pengendalian lingkungan	Peningkatan pengawasan dan pengendalian kualitas lingkungan
Bidang Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
Belum optimalnya penguatan kualitas pelayanan Kependudukan dan pencatatan sipil	Penguatan Kualitas pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Bidang Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
Belum optimalnya Kapasitas tata Kelola pemerintahan desa	Penguatan Kualitas pelayanan Kependudukan dan Pencatatan

Pemetaan Masalah	Strategi
	Sipil
Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat desa	Peningkatan pemberdayaan masyarakat desa
Bidang Urusan Perhubungan	
Belum optimalnya Kelancar-an lalu lintas dan angkutan jalan	Meningkatkan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan
Belum memadainya ketersediaan dan kualitas sarana prasarana perhubungan pendukung ekonomi	Peningkatan ketersediaan dan kualitas sarana prasarana perhubungan pendukung ekonomi
Bidang Urusan Komunikasi dan Informatika	
Belum optimalnya penguatan kelembagaan keterbukaan informasi pelayan public	Penguatan kelembagaan keterbukaan informasi pelayanan publik
Bidang Urusan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	
Belum optimalnya kelembagaan dan kualitas SDM koperasi	Peningkatan kelembagaan dan kualitas SDM Koperasi
Belum optimalnya omzet usaha mikro	Peningkatan omzet usaha mikro
Bidang Urusan Penanaman Modal	
Kurangnya jumlah investor	Peningkatan daya Tarik investasi
Bidang Urusan Pemuda dan Olahraga	
Belum optimalnya prestasi raga	Peningkatan prestasi olahraga
Belum optimalnya Pengembangan organisasi kepemudaan	Pengembangan organisasi kepemudaan
Belum optimalnya pembinaan organisasi kepramukaan	Pembinaan organisasi kepramukaan
Bidang Urusan Statistik	
Belum optimalnya Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Peningkatan kualitas pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah
Bidang Urusan Persandian	
Rendahnya penguatan inovasi dan adaptasi teknologi terpadu	Penguatan Inovasi dan Adaptasi Teknologi Terpadu
Bidang Urusan Kebudayaan	
Belum optimalnya Dan fasilitasi obyek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya	Meningkatkan pengelolaan dan fasilitasi obyek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya
Bidang Urusan Perpustakaan	
Belum optimalnya budaya baca dan literasi	Peningkatan budaya baca dan literasi

Pemetaan Masalah	Strategi
Bidang Urusan Kearsipan	
Belum optimalnya Kualitas pelayanan kearsipan	Penguatan Inovasi dan Adaptasi Teknologi Terpadu
Bidang Urusan Pertanian	
Belum optimalnya produksi dan pengolahan hasil pertanian, perkebunan dan peternakan	Meningkatkan produksi pertanian, perkebunan.
Belum optimalnya produksi hasil peternakan	Meningkatkan produksi hasil peternakan
Meningkatnya populasi ternak	Meningkatkan populasi ternak
Bidang Urusan Kelautan dan Perikanan	
Belum optimalnya produksi perikanan	Meningkatkan produksi perikanan
Bidang Urusan Perindustrian	
Lemahnya nilai produksi	Menguatkan nilai produksi industri
Bidang Urusan Perdagangan	
Belum optimalnya kelancaran distribusi barang dagangan	Peningkatan kelancaran distribusi barang perdagangan
Menguatkan sarana distribusi perdagangan	Peningkatan kapasitas pemasaran produk perikanan dan pertanian
Bidang Urusan Pariwisata	
Belum optimalnya kunjungan wisatawan	Peningkatan kunjungan wisatawan
Belum optimalnya omzet pelaku ekonomi kreatif	Peningkatan omzet pelaku ekonomi kreatif
Bidang Urusan Sekretariat Daerah	
Belum optimalnya Pembangunan kelembagaan berbasis kinerja	Pembangunan kelembagaan berbasis kinerja
Kurangnya efektifitas kebijakan pemerintah daerah	Peningkatan efektifitas kebijakan Pemerintah Daerah
Belum optimalnya kualitas penyelenggaraan pendidikan	Meningkatkan pengelolaan dan fasilitasi obyek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya
Bidang Urusan Sekretariat DPRD	
Belum optimalnya efektifitas kebijakan pemerintah daerah	Peningkatan efektifitas kebijakan Pemerintah Daerah
Bidang Urusan Kewilayahan	
Belum optimalnya kualitas system pelayanan publik	Peningkatan kualitas sistem pelayanan publik

Pemetaan Masalah	Strategi
Belum optimalnya Dukungan terhadap fungsi kewilayahan	Penguatan dukungan terhadap fungsi kewilayahan
Bidang Urusan Perencanaan	
Belum optimalnya kualitas perencanaan daerah	Peningkatan kualitas perencanaan daerah
Belum optimalnya kualitas pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Peningkatan kualitas pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah
Bidang Urusan Keuangan	
Belum optimalnya kinerja dan transparansi pengelolaan keuangan daerah	Peningkatan kinerja dan transparansi pengelolaan keuangan daerah
Belum optimalnya kapasitas keuangan daerah	Peningkatan Kapasitas Keuangan Daerah
Belum optimalnya kualitas pelaporan dan system pengawasan daerah	Penguatan kualitas pelaporan dan sistem pengawasan daerah
Bidang Urusan Kepegawaian	
Belum optimal tata kelola aparatur pemerintah dalam birokrasi	Peningkatan tata kelola aparatur pemerintah dalam birokrasi
Bidang Urusan Pendidikan dan Pelatihan	
	Peningkatan tata kelola aparatur pemerintah dalam birokrasi
Bidang Urusan Pengawasan	
Penguatan kualitas pelaporan dan sistem pengawasan daerah	Penguatan kualitas pelaporan dan sistem pengawasan daerah
Melemahnya kualitas pelaporan dan system pengawasan daerah	
Bidang Urusan Penelitian dan Pengembangan	
Belum optimalnya efektifitas kebijakan pemerintah daerah	Peningkatan efektifitas kebijakan Pemerintah Daerah
Bidang Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik	
Belum optimalnya kohesivitas sosial	Meningkatnya kohesivitas sosial

Tabel 6.2. Strategi dan Arah Kebijakan

Tujuan 1 : (Terwujudnya Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing)		
Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan	Peningkatan Penanganan Gizi Buruk Dan Stunting
		Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kesehatan
		Peningkatan Akreditasi Puskesmas Dan Rumah Sakit
		Peningkatan Kualitas Pengawasan Obat Dan Makanan
	Peningkatan Penanganan Gizi Buruk Dan Stunting	Pemenuhan Kebutuhan Gizi Ibu Hamil
		Peningkatan Gizi Bayi Dan Balita
		Peningkatan Penerapan PHBS (Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat)
	Peningkatan Kualitas Kesehatan Ibu	Peningkatan Penanganan Komplikasi Saat Kehamilan
		Peningkatan Penanganan Kompikasi Saat Persalinan
		Peningkatan Penanganan Komplikasi Pasca Persalinan/Nifas
		Peningkatan Kunjungan K1 Dan K4
		Peningkatan Ibu Melahirkan Di Fasilitas

Tujuan 1 : (Terwujudnya Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing)		
Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	Peningkatan Kualitas Kesehatan Anak	Kesehatan
		Peningkatan Imunisasi Dasar Lengkap
		Penurunan Bayi Lahir Dengan Berat Badan Bawah Garis Merah (BBBGM)
		Penurunan Bayi Lahir Dengan Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR)
	Peningkatan Penanganan Penyakit Menular (TBC Dan HIV) Dan Tidak Menular (Hipertensi Dan Demam Berdarah)	Peningkatan Imunisasi Dasar Lengkap
		Penurunan Bayi Lahir Dengan Berat Badan Bawah Garis Merah (BBBGM)
		Penurunan Bayi Lahir Dengan Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR)
	Penanganan Dan Pemulihan Pandemi Covid-19,	Peningkatan Disiplin Protokol Kesehatan
		Fasilitasi Percepatan Vaksinasi COVID-19
		Peningkatan Testing Dan Perawatan Pasien COVID-19
	Peningkatan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Bidang Kesehatan
		Optimalisasi Peran Kader Kesehatan
Meningkatnya Akses dan Kualitas Pendidikan	Peningkatan Fasilitas Pendidikan	Pembaharuan Sarana Dan Prasarana Pendidikan SD Dan SMP
		Peningkatan Layanan Ketersediaan

Tujuan 1 : (Terwujudnya Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing)		
Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		Pendidikan Kesenjangan
		Peningkatan Pendidikan Inklusif
		Fasilitasi Beasiswa Pendidikan Tinggi
		Standarisasi Penyelenggaraan PAUD
		Peningkatan Koordinasi Dengan Sekolah-Sekolah PAUD Non Pemerintah
		Penyediaan Dan Peningkatan Sarana Dan Prasarana PAUD
	Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan	Peningkatan Kompetensi Guru
		Peningkatan Akreditasi SD Dan SMP
		Optimalisasi Pembelajaran Berbasis Digital
		Peningkatan Partisipasi Pendidikan Tingkat PAUD
	Peningkatan Budaya Baca dan Literasi	Peningkatan Koleksi Buku Perpustakaan
		Peningkatan Fasilitas Perpustakaan
		Pengembangan Taman Baca Masyarakat
Meningkatnya kontribusi pemuda dalam pembangunan	Peningkatan Prestasi Olahraga	Pemerataan Fasilitas Olahraga
		Perbaikan Manajemen Pembibitan Atlit
	Pengembangan	Optimalisasi

Tujuan 1 : (Terwujudnya Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing)		
Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	Organisasi Kepemudaan	Pembinaan Organisasi Kepemudaan
		Peningkatan Kapasitas Pemuda Dalam Organisasi
		Peningkatan Tata Kelola Organisasi Kepemudaan
	Pembinaan Organisasi Kepramukaan	Peningkatan Tata Kelola Organisasi Kepramukaan

Tujuan 2 : (Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi)		
Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Pertanian Dan Perikanan Terhadap Perekonomian	Meningkatkan Produksi Pertanian, Perkebunan	Peningkatan Kapasitas SDM Sektor Pertanian Dan Perkebunan
		Peningkatan Sarana Dan Prasarana Pertanian, Perkebunan
		Peningkatan Perizinan Pertanian
	Meningkatkan Produksi Hasil Pternakan	Peningkatan Kapasitas SDM Sektor Pternakan
		Peningkatan Sarana Dan Prasarana Pternakan
	Meningkatkan Populasi Ternak	Peningkatan Kesehatan Hewan
	Meningkatkan Produksi Perikanan	Peningkatan Kapasitas SDM Perikanan Tangkap
		Peningkatan Sarana Dan Prasarana

Tujuan 2 : (Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi)		
Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		Perikanan Tangkap
		Pengadopsian Metode Modern Penangkapan Ikan
		Peningkatan Kapasitas SDM Perikanan Budidaya
		Peningkatan Sarana Perikanan Budidaya
		Pengadopsian Metode Budidaya Perikanan Yang Baik
		Pengembangan Promosi Produk Perikanan
Meningkatnya Ketahanan Pangan	Peningkatan Ketersediaan Pangan	Peningkatan Stok Cadangan Pangan
		Penyediaan Prasarana Lumbung Pangan
	Peningkatan Keterjangkauan Pangan	Peningkatan Kualitas Informasi Dan Distribusi Pangan
		Peningkatan Penanganan Kerawanan Pangan
	Peningkatan Pemanfaatan Pangan	Peningkatan Diversifikasi Pangan Non-beras dan Non-terigu
	Peningkatan Keamanan Pangan	Peningkatan Keamanan Pangan
Meningkatnya pertumbuhan sektor Perindustrian dan perdagangan terhadap perekonomian	Menguatkan Nilai Produksi Industri	Peningkatan Kapasitas SDM Sektor Industri
		Peningkatan Sarana Dan Prasarana Industri
		Meningkatkan Kreativitas Dan Inovasi Pelaku Industri

Tujuan 2 : (Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi)		
Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	Peningkatan Kelancaran Distribusi Barang Perdagangan	Peningkatan Prasarana Dan Sarana Perdagangan
		Perbaikan Fungsi Pasar
		Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Penting
		Peningkatan Standarisasi Dan Perlindungan Konsumen
	Peningkatan Kapasitas Pemasaran Produk Perikanan Dan Pertanian	Peningkatan Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
Meningkatnya pertumbuhan sektor pariwisata terhadap perekonomian	Peningkatan Kunjungan Wisatawan	Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
		Peningkatan Pemasaran Destinasi Wisata
		Peningkatan Kerjasama Pengembangan Pariwisata
	Peningkatan Omzet Pelaku Ekonomi Kreatif	Peningkatan Kapasitas Produksi Ekraf
		Peningkatan Kualitas Produk Ekraf
Meningkatnya Realisasi Investasi	Peningkatan daya tarik investasi	Peningkatan Identifikasi Potensi Investasi
		Peningkatan Promosi Investasi
		Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan

Tujuan 3 : (Menurunnya Kemiskinan)		
Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Menurunnya Pengangguran	Peningkatan Kesempatan Kerja	Peningkatan Kesesuaian Keterampilan Pencari Kerja Dengan

Tujuan 3 : (Menurunnya Kemiskinan)		
Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		Permintaan Pasar Kerja
		Peningkatan Jaringan Kerjasama Penyaluran Tenaga Kerja
	Peningkatan Kelembagaan Dan Kualitas SDM Koperasi	Peningkatan Kapasitas SDM Pengurus Koperasi
		Peningkatan Kualitas Metode Pengelolaan Koperasi
	Peningkatan Omzet Usaha Mikro	Peningkatan Kapasitas Produksi UMKM
		Peningkatan Kualitas Produk UKM

Tujuan 4 : (Meningkatnya Infrastruktur Dasar dan Pengembangan Wilayah yang Berkelanjutan)		
Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Infrastruktur Pelayanan Dasar Yang Memadai	Mengoptimalkaan Penyediaan Infrastruktur Pelayanan Dasar Yang Memadai	Penyediaan Sarana Dan Prasarana Air Bersih
		Penyediaan Sarana Dan Prasarana Sanitasi
		Penyediaan Sarana Dan Prasarana Perumahan Lainnya
		Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Terdampak Relokasi Program Pemerintah
		Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Rusak Atau Tidak

Tujuan 4 : (Meningkatnya Infrastruktur Dasar dan Pengembangan Wilayah yang Berkelanjutan)		
Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		Layak Huni, Dan Bagi Korban Bencana
Meningkatnya Infrastruktur Pendukung Pengembangan Ekonomi Yang Memadai	Peningkatan ketersediaan dan kualitas sarana prasarana perhubungan pendukung ekonomi	Peningkatan Pemerataan Jaringan Jalan
		Peningkatan Ketersediaan Sarana Dan Prasarana Penunjang Pelabuhan Pengumpan Lokal
		Peningkatan Dan Pemerliharaan Jaringan Drainase
		Peningkatan Dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi
Meningkatnya Kualitas Kinerja Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan	Meningkatkan Kelancaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan	Peningkatan Standar Keamanan Dan Keselamatan Berlalu Lintas
		Peningkatan Ketersediaan Sarana Prasarana Perhubungan Berdasarkan Rencana Pengembangan Wilayah
Meningkatnya Keserasian Pembangunan Antar Sektor	Optimalisasi Penyelenggaraan Perencanaan Pemanfaatan Dan Pengendalian Tata Ruang	Penyelesaian Sengketa Pertanahan Oleh Pemerintah Daerah
		Penyediaan Sistem Informasi Tata Ruang
		Peningkatan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)
		Optimalisasi Layanan

Tujuan 4 : (Meningkatnya Infrastruktur Dasar dan Pengembangan Wilayah yang Berkelanjutan)		
Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		Jasa Konstruksi
Meningkatnya Kualitas Air, Udara Dan Lahan	Peningkatan Pengawasan Dan Pengendalian Kualitas Lingkungan	Peningkatan Pengendalian Pencemaran Air
		Peningkatan Pengendalian Pencemaran Udara
		Peningkatan Peran Serta Pemerintah Dan Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup
		Peningkatan Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau
		Peningkatan Pengelolaan Sampah Terpadu

Tujuan 5 : (Meningkatnya Keberdayaan Sosial Masyarakat)		
Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Kesejahteraan PMKS	Peningkatan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS	Peningkatan Upaya Rehabilitasi Sosial Diluar Panti
		Peningkatan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas
		Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial
		Peningkatan Penanganan Fakir Miskin
	Pengembangan Kawasan	Peningkatan Kawasan Transmigrasi

Tujuan 5 : (Meningkatnya Keberdayaan Sosial Masyarakat)		
Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	Transmigrasi Berkelanjutan	
	Peningkatan Pengelolaan Dan Pemeliharaan Makam Pahlawan	Peningkatan Sistem Keamanan Dan Kebersihan Taman Makam Pahlawan

Tujuan 6 : (Meningkatnya Kualitas Pencegahan dan Penanganan Bencana)		
Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Menurunnya Resiko Bencana	Peningkatan Ketahanan dan perlindungan Masyarakat terhadap Bencana	Fasilitasi Pemenuhan Kebutuhan Dasar Korban Bencana Alam Dan Non Alam Saat Terjadi Bencana
		Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana
		Peningkatan Pendampingan Setelah Tanggap Darurat Bencana

Tujuan 7 : (Menurunnya Kesenjangan Gender)		
Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Keberdayaan Perempuan dan Anak	Peningkatan Partisipasi Perempuan Aktif Dalam Kegiatan Ekonomi dan Politik	Peningkatan Pengarusutamaan Gender di Lingkungan Pemerintah dan Masyarakat
	Peningkatan Perlindungan Terhadap Perempuan	Peningkatan Kerjasama Antar Lembaga Perlindungan Perempuan

Tujuan 7 : (Menurunnya Kesenjangan Gender)		
Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		Peningkatan Peran Serta Masyarakat, Dunia Usaha dan Media dalam Mencegah Kekerasan Terhadap Perempuan
		Peningkatan Kapasitas Kader dalam Memberikan Pendampingan
		Peningkatan Fasilitas Pengaduan
	Peningkatan Perlindungan Terhadap Anak Dan Pemenuhan Hak Anak	Peningkatan Perlindungan Anak Terpadu

Tujuan 8 : (Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan)		
Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel	Peningkatan Kinerja dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah	Penguatan Kinerja Belanja Daerah Berbasis Prioritas dan Kebutuhan Daerah
		Peningkatan Akses Publik Terhadap Informasi Keuangan Daerah
	Peningkatan Kapasitas Keuangan Daerah	Optimalisasi dan Pemanfaatan TIK dalam Pengelolaan Retribusi Daerah
		Identifikasi dan Pendataan Sumber-Sumber Retribusi

Tujuan 8 : (Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan)		
Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		Daerah
		Optimalisasi Sistem Pajak Daerah
		Peningkatan Pengendalian dan Pengawasan Sumber PAD
	Penguatan Kualitas Pelaporan dan Sistem Pengawasan Daerah	Peningkatan Kelembagaan Pengawasan Daerah
		Penguatan Sistem Pengendalian Interen Pemerintah
		Penguatan Kualitas Pelaporan Keuangan Daerah
		Peningkatan Efektivitas Penatausahaan, Pengamanan dan Pemanfaatan Aset Daerah
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah	Peningkatan Kualitas Perencanaan Daerah	Peningkatan Sinergitas Perencanaan di Tingkat Daerah Dengan Perangkat Daerah
	Peningkatan Kualitas Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Pengembangan Instrumen Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Perecanaan dan Pembangunan Daerah
		Penguatan Sistem Pengelolaan Data Kinerja
	Pembangunan	Peningkatan Fasilitasi

Tujuan 8 : (Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan)		
Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	Kelembagaan Berbasis Kinerja	Perangkat Daerah dalam Implementasi SAKIP
		Peningkatan Kinerja Aparatur Sipil Negara
		Peningkatan Penataan Kelembagaan
		Peningkatan Tata Laksana
		Peningkatan Fasilitasi Perangkat Daerah dalam Reformasi Birokrasi
	Peningkatan Efektifitas Kebijakan Pemerintah Daerah	Peningkatan Sinkronisasi, Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
		Peningkatan Fasilitasi dan Pembinaan Penyusunan Produk Hukum Daerah
		Peningkatan Sinkronisasi, Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Bidang Perekonomian dan Pembangunan
		Peningkatan Kapasitas BUMD
		Peningkatan Pengadaan Barang dan Jasa Berbasis Elektronik
		Peningkatan Peran

Tujuan 8 : (Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan)		
Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		Penelitian Sebagai Dasar Perumusan Kebijakan
		Peningkatan Dukungan Kinerja DPRD
	Peningkatan Tata Kelola Aparatur Pemerintah dalam Birokrasi	Peningkatan Pemerataan Distribusi Pegawai
		Peningkatan Pembinaan Terhadap Pegawai
		Peningkatan Kesejahteraan Aparatur Penyelenggaraan Pemerintahan
		Penempatan Jabatan Berdasarkan Sistem Merit
		Peningkatan Kapasitas, Kompetensi Teknis, Managerial, dan Fungsional
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Sistem Pelayanan Publik	Penerapan Instrumen Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik
		Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan
	Penguatan Dukungan Terhadap Fungsi Kewilayahan	Fasilitasi dan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan
		Peningkatan Kapasitas ASN Tingkat Kecamatan dan Desa
		Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan

Tujuan 8 : (Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan)		
Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		Pemerintahan Desa
	Penguatan Kualitas Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Peningkatan Database Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang Valid dan Update
		Peningkatan Kesadaran Masyarakat dalam Mengurus Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kearsipan	Peningkatan Sistem Pengelolaan Kearsipan Daerah
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik	Penguatan Kelembagaan Keterbukaan Informasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kapasitas Informasi Masyarakat dalam Penjabaran Informasi Pembangunan Daerah
		Penguatan Kapasitas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
	Penguatan Inovasi dan Adaptasi Teknologi Terpadu	Penguatan Kualitas Keamanan Informasi Daerah

Tujuan 9 : (Optimalisasi Kemandirian Desa)		
Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Keberdayaan Desa	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Desa	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
		Peningkatan Fasilitasi Penataan Desa

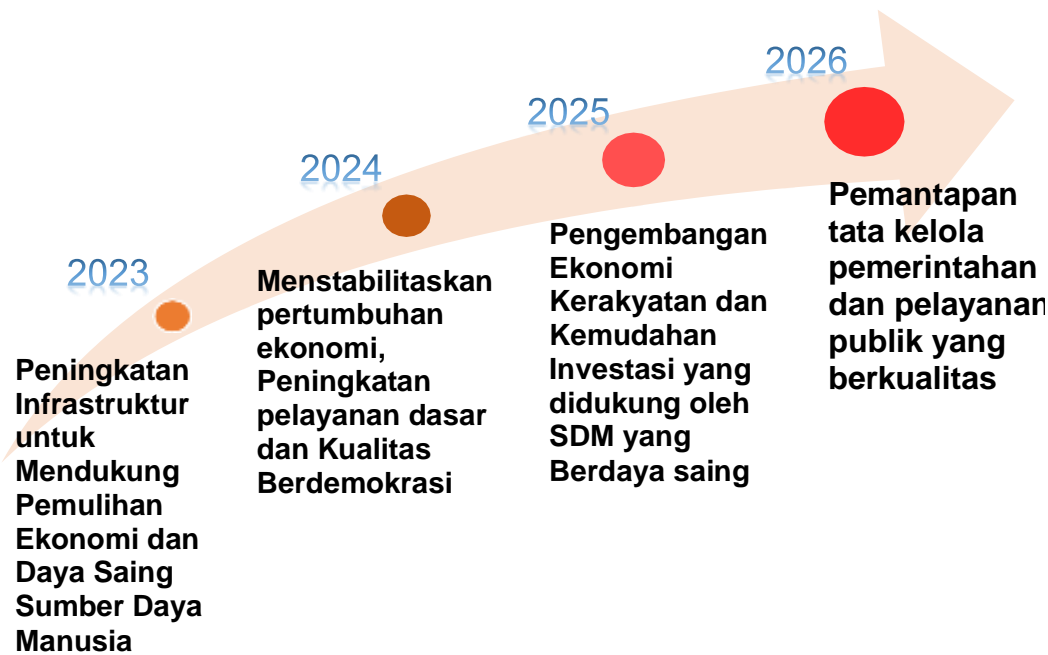
	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Peningkatan Kapasitas Kelompok Masyarakat Desa
		Optimalisasi Potensi Dan Aset Desa

Tujuan 10 : (Meningkatnya kehidupan masyarakat yang harmonis)		
Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Menurunnya Potensi Konflik Sosial	Meningkatnya Kohesivitas Sosial	Pembinaan Politik Dan Wawasan Kebangsaan
Meningkatnya Ketertiban Dan Ketenteraman	Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban	Peningkatan Ketaatan Terhadap Perda / Perkada
		Penigkatan Cakupan Patroli Ketertiban Dan Ketenteraman
		Penigkatan Kewaspadaan Dini Masyarakat

6.2. Arah Kebijakan Tahunan dan Prioritas Pembangunan

Arah kebijakan tahunan yang terdapat dalam RPD memandu sinkronisasi antara perencanaan jangka menengah dengan perencanaan tahunan. Arah kebijakan tahunan akan menjadi tema dan prioritas pembangunan dalam dokumen RKPD Kabupaten Seram Bagian Barat. Perumusan arah kebijakan tahunan berbasis pada telaah urgensi isu/permasalahan pembangunan yang perlu direspon secara sistematis dan bertahap.

Gambar 6.1. Arah Kebijakan Tahunan RPD Kabupaten Seram
Bagian Barat Tahun 2023-2026



Tabel 6.3. Arah Kebijakan Tahunan dan Prioritas Pembangunan

Tahun	Arah Kebijakan Tahunan	Prioritas Pembangunan
2023	Peningkatan infrastruktur untuk mendukung pemulihan ekonomi dan daya saing sumber daya manusia	<div>Pembangunan infrastruktur berorientasi untuk peningkatan konektivitas antar pusat pertumbuhan dan pemerataan pembangunan di Kabupaten Seram Bagian Barat, sehingga tidak terdapat ketimpangan antar wilayah. Tahun 2023 merupakan tahun pemantapan tata kelola pemerintahan dan SDM. Prioritas pembangunan dalam arah kebijakan ini terkait:</div> <ul style="list-style-type: none"> • Percepatan pembangunan infrastruktur kewilayahan • Percepatan penanggulangan kemiskinan • Peningkatan kualitas dan daya saing SDM • Peningkatan nilai tambah produk unggulan

Tahun	Arah Kebijakan Tahunan	Prioritas Pembangunan
		<ul style="list-style-type: none"> • Penguatan sistem ketahanan pangan berkelanjutan • Tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah
2024	Menstabiliskan pertumbuhan ekonomi, Peningkatan pelayanan dasar dan Kualitas Berdemokrasi	<p>Tahun 2024 merupakan tahun politik dimana Kabupaten Seram Bagian Barat termasuk salah satu daerah di Indonesia yang menyelenggarakan pemilihan umum kepala daerah, sehingga fokus prioritas pembangunan untuk tahun 2024 adalah menyukseskan penyelenggaraan pemilihan umum serta menjaga stabilitas politik di daerah. Disamping itu pula pengentasan kemiskinan melalui peningkatan ekonomi masyarakat dan peningkatan infrastruktur berkelanjutan masih menjadi prioritas pembangunan di tahun 2024. Prioritas pembangunan dalam arah kebijakan ini terkait:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menjaga Stabilitas dan Meningkatkan Produksi Sektor Unggulan • Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Pelayanan Dasar • Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas • Reformasi Birokrasi dalam Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik • Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran • Mewujudkan pelaksanaan pemilu secara demokratis
2025	Pengembangan	Pada tahun 2025 diharapkan laju

Tahun	Arah Kebijakan Tahunan	Prioritas Pembangunan
	Ekonomi Kerakyatan dan Kemudahan Investasi yang didukung oleh SDM yang Berdaya saing	<p>pertumbuhan ekonomi Kabupaten Seram Bagian Barat semakin meningkat, sehingga prioritas pembangunan di tahun ini difokuskan untuk pengembangan ekonomi khususnya bagi UMKM/IKM yang sejalan dengan peningkatan sumber daya manusia yang berdaya saing. Prioritas pembangunan dalam arah kebijakan ini terkait:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan • Peningkatan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru berdasarkan fungsi kewilayahan • Pengembangan Sumber Daya untuk mendorong terciptanya investasi • Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing • Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup • Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran
2026	Pemantapan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas	Upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari berbagai sektor ditargetkan pada tahun 2026 telah masuk tahap berkembang, diharapkan target pelayanan publik semakin berkualitas yang ditandai dengan nilai indeks kepuasan masyarakat yang semakin membaik, disamping itu pula dalam kerangka penguatan ekonomi

Tahun	Arah Kebijakan Tahunan	Prioritas Pembangunan
		<p>berkelanjutan tetap menjadi fokus perhatian pemerintah daerah. Prioritas pembangunan dalam arah kebijakan ini terkait:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Reformasi Birokrasi melalui Penguatan Inovasi dan Penerapan teknologi • Penguatan Stabilitas Wilayah Untuk Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Harmonis dan Berbudaya • Peningkatan kualitas SDM yang berdaya saing • Penguatan Infrastruktur Wilayah dan Ketahanan Bencana • Penguatan Pertumbuhan dan Ketahanan Ekonomi Daerah dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan • Peningkatan Lapangan Kerja dan Investasi

Rumusan arah kebijakan perlu memperhatikan kebijakan Pemerintah Pusat dan Provinsi Maluku, agar tercapai sinergi pembangunan antara level pemerintah. Sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang RPJMN Tahun 2020-2024 telah dijelaskan tentang arah pembangunan untuk pengembangan wilayah di Provinsi Maluku, yang selanjutnya menjadi program prioritas pembangunan pemerintah di wilayah Maluku. Gambaran pembangunan RPJMN dan sinergitas arah kebijakan dan prioritas pembangunan Kabupaten Seram Bagian Barat dapat digambarkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 6.4. Dukungan Arah Kebijakan RPD Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2023-2026 Terhadap RPJMN 2020-2024

No	KP/ Proyek Prioritas Nasional di Wilayah Maluku Khusus Wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat	Dukungan Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2023-2026
KP 2: Pengembangan Sektor Unggulan		
1.	Pengembangan komoditas unggulan lada, pala dan cengkeh	<ul style="list-style-type: none">• Percepatan pembangunan infrastruktur kewilayahan• Peningkatan nilai tambah produk unggulan• Penguatan sistem ketahanan pangan berkelanjutan• Menjaga Stabilitas dan Meningkatkan Produksi Sektor Unggulan• Peningkatan Lapangan Kerja dan Investasi
2.	Pengembangan Komoditas unggulan Kelapa	
3.	Optimalisasi komoditas unggulan pertambangan	
4.	Pengembangan komoditas unggulan perikanan tangkap	
KP 4 : Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan dan Transmigrasi		
1.	Percepatan pembangunan daerah tertinggal di Provinsi Maluku	<ul style="list-style-type: none">• Percepatan Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran
2.	Pembangunan Desa Terpadu	
KP: 5 Kelembagaan dan Keuangan Daerah		
1.	Peningkatan kapasitas Pemerintah Daerah dan Hubungan Pusat-Daerah di Provinsi Maluku	<ul style="list-style-type: none">• Peningkatan kualitas dan daya saing SDM• Reformasi Birokrasi melalui Penguatan Inovasi dan Penerapan teknologi• Tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah
2.	Layanan pertanahan	
3.	Penyelenggaraan penataan ruang	

6.3. Program Pembangunan Daerah

6.3.1. Prioritas Pembangunan Daerah

Program pembangunan daerah pada RPD merupakan program strategis daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang memiliki dimensi teknokratik. Dimana perencanaan dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas melibatkan atau mengakomodasi keilmiahan dan perkembangan teknologi. Prioritas pembangunan Kabupaten Seram Bagian Barat dalam periode 2023-2026 sebagai berikut:

Tabel 6.5. Prioritas Pembangunan Daerah

No	Prioritas Pembangunan	Konsep Operasional	Program Berdasarkan Nomenklatur
1	Penataan Ibu Kota Kabupaten	Penyelesaian Sengketa lahan yang diatasnya terdapat bangunan milik pemerintah dan Identifikasi lahan-lahan strategis untuk keperluan penataan Ibu kota kabupaten sehingga terciptanya kawasan kota kabupaten yang tertata dan nyaman bagi masyarakat	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan
			Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
2	Pembangunan Infrastruktur pada Wilayah Tertinggal	Penyediaan infrastruktur dasar pada wilayah tertinggal serta pengentasan rumah tidak layak huni	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
			Program Pengembangan Permukiman
			Program Penyelenggaraan Jalan
			Program Perumahan dan Kawasan

No	Prioritas Pembangunan	Konsep Operasional	Program Berdasarkan Nomenklatur
			Permukiman Kumuh
3	Pembangunan Destinasi Wisata Unggulan	Pengembangan Destinasi pariwisata "Segitiga Saka Mese Nusa" dan destinasi wisata lainnya berbasis kearifan lokal melalui peningkatan sarana prasarana dan promosi pariwisata, secara berkelanjutan	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
			Program Pemasaran Pariwisata
4	Pendampingan dan Pengembangan UMKM	Pendampingan UMKM dari hulu ke hilir agar mampu menciptakan nilai tambah hasil produksi serta pendampingan dalam mengoptimalkan potensi unggulan	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)
			Program Pengembangan UMKM
			Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
5	Perluasan Lahan Pertanian Produktif	Fasilitasi perluasan kawasan pertanian baru milik masyarakat untuk memberdayakan petani serta membantu pemasaran hasil pertanian secara komprehensif berbasis mutu dan kualitas	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
			Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
			Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian
			Program Penyuluhan Pertanian
6	Peningkatan Produksi Perikanan	Fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana perikanan tangkap dan budidaya, melalui pengembangan kawasan perikanan terintegrasi dalam mendukung	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
			Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

No	Prioritas Pembangunan	Konsep Operasional	Program Berdasarkan Nomenklatur
		program Lumbung Ikan Nasional	
7	Pengembangan Kawasan Industri	Pengembangan Kawasan Industri (SIKIM) Pengelolaan Potensi Sumber Daya Alam secara produktif	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
8	Pengembangan Sekolah Unggulan	Menstimulasi satuan pendidikan pada setiap jenjang pendidikan melalui peningkatan kualitas guru dan kualitas pendidikan serta menciptakan kompetisi intelektual berkelanjutan dalam bidang sains, teknologi, sastra, sosial dan ekonomi	Program Pengelolaan Pendidikan
			Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
9	Peningkatan Kualitas Rumah Sakit dan Puskesmas	Menuju Rumah Sakit Umum Daerah Piru berakreditasi A	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
		Peningkatan fasilitas Puskesmas, tenaga kesehatan, dan peningkatan standar pelayanan minimal kesehatan	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
10	Peningkatkan kinerja Aparatur Pemerintah Daerah	Penegakan disiplin, peningkatan kualitas, serta peningkatan kinerja birokrasi pemerintah daerah melalui penambahan penghasilan pegawai	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
			Program Kepegawaian Daerah
11	Peningkatan Inovasi dalam Tata Kelola	Pendayagunaan inovasi pemerintah daerah berbasis e-government	Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kab./Kota

No	Prioritas Pembangunan	Konsep Operasional	Program Berdasarkan Nomenklatur
	Pemerintahan	dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun pelayanan masyarakat	Program Aplikasi Informatika
			Program Informasi dan Komunikasi Publik
12	Mendorong Investasi yang Berdaya Saing	Menstimulasi badan usaha milik daerah dalam peningkatan kualitas investasi dan variasi strategi bisnis untuk meningkatkan pendapatan daerah	Program Perekonomian dan Pembangunan
		membuka peluang investasi dalam negeri serta mempercepat proses izin usaha investasi di daerah	Program Pelayanan Penanaman Modal
			Program Promosi Penanaman Modal
13	Mewujudkan pelaksanaan pemilu secara demokratis	Mempersiapkan pelaksanaan Pemilihan Umum melalui sinergitas penyelenggara serta edukasi pemilu kepada masyarakat	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
			Program Peningkatan Kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasiliasi penanganan konflik sosial
			Program Pengelolaan informasi administrasi kependudukan
			Program Pendaftaran Penduduk
			Program Peningkatan Ketenteraman dan ketertiban umum
			Program Informasi dan

No	Prioritas Pembangunan	Konsep Operasional	Program Berdasarkan Nomenklatur
			Komunikasi Publik
			Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

6.3.2. Program Pengentasan Kemiskinan Lintas Sektor Kabupaten Seram Bagian Barat

Fokus pembangunan baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah tidak lepas dari isu kemiskinan. Berbagai pendekatan terhadap pengentasan kemiskinan sudah dilakukan oleh Pemerintah, namun belum menuai hasil yang maksimal. Salah satu penyebabnya adalah karakteristik kemiskinan yang multidimensional. Faktor inilah yang mengharuskan standar yang digunakan untuk mengintervensi permasalahan kemiskinan harus dari berbagai sektor. Badan Pusat Statistik (BPS) mengklasifikasi standar kriteria kemiskinan menjadi 14 kriteria dan mewakili dari berbagai aspek. Pemerintah Daerah menggunakan kriteria kemiskinan tersebut dalam menangani permasalahan kemiskinannya. Adapun 14 kriteria yang digunakan oleh Pemerintah Daerah, adalah sebagai berikut:

1. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m2 per orang;
2. Jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu kualitas rendah;
3. Jenis dinding tempat tinggal dari bambu/ rumbia/ kayu berkualitas rendah/tembok tanpa diplester;
4. Tidak memiliki fasilitas buang air besar/bersama-sama dengan rumah tangga lain;
5. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik;
6. Sumber air minum berasal dari sumur/mata air tidak terlindung/sungai/air hujan;
7. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/arang/minyak tanah;
8. Hanya mengkonsumsi daging/susu/ayam dalam satu kali seminggu;
9. Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun.
10. Hanya sanggup makan sebanyak satu/dua kali dalam sehari;
11. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/poliklinik;

12. Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah: petani dengan luas lahan 500 M2, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan dan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah Rp. 600.000,- per Bulan;
13. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga: tidak sekolah/tidak tamat SD/tamat SD;
14. Tidak memiliki tabungan/barang yang mudah dijual dengan minimal Rp.500.000,- seperti sepeda motor kredit/non kredit, emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya.

Kriteria kemiskinan yang disusun oleh BPS di atas mencakup berbagai sektor, seperti pendidikan, kesehatan, pendapatan, sosial, infrastruktur, dan sebagainya. Seluruh kriteria tersebut perlu diidentifikasi untuk menentukan keterwakilannya dalam program-program yang terdapat dalam peraturan terkait. Program yang mewakili kriteria kemiskinan akan menjadi program prioritas Pemerintah Daerah untuk satu periode ke depan. Adapun hasil identifikasi terhadap program-program yang mewakili kriteria kemiskinan, adalah sebagai berikut:

Tabel 6.6. Identifikasi Program yang Mewakili Kriteria Kemiskinan

Klaster	Kriteria Kemiskinan	Program	Indikator Program
RTLH	<ul style="list-style-type: none"> Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m2 per orang 	Program kawasan permukiman	Persentase rumah tidak layak huni yang ditingkatkan kualitasnya di kawasan kumuh
	<ul style="list-style-type: none"> Jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu kualitas rendah 	Program pengembangan perumahan	Persentase rumah tidak layak huni yang ditangani
	<ul style="list-style-type: none"> Jenis dinding tempat tinggal dari bambu/rumbia/kayu berkualitas rendah/tembok tanpa diplester 	Program perumahan dan kawasan permukiman kumuh	Persentase penyediaan rumah layak huni bagi keluarga miskin
	Tidak memiliki fasilitas buang air besar/bersama-sama dengan rumah tangga lain	Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	<ul style="list-style-type: none"> Persentase sanitasi komunal dalam kondisi baik

Klaster	Kriteria Kemiskinan	Program	Indikator Program
			<ul style="list-style-type: none"> Persentase peningkatan ketersediaan sanitasi individual
		Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase desa yang menerapkan GERMAS
Air Minum	Sumber air minum berasal dari sumur/mata air tidak terlindung/sungai/air hujan;	Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	Persentase rumah tangga yang terlayani air bersih perpipaan
Pendapatan perkapita (bantuan sosial, tenaga kerja dan pemberdayaan	Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik	Program perlindungan dan jaminan sosial	Persentase keluarga penerima manfaat yang menerima bantuan sosial
		Program pengembangan permukiman	Persentase infrastruktur dikawasan strategis cepat tumbuh yang memadai
		Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)	Persentase kawasan perumahan yang memiliki PSU dalam kondisi baik
	<ul style="list-style-type: none"> Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/arang/minyak 	Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	Persentase pertumbuhan pemenuhan prasarana pertanian

Klaster	Kriteria Kemiskinan	Program	Indikator Program
	tanah <ul style="list-style-type: none"> Hanya mengkonsumsi daging/susu/ayam dalam satu kali seminggu Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun Hanya sanggup makan sebanyak satu/dua kali dalam sehari Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah: petani dengan luas lahan 500 M2, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan dan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah Rp. 600.000,- per Bulan Tidak memiliki tabungan/barang yang mudah dijual dengan minimal Rp.500.000,- seperti sepeda motor kredit/non kredit, emas, ternak, kapal motor, atau barang 	Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Persentase pertumbuhan pemanfaatan sarana pertanian
		Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Persentase pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian
		Program pengelolaan perikanan tangkap	Persentase kelompok nelayan terlatih
		Program pengelolaan perikanan budidaya	Persentase kelompok perikanan budidaya yang terlatih
		Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	Persentase promosi konsumsi ikan yang berhasil dijalankan
		Program perencanaan dan pembangunan industri	Persentase pelaku IKM yang terlatih
		Program pelatihan kerja dan produktifitas tenaga kerja	Persentase tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan permintaan pasar tenaga kerja
		Program pemberdayaan	Persentase usaha mikro yang

Klaster	Kriteria Kemiskinan	Program	Indikator Program
	modal lainnya	UMKM	meningkat kapasitas produksinya
Kesehatan	Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/poliklinik	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Persentase warga miskin yang mendapatkan bantuan pembiayaan sebagai peserta JKN KIS
		Program perlindungan dan jaminan sosial	Persentase keluarga penerima manfaat yang menerima bantuan sosial
Pendidikan	Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga: tidak sekolah/tidak tamat SD/tamat SD	Program pengelolaan pendidikan	Persentase kepala rumah tangga yang mendapatkan fasilitas kejar paket A

Dari hasil identifikasi terhadap program-program dalam peraturan terkait, secara umum dibagi ke dalam 5 (lima) klaster, yaitu Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), air minum, pendapatan per kapita, Kesehatan, dan Pendidikan. Klaster-klaster tersebut kemudian mewakili satu sampai beberapa program sehingga total program yang diidentifikasi, yaitu 21 program prioritas.

Program prioritas ini kemudian diintegrasikan dalam perencanaan pembangunan Daerah melalui pendekatan *cross-cutting*. *Cross-cutting* ini memberikan gambaran secara jelas mengenai pengentasan kemiskinan lintas sektor di Daerah. Selain itu, pendekatan *cross-cutting* ini menunjukkan bahwa dalam mengentaskan kemiskinan diperlukan kolaborasi dari berbagai perangkat Daerah.

6.3.3 Program Prioritas

Perumusan program pembangunan daerah dalam dimensi teknokratik mengacu pada upaya pencapaian tujuan dan sasaran, serta berdasarkan rumusan strategi yang telah dipilih. Program pembangunan dalam dimensi

teknokratik juga membangun keterpaduan antara prioritas pembangunan dengan upaya pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan yang berorientasi *outcome* dan *impact*. Berikut adalah rincian seluruh program pembangunan Daerah yang dapat dilihat keselarasannya dengan sasaran pembangunan Daerah.

Tabel 6.7. Program Prioritas

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal Program (2021)	Capaian Kinerja Program				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD	Urusan Penanggung-jawab
							2023	2024	2025	2026		
Terwujudnya kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing		Indeks Pembangunan Manusia (IPM)			Indeks	65,83	66,32	66,67	67,01	67,36	67,36	
	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup			Tahun	61,85	62,34	62,57	62,8	63,03	63,03	
			Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Desa Siaga Aktif Mandiri	Persen	9,00	11,96	16,30	20,65	25,00	25,00	Kesehatan
				Persentase Desa yang menerapkan GERMAS	Persen	50,60	54,35	59,78	65,22	70,65	70,65	Kesehatan

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal Program (2021)	Capaian Kinerja Program				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD	Urusan Penanggung-jawab
							2023	2024	2025	2026		
			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Rumah Sakit Terakreditasi	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Kesehatan
				Persentase Capaian SPM Rumah Sakit	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Kesehatan
				Persentase Puskesmas Terakreditasi	Persen	70,59	76,47	82,35	88,24	94,12	94,12	Kesehatan
				Presentase Warga Miskin yang Mendapatkan Bantuan Pembiayaan sebagai Peserta JKN KIS	Persen	49,78	53,17	59,03	62,62	65,71	68,01	Kesehatan

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal Program (2021)	Capaian Kinerja Program				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD	Urusan Penanggung-jawab
							2023	2024	2025	2026		
				Persentase Warga Negara Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Layanan Kesehatan	Persen	96,96	98,53	98,74	98,94	99,15	99,15	Kesehatan
				Persentase Warga Negara Usia Produktif yang mendapatkan Layanan Kesehatan	Persen	18,00	20,00	18,00	16,00	14,00	14,00	Kesehatan
				Presentase Kematian Warga Negara Usia Produktif	Persen	0,03	0,04	0,04	0,03	0,03	0,03	Kesehatan

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal Program (2021)	Capaian Kinerja Program				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD	Urusan Penanggung-jawab
							2023	2024	2025	2026		
				Persentase Warga Negara Lanjut Usia yang Mendapatkan Layanan Kesehatan	Persen	70,00	72,00	74,00	78,00	82,00	82,00	Kesehatan
				Jumlah Kematian Warga Negara Usia Lanjut	Angka	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	10,00	Kesehatan
				Persentase Balita Gizi Kurang	Persen	12,00	10,00	8,00	7,00	5,00	5,00	Kesehatan
				Persentase Balita Stunting	Persen	28,70	27,00	27,00	26,00	25,00	25,00	Kesehatan
				Persentase Balita Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Persen	70,00	72,00	75,00	76,00	82,00	82,00	Kesehatan

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal Program (2021)	Capaian Kinerja Program				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD	Urusan Penanggung-jawab
							2023	2024	2025	2026		
				Persentase Ibu Bersalin yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar	Persen	72,00	75,00	77,00	80,00	82,00	82,00	Kesehatan
				Persentase Ibu Hamil yang mendapatkan Pelayanan Ibu Hamil	Persen	84,00	85,00	87,00	90,00	92,00	92,00	Kesehatan
				Persentase Bayi Baru Lahir mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Persen	72,00	75,00	77,00	80,00	82,00	82,00	Kesehatan
				Persentase Orang	Persen	44,90	42,00	40,00	35,00	32,00	32,00	Kesehatan

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal Program (2021)	Capaian Kinerja Program				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD	Urusan Penanggung-jawab
							2023	2024	2025	2026		
				Terduga TBC mendapatkan Pelayanan TBC Sesuai Standar								
				Persentase Orang dengan Resiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh	Persen	38,00	25,00	20,00	15,00	10,00	10,00	Kesehatan
				Persentase Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Persen	2,20	2,20	3,50	3,70	3,90	3,90	Kesehatan

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal Program (2021)	Capaian Kinerja Program				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD	Urusan Penanggung-jawab
							2023	2024	2025	2026		
				Persentase Penderita Diabetes Militus yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Persen	2,90	3,20	3,60	3,80	4,00	4,00	Kesehatan
				Persentase ODGJ yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Persen	0,00	50,00	50,00	50,00	100,00	100,00	Kesehatan
				Angka Kesakitan Covid-19	Angka	190,00	127,00	110,00	42,00	5,00	5,00	Kesehatan
			Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan	Persentase makanan minuman yang lolos uji	Persen	78	83	84	85	86	86	Kesehatan

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal Program (2021)	Capaian Kinerja Program				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD	Urusan Penanggung-jawab
							2023	2024	2025	2026		
			Minuman									
				Persentase obat layak edar pada sarana pelayanan kefarmasian	Persen	80	96	97	98	99	99	Kesehatan
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Tenaga Kesehatan yang Memenuhi Kualifikasi (Pendidikan Minimal D3 Kesehatan)	Persen	52,97	52,97	54,84	61,97	64,52	64,52	Kesehatan
	Meningkatnya Akses dan Kualitas Pendidikan	Rata - Rata Lama Sekolah			Tahun	8,92	8,95	8,97	9,00	9,02	9,02	

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal Program (2021)	Capaian Kinerja Program				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD	Urusan Penanggung-jawab
							2023	2024	2025	2026		
		Harapan Lama Sekolah			Tahun	13,48	13,52	13,54	13,56	13,59	13,59	
		Nilai Rata-Rata Ujian Sekolah			Angka	65,20	66,50	67,00	68,00	68,50	68,50	
			Program Pengelolaan Pendidikan	APM SD	Persen	98,30	98,32	98,40	98,60	98,80	98,80	Pendidikan
				APM SMP	Persen	76,12	80,15	82,00	83,00	84,00	84,00	Pendidikan
				Angka Partisipasi Sekolah SD	Persen	93,36	93,50	94,00	94,50	95,00	95,00	Pendidikan
				Angka Partisipasi Sekolah SMP	Persen	76,12	80,15	82,00	83,00	84,00	84,00	
				Persentase Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang Menyelesaikan Pendidikan Dasar	Persen	93,36	93,50	94,00	94,50	95,00	95,00	Pendidikan

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal Program (2021)	Capaian Kinerja Program				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD	Urusan Penanggung-jawab
							2023	2024	2025	2026		
				dan/atau Menengah yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Kesetaraan								
				APK PAUD	Persen	35,29	40,50	45,00	45,50	45,70	45,70	Pendidikan
				Persentase Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD	Persen	69,75	70,73	71,39	72,06	72,72	72,72	Pendidikan
				Persentase Sekolah SD dan SMP yang Terakreditasi	Persen	71,79	74,66	77,70	87,84	94,59	94,59	Pendidikan

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal Program (2021)	Capaian Kinerja Program				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD	Urusan Penanggung-jawab
							2023	2024	2025	2026		
			Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Alokasi Beasiswa Pendidikan Tinggi yang Tepat Sasaran	Persen	75,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Sekretariat Daerah
			Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase Guru SD dan SMP yang Bersertifikasi	Persen	21,94	25,48	27,07	30,25	38,22	38,22	Pendidikan
			Program Pembinaan Perpustakaan	Rasio Ketercukupan Koleksi Perpustakaan dengan Penduduk	Persen	43,00	50,00	52,00	57,00	59,00	59,00	Perpustakaan
	Meningkatnya kontribusi pemuda dalam pembangunan	Persentase Cabang Olahraga yang dibangun			Persen	3,87	6,38	8,51	8,51	12,77	12,77	

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal Program (2021)	Capaian Kinerja Program				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD	Urusan Penanggung-jawab
							2023	2024	2025	2026		
			Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Persentase Fasilitas Olahraga dalam Kondisi Baik	Persen	17,00	20,00	25,00	30,00	32,00	32,00	Pemuda dan Olahraga
				Cakupan Pembinaan Atlit Muda	Persen	69,45	70,01	70,72	71,43	72,14	72,14	Pemuda dan Olahraga
		Tingkat Partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan			Persen	1,87	2,75	3,10	3,40	3,85	3,85	
			Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase Pemuda yang mendapat pelatihan pengembangan kepemimpinan, kepedulian,	Persen	40,00	50,00	52,00	55,00	60,00	60,00	Pemuda dan Olahraga

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal Program (2021)	Capaian Kinerja Program				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD	Urusan Penanggung-jawab
							2023	2024	2025	2026		
				kesukarelawan an dan kepeloporan pemuda								
			Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Persentase Kelompok Pramuka Aktif	Persen	76,00	80,00	83,00	85,00	90,00	90,00	Pemuda dan Olahraga
	Meningkatnya pelestarian budaya lokal	Persentase budaya lokal yang dilestarikan			Persen	2	3	4	4	5	5	
			Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase kegiatan tradisi adat dan seni yang sudah direvitalisasi	Persen	10,00	12,00	15,00	20,00	25,00	25,00	Kebudayaan

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal Program (2021)	Capaian Kinerja Program				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD	Urusan Penanggung-jawab
							2023	2024	2025	2026		
	Meningkatnya Pengendalian penduduk	Angka Kelahiran Total (TFR)			Angka	0	2,09	2,08	2,07	2,06	2,06	
			Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	Persentase Peserta KB Aktif	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			Program Pengendalian Penduduk	Rata-Rata Usia Kawin Pertama Wanita	Persen	18,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Meningkatnya pertumbuhan Ekonomi		Laju Pertumbuhan Ekonomi			Persen	3,40	5,44	5,79	6,15	6,50	6,50	
	Meningkatnya pertumbuhan sektor Pertanian dan perikanan terhadap perekonomian	Persentase Pertumbuhan PDRB sektor Pertanian, dan perikanan			Persen	1,12	1,56	1,86	2,05	2,33	2,33	

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal Program (2021)	Capaian Kinerja Program				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD	Urusan Penanggung-jawab
							2023	2024	2025	2026		
			Program Penyuluhan Pertanian	Persentase cakupan bina kelompok tani	Persen	100	100	100	100	100	100	Pertanian
			Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase pertumbuhan pemenuhan prasarana pertanian	Persen	17,68	20	22	25	27	27	Pertanian
			Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase pertumbuhan pemanfaatan sarana pertanian	Persen	17,68	20	25	28	30	30	Pertanian
			Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase usaha pertanian yang mendapatkan rekomendasi perizinan usaha pertanian	Persen	17,39	20	25	30	35	35	Pertanian

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal Program (2021)	Capaian Kinerja Program				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD	Urusan Penanggung-jawab
							2023	2024	2025	2026		
				Persentase kelompok peternak terlatih	Persen	11,63	15	18	22	28	31	Pertanian
			Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase prasarana peternakan berkondisi baik	Persen	12,68	15	18	22	28	31	Pertanian
			Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase sarana peternakan berkondisi baik	Persen	12,04	15	18	22	28	31	Pertanian
			Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	Persen	47,84	50	60	70	80	80	Pertanian

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal Program (2021)	Capaian Kinerja Program				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD	Urusan Penanggung-jawab
							2023	2024	2025	2026		
			Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Pengendalian dan Penanggulang an Bencana Pertanian	Persen	80,09	85	90	95	100	100	Pertanian
			Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Persentase kelompok nelayan terlatih	Persen	67,04	70	75	80	85	85	Kelautan dan Perikanan
				Persentase sarana perikanan tangkap berkondisi baik	Persen	47,16	50	55	60	70	70	Kelautan dan Perikanan
				Persentase prasarana perikanan tangkap berkondisi baik	Persen	47,74	50	55	60	70	70	Kelautan dan Perikanan

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal Program (2021)	Capaian Kinerja Program				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD	Urusan Penanggung-jawab
							2023	2024	2025	2026		
				Persentase kelompok nelayan yang menerapkan metode penangkapan ikan yang baik dan benar	Persen	37,88	40	45	50	55	55	Kelautan dan Perikanan
			Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Persentase kelompok perikanan budidaya yang terlatih	Persen	75,93	78	85	90	95	95	Kelautan dan Perikanan
				Persentase sarana perikanan budidaya yang ber kondisi baik	Persen	42,85	45	48	55	60	60	Kelautan dan Perikanan

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal Program (2021)	Capaian Kinerja Program				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD	Urusan Penanggung-jawab
							2023	2024	2025	2026		
				Persentase Kelompok pembudidaya perikanan yang menggunakan metode budidaya yang baik	Persen	75,29	78	85	90	95	95	Kelautan dan Perikanan
			Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase promosi konsumsi ikan yang berhasil dijalankan	Persen	27,97	30	40	45	50	50	Kelautan dan Perikanan
	Meningkatnya ketahanan pangan	Indeks Ketahanan Pangan			Indeks	43	55	60	68	72	72	

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal Program (2021)	Capaian Kinerja Program				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD	Urusan Penanggung-jawab
							2023	2024	2025	2026		
			Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase stok cadangan pangan	Persen	62,31	65	70	75	80	80	Pangan
			Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Persentase infrastruktur kemandirian pangan kondisi baik	Persen	62,95	65	70	75	80	80	Pangan
			Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase Ketersediaan informasi Distribusi Pangan yang dapat diakses masyarakat	Persen	47,97	50	55	60	65	65	Pangan

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal Program (2021)	Capaian Kinerja Program				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD	Urusan Penanggung-jawab
							2023	2024	2025	2026		
			Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase penanganan desa rawan pangan	Persen	57,17	60	65	70	75	75	Pangan
			Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase peningkatan kelompok yang melaksanakan Diversifikasi Pangan	Persen	47,58	50	55	60	65	65	Pangan
			Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase pangan yang aman (layak konsumsi)	Persen	52,42	55	60	65	70	70	Pangan
	Meningkatnya pertumbuhan sektor Perindustrian dan perdagangan terhadap perekonomian	Persentase Pertumbuhan PDRB sektor perindustrian			Persen	1,98	2,34	2,66	3,03	3,47	3,47	

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal Program (2021)	Capaian Kinerja Program				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD	Urusan Penanggung-jawab
							2023	2024	2025	2026		
	n											
			Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase pelaku IKM yang terlatih	Persen	47,96	50	55	60	70	70	Perindustrian
				Persentase Sarana dan Prasarana Industri yang berkategori baik	Persen	52,04	55	60	65	70	70	Perindustrian
				Persentase pelaku IKM yang menghasilkan inovasi	Persen	2,4	5	10	15	20	20	Perindustrian

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal Program (2021)	Capaian Kinerja Program				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD	Urusan Penanggung-jawab
							2023	2024	2025	2026		
		Persentase Pertumbuhan PDRB sektor Perdagangan			Persen	2,21	3,26	3,91	4,56	5,20	5,20	
			Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Prasarana dan Sarana Perdagangan yang berkondisi baik	Persen	53	55	60	65	70	70	Perdagangan
				Persentase Pasar yang memenuhi persyaratan teknis pasar	Persen	27,83	30	35	40	50	50	Perdagangan
			Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase stabilitas harga kebutuhan barang pokok dan barang penting	Persen	67,17	70	75	80	85	85	Perdagangan

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal Program (2021)	Capaian Kinerja Program				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD	Urusan Penanggung-jawab
							2023	2024	2025	2026		
			Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase penurunan kasus sengketa perdagangan	Persen	17,96	20	22	25	28	28	Perdagangan
			Program Penggunaan dan pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase pelaku usaha binaan yang difasilitasi promosi produk	Persen	47,04	50	55	60	70	70	Perdagangan
			Program Pengembangan Ekspor	Peningkatan ekspor	Persen	0	0	10	12	15	15	Perdagangan
	Meningkatnya pertumbuhan sektor pariwisata terhadap perekonomian	Persentase Pertumbuhan PDRB sektor Pariwisata			Persen	1,97	2,52	2,87	3,27	3,74	3,74	

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal Program (2021)	Capaian Kinerja Program				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD	Urusan Penanggung-jawab
							2023	2024	2025	2026		
	n											
			Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase destinasi wisata yang ditingkatkan daya tariknya	Persen	7	10	20	25	30	30	Pariwisata
			Program Pemasaran Pariwisata	Persentase promosi potensi pariwisata yang ditindaklanjuti dengan kerjasama investasi	Persen	7,13	10	20	25	30	30	Pariwisata

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal Program (2021)	Capaian Kinerja Program				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD	Urusan Penanggung-jawab
							2023	2024	2025	2026		
				Persentase kerjasama pengembangan pariwisata yang berjalan dengan baik	Persen	6,58	10	20	25	30	30	Pariwisata
			Program Pengembangan Sumberdaya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase pelaku Ekraf yang meningkatkan kapasitas produksinya	Persen	2,93	5	10	15	20	20	Pariwisata
				Persentase pelaku Ekraf yang memiliki produk yang tersertifikasi	Persen	2,13	5	10	15	20	20	Pariwisata

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal Program (2021)	Capaian Kinerja Program				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD	Urusan Penanggung-jawab
							2023	2024	2025	2026		
	Meningkatnya realisasi investasi	Pertumbuhan Realisasi penanaman modal dalam negeri (PMDN)			Persen	0,92	1,5	2,3	3	3,5	3,5	
			Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase potensi investasi yang teridentifikasi	Persen	12,5	15	20	25	30	30	Penanaman Modal
			Program Promosi Penanaman Modal	Persentase potensi investasi yang dipromosikan	Persen	17,04	20	25	30	35	35	Penanaman Modal
			Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase pelayanan perizinan dan non perizinan yang dijalankan sesuai SOP	Persen	57,29	60	70	80	90	90	Penanaman Modal

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal Program (2021)	Capaian Kinerja Program				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD	Urusan Penanggung-jawab
							2023	2024	2025	2026		
			Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase usaha yang dipantau, dibina dan diawasi	Persen	17,95	20	25	30	35	35	Penanaman Modal
Menurunnya kemiskinan		Tingkat Kemiskinan			Persen	25,27	24,95	24,86	24,76	24,67	24,67	
	Menurunnya Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)			Persen	5,65	4,34	3,88	3,43	2,97	2,97	
			Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan permintaan pasar tenaga kerja	Persen	22,08	25	25	25	25	25	Tenaga Kerja

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal Program (2021)	Capaian Kinerja Program				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD	Urusan Penanggung-jawab
							2023	2024	2025	2026		
			Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan	Persen	22,25	25	25	25	25	25	Tenaga Kerja
			Program Hubungan Industrial	Peningkatan pelayanan penempatan tenaga kerja	Persen	35	40	43	45	46	46	Tenaga Kerja
	Meningkatnya kontribusi sektor koperasi dan UKM terhadap perekonomian	Persentase koperasi yang meningkat SHU-nya			Persen	4,37	5,47	5,95	6,42	6,90	6,90	
			Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase pengurus koperasi yang terlatih	Persen	47,18	50	60	70	80	80	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal Program (2021)	Capaian Kinerja Program				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD	Urusan Penanggung-jawab
							2023	2024	2025	2026		
			Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase koperasi produksi yang didampingi	Persen	57,76	60	70	75	80	80	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
			Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Prosentase koperasi yang disupervisi kesehatan manajemennya	Persen	67	70	75	80	90	90	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		Persentase Pertumbuhan UMKM			Persen	0,7	1	1,2	1,6	2	2	
			Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Prosentase usaha mikro yang meningkat kapasitas produksinya	Persen	8	10	20	30	40	40	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal Program (2021)	Capaian Kinerja Program				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD	Urusan Penanggung-jawab
							2023	2024	2025	2026		
			Program Pengembangan UMKM	Persentase usaha mikro yang memiliki produk yang bersertifikat	Persen	2,04	5	10	15	20	20	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Meningkatnya infrastruktur dasar dan pengembangan wilayah yang berkelanjutan		Indeks Infrastruktur			Indeks	64,64	75,03	80,23	85,42	90,62	90,62	
	Meningkatnya infrastruktur pelayanan dasar yang memadai	Persentase cakupan infrastruktur pelayanan dasar			Persen	64,37	78,12	79,26	80,39	81,53	81,53	

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal Program (2021)	Capaian Kinerja Program				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD	Urusan Penanggung-jawab
							2023	2024	2025	2026		
			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase rumah tangga yang terlayani air bersih perpipaan	Persen	51,26	60,00	70,00	80,00	90,00	90,00	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase sanitasi komunal dalam kondisi baik	Persen	61,26	70,00	75,00	80,00	85,00	85,00	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Persentase Peningkatan ketersediaan sanitasi individual	Persen	3,57	5,00	10,00	15,00	20,00	20,00	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase kawasan perumahan yang memiliki PSU dalam kondisi baik	Persen	56,68	60,00	62,00	68,00	71,00	71,00	Perumahan dan Kawasan Permukiman

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal Program (2021)	Capaian Kinerja Program				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD	Urusan Penanggung-jawab
							2023	2024	2025	2026		
			Program Pengembangan Permukiman	Persentase infrastruktur dikawasan strategis cepat tumbuh yang memadai	Persen	50,25	55,00	60,00	65,00	70,00	70,00	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Program Pengembangan Perumahan	Persentase rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kot a	Persen	35,28	40,00	45,00	50,00	55,00	55,00	Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Persentase rumah layak huni bagi korban bencana	Persen	65,27	70,00	75,00	80,00	85,00	85,00	Perumahan dan Kawasan Permukiman

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal Program (2021)	Capaian Kinerja Program				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD	Urusan Penanggung-jawab
							2023	2024	2025	2026		
				kabupaten/kot a								
				Persentase rekomendasi teknis site plan pengembangan dan pembangunan perumahan	Persen	5,29	10,00	20,00	30,00	40,00	40,00	Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Program Kawasan Permukiman	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 hektar yang ditangani	Persen	10,28	15,00	20,00	25,00	30,00	30,00	Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Persentase rumah tidak layak huni yang	Persen	15,25	20,00	25,00	30,00	40,00	40,00	Perumahan dan Kawasan Permukiman

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal Program (2021)	Capaian Kinerja Program				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD	Urusan Penanggung-jawab
							2023	2024	2025	2026		
				ditingkatkan kualitasnya di kawasan kumuh								
			Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase rumah tidak layak huni yang ditangani	Persen	40,23	45,00	50,00	60,00	70,00	70,00	Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Persentase rumah tidak layak huni yang ditingkatkan kualitasnya di luar kawasan kumuh	Persen	40,85	45,00	50,00	60,00	70,00	70,00	Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Persentase penyediaan rumah layak huni bagi	Persen	45,75	50,00	60,00	70,00	80,00	80,00	Perumahan dan Kawasan Permukiman

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal Program (2021)	Capaian Kinerja Program				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD	Urusan Penanggung-jawab
							2023	2024	2025	2026		
				keluarga miskin								
	Meningkatnya infrastruktur pendukung pengembangan ekonomi yang memadai	Cakupan infrastruktur yang mendukung pengembangan ekonomi dalam kondisi mantap/dalam kondisi baik			Persen	49,73	60,89	64,69	68,50	72,31	72,31	
			Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase panjang jaringan jalan yang ditingkatkan kualitasnya	Persen	55,85	60,00	70,00	80,00	90,00	90,00	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Persentase Panjang Jembatan	Persen	55,71	60,00	70,00	80,00	90,00	90,00	Pekerjaan Umum dan Penataan

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal Program (2021)	Capaian Kinerja Program				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD	Urusan Penanggung-jawab
							2023	2024	2025	2026		
				dalam kondisi baik								Ruang
			Program Pengelolaan Pelayaran	Persentase ijin pengelolaan pelayaran yang diterbitkan	Persen	4,12	5,00	10,00	15,00	20,00	20,00	Perhubungan
			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase drainase kondisi baik	Persen	55,72	60,00	65,00	70,00	75,00	75,00	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	Persen	45,81	50,00	55,00	60,00	65,00	65,00	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal Program (2021)	Capaian Kinerja Program				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD	Urusan Penanggung-jawab
							2023	2024	2025	2026		
	Meningkatnya kualitas kinerja lalu lintas dan angkutan jalan	indeks kinerja lalu lintas dan angkutan jalan			Indeks	48,33	62,83	66,96	71,08	75,21	75,21	
			Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase angkutan umum yang berkualitas baik	Persen	55,54	60,00	70,00	80,00	90,00	90,00	Perhubungan
				Persentase kepemilikan KIR Angkutan Umum	Persen	65,03	70,00	75,00	80,00	85,00	85,00	Perhubungan
				Persentase sarana dan prasarana perhubungan memadai	Persen	45,24	50,00	55,00	60,00	70,00	70,00	Perhubungan

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal Program (2021)	Capaian Kinerja Program				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD	Urusan Penanggung-jawab
							2023	2024	2025	2026		
	Meningkatnya keserasian pembangunan antar sektor	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang			Persen	61	65	69	72,5	75	75	
			Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Persentase Penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan yang selesai tepat waktu	Persen	17,29	20,00	30,00	40,00	50,00	50,00	Pertanahan
			Program Penetapan Tanah Ulayat	Persentase tanah ulayat yang ditetapkan	Persen	7,21	10,00	20,00	30,00	40,00	40,00	Pertanahan
			Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase ketersediaan informasi tata ruang	Persen	35,84	40,00	50,00	60,00	70,00	70,00	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal Program (2021)	Capaian Kinerja Program				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD	Urusan Penanggung-jawab
							2023	2024	2025	2026		
				Persentase kawasan memiliki rencana detil tata ruang	Persen	8,24	10,00	15,00	20,00	25,00	25,00	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase Peningkatan Layanan Jasa Konstruksi	Persen	41,53	45,00	55,00	60,00	70,00	70,00	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Meningkatnya kualitas air, udara dan lahan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup			Indeks	79,80	82,40	83,70	85,00	86,30	86,30	
		Indeks Kualitas Air (IKA)			Indeks	55,56	56,09	56,17	56,25	56,33	56,33	
		Indeks Kualitas Udara (IKU)			Indeks	93,33	93,73	93,93	94,13	94,33	94,33	

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal Program (2021)	Capaian Kinerja Program				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD	Urusan Penanggung-jawab
							2023	2024	2025	2026		
			Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Cakupan pemantauan kualitas air	Persen	57,00	60,00	70,00	80,00	90,00	90,00	Lingkungan Hidup
				Persentase sumber air yang dikonservasi	Persen	46,00	50,00	60,00	70,00	80,00	80,00	Lingkungan Hidup
				Persentase Kampung Iklim yang terfasilitasi	Persen	0,24	5,00	10,00	15,00	20,00	20,00	Lingkungan Hidup
				Cakupan pemantauan kualitas udara	Persen	55,24	60,00	70,00	80,00	90,00	90,00	Lingkungan Hidup
			Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	Persentase limbah B3 yang terkelola	Persen	25	30	35	40	45	45	Lingkungan Hidup

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal Program (2021)	Capaian Kinerja Program				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD	Urusan Penanggung-jawab
							2023	2024	2025	2026		
			dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)									
		Indeks Kualitas Lahan (IKL)			Indeks	87,85	87,85	87,85	87,85	87,85	87,85	
			Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase persetujuan lingkungan yang dikeluarkan bagi aktivitas investasi yang sesuai standar	Persen	76,00	80,00	85,00	90,00	95,00	95,00	Lingkungan Hidup
				Persentase ketaatan pelaku usaha dan/ atau kegiatan terhadap izin	Persen	66,00	70,00	75,00	80,00	85,00	85,00	Lingkungan Hidup

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal Program (2021)	Capaian Kinerja Program				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD	Urusan Penanggung-jawab
							2023	2024	2025	2026		
				lingkungan, izin PPLH dan PUU LH								
				Persentase perusahaan yang ramah lingkungan	Persen	59,30	65,00	70,00	75,00	80,00	80,00	Lingkungan Hidup
			Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase perencanaan lingkungan hidup yang sesuai standar	Persen	76,00	80,00	85,00	90,00	95,00	95,00	Lingkungan Hidup
			Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Presentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang dikelola	Persen	1,00	5,00	10,00	15,00	20,00	20,00	Lingkungan Hidup
			Program Pengelolaan Persampahan	Persentase timbulan sampah di perkotaan yang ditangani	Persen	45,24	50,00	60,00	70,00	80,00	80,00	Lingkungan Hidup

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal Program (2021)	Capaian Kinerja Program				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD	Urusan Penanggung-jawab
							2023	2024	2025	2026		
			Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase ketersediaan TPS3R di Kecamatan	Persen	16,00	20,00	30,00	40,00	50,00	50,00	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Meningkatnya keberdayaan sosial masyarakat		Angka Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)			Angka	12,71	16,39	15,74	15,31	15,21	15,21	
	Meningkatnya kesejahteraan PMKS	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial			Persen	0,91	1,44	1,58	1,71	1,83	1,83	
			Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Anak Terlantar yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial di Luar	Persen	0,23	1,53	1,50	1,46	1,43	1,43	Sosial

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal Program (2021)	Capaian Kinerja Program				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD	Urusan Penanggung-jawab
							2023	2024	2025	2026		
				Panti								
				Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial di Luar Panti	Persen	15,67	16,88	14,63	12,38	10,13	10,13	Sosial
				Persentase Penyandang Disabilitas yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial di Luar Panti	Persen	2,81	5,15	7,72	10,30	12,87	12,87	Sosial

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal Program (2021)	Capaian Kinerja Program				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD	Urusan Penanggung-jawab
							2023	2024	2025	2026		
			Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang Aktif	Persen	76,97	100,0 0	100,0 0	100,0 0	100,0 0	100,00	Sosial
			Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase Keluarga Penerima Manfaat yang Menerima Bantuan Sosial	Persen	86,57	100,0 0	100,0 0	100,0 0	100,0 0	100,00	Sosial
			Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Persentase Kawasan transmigrasi	Persen	0,00	5,00	10,00	15,00	20,00	20,00	Transmigrasi
			Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Cakupan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan sesuai Standar	Persen	100,00	100,0 0	100,0 0	100,0 0	100,0 0	100,00	Sosial

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal Program (2021)	Capaian Kinerja Program				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD	Urusan Penanggung-jawab
							2023	2024	2025	2026		
Meningkatnya kualitas pencegahan dan penanganan bencana		Indeks Resiko bencana			Indeks	170,18	172,81	173,68	174,56	175,44	175,44	
	Menurunnya resiko bencana	Indeks Kapasitas (Komponen IRBI)			Indeks	79	83	85	86	87	87	
			Program Penanganan Bencana	Persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial selama Masa Tanggap Darurat	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Sosial
			Program Penanggulangan Bencana	Persentase Warga Negara yang	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Ketenteraman dan Ketertiban

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal Program (2021)	Capaian Kinerja Program				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD	Urusan Penanggung-jawab
							2023	2024	2025	2026		
				Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana								
				Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Ketenteraman dan Ketertiban
				Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Ketenteraman dan Ketertiban

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal Program (2021)	Capaian Kinerja Program				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD	Urusan Penanggung-jawab
							2023	2024	2025	2026		
				Korban Bencana								
			Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Ketenteraman dan Ketertiban
Menurunkan kesenjangan gender		Indeks Pembangunan Gender			Indeks	96,21	98,62	98,65	98,67	98,69	98,69	
	Meningkatnya keberdayaan perempuan dan anak	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan			Persen	59,47	64,77	66,78	68,78	70,79	70,79	

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal Program (2021)	Capaian Kinerja Program				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD	Urusan Penanggung-jawab
							2023	2024	2025	2026		
			Program Pengarusutamaa n Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta dan Pemerintah	Persen	7,55	8,50	8,60	8,70	8,80	8,80	Pemberdaya an Perempuan dan Perlindungan Anak
		Persentase kekerasan terhadap perempuan			Persen	0,0207	0,0195	0,0188	0,0182	0,0143	0,0143	
			Program Perlindungan Perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan yang ditangani	Persen	86,00	88,46	89,09	90,32	96,00	96,00	Pemberdaya an Perempuan dan Perlindungan Anak
		Persentase Kekerasan terhadap Anak			Persen	0,0043	0,0038	0,0031	0,0023	0,0016	0,0016	

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal Program (2021)	Capaian Kinerja Program				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD	Urusan Penanggung-jawab
							2023	2024	2025	2026		
			Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase Anak Korban Kekerasan yang ditangani	Persen	56,87	70,00	93,33	100,00	100,00	100,00	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan		Indeks Reformasi Birokrasi			Indeks	58,12	76,67	76,92	77,08	77,16	77,16	
	Terwujudnya pengelolaan keuangan yang akuntabel	Opini BPK			WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
			Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Presentase PD yang menyusun Laporan keuangan sesuai Satndar	Persen	88,00	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Keuangan

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal Program (2021)	Capaian Kinerja Program				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD	Urusan Penanggung-jawab
							2023	2024	2025	2026		
				(Waktu dan SAP)								
				Presentase Realisasi Belanja daerah minimal 90 %	Persen	88,00	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Keuangan
			Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Persen	3,78	4,11	4,47	4,87	5,31	5,31	Keuangan
			Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Capaian Nilai MCP Kabupaten	Persen	66,01	68,70	70,37	72,04	73,71	73,71	Inspektorat
			Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	Persen	78,43	81,25	84,62	90,91	93,75	93,75	Inspektorat

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal Program (2021)	Capaian Kinerja Program				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD	Urusan Penanggung-jawab
							2023	2024	2025	2026		
				Eksternal								
				Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Internal	Persen	80,06	88,57	91,43	94,44	100,00	100,00	Inspektorat
			Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase aset daerah yang dilakukan penatausahaan dan pengamanan	Persen	97,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Keuangan
				Persentase Aset Tanah yang bersertifikat	Persen	30,00	50,00	60,00	70,00	80,00	80,00	Keuangan

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal Program (2021)	Capaian Kinerja Program				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD	Urusan Penanggung-jawab
							2023	2024	2025	2026		
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah	Nilai SAKIP			Nilai	CC	B	B	A	A	A	
			Program Perencanaan, Pengendalian dan Evauasi Pembangunan Daerah	Persentase Realisasi program	Persen	87,00	100,0 0	100,0 0	100,0 0	100,0 0	100,00	Perencanaan
			Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase konsistensi dokumen RPJMD dengan RKPD	Persen	87,00	100,0 0	100,0 0	100,0 0	100,0 0	100,00	Perencanaan
				Persentase konsistensi dokumen RPJMD	Persen	83,43	100,0 0	100,0 0	100,0 0	100,0 0	100,00	Perencanaan

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal Program (2021)	Capaian Kinerja Program				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD	Urusan Penanggung-jawab
							2023	2024	2025	2026		
				dengan Renstra								
				Persentase konsistensi dokumen Renstra dengan Renja	Persen	82,02	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Perencanaan
				Persentase Penyusunan dokumen perencanaan Tepat Waktu	Persen	83,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Perencanaan
			Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase data statistik sektoral yang terupdate	Persen	75,32	80,00	85,00	90,00	95,00	95,00	Statistik
			Program Penunjang urusan Pemerintahan	Persentase penyampaian laporan kinerja sesuai standar	Persen	88,74	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Penunjang / Rutin

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal Program (2021)	Capaian Kinerja Program				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD	Urusan Penanggung-jawab
							2023	2024	2025	2026		
			Daerah Kab./Kota	(Waktu)								
				Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Sekretariat Daerah
				Persentase Pemenuhan Layanan Sarana dan Prasarana Kerja	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Sekretariat Daerah
				Persentase Perangkat Daerah yang memiliki Nilai SAKIP Minimal 80	Persen	65,32	76,92	82,69	90,38	96,15	96,15	Sekretariat Daerah

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal Program (2021)	Capaian Kinerja Program				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD	Urusan Penanggung-jawab
							2023	2024	2025	2026		
		Status kinerja Penyelenggaraan pemerintahan daerah			Predikat	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
			Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase usulan kebijakan bidang pemerintahan yang ditindaklanjuti	Persen	65,64	66,67	73,33	86,67	100,00	100,00	Sekretariat Daerah
				Persentase Kerjasama Pemerintah Daerah yang ditindaklanjuti	Persen	54,23	66,67	75,00	87,50	100,00	100,00	Sekretariat Daerah
				Persentase usulan kebijakan bidang	Persen	63,00	60,00	70,00	76,00	80,00	80,00	Sekretariat Daerah

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal Program (2021)	Capaian Kinerja Program				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD	Urusan Penanggung-jawab
							2023	2024	2025	2026		
				kesejahteraan rakyat yang ditindaklanjuti								
				Persentase produk hukum daerah yang dituntaskan	Persen	74,00	80,00	87,50	90,00	92,50	92,50	Sekretariat Daerah
			Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase usulan kebijakan bidang perekonomian yang ditindaklanjuti	Persen	12,00	15,00	20,00	25,00	30,00	30,00	Sekretariat Daerah
				Persentase Kebijakan Strategis Bidang Pembangunan yang	Persen	77,00	80,00	85,00	90,00	95,00	95,00	Sekretariat Daerah

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal Program (2021)	Capaian Kinerja Program				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD	Urusan Penanggung-jawab
							2023	2024	2025	2026		
				ditindaklanjuti								
				Persentase kontribusi BUMD terhadap PAD	Persen	0,00	0,25	0,38	0,50	0,63	0,63	Sekretariat Daerah
				Persentase Pengadaan Barang dan Jasa yang tepat waktu	Persen	86,23	80,00	83,33	88,46	90,91	90,91	Sekretariat Daerah
			Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Persentase Police Brief Bidang Penelitian dan Pengembangan yang dimanfaatkan dalam	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Penelitian dan Pengembangan

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal Program (2021)	Capaian Kinerja Program				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD	Urusan Penanggung-jawab
							2023	2024	2025	2026		
				Perumusan Kebijakan								
				Persentase Kebijakan Inovasi yang diterapkan	Persen	44,00	48,00	50,00	52,00	54,00	60,00	Penelitian dan Pengembangan
			Program dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase dukungan Tupoksi DPRD sesuai standar	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Sekretariat DPRD
			Program Kepegawaian Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pegawai di Setiap Jabatan	Persen	75,00	77,00	80,00	83,00	87,00	94,00	Kepegawaian

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal Program (2021)	Capaian Kinerja Program				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD	Urusan Penanggung-jawab
							2023	2024	2025	2026		
				Persentase penurunan kasus pelanggaran disiplin ASN	Persen	74,00	77,00	80,00	83,00	87,00	94,00	Kepegawaian
				Persentase Pegawai yang Memenuhi Target SKP dengan predikat minimal baik	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Kepegawaian
			Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase kesesuaian jabatan dengan persyaratan	Persen	75,00	87,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Pendidikan dan Pelatihan
				Persentase ASN yang mendapatkan peningkatan kapasitas	Persen	0,06	0,07	0,08	0,09	0,10	0,20	Pendidikan dan Pelatihan

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal Program (2021)	Capaian Kinerja Program				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD	Urusan Penanggung-jawab
							2023	2024	2025	2026		
	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat			Indeks	0	77,5	80,5	85,75	87	87	
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase layanan masyarakat yang sesuai standar	Persen	65,12	89,13	91,30	93,48	97,83	97,83	Kecamatan
				Persentase Layanan Publik Kecamatan Tepat Waktu	Persen	75,00	100,0 0	100,0 0	100,0 0	100,0 0	100,00	Kecamatan
			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Hasil Koordinasi Bidang Pemberdayaa	Persen	87,12	100,0 0	100,0 0	100,0 0	100,0 0	100,00	Kecamatan

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal Program (2021)	Capaian Kinerja Program				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD	Urusan Penanggung-jawab
							2023	2024	2025	2026		
				n Masyarakat dan Pembangunan yang ditindaklanjuti								
			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Koordinasi Pemerintahan Umum yang ditindaklanjuti	Persen	89,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Kecamatan
			Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang ditindaklanjuti	Persen	83,42	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Kecamatan

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal Program (2021)	Capaian Kinerja Program				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD	Urusan Penanggung-jawab
							2023	2024	2025	2026		
			Program Pendaftaran Penduduk	Persentase masyarakat yang memiliki KTP	Persen	49,21	50,30	51,23	51,69	52,16	52,16	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				Persentase Keluarga yang memiliki KK	Persen	21,24	24,91	24,96	25,01	25,05	25,05	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Program Pencatatan Sipil	Persentase penerbitan akta kelahiran	Persen	65,00	79,00	80,00	81,00	82,00	82,00	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				Persentase penerbitan akta Nikah	Persen	11,00	12,00	14,00	16,00	18,00	18,00	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal Program (2021)	Capaian Kinerja Program				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD	Urusan Penanggung-jawab
							2023	2024	2025	2026		
				Persentase penerbitan akta Perceraian	Persen	0,06	0,07	0,06	0,05	0,04	0,04	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				Persentase penerbitan akta kematian	Persen	0,13	0,16	0,24	0,26	0,28	0,28	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Program Pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Persentase penyajian informasi kependudukan sesuai standar	Persen	35,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Program Pengelolaan Arsip	Persentase PD yang mengelola arsip secara baku	Persen	75,21	86,54	88,46	90,38	92,31	92,31	Kearsipan

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal Program (2021)	Capaian Kinerja Program				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD	Urusan Penanggung-jawab
							2023	2024	2025	2026		
	Meningkatnya Penyelenggaraan pemerintahan berbasis Elektronik	Predikat SPBE			Predikat	Kurang	Cukup	Baik	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	
			Program Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase penyebaran seluruh informasi daerah kepada masyarakat	Persen	67,00	70,00	80,00	90,00	100,00	100,00	Komunikasi dan Informatika
			Program Aplikasi Informatika	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara elektronik	Persen	76,00	80,00	85,00	90,00	95,00	95,00	Komunikasi dan Informatika

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal Program (2021)	Capaian Kinerja Program				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD	Urusan Penanggung-jawab
							2023	2024	2025	2026		
			Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	Persen	23,00	25,00	40,00	45,00	50,00	50,00	Persandian
Optimalisasi Kemandirian Desa		Indeks Desa Membangun			Angka	6	10	12	14	16	16	
	Meningkatnya keberdayaan desa	Persentase Penurunan Status Desa dari Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal			Persen	19,57	3,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang memiliki administrasi sesuai standar	Persen	89,00	90,00	93,00	95,00	98,00	98,00	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal Program (2021)	Capaian Kinerja Program				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD	Urusan Penanggung-jawab
							2023	2024	2025	2026		
			Program Penataan Desa	Persentase Penataan Desa yang difasilitasi sesuai Ketentuan	Persen	71,00	75,00	80,00	82,00	86,00	86,00	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase kelembagaan masyarakat desa yang diberdayakan	Persen	66,00	69,00	71,00	73,00	75,00	75,00	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Meningkatnya kehidupan masyarakat yang harmonis		Angka Konflik Sosial			Angka	3,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Menurunnya potensi konflik sosial	Persentase konflik sosial yang ditangani			Persen	100	100	100	100	100	100	

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal Program (2021)	Capaian Kinerja Program				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD	Urusan Penanggung-jawab
							2023	2024	2025	2026		
			Program Penguatan Ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Persentase masyarakat yang mendapatkan penguatan ideologi Pancasila	Persen	50,00	60,87	65,22	70,65	76,09	76,09	Kesatuan Bangsa dan Politik
			Program Pemberdayaan dan Pengawasan organisasi kemasyarakatan	Persentase Ormas yang terdaftar	Persen	65,12	81,08	89,19	94,59	100,00	100,00	Kesatuan Bangsa dan Politik
			Program Peningkatan Kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	Persentase kebijakan kewaspadaan dini penanganan konflik sosial yang ditindaklanjuti	Persen	86,92	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Kesatuan Bangsa dan Politik

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal Program (2021)	Capaian Kinerja Program				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD	Urusan Penanggung-jawab
							2023	2024	2025	2026		
			Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase Penanganan Fasilitasi Bidang Politik Dalam Negeri	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Kesatuan Bangsa dan Politik
	Meningkatnya ketertiban dan ketenteraman	Persentase Penanganan Kasus K3			Persen	100	100	100	100	100	100	
			Program Peningkatan Ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase Penegakan Perda	Persen	69,12	71,43	80,00	77,78	75,00	75,00	Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal Program (2021)	Capaian Kinerja Program				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD	Urusan Penanggung-jawab
							2023	2024	2025	2026		
				persentase kasus K3 yang ditangani	Persen	85,00	87,50	81,82	88,89	100,00	100,00	Ketenteraman dan Ketertiban Umum

BAB VII

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat indikasi rencana program prioritas Pemerintah Daerah, untuk memenuhi layanan Perangkat Daerah dalam melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah. Selain itu, bab ini juga memuat target program dan pagu indikatifnya. Pagu indikatif merupakan proyeksi kebutuhan pendanaan dalam bentuk jumlah dana yang tersedia untuk menyusun program tahunan. Jumlah dana yang tersedia mengacu pada bab III RPD ini terutama mengenai kerangka pendanaan yang terdiri dari kapasitas riil keuangan dan belanja daerah. Adapun kerangka pendanaan pembangunan daerah dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

7.1. Kerangka Pendanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

Pelaksanaan pembangunan daerah tidak terlepas dari kerangka pendanaan yang diproyeksikan saat ini. Sebagaimana yang telah dijelaskan di bab 3 terkait dengan proyeksi APBD tahun 2023 hingga 2026 dimana menuai tantangan besar. Tantangan tersebut disebabkan adanya COVID-19 yang melanda Kabupaten Seram Bagian Barat, bahkan seluruh daerah di Indonesia. Diharapkan proyeksi pendapatan daerah dapat tercapai melalui upaya sebagai berikut:

1. Peningkatan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak;
2. Penguatan data objek pajak;
3. Peningkatan *punishment* dan *reward* terhadap subjek pajak;
4. Optimalisasi objek retribusi daerah;
5. Peningkatan koordinasi dengan perangkat daerah penghasil;
6. Peningkatan pelayanan pajak berbasis digital;
7. Peningkatan kontribusi BUMD terhadap PAD;
8. Optimalisasi aset-aset daerah yang potensial dalam mendukung investasi daerah;

Adapun kerangka pendanaan pembangunan daerah Kabupaten Seram Bagian Barat tahun 2023-2026 dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

Tabel 7.1. Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026

Kode			Kapasitas Riil/ Belanja	Proyeksi			
				2023	2024	2025	2026
1			2	3	4	5	6
			Kapasitas Riil Keuangan	996.251.245.271,43	1.002.942.468.178,19	1.009.633.691.084,94	1.016.324.913.991,70
5			BELANJA	996.251.245.271,43	1.002.942.468.178,19	1.009.633.691.084,94	1.016.324.913.991,70
5	1		Belanja Operasi	693.586.376.025,13	695.767.554.778,71	697.956.641.727,67	700.153.671.187,29
5	1	01	Belanja Pegawai	435.474.398.660,24	436.345.347.457,56	437.218.038.152,48	438.092.474.228,78
5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	246.651.911.273,70	247.885.170.830,07	249.124.596.684,22	250.370.219.667,64
5	1	05	Belanja Hibah	10.353.063.816,14	10.422.599.144,79	10.492.134.473,45	10.561.669.802,10
5	1	06	Belanja Bantuan Sosial	1.107.002.275,05	1.114.437.346,29	1.121.872.417,53	1.129.307.488,77
5	2		Belanja Modal	148.578.596.219,30	151.348.209.007,34	154.106.211.443,17	156.852.550.700,75
5	3		Belanja Tidak Terduga	6.000.000.000,00	7.000.000.000,00	8.000.000.000,00	9.000.000.000,00
5	4		Belanja Transfer	148.086.273.027,00	148.826.704.392,14	149.570.837.914,10	150.318.692.103,67
5	4	02	Belanja Bantuan Keuangan	148.086.273.027,00	148.826.704.392,14	149.570.837.914,10	150.318.692.103,67

Pada dasarnya ketercapaian target kinerja program tidak hanya didukung oleh pendanaan yang bersumber dari APBD Kabupaten Seram Bagian Barat, melainkan bisa dari berbagai sumber pendanaan lain, seperti APBN maupun pendanaan lainnya. Namun demikian, kerangka pendanaan pembangunan daerah dalam bab ini hanya mencantumkan sumber pendanaan yang bersumber dari APBD Kabupaten Seram Bagian Barat. Kerangka pendanaan ini akan menjadi acuan dalam menyusun kebutuhan pendanaan masing-masing program. Program-program yang telah disusun pagu indikatifnya kemudian menjadi acuan bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah.

7.2. Program Pembangunan

7.2.1. Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Pendidikan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Pendidikan

Program ini dilaksanakan dalam rangka optimalisasi pengelolaan pendidikan Sekolah Dasar, Menengah Pertama, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dan Pendidikan Kesetaraan. Program ini dioperasionalkan dalam bentuk pembangunan unit sekolah baru, perpustakaan sekolah, sarana dan prasarana utilitas sekolah, penambahan ruang kelas baru, rehabilitasi ruang kelas, pengadaan perlengkapan sekolah, perlengkapan siswa, mebel sekolah alat peraga siswa, pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan, peningkatan kapasitas pengelola dana BOS, pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa, baik di tingkat pendidikan dasar, menengah pertama, PAUD maupun pendidikan kesetaraan. Pelaksanaan program ini diharapkan dapat meningkatkan APM SD dan SMP, APK PAUD, persentase sekolah SD dan SMP yang terakreditasi serta beberapa indikator lain yang merupakan standar pelayanan minimum dalam urusan pendidikan.

b. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Program ini diarahkan untuk melakukan pemerataan dari segi kuantitas maupun kualitas pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan pendidikan dasar, PAUD, dan pendidikan kesetaraan. Program ini dioperasionalkan dengan melakukan pemetaan dan perhitungan terhadap jumlah pendidik dan tenaga kependidikan baik di satuan pendidikan dasar, PAUD maupun pendidikan kesetaraan. Program ini dilakukan untuk meningkatkan persentase guru SD dan SMP yang bersertifikasi.

2. Kesehatan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Program ini diarahkan untuk memenuhi kualitas layanan kesehatan dasar bagi masyarakat. Layanan tersebut difokuskan pada layanan rumah sakit dan puskesmas sesuai standar. Cakupan layanan yang diberikan diantaranya pemeriksaan ibu hamil, pelayanan ibu bersalin, pelayanan bayi baru lahir, pelayanan balita, penanganan penyakit menular dan tidak menular, pencegahan stunting dan balita kurang gizi, penanganan Covid-19, jaminan kesehatan warga miskin, peningkatan kesehatan lingkungan serta memberikan layanan screening kesehatan kepada warga negara usia pendidikan dasar, usia produktif, dan lanjut usia.

b. Program Peningkatan Kapasitas SDM Tenaga Kesehatan

Program ini diarahkan untuk meningkatkan mutu dan kompetensi SDM kesehatan melalui berbagai kegiatan baik berupa pendidikan non formal bersertifikasi maupun dalam upaya pemenuhan jumlah kebutuhan tenaga kesehatan dan sebagainya.

c. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga kesehatan baik kesehatan personal maupun lingkungan sekitar. Upaya yang akan dilakukan yaitu membentuk desa siaga aktif mandiri dan menerapkan Germas pada masing-masing desa.

d. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman

Program ini diarahkan untuk memastikan obat dan makanan yang beredar sudah lolos uji sesuai standar kesehatan. Adapun upaya yang akan dilakukan yaitu memastikan sarana produksi IRTP memenuhi standar dan syarat perijinan, Tempat Pengolahan Makanan (TPM) memenuhi syarat hygiene sanitasi, serta fasilitasi pelayanan kefarmasian memenuhi standar dan syarat perijinan.

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan infrastruktur air baku untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Kabupaten Seram Bagian Barat. Indikator keberhasilan dari program ini adalah meningkatnya jaringan irigasi pada wilayah-wilayah persawahan maupun pertanian masyarakat di desa-desa.

b. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan air bersih untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Kabupaten Seram Bagian Barat. Indikator keberhasilan dari program ini adalah meningkatnya rumah tangga yang terlayani air bersih untuk kebutuhan pokok sehari-hari di Kabupaten Seram Bagian Barat. Program ini dilaksanakan untuk mendukung tercapainya indikator kinerja SDGs akses layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.

c. Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional

Program ini bertujuan untuk terselenggaranya pengelolaan sampah dengan inovasi teknologi mesin pencacah sampah dan pengayak kompos yang lebih efektif dan efisien. Program ini dilaksanakan untuk mendukung tercapainya indikator kinerja persentase ketersediaan TPS3R di Kecamatan.

d. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah

Program ini bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan sanitasi individu maupun komunal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Kabupaten Seram Bagian Barat. Indikator keberhasilan dari program ini adalah banyaknya rumah tangga yang terlayani sanitasi layak dan dalam kondisi baik serta banyaknya rumah tangga yang telah memiliki septitank individu. Program ini dilaksanakan untuk mendukung tercapainya indikator kinerja SDGs akses layanan sanitasi layak dan berkelanjutan

e. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase

Program ini bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan jaringan drainase baik pada wilayah perkotaan atau perumahan maupun pada daerah-daerah dengan kondisi rawan banjir. Indikator keberhasilan program ini adalah banyaknya saluran drainase yang dibangun dan dipelihara dalam kondisi baik atau layak.

f. Program Pengembangan Permukiman

Program ini bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pada kawasan strategis diluar kawasan perumahan diluar Kawasan permukiman. Indikator keberhasilan program ini adalah banyaknya infrastruktur dikawasan strategis cepat tumbuh yang dibangun atau dipelihara.

g. Program Penyelenggaraan Jalan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan jaringan jalan dan jembatan di wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat. Indikator

keberhasilan program ini adalah panjang jalan yang ditingkatkan kualitasnya, serta banyaknya jembatan dalam kondisi baik.

h. Program Pengembangan Jasa Konstruksi

Program ini bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan gedung fasilitas publik yang memadai di Kabupaten Seram Bagian Barat. Indikator keberhasilan dari program ini adalah banyaknya jasa konstruksi yang telah memiliki SIUJK. Program ini dilaksanakan untuk mendukung tercapainya indikator kinerja bangunan yang sesuai standar.

i. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian tata ruang di Kabupaten Seram Bagian Barat. Pada aspek perencanaan, program ini diarahkan pada peningkatan ketersediaan dokumen rencana detail tata ruang (RDTR), sedangkan pada aspek pemanfaatan dan pengendalian dilakukan dengan mengoptimalkan koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan tata ruang. Program ini dilaksanakan untuk mendukung indikator kinerja persentase kesesuaian pemanfaatan ruang.

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengembangan Perumahan

Program ini diarahkan untuk meningkatkan penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana maupun korban relokasi program pemerintah kabupaten. Program dilaksanakan untuk mendukung tercapainya SPM bidang perumahan dan kawasan permukiman dan indikator kinerja cakupan ketersediaan rumah layak huni.

b. Program Kawasan Permukiman

Program ini bertujuan untuk meningkatkan penanganan kawasan kumuh melalui penataan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 Ha serta perbaikan rumah tidak layak huni di kawasan kumuh. Program ini mendukung pencapaian indikator kinerja menurunnya luas kawasan kumuh dan meningkatnya cakupan ketersediaan rumah layak huni.

c. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh

Program ini diarahkan pada perbaikan rumah tidak layak huni di luar kawasan kumuh. Program ini dilaksanakan untuk mendukung upaya pengentasan kemiskinan dan pencapaian indikator kinerja cakupan ketersediaan rumah layak huni.

d. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)

Program ini diarahkan pada peningkatan ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum untuk mendukung fungsi hunian serta penyediaan rumah layak huni

untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Program ini mendukung tercapainya indikator kinerja menurunnya luas kawasan kumuh dan meningkatnya cakupan ketersediaan rumah layak huni.

5. Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Program ini diarahkan pada kegiatan penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dalam daerah kabupaten, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, dan pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten. Beberapa kegiatan tersebut dioperasionalkan dalam bentuk pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum, koordinasi penyelenggaraan keramaian dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, membangun kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan, sosialisasi penegakan Peraturan daerah dan Peraturan Bupati, penanganan atas pelanggaran Peraturan daerah dan Peraturan Bupati, serta pengembangan kapasitas dan karir PPNS. Program ini dilaksanakan untuk meningkatkan persentase penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman, dan Keindahan).

b. Program Penanggulangan Bencana

Program ini diarahkan pada kegiatan pelayanan informasi rawan bencana kabupaten, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, serta penataan sistem dasar penanggulangan bencana. Beberapa kegiatan tersebut dioperasionalkan kedalam bentuk penyusunan kajian resiko bencana, penyusunan rencana penanggulangan bencana, sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana, pemberian pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana, penyediaan sarana dan prasarana kesiapsiagaan, penanganan pasca bencana, pengembangan kapasitas Tim Reaksi cepat (TRC), penyusunan regulasi penanganan bencana, penguatan kelembagaan bencana, dan pembinaan, serta pengawasan terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana. Program ini dilaksanakan untuk meningkatkan persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana dan persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana.

c. Program Pencegahan Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran

Program ini diarahkan pada kegiatan pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah kabupaten, inspeksi peralatan proteksi kebakaran, investigasi kejadian

kebakaran. Beberapa kegiatan tersebut dioperasionisasikan dalam bentuk pencegahan, pengendalian dan pemadaman kebakaran, penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran, penanganan bahan beracun dan berbahaya kebakaran, pengadaan sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran, pembinaan aparaturnya pemadam kebakaran, pengelolaan sistem komunikasi dan informasi kebakaran, pendataan dan penilaian sarana dan prasarana proteksi kebakaran, investigasi kejadian kebakaran, pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran, dan pembentukan relawan pemadam kebakaran. program ini dilaksanakan untuk meningkatkan persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran yang dilaporkan.

6. Sosial

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pemberdayaan Sosial

Program ini diarahkan untuk meningkatkan kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam melaksanakan usaha kesejahteraan masyarakat. Upaya yang akan dilakukan yaitu pengembangan PSKS melalui berbagai pelatihan bersertifikat dan pengumpulan sumbangan dari dunia usaha untuk mendukung program kesejahteraan masyarakat.

b. Program Rehabilitasi Sosial

Program ini diarahkan untuk memberikan pelayanan dasar kepada anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan, pengemis, disabilitas dan PMKS lainnya diluar panti sosial. Pelayanan dasar tersebut terdiri dari penyediaan permakanan, penyediaan sandang, pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial, penyediaan alat bantu, peningkatan kemitraan rehabilitasi sosial, serta pemberian bimbingan sosial kepada keluarga ODGJ.

c. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Program ini diarahkan untuk memberikan bantuan sosial dan fasilitasi pengembangan ekonomi bagi fakir miskin. Salah satu kunci keberhasilan program tersebut yaitu tersedianya data fakir miskin yang akurat dan update. Selanjutnya dibutuhkan fasilitasi penyaluran bantuan sosial dan ekonomi yang tepat sasaran pada masyarakat.

d. Program Penanganan Bencana

Program ini diarahkan untuk memberikan bantuan sosial saat dan setelah masa tanggap darurat bencana. Bantuan sosial yang diberikan diantaranya penyediaan sandang, penanganan khusus kelompok rentan, pelayanan dukungan psikososial, serta koordinasi pelaksanaan taruna siaga bencana dan kampung siaga bencana.

e. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

Program ini diarahkan untuk pengelolaan Taman Makam Pahlawan (TMP) sesuai standar. Standar tersebut cukup membantu dalam implementasi proses pengelolaan TMP.

7.2.2. Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Tenaga Kerja

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut

a. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja

Program ini diarahkan untuk meningkatkan kompetensi dari tenaga kerja melalui berbagai pelatihan agar dapat memenuhi kebutuhan pasar tenaga kerja saat ini serta memberi perhatian lebih kepada masyarakat usia produktif yang kurang mampu. Dengan adanya program ini diharapkan tenaga kerja di Kabupaten Seram Bagian Barat memiliki kompetensi (yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi) yang sesuai dengan kebutuhan pasar saat ini. Untuk mencapai hal tersebut, upaya-upaya yang dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan keterampilan pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi, pengadaan sarana pelatihan kerja, pembinaan LPK swasta, serta penyediaan sumber daya perizinan LPK secara terintegrasi. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator persentase kesesuaian tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan permintaan pasar tenaga kerja dan persentase peningkatan fasilitasi pelatihan kerja bagi usia produktif masyarakat tidak mampu.

b. Program Penempatan Tenaga Kerja

Program ini diarahkan untuk lebih fokus pada penempatan tenaga kerja secara langsung melalui upaya-upaya yang berjenjang mulai dari pemutakhiran *database* pencari kerja, penyuluhan, penyediaan bursa kerja *online* maupun *offline*, pengawasan terhadap LPTKS, hingga memberikan pelatihan terhadap Calon Pekerja Migran Indonesia/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CPMI/CTKI), dan pemberdayaan terhadap Pekerja Migran Indonesia/Tenaga Kerja Indonesia (PMI/TKI). Program ini dilakukan untuk mencapai indikator yaitu persentase tenaga kerja yang ditempatkan.

c. Program Hubungan Industrial

Program ini diarahkan untuk terjaminnya hak dan kewajiban antara pekerja dengan yang memberi kerja. Untuk mencapai tujuan tersebut, dilakukan melalui upaya pengawasan terhadap implementasi peraturan perundang-undangan bidang tenaga kerja oleh perusahaan, mencegah adanya perselisihan hubungan industrial antara pegawai dan perusahaan, serta memediasi perselisihan yang terjadi antara pegawai dan perusahaan melalui perundingan bipartite. Program ini dilakukan untuk

mencapai indikator yaitu persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan, persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak, persentase perusahaan yang memenuhi hak pekerja dan kebebasan berserikat dan persentase perusahaan yang mempekerjakan penduduk termasuk difabel.

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan praktek dalam mewujudkan kesetaraan gender baik dilingkungan pemerintah maupun non pemerintah. Dilingkungan pemerintah, program ini diarahkan pada peningkatan penggunaan Anggaran Responsif Gender (ARG). Sedangkan pada lingkungan non pemerintah diarahkan untuk meningkatkan partisipasi perempuan di berbagai bidang seperti politik, hukum, ekonomi, sosial dan sebagainya.

b. Program Perlindungan Perempuan

Program ini diarahkan untuk meningkatkan layanan perlindungan terhadap perempuan. Program tersebut dibagi menjadi dua aspek yakni aspek pencegahan dan penanganan. Aspek pencegahan dilakukan melalui sosialisasi adanya layanan perlindungan korban kekerasan, serta mencegah terjadinya kekerasan dalam keluarga. Pada aspek penanganan akan ada penambahan jumlah layanan rujukan, peningkatan kerjasama dengan lembaga terkait serta peningkatan kapasitas SDM penyedia layanan.

c. Program Perlindungan Khusus Anak

Program ini ditujukan untuk meningkatkan upaya perlindungan khusus pada anak. Adapun upaya yang akan dilakukan yaitu meningkatkan upaya advokasi dan pendampingan pencegahan kekerasan pada anak, pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) anak yang memerlukan perlindungan khusus serta peningkatan kualitas SDM penyelenggaraan layanan perlindungan anak.

3. Pangan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan

Program ini diarahkan untuk mendukung ketersediaan pangan di Kabupaten Seram Bagian Barat. Program ini memiliki indikator persentase peningkatan lumbung pangan dalam kondisi baik. Sarana dan prasarana lumbung pangan menjadi fokus perhatian utama yang harus diintervensi.

b. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat

Program ini diarahkan untuk mendukung ketersediaan pangan di Kabupaten Seram Bagian Barat. Program ini memiliki indikator persentase cadangan pangan, persentase ketersediaan informasi distribusi pangan yang dapat diakses masyarakat, dan persentase peningkatan kelompok UMKM yang melaksanakan diversifikasi pangan. Stok cadangan pangan utama, seperti beras, media informasi distribusi pangan dan pembinaan kelompok UMKM menjadi fokus perhatian utama yang harus diintervensi.

c. Program Penanganan Kerawanan Pangan

Program ini diarahkan untuk mendukung ketersediaan pangan di Kabupaten Seram Bagian Barat. Program ini memiliki indikator persentase penanganan desa rawan pangan. Pendataan dan penanganan desa rawan pangan dengan melibatkan kolaborasi multi aktor di Kabupaten Seram Bagian Barat menjadi fokus perhatian utama yang harus diintervensi.

d. Program Pengawasan Keamanan Pangan

Program ini diarahkan untuk mendukung peningkatan keamanan pangan di Kabupaten Seram Bagian Barat. Program ini memiliki indikator persentase pangan yang aman (layak konsumsi). Peningkatan ketersediaan dan kualitas sarana-prasarana laboratorium pengujian pangan dan pengembangan sertifikasi pangan yang aman (layak konsumsi) menjadi fokus perhatian utama yang harus diintervensi.

4. Pertanian

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan

Program ini bertujuan untuk mengoptimalkan penyelesaian asat tetap (tanah) pemerintah daerah melalui pemberian ganti kerugian kepada para pihak berhak, sekaligus memperluas area lahan milik pemerintah daerah guna keberlanjutan pembangunan untuk penataan ibukota dan daerah strategis lainnya.

b. Program Penetapan Tanah Ulayat

Program ini diarahkan untuk menyelesaikan penataan tanah ulayat melalui kegiatan survei dan pemetaan batas tanah ulayat serta pengakuan dan pengukuhan masyarakat hukum adat dalam wilayah petuanannya.

5. Lingkungan Hidup

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut

a. Program Perencanaan Lingkungan Hidup

Program ini bertujuan untuk mengendalikan pencemaran limbah dengan meningkatkan kualitas perencanaan lingkungan hidup di Kabupaten Seram Bagian Barat. Indikator tercapainya program ini adalah banyaknya dokumen perencanaan lingkungan hidup yang berhasil disusun dengan baik dan sesuai dengan kondisi lingkungan hidup di Kabupaten Seram Bagian Barat. Program ini dilaksanakan untuk mendukung tercapainya indikator kinerja Indeks Kualitas Air.

b. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Program ini diarahkan pada pencegahan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup dan pelaksanaan pengendalian emisi Gas Rumah Kaca (GRK). Program ini diharapkan dapat menekan emisi GRK di Kabupaten Seram Bagian Barat dan mendukung ketercapaian indikator kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).

c. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)

Program ini diarahkan pada peningkatan ketersediaan dan optimalisasi pengelolaan ruang terbuka hijau, seperti kebun raya, taman kota, dan ruang terbuka hijau lainnya. Program ini dilaksanakan untuk mendukung ketercapaian indikator kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).

d. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

Program ini diarahkan untuk menjaga kesinambungan antara peningkatan aktivitas dan izin investasi yang ada di Kabupaten Seram Bagian Barat dengan kelestarian lingkungan hidup. Untuk mencapai tujuan tersebut, upaya yang dilakukan melalui fasilitasi pemenuhan ketentuan dan kewajiban izin lingkungan dan/atau izin PPLH bagi usaha dan atau kegiatan yang mengajukan rekomendasi perizinan lingkungan, serta pengawasan terhadap usaha atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH nya diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat. Selain itu, program ini juga bertujuan untuk mendukung terciptanya perusahaan yang ramah lingkungan sehingga diharapkan investasi di Kabupaten Seram Bagian Barat meningkat tanpa memberi dampak buruk bagi lingkungan. Program ini dilakukan untuk mencapai tiga indikator yaitu persentase persetujuan lingkungan yang dikeluarkan bagi aktivitas investasi yang sesuai standar, persentase ketaatan pelaku usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH, serta persentase perusahaan yang ramah lingkungan.

e. Program Pengelolaan Persampahan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan persampahan melalui peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana persampahan, optimalisasi pengelolaan sampah 3R, dan peningkatan peran masyarakat dalam pengelolaan sampah. Program ini dilaksanakan untuk mendukung ketercapaian indikator kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).

f. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)

Program ini bertujuan untuk mengendalikan pencemaran limbah terutama limbah B3 di Kabupaten Boyolali. Indikator tercapainya program ini adalah limbah B3 yang ada dapat terkelola dengan baik. Program ini dilaksanakan untuk mendukung tercapainya indikator kinerja Indeks Kualitas Air.

6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pendaftaran Penduduk

Dokumen kependudukan memegang peran penting dalam pembangunan. Oleh karena itu, program ini diarahkan untuk meningkatkan kepemilikan dokumen kependudukan berupa e-KTP, Kartu Identitas Anak, dan Kartu Keluarga. Fokus intervensi dari program pendaftaran penduduk antara lain berupa peningkatan kualitas pelayanan dan penyelenggaraan pendaftaran penduduk, serta peningkatan penataan pendaftaran penduduk.

b. Program Pencatatan Sipil

Program ini diarahkan untuk meningkatkan kepemilikan dokumen pencatatan sipil, terutama berupa akta kelahiran dan pengurusan akta kematian, serta pencatatan pernikahan atau akta nikah. Peningkatan kualitas pelayanan dan penyelenggaraan pencatatan sipil menjadi kerangka kegiatan didalam program ini.

c. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Program ini diarahkan untuk meningkatkan pemutakhiran data kependudukan. Kerangka kegiatan yang menjadi prioritas berupa penataan dan penyelenggaraan informasi administrasi kependudukan.

7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penataan Desa

Seiring dengan kewenangan desa yang semakin besar di dalam UU No 6 Tahun 2014, maka diperlukan peningkatan fasilitasi bagi pemerintah desa dalam melakukan penataan desa. Oleh karena itu, program ini memiliki indikator kinerja berupa persentase penataan desa yang difasilitasi sesuai ketentuan. Kerangka kegiatan yang akan dijalankan berupa fasilitasi perubahan status desa menjadi kelurahan, desa menjadi desa adat, peningkatan status dusun menjadi desa sesuai kebutuhan pembangunan dan masyarakat, serta percepatan penegasan

batas desa. Tidak kalah penting dalam program ini akan memfasilitasi tata ruang desa dan sarana prasarana desa.

b. Program Administrasi Pemerintahan Desa

Program ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintah desa. Adapun langkah yang ditempuh melalui pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa serta penataan desa. Pembinaan dan pengawasan dilakukan melalui fasilitasi penyusunan perencanaan dan pelaporan pembangunan desa, fasilitasi pengelolaan keuangan desa, fasilitasi musyawarah desa, fasilitasi peningkatan kapasitas aparatur desa, fasilitasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa serta fasilitasi penyelenggaraan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa.

c. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat

Program ini dilaksanakan untuk meningkatkan upaya pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan potensi desa dan peningkatan swadaya masyarakat dalam pembangunan. Pengembangan desa dilakukan melalui proses identifikasi potensi, fasilitasi pengembangan ekonomi desa, dan peningkatan penggunaan Teknologi Tepat Guna (TTG). Sedangkan peningkatan swadaya masyarakat melalui peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan desa, peningkatan bantuan bulanan bhakti gotong royong, dan fasilitasi kegiatan PKK.

8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengendalian Penduduk

Program ini diarahkan untuk meningkatkan rata-rata usia kawin agar jumlah penduduk tidak meningkat secara signifikan. Untuk itu, diperlukan data basis keluarga dan data hasil pelayanan KB modern untuk memetakan perkiraan pengendalian penduduk. Selain itu, perlu peningkatan pemanfaatan dokumen kajian pengendalian penduduk pada setiap PD. Hal tersebut bertujuan agar masing-masing perangkat daerah memperhatikan aspek dampak kependudukan pada setiap keputusan yang diambil.

b. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)

Program ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah KB aktif pada masyarakat. Peningkatan tersebut dalam rangka mendukung upaya pengendalian jumlah penduduk. Adapun upaya yang akan dilakukan melalui pengendalian distribusi kebutuhan alat dan obat kontrasepsi, meningkatkan tenaga penyuluh KB lapangan serta mengurangi kasus kegagalan atau komplikasi berat pemakaian kontrasepsi Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP).

9. Perhubungan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Program ini diarahkan pada peningkatan akses masyarakat terhadap moda transportasi, peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan, rekayasa lalu lintas untuk mengantisipasi kemacetan, pengujian berkala kendaraan bermotor, dan pengelolaan parkir. Program ini dilaksanakan untuk mendukung tercapainya indikator kinerja rasio konektivitas kabupaten.

b. Program Pengelolaan Pelayaran

Program ini diarahkan pada pembangunan atau peningkatan baik sarana dan prasarana pelabuhan pengumpan lokal, penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian Pelabuhan pengumpan lokal.

10. Komunikasi dan Informatika

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Informasi dan Komunikasi Publik

Program ini diarahkan untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang baik, terutama terkait aspek transparansi dan partisipasi masyarakat. Kinerja yang diharapkan tercapai melalui program ini adalah persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah daerah, serta persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi. Informasi publik melalui program ini diharapkan tidak hanya satu arah dari pemerintah kepada masyarakat, sekaligus mampu membangun inisiatif warga untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan perumusan kebijakan. Berbagai rencana teknis didalam program ini antara lain fasilitasi kelompok informasi masyarakat dan penguatan peran PPID.

b. Program Aplikasi Informatika

Program ini dirancang untuk mengembangkan layanan publik secara online sebagai salah satu program yang mendukung inovasi Kabupaten Seram Bagian Barat. Indikator tercapainya program ini adalah meningkatnya perangkat daerah yang telah mengimplementasikan inovasi *e-government*. Program ini dilaksanakan untuk mendukung indikator kinerja layanan publik dan pengaduan online yang aktif.

11. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi

Program ini diarahkan untuk meningkatkan pengawasan dan pemeriksaan koperasi guna kemandirian ketangguhan dan akuntabilitas koperasi kewenangan kabupaten.

b. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi

Program ini diarahkan untuk mengetahui dan meningkatkan kesehatan koperasi yang diharapkan akan berdampak pada rasa aman dan nyaman bagi anggota koperasi. Selain itu, koperasi yang sehat juga diharapkan dapat membantu perekonomian khususnya perekonomian lokal. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator persentase koperasi yang dibina yang meningkat nilai kesehatannya.

c. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian

Program ini diarahkan untuk memberikan pendidikan dan pelatihan bagi SDM koperasi. Hal tersebut dilakukan karena cukup banyak koperasi di Kabupaten Seram Bagian Barat yang tidak sehat atau nonaktif akibat dari kualitas SDM yang rendah. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator persentase peningkatan SDM Koperasi yang terlatih.

d. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)

Program ini lebih berfokus pada pemberdayaan usaha mikro secara langsung agar usahanya semakin meningkat serta menciptakan usaha-usaha mikro yang baru. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator persentase rata-rata peningkatan omzet pelaku usaha mikro dan jumlah pengembangan usaha mikro.

e. Program Pengembangan UMKM

Program ini lebih berfokus pada pemberdayaan usaha mikro secara langsung agar usahanya semakin meningkat serta menciptakan usaha-usaha mikro yang baru. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator persentase rata-rata peningkatan omzet pelaku usaha mikro dan jumlah pengembangan usaha mikro.

12. Penanaman Modal

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Program ini diarahkan untuk meningkatkan iklim investasi di Kabupaten Seram Bagian Barat melalui identifikasi potensi investasi. Hal ini dilakukan dengan upaya pembuatan peta potensi investasi, profil investasi, hingga yang bersifat mempermudah investasi melalui kebijakan daerah mengenai fasilitasi/insentif. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator yaitu persentase peningkatan potensi investasi yang teridentifikasi.

b. Program Promosi Penanaman Modal

Program ini diarahkan untuk meningkatkan iklim investasi di Kabupaten Seram Bagian Barat melalui promosi potensi investasi secara langsung melalui berbagai kegiatan. Dengan adanya program ini diharapkan realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) di Kabupaten Seram Bagian Barat meningkat. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator yaitu

persentase promosi potensi investasi yang ditindaklanjuti dengan peninjauan kerjasama investasi, serta persentase realisasi investasi.

c. Program Pelayanan Penanaman Modal

Program ini diarahkan untuk memberikan pelayanan yang optimal dan sesuai standar bagi kegiatan investasi sehingga diharapkan aktivitas investasi di Kabupaten Seram Bagian Barat tidak terhalang oleh regulasi dan prosedur yang menyulitkan bagi investor. Keberhasilan dari program ini akan diukur melalui pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang menghasilkan indikator yang ingin dicapai dari program ini yaitu nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM dalam hal ini calon investor) perizinan investasi.

d. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Program ini diarahkan untuk monitoring pelaksanaan penanaman modal melalui pemantauan pelaksanaan penanaman modal (perusahaan) dan pembinaan pelaksanaan penanaman modal (pelaku usaha). Program ini dilakukan untuk mencapai indikator persentase peningkatan perusahaan yang tertib pelaporan LPKM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal).

13. Kepemudaan dan Olahraga

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut

a. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan

Program ini diarahkan pada kegiatan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor, wirausaha muda pemula, dan pemuda kader, serta pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat daerah kabupaten. Beberapa kegiatan tersebut dioperasionisasikan dalam bentuk peningkatan kepemimpinan, kepeloporan dan kesukarelawanan pemuda, penyelenggaraan seleksi dan pelatihan pasukan pengibar bendera, serta peningkatan kapasitas pemuda dan organisasi kepemudaan. Program ini dilaksanakan sebagai upaya untuk meningkatkan persentase organisasi pemuda yang mengikuti pelatihan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawanan dan kepeloporan pemuda.

b. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan

Program ini diarahkan pada kegiatan pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan daerah, pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga, penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat daerah kabupaten, serta pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat daerah provinsi. Beberapa kegiatan tersebut dioperasionisasikan dalam bentuk penguatan koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana olahraga, peningkatan kerjasama organisasi keolahragaan dengan lembaga terkait, penyelenggaraan

kejuaraan olahraga multievent, pembinaan dan pengembangan atlet berprestasi, serta pemberian penghargaan olahraga. Program ini dilaksanakan untuk meningkatkan cakupan fasilitas olahraga dalam kondisi baik, pelatih yang berprestasi serta pembinaan terhadap atlet muda.

c. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan

Program ini diarahkan pada kegiatan pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan. kegiatan ini dioperasionalisasikan dengan melakukan perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan prasarana dan sarana kepramukaan tingkat daerah. Program ini dilaksanakan untuk meningkatkan persentase kelompok pramuka aktif.

14. Statistik

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut

a. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Data statistik yang akurat dan mutakhir memiliki peran penting dalam proses pembangunan. Oleh karena itu, program ini diarahkan untuk mencapai indikator kinerja berupa persentase penyediaan data statistik sektoral yang berkualitas. Data statistik yang berkualitas diperoleh melalui rangkaian proses koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis, dan diseminasi data statistik sektoral. Harapannya, setiap sektor atau perangkat daerah mampu menyediakan data statistik sektoral yang berkualitas dan bermanfaat bagi efektivitas pembangunan.

15. Persandian

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut

a. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi

Di tengah revolusi digital yang makin masif, perlu disertai dengan tingkat keamanan informasi. Program ini diarahkan untuk mencapai kinerja persentase tingkat keamanan informasi pemerintah.

16. Kebudayaan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut

a. Program Pengembangan Kebudayaan

Program ini diarahkan untuk pengembangan kebudayaan di tingkat kabupaten, dalam upaya meningkatkan eksistensi nilai budaya yang dilestarikan baik pada tingkat lokal, nasional maupun internasional. Program ini dilaksanakan untuk meningkatkan rasio kegiatan tradisi adat dan seni yang sudah direvitalisasi.

17. Perpustakaan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut

a. Program Pembinaan Perpustakaan

Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan perpustakaan tingkat dan pemberdayaan gemar membaca tingkat daerah. Beberapa kegiatan tersebut dioperasionisasikan dengan melakukan pengembangan dan pemeliharaan layanan perpustakaan elektronik, pengembangan kekhasan koleksi perpustakaan, pengelolaan dan pengembangan bahan perpustakaan, pembinaan perpustakaan pada satuan pendidikan dasar di seluruh wilayah kabupaten, pembinaan perpustakaan khusus, pengembangan layanan perpustakaan rujukan, sosialisasi budaya baca dan literasi pada satuan pendidikan dasar dan pendidikan khusus serta masyarakat, pembangunan sarana dan prasarana perpustakaan ditempat-tempat umum, pemberian penghargaan gerakan budaya gemar membaca, serta pengembangan literasi berbasis inklusi sosial. Program ini dilaksanakan untuk meningkatkan rasio ketercukupan koleksi perpustakaan, persentase perpustakaan sesuai standar nasional dan SKM layanan perpustakaan.

18. Kearsipan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut

a. Program Pengelolaan Arsip

Program ini diarahkan untuk meningkatkan nilai audit kearsipan. Kerangka kegiatan yang akan dijalankan berupa pengelolaan arsip dinamis, statis, dan pengelolaan simpul jaringan informasi kearsipan nasional tingkat kabupaten.

7.2.3. Urusan Pemerintahan Pilihan

1. Kelautan dan Perikanan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

Program ini diarahkan untuk meningkatkan produksi perikanan tangkap di Kabupaten Seram Bagian Barat. Program ini memiliki indikator persentase kelompok nelayan yang menerapkan metode penangkapan ikan yang baik dan benar serta persentase nelayan kecil yang diberdayakan. Kualitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta metode penangkapan ikan menjadi fokus perhatian utama yang harus diintervensi.

b. Program Pengelolaan Perikanan Budaya

Program ini diarahkan untuk meningkatkan produksi perikanan budidaya. Program ini memiliki indikator persentase kelompok pembudidaya perikanan yang menggunakan metode budidaya yang baik, persentase pembudidaya ikan kecil yang diberdayakan, dan persentase peningkatan ketersediaan benih. Kualitas

sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta metode budidaya ikan menjadi fokus perhatian utama yang harus diintervensi.

c. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Program ini diarahkan untuk meningkatkan pemasaran produk perikanan. Program ini memiliki indikator persentase promosi konsumsi ikan yang berhasil dijalankan. Peningkatan ketersediaan dan kualitas sarana dan metode promosi langsung dan tidak langsung menjadi fokus perhatian utama yang harus diintervensi.

2. Pariwisata

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

Program ini diarahkan untuk meningkatkan objek daya tarik wisata yang merupakan komponen inti dalam aktivitas pariwisata yang dapat menarik wisatawan. Upaya tersebut dilakukan melalui pengelolaan daya tarik wisata, pengelolaan destinasi pariwisata, pemeliharaan/ pengadaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana destinasi pariwisata, serta fasilitasi dan standarisasi industri usaha pariwisata. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator persentase peningkatan destinasi wisata yang dikembangkan, persentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan dan persentase peningkatan destinasi wisata berkembang.

b. Program Pemasaran Pariwisata

Program ini diarahkan pada pemasaran pariwisata melalui kegiatan promosi media cetak, elektronik, dan media lainnya baik didalam maupun luar negeri. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator persentase promosi potensi pariwisata yang ditindaklanjuti dengan kerjasama investasi, dan persentase peningkatan kerjasama pengembangan wisata yang terjalin.

c. Program Pengembangan Sumberdaya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Program ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif melalui pelatihan serta optimalisasi kelompok masyarakat atau kelompok sadar wisata dalam pengembangan kepariwisataan. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator persentase peningkatan perkembangan ekonomi kreatif dan ekonomi kepariwisataan.

3. Pertanian

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

Program ini diarahkan untuk meningkatkan produksi pertanian, produksi hasil peternakan dan populasi ternak. Program ini memiliki indikator persentase bantuan sarana pertanian yang tepat sasaran (petani penggarap, buruh tani, petani lahan kecil), persentase peningkatan ketersediaan sarana peternakan, dan persentase sampel obat hewan yang diperiksa. Peningkatan ketersediaan dan kualitas sarana pertanian dan peternakan menjadi fokus perhatian utama yang harus diintervensi.

b. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian

Program ini diarahkan untuk meningkatkan produksi pertanian dan produksi hasil peternakan. Program ini memiliki indikator persentase prasarana pertanian dalam kondisi baik, dan persentase peningkatan ketersediaan prasarana peternakan. Peningkatan ketersediaan dan kualitas prasarana pertanian dan peternakan menjadi fokus perhatian utama yang harus diintervensi.

c. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Program ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas produk hasil peternakan dan meningkatkan populasi ternak. Program ini memiliki indikator persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular. Peningkatan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana menjadi fokus perhatian utama yang harus diintervensi.

d. Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian

Program ini diarahkan untuk menjaga produksi pertanian melalui upaya penurunan resiko dampak bencana pertanian. Program ini memiliki indikator persentase luasan lahan terkena bencana yang tertangani, persentase fasilitasi penanggulangan bencana yang tertangani, dan persentase petani yang mendapatkan asuransi pertanian. Pencegahan dan penanggulangan bencana pertanian menjadi fokus perhatian utama yang harus diintervensi.

e. Program Perizinan Usaha Pertanian

Program ini diarahkan untuk meningkatkan produksi pertanian, walaupun tidak mendukung secara langsung. Program ini sangat dibutuhkan untuk membina pelaku usaha pertanian dalam arti luas agar mampu mengelola usahanya dengan baik. Program ini memiliki indikator persentase usaha peternakan yang mempunyai izin usaha. Identifikasi jenis-jenis usaha dan peningkatan kualitas pelayanan perizinan usaha pertanian menjadi fokus perhatian utama yang harus diintervensi.

f. Program Penyuluhan Pertanian

Program ini diarahkan untuk meningkatkan kapasitas produksi pertanian dan produk hasil peternakan. Program ini memiliki indikator cakupan bina kelompok tani. Pendataan dan pendampingan kelompok petani secara berkesinambungan

untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia petani menjadi fokus perhatian utama yang harus diintervensi.

4. Perdagangan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan

Program ini diarahkan untuk peningkatan sarana dan prasarana pasar rakyat melalui pembangunan dan atau rehabilitasi pasar. Dengan adanya sarana distribusi perdagangan (pasar) yang baik maka diharapkan lalu lintas barang dapat terjamin. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator persentase sarana perdagangan dalam kondisi baik, persentase pedagang yang tertib lokasi, serta jumlah pendapatan retribusi pelayanan pasar.

b. Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

Program ini bertujuan untuk memastikan harga barang kebutuhan pokok dan barang penting yang beredar stabil dan tidak memberatkan masyarakat. Program tersebut juga untuk memastikan agar daya beli masyarakat tidak turun dan memastikan barang kebutuhan pokok dan barang penting dapat selalu diakses oleh masyarakat. Upaya tersebut dilakukan melalui pemantauan harga barang kebutuhan pokok dan barang penting melalui sistem yang terintegrasi dan pengendalian harga barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar. Program ini memiliki indikator yang ingin dicapai yaitu persentase koefisiensi variasi harga antar waktu.

c. Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen

Program ini dilakukan untuk memberikan perlindungan konsumen melalui standarisasi alat tera yang ada agar konsumen/masyarakat tidak dirugikan. Upaya tersebut dilakukan melalui pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang, dan pengawasan. Program ini memiliki indikator yang akan dicapai yaitu persentase alat UTTP yang sudah tertib ukur

d. Program Penggunaan dan pemasaran Produk Dalam Negeri

Program ini diarahkan melalui pelaksanaan promosi pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri serta pelaksanaan promosi penggunaan produk dalam negeri di tingkat kabupaten, serta untuk meningkatkan pendapatan pelaku usaha pengolahan di Kabupaten Seram Bagian Barat. Media dan metode promosi pemasaran menjadi fokus perhatian utama yang harus diintervensi. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator persentase pelaku usaha yang memperoleh fasilitas promosi, persentase informasi perdagangan yang harus diawasi, dan persentase produk yang dipasarkan.

e. Program Pengembangan Ekspor

Program ini diarahkan melalui penyelenggaraan promosi dagang melalui kegiatan pameran dagang dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang dimiliki oleh Kabupaten Seram Bagian Barat serta pembinaan dan pengembangan usaha ekspor unggulan. Program ini memiliki indikator yang ingin dicapai yaitu persentase pelaku usaha potensial ekspor yang dipromosikan dan persentase peningkatan pelaku usaha ekspor.

5. Perindustrian

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

d. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri

Program ini diarahkan untuk meningkatkan industri di tingkat kabupaten khususnya Industri Kecil Menengah (IKM) melalui koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat, pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana industri, peningkatan akses permodalan, penerapan teknologi tepat guna serta untuk meningkatkan pendapatan pelaku usaha pengolahan. Kualitas sumber daya manusia pelaku usaha, sarana dan prasarana serta metode produksi menjadi fokus perhatian utama yang harus diintervensi. Program ini memiliki indikator yang akan dicapai yaitu persentase Industri Kecil Menengah (IKM) yang terlatih, persentase peningkatan akses permodalan, persentase IKM yang menggunakan teknologi tepat guna, persentase IKM yang menerapkan metode produksi berorientasi bisnis, dan persentase IKM susu yang meningkat produktivitasnya.

7.2.4. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

1. Sekretariat Daerah

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Program ini dirumuskan berdasarkan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah untuk melakukan koordinasi dan sinkronisasi terkait kebijakan pemerintah daerah. Peran Setda dalam hal ini tidak hanya melakukan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, sekaligus pengendalian terkait tindak lanjut kebijakan di bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat. Program ini juga terkait kualitas produk hukum daerah yang mampu menjawab kebutuhan daerah dan mampu selaras dengan produk hukum provinsi dan nasional. Program ini juga memuat berbagai kebutuhan pembangunan terkait aspek kesejahteraan rakyat yang tidak terwadahi dalam program di perangkat daerah, terutama terkait alokasi beasiswa pendidikan tinggi bagi putra-putri Seram Bagian Barat dan fasilitasi kegiatan-kegiatan keagamaan.

b. Program Perekonomian dan Pembangunan

Program ini juga memiliki fungsi penting sebagai instrumen koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan tindak lanjut kebijakan bidang perekonomian dan pembangunan. Penguatan fungsi pengendalian dan evaluasi memiliki peran penting dalam menentukan efektivitas pelaksanaan program ini. Selain itu, program ini juga diarahkan mampu mengawal kinerja BUMD sehingga dapat berkontribusi pada PAD, serta efektivitas dan efisiensi *e-procurement* dalam pengadaan barang dan jasa. Tidak kalah penting, program perekonomian dan pembangunan juga berupaya meningkatkan peran sektor swasta dalam pembangunan daerah.

c. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Program ini selain memiliki peran fasilitasi administrasi rutin perkantoran, layanan protokol dan komunikasi pimpinan daerah, juga memiliki peran strategis dalam rangka penguatan reformasi birokrasi. Program ini menjadi instrumen dalam pengelolaan implementasi 8 area perubahan reformasi birokrasi, termasuk didalamnya terkait pembangunan akuntabilitas kinerja, peningkatan kualitas tata laksana dan pelayanan publik. Program ini memiliki peran penting untuk mencapai target kinerja indikator makro tata kelola pemerintahan berupa Indeks Reformasi Birokrasi, nilai SAKIP, dan IKM.

2. Sekretariat DPRD

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

Program ini diarahkan untuk meningkatkan dukungan tugas dan fungsi DPRD sesuai standar. Tugas dan fungsi DPRD berupa legislasi, pengawasan, dan penganggaran, kemudian dioperasionalisasi melalui kerangka kegiatan yang akan difasilitasi berupa fasilitasi pembentukan Perda dan Peraturan DPRD, pembahasan kebijakan anggaran, penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat, fasilitasi tugas dan peningkatan kapasitas DPRD.

7.2.5. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

1. Perencanaan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan

Program ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas proses pembangunan, yaitu mulai dari perencanaan, pengendalian, hingga evaluasi. Target kinerja yang akan dicapai terkait persentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam dokumen perencanaan hingga persentase capaian target program pembangunan.

Kerangka kegiatan yang akan dijalankan didalam program ini mulai dari aspek perencanaan partisipatif berupa konsultasi publik dan musrenbang, kemudian terkait analisis data dan informasi pembangunan daerah, hingga kualitas pengendalian dan evaluasi pembangunan.

b. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan

Sinkronisasi antar dokumen perencanaan memiliki peran strategis dalam menentukan efektivitas pembangunan. Program ini, diarahkan agar berbagai dokumen perencanaan dapat sinkron. Sinkronisasi, terutama terkait perencanaan jangka menengah dengan tahunan, dan perencanaan pemerintah daerah dengan perangkat daerah. Koordinasi dan sinkronisasi direncanakan mulai dari setiap bidang, yaitu pemerintahan dan pembangunan manusia, perekonomian dan sumber daya alam, serta infrastruktur dan kewilayahan. Kerangka kegiatan teknis yang dijalankan mulai dari koordinasi penyusunan, asistensi penyusunan, monitoring dan evaluasi penyusunan, serta koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan.

2. Keuangan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Program ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah. Indikator kinerja didalam program ini berupa persentase penyediaan anggaran sesuai ketentuan, persentase penyerapan APBD tahun berjalan, hingga persentase penyajian laporan keuangan sesuai ketentuan. Oleh karena itu, kerangka kegiatan didalam program ini mulai dari proses koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah, koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan, serta koordinasi dan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan.

b. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Program ini diarahkan untuk meningkatkan kapasitas fiskal pemerintah daerah, terutama dari komponen PAD berupa pajak dan retribusi daerah. Kerangka kegiatan direncanakan mulai dari penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah, penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah, penagihan pajak, hingga pembinaan dan pengawasan pengelolaan pajak dan retribusi daerah.

c. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Program ini diarahkan untuk meningkatkan inventarisasi aset daerah dan pemanfaatan barang milik daerah. Kerangka kegiatan di dalam program ini, antara lain terkait penyusunan standar harga, penatausahaan, inventarisasi, pengamanan, dan penilaian barang milik daerah. Program ini tidak kalah penting

juga terkait penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah.

3. Kepegawaian

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Kepegawaian Daerah

Program ini memiliki peran penting untuk menopang pelaksanaan manajemen ASN. Kinerja yang diarahkan program ini yaitu persentase pemenuhan kebutuhan pegawai di setiap jabatan, persentase pegawai yang memenuhi target SKP, dan persentase penurunan pelanggaran disiplin pegawai. Kerangka kegiatan yang akan dijalankan mulai dari pengadaan, pemberhentian, dan informasi kepegawaian ASN, mutasi dan promosi ASN, hingga penilaian dan evaluasi kinerja ASN.

4. Pendidikan dan Pelatihan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

Program ini diarahkan, terutama untuk meningkatkan kompetensi ASN lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat. Indikator kinerja yang akan dicapai di dalam program ini yaitu persentase kesesuaian jabatan dengan persyaratan dan persentase ASN yang mendapatkan peningkatan kapasitas.

5. Penelitian dan Pengembangan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah

Penelitian dan pengembangan daerah tidak lepas dari mandat Permendagri No. 17 Tahun 2016, terutama terkait bentuk kelitbangan utama berupa penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, dan evaluasi kebijakan. Indikator kinerja program diarahkan berorientasi hasil, yakni terkait tindak lanjut kebijakan inovasi daerah yang diterapkan dan hasil penelitian yang telah diolah dalam bentuk *policy brief* yang ditindaklanjuti sebagai bahan pengambilan kebijakan. Penelitian dan pengembangan yang akan dijalankan sebagai basis *evidence based policy* terkait berbagai bidang pemerintahan, yaitu penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan, sosial dan kependudukan, ekonomi dan pembangunan, serta pengembangan inovasi dan teknologi. Inovasi daerah yang diterapkan diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik dan akselerasi pembangunan.

7.2.6. Unsur Pengawas Urusan Pemerintahan

1. Inspektorat Daerah

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penyelenggaraan Pengawasan

Program ini diarahkan untuk meningkatkan tindak lanjut hasil pemeriksaan eksternal dan internal, sehingga mampu meningkatkan capaian opini BPK ke WTP. Dalam rangka mewadahi fungsi kontrol masyarakat, program ini juga memiliki target kinerja berupa persentase aduan masyarakat yang ditindaklanjuti. Beberapa kerangka kegiatan teknis berupa pengawasan kinerja pemerintah daerah, review laporan kinerja dan keuangan, monitoring dan evaluasi TLHP, pengawasan desa dan pengawasan untuk tujuan tertentu.

b. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

Program ini diarahkan untuk menopang kinerja *outcome* berupa maturitas SPIP dan WBK/WBBM. Indikator kinerja di dalam program ini berupa capaian nilai MCP, indeks manajemen resiko, dan kapabilitas APIP. Kerangka kegiatan yang akan dijalankan terkait pencegahan dan pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi, serta pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan daerah.

7.2.7. Unsur Kewilayahan

1. Kecamatan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Program ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik Kecamatan. Peningkatan kualitas pelayanan Kecamatan terkait pelayanan administrasi maupun pelayanan sarana dan prasarana umum, dengan orientasi hasil berupa meningkatnya indeks kepuasan masyarakat di setiap kecamatan. Kerangka kegiatan yang akan dijalankan berupa koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di kecamatan, penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah di kecamatan, serta koordinasi pemeliharaan sarana dan prasarana.

b. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Program ini diarahkan untuk menopang pelaksanaan peran strategis Kecamatan, yakni pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. Program ini memiliki indikator kinerja yang berperan dalam pengentasan kemiskinan, yakni persentase stimulus bagi masyarakat miskin/berpenghasilan rendah yang tepat sasaran di lingkup kecamatan. Indikator kinerja didalam program ini juga terkait tindak lanjut hasil koordinasi pemberdayaan masyarakat. Kerangka kegiatan untuk menjalankan pemberdayaan masyarakat, antara lain peningkatan partisipasi masyarakat dalam musrenbang desa atau kelurahan, pemberdayaan masyarakat kelurahan serta pembangunan sarana dan prasarana kelurahan, dan

peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan dan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat.

c. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Salah satu fungsi Kecamatan yakni menyelenggarakan pemerintahan umum di wilayahnya. Pemerintahan umum di wilayah Kecamatan diarahkan untuk penguatan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional, serta pembinaan kerukunan antar dan intra umat beragama dalam rangka menjaga kohesivitas sosial di wilayah Kecamatan.

d. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Kecamatan memiliki peran strategis sebagai *intermediary* antara pemerintah daerah dengan desa. Oleh karena itu, program ini diarahkan untuk memperkuat kapasitas desa di dalam menjalankan kewenangannya, serta membangun sinergi antara pembangunan daerah dengan desa. Kerangka kegiatan teknis yang akan dijalankan berupa fasilitasi administrasi pemerintahan dan keuangan desa.

7.2.8. Unsur Pemerintahan Umum

1. Kesatuan Bangsa dan Politik

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

Program ini diarahkan pada kegiatan perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ideologi pancasila dan karakter kebangsaan. Kegiatan tersebut dioperasionalisasikan dengan membangun koordinasi dan kerjasama pada bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan sejarah kebangsaan. Program ini dilaksanakan untuk meningkatkan persentase masyarakat yang paham terhadap ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan.

b. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik

Program ini diarahkan pada kegiatan perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik. Kegiatan tersebut dioperasionalisasikan dengan menerapkan kebijakan dibidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah. Program ini dilaksanakan untuk meningkatkan persentase penanganan fasilitasi bidang politik dalam negeri.

c. Program Pemberdayaan dan Pengawasan organisasi kemasyarakatan

Program ini diarahkan pada kegiatan perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan. Kegiatan tersebut dioperasionisasikan dengan membangun koordinasi dan kerjasama pada bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah. Program ini dilaksanakan untuk meningkatkan persentase masyarakat yang paham terhadap pembinaan ormas.

d. Program Peningkatan Kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial

program ini diarahkan pada kegiatan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial. Kegiatan tersebut dioperasionisasikan dengan membangun koordinasi dan kerjasama pada bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelejen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, penanganan konflik di daerah, serta melaksanakan forum koordinasi antar pimpinan daerah tingkat kabupaten. program ini dilaksanakan untuk menekan angka potensi konflik sosial.

Tabel. 7.2. Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2023-2026

Kode			Bidang Urusan Pemerintah- an dan Program Prioritas Pembangun- an	Indikator Program	Satu- an	Kondisi Kinerja Awal 2021	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan								KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		Urusan Penanggu ng Jawab
							2023		2024		2025		2026				
							Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
X	XX		Urusan Penunjang Seluruh Perangkat Daerah														
X	XX	01	Program Penunjang urusan Pemerintah- an Daerah Kab./Kota	Persentase penyampaian laporan kinerja sesuai standar (Waktu)	Persen	88,74	100, 00	505.709.7 87.471,43	100, 00	509.106.3 34.178,19	100, 00	512.502.88 3.506,12	100, 00	515.899.4 34.491,70	100, 00	515.899.4 34.491,70	Penunjang / Rutin
				Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Persen	100,00	100, 00		100, 00		100, 00		100, 00		100, 00		Penunjang / Rutin
				Persentase Pemenuhan Layanan Sarana dan Prasarana Kerja	Persen	100,00	100, 00		100, 00		100, 00		100, 00		100, 00		Penunjang / Rutin

Kode			Bidang Urusan Pemerintah- an dan Program Prioritas Pembangun- an	Indikator Program	Satu- an	Kondisi Kinerja Awal 2021	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan								KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		Urusan Penanggu ng Jawab
							2023		2024		2025		2026				
							Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				Persentase Perangkat Daerah yang memiliki Nilai SAKIP Minimal 80	Persen	65,32	76,9 2		82,6 9		90,3 8		96,1 5		96,1 5		Sekretariat Daerah
1			Urusan Pemerintaha n Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar														
1	01		Urusan Pemerintah an Bidang Pendidikan														
1	01	02	Program Pengelolaan Pendidikan	APM SD	Persen	98,30	98,3 2	85.358.51 8.000,00	98,4 0	85.931.82 0.000,00	98,6 0	86.505.122. 100,00	98,8 0	87.078.42 4.100,00	98,8 0	87.078.42 4.100,00	Pendidikan
				APM SMP	Persen	76,12	80,1 5		82,0 0		83,0 0		84,0 0		84,0 0		Pendidikan
				Angka	Persen	93,36	93,5		94,0		94,5		95,0		95,0		Pendidikan

Kode			Bidang Urusan Pemerintah- an dan Program Prioritas Pembangun- an	Indikator Program	Satu- an	Kondisi Kinerja Awal 2021	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan								KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		Urusan Penanggu ng Jawab
							2023		2024		2025		2026				
							Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
				Partisipasi Sekolah SD			0		0		0		0				
				Persentase Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang Menyelesaikan Pendidikan Dasar dan/atau Menengah yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Kesetaraan	Persen	93,36	93,50		94,00		94,50		95,00		95,00	Pendidikan	
				APK PAUD	Persen	35,29	40,50		45,00		45,50		45,70		45,70	Pendidikan	
				Persentase Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD	Persen	69,75	70,73		71,39		72,06		72,72		72,72	Pendidikan	

Kode			Bidang Urusan Pemerintah- an dan Program Prioritas Pembangun- an	Indikator Program	Satu- an	Kondisi Kinerja Awal 2021	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan								KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		Urusan Penanggu ng Jawab
							2023		2024		2025		2026				
							Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				Persentase Sekolah SD dan SMP yang Terakreditasi	Persen	71,79	74,66		77,70		87,84		94,59		94,59		Pendidikan
1	01	04	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase Guru SD dan SMP yang Bersertifikasi	Persen	21,94	25,48	361.222.600,00	27,07	363.648.700,00	30,25	366.074.800,00	38,22	368.501.000,00	38,22	368.501.000,00	Pendidikan
1	02		Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan														
1	02	02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Rumah Sakit Terakreditasi	Persen	100,00	100,00	69.788.715.900,00	100,00	70.257.444.900,00	100,00	70.726.173.900,00	100,00	71.194.902.900,00	100,00	71.194.902.900,00	Kesehatan
				Persentase Capaian SPM Rumah Sakit	Persen	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Kesehatan

Kode			Bidang Urusan Pemerintah- an dan Program Prioritas Pembangun- an	Indikator Program	Satu- an	Kondisi Kinerja Awal 2021	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan								KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		Urusan Penanggu ng Jawab
							2023		2024		2025		2026				
							Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				Persentase Puskesmas Terakreditasi	Persen	70,59	76,4 7		82,3 5		88,2 4		94,1 2		94,1 2		Kesehatan
				Presentase Warga Miskin yang Mendapatkan Bantuan Pembiayaan sebagai Peserta JKN KIS	Persen	49,78	53,1 7		59,0 3		62,6 2		65,7 1		68,0 1		Kesehatan
				Persentase Warga Negara Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Layanan Kesehatan	Persen	96,96	98,5 3		98,7 4		98,9 4		99,1 5		99,1 5		Kesehatan
				Persentase Warga Negara Usia Produktif yang mendapatkan Layanan	Persen	18,00	20,0 0		18,0 0		16,0 0		14,0 0		14,0 0		Kesehatan

Kode			Bidang Urusan Pemerintah- an dan Program Prioritas Pembangun- an	Indikator Program	Satu- an	Kondisi Kinerja Awal 2021	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan								KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		Urusan Penanggu ng Jawab
							2023		2024		2025		2026				
							Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				Kesehatan													
				Presentase Kematian Warga Negara Usia Produktif	Persen	0,03	0,04		0,04		0,03		0,03		0,03		Kesehatan
				Persentase Warga Negara Lanjut Usia yang Mendapatkan Layanan Kesehatan	Persen	70,00	72,0 0		74,0 0		78,0 0		82,0 0		82,0 0		Kesehatan
				Jumlah Kematian Warga Negara Usia Lanjut	Angka	6,00	7,00		8,00		9,00		10,0 0		10,0 0		Kesehatan
				Persentase Balita Gizi Kurang	Persen	12,00	10,0 0		8,00		7,00		5,00		5,00		Kesehatan
				Persentase Balita Stunting	Persen	28,70	27,0 0		27,0 0		26,0 0		25,0 0		25,0 0		Kesehatan

Kode			Bidang Urusan Pemerintah- an dan Program Prioritas Pembangun- an	Indikator Program	Satu- an	Kondisi Kinerja Awal 2021	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan								KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		Urusan Penanggu ng Jawab
							2023		2024		2025		2026				
							Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				Persentase Balita Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Persen	70,00	72,0 0		75,0 0		76,0 0		82,0 0		82,0 0		Kesehatan
				Persentase Ibu Bersalin yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar	Persen	72,00	75,0 0		77,0 0		80,0 0		82,0 0		82,0 0		Kesehatan
				Persentase Ibu Hamil yang mendapatkan Pelayanan Ibu Hamil	Persen	84,00	85,0 0		87,0 0		90,0 0		92,0 0		92,0 0		Kesehatan
				Persentase Bayi Baru Lahir mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Persen	72,00	75,0 0		77,0 0		80,0 0		82,0 0		82,0 0		Kesehatan

Kode			Bidang Urusan Pemerintah- an dan Program Prioritas Pembangun- an	Indikator Program	Satu- an	Kondisi Kinerja Awal 2021	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan								KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		Urusan Penanggu ng Jawab
							2023		2024		2025		2026				
							Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				Persentase Orang Terduga TBC mendapatkan Pelayanan TBC Sesuai Standar	Persen	44,90	42,0 0		40,0 0		35,0 0		32,0 0		32,0 0		Kesehatan
				Persentase Orang dengan Resiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh	Persen	38,00	25,0 0		20,0 0		15,0 0		10,0 0		10,0 0		Kesehatan
				Persentase Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Persen	2,20	2,20		3,50		3,70		3,90		3,90		Kesehatan
				Persentase Penderita Diabetes Militus yang	Persen	2,90	3,20		3,60		3,80		4,00		4,00		Kesehatan

Kode			Bidang Urusan Pemerintah- an dan Program Prioritas Pembangun- an	Indikator Program	Satu- an	Kondisi Kinerja Awal 2021	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan								KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		Urusan Penanggu ng Jawab
							2023		2024		2025		2026				
							Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar													
				Persentase ODGJ yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Persen	0,00	50,0 0		50,0 0		50,0 0		100, 00		100, 00		Kesehatan
				Angka Kesakitan Covid-19	Angka	190,00	127, 00		110, 00		42,0 0		5,00		5,00		Kesehatan
1	02	03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Tenaga Kesehatan yang Memenuhi Kualifikasi (Pendidikan Minimal D3 Kesehatan)	Persen	52,97	52,9 7	111.747.2 00,00	54,8 4	112.497.8 00,00	61,9 7	113.248.30 0,00	64,5 2	113.998.8 00,00	64,5 2	113.998.8 00,00	Kesehatan

Kode			Bidang Urusan Pemerintah- an dan Program Prioritas Pembangun- an	Indikator Program	Satu- an	Kondisi Kinerja Awal 2021	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan								KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		Urusan Penanggu ng Jawab
							2023		2024		2025		2026				
							Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	02	04	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase makanan minuman yang lolos uji	Persen	78	83	125.000.0 00,00	84	125.000.0 00,00	85	125.000.00 0,00	86	125.000.0 00,00	86	125.000.0 00,00	Kesehatan
				Persentase obat layak edar pada sarana pelayanan kefarmasian	Persen	80	96		97		98		99		99		Kesehatan
1	02	05	Program Pemberdaya an Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Desa Siaga Aktif Mandiri	Persen	9,00	11,9 6	968.375.0 00,00	16,3 0	974.879.0 00,00	20,6 5	981.383.00 0,00	25,0 0	987.887.0 00,00	25,0 0	987.887.0 00,00	Kesehatan
				Persentase Desa yang menerapkan GERMAS	Persen	50,60	54,3 5		59,7 8		65,2 2		70,6 5		70,6 5		Kesehatan

Kode			Bidang Urusan Pemerintah- an dan Program Prioritas Pembangun- an	Indikator Program	Satu- an	Kondisi Kinerja Awal 2021	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan								KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		Urusan Penanggu ng Jawab
							2023		2024		2025		2026				
							Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	03		Urusan Pemerintaha n Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang														
1	03	02	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	Persen	45,81	50,0 0	10.274.35 6.000,00	55,0 0	10.343.36 2.700,00	60,0 0	10.412.369. 400,00	65,0 0	10.481.37 6.100,00	65,0 0	10.481.37 6.100,00	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	03	Program Pengelolaan dan Pengembang an Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase rumah tangga yang terlayani air bersih perpipaan	Persen	51,26	60,0 0	6.042.406 .300,00	70,0 0	6.082.989 .600,00	80,0 0	6.123.572.8 00,00	90,0 0	6.164.156 .000,00	90,0 0	6.164.156 .000,00	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode			Bidang Urusan Pemerintah- an dan Program Prioritas Pembangun- an	Indikator Program	Satu- an	Kondisi Kinerja Awal 2021	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan								KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		Urusan Penanggu ng Jawab
							2023		2024		2025		2026				
							Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	03	04	Program Pengembang an Sistem dan Pengelolaan Persampaha n Regional	Persentase ketersediaan TPS3R di Kecamatan	Persen	16,00	20,0 0		30,0 0		40,0 0		50,0 0		50,0 0		Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	05	Program Pengelolaan dan Pengembang an Sistem Air Limbah	Persentase sanitasi komunal dalam kondisi baik	Persen	61,26	70,0 0	5.423.976 .000,00	75,0 0	5.460.405 .600,00	80,0 0	5.496.835.2 00,00	85,0 0	5.533.264 .800,00	85,0 0	5.533.264 .800,00	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Persentase Peningkatan ketersediaan sanitasi individual	Persen	3,57	5,00		10,0 0		15,0 0		20,0 0		20,0 0		Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	06	Program Pengelolaan dan Pengembang an Sistem Drainase	Persentase drainase kondisi baik	Persen	55,72	60,0 0	110.751.0 00,00	65,0 0	111.494.8 00,00	70,0 0	112.238.70 0,00	75,0 0	112.982.5 00,00	75,0 0	112.982.5 00,00	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode			Bidang Urusan Pemerintah- an dan Program Prioritas Pembangun- an	Indikator Program	Satu- an	Kondisi Kinerja Awal 2021	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan								KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		Urusan Penanggu ng Jawab
							2023		2024		2025		2026				
							Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	03	07	Program Pengembang an Permukiman	Persentase infrastruktur dikawasan strategis cepat tumbuh yang memadai	Persen	50,25	55,0 0	4.712.991 .600,00	60,0 0	4.744.646 .000,00	65,0 0	4.776.300.3 00,00	70,0 0	4.807.954 .700,00	70,0 0	4.807.954 .700,00	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	10	Program Penyelengga raan Jalan	Persentase panjang jaringan jalan yang ditingkatkan kualitasnya	Persen	55,85	60,0 0	60.103.76 3.100,00	70,0 0	60.507.44 4.000,00	80,0 0	60.911.125. 000,00	90,0 0	61.314.80 6.000,00	90,0 0	61.314.80 6.000,00	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Persentase Panjang Jembatan dalam kondisi baik	Persen	55,71	60,0 0		70,0 0		80,0 0		90,0 0		90,0 0		Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	11	Program Pengembang an Jasa Konstruksi	Persentase Peningkatan Layanan Jasa Konstruksi	Persen	41,53	45,0 0	147.056.6 00,00	55,0 0	148.044.3 00,00	60,0 0	149.032.00 0,00	70,0 0	150.019.6 00,00	70,0 0	150.019.6 00,00	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode			Bidang Urusan Pemerintah- an dan Program Prioritas Pembangun- -an	Indikator Program	Satu- an	Kondisi Kinerja Awal 2021	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan								KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		Urusan Penanggu ng Jawab
							2023		2024		2025		2026				
							Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	03	12	Program Penyelengga raan Penataan Ruang	Persentase ketersediaan informasi tata ruang	Persen	35,84	40,0 0	864.592.9 00,00	50,0 0	870.399.8 00,00	60,0 0	876.206.80 0,00	70,0 0	882.013.7 00,00	70,0 0	882.013.7 00,00	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Persentase kawasan memiliki rencana detil tata ruang	Persen	8,24	10,0 0		15,0 0		20,0 0		25,0 0		25,0 0		Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	04		Urusan Pemerintaha n Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman														
1	04	02	Program Pengembang an Perumahan	Persentase rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program	Persen	35,28	40,0 0	310.973.5 00,00	45,0 0	313.062.2 00,00	50,0 0	315.150.80 0,00	55,0 0	317.239.4 00,00	55,0 0	317.239.4 00,00	Perumahan dan Kawasan Permukima n

Kode			Bidang Urusan Pemerintah- an dan Program Prioritas Pembangun- an	Indikator Program	Satu- an	Kondisi Kinerja Awal 2021	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan								KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		Urusan Penanggu ng Jawab
							2023		2024		2025		2026				
							Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				pemerintah daerah kabupaten/kota													
				Persentase rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Persen	65,27	70,00		75,00		80,00		85,00		85,00		Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Persentase rekomendasi teknis site plan pengembangan dan pembangunan perumahan	Persen	5,29	10,00		20,00		30,00		40,00		40,00		Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	04	03	Program Kawasan Permukiman	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 hektar yang ditangani	Persen	10,28	15,00	1.341.446.300,00	20,00	1.350.456.000,00	25,00	1.359.465.700,00	30,00	1.368.475.300,00	30,00	1.368.475.300,00	Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kode			Bidang Urusan Pemerintah- an dan Program Prioritas Pembangun- -an	Indikator Program	Satu- an	Kondisi Kinerja Awal 2021	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan								KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		Urusan Penanggu ng Jawab
							2023		2024		2025		2026				
							Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				Persentase rumah tidak layak huni yang ditingkatkan kualitasnya di kawasan kumuh	Persen	15,25	20,00		25,00		30,00		40,00		40,00		Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	04	04	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase rumah tidak layak huni yang ditangani	Persen	40,23	45,00	110.751.000,00	50,00	111.494.800,00	60,00	112.238.700,00	70,00	112.982.500,00	70,00	112.982.500,00	Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Persentase rumah tidak layak huni yang ditingkatkan kualitasnya di luar kawasan kumuh	Persen	40,85	45,00		50,00		60,00		70,00		70,00		Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Persentase penyediaan rumah layak huni bagi keluarga miskin	Persen	45,75	50,00		60,00		70,00		80,00		80,00		Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kode			Bidang Urusan Pemerintah- an dan Program Prioritas Pembangun- an	Indikator Program	Satu- an	Kondisi Kinerja Awal 2021	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan								KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		Urusan Penanggu ng Jawab
							2023		2024		2025		2026				
							Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	04	05	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase kawasan perumahan yang memiliki PSU dalam kondisi baik	Persen	56,68	60,00	2.484.972.300,00	62,00	2.501.662.400,00	68,00	2.518.352.400,00	71,00	2.535.042.500,00	71,00	2.535.042.500,00	Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	05		Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat														
1	05	02	Program Peningkatan Ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase Penegakan Perda	Persen	69,12	71,43	548.820.000,00	80,00	552.506.100,00	77,78	556.192.200,00	75,00	559.878.300,00	75,00	559.878.300,00	Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Kode			Bidang Urusan Pemerintah- an dan Program Prioritas Pembangun- an	Indikator Program	Satu- an	Kondisi Kinerja Awal 2021	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan								KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		Urusan Penanggu ng Jawab
							2023		2024		2025		2026				
							Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				Persentase kasus K3 yang ditangani	Persen	85,00	87,50		81,82		88,89		100,00		100,00		Ketenteraman dan Ketertiban Umum
1	05	03	Program Penanggulangan Bencana	Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana	Persen	100,00	100,00	479.572.500,00	100,00	482.793.500,00	100,00	486.014.500,00	100,00	489.235.500,00	100,00	489.235.500,00	Ketenteraman dan Ketertiban
				Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Persen	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Ketenteraman dan Ketertiban

Kode			Bidang Urusan Pemerintah- an dan Program Prioritas Pembangun- -an	Indikator Program	Satu- an	Kondisi Kinerja Awal 2021	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan								KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		Urusan Penanggu ng Jawab
							2023		2024		2025		2026				
							Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persen	100,00	100, 00		100, 00		100, 00		100, 00		100, 00		Ketenteram an dan Ketertiban
1	05	04	Program Pencegahan, Penanggulan gan, Penyelamata n Kebakaran Dan Penyelamata n Non Kebakaran	Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Persen	100,00	100, 00	135.935.4 00,00	100, 00	136.848.4 00,00	100, 00	137.761.40 0,00	100, 00	138.674.4 00,00	100, 00	138.674.4 00,00	Ketenteram an dan Ketertiban
1	06		Urusan Pemerintaha n Bidang Sosial														

Kode			Bidang Urusan Pemerintah- an dan Program Prioritas Pembangun- an	Indikator Program	Satu- an	Kondisi Kinerja Awal 2021	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan								KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		Urusan Penanggu ng Jawab
							2023		2024		2025		2026				
							Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	06	02	Program Pemberdaya an Sosial	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang Aktif	Persen	76,97	100, 00	110.751.0 00,00	100, 00	111.494.8 00,00	100, 00	112.238.70 0,00	100, 00	112.982.5 00,00	100, 00	112.982.5 00,00	Sosial
1	06	04	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Anak Terlantar yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial di Luar Panti	Persen	0,23	1,53	264.390.1 00,00	1,50	266.165.8 00,00	1,46	267.941.60 0,00	1,43	269.717.3 00,00	1,43	269.717.3 00,00	Sosial
				Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial di Luar Panti	Persen	15,67	16,8 8		14,6 3		12,3 8		10,1 3		10,1 3		Sosial
				Persentase Penyandang Disabilitas yang Memperoleh Rehabilitasi	Persen	2,81	5,15		7,72		10,3 0		12,8 7		12,8 7		Sosial

Kode			Bidang Urusan Pemerintah- an dan Program Prioritas Pembangun- an	Indikator Program	Satu- an	Kondisi Kinerja Awal 2021	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan								KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		Urusan Penanggu ng Jawab
							2023		2024		2025		2026				
							Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				Sosial di Luar Panti													
1	06	05	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase Keluarga Penerima Manfaat yang Menerima Bantuan Sosial	Persen	86,57	100,00	784.041.200,00	100,00	789.307.100,00	100,00	794.573.000,00	100,00	799.839.000,00	100,00	799.839.000,00	Sosial
1	06	06	Program Penanganan Bencana	Persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial selama Masa Tanggap Darurat	Persen	100,00	100,00	137.738.100,00	100,00	138.663.200,00	100,00	139.588.300,00	100,00	140.513.400,00	100,00	140.513.400,00	Sosial
1	06	07	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Cakupan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan sesuai Standar	Persen	100,00	100,00	37.008.000,00	100,00	37.257.000,00	100,00	37.505.600,00	100,00	37.754.200,00	100,00	37.754.200,00	Sosial

Kode			Bidang Urusan Pemerintah- an dan Program Prioritas Pembangun- an	Indikator Program	Satu- an	Kondisi Kinerja Awal 2021	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan								KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		Urusan Penanggu ng Jawab
							2023		2024		2025		2026				
							Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2			Urusan Pemerintah- an Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar														
2	07		Urusan Pemerintah- an Bidang Tenaga Kerja														
2	07	03	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan permintaan pasar tenaga kerja	Persen	22,08	25	110.751.0 00,00	25	111.494.8 00,00	25	112.238.70 0,00	25	112.982.5 00,00	25	112.982.5 00,00	Tenaga Kerja

Kode			Bidang Urusan Pemerintah- an dan Program Prioritas Pembangun- -an	Indikator Program	Satu- an	Kondisi Kinerja Awal 2021	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan								KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		Urusan Penanggu ng Jawab
							2023		2024		2025		2026				
							Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	07	04	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan	Persen	22,25	25	85.250.00 0,00	25	85.822.60 0,00	25	86.395.200, 00	25	86.967.70 0,00	25	86.967.70 0,00	Tenaga Kerja
2	07	05	Program Hubungan Industrial	Peningkatan pelayanan penempatan tenaga kerja	Persen	35	40	172.808.4 50,00	43	180.089.2 95,00	45	180.000.00 0,00	46	180.000.0 00,00	46	180.000.0 00,00	Tenaga Kerja
2	08		Urusan Pemerintaha n Bidang Pemberdaya an Perempuan dan Perlindunga n Anak														
2	08	02	Program Pengarusuta maan Gender Dan Pemberdaya an Perempuan	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta dan Pemerintah	Persen	7,55	8,50	81.810.00 0,00	8,60	82.360.40 0,00	8,70	82.909.900, 00	8,80	83.459.40 0,00	8,80	83.459.40 0,00	Pemberday aan Perempuan dan Perlindung an Anak

Kode			Bidang Urusan Pemerintah- an dan Program Prioritas Pembangun- an	Indikator Program	Satu- an	Kondisi Kinerja Awal 2021	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan								KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		Urusan Penanggu ng Jawab
							2023		2024		2025		2026				
							Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	08	03	Program Perlindungan Perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan yang ditangani	Persen	86,00	88,4 6	521.092.9 00,00	89,0 9	524.592.8 00,00	90,3 2	528.092.60 0,00	96,0 0	531.592.5 00,00	96,0 0	531.592.5 00,00	Pemberday aan Perempuan dan Perlindung an Anak
2	08	07	Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase Anak Korban Kekerasan yang ditangani	Persen	56,87	70,0 0	521.172.9 00,00	93,3 3	524.673.3 00,00	100, 00	528.173.70 0,00	100, 00	531.674.1 00,00	100, 00	531.674.1 00,00	Pemberday aan Perempuan dan Perlindung an Anak
2	09		Urusan Pemerintah an Bidang Pangan														
2	09	02	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan	Persentase infrastruktur kemandirian pangan kondisi baik	Persen	62,95	65	427.520.3 00,00	70	430.391.7 00,00	75	433.263.10 0,00	80	436.134.5 00,00	80	436.134.5 00,00	Pangan

Kode			Bidang Urusan Pemerintah- an dan Program Prioritas Pembangun- an	Indikator Program	Satu- an	Kondisi Kinerja Awal 2021	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan								KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		Urusan Penanggu ng Jawab
							2023		2024		2025		2026				
							Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			dan Kemandirian Pangan														
2	09	03	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase stok cadangan pangan	Persen	62,31	65	372.940.6 00,00	70	375.445.4 00,00	75	377.950.30 0,00	80	380.455.0 00,00	80	380.455.0 00,00	Pangan
				Persentase peningkatan kelompok yang melaksanakan Diversifikasi Pangan	Persen	47,58	50		55		60		65		65		Pangan
				Persentase Ketersediaan informasi Distribusi Pangan yang dapat diakses	Persen	47,97	50		55		60		65		65		Pangan

Kode			Bidang Urusan Pemerintah- an dan Program Prioritas Pembangun- an	Indikator Program	Satu- an	Kondisi Kinerja Awal 2021	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan								KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		Urusan Penanggu ng Jawab
							2023		2024		2025		2026				
							Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				masyarakat													
2	09	04	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase penanganan desa rawan pangan	Persen	57,17	60	181.436.1 00,00	65	182.654.7 00,00	70	183.873.30 0,00	75	185.091.8 00,00	75	185.091.8 00,00	Pangan
2	09	05	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase pangan yang aman (layak konsumsi)	Persen	52,42	55	734.560.8 00,00	60	739.494.4 00,00	65	744.428.00 0,00	70	749.361.6 00,00	70	749.361.6 00,00	Pangan
2	10		Urusan Pemerintah an Bidang Pertanahan														
2	10	05	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembanguna	Persentase Penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan yang selesai	Persen	17,29	20,0 0	9.683.562 .100,00	30,0 0	9.748.600 .700,00	40,0 0	9.813.639.4 00,00	50,0 0	9.878.678 .100,00	50,0 0	9.878.678 .100,00	Pertanahan

Kode			Bidang Urusan Pemerintah- an dan Program Prioritas Pembangun- an	Indikator Program	Satu- an	Kondisi Kinerja Awal 2021	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan								KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		Urusan Penanggu ng Jawab
							2023		2024		2025		2026				
							Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			n	tepat waktu													
2	10	07	Program Penetapan Tanah Ulayat	Persentase tanah ulayat yang ditetapkan	Persen	7,21	10,0 0	81.810.00 0,00	20,0 0	82.360.40 0,00	30,0 0	82.909.900, 00	40,0 0	83.459.40 0,00	40,0 0	83.459.40 0,00	Pertanahan
2	11		Urusan Pemerintaha n Bidang Lingkungan Hidup														
2	11	02	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase perencanaan lingkungan hidup yang sesuai standar	Persen	76,00	80,0 0	110.751.0 00,00	85,0 0	111.494.8 00,00	90,0 0	112.238.70 0,00	95,0 0	112.982.5 00,00	95,0 0	112.982.5 00,00	Lingkungan Hidup
2	11	03	Program Pengendalia n Pencemaran dan/atau Kerusakan	Cakupan pemantauan kualitas air	Persen	57,00	60,0 0	527.540.9 00,00	70,0 0	531.084.1 00,00	80,0 0	534.627.20 0,00	90,0 0	538.170.4 00,00	90,0 0	538.170.4 00,00	Lingkungan Hidup

Kode			Bidang Urusan Pemerintah- an dan Program Prioritas Pembangun- an	Indikator Program	Satu- an	Kondisi Kinerja Awal 2021	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan								KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		Urusan Penanggu ng Jawab
							2023		2024		2025		2026				
							Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Lingkungan Hidup														
				Persentase sumber air yang dikonservasi	Persen	46,00	50,0 0		60,0 0		70,0 0		80,0 0		80,0 0		Lingkungan Hidup
				Persentase Kampung Iklim yang terfasilitasi	Persen	0,24	5,00		10,0 0		15,0 0		20,0 0		20,0 0		Lingkungan Hidup
				Cakupan pemantauan kualitas udara	Persen	55,24	60,0 0		70,0 0		80,0 0		90,0 0		90,0 0		Lingkungan Hidup
2	11	04	Program Pengelolaan Keanekaraga man Hayati (KEHATI)	Presentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang dikelola	Persen	1,00	5,00	255.179.6 00,00	10,0 0	256.893.5 00,00	15,0 0	258.607.40 0,00	20,0 0	260.321.3 00,00	20,0 0	260.321.3 00,00	Lingkungan Hidup
2	11	05	Program Pengendalia n Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan	Persentase limbah B3 yang terkelola	Persen	25	30	75.000.00 0,00	35	80.000.00 0,00	40	85.000.000, 00	45	90.000.00 0,00	45	90.000.00 0,00	Lingkungan Hidup

Kode			Bidang Urusan Pemerintah- an dan Program Prioritas Pembangun- an	Indikator Program	Satu- an	Kondisi Kinerja Awal 2021	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan								KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		Urusan Penanggu ng Jawab
							2023		2024		2025		2026				
							Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)														
2	11	06	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase persetujuan lingkungan yang dikeluarkan bagi aktivitas investasi yang sesuai standar	Persen	76,00	80,0 0	115.324.3 00,00	85,0 0	116.098.9 00,00	90,0 0	116.873.50 0,00	95,0 0	117.648.0 00,00	95,0 0	117.648.0 00,00	Lingkungan Hidup
				Persentase ketaatan pelaku usaha dan/ atau kegiatan terhadap izin	Persen	66,00	70,0 0		75,0 0		80,0 0		85,0 0		85,0 0		Lingkungan Hidup

Kode			Bidang Urusan Pemerintah- an dan Program Prioritas Pembangun- an	Indikator Program	Satu- an	Kondisi Kinerja Awal 2021	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan								KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		Urusan Penanggu ng Jawab
							2023		2024		2025		2026				
							Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				lingkungan, izin PPLH dan PUU LH													
				Persentase perusahaan yang ramah lingkungan	Persen	59,30	65,0 0		70,0 0		75,0 0		80,0 0		80,0 0		Lingkungan Hidup
2	11	11	Program Pengelolaan Persampaha n	Persentase timbunan sampah di perkotaan yang ditangani	Persen	45,24	50,0 0		60,0 0		70,0 0		80,0 0		80,0 0		Lingkungan Hidup
2	12		Urusan Pemerintah an Bidang Administras i Kependudu kan dan Pencatatan Sipil														

Kode			Bidang Urusan Pemerintah- an dan Program Prioritas Pembangun- an	Indikator Program	Satu- an	Kondisi Kinerja Awal 2021	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan								KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		Urusan Penanggu ng Jawab
							2023		2024		2025		2026				
							Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	12	02	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase masyarakat yang memiliki KTP	Persen	49,21	50,3 0	261.805.8 00,00	51,2 3	263.564.2 00,00	51,6 9	265.322.60 0,00	52,1 6	267.081.0 00,00	52,1 6	267.081.0 00,00	Administras i Kependudu kan dan Pencatatan Sipil
				Persentase Keluarga yang memiliki KK	Persen	21,24	24,9 1		24,9 6		25,0 1		25,0 5		25,0 5		Administras i Kependudu kan dan Pencatatan Sipil
2	12	03	Program Pencatatan Sipil	Persentase penerbitan akta kelahiran	Persen	65,00	79,0 0	136.931.3 00,00	80,0 0	137.851.0 00,00	81,0 0	138.770.70 0,00	82,0 0	139.690.4 00,00	82,0 0	139.690.4 00,00	Administras i Kependudu kan dan Pencatatan Sipil
				Persentase penerbitan akta Nikah	Persen	11,00	12,0 0		14,0 0		16,0 0		18,0 0		18,0 0		Administras i Kependudu kan dan Pencatatan Sipil

Kode			Bidang Urusan Pemerintah- an dan Program Prioritas Pembangun- -an	Indikator Program	Satu- an	Kondisi Kinerja Awal 2021	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan								KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		Urusan Penanggu ng Jawab
							2023		2024		2025		2026				
							Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				Persentase penerbitan akta Perceraian	Persen	0,06	0,07		0,06		0,05		0,04		0,04		Administras i Kependudu kan dan Pencatatan Sipil
				Persentase penerbitan akta kematian	Persen	0,13	0,16		0,24		0,26		0,28		0,28		Administras i Kependudu kan dan Pencatatan Sipil
2	12	04	Program Pengelolaan informasi administrasi kependuduka n	Persentase penyajian informasi kependudukan sesuai standar	Persen	35,00	100, 00	158.574.1 00,00	100, 00	159.639.2 00,00	100, 00	160.704.20 0,00	100, 00	161.769.3 00,00	100, 00	161.769.3 00,00	Administras i Kependudu kan dan Pencatatan Sipil
2	13		Urusan Pemerintaha n Bidang Pemberdaya an Masyarakat														

Kode			Bidang Urusan Pemerintah- an dan Program Prioritas Pembangun- an	Indikator Program	Satu- an	Kondisi Kinerja Awal 2021	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan								KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		Urusan Penanggu ng Jawab
							2023		2024		2025		2026				
							Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			dan Desa														
2	13	02	Program Penataan Desa	Persentase Penataan Desa yang difasilitasi sesuai Ketentuan	Persen	71,00	75,0 0	179.201.5 00,00	80,0 0	180.405.1 00,00	82,0 0	181.608.70 0,00	86,0 0	182.812.3 00,00	86,0 0	182.812.3 00,00	Pemberday aan Masyarakat dan Desa
2	13	04	Program Administrasi Pemerintaha n Desa	Persentase Desa yang memiliki administrasi sesuai standar	Persen	89,00	90,0 0	344.919.9 00,00	93,0 0	347.236.5 00,00	95,0 0	349.553.10 0,00	98,0 0	351.869.7 00,00	98,0 0	351.869.7 00,00	Pemberday aan Masyarakat dan Desa
2	13	05	Program Pemberdaya an Lembaga Kemasyarak atan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase kelembagaan masyarakat desa yang diberdayakan	Persen	66,00	69,0 0	433.492.6 00,00	71,0 0	436.404.1 00,00	73,0 0	439.315.70 0,00	75,0 0	442.227.2 00,00	75,0 0	442.227.2 00,00	Pemberday aan Masyarakat dan Desa

Kode			Bidang Urusan Pemerintah- an dan Program Prioritas Pembangun- an	Indikator Program	Satu- an	Kondisi Kinerja Awal 2021	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan								KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		Urusan Penanggu ng Jawab
							2023		2024		2025		2026				
							Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	14		Urusan Pemerintah an Bidang Pengendalia n Penduduk dan Keluarga Berencana														
2	14	02	Program Pengendalia n Penduduk	Rata-Rata Usia Kawin Pertama Wanita	Persen	18,00	19,0 0	530.976.5 00,00	19,0 0	534.542.7 00,00	19,0 0	538.109.00 0,00	19,0 0	541.675.2 00,00	19,0 0	541.675.2 00,00	Pengendali an Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	03	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase Peserta KB Aktif	Persen	100,00	100, 00	2.306.873 .400,00	100, 00	2.322.367 .300,00	100, 00	2.337.861.2 00,00	100, 00	2.353.355 .100,00	100, 00	2.353.355 .100,00	Pengendali an Penduduk dan Keluarga Berencana
2	15		Urusan Pemerintah an Bidang Perhubunga														

Kode			Bidang Urusan Pemerintah- an dan Program Prioritas Pembangun- an	Indikator Program	Satu- an	Kondisi Kinerja Awal 2021	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan								KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		Urusan Penanggu ng Jawab
							2023		2024		2025		2026				
							Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			n														
2	15	02	Program Penyelengga raan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase angkutan umum yang berkualitas baik	Persen	55,54	60,0 0	776.737.5 00,00	70,0 0	781.954.4 00,00	80,0 0	787.171.30 0,00	90,0 0	792.388.1 00,00	90,0 0	792.388.1 00,00	Perhubung an
				Persentase kepemilikan KIR Angkutan Umum	Persen	65,03	70,0 0		75,0 0		80,0 0		85,0 0		85,0 0		Perhubung an
				Persentase sarana dan prasarana perhubungan memadai	Persen	45,24	50,0 0		55,0 0		60,0 0		70,0 0		70,0 0		Perhubung an
2	15	03	Program Pengelolaan Pelayaran	Persentase ijin pengelolaan pelayaran yang diterbitkan	Persen	4,12	5,00	2.570.204 .200,00	10,0 0	2.587.466 .700,00	15,0 0	2.604.729.3 00,00	20,0 0	2.621.991 .800,00	20,0 0	2.621.991 .800,00	Perhubung an
2	16		Urusan Pemerintah an Bidang														

Kode			Bidang Urusan Pemerintah- an dan Program Prioritas Pembangun- an	Indikator Program	Satu- an	Kondisi Kinerja Awal 2021	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan								KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		Urusan Penanggu ng Jawab
							2023		2024		2025		2026				
							Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Komunikasi dan Informatika														
2	16	02	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Pesentase penyebaran seluruh informasi daerah kepada masyarakat	Persen	67,00	70,0 0	360.956.0 00,00	80,0 0	363.380.3 00,00	90,0 0	365.804.60 0,00	100, 00	368.228.9 00,00	100, 00	368.228.9 00,00	Komunikasi dan Informatika
2	16	03	Program Aplikasi Informatika	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara elektronik	Persen	76,00	80,0 0	247.037.9 00,00	85,0 0	248.697.1 00,00	90,0 0	250.356.30 0,00	95,0 0	252.015.5 00,00	95,0 0	252.015.5 00,00	Komunikasi dan Informatika
2	17		Urusan Pemerintah an Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah														

Kode			Bidang Urusan Pemerintah- an dan Program Prioritas Pembangun- an	Indikator Program	Satu- an	Kondisi Kinerja Awal 2021	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan								KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		Urusan Penanggu ng Jawab
							2023		2024		2025		2026				
							Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	17	03	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase koperasi produksi yang didampingi	Persen	57,76	60	355.343.900,00	70	357.730.600,00	75	360.117.200,00	80	362.503.800,00	80	362.503.800,00	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	17	04	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Prosentase koperasi yang disupervisi kesehatan manajemennya	Persen	67	70	255.655.100,00	75	257.372.200,00	80	259.089.300,00	90	260.806.300,00	90	260.806.300,00	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	17	05	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase pengurus koperasi yang terlatih	Persen	47,18	50	110.751.000,00	60	111.494.800,00	70	112.238.700,00	80	112.982.500,00	80	112.982.500,00	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	17	07	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Prosentase usaha mikro yang meningkat kapasitas produksinya	Persen	8	10	157.764.000,00	20	158.823.600,00	30	159.883.300,00	40	160.942.900,00	40	160.942.900,00	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Kode			Bidang Urusan Pemerintah- an dan Program Prioritas Pembangun- an	Indikator Program	Satu- an	Kondisi Kinerja Awal 2021	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan								KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		Urusan Penanggu ng Jawab
							2023		2024		2025		2026				
							Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	17	08	Program Pengembang an UMKM	Persentase usaha mikro yang memiliki produk yang bersertifikat	Persen	2,04	5	746.689.5 00,00	10	751.704.6 00,00	15	756.719.70 0,00	20	761.734.7 00,00	20	761.734.7 00,00	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	18		Urusan Pemerintah an Bidang Penanaman Modal														
2	18	02	Program Pengembang an Iklim Penanaman Modal	Persentase potensi investasi yang teridentifikasi	Persen	12,5	15	110.751.0 00,00	20	111.494.8 00,00	25	112.238.70 0,00	30	112.982.5 00,00	30	112.982.5 00,00	Penanama n Modal
2	18	03	Program Promosi Penanaman Modal	Persentase potensi investasi yang dipromosikan	Persen	17,04	20	151.028.3 00,00	25	152.042.7 00,00	30	153.057.00 0,00	35	154.071.4 00,00	35	154.071.4 00,00	Penanama n Modal
2	18	04	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase pelayanan perizinan dan non perizinan yang dijalankan	Persen	57,29	60	256.146.2 00,00	70	257.866.6 00,00	80	259.587.00 0,00	90	261.307.4 00,00	90	261.307.4 00,00	Penanama n Modal

Kode			Bidang Urusan Pemerintah- an dan Program Prioritas Pembangun- an	Indikator Program	Satu- an	Kondisi Kinerja Awal 2021	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan								KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		Urusan Penanggu ng Jawab
							2023		2024		2025		2026				
							Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				sesuai SOP													
2	18	05	Program Pengendalia n Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase usaha yang dipantau, dibina dan diawasi	Persen	17,95	20	371.726.900,00	25	374.223.500,00	30	376.720.200,00	35	379.216.900,00	35	379.216.900,00	Penanama n Modal
2	19		Urusan Pemerintaha n Bidang Kepemudaa n dan Olahraga														
2	19	02	Program Pengembang an Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase Pemuda yang mendapat pelatihan pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawana	Persen	40,00	50,00	755.706.000,00	52,00	760.781.600,00	55,00	765.857.278,82	60,00	770.932.900,00	60,00	770.932.900,00	Pemuda dan Olahraga

Kode			Bidang Urusan Pemerintah- an dan Program Prioritas Pembangun- an	Indikator Program	Satu- an	Kondisi Kinerja Awal 2021	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan								KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		Urusan Penanggu ng Jawab
							2023		2024		2025		2026				
							Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				n dan kepeloporan pemuda													
2	19	03	Program Pengembang an Kapasitas Daya Saing Keolahragaa n	Persentase Fasilitas Olahraga dalam Kondisi Baik	Persen	17,00	20,0 0	1.185.806 .700,00	25,0 0	1.193.771 .100,00	30,0 0	1.201.735.4 00,00	32,0 0	1.209.699 .800,00	32,0 0	1.209.699 .800,00	Pemuda dan Olahraga
				Cakupan Pembinaan Atlit Muda	Persen	69,45	70,0 1		70,7 2		71,4 3		72,1 4		72,1 4		Pemuda dan Olahraga
2	19	04	Program Pengembang an Kapasitas Kepramukaa n	Persentase Kelompok Pramuka Aktif	Persen	76,00	80,0 0	250.644.7 00,00	83,0 0	252.328.1 00,00	85,0 0	254.011.50 0,00	90,0 0	255.695.0 00,00	90,0 0	255.695.0 00,00	Pemuda dan Olahraga
2	20		Urusan Pemerintah an Bidang Statistik														

Kode			Bidang Urusan Pemerintah- an dan Program Prioritas Pembangun- an	Indikator Program	Satu- an	Kondisi Kinerja Awal 2021	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan								KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		Urusan Penanggu ng Jawab
							2023		2024		2025		2026				
							Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	20	02	Program Penyelengga raan Statistik Sektoral	Persentase data statistik sektoral yang terupdate	Persen	75,32	80,0 0	238.842.9 00,00	85,0 0	240.447.1 00,00	90,0 0	242.051.30 0,00	95,0 0	243.655.4 00,00	95,0 0	243.655.4 00,00	Statistik
2	21		Urusan Pemerintaha n Bidang Persandian														
2	21	02	Program Penyelengga raan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	Persen	23,00	25,0 0	334.878.2 00,00	40,0 0	337.127.4 00,00	45,0 0	339.376.50 0,00	50,0 0	341.625.7 00,00	50,0 0	341.625.7 00,00	Persandian
2	22		Urusan Pemerintaha n Bidang Kebudayaan														
2	22	02	Program Pengembang an Kebudayaan	persentase kegiatan tradisi adat dan seni yang sudah direvitalisasi	Persen	10,00	12,0 0	85.250.00 0,00	15,0 0	85.822.60 0,00	20,0 0	86.395.200, 00	25,0 0	86.967.70 0,00	25,0 0	86.967.70 0,00	Kebudayaa n

Kode			Bidang Urusan Pemerintah- an dan Program Prioritas Pembangun- an	Indikator Program	Satu- an	Kondisi Kinerja Awal 2021	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan								KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		Urusan Penanggu ng Jawab
							2023		2024		2025		2026				
							Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	23		Urusan Pemerintah an Bidang Perpustakaa n														
2	23	02	Program Pembinaan Perpustakaa n	Rasio Ketercukupan Koleksi Perpustakaan dengan Penduduk	Persen	43,00	50,0 0	363.613.3 00,00	52,0 0	366.055.4 00,00	57,0 0	368.497.60 0,00	59,0 0	370.939.8 00,00	59,0 0	370.939.8 00,00	Perpustaka an
2	24		Urusan Pemerintah an Bidang Kearsipan														
2	24	02	Program Pengelolaan Arsip	Persentase PD yang mengelola arsip secara baku	Persen	75,21	86,5 4	85.250.00 0,00	88,4 6	85.822.60 0,00	90,3 8	86.395.200, 00	92,3 1	86.967.70 0,00	92,3 1	86.967.70 0,00	Kearsipan
3			Urusan Pemerintah an Pilihan														

Kode			Bidang Urusan Pemerintah- an dan Program Prioritas Pembangun- an	Indikator Program	Satu- an	Kondisi Kinerja Awal 2021	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan								KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		Urusan Penanggu ng Jawab
							2023		2024		2025		2026				
							Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3	25		Urusan Pemerintah an Bidang Kelautan dan Perikanan														
3	25	03	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Persentase kelompok nelayan terlatih	Persen	67,04	70	3.877.328 .300,00	75	3.903.370 .000,00	80	3.929.411.7 00,00	85	3.955.453 .400,00	85	3.955.453 .400,00	Kelautan dan Perikanan
				Persentase sarana perikanan tangkap berkondisi baik	Persen	47,16	50		55		60		70		70		Kelautan dan Perikanan
				Persentase prasarana perikanan tangkap berkondisi baik	Persen	47,74	50		55		60		70		70		Kelautan dan Perikanan

Kode			Bidang Urusan Pemerintah- an dan Program Prioritas Pembangun- -an	Indikator Program	Satu- an	Kondisi Kinerja Awal 2021	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan								KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		Urusan Penanggu ng Jawab
							2023		2024		2025		2026				
							Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				Persentase kelompok nelayan yang menerapkan metode penangkapan ikan yang baik dan benar	Persen	37,88	40		45		50		55		55		Kelautan dan Perikanan
3	25	04	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Persentase kelompok perikanan budidaya yang terlatih	Persen	75,93	78	612.364.300,00	85	616.477.200,00	90	620.590.100,00	95	624.703.000,00	95	624.703.000,00	Kelautan dan Perikanan
				Persentase sarana perikanan budidaya yang berkondisi baik	Persen	42,85	45		48		55		60		60		Kelautan dan Perikanan
				Persentase Kelompok pembudidaya perikanan yang menggunakan metode	Persen	75,29	78		85		90		95		95		Kelautan dan Perikanan

Kode			Bidang Urusan Pemerintah- an dan Program Prioritas Pembangun- -an	Indikator Program	Satu- an	Kondisi Kinerja Awal 2021	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan								KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		Urusan Penanggu ng Jawab
							2023		2024		2025		2026				
							Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				budidaya yang baik													
3	25	06	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase promosi konsumsi ikan yang berhasil dijalankan	Persen	27,97	30	350.745.300,00	40	353.101.100,00	45	355.456.800,00	50	357.812.600,00	50	357.812.600,00	Kelautan dan Perikanan
3	26		Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata														
3	26	02	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase destinasi wisata yang ditingkatkan daya tariknya	Persen	7	10	332.469.400,00	20	334.702.400,00	25	336.935.400,00	30	339.168.400,00	30	339.168.400,00	Pariwisata

Kode			Bidang Urusan Pemerintah- an dan Program Prioritas Pembangun- an	Indikator Program	Satu- an	Kondisi Kinerja Awal 2021	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan								KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		Urusan Penanggu ng Jawab
							2023		2024		2025		2026				
							Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3	26	03	Program Pemasaran Pariwisata	Persentase promosi potensi pariwisata yang ditindaklanjuti dengan kerjasama investasi	Persen	7,13	10	120.713.5 00,00	20	121.524.3 00,00	25	122.335.00 0,00	30	123.145.8 00,00	30	123.145.8 00,00	Pariwisata
				Persentase kerjasama pengembangan pariwisata yang berjalan dengan baik	Persen	6,58	10		20		25		30		30		Pariwisata
3	26	05	Program Pengembang an Sumberdaya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase pelaku Ekraf yang meningkat kapasitas produksinya	Persen	2,93	5	378.518.8 00,00	10	381.061.1 00,00	15	383.603.30 0,00	20	386.145.6 00,00	20	386.145.6 00,00	Pariwisata
				Persentase pelaku Ekraf yang memiliki produk yang	Persen	2,13	5		10		15		20		20		Pariwisata

Kode			Bidang Urusan Pemerintah- an dan Program Prioritas Pembangun- an	Indikator Program	Satu- an	Kondisi Kinerja Awal 2021	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan								KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		Urusan Penanggu ng Jawab
							2023		2024		2025		2026				
							Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				tersertifikasi													
3	27		Urusan Pemerintaha n Bidang Pertanian														
3	27	02	Program Penyediaan dan Pengembang an Sarana Pertanian	Persentase pertumbuhan pemanfaatan sarana pertanian	Persen	17,68	20	3.206.678 .000,00	25	3.228.215 .300,00	28	3.249.752.7 00,00	30	3.271.290 .000,00	30	3.271.290 .000,00	Pertanian
				Persentase sarana peternakan berkondisi baik	Persen	12,04	15		18		22		28		31		Pertanian
3	27	03	Program Penyediaan dan Pengembang an Prasarana Pertanian	Persentase pertumbuhan pemenuhan prasarana pertanian	Persen	17,68	20	2.402.432 .500,00	22	2.418.568 .100,00	25	2.434.703.9 00,00	27	2.450.839 .500,00	27	2.450.839 .500,00	Pertanian

Kode			Bidang Urusan Pemerintah- an dan Program Prioritas Pembangun- an	Indikator Program	Satu- an	Kondisi Kinerja Awal 2021	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan								KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		Urusan Penanggu ng Jawab
							2023		2024		2025		2026				
							Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				Persentase prasarana peternakan berkondisi baik	Persen	12,68	15		18		22		28		31		Pertanian
3	27	04	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	Persen	47,84	50	130.024.300,00	60	130.897.600,00	70	131.770.900,00	80	132.644.200,00	80	132.644.200,00	Pertanian
3	27	05	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Pengendalian dan Penanggulanga n Bencana Pertanian	Persen	80,09	85	85.250.000,00	90	85.822.600,00	95	86.395.200,00	100	86.967.700,00	100	86.967.700,00	Pertanian
3	27	06	Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase usaha pertanian yang mendapatkan rekomendasi perizinan usaha pertanian	Persen	17,39	20	110.751.000,00	25	111.494.800,00	30	112.238.700,00	35	112.982.500,00	35	112.982.500,00	Pertanian

Kode			Bidang Urusan Pemerintah- an dan Program Prioritas Pembangun- an	Indikator Program	Satu- an	Kondisi Kinerja Awal 2021	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan								KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		Urusan Penanggu ng Jawab
							2023		2024		2025		2026				
							Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				Persentase kelompok peternak terlatih	Persen	11,63	15		18		22		28		31		Pertanian
3	27	07	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase cakupan bina kelompok tani	Persen	100	100	264.196.600,00	100	265.971.100,00	100	267.745.500,00	100	269.520.000,00	100	269.520.000,00	Pertanian
3	30		Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan														
3	30	03	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Prasarana dan Sarana Perdagangan yang berkondisi baik	Persen	53	55	879.185.000,00	60	885.090.000,00	65	890.994.900,00	70	896.899.900,00	70	896.899.900,00	Perdagangan
				Persentase Pasar yang memenuhi persyaratan teknis pasar	Persen	27,83	30		35		40		50		50		Perdagangan

Kode			Bidang Urusan Pemerintah- an dan Program Prioritas Pembangun- an	Indikator Program	Satu- an	Kondisi Kinerja Awal 2021	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan								KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		Urusan Penanggu ng Jawab
							2023		2024		2025		2026				
							Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3	30	04	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase stabilitas harga kebutuhan barang pokok dan barang penting	Persen	67,17	70	80.961.00 0,00	75	81.505.30 0,00	80	82.049.100, 00	85	82.592.80 0,00	85	82.592.80 0,00	Perdagang an
3	30	06	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase penurunan kasus sengketa perdagangan	Persen	17,96	20	123.157.0 00,00	22	123.984.2 00,00	25	124.811.40 0,00	28	125.638.5 00,00	28	125.638.5 00,00	Perdagang an
3	30	07	Program Penggunaan dan pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase pelaku usaha binaan yang difasilitasi promosi produk	Persen	47,04	50	111.747.2 00,00	55	112.497.8 00,00	60	113.248.30 0,00	70	113.998.8 00,00	70	113.998.8 00,00	Perdagang an
3	30	08	Program Pengembang an Ekspor	Peningkatan Ekspor	Persen	0	0	700.000.0 00,00	10	700.000.0 00,00	12	700.000.00 0,00	15	700.000.0 00,00	15	700.000.0 00,00	Perdagang an

Kode			Bidang Urusan Pemerintah- an dan Program Prioritas Pembangun- an	Indikator Program	Satu- an	Kondisi Kinerja Awal 2021	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan								KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		Urusan Penanggu ng Jawab
							2023		2024		2025		2026				
							Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3	31		Urusan Pemerintah an Bidang Perindustria n														
3	31	02	Program Perencanaan dan Pembanguna n Industri	Persentase pelaku IKM yang terlatih	Persen	47,96	50	3.223.463 .500,00	55	3.245.113 .600,00	60	3.266.763.7 00,00	70	3.288.413 .700,00	70	3.288.413 .700,00	Perindustri an
				Persentase Sarana dan Prasarana Industri yang berkondisi baik	Persen	52,04	55		60		65		70		70		Perindustri an
				Persentase pelaku IKM yang menghasilkan inovasi	Persen	2,4	5		10		15		20		20		Perindustri an
4			Unsur Pendukung Urusan Pemerintah an														

Kode			Bidang Urusan Pemerintah- an dan Program Prioritas Pembangun- an	Indikator Program	Satu- an	Kondisi Kinerja Awal 2021	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan								KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		Urusan Penanggu ng Jawab
							2023		2024		2025		2026				
							Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4	01		Sekretariat Daerah														
4	01	02	Program Pemerintah an dan Kesejahteraa n Rakyat	Persentase usulan kebijakan bidang pemerintahan yang ditindaklanjuti	Persen	65,64	66,6 7	11.460.06 6.000,00	73,3 3	11.537.03 6.400,00	86,6 7	11.614.006. 800,00	100, 00	11.690.97 7.200,00	100, 00	11.690.97 7.200,00	Sekretariat Daerah
				Persentase Alokasi Beasiswa Pendidikan Tinggi yang Tepat Sasaran	Persen	75,00	100, 00		100, 00		100, 00		100, 00		100, 00		Sekretariat Daerah
				Persentase Kerjasama Pemerintah Daerah yang ditindaklanjuti	Persen	54,23	66,6 7		75,0 0		87,5 0		100, 00		100, 00		Sekretariat Daerah
				Persentase usulan kebijakan bidang kesejahteraan rakyat yang	Persen	63,00	60,0 0		70,0 0		76,0 0		80,0 0		80,0 0		Sekretariat Daerah

Kode			Bidang Urusan Pemerintah- an dan Program Prioritas Pembangun- an	Indikator Program	Satu- an	Kondisi Kinerja Awal 2021	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan								KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		Urusan Penanggu ng Jawab
							2023		2024		2025		2026				
							Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				ditindaklanjuti													
				Persentase produk hukum daerah yang dituntaskan	Persen	74,00	80,00		87,50		90,00		92,50		92,50		Sekretariat Daerah
4	01	03	Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase usulan kebijakan bidang perekonomian yang ditindaklanjuti	Persen	12,00	15,00	856.754.800,00	20,00	862.509.100,00	25,00	868.263.400,00	30,00	874.017.700,00	30,00	874.017.700,00	Sekretariat Daerah
				Persentase Kebijakan Strategis Bidang Pembangunan yang ditindaklanjuti	Persen	77,00	80,00		85,00		90,00		95,00		95,00		Sekretariat Daerah
				Persentase kontribusi BUMD terhadap PAD	Persen	0,00	0,25		0,38		0,50		0,63		0,63		Sekretariat Daerah

Kode			Bidang Urusan Pemerintah- an dan Program Prioritas Pembangun- -an	Indikator Program	Satu- an	Kondisi Kinerja Awal 2021	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan								KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		Urusan Penanggu ng Jawab
							2023		2024		2025		2026				
							Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				Persentase Pengadaan Barang dan Jasa yang tepat waktu	Persen	86,23	80,0 0		83,3 3		88,4 6		90,9 1		90,9 1		Sekretariat Daerah
4	02		Sekretariat DPRD		Persen												
4	02	02	Program dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase dukungan Tupoksi DPRD sesuai standar	Persen	100,00	100, 00	17.574.19 1.400,00	100, 00	17.692.22 6.700,00	100, 00	17.810.262. 000,00	100, 00	17.928.29 7.300,00	100, 00	17.928.29 7.300,00	Sekretariat DPRD
5			Unsur Penunjang Urusan Pemerintaha n														
5	01		Perencanaa n														
5	01	02	Program Perencanaan , Pengendalia	Persentase Realisasi program	Persen	87,00	100, 00	1.497.536 .600,00	100, 00	1.507.594 .700,00	100, 00	1.517.652.7 00,00	100, 00	1.527.710 .800,00	100, 00	1.527.710 .800,00	Perencana an

Kode			Bidang Urusan Pemerintah- an dan Program Prioritas Pembangun- an	Indikator Program	Satu- an	Kondisi Kinerja Awal 2021	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan								KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		Urusan Penanggu ng Jawab
							2023		2024		2025		2026				
							Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			n dan Evauasi Pembanguna n Daerah														
5	01	03	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembanguna n Daerah	Persentase konsistensi dokumen RPJMD dengan RKPD	Persen	87,00	100, 00	670.907.9 00,00	100, 00	675.414.0 00,00	100, 00	679.920.00 0,00	100, 00	684.426.1 00,00	100, 00	684.426.1 00,00	Perencana an
				Persentase konsistensi dokumen RPJMD dengan Renstra	Persen	83,43	100, 00		100, 00		100, 00		100, 00		100, 00		Perencana an
				Persentase konsistensi dokumen Renstra dengan Renja	Persen	82,02	100, 00		100, 00		100, 00		100, 00		100, 00		Perencana an

Kode			Bidang Urusan Pemerintah- an dan Program Prioritas Pembangun- an	Indikator Program	Satu- an	Kondisi Kinerja Awal 2021	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan								KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		Urusan Penanggu ng Jawab
							2023		2024		2025		2026				
							Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				Persentase Penyusunan dokumen perencanaan Tepat Waktu	Persen	83,00	100, 00		100, 00		100, 00		100, 00		100, 00		Perencana an
5	02		Keuangan														
5	02	02	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Presentase PD yang menyusun Laporan keuangan sesuai Satndar (Waktu dan SAP)	Persen	88,00	90,0 0	150.988.5 59.000,00	100, 00	152.002.6 58.700,00	100, 00	153.016.75 8.400,00	100, 00	154.030.8 58.100,00	100, 00	154.030.8 58.100,00	Keuangan
				Presentase Realisasi Belanja daerah minimal 90 %	Persen	88,00	90,0 0		100, 00		100, 00		100, 00		100, 00		Keuangan
5	02	03	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase aset daerah yang dilakukan penatausahaan dan pengamanan	Persen	97,00	100, 00	275.820.4 00,00	100, 00	277.672.9 00,00	100, 00	279.525.40 0,00	100, 00	281.378.0 00,00	100, 00	281.378.0 00,00	Keuangan

Kode			Bidang Urusan Pemerintah- an dan Program Prioritas Pembangun- an	Indikator Program	Satu- an	Kondisi Kinerja Awal 2021	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan								KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		Urusan Penanggu ng Jawab
							2023		2024		2025		2026				
							Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				Persetase Aset Tanah yang bersertifikat	Persen	30,00	50,00		60,00		70,00		80,00		80,00		Keuangan
5	02	04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Persen	3,78	4,11	1.082.865.000,00	4,47	1.090.138.000,00	4,87	1.097.410.900,00	5,31	1.104.683.900,00	5,31	1.104.683.900,00	Keuangan
5	03		Kepegawaian														
5	03	02	Program Kepegawaian Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pegawai di Setiap Jabatan	Persen	75,00	77,00	1.777.257.200,00	80,00	1.789.194.000,00	83,00	1.801.130.800,00	87,00	1.813.067.500,00	94,00	1.813.067.500,00	Kepegawaian
				Persentase penurunan kasus pelanggaran disiplin ASN	Persen	74,00	77,00		80,00		83,00		87,00		94,00		Kepegawaian
				Persentase Pegawai yang Memenuhi Target SKP dengan predikat	Persen	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Kepegawaian

Kode			Bidang Urusan Pemerintah- an dan Program Prioritas Pembangun- an	Indikator Program	Satu- an	Kondisi Kinerja Awal 2021	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan								KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		Urusan Penanggu ng Jawab
							2023		2024		2025		2026				
							Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				minimal baik													
5	04		Pendidikan dan Pelatihan														
5	04	02	Program Pengembang an Sumber Daya Manusia	Persentase kesesuaian jabatan dengan pesyaratan	Persen	75,00	87,00	1.134.911.300,00	100,00	1.142.533.800,00	100,00	1.150.156.300,00	100,00	1.157.778.800,00	100,00	1.157.778.800,00	Pendidikan dan Pelatihan
				Persentase ASN yang mendapatkan peningkatan kapasitas	Persen	0,06	0,07		0,08		0,09		0,10		0,20		Pendidikan dan Pelatihan
5	05		Penelitian dan Pengemban gan														

Kode			Bidang Urusan Pemerintah- an dan Program Prioritas Pembangun- an	Indikator Program	Satu- an	Kondisi Kinerja Awal 2021	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan								KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		Urusan Penanggu ng Jawab
							2023		2024		2025		2026				
							Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5	05	02	Program Penelitian Dan Pengembang an Daerah	Persentase Police Brief Bidang Penelitian dan Pengembangan yang dimanfaatkan dalam Perumusan Kebijakan	Persen	100,00	100, 00	288.398.3 00,00	100, 00	290.335.3 00,00	100, 00	292.272.30 0,00	100, 00	294.209.3 00,00	100, 00	294.209.3 00,00	Penelitian dan Pengemba ngan
				Persentase Kebijakan Inovasi yang diterapkan	Persen	44,00	48,0 0		50,0 0		52,0 0		54,0 0		60,0 0		Penelitian dan Pengemba ngan
6			Unsur Pengawas Urusan Pemerintaha n														
6	01		Inspektorat Daerah														
6	01	02	Program Penyelengga raan	Persentase Tindak Lanjut Hasil	Persen	78,43	81,2 5	2.031.239 .600,00	84,6 2	2.044.882 .200,00	90,9 1	2.058.524.9 00,00	93,7 5	2.072.167 .500,00	93,7 5	2.072.167 .500,00	Inspektorat

Kode			Bidang Urusan Pemerintah- an dan Program Prioritas Pembangun- an	Indikator Program	Satu- an	Kondisi Kinerja Awal 2021	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan								KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		Urusan Penanggu ng Jawab
							2023		2024		2025		2026				
							Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Pengawasan	Pemeriksaan Eksternal													
				Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Internal	Persen	80,06	88,57		91,43		94,44		100,00		100,00		Inspektorat
6	01	03	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Capaian Nilai MCP Kabupaten	Persen	66,01	68,70	601.287.800,00	70,37	605.326.200,00	72,04	609.364.700,00	73,71	613.403.200,00	73,71	613.403.200,00	Inspektorat
7			Unsur Kewilayahan														
7	01		Kecamatan														
7	01	02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan	Persentase layanan masyarakat yang sesuai standar	Persen	65,12	89,13	637.259.100,00	91,30	641.539.200,00	93,48	645.819.300,00	97,83	650.099.400,00	97,83	650.099.400,00	Kecamatan

Kode			Bidang Urusan Pemerintah- an dan Program Prioritas Pembangun- an	Indikator Program	Satu- an	Kondisi Kinerja Awal 2021	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan								KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		Urusan Penanggu ng Jawab
							2023		2024		2025		2026				
							Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Publik														
				Persentase Layanan Publik Kecamatan Tepat Waktu	Persen	75,00	100, 00		100, 00		100, 00		100, 00		100, 00		Kecamatan
7	01	03	Program Pemberdaya an Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Hasil Koordinasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan yang ditindaklanjuti	Persen	87,12	100, 00	250.004.3 00,00	100, 00	251.683.4 00,00	100, 00	253.362.60 0,00	100, 00	255.041.7 00,00	100, 00	255.041.7 00,00	Kecamatan
7	01	05	Program Penyelengga raan Urusan Pemerintaha n Umum	Persentase Koordinasi Pemerintahan Umum yang ditindaklanjuti	Persen	89,00	100, 00	120.713.5 00,00	100, 00	121.524.3 00,00	100, 00	122.335.00 0,00	100, 00	123.145.8 00,00	100, 00	123.145.8 00,00	Kecamatan

Kode			Bidang Urusan Pemerintah- an dan Program Prioritas Pembangun- an	Indikator Program	Satu- an	Kondisi Kinerja Awal 2021	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan								KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		Urusan Penanggu ng Jawab
							2023		2024		2025		2026				
							Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7	01	06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintaha n Desa	Persentase Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang ditindaklanjuti	Persen	83,42	100, 00	612.428.7 00,00	100, 00	616.542.1 00,00	100, 00	620.655.40 0,00	100, 00	624.768.7 00,00	100, 00	624.768.7 00,00	Kecamatan
8			Unsur Pemerintaha n Umum														
8	01		Kesatuan Bangsa dan Politik														
8	01	02	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Persentase masyarakat yang mendapatkan penguatan ideologi Pancasila	Persen	50,00	60,8 7	334.878.2 00,00	65,2 2	337.127.4 00,00	70,6 5	339.376.50 0,00	76,0 9	341.625.7 00,00	76,0 9	341.625.7 00,00	Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode			Bidang Urusan Pemerintah- an dan Program Prioritas Pembangun- an	Indikator Program	Satu- an	Kondisi Kinerja Awal 2021	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan								KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		Urusan Penanggu ng Jawab
							2023		2024		2025		2026				
							Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
8	01	03	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase Penanganan Fasilitas Bidang Politik Dalam Negeri	Persen	100,00	100,00	1.546.338.000,00	100,00	1.556.723.900,00	100,00	1.567.109.700,00	100,00	1.577.495.500,00	100,00	1.577.495.500,00	Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	04	Program Pemberdayaan dan Pengawasan organisasi kemasyarakatan	Persentase Ormas yang terdaftar	Persen	65,12	81,08	111.747.200,00	89,19	112.497.800,00	94,59	113.248.300,00	100,00	113.998.800,00	100,00	113.998.800,00	Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode			Bidang Urusan Pemerintah- an dan Program Prioritas Pembangun- -an	Indikator Program	Satu- an	Kondisi Kinerja Awal 2021	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan								KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		Urusan Penanggu ng Jawab
							2023		2024		2025		2026				
							Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
8	01	06	Program Peningkatan Kewaspadaa n nasional dan peningkatan kualitas dan fasiliasi penanganan konflik sosial	Persentase kebijakan kewaspadaan dini penanganan konflik sosial yang ditindaklanjuti	Persen	86,92	100, 00	570.440.8 00,00	100, 00	574.272.1 00,00	100, 00	578.103.40 0,00	100, 00	581.934.7 00,00	100, 00	581.934.7 00,00	Kesatuan Bangsa dan Politik

BAB VIII

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bab ini menyajikan gambaran kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk satu periode ke depan. Gambaran kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berkaitan dengan ukuran keberhasilan pencapaian tujuan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK). Selain itu, bab ini juga menyajikan IKU masing-masing Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat.

Target IKU yang sudah ditetapkan pada setiap tahapan mulai dari tahun 2023 sampai tahun 2026 merupakan target yang ditetapkan dengan menggunakan dua pendekatan. Pertama menggunakan pendekatan proyeksi statistik, yang kedua pendekatan terhadap situasi dan kondisi riil yang dihadapi daerah saat ini. Pertama, penetapan target dilakukan dengan pendekatan statistik dengan melihat kinerja dari setiap indikator selama 5 tahun ke belakang. Teknik yang digunakan antara lain forecast linear, forecast Exponential Triple Smoothing (ETS), serta menggunakan rata-rata pertumbuhan tiap indikator selama 5 tahun sebelumnya. Kedua, menggunakan teknik pendekatan empiris dengan mempertimbangkan pendekatan kondisi yang dihadapi daerah. Hal tersebut menjadi pertimbangan dalam menentukan target IKU sehingga dapat dijabarkan target-target yang sifatnya pesimis, moderat, maupun optimis. Selain itu, pendekatan empiris juga memperhatikan aspek-aspek adanya ketidakpastian atau uncertainty akibat PandemiCovid-19, kebijakan pusat dan daerah serta prioritas dalam pembangunan 4 (empat) tahun ke depan.

8.1. Indikator Kinerja Utama Daerah

Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah merupakan ukuran keberhasilan pencapaian tujuan Rencana Pembangunan Daerah. IKU tersebut ditetapkan sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk satu periode ke depan. Adapun IKU Daerah yang ditetapkan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 8.1. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat
Tahun 2023-2026**

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Kondisi Awal (2021)	Target Capaian				Kondisi Akhir (2026)
				2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1,	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	65,83	66,67	67,01	67,36	67,71	67,71
2,	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	7,29	7,09	6,72	6,21	6	5,82
3,	Indeks Resiko Bencana	Indeks	170,18	172,81	173,68	174,56	175,44	175,44
4,	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	98,44	98,62	98,65	98,67	98,69	98,69
5,	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Nilai	3,4	5,44	5,79	6,15	6,50	6,50
6,	Tingkat Kemiskinan	Persen	25,27	24,95	24,86	24,76	24,67	24,67
7,	Indeks Infrastruktur	Indeks	64,64	75,03	80,23	85,42	90,62	90,62
8,	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	79,8	82,4	83,7	85	86,3	86,3
9,	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	-	76,67	76,92	77,08	77,16	77,16
10,	Indeks Desa Membangun (Jumlah Desa yang termasuk dalam Kategori Desa Mandiri)	Jumlah	6	10	12	14	16	16
11,	Angka Konflik Sosial	Nilai	5	2	0	0	0	0

8.2. Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah merupakan ukuran keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah di tingkat Perangkat Daerah. IKU tersebut secara langsung mendukung capaian IKU daerah. Berikut ini adalah IKU masing-masing PD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat.

Tabel 8.2. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat
Tahun 2023-2026

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal (2021)	Target Capaian				Kondisi Akhir (2026)	Perangkat Daerah Penanggungjawab
				2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Angka Harapan Hidup	Tahun	61,85	62,34	62,57	62,80	63,03	63,03	Dinas Kesehatan
2	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	8,92	8,95	8,97	9,00	9,02	9,02	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
3	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,48	13,52	13,54	13,56	13,59	13,59	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
4	Nilai Rata-Rata Ujian Sekolah	Angka	65,20	66,50	67,00	68,00	68,50	68,50	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
5	Persentase Cabang Olahraga yang dibina	Persen	3,87	6,38	8,51	8,51	12,77	12,77	Dinas Pemuda dan Olahraga

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal (2021)	Target Capaian				Kondisi Akhir (2026)	Perangkat Daerah Penanggungjawab
				2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	Tingkat Partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan	Persen	1,87	2,75	3,10	3,40	3,85	3,85	Dinas Pemuda dan Olahraga
7	Persentase budaya lokal yang dilestarikan	Persen	2	3	4	4	5	5	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
8	Angka Kelahiran Total (TFR)	Angka	2,09	2,08	2,07	2,06	2,06	2,09	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
9	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian dan Perikanan	Persen	1,12	1,56	1,86	2,05	2,33	2,33	Dinas Pertanian
									Dinas Perikanan
10	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	43	55	60	68	72	72	Dinas Ketahanan Pangan
11	Persentase Pertumbuhan PDRB sektor perindustrian	Persen	1,98	2,34	2,66	3,03	3,47	3,47	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal (2021)	Target Capaian				Kondisi Akhir (2026)	Perangkat Daerah Penanggungjawab
				2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	Persentase Pertumbuhan PDRB sektor Perdagangan	Persen	2,21	3,26	3,91	4,56	5,20	5,20	Kerja
13	Persentase Pertumbuhan PDRB sektor Pariwisata	Persen	1,97	2,52	2,87	3,27	3,74	3,74	Dinas Pariwisata
14	Pertumbuhan Realisasi penanaman modal dalam negeri (PMDN)	Persen	0,92	1,5	2,3	3	3,5	3,5	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
15	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	5,65	4,34	3,88	3,43	2,97	2,97	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja
16	Persentase koperasi yang meningkat SHU-nya	Persen	4,37	5,47	5,95	6,42	6,90	6,90	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
17	Persentase Pertumbuhan UMKM	Persen	0,7	1	1,2	1,6	2	2	
18	Persentase Cakupan Infrastruktur Pelayanan	Persen	64,37	78,12	79,26	80,39	81,53	81,53	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal (2021)	Target Capaian				Kondisi Akhir (2026)	Perangkat Daerah Penanggungjawab
				2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Dasar								Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
19	Cakupan infrastruktur yang mendukung pengembangan ekonomi dalam kondisi mantap/dalam kondisi baik	Indeks	49,73	60,89	64,69	68,50	72,31	72,31	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
									Dinas Perhubungan
20	Indeks Kinerja Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Indeks	48,33	62,83	66,96	71,08	75,21	75,21	Dinas Perhubungan
21	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	Persen	61	65	69	72,5	75	75	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
									Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
22	Indeks Kualitas Air (IKA)	Indeks	55,56	56,09	56,17	56,25	56,33	56,33	Dinas Lingkungan Hidup
23	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Indeks	93,33	93,73	93,93	94,13	94,33	94,33	Dinas Lingkungan Hidup

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal (2021)	Target Capaian				Kondisi Akhir (2026)	Perangkat Daerah Penanggungjawab
				2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24	Indeks Kualitas Lahan	Indeks	87,85	87,85	87,85	87,85	87,85	87,85	Dinas Lingkungan Hidup
									Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
25	Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial	Persen	0,91	1,44	1,58	1,71	1,83	1,83	Dinas Sosial
									Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
26	Indeks Kapasitas (Komponen IRBI)	Indeks	79	83	85	86	87	87	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
									Dinas Sosial
27	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	Persen	59,47	64,77	66,78	68,78	70,79	70,79	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
28	Persentase kekerasan terhadap perempuan	Persen	0,0207	0,0195	0,0188	0,0182	0,0143	0,0143	
29	Persentase Kekerasan terhadap Anak	Persen	0,0043	0,0038	0,0031	0,0023	0,0016	0,0016	

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal (2021)	Target Capaian				Kondisi Akhir (2026)	Perangkat Daerah Penanggungjawab
				2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30	Opini BPK	Predikat	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
									Inspektorat Daerah
31	Nilai SAKIP	Predikat	CC	B	B	A	A	A	Sekretariat Daerah
									Badan Perencanaan
									Dinas Komunikasi dan Informatika
32	Status kinerja Penyelenggaraan pemerintahan daerah	Predikat	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sekretariat Daerah
									Sekretariat DPRD
									Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
									Badan Penelitian dan Pengembangan
33	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	-	77,5	80,5	85,75	87	87	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal (2021)	Target Capaian				Kondisi Akhir (2026)	Perangkat Daerah Penanggungjawab
				2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									Dinas Kesehatan
									Rumah Sakit Umum Daerah Piru
									Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran
									Dinas Kepndudukan dan Pencatatan Sipil
									Dinas Komunikasi dan Informatika
									Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
									Dinas Kearsipan
									Sekretariat Daerah
									Kantor Camat
34	Predikat SPBE (Sistem	Predikat	Kurang	Cukup	Baik	Baik	Sangat	Sangat	Dinas Komunikasi dan

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal (2021)	Target Capaian				Kondisi Akhir (2026)	Perangkat Daerah Penanggungjawab
				2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pemerintahan Berbasis Elektronik)						Baik	Baik	Informatika
35	Persentase Penurunan Status Desa dari Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal	Persen	19,57	3,26	0,00	0,00	0,00	0,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
36	Persentase konflik sosial yang ditangani	Persen	100	100	100	100	100	100	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
37	Persentase Penangan Kasus K3	Persen	100	100	100	100	100	100	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran

8.3. INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (IKK)

Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan ukuran capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. IKK ini diambil dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Adapun IKK Kabupaten Seram Bagian Barat yang ditetapkan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 8.3 Penetapan Indikator Kinerja Menurut Bidang Urusan Penyelenggaraan Tingkat Sasaran (Dampak/Impact)
Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2023-2026

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Tahun Ke				Kondisi Akhir
				2023	2024	2025	2026	
Aspek Kesejahteraan Masyarakat								
1	Pertumbuhan PDRB	Persen	3.40	5.44	5.79	6.15	6.50	6.50
2	Pdrb Per Kapita	Juta Rupiah	9.553	10.141	10.406	10.671	10.936	10.936
3	Persentase Penduduk Diatas Garis Kemiskinan	Persen	74.73	75.05	75.15	75.24	75.34	75.34
4	Indeks PembangunanManusia (IPM)	Angka	65.83	66.32	66.67	67.01	67.36	67.36
5	Angka Melek Huruf	Persen	99,88	99,88	99,88	99,88	99,88	99,88
6	Angka Rata-Rata LamaSekolah	Tahun	8,45	8.46	8.47	8.48	8.49	8.49
7	Angka Usia Harapan Hidup	Tahun	61.85	62.34	62.57	62.80	63.03	63.03
8	Presentase Balita GiziKurang	Persen		10	8	7	5	5
9	Angka PartisipasiAngkatan Kerja	persen	56.67	62.38	64.91	67.45	69.98	69.98
10	Tingkat PartisipasiAngkatan Kerja	Persen	72,20	75.05	76.21	77.38	78.54	78.54
11	Tingkat Pengangguran	Persen	5.65	77.5	80.5	85.75	87	87
12	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	-	77.50	80.50	85.75	87.00	87.00
13	Persentase PAD Terhadap Pendapatan	Persen	3.68	4.11	4.47	4.87	5.31	5.31
14	Opini BPK	Predikat	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
15	Persentase CadanganPangan	Persen	62,31	65	70	75	80	80

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Tahun Ke				Kondisi Akhir
				2023	2024	2025	2026	
16	Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebuna Terhadap PDRB	Persen	27.07%	27.65%	27.91%	28.18%	28.44%	28.44%
17	Produksi Sektor Pertanian	Ton/ha	34.169	35.169	36.257	36.346	37.462	37.462
18	Produksi Sektor Perkebunan	Ton	26.150	27.247	27.789	28.869	29.150	29.150
19	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB	Persen	1.97%	2.52%	2.87%	3.27%	3.74%	3.74%
20	Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	Persen	2.21%	3.26%	3.91%	4.56%	5.20%	5.20%
21	Kontribusi Perikanan Terhadap PDRB	Persen	8.69%	8.93%	9.02%	9.10%	9.19%	9.19%
22	Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB	Persen	1.98%	2.34%	2.66%	3.03%	3.47%	3.47%
Aspek Kesejahteraan Masyarakat								
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita	Rupiah per kapita	861.616	1.021.806	1.093.210	1.164.613	1.236.016	1.236.016
2	Nilai Tukar Petani	Angka	101,03	101,15	101,21	101,36	101,45	101,45
3	Persentase Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Perkapita	Rupiah per kapita	48.29	48.69	49.61	50.54	51.46	51.46
5	Persentase Desa Berstatus Swasembada Terhadap Total Desa	Persen	30%	40%	45%	50%	56%	56%
6	Rasio Pinjaman Terhadap Simpanan Di Bank Umum	Persen	20	20	20	20	20	20

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Tahun Ke				Kondisi Akhir
				2023	2024	2025	2026	
8	Angka Kriminalitas Yang Tertangani	Persen	100	100	100	100	100	100

**Tabel 8.4 Penetapan Indikator Kinerja Menurut Bidang Urusan Penyelenggaraan Tingkat Outcome
Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2023-2026**

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Tahun Ke				Kondisi Akhir
				2023	2024	2025	2026	
Aspek Pelayanan Umum								
A.	Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar							
1.	Bidang Urusan Pendidikan							
1.1	Tingkat Partisipasi Warga Usia 4-6 Tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	Persen	32,01	45	60	75	90	90
1.2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Persen	67,09	75	81	88	96	96
1.3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	Persen	55,38	65	75	85	95	95

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Tahun Ke				Kondisi Akhir
				2023	2024	2025	2026	
2.	Bidang Urusan Kesehatan							
2.1	Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk	Persen	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
2.2	Persentase RS kabupaten yang terakreditasi	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.3	Persentase ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibuhamil (SPM)	Persen	93,20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.4	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan (SPM)	Persen	99,70	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir (SPM)	Persen	98,70	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standard (SPM)	Persen	88,60	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3.	Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang							
3.1	Rasio luas kawasan permukiman rawanbanjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir	Persen	-	37,50	50,00	62,50	75,00	75,00
3.2	Rasio luas daerah irigasi kewenangan yang	Persen	61,00	61,53	61,91	62,29	62,67	62,67

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Tahun Ke				Kondisi Akhir
				2023	2024	2025	2026	
	dilayani oleh jaringan irigasi							
3.3	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga	Persen	90,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3.4	Rasio kepatuhan IMB	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3.5	Tingkat Kemantapan Jalan	Persen	82,52	82,92	83,12	83,32	83,52	83,52
3.6	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4	Bidang Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman							
4.1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana (SPM)	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4.2	Berkurangnya jumlah unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Persen	11,99	11,06	10,59	10,12	9,65	9,65
4.3	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)	Persen	20,00	40,00	60,00	80,00	100,00	100,00

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Tahun Ke				Kondisi Akhir
				2023	2024	2025	2026	
5	Bidang Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat							
5.1	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5.2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	00,00	100,00
5.3	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5.4	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korbankebakaran	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6	Bidang Urusan Sosial							
6.1	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6.2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Tahun Ke				Kondisi Akhir
				2023	2024	2025	2026	
	saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah							
B	Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar							
1	Bidang Urusan Tenaga Kerja							
1.1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan mengacu ke rencana tenaga kerja	Persen	33,33	52,63	52,63	52,63	52,63	52,63
1.2	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	Persen	1,01	2,30	3,46	4,61	5,76	5,76
2.	Bidang Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak							
2.2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	Persen	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Persen	0,09	0,08	0,08	0,07	0,07	0,072
3.	Bidang Urusan Pangan							
3.1	Persentase ketersediaan pangan sesuai kebutuhan	Persen	62,31	65	70	75	80	80

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Tahun Ke				Kondisi Akhir
				2023	2024	2025	2026	
4	Bidang Urusan Pertanahan							
4.1	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4.5	Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5	Bidang Urusan Lingkungan Hidup							
5.1	Persentase Jumlah Sampah yang Tertangani	Persen	40	50	60	70	80	80
6	Bidang Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil							
6.1	Perekaman KTP Elektronik	Persen	99,69	99,70	99,70	99,70	99,70	99,70
6.2	Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	Persen	27,92	40,00	45,00	50,00	60,00	60,00
6.3	Kepemilikan Akta Kelahiran	Persen	66,40	67,00	67,48	67,90	68,00	68,00
6.4	Jumlah PD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	Jumlah	24,52	35,00	40,00	45,00	50,00	50,00
7	Bidang Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa							
7.1	Jumlah Desa dalam kategori Tertinggal dan	Jumlah	18	10	4	0	0	0

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Tahun Ke				Kondisi Akhir
				2023	2024	2025	2026	
	Sangat Tertinggal							
8	Bidang Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana							
8.1	Persentase pemakaian kontrasepsi modern	Persen		70,50	71,00	71,50	72,00	72,00
8.2	Persentase peserta KB aktif MKJP	Persen	71,20	71,32	71,38	71,44	71,50	71,5
8.3	Persentase pelayanan KB pasca persalinan	Persen		72,60	73,20	73,80	74,40	74,4
9.	Bidang Urusan Perhubungan							
9.1	Rasio konektivitas	Rasio	0,36	0,39	0,39	0,40	0,40	0,40
9.2	Kinerja lalu lintas	Rasio	0,41	0,40	0,40	0,39	0,39	0,39
10	Bidang Urusan Komunikasi dan Informatika							
10.1	Persentase PD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh DINAS Kominfo	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10.2	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10.3	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi public	Persen	56,18	65,00	70,00	75,00	80,00	80,00
11	Bidang Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah							

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Tahun Ke				Kondisi Akhir
				2023	2024	2025	2026	
11.1	Persentase peningkatan koperasi yang berkualitas	Persen	65,64	66,32	66,55	66,78	67,01	67,01
12	Bidang Urusan Penanaman Modal							
12.1	Persentase peningkatan investasi	Persen	4,55	4,56	4,57	4,58	4,60	4,60
13	Bidang Urusan Kepemudaan dan Olahraga							
13.1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomimandiri	Persen	1,02	1,03	1,04	1,05	1,06	1,06
13.2	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Persen	4,68	5,68	6,18	6,68	7,18	7,18
14	Bidang Urusan Statistik							
14.1	Persentase PD yang menggunakan data statistik dalam Menyusun perencanaan pembangunan daerah	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
14.2	Persentase PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Tahun Ke				Kondisi Akhir
				2023	2024	2025	2026	
15	Bidang Urusan Persandian							
15.1	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16	Bidang Urusan Perpustakaan							
16.5	Persentase perpustakaan sesuai standar Nasional perpustakaan	Persen	1,03	3,66	4,81	5,95	7,09	7,09
16.4	Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	Persen		0,91	1,08	1,26	1,43	1,43
17	Bidang Urusan Kearsipan							
17.1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja	Persen	76,00	77,00	77,50	78,00	78,50	78,50
17.2	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara	Persen	57,00	58,00	58,50	59,00	59,50	59,5
18	Bidang Urusan Kebudayaan							
18.1	Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	Jumlah	2	3	4	4	5	5
C	Urusan Pemerintahan Pilihan							
19	Bidang Urusan Pertanian							

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Tahun Ke				Kondisi Akhir
				2023	2024	2025	2026	
19.1	Produktivitas Pertanian per Tahun	Ton	34.169	35.169	36.257	36.346	37.462	37.462
19.2	Produktivitas Perkebunan per Tahun	Ton	26.150	27.247	27.789	28.869	29.150	29.150
20	Bidang Urusan Pariwisata							
20.1	Jumlah Objek Pariwisata Andalan	Jumlah	3	4	5	6	8	8
20.2	Peningkatan Penyelenggaraan Promosi dan Pameran	Jumlah	1	2	2	3	4	4
21	Bidang Urusan Kelautan dan Perikanan							
21.1	Produktivitas Perikanan	Ton	31.904	35.850	37.685	39.875	42.540	42.540
22	Bidang Urusan Perdagangan							
22.1	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh izin sesuai Ketentuan	Persen	19,73	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
22.2	Persentase Alat-Alat Ukur Takar, Timbang dan Perlengkapannya bertanda sah yang berlaku	Persen	51,82	55,00	60,00	65,00	70,00	70,00
23	Bidang Urusan Perindustrian							
23.1	Cakupan Bina Kelompok Pengrajin	Persen	40	52	65	72	82	82
D	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan							
1	Bidang Urusan Perencanaan							

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Tahun Ke				Kondisi Akhir
				2023	2024	2025	2026	
1.1	Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang Telah ditetapkan dengan PERDA	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
1.2	Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang Telah ditetapkan dengan PERDA	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
1.3	Tersedianya Dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
1.4	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	Persen	100	100	100	100	100	100
1.5	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	Persen	100	100	100	100	100	100
2	Bidang Urusan Keuangan							
2.1	Persentase SILPA terhadap APBD	Persen	5,9	5	4,5	4	3	3
2.2	Persentase Program yang tidak terlaksana	Persen	0,1	0	0	0	0	0
2.2	Penetapan APBD	Waktu	Tidak Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
3	Bidang Urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan							
3.1	Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan	Persen	0.07	0,08	0,09	0,1	0,15	0,15

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Tahun Ke				Kondisi Akhir
				2023	2024	2025	2026	
	dan Pelatihan Formal							
3.2	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti Pendidikan dan pelatihan struktural	Persen	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09	0,09
4	Bidang Urusan Penelitian dan Pengembangan							
4.1	Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan	Persen	100	100	100	100	100	100
4.2	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan	Persen	67	75	81	88	100	100
4.3	Persentase Kebijakan Inovasi yang diterapkan di Daerah	Persen	48	55	65	75	90	90
5.	Bidang Urusan Pengawasan							
5.1	Persentase Tindak Lanjut Temuan	Persen	80	88.57	91.43	94.44	100.00	100.00
5.2	Jumlah Temuan BPK	Jumlah	29	15	13	10	5	5
6.	Bidang Urusan Sekretariat DPRD							
6.1	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada Setiap Alat-Alat Kelengkapan DPRD	Ada / Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

BAB IX

PENUTUP

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 disusun untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan rencana pembangunan 4 (empat) Tahun kedepan memperhatikan Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2018-2022 yang akan segera berakhir diakhir tahun 2022 mendatang. Selanjutnya RPD ini akan menjadi pedoman dan arah bersama bagi seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Seram Bagian Barat.

Implementasi RPD Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2023-2026 diperlukan komitmen bersama untuk dilaksanakan secara konsisten berdasarkan kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat berkewajiban menyusun Rencana Strategis (Renstra PD) Tahun 2023-2026 yang memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan indikasi kegiatan pembangunan sesuai tugas dan fungsinya masing-masing, dengan berpedoman pada RPD Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2023-2026, yang selanjutnya sebagai acuan menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah;
2. Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah serta masyarakat, termasuk dunia usaha, dalam melaksanakan pembangunan agar mengacu pada RPD Tahun 2023-2026 ini dengan sebaik-baiknya;
3. Penyusunan RKPD berpedoman pada RPD yang selanjutnya sebagai acuan dalam penyusunan KUA-PPAS dan penyusunan Rancangan APBD Tahun 2023, 2024, 2025 dan 2026;
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPD Tahun 2023-2026, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPD Tahun 2023-2026, sebagai berikut :
 - a. Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dilakukan oleh masing-masing Pimpinan Perangkat Daerah;
 - b. Kepala Badan Perencanaan Kabupaten Seram Bagian Barat menghimpun dan menganalisis hasil pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing Pimpinan Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya;
 - c. Kepala Perangkat Daerah melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan perangkat daerah periode sebelumnya;
 - d. Kepala Badan Perencanaan Kabupaten Seram Bagian Barat menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada huruf (c);

- e. Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf (d) menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya.
5. RPD Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2023-2026 menjadi pedoman bagi pengendalian dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, melalui instrumen berupa rumusan dan target indikator kinerja utama dan indikator kinerja kunci yang termuat didalam tujuan, sasaran, dan program pembangunan;





TAHUN 2022